SALINAN

BUPATI GUNUNG MAS
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

PERATURAN DAERAH KABUPATEN GUNUNG MAS

NOMOR 3 TAHUN 2024

TENTANG

PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI GUNUNG MAS,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 320 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023;

Mengingat :

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Pemerintahan yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya dan Kabupaten Barito Timur di Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4180);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010

Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6847);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6883);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Harmonisasi Kebijakan Fiskal Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6909);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1425);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2017 tentang Pedoman Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban

Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 450);

22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
24. Peraturan Daerah Kabupaten Gunung Mas Nomor 4 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Gunung Mas Tahun 2018 Nomor 253, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Gunung Mas Nomor 253.a) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Gunung Mas Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Gunung Mas Nomor 4 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Gunung Mas Tahun 2021 Nomor 296, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Gunung Mas Nomor 296.a);
25. Peraturan Daerah Kabupaten Gunung Mas Nomor 5 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Gunung Mas Tahun 2020 Nomor 280, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Gunung Mas Nomor 280.a);
26. Peraturan Daerah Kabupaten Gunung Mas Nomor 14 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Gunung Mas Tahun 2021 Nomor 298, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Gunung Mas Nomor 298.a) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Gunung Mas Nomor 8 Tahun 2022 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Gunung Mas Tahun 2022 Nomor 306, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Gunung Mas Nomor 306.a);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN GUNUNG MAS
dan
BUPATI GUNUNG MAS

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2023.

Pasal 1

(1) Pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah berupa laporan keuangan memuat:
   a. laporan realisasi anggaran;
   b. laporan perubahan saldo anggaran lebih;
   c. neraca;
   d. laporan operasional;
   e. laporan arus kas;
   f. laporan perubahan ekuitas; dan
   g. catatan atas laporan keuangan.

(2) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri dengan laporan kinerja dan ikhtisar laporan keuangan badan usaha milik daerah/perusahaan daerah.

Pasal 2

Laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf a tahun anggaran 2023 sebagai berikut:

a.	pendapatan daerah	Rp. 1.176.119.496.936,58	
b.	belanja daerah	Rp. 1.250.220.807.539,09	
c.	surplus/(defisit) (a-b)		Rp. (74.101.310.602,51)
d.	penerimaan pembiayaan	Rp. 135.547.383.201,20	
e.	pengeluaran pembiayaan	Rp. 11.968.000.000,00	
f.	pembiayaan netto (d-e)		Rp. 123.579.383.201,20
g.	sisa lebih/(kurang) pembiayaan anggaran tahun berjalan (SILPA/SIKPA) (c+f)		Rp. 49.478.072.598,69

Pasal 3

Uraian laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 sebagai berikut:

a. selisih anggaran dengan realisasi pendapatan sejumlah Rp34.511.514.225,42 dengan rincian sebagai berikut:

1.	anggaran pendapatan setelah perubahan	Rp. 1.210.631.011.162,00
2.	realisasi	Rp. 1.176.119.496.936,58
	selisih lebih/(kurang) (2-1)	Rp. (34.511.514.225,42)

b. selisih anggaran dengan realisasi belanja sejumlah Rp83.989.586.823,91 dengan rincian sebagai berikut:

1.	anggaran belanja setelah perubahan	Rp. 1.334.210.394.363,00
2.	realisasi	Rp. 1.250.220.807.539,09
	selisih lebih/(kurang) (2-1)	Rp. (83.989.586.823,91)

c. selisih anggaran dengan realisasi surplus/(defisit) sejumlah Rp49.478.072.598,49 dengan rincian sebagai berikut:

1.	anggaran surplus/(defisit) setelah perubahan	Rp. (123.579.383.201,00)
2.	realisasi	Rp. (74.101.310.602,51)
	selisih lebih/(kurang) (2-1)	Rp. 49.478.072.598,49

d. selisih anggaran dengan realisasi penerimaan pembiayaan sejumlah Rp0,20 dengan rincian sebagai berikut:

1.	anggaran penerimaan pembiayaan setelah perubahan	Rp. 135.547.383.201,00

2. realisasi		Rp.	135.547.383.201,20
	selisih lebih/(kurang) (2-1)	Rp.	0,20

e. selisih anggaran dengan realisasi pengeluaran pembiayaan sejumlah Rp0,00 dengan rincian sebagai berikut :

1. anggaran pengeluaran pembiayaan setelah perubahan		Rp.	11.968.000.000,00
2. realisasi		Rp.	11.968.000.000,00
	selisih lebih/(kurang) (2-1)	Rp.	0,00

f. selisih anggaran dengan realisasi pembiayaan netto sejumlah Rp0,20 dengan rincian sebagai berikut :

1. anggaran pembiayaan netto setelah perubahan		Rp.	123.579.383.201,00
2. realisasi		Rp.	123.579.383.201,20
	selisih lebih/(kurang) (2-1)	Rp.	0,20

g. selisih anggaran dengan realisasi sisa lebih/(kurang) pembiayaan anggaran tahun berjalan sejumlah Rp49.478.072.598,69 dengan rincian sebagai berikut :

1. anggaran sisa lebih/(kurang) pembiayaan anggaran tahun berjalan setelah perubahan		Rp.	0,00
2. realisasi		Rp.	49.478.072.598,69
	selisih lebih/(kurang) (2-1)	Rp.	49.478.072.598,69

Pasal 4

Laporan perubahan saldo anggaran lebih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf b per 31 Desember Tahun 2023 sebagai berikut:

a.	saldo Anggaran Lebih Awal	Rp.	135.547.383.201,20	
b.	penggunaan Saldo Anggaran Lebih tahun berkenaan	Rp.	135.547.383.201,20	
	sub total (a-b)		Rp.	0,00
c.	sisa lebih/kurang pembiayaan anggaran (SILPA/SIKPA)	Rp.	49.478.072.598,69	
d.	koreksi kesalahan pembukuan tahun sebelumnya	Rp.	0,00	
e.	lain-lain	Rp.	0,00	
	sub total (c+d+e)		Rp.	49.478.072.598,69
f.	Saldo Anggaran Lebih Akhir (a-b+c+d+e)		Rp.	49.478.072.598,69

Pasal 5

Neraca sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf c per 31 Desember Tahun 2023 sebagai berikut:

a.	jumlah aset	Rp.	2.217.897.818.074,30
b.	jumlah kewajiban	Rp.	3.099.807.731,49
c.	jumlah ekuitas	Rp.	2.214.798.010.342,81

Pasal 6

Laporan operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf d per 31 Desember Tahun 2023 sebagai berikut:

a.	pendapatan daerah – LO	Rp. 1.321.799.231.687,58		
b.	beban daerah	Rp. 1.120.093.206.472,62		
	surplus/(defisit) dari operasi (a-b)		Rp.	201.706.025.214,96
c.	kegiatan non operasional – LO:			
	1. surplus Non Operasional – LO	Rp. 21.689.804.470,00		
	2. defisit Non Operasional – LO	Rp. 25.623.200.295,19		
	surplus/(defisit) dari kegiatan non operasional (1-2)		Rp.	(3.933.395.825,19)
d.	surplus/(defisit) sebelum pos luar biasa (a-b+c.1-c.2)		Rp.	197.772.629.389,77
e.	surplus/(defisit) dari pos luar biasa		Rp.	(212.500.000,00)
f.	surplus/(defisit) – LO (a-b+c.1-c.2+e)		Rp.	197.560.129.389,77

Pasal 7

Laporan arus kas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf e untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember Tahun 2023 sebagai berikut:

a.	saldo kas awal per 1 Januari Tahun 2023	Rp.	135.547.385.243,20
b.	arus kas bersih dari aktivitas operasi	Rp.	201.801.155.628,88
c.	arus kas bersih dari aktivitas investasi	Rp.	(287.870.466.231,39)
d.	arus kas bersih dari aktivitas pendanaan	Rp.	0,00
e.	arus kas bersih dari aktivitas transitoris	Rp.	69.514,00
f.	saldo kas akhir per 31 Desember Tahun 2023 (a+b+c+d+e)	Rp.	49.478.144.154,69

Pasal 8

Laporan perubahan ekuitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf f per 31 Desember Tahun 2023 sebagai berikut:

a.	ekuitas awal	Rp.	2.017.336.123.142,54
b.	surplus/(defisit) – LO	Rp.	197.560.129.389,77
c.	dampak kumulatif perubahan kebijakan/ kesalahan mendasar	Rp.	(98.242.189,50)
d.	ekuitas akhir (a+b+c)	Rp.	2.214.798.010.342,81

Pasal 9

Catatan atas laporan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf g tahun anggaran 2023 memuat informasi baik secara kuantitatif maupun kualitatif atas pos-pos laporan keuangan.

Pasal 10

Pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran

yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, terdiri dari:

a. Lampiran I — Laporan Realisasi Anggaran (LRA);
   1. Lampiran I.1 — Ringkasan LRA menurut urusan pemerintahan daerah dan organisasi;
   2. Lampiran I.2 — Ringkasan APBD yang diklasifikasikan menurut kelompok dan jenis pendapatan, belanja, dan pembiayaan;
   3. Lampiran I.3 — Rincian APBD menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, program, kegiatan, sub kegiatan, kelompok, jenis pendapatan, belanja, dan pembiayaan;
   4. Lampiran I.4 — Rekapitulasi realisasi belanja menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, program, kegiatan dan sub kegiatan;
b. Lampiran II — Laporan perubahan saldo anggaran lebih;
c. Lampiran III — Laporan operasional;
d. Lampiran IV — Laporan perubahan ekuitas;
e. Lampiran V — Neraca;
f. Lampiran VI — Laporan arus kas;
g. Lampiran VII — Catatan atas laporan keuangan;
h. Lampiran VIII — Daftar rekapitulasi piutang daerah;
i. Lampiran IX — Daftar rekapitulasi penyisihan piutang tidak tertagih;
j. Lampiran X — Daftar rekapitulasi dana bergulir dan penyisihan dana bergulir;
k. Lampiran XI — Daftar penyertaan modal (investasi) pemerintah daerah;
l. Lampiran XII — Daftar rekapitulasi realisasi penambahan dan pengurangan aset tetap daerah;
m. Lampiran XIII — Daftar rekapitulasi aset tetap;
n. Lampiran XIV — Daftar rekapitulasi konstruksi dalam pekerjaan;
o. Lampiran XV — Daftar rekapitulasi aset lainnya;
p. Lampiran XVI — Daftar dana cadangan daerah;
q. Lampiran XVII — Daftar kewajiban jangka pendek;
r. Lampiran XVIII — Daftar kewajiban jangka panjang;
s. Lampiran XIX — Daftar kegiatan/sub kegiatan yang belum diselesaikan sampai akhir tahun anggaran 2023 dan dianggarkan kembali dalam anggaran tahun berikutnya;
t. Lampiran XX — Ikhtisar laporan keuangan Badan Usaha Milik Daerah/Perusahaan Daerah;
   1. Lampiran XX.1 — Ikhtisar laporan keuangan (neraca) Badan Usaha Milik Daerah/Perusahaan Daerah;
   2. Lampiran XX.2 — Ikhtisar laporan keuangan (laporan laba/rugi) Badan Usaha Milik Daerah/Perusahaan Daerah.

Pasal 11

Bupati menetapkan Peraturan Bupati tentang penjabaran pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai rincian lebih lanjut dari pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Pasal 12

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Gunung Mas.

Ditetapkan di Kuala Kurun
pada tanggal 19 Agustus 2024

Pj. BUPATI GUNUNG MAS,

ttd

HERSON B. ADEN

Diundangkan di Kuala Kurun
pada tanggal 19 Agustus 2024
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN GUNUNG MAS,

ttd

RICHARD

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN GUNUNG MAS TAHUN 2024 NOMOR
NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN GUNUNG MAS, 323
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH: 03,47/2024

Salinan Sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

ERDISITO, SH
Pembina Tk. I (IV/b)
NIP. 19700617 200501 1 007

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN GUNUNG MAS
NOMOR 3 TAHUN 2024

TENTANG

PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2023

I. UMUM

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah merupakan dasar pengelolaan keuangan daerah pada tahun anggaran berkenaan dalam rangka penyelenggaraan fungsi pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat untuk mencapai tujuan bernegara sebagaimana diamanatkan dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Sebagai dasar pengelolaan keuangan Daerah, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah meliputi masa 1 (satu) tahun anggaran yakni mulai 1 Januari sampai dengan 31 Desember tahun berkenaan.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Gunung Mas Tahun Anggaran 2023 ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Gunung Mas Nomor 14 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 dan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Gunung Mas Nomor 8 Tahun 2022 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022. Setelah berakhirnya Tahun Anggaran 2023, maka pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 harus dipertanggungjawabkan sesuai ketentuan yang berlaku.

Berdasarkan ketentuan Pasal 31 ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan Pasal 320 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang dan Pasal 194 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, disebutkan bahwa pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dimaksud dilakukan dalam bentuk penyampaian laporan keuangan oleh Kepala Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah berupa laporan keuangan yang telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun anggaran berakhir.

Laporan keuangan yang tercantum dalam Peraturan Daerah ini disusun dan disajikan berdasarkan hasil pemeriksaan BPK-RI Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Pemeriksaan nomor: 41.A/LHP/XIX.PAL/05/2023 tanggal 8 Mei 2023 dengan opini Wajar Tanpa Pengecualiaan (WTP).

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1
Cukup jelas.

Pasal 2
Cukup jelas.

Pasal 3
Cukup jelas.

Pasal 4
Cukup jelas.

Pasal 5
Cukup jelas.

Pasal 6
Cukup jelas.

Pasal 7
Cukup jelas.

Pasal 8
Cukup jelas.

Pasal 9
Cukup jelas.

Pasal 10
Cukup jelas.

Pasal 11
Cukup jelas.

Pasal 12
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN GUNUNG MAS TAHUN 2024 NOMOR 323.a

LAMPIRAN I
PERATURAN BUPATI DAERAH KABUPATEN GUNUNG MAS
NOMOR 3 TAHUN 2024
TENTANG
PERTANGGUNG JAWABAN PELAKSANAAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2023

PEMERINTAH KABUPATEN GUNUNG MAS

LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN

31 DESEMBER 2023 DAN 2022

CaLK	URAIAN	ANGGARAN TAHUN 2023 (Rp)	REALISASI TAHUN 2023 (Rp)	(%)	REALISASI TAHUN 2022 (Rp)
5.1.1	***PENDAPATAN DAERAH***				
5.1.1.1	***PENDAPATAN ASLI DAERAH***				
5.1.1.1.1	Pajak Daerah	49.230.000.000,00	11.888.728.187,00	24,15	30.932.700.270,00
5.1.1.1.2	Retribusi Daerah	4.828.080.000,00	5.824.282.265,20	120,63	4.507.497.060,00
5.1.1.1.3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	24.000.000,00	81.147.428,96	338,11	12.683.801.108,00
5.1.1.1.4	Lain-lain PAD yang Sah	20.250.416.530,00	18.198.092.951,42	89,87	30.093.074.831,86
	Jumlah Pendapatan Asli Daerah	***74.332.496.530,00***	***35.992.250.832,58***	***48,42***	***78.217.073.269,86***
5.1.1.2	***PENDAPATAN TRANSFER***				
5.1.1.2.1	***PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT***				
5.1.1.2.1.1	*Dana Perimbangan*	*969.050.672.000,00*	*967.710.343.580,00*	*99,86*	*862.410.247.437,00*
5.1.1.2.1.1.1	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil (DBH)	248.332.186.000,00	258.566.474.235,00	104,12	161.543.797.120,00
5.1.1.2.1.1.2	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum (DAU)	529.366.223.000,00	529.272.767.216,00	99,98	508.244.449.070,00
5.1.1.2.1.1.3	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik	73.996.025.000,00	72.770.345.330,00	98,34	97.735.626.106,00
5.1.1.2.1.1.4	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik	117.356.238.000,00	107.100.756.799,00	91,26	94.886.375.141,00
5.1.1.2.1.2	Dana Insentif Daerah (DID)	9.487.123.000,00	15.456.199.000,00	162,92	3.821.039.000,00
5.1.1.2.1.3	Dana Desa	95.278.770.000,00	95.043.161.190,00	99,75	90.215.183.720,00
	Jumlah Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	***1.073.816.565.000,00***	***1.078.209.703.770,00***	***100,41***	***956.446.470.157,00***
5.1.1.2.2	***PENDAPATAN TRANSFER ANTAR DAERAH***				
5.1.1.2.2.1	Pendapatan Bagi Hasil	58.733.909.632,00	57.314.887.058,00	97,58	47.965.994.871,64
	Jumlah Pendapatan Transfer Antar Daerah	***58.733.909.632,00***	***57.314.887.058,00***	***97,58***	***47.965.994.871,64***
	Total Pendapatan Transfer	***1.132.550.474.632,00***	***1.135.524.590.828,00***	***100,26***	***1.004.412.465.028,64***
5.1.1.3	***LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH***				
5.1.1.3.1	Pendapatan Hibah	0,00	0,00	0,00	5.662.000,00
5.1.1.3.2	Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	3.748.040.000,00	4.602.655.276,00	122,80	1.483.904.656,00
	Jumlah Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah	***3.748.040.000,00***	***4.602.655.276,00***	***122,80***	***1.489.566.656,00***
	JUMLAH PENDAPATAN DAERAH	***1.210.631.011.162,00***	***1.176.119.496.936,58***	***97,15***	***1.084.119.104.954,50***
5.1.2	***BELANJA DAERAH***				
5.1.2.1	***BELANJA OPERASI***				
5.1.2.1.1	Belanja Pegawai	438.640.414.118,00	412.033.313.157,00	93,93	382.850.310.978,00
5.1.2.1.2	Belanja Barang dan Jasa	359.545.950.279,00	335.529.741.026,70	93,32	254.015.538.421,61
5.1.2.1.3	Belanja Subsidi	100.000.000,00	0,00	0,00	0,00
5.1.2.1.4	Belanja Hibah	51.112.378.628,00	48.514.563.352,00	94,92	15.018.602.059,00
5.1.2.1.5	Belanja Bantuan Sosial	204.065.800,00	203.500.000,00	99,72	863.805.000,00
	Jumlah Belanja Operasi	***849.602.808.825,00***	***796.281.117.535,70***	***93,72***	***652.748.256.458,61***

LAMPIRAN I
PERATURAN BUPATI DAERAH KABUPATEN GUNUNG MAS
NOMOR 3 TAHUN 2024
TENTANG
PERTANGGUNG JAWABAN PELAKSANAAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2023

CaLK	URAIAN	ANGGARAN TAHUN 2023 (Rp)	REALISASI TAHUN 2023 (Rp)	(%)	REALISASI TAHUN 2022 (Rp)
5.1.2.2	***BELANJA MODAL***				
5.1.2.2.1	Belanja Modal Tanah	362.592.000,00	359.717.000,00	99,21	549.000.000,00
5.1.2.2.2	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	42.778.000.957,00	41.300.725.933,00	96,55	46.253.480.479,21
5.1.2.2.3	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	63.436.569.863,00	62.575.674.211,00	98,64	65.821.245.635,27
5.1.2.2.4	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	183.316.396.869,00	169.522.427.528,39	92,48	125.824.467.024,00
5.1.2.2.5	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	1.208.388.328,00	1.665.999.253,00	137,87	813.030.274,00
5.1.2.2.6	Belanja Aset Lainnya	728.346.591,00	705.055.106,00	96,80	377.839.800,00
	Jumlah Belanja Modal	***291.830.294.608,00***	***276.129.599.031,39***	***94,62***	***239.639.063.212,48***
5.1.2.3	***BELANJA TIDAK TERDUGA***				
5.1.2.3.1	Belanja Tidak Terduga	9.580.000.000,00	212.500.000,00	2,22	219.933.860,00
	Jumlah Belanja Tidak Terduga	***9.580.000.000,00***	***212.500.000,00***	***2,22***	***219.933.860,00***
5.1.2.4	***BELANJA TRANSFER***				
5.1.2.4.1	Belanja Bagi Hasil	10.655.216.000,00	5.391.902.399,00	50,60	0,00
5.1.2.4.2	Belanja Bantuan Keuangan	172.542.074.930,00	172.205.688.573,00	99,81	150.741.580.077,00
	Jumlah Belanja Transfer	***183.197.290.930,00***	***177.597.590.972,00***	***96,94***	***150.741.580.077,00***
	JUMLAH BELANJA DAERAH	***1.334.210.394.363,00***	***1.250.220.807.539,09***	***93,70***	***1.043.348.833.608,09***
	SURPLUS/ DEFISIT	***(123.579.383.201,00)***	***(74.101.310.602,51)***	***0,00***	***40.770.271.346,41***
5.1.3	***PEMBIAYAAN***				
5.1.3.1	***PENERIMAAN PEMBIAYAAN***				
5.1.3.1.1	***Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya***	135.547.383.201,00	135.547.383.201,20	100,00	105.127.111.854,79
	Jumlah Penerimaan Pembiayaan	***135.547.383.201,00***	***135.547.383.201,20***	***100,00***	***105.127.111.854,79***
5.1.3.2	***PENGELUARAN PEMBIAYAAN***				
5.1.3.2.1	***Penyertaan Modal Daerah***	11.968.000.000,00	11.968.000.000,00	100,00	10.350.000.000,00
	Jumlah Pengeluaran Pembiayaan	***11.968.000.000,00***	***11.968.000.000,00***	***100,00***	***10.350.000.000,00***
	PEMBIAYAAN NETTO	***123.579.383.201,00***	***123.579.383.201,20***	***100,00***	***94.777.111.854,79***
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA)	***0,00***	***49.478.072.598,69***	***0,00***	***135.547.383.201,20***

Pj. BUPATI GUNUNG MAS

ttd

HERSON B. ADEN

LAMPIRAN 1.1

PERATURAN DAERAH KABUPATEN GUNUNG MAS
NOMOR 3 TAHUN 2024
TENTANG
PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2023

PEMERINTAH KABUPATEN GUNUNG MAS

RINGKASAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN ORGANISASI

Tahun Anggaran 2023

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)	
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)
4	**PENDAPATAN DAERAH**	1.210.631.011.162,00	1.176.119.496.936,58	(34.511.514.225,42)	97,15
4.1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**	12.527.000.000,00	15.188.405.438,20	2.661.405.438,20	121,25
4.1.01	**PENDIDIKAN**	24.000.000,00	21.000.000,00	(3.000.000,00)	87,50
4.1.01.1-01.2-19.0-00.01	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga	24.000.000,00	21.000.000,00	(3.000.000,00)	87,50
4.1.02	**KESEHATAN**	12.320.000.000,00	14.563.318.083,00	2.243.318.083,00	118,21
4.1.02.1-02.5-02.0-00.01	Dinas Kesehatan	12.320.000.000,00	14.563.318.083,00	2.243.318.083,00	118,21
4.1.03	**PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG**	183.000.000,00	604.087.355,20	421.087.355,20	330,10
4.1.03.1-03.1-04.0-00.01	Dinas Pekerjaan Umum	183.000.000,00	604.087.355,20	421.087.355,20	330,10
4.2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**	1.186.500.000,00	1.006.427.200,00	(180.072.800,00)	84,82
4.2.11	**LINGKUNGAN HIDUP**	676.500.000,00	485.519.000,00	(190.981.000,00)	71,77
4.2.11.2-11.3-28.2-15.01	Dinas Lingkungan Hidup, Kehutanan, dan Perhubungan	676.500.000,00	485.519.000,00	(190.981.000,00)	71,77
4.2.16	**KOMUNIKASI & INFORMATIKA**	205.000.000,00	362.308.200,00	157.308.200,00	176,74
4.2.16.2-16.2-20.2-21.01	Dinas Komunikasi dan Informatika, Statistik dan Persandian	205.000.000,00	362.308.200,00	157.308.200,00	176,74
4.2.17	**KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH**	305.000.000,00	158.600.000,00	(146.400.000,00)	52,00
4.2.17.2-17.2-07.3-32.01	Dinas Transmigrasi, Tenaga Kerja, dan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah	305.000.000,00	158.600.000,00	(146.400.000,00)	52,00
4.3	**URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN**	2.822.580.000,00	2.747.753.000,00	(74.827.000,00)	97,35
4.3.25	**KELAUTAN DAN PERIKANAN**	132.000.000,00	132.309.000,00	309.000,00	100,23
4.3.25.3-25.2-09.0-00.01	Dinas Perikanan dan Ketahanan Pangan	132.000.000,00	132.309.000,00	309.000,00	100,23
4.3.26	**PARIWISATA**	60.000.000,00	17.500.000,00	(42.500.000,00)	29,17
4.3.26.3-26.2-22.0-00.01	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	60.000.000,00	17.500.000,00	(42.500.000,00)	29,17
4.3.27	**PERTANIAN**	1.060.000.000,00	824.720.000,00	(235.280.000,00)	77,80
4.3.27.3-27.0-00.0-00.01	Dinas Pertanian	1.060.000.000,00	824.720.000,00	(235.280.000,00)	77,80
4.3.31	**PERINDUSTRIAN**	1.570.580.000,00	1.773.224.000,00	202.644.000,00	112,90
4.3.31.3-31.3-30.0-00.01	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	1.570.580.000,00	1.773.224.000,00	202.644.000,00	112,90
4.4	**UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN**	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	100,00
4.4.01	**SEKRETARIAT DAERAH**	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	100,00
4.4.01.4-01.2-10.3-29.01	Sekretariat Daerah	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	100,00
4.5	**UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN**	1.194.088.931.162,00	1.157.170.911.298,38	(36.918.019.863,62)	96,91
4.5.01	**PERENCANAAN**	28.000.000,00	43.500.000,00	15.500.000,00	155,36
4.5.01.5-01.1-05.0-00.01	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Penelitian	28.000.000,00	43.500.000,00	15.500.000,00	155,36
4.5.02	**KEUANGAN**	1.194.060.931.162,00	1.157.127.411.298,38	(36.933.519.863,62)	96,91

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)	
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)
4.5.02.5-02.0-00.0-00.01	Badan Keuangan dan Aset Daerah	1.144.660.931.162,00	1.144.909.195.111,38	248.263.949,38	100,02
4.5.02.5-02.0-00.0-00.02	Badan Pendapatan Daerah	49.400.000.000,00	12.218.216.187,00	(37.181.783.813,00)	24,73
5	**BELANJA DAERAH**	1.334.210.394.363,00	1.250.220.807.539,09	(83.989.586.823,91)	93,70
5.1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**	790.437.979.084,00	738.961.329.522,10	(51.476.649.561,90)	93,49
5.1.01	**PENDIDIKAN**	328.916.042.265,00	312.896.551.498,71	(16.019.490.766,29)	95,13
5.1.01.1-01.2-19.0-00.01	**Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga**	328.916.042.265,00	312.896.551.498,71	(16.019.490.766,29)	95,13
5.1.01.1-01.2-19.0-00.01.1	BELANJA OPERASI	286.065.493.175,00	270.484.580.814,71	(15.580.912.360,29)	94,55
5.1.01.1-01.2-19.0-00.01.1.01	Belanja Pegawai	234.711.280.416,00	224.029.573.954,00	(10.681.706.462,00)	95,45
5.1.01.1-01.2-19.0-00.01.1.02	Belanja Barang dan Jasa	44.783.312.829,00	42.256.980.861,71	(2.526.331.967,29)	94,36
5.1.01.1-01.2-19.0-00.01.1.05	Belanja Hibah	6.570.899.930,00	4.198.025.999,00	(2.372.873.931,00)	63,89
5.1.01.1-01.2-19.0-00.01.2	BELANJA MODAL	42.850.549.090,00	42.411.970.684,00	(438.578.406,00)	98,98
5.1.01.1-01.2-19.0-00.01.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	5.895.322.187,00	5.504.475.878,00	(390.846.309,00)	93,37
5.1.01.1-01.2-19.0-00.01.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	36.032.085.125,00	35.526.679.053,00	(505.406.072,00)	98,60
5.1.01.1-01.2-19.0-00.01.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	923.141.778,00	1.380.815.753,00	457.673.975,00	149,58
5.1.02	**KESEHATAN**	191.284.796.178,00	172.325.780.293,00	(18.959.015.885,00)	90,09
5.1.02.1-02.5-02.0-00.01	**Dinas Kesehatan**	191.284.796.178,00	172.325.780.293,00	(18.959.015.885,00)	90,09
5.1.02.1-02.5-02.0-00.01.1	BELANJA OPERASI	169.997.505.555,00	151.775.168.317,00	(18.222.337.238,00)	89,28
5.1.02.1-02.5-02.0-00.01.1.01	Belanja Pegawai	73.984.919.268,00	67.925.604.249,00	(6.059.315.019,00)	91,81
5.1.02.1-02.5-02.0-00.01.1.02	Belanja Barang dan Jasa	95.352.586.287,00	83.189.564.068,00	(12.163.022.219,00)	87,24
5.1.02.1-02.5-02.0-00.01.1.05	Belanja Hibah	660.000.000,00	660.000.000,00	0,00	100,00
5.1.02.1-02.5-02.0-00.01.2	BELANJA MODAL	21.287.290.623,00	20.550.611.976,00	(736.678.647,00)	96,54
5.1.02.1-02.5-02.0-00.01.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	15.251.729.789,00	14.702.193.976,00	(549.535.813,00)	96,40
5.1.02.1-02.5-02.0-00.01.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	6.035.560.834,00	5.848.418.000,00	(187.142.834,00)	96,90
5.1.03	**PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG**	222.476.567.698,00	207.603.270.824,39	(14.873.296.873,61)	93,31
5.1.03.1-03.1-04.0-00.01	**Dinas Pekerjaan Umum**	222.476.567.698,00	207.603.270.824,39	(14.873.296.873,61)	93,31
5.1.03.1-03.1-04.0-00.01.1	BELANJA OPERASI	37.784.687.372,00	36.678.890.746,00	(1.105.796.626,00)	97,07
5.1.03.1-03.1-04.0-00.01.1.01	Belanja Pegawai	6.335.881.439,00	6.137.700.923,00	(198.180.516,00)	96,87
5.1.03.1-03.1-04.0-00.01.1.02	Belanja Barang dan Jasa	31.448.805.933,00	30.541.189.823,00	(907.616.110,00)	97,11
5.1.03.1-03.1-04.0-00.01.2	BELANJA MODAL	184.691.880.326,00	170.924.380.078,39	(13.767.500.247,61)	92,55
5.1.03.1-03.1-04.0-00.01.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	2.044.191.537,00	2.029.478.000,00	(14.713.537,00)	99,28
5.1.03.1-03.1-04.0-00.01.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	4.663.400.000,00	4.638.604.000,00	(24.796.000,00)	99,47
5.1.03.1-03.1-04.0-00.01.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	177.980.403.789,00	164.253.756.588,39	(13.726.647.200,61)	92,29
5.1.03.1-03.1-04.0-00.01.2.06	Belanja Modal Aset Lainnya	3.885.000,00	2.541.490,00	(1.343.510,00)	65,42
5.1.05	**KETENTERAMAN, KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT**	40.125.872.414,00	38.789.100.207,00	(1.336.772.207,00)	96,67
5.1.05.1-05.0-00.0-00.01	**Satuan Polisi Pamong Praja**	9.890.140.188,00	9.254.833.257,00	(635.306.931,00)	93,58
5.1.05.1-05.0-00.0-00.01.1	BELANJA OPERASI	8.851.049.085,00	8.236.597.257,00	(614.451.828,00)	93,06
5.1.05.1-05.0-00.0-00.01.1.01	Belanja Pegawai	3.197.967.272,00	2.894.671.039,00	(303.296.233,00)	90,52
5.1.05.1-05.0-00.0-00.01.1.02	Belanja Barang dan Jasa	5.653.081.813,00	5.341.926.218,00	(311.155.595,00)	94,50
5.1.05.1-05.0-00.0-00.01.2	BELANJA MODAL	1.039.091.103,00	1.018.236.000,00	(20.855.103,00)	97,99
5.1.05.1-05.0-00.0-00.01.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	1.039.091.103,00	1.018.236.000,00	(20.855.103,00)	97,99

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)	
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)
5.1.05.1-05.2-11.0-00.02	**Badan Penanggulangan Bencana Daerah**	7.349.094.171,00	7.131.057.777,00	(218.036.394,00)	97,03
5.1.05.1-05.2-11.0-00.02.1	BELANJA OPERASI	7.243.101.381,00	7.029.147.777,00	(213.953.604,00)	97,05
5.1.05.1-05.2-11.0-00.02.1.01	Belanja Pegawai	1.980.615.063,00	1.881.005.562,00	(99.609.501,00)	94,97
5.1.05.1-05.2-11.0-00.02.1.02	Belanja Barang dan Jasa	5.262.486.318,00	5.148.142.215,00	(114.344.103,00)	97,83
5.1.05.1-05.2-11.0-00.02.2	BELANJA MODAL	105.992.790,00	101.910.000,00	(4.082.790,00)	96,15
5.1.05.1-05.2-11.0-00.02.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	105.992.790,00	101.910.000,00	(4.082.790,00)	96,15
5.1.05.1-05.8-01.0-00.03	**Badan Kesatuan Bangsa dan Politik**	22.886.638.055,00	22.403.209.173,00	(483.428.882,00)	97,89
5.1.05.1-05.8-01.0-00.03.1	BELANJA OPERASI	22.229.814.096,00	21.748.280.373,00	(481.533.723,00)	97,83
5.1.05.1-05.8-01.0-00.03.1.01	Belanja Pegawai	2.647.325.789,00	2.328.497.715,00	(318.828.074,00)	87,96
5.1.05.1-05.8-01.0-00.03.1.02	Belanja Barang dan Jasa	3.339.984.685,00	3.178.092.479,00	(161.892.206,00)	95,15
5.1.05.1-05.8-01.0-00.03.1.05	Belanja Hibah	16.242.503.622,00	16.241.690.179,00	(813.443,00)	99,99
5.1.05.1-05.8-01.0-00.03.2	BELANJA MODAL	656.823.959,00	654.928.800,00	(1.895.159,00)	99,71
5.1.05.1-05.8-01.0-00.03.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	656.823.959,00	654.928.800,00	(1.895.159,00)	99,71
5.1.06	**SOSIAL**	7.634.700.529,00	7.346.626.699,00	(288.073.830,00)	96,23
5.1.06.1-06.0-00.0-00.01	**Dinas Sosial**	7.634.700.529,00	7.346.626.699,00	(288.073.830,00)	96,23
5.1.06.1-06.0-00.0-00.01.1	BELANJA OPERASI	7.371.869.482,00	7.093.240.999,00	(278.628.483,00)	96,22
5.1.06.1-06.0-00.0-00.01.1.01	Belanja Pegawai	2.700.201.256,00	2.578.503.461,00	(121.697.795,00)	95,49
5.1.06.1-06.0-00.0-00.01.1.02	Belanja Barang dan Jasa	4.160.513.226,00	4.003.582.538,00	(156.930.688,00)	96,23
5.1.06.1-06.0-00.0-00.01.1.05	Belanja Hibah	511.155.000,00	511.155.000,00	0,00	100,00
5.1.06.1-06.0-00.0-00.01.2	BELANJA MODAL	262.831.047,00	253.385.700,00	(9.445.347,00)	96,41
5.1.06.1-06.0-00.0-00.01.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	262.831.047,00	253.385.700,00	(9.445.347,00)	96,41
5.2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**	95.274.116.354,00	90.507.872.041,00	(4.766.244.313,00)	95,00
5.2.08	**PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK**	12.134.253.516,00	11.193.434.458,00	(940.819.058,00)	92,25
5.2.08.2-08.2-14.0-00.01	**Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak**	12.134.253.516,00	11.193.434.458,00	(940.819.058,00)	92,25
5.2.08.2-08.2-14.0-00.01.1	BELANJA OPERASI	11.285.747.627,00	10.363.710.458,00	(922.037.169,00)	91,83
5.2.08.2-08.2-14.0-00.01.1.01	Belanja Pegawai	3.634.438.760,00	3.471.510.988,00	(162.927.772,00)	95,52
5.2.08.2-08.2-14.0-00.01.1.02	Belanja Barang dan Jasa	7.126.308.867,00	6.367.199.470,00	(759.109.397,00)	89,35
5.2.08.2-08.2-14.0-00.01.1.05	Belanja Hibah	525.000.000,00	525.000.000,00	0,00	100,00
5.2.08.2-08.2-14.0-00.01.2	BELANJA MODAL	848.505.889,00	829.724.000,00	(18.781.889,00)	97,79
5.2.08.2-08.2-14.0-00.01.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	848.505.889,00	829.724.000,00	(18.781.889,00)	97,79
5.2.11	**LINGKUNGAN HIDUP**	21.768.019.323,00	20.883.626.183,00	(884.393.140,00)	95,94
5.2.11.2-11.3-28.2-15.01	**Dinas Lingkungan Hidup, Kehutanan, dan Perhubungan**	21.768.019.323,00	20.883.626.183,00	(884.393.140,00)	95,94
5.2.11.2-11.3-28.2-15.01.1	BELANJA OPERASI	15.333.556.127,00	14.532.323.065,00	(801.233.062,00)	94,77
5.2.11.2-11.3-28.2-15.01.1.01	Belanja Pegawai	5.106.058.411,00	4.849.174.897,00	(256.883.514,00)	94,97
5.2.11.2-11.3-28.2-15.01.1.02	Belanja Barang dan Jasa	10.227.497.716,00	9.683.148.168,00	(544.349.548,00)	94,68
5.2.11.2-11.3-28.2-15.01.2	BELANJA MODAL	6.434.463.196,00	6.351.303.118,00	(83.160.078,00)	98,71
5.2.11.2-11.3-28.2-15.01.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	908.712.600,00	908.234.020,00	(478.580,00)	99,95
5.2.11.2-11.3-28.2-15.01.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	4.046.272.000,00	3.996.548.458,00	(49.723.542,00)	98,77
5.2.11.2-11.3-28.2-15.01.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	1.479.478.596,00	1.446.520.640,00	(32.957.956,00)	97,77

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)	
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)
5.2.12	**ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL**	6.824.470.189,00	6.600.251.847,00	(224.218.342,00)	96,71
5.2.12.2-12.0-00.0-00.01	**Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil**	6.824.470.189,00	6.600.251.847,00	(224.218.342,00)	96,71
5.2.12.2-12.0-00.0-00.01.1	BELANJA OPERASI	6.075.450.289,00	5.858.609.647,00	(216.840.642,00)	96,43
5.2.12.2-12.0-00.0-00.01.1.01	Belanja Pegawai	2.455.307.699,00	2.310.873.858,00	(144.433.841,00)	94,12
5.2.12.2-12.0-00.0-00.01.1.02	Belanja Barang dan Jasa	3.620.142.590,00	3.547.735.789,00	(72.406.801,00)	98,00
5.2.12.2-12.0-00.0-00.01.2	BELANJA MODAL	749.019.900,00	741.642.200,00	(7.377.700,00)	99,02
5.2.12.2-12.0-00.0-00.01.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	749.019.900,00	741.642.200,00	(7.377.700,00)	99,02
5.2.13	**PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA**	10.113.718.512,00	9.178.051.335,00	(935.667.177,00)	90,75
5.2.13.2-13.0-00.0-00.01	**Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa**	10.113.718.512,00	9.178.051.335,00	(935.667.177,00)	90,75
5.2.13.2-13.0-00.0-00.01.1	BELANJA OPERASI	9.843.159.342,00	8.941.757.335,00	(901.402.007,00)	90,84
5.2.13.2-13.0-00.0-00.01.1.01	Belanja Pegawai	2.478.398.701,00	2.103.217.667,00	(375.181.034,00)	84,86
5.2.13.2-13.0-00.0-00.01.1.02	Belanja Barang dan Jasa	7.364.760.641,00	6.838.539.668,00	(526.220.973,00)	92,85
5.2.13.2-13.0-00.0-00.01.2	BELANJA MODAL	270.559.170,00	236.294.000,00	(34.265.170,00)	87,34
5.2.13.2-13.0-00.0-00.01.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	270.559.170,00	236.294.000,00	(34.265.170,00)	87,34
5.2.16	**KOMUNIKASI & INFORMATIKA**	11.753.622.591,00	10.993.459.441,00	(760.163.150,00)	93,53
5.2.16.2-16.2-20.2-21.01	**Dinas Komunikasi dan Informatika, Statistik dan Persandian**	11.753.622.591,00	10.993.459.441,00	(760.163.150,00)	93,53
5.2.16.2-16.2-20.2-21.01.1	BELANJA OPERASI	10.981.851.143,00	10.240.543.375,00	(741.307.768,00)	93,25
5.2.16.2-16.2-20.2-21.01.1.01	Belanja Pegawai	3.362.139.993,00	3.221.540.873,00	(140.599.120,00)	95,82
5.2.16.2-16.2-20.2-21.01.1.02	Belanja Barang dan Jasa	7.559.711.150,00	6.959.049.072,00	(600.662.078,00)	92,05
5.2.16.2-16.2-20.2-21.01.1.05	Belanja Hibah	60.000.000,00	59.953.430,00	(46.570,00)	99,92
5.2.16.2-16.2-20.2-21.01.2	BELANJA MODAL	771.771.448,00	752.916.066,00	(18.855.382,00)	97,56
5.2.16.2-16.2-20.2-21.01.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	659.874.857,00	659.662.200,00	(212.657,00)	99,97
5.2.16.2-16.2-20.2-21.01.2.06	Belanja Modal Aset Lainnya	111.896.591,00	93.253.866,00	(18.642.725,00)	83,34
5.2.17	**KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH**	7.566.053.678,00	7.315.465.377,00	(250.588.301,00)	96,69
5.2.17.2-17.2-07.3-32.01	**Dinas Transmigrasi, Tenaga Kerja, dan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah**	7.566.053.678,00	7.315.465.377,00	(250.588.301,00)	96,69
5.2.17.2-17.2-07.3-32.01.1	BELANJA OPERASI	7.084.497.678,00	6.834.111.521,00	(250.386.157,00)	96,47
5.2.17.2-17.2-07.3-32.01.1.01	Belanja Pegawai	3.569.672.810,00	3.380.132.587,00	(189.540.223,00)	94,69
5.2.17.2-17.2-07.3-32.01.1.02	Belanja Barang dan Jasa	3.514.824.868,00	3.453.978.934,00	(60.845.934,00)	98,27
5.2.17.2-17.2-07.3-32.01.2	BELANJA MODAL	481.556.000,00	481.353.856,00	(202.144,00)	99,96
5.2.17.2-17.2-07.3-32.01.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	481.556.000,00	481.353.856,00	(202.144,00)	99,96
5.2.18	**PENANAMAN MODAL**	5.740.999.778,00	5.360.276.175,00	(380.723.603,00)	93,37
5.2.18.2-18.0-00.0-00.01	**Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu**	5.740.999.778,00	5.360.276.175,00	(380.723.603,00)	93,37
5.2.18.2-18.0-00.0-00.01.1	BELANJA OPERASI	5.081.576.948,00	4.714.816.675,00	(366.760.273,00)	92,78
5.2.18.2-18.0-00.0-00.01.1.01	Belanja Pegawai	2.349.640.295,00	2.166.781.798,00	(182.858.497,00)	92,22
5.2.18.2-18.0-00.0-00.01.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.731.936.653,00	2.548.034.877,00	(183.901.776,00)	93,27
5.2.18.2-18.0-00.0-00.01.2	BELANJA MODAL	659.422.830,00	645.459.500,00	(13.963.330,00)	97,88
5.2.18.2-18.0-00.0-00.01.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	659.422.830,00	645.459.500,00	(13.963.330,00)	97,88
5.2.23	**PERPUSTAKAAN**	19.372.978.767,00	18.983.307.225,00	(389.671.542,00)	97,99
5.2.23.2-23.2-24.0-00.01	**Dinas Perpustakaan dan Kearsipan**	19.372.978.767,00	18.983.307.225,00	(389.671.542,00)	97,99
5.2.23.2-23.2-24.0-00.01.1	BELANJA OPERASI	6.501.738.710,00	6.225.266.634,00	(276.472.076,00)	95,75

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)	
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)
5.2.23.2-23.2-24.0-00.01.1.01	Belanja Pegawai	2.938.619.483,00	2.749.779.339,00	(188.840.144,00)	93,57
5.2.23.2-23.2-24.0-00.01.1.02	Belanja Barang dan Jasa	3.563.119.227,00	3.475.487.295,00	(87.631.932,00)	97,54
5.2.23.2-23.2-24.0-00.01.2	BELANJA MODAL	12.871.240.057,00	12.758.040.591,00	(113.199.466,00)	99,12
5.2.23.2-23.2-24.0-00.01.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	1.004.190.795,00	993.836.491,00	(10.354.304,00)	98,97
5.2.23.2-23.2-24.0-00.01.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	9.999.191.512,00	9.919.163.600,00	(80.027.912,00)	99,20
5.2.23.2-23.2-24.0-00.01.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	1.668.357.750,00	1.645.600.000,00	(22.757.750,00)	98,64
5.2.23.2-23.2-24.0-00.01.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	199.500.000,00	199.440.500,00	(59.500,00)	99,97
5.3	**URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN**	58.578.779.250,00	56.459.793.420,95	(2.118.985.829,05)	96,38
5.3.25	**KELAUTAN DAN PERIKANAN**	9.132.587.460,00	8.781.947.278,95	(350.640.181,05)	96,16
5.3.25.3-25.2-09.0-00.01	**Dinas Perikanan dan Ketahanan Pangan**	9.132.587.460,00	8.781.947.278,95	(350.640.181,05)	96,16
5.3.25.3-25.2-09.0-00.01.1	BELANJA OPERASI	8.612.510.704,00	8.273.625.528,95	(338.885.175,05)	96,07
5.3.25.3-25.2-09.0-00.01.1.01	Belanja Pegawai	3.527.422.669,00	3.398.515.642,00	(128.907.027,00)	96,35
5.3.25.3-25.2-09.0-00.01.1.02	Belanja Barang dan Jasa	5.085.088.035,00	4.875.109.886,95	(209.978.148,05)	95,87
5.3.25.3-25.2-09.0-00.01.2	BELANJA MODAL	520.076.756,00	508.321.750,00	(11.755.006,00)	97,74
5.3.25.3-25.2-09.0-00.01.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	162.194.765,00	151.631.500,00	(10.563.265,00)	93,49
5.3.25.3-25.2-09.0-00.01.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	38.894.400,00	38.845.000,00	(49.400,00)	99,87
5.3.25.3-25.2-09.0-00.01.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	318.987.591,00	317.845.250,00	(1.142.341,00)	99,64
5.3.26	**PARIWISATA**	11.019.014.567,00	10.137.466.766,00	(881.547.801,00)	92,00
5.3.26.3-26.2-22.0-00.01	**Dinas Kebudayaan dan Pariwisata**	11.019.014.567,00	10.137.466.766,00	(881.547.801,00)	92,00
5.3.26.3-26.2-22.0-00.01.1	BELANJA OPERASI	9.966.931.629,00	9.093.784.166,00	(873.147.463,00)	91,24
5.3.26.3-26.2-22.0-00.01.1.01	Belanja Pegawai	3.312.316.777,00	2.582.214.698,00	(730.102.079,00)	77,96
5.3.26.3-26.2-22.0-00.01.1.02	Belanja Barang dan Jasa	5.104.614.852,00	4.961.569.468,00	(143.045.384,00)	97,20
5.3.26.3-26.2-22.0-00.01.1.05	Belanja Hibah	1.550.000.000,00	1.550.000.000,00	0,00	100,00
5.3.26.3-26.2-22.0-00.01.2	BELANJA MODAL	1.052.082.938,00	1.043.682.600,00	(8.400.338,00)	99,20
5.3.26.3-26.2-22.0-00.01.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	443.586.308,00	438.624.500,00	(4.961.808,00)	98,88
5.3.26.3-26.2-22.0-00.01.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	533.850.080,00	530.415.100,00	(3.434.980,00)	99,36
5.3.26.3-26.2-22.0-00.01.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	74.646.550,00	74.643.000,00	(3.550,00)	100,00
5.3.27	**PERTANIAN**	32.775.831.404,00	32.016.761.530,00	(759.069.874,00)	97,68
5.3.27.3-27.0-00.0-00.01	**Dinas Pertanian**	32.775.831.404,00	32.016.761.530,00	(759.069.874,00)	97,68
5.3.27.3-27.0-00.0-00.01.1	BELANJA OPERASI	29.833.548.942,00	29.099.202.780,00	(734.346.162,00)	97,54
5.3.27.3-27.0-00.0-00.01.1.01	Belanja Pegawai	7.872.711.826,00	7.646.481.387,00	(226.230.439,00)	97,13
5.3.27.3-27.0-00.0-00.01.1.02	Belanja Barang dan Jasa	12.137.994.584,00	11.668.555.193,00	(469.439.391,00)	96,13
5.3.27.3-27.0-00.0-00.01.1.05	Belanja Hibah	9.822.842.532,00	9.784.166.200,00	(38.676.332,00)	99,61
5.3.27.3-27.0-00.0-00.01.2	BELANJA MODAL	2.942.282.462,00	2.917.558.750,00	(24.723.712,00)	99,16
5.3.27.3-27.0-00.0-00.01.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	1.128.016.462,00	1.112.411.750,00	(15.604.712,00)	98,62
5.3.27.3-27.0-00.0-00.01.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	1.734.266.000,00	1.725.247.000,00	(9.019.000,00)	99,48
5.3.27.3-27.0-00.0-00.01.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	80.000.000,00	79.900.000,00	(100.000,00)	99,88
5.3.31	**PERINDUSTRIAN**	5.651.345.819,00	5.523.617.846,00	(127.727.973,00)	97,74
5.3.31.3-31.3-30.0-00.01	**Dinas Perindustrian dan Perdagangan**	5.651.345.819,00	5.523.617.846,00	(127.727.973,00)	97,74
5.3.31.3-31.3-30.0-00.01.1	BELANJA OPERASI	5.494.717.837,00	5.373.253.846,00	(121.463.991,00)	97,79

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)	
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)
5.3.31.3-31.3-30.0-00.01.1.01	Belanja Pegawai	2.354.686.787,00	2.304.929.660,00	(49.757.127,00)	97,89
5.3.31.3-31.3-30.0-00.01.1.02	Belanja Barang dan Jasa	3.140.031.050,00	3.068.324.186,00	(71.706.864,00)	97,72
5.3.31.3-31.3-30.0-00.01.2	BELANJA MODAL	156.627.982,00	150.364.000,00	(6.263.982,00)	96,00
5.3.31.3-31.3-30.0-00.01.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	156.627.982,00	150.364.000,00	(6.263.982,00)	96,00
5.4	**UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN**	91.041.284.602,00	87.572.301.942,00	(3.468.982.660,00)	96,19
5.4.01	**SEKRETARIAT DAERAH**	51.007.820.095,00	48.559.489.572,00	(2.448.330.523,00)	95,20
5.4.01.4-01.2-10.3-29.01	**Sekretariat Daerah**	51.007.820.095,00	48.559.489.572,00	(2.448.330.523,00)	95,20
5.4.01.4-01.2-10.3-29.01.1	BELANJA OPERASI	47.547.575.297,00	45.290.162.122,00	(2.257.413.175,00)	95,25
5.4.01.4-01.2-10.3-29.01.1.01	Belanja Pegawai	9.808.659.831,00	8.852.358.363,00	(956.301.468,00)	90,25
5.4.01.4-01.2-10.3-29.01.1.02	Belanja Barang dan Jasa	22.419.872.122,00	21.304.731.215,00	(1.115.140.907,00)	95,03
5.4.01.4-01.2-10.3-29.01.1.05	Belanja Hibah	15.114.977.544,00	14.929.572.544,00	(185.405.000,00)	98,77
5.4.01.4-01.2-10.3-29.01.1.06	Belanja Bantuan Sosial	204.065.800,00	203.500.000,00	(565.800,00)	99,72
5.4.01.4-01.2-10.3-29.01.2	BELANJA MODAL	3.460.244.798,00	3.269.327.450,00	(190.917.348,00)	94,48
5.4.01.4-01.2-10.3-29.01.2.01	Belanja Modal Tanah	362.592.000,00	359.717.000,00	(2.875.000,00)	99,21
5.4.01.4-01.2-10.3-29.01.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	3.097.652.798,00	2.909.610.450,00	(188.042.348,00)	93,93
5.4.02	**SEKRETARIAT DPRD**	40.033.464.507,00	39.012.812.370,00	(1.020.652.137,00)	97,45
5.4.02.4-02.0-00.0-00.01	**Sekretariat DPRD**	40.033.464.507,00	39.012.812.370,00	(1.020.652.137,00)	97,45
5.4.02.4-02.0-00.0-00.01.1	BELANJA OPERASI	38.231.349.398,00	37.269.770.030,00	(961.579.368,00)	97,48
5.4.02.4-02.0-00.0-00.01.1.01	Belanja Pegawai	14.969.356.469,00	14.686.296.452,00	(283.060.017,00)	98,11
5.4.02.4-02.0-00.0-00.01.1.02	Belanja Barang dan Jasa	23.261.992.929,00	22.583.473.578,00	(678.519.351,00)	97,08
5.4.02.4-02.0-00.0-00.01.2	BELANJA MODAL	1.802.115.109,00	1.743.042.340,00	(59.072.769,00)	96,72
5.4.02.4-02.0-00.0-00.01.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	1.516.645.109,00	1.460.665.000,00	(55.980.109,00)	96,31
5.4.02.4-02.0-00.0-00.01.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	200.000.000,00	197.989.590,00	(2.010.410,00)	98,99
5.4.02.4-02.0-00.0-00.01.2.06	Belanja Modal Aset Lainnya	85.470.000,00	84.387.750,00	(1.082.250,00)	98,73
5.5	**UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN**	242.021.385.736,00	223.217.246.894,04	(18.804.138.841,96)	92,23
5.5.01	**PERENCANAAN**	10.793.284.975,00	10.370.692.120,04	(422.592.854,96)	96,08
5.5.01.5-01.1-05.0-00.01	**Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Penelitian**	10.793.284.975,00	10.370.692.120,04	(422.592.854,96)	96,08
5.5.01.5-01.1-05.0-00.01.1	BELANJA OPERASI	10.035.957.640,00	9.617.280.820,04	(418.676.819,96)	95,83
5.5.01.5-01.1-05.0-00.01.1.01	Belanja Pegawai	3.902.153.556,00	3.699.201.421,00	(202.952.135,00)	94,80
5.5.01.5-01.1-05.0-00.01.1.02	Belanja Barang dan Jasa	6.133.804.084,00	5.918.079.399,04	(215.724.684,96)	96,48
5.5.01.5-01.1-05.0-00.01.2	BELANJA MODAL	757.327.335,00	753.411.300,00	(3.916.035,00)	99,48
5.5.01.5-01.1-05.0-00.01.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	757.327.335,00	753.411.300,00	(3.916.035,00)	99,48
5.5.02	**KEUANGAN**	222.930.749.503,00	204.777.855.236,00	(18.152.894.267,00)	91,86
5.5.02.5-02.0-00.0-00.01	**Badan Keuangan dan Aset Daerah**	210.885.921.340,00	194.504.205.286,00	(16.381.716.054,00)	92,23
5.5.02.5-02.0-00.0-00.01.1	BELANJA OPERASI	17.043.341.706,00	15.692.657.954,00	(1.350.683.752,00)	92,08
5.5.02.5-02.0-00.0-00.01.1.01	Belanja Pegawai	4.971.602.374,00	4.260.827.292,00	(710.775.082,00)	85,70
5.5.02.5-02.0-00.0-00.01.1.02	Belanja Barang dan Jasa	11.971.739.332,00	11.431.830.662,00	(539.908.670,00)	95,49
5.5.02.5-02.0-00.0-00.01.1.04	Belanja Subsidi	100.000.000,00	0,00	(100.000.000,00)	0
5.5.02.5-02.0-00.0-00.01.2	BELANJA MODAL	1.065.288.704,00	1.001.456.360,00	(63.832.344,00)	94,01
5.5.02.5-02.0-00.0-00.01.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	987.588.704,00	923.781.360,00	(63.807.344,00)	93,54

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)	
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)
5.5.02.5-02.0-00.0-00.01.2.06	Belanja Modal Aset Lainnya	77.700.000,00	77.675.000,00	(25.000,00)	99,97
5.5.02.5-02.0-00.0-00.01.3	BELANJA TIDAK TERDUGA	9.580.000.000,00	212.500.000,00	(9.367.500.000,00)	2,22
5.5.02.5-02.0-00.0-00.01.3.01	Belanja Tidak Terduga	9.580.000.000,00	212.500.000,00	(9.367.500.000,00)	2,22
5.5.02.5-02.0-00.0-00.01.4	BELANJA TRANSFER	183.197.290.930,00	177.597.590.972,00	(5.599.699.958,00)	96,94
5.5.02.5-02.0-00.0-00.01.4.01	Belanja Bagi Hasil	10.655.216.000,00	5.391.902.399,00	(5.263.313.601,00)	50,60
5.5.02.5-02.0-00.0-00.01.4.02	Belanja Bantuan Keuangan	172.542.074.930,00	172.205.688.573,00	(336.386.357,00)	99,81
5.5.02.5-02.0-00.0-00.02	**Badan Pendapatan Daerah**	12.044.828.163,00	10.273.649.950,00	(1.771.178.213,00)	85,30
5.5.02.5-02.0-00.0-00.02.1	BELANJA OPERASI	11.378.942.925,00	9.617.499.450,00	(1.761.443.475,00)	84,52
5.5.02.5-02.0-00.0-00.02.1.01	Belanja Pegawai	6.525.066.258,00	4.838.905.273,00	(1.686.160.985,00)	74,16
5.5.02.5-02.0-00.0-00.02.1.02	Belanja Barang dan Jasa	4.853.876.667,00	4.778.594.177,00	(75.282.490,00)	98,45
5.5.02.5-02.0-00.0-00.02.2	BELANJA MODAL	665.885.238,00	656.150.500,00	(9.734.738,00)	98,54
5.5.02.5-02.0-00.0-00.02.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	216.490.238,00	208.953.500,00	(7.536.738,00)	96,52
5.5.02.5-02.0-00.0-00.02.2.06	Belanja Modal Aset Lainnya	449.395.000,00	447.197.000,00	(2.198.000,00)	99,51
5.5.03	**KEPEGAWAIAN**	8.297.351.258,00	8.068.699.538,00	(228.651.720,00)	97,24
5.5.03.5-03.5-04.0-00.01	**Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia**	8.297.351.258,00	8.068.699.538,00	(228.651.720,00)	97,24
5.5.03.5-03.5-04.0-00.01.1	BELANJA OPERASI	8.179.026.258,00	7.950.389.538,00	(228.636.720,00)	97,20
5.5.03.5-03.5-04.0-00.01.1.01	Belanja Pegawai	2.655.622.617,00	2.504.652.200,00	(150.970.417,00)	94,32
5.5.03.5-03.5-04.0-00.01.1.02	Belanja Barang dan Jasa	5.468.403.641,00	5.390.737.338,00	(77.666.303,00)	98,58
5.5.03.5-03.5-04.0-00.01.1.05	Belanja Hibah	55.000.000,00	55.000.000,00	0,00	100,00
5.5.03.5-03.5-04.0-00.01.2	BELANJA MODAL	118.325.000,00	118.310.000,00	(15.000,00)	99,99
5.5.03.5-03.5-04.0-00.01.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	118.325.000,00	118.310.000,00	(15.000,00)	99,99
5.6	**UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN**	11.725.560.747,00	11.331.428.663,00	(394.132.084,00)	96,64
5.6.01	**INSPEKTORAT**	11.725.560.747,00	11.331.428.663,00	(394.132.084,00)	96,64
5.6.01.6-01.0-00.0-00.01	**Inspektorat**	11.725.560.747,00	11.331.428.663,00	(394.132.084,00)	96,64
5.6.01.6-01.0-00.0-00.01.1	BELANJA OPERASI	9.417.118.906,00	9.028.589.663,00	(388.529.243,00)	95,87
5.6.01.6-01.0-00.0-00.01.1.01	Belanja Pegawai	5.065.951.408,00	4.886.654.361,00	(179.297.047,00)	96,46
5.6.01.6-01.0-00.0-00.01.1.02	Belanja Barang dan Jasa	4.351.167.498,00	4.141.935.302,00	(209.232.196,00)	95,19
5.6.01.6-01.0-00.0-00.01.2	BELANJA MODAL	2.308.441.841,00	2.302.839.000,00	(5.602.841,00)	99,76
5.6.01.6-01.0-00.0-00.01.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	1.853.154.269,00	1.849.385.000,00	(3.769.269,00)	99,80
5.6.01.6-01.0-00.0-00.01.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	255.580.812,00	254.854.000,00	(726.812,00)	99,72
5.6.01.6-01.0-00.0-00.01.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	199.706.760,00	198.600.000,00	(1.106.760,00)	99,45
5.7	**UNSUR KEWILAYAHAN**	45.131.288.590,00	42.170.835.056,00	(2.960.453.534,00)	93,44
5.7.01	**KECAMATAN**	45.131.288.590,00	42.170.835.056,00	(2.960.453.534,00)	93,44
5.7.01.7-01.0-00.0-00.01	**Kecamatan Kurun**	5.697.808.000,00	5.443.918.927,00	(253.889.073,00)	95,54
5.7.01.7-01.0-00.0-00.01.1	BELANJA OPERASI	5.511.175.474,00	5.258.495.327,00	(252.680.147,00)	95,42
5.7.01.7-01.0-00.0-00.01.1.01	Belanja Pegawai	2.936.825.164,00	2.756.629.910,00	(180.195.254,00)	93,86
5.7.01.7-01.0-00.0-00.01.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.574.350.310,00	2.501.865.417,00	(72.484.893,00)	97,18
5.7.01.7-01.0-00.0-00.01.2	BELANJA MODAL	186.632.526,00	185.423.600,00	(1.208.926,00)	99,35
5.7.01.7-01.0-00.0-00.01.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	136.314.894,00	135.173.600,00	(1.141.294,00)	99,16
5.7.01.7-01.0-00.0-00.01.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	50.317.632,00	50.250.000,00	(67.632,00)	99,87

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)	
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)
5.7.01.7-01.0-00.0-00.02	**Kecamatan Tewah**	4.287.636.305,00	4.022.741.623,00	(264.894.682,00)	93,82
5.7.01.7-01.0-00.0-00.02.1	BELANJA OPERASI	4.198.165.448,00	3.933.662.223,00	(264.503.225,00)	93,70
5.7.01.7-01.0-00.0-00.02.1.01	Belanja Pegawai	2.205.851.455,00	1.997.252.375,00	(208.599.080,00)	90,54
5.7.01.7-01.0-00.0-00.02.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.992.313.993,00	1.936.409.848,00	(55.904.145,00)	97,19
5.7.01.7-01.0-00.0-00.02.2	BELANJA MODAL	89.470.857,00	89.079.400,00	(391.457,00)	99,56
5.7.01.7-01.0-00.0-00.02.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	89.470.857,00	89.079.400,00	(391.457,00)	99,56
5.7.01.7-01.0-00.0-00.03	**Kecamatan Kahayan Hulu Utara**	2.997.045.588,00	2.870.910.571,00	(126.135.017,00)	95,79
5.7.01.7-01.0-00.0-00.03.1	BELANJA OPERASI	2.708.079.543,00	2.584.510.571,00	(123.568.972,00)	95,44
5.7.01.7-01.0-00.0-00.03.1.01	Belanja Pegawai	1.345.302.250,00	1.265.677.251,00	(79.624.999,00)	94,08
5.7.01.7-01.0-00.0-00.03.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.362.777.293,00	1.318.833.320,00	(43.943.973,00)	96,78
5.7.01.7-01.0-00.0-00.03.2	BELANJA MODAL	288.966.045,00	286.400.000,00	(2.566.045,00)	99,11
5.7.01.7-01.0-00.0-00.03.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	43.034.445,00	42.300.000,00	(734.445,00)	98,29
5.7.01.7-01.0-00.0-00.03.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	245.931.600,00	244.100.000,00	(1.831.600,00)	99,26
5.7.01.7-01.0-00.0-00.04	**Kecamatan Sepang**	3.714.662.771,00	3.420.498.559,00	(294.164.212,00)	92,08
5.7.01.7-01.0-00.0-00.04.1	BELANJA OPERASI	3.498.638.591,00	3.205.119.692,00	(293.518.899,00)	91,61
5.7.01.7-01.0-00.0-00.04.1.01	Belanja Pegawai	1.987.565.104,00	1.842.499.069,00	(145.066.035,00)	92,70
5.7.01.7-01.0-00.0-00.04.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.511.073.487,00	1.362.620.623,00	(148.452.864,00)	90,18
5.7.01.7-01.0-00.0-00.04.2	BELANJA MODAL	216.024.180,00	215.378.867,00	(645.313,00)	99,70
5.7.01.7-01.0-00.0-00.04.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	92.026.337,00	92.012.867,00	(13.470,00)	99,99
5.7.01.7-01.0-00.0-00.04.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	97.469.100,00	96.900.000,00	(569.100,00)	99,42
5.7.01.7-01.0-00.0-00.04.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	26.528.743,00	26.466.000,00	(62.743,00)	99,76
5.7.01.7-01.0-00.0-00.05	**Kecamatan Manuhing**	3.944.493.214,00	3.747.131.944,00	(197.361.270,00)	95,00
5.7.01.7-01.0-00.0-00.05.1	BELANJA OPERASI	3.720.467.982,00	3.523.814.837,00	(196.653.145,00)	94,71
5.7.01.7-01.0-00.0-00.05.1.01	Belanja Pegawai	2.262.103.106,00	2.119.863.920,00	(142.239.186,00)	93,71
5.7.01.7-01.0-00.0-00.05.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.458.364.876,00	1.403.950.917,00	(54.413.959,00)	96,27
5.7.01.7-01.0-00.0-00.05.2	BELANJA MODAL	224.025.232,00	223.317.107,00	(708.125,00)	99,68
5.7.01.7-01.0-00.0-00.05.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	224.025.232,00	223.317.107,00	(708.125,00)	99,68
5.7.01.7-01.0-00.0-00.06	**Kecamatan Rungan**	3.495.536.366,00	3.212.062.787,00	(283.473.579,00)	91,89
5.7.01.7-01.0-00.0-00.06.1	BELANJA OPERASI	3.357.084.974,00	3.074.657.832,00	(282.427.142,00)	91,59
5.7.01.7-01.0-00.0-00.06.1.01	Belanja Pegawai	1.876.579.188,00	1.740.327.065,00	(136.252.123,00)	92,74
5.7.01.7-01.0-00.0-00.06.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.480.505.786,00	1.334.330.767,00	(146.175.019,00)	90,13
5.7.01.7-01.0-00.0-00.06.2	BELANJA MODAL	138.451.392,00	137.404.955,00	(1.046.437,00)	99,24
5.7.01.7-01.0-00.0-00.06.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	29.741.877,00	29.134.955,00	(606.922,00)	97,96
5.7.01.7-01.0-00.0-00.06.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	108.709.515,00	108.270.000,00	(439.515,00)	99,60
5.7.01.7-01.0-00.0-00.07	**Kecamatan Mihing Raya**	3.777.928.523,00	3.513.252.046,00	(264.676.477,00)	92,99
5.7.01.7-01.0-00.0-00.07.1	BELANJA OPERASI	3.597.654.083,00	3.347.101.046,00	(250.553.037,00)	93,04
5.7.01.7-01.0-00.0-00.07.1.01	Belanja Pegawai	2.000.531.689,00	1.836.857.255,00	(163.674.434,00)	91,82
5.7.01.7-01.0-00.0-00.07.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.597.122.394,00	1.510.243.791,00	(86.878.603,00)	94,56
5.7.01.7-01.0-00.0-00.07.2	BELANJA MODAL	180.274.440,00	166.151.000,00	(14.123.440,00)	92,17
5.7.01.7-01.0-00.0-00.07.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	169.174.440,00	155.051.000,00	(14.123.440,00)	91,65

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)	
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)
5.7.01.7-01.0-00.0-00.07.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	11.100.000,00	11.100.000,00	0,00	100,00
5.7.01.7-01.0-00.0-00.08	**Kecamatan Rungan Hulu**	3.901.999.038,00	3.642.354.681,00	(259.644.357,00)	93,35
5.7.01.7-01.0-00.0-00.08.1	BELANJA OPERASI	3.502.436.180,00	3.245.336.938,00	(257.099.242,00)	92,66
5.7.01.7-01.0-00.0-00.08.1.01	Belanja Pegawai	1.892.131.094,00	1.659.410.402,00	(232.720.692,00)	87,70
5.7.01.7-01.0-00.0-00.08.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.610.305.086,00	1.585.926.536,00	(24.378.550,00)	98,49
5.7.01.7-01.0-00.0-00.08.2	BELANJA MODAL	399.562.858,00	397.017.743,00	(2.545.115,00)	99,36
5.7.01.7-01.0-00.0-00.08.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	178.717.924,00	177.004.743,00	(1.713.181,00)	99,04
5.7.01.7-01.0-00.0-00.08.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	220.844.934,00	220.013.000,00	(831.934,00)	99,62
5.7.01.7-01.0-00.0-00.09	**Kecamatan Damang Batu**	3.260.934.944,00	3.017.130.993,00	(243.803.951,00)	92,52
5.7.01.7-01.0-00.0-00.09.1	BELANJA OPERASI	2.862.310.192,00	2.624.912.865,00	(237.397.327,00)	91,71
5.7.01.7-01.0-00.0-00.09.1.01	Belanja Pegawai	1.538.867.708,00	1.377.346.375,00	(161.521.333,00)	89,50
5.7.01.7-01.0-00.0-00.09.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.323.442.484,00	1.247.566.490,00	(75.875.994,00)	94,27
5.7.01.7-01.0-00.0-00.09.2	BELANJA MODAL	398.624.752,00	392.218.128,00	(6.406.624,00)	98,39
5.7.01.7-01.0-00.0-00.09.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	134.265.993,00	128.521.378,00	(5.744.615,00)	95,72
5.7.01.7-01.0-00.0-00.09.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	264.358.759,00	263.696.750,00	(662.009,00)	99,75
5.7.01.7-01.0-00.0-00.10	**Kecamatan Manuhing Raya**	2.800.868.834,00	2.677.934.602,00	(122.934.232,00)	95,61
5.7.01.7-01.0-00.0-00.10.1	BELANJA OPERASI	2.644.588.382,00	2.522.342.150,00	(122.246.232,00)	95,38
5.7.01.7-01.0-00.0-00.10.1.01	Belanja Pegawai	1.220.312.100,00	1.102.390.947,00	(117.921.153,00)	90,34
5.7.01.7-01.0-00.0-00.10.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.424.276.282,00	1.419.951.203,00	(4.325.079,00)	99,70
5.7.01.7-01.0-00.0-00.10.2	BELANJA MODAL	156.280.452,00	155.592.452,00	(688.000,00)	99,56
5.7.01.7-01.0-00.0-00.10.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	156.280.452,00	155.592.452,00	(688.000,00)	99,56
5.7.01.7-01.0-00.0-00.11	**Kecamatan Miri Manasa**	3.629.432.004,00	3.307.934.470,00	(321.497.534,00)	91,14
5.7.01.7-01.0-00.0-00.11.1	BELANJA OPERASI	3.215.594.591,00	2.908.479.760,00	(307.114.831,00)	90,45
5.7.01.7-01.0-00.0-00.11.1.01	Belanja Pegawai	1.287.449.652,00	1.157.280.182,00	(130.169.470,00)	89,89
5.7.01.7-01.0-00.0-00.11.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.928.144.939,00	1.751.199.578,00	(176.945.361,00)	90,82
5.7.01.7-01.0-00.0-00.11.2	BELANJA MODAL	413.837.413,00	399.454.710,00	(14.382.703,00)	96,52
5.7.01.7-01.0-00.0-00.11.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	204.937.633,00	190.998.000,00	(13.939.633,00)	93,20
5.7.01.7-01.0-00.0-00.11.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	208.899.780,00	208.456.710,00	(443.070,00)	99,79
5.7.01.7-01.0-00.0-00.12	**Kecamatan Rungan Barat**	3.622.943.003,00	3.294.963.853,00	(327.979.150,00)	90,95
5.7.01.7-01.0-00.0-00.12.1	BELANJA OPERASI	3.314.494.133,00	2.989.423.403,00	(325.070.730,00)	90,19
5.7.01.7-01.0-00.0-00.12.1.01	Belanja Pegawai	1.668.878.381,00	1.488.172.747,00	(180.705.634,00)	89,17
5.7.01.7-01.0-00.0-00.12.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.645.615.752,00	1.501.250.656,00	(144.365.096,00)	91,23
5.7.01.7-01.0-00.0-00.12.2	BELANJA MODAL	308.448.870,00	305.540.450,00	(2.908.420,00)	99,06
5.7.01.7-01.0-00.0-00.12.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	44.577.450,00	44.577.450,00	0,00	100,00
5.7.01.7-01.0-00.0-00.12.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	263.871.420,00	260.963.000,00	(2.908.420,00)	98,90
6	**PEMBIAYAAN DAERAH**	147.515.383.201,00	147.515.383.201,20	0,20	100,00
6.5	**UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN**	147.515.383.201,00	147.515.383.201,20	0,20	100,00
6.5.02	**KEUANGAN**	147.515.383.201,00	147.515.383.201,20	0,20	100,00
6.5.02.5-02.0-00.0-00.01	**Badan Keuangan dan Aset Daerah**	147.515.383.201,00	147.515.383.201,20	0,20	100,00
6.5.02.5-02.0-00.0-00.01.1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	135.547.383.201,00	135.547.383.201,20	0,20	100,00

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)	
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)
6.5.02.5-02.0-00.0-00.01.1.01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	135.547.383.201,00	135.547.383.201,20	0,20	100,00
6.5.02.5-02.0-00.0-00.01.2	PENGELUARAN PEMBIAYAAN	11.968.000.000,00	11.968.000.000,00	0,00	100,00
6.5.02.5-02.0-00.0-00.01.2.02	Penyertaan Modal Daerah	11.968.000.000,00	11.968.000.000,00	0,00	100,00

Pj. BUPATI GUNUNG MAS

ttd

HERSON B. ADEN

LAMPIRAN 1.2

PERATURAN DAERAH KABUPATEN GUNUGN MAS
NOMOR 3 TAHUN 2024
TENTANG
PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2023

PEMERINTAH KABUPATEN GUNUNG MAS

RINGKASAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK DAN JENIS PENDAPATAN,BELANJA, DAN PEMBIAYAAN

Tahun Anggaran 2023

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN 2023	REALISASI 2023	(%)	REALISASI 2022
4	**PENDAPATAN DAERAH**	1.210.631.011.162,00	1.176.119.496.936,58	97,15	1.084.119.104.954,50
4.1	**PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**	74.332.496.530,00	35.992.250.832,58	48,42	78.217.073.269,86
4.1.01	**Pajak Daerah**	49.230.000.000,00	11.888.728.187,00	24,15	30.932.700.270,00
4.1.02	**Retribusi Daerah**	4.828.080.000,00	5.824.282.265,20	120,63	4.507.497.060,00
4.1.03	**Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan**	24.000.000,00	81.147.428,96	338,11	12.683.801.108,00
4.1.04	**Lain-lain PAD yang Sah**	20.250.416.530,00	18.198.092.951,42	89,87	30.093.074.831,86
4.2	**PENDAPATAN TRANSFER**	1.132.550.474.632,00	1.135.524.590.828,00	100,26	1.004.412.465.028,64
4.2.01	**Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat**	1.073.816.565.000,00	1.078.209.703.770,00	100,41	956.446.470.157,00
4.2.01.01	Dana Perimbangan	969.050.672.000,00	967.710.343.580,00	99,86	862.410.247.437,00
4.2.01.02	Dana Insentif Daerah (DID)	9.487.123.000,00	15.456.199.000,00	162,92	3.821.039.000,00
4.2.01.05	Dana Desa	95.278.770.000,00	95.043.161.190,00	99,75	90.215.183.720,00
4.2.02	**Pendapatan Transfer Antar Daerah**	58.733.909.632,00	57.314.887.058,00	97,58	47.965.994.871,64
4.2.02.01	Pendapatan Bagi Hasil	58.733.909.632,00	57.314.887.058,00	97,58	47.965.994.871,64
4.3	**LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH**	3.748.040.000,00	4.602.655.276,00	122,80	1.489.566.656,00
4.3.01	**Pendapatan Hibah**	0,00	0,00	0	5.662.000,00
4.3.03	**Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan**	3.748.040.000,00	4.602.655.276,00	122,80	1.483.904.656,00
5	**BELANJA DAERAH**	1.334.210.394.363,00	1.250.220.807.539,09	93,70	1.043.348.833.608,09
5.1	**BELANJA OPERASI**	849.602.808.825,00	796.281.117.535,70	93,72	652.748.256.458,61
5.1.01	**Belanja Pegawai**	438.640.414.118,00	412.033.313.157,00	93,93	382.850.310.978,00
5.1.02	**Belanja Barang dan Jasa**	359.545.950.279,00	335.529.741.026,70	93,32	254.015.538.421,61
5.1.04	**Belanja Subsidi**	100.000.000,00	0,00	0,00	0,00
5.1.05	**Belanja Hibah**	51.112.378.628,00	48.514.563.352,00	94,92	15.018.602.059,00
5.1.06	**Belanja Bantuan Sosial**	204.065.800,00	203.500.000,00	99,72	863.805.000,00
5.2	**BELANJA MODAL**	291.830.294.608,00	276.129.599.031,39	94,62	239.639.063.212,48
5.2.01	**Belanja Modal Tanah**	362.592.000,00	359.717.000,00	99,21	549.000.000,00
5.2.02	**Belanja Modal Peralatan dan Mesin**	42.778.000.957,00	41.300.725.933,00	96,55	46.253.480.479,21
5.2.03	**Belanja Modal Gedung dan Bangunan**	63.436.569.863,00	62.575.674.211,00	98,64	65.821.245.635,27
5.2.04	**Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi**	183.316.396.869,00	169.522.427.528,39	92,48	125.824.467.024,00
5.2.05	**Belanja Modal Aset Tetap Lainnya**	1.208.388.328,00	1.665.999.253,00	137,87	813.030.274,00
5.2.06	**Belanja Modal Aset Lainnya**	728.346.591,00	705.055.106,00	96,80	377.839.800,00
5.3	**BELANJA TIDAK TERDUGA**	9.580.000.000,00	212.500.000,00	2,22	219.933.860,00

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN 2023	REALISASI 2023	(%)	REALISASI 2022
5.3.01	**Belanja Tidak Terduga**	9.580.000.000,00	212.500.000,00	2,22	219.933.860,00
5.4	**BELANJA TRANSFER**	183.197.290.930,00	177.597.590.972,00	96,94	150.741.580.077,00
5.4.01	**Belanja Bagi Hasil**	10.655.216.000,00	5.391.902.399,00	50,60	0,00
5.4.02	**Belanja Bantuan Keuangan**	172.542.074.930,00	172.205.688.573,00	99,81	150.741.580.077,00
	SURPLUS / DEFISIT	(123.579.383.201,00)	(74.101.310.602,51)	0	40.770.271.346,41
6.1	**PENERIMAAN PEMBIAYAAN**	135.547.383.201,00	135.547.383.201,20	100,00	105.127.111.854,79
6.1.01	**Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya**	135.547.383.201,00	135.547.383.201,20	100,00	105.127.111.854,79
6.2	**PENGELUARAN PEMBIAYAAN**	11.968.000.000,00	11.968.000.000,00	100,00	10.350.000.000,00
6.2.02	**Penyertaan Modal Daerah**	11.968.000.000,00	11.968.000.000,00	100,00	10.350.000.000,00
	PEMBIAYAAN NETTO	123.579.383.201,00	123.579.383.201,20	100,00	94.777.111.854,79
SISA LEBIH / KURANG PEMBIAYAAN TAHUN BERKENAAN		**0,00**	**49.478.072.598,69**	**0**	**135.547.383.201,20**

Pj. BUPATI GUNUNG MAS

ttd

HERSON B. ADEN

LAMPIRAN 1.3

PERATURAN DAERAH KABUPATEN GUNUNG MAS
NOMOR 3 TAHUN 2024
TENTANG
PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2023

PEMERINTAH KABUPATEN GUNUNG MAS

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUBKEGIATAN, KELOMPOK, DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

Tahun Anggaran 2023

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM	KETERANGAN
		ANGGARAN	REALISASI	(Rp)	(%)		
00.0.00.00.4	**PENDAPATAN DAERAH**	1.210.631.011.162,00	1.176.119.496.936,58	(34.511.514.225,42)	97,15		
00.0.00.00.4.1	**PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**	74.332.496.530,00	35.992.250.832,58	(38.340.245.697,42)	48,42		
00.0.00.00.4.1.01	Pajak Daerah	49.230.000.000,00	11.888.728.187,00	(37.341.271.813,00)	24,15		
00.0.00.00.4.1.02	Retribusi Daerah	4.828.080.000,00	5.824.282.265,20	996.202.265,20	120,63		
00.0.00.00.4.1.03	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	24.000.000,00	81.147.428,96	57.147.428,96	338,11		
00.0.00.00.4.1.04	Lain-lain PAD yang Sah	20.250.416.530,00	18.198.092.951,42	(2.052.323.578,58)	89,87		
00.0.00.00.4.2	**PENDAPATAN TRANSFER**	1.132.550.474.632,00	1.135.524.590.828,00	2.974.116.196,00	100,26		
00.0.00.00.4.2.01	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	1.073.816.565.000,00	1.078.209.703.770,00	4.393.138.770,00	100,41		
00.0.00.00.4.2.02	Pendapatan Transfer Antar Daerah	58.733.909.632,00	57.314.887.058,00	(1.419.022.574,00)	97,58		
00.0.00.00.4.3	**LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH**	3.748.040.000,00	4.602.655.276,00	854.615.276,00	122,80		
00.0.00.00.4.3.03	Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	3.748.040.000,00	4.602.655.276,00	854.615.276,00	122,80		
00.0.00.00.5	**BELANJA DAERAH**	1.334.210.394.363,00	1.250.220.807.539,09	(83.989.586.823,91)	93,70		
00	**Non Program**	0,00	95.494.796.190,00	95.494.796.190,00	0		
00.0.00	Non Kegiatan	0,00	95.494.796.190,00	95.494.796.190,00	0		
00.0.00.00	Non Sub Kegiatan	0,00	95.494.796.190,00	95.494.796.190,00	0		
00.0.00.00.5.1	BELANJA OPERASI	0,00	451.635.000,00	451.635.000,00	0		
00.0.00.00.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	0,00	-3.645.000,00	(3.645.000,00)	0		
00.0.00.00.5.1.05	Belanja Hibah	0,00	455.280.000,00	455.280.000,00	0		
00.0.00.00.5.4	BELANJA TRANSFER	0,00	95.043.161.190,00	95.043.161.190,00	0		
00.0.00.00.5.4.02	Belanja Bantuan Keuangan	0,00	95.043.161.190,00	95.043.161.190,00	0		
01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	565.222.192.821,00	530.060.380.254,04	(35.161.812.566,96)	93,78		
01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	3.097.093.941,00	2.935.909.090,00	(161.184.851,00)	94,80		
01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1.158.115.833,00	1.101.320.022,00	(56.795.811,00)	95,10		
01.2.01.01.5.1	BELANJA OPERASI	1.158.115.833,00	1.101.320.022,00	(56.795.811,00)	95,10		
01.2.01.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.158.115.833,00	1.101.320.022,00	(56.795.811,00)	95,10		
01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	156.461.110,00	143.659.470,00	(12.801.640,00)	91,82		
01.2.01.02.5.1	BELANJA OPERASI	156.461.110,00	143.659.470,00	(12.801.640,00)	91,82		

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM	KETERANGAN
		ANGGARAN	REALISASI	(Rp)	(%)		
01.2.01.02.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	156.461.110,00	143.659.470,00	(12.801.640,00)	91,82		
01.2.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	65.128.036,00	62.626.930,00	(2.501.106,00)	96,16		
01.2.01.03.5.1	BELANJA OPERASI	65.128.036,00	62.626.930,00	(2.501.106,00)	96,16		
01.2.01.03.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	65.128.036,00	62.626.930,00	(2.501.106,00)	96,16		
01.2.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	123.465.665,00	116.676.220,00	(6.789.445,00)	94,50		
01.2.01.04.5.1	BELANJA OPERASI	123.465.665,00	116.676.220,00	(6.789.445,00)	94,50		
01.2.01.04.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	123.465.665,00	116.676.220,00	(6.789.445,00)	94,50		
01.2.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	98.763.837,00	94.478.160,00	(4.285.677,00)	95,66		
01.2.01.05.5.1	BELANJA OPERASI	98.763.837,00	94.478.160,00	(4.285.677,00)	95,66		
01.2.01.05.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	98.763.837,00	94.478.160,00	(4.285.677,00)	95,66		
01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1.254.934.472,00	1.197.748.930,00	(57.185.542,00)	95,44		
01.2.01.06.5.1	BELANJA OPERASI	1.222.111.772,00	1.164.948.930,00	(57.162.842,00)	95,32		
01.2.01.06.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.222.111.772,00	1.164.948.930,00	(57.162.842,00)	95,32		
01.2.01.06.5.2	BELANJA MODAL	32.822.700,00	32.800.000,00	(22.700,00)	99,93		
01.2.01.06.5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	32.822.700,00	32.800.000,00	(22.700,00)	99,93		
01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	240.224.988,00	219.399.358,00	(20.825.630,00)	91,33		
01.2.01.07.5.1	BELANJA OPERASI	240.224.988,00	219.399.358,00	(20.825.630,00)	91,33		
01.2.01.07.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	240.224.988,00	219.399.358,00	(20.825.630,00)	91,33		
01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	422.787.857.528,00	396.820.725.762,00	(25.967.131.766,00)	93,86		
01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	421.294.152.027,00	395.391.097.661,00	(25.903.054.366,00)	93,85		
01.2.02.01.5.1	BELANJA OPERASI	421.294.152.027,00	395.391.097.661,00	(25.903.054.366,00)	93,85		
01.2.02.01.5.1.01	Belanja Pegawai	421.078.437.742,00	395.175.383.376,00	(25.903.054.366,00)	93,85		
01.2.02.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	215.714.285,00	215.714.285,00	0,00	100,00		
01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	230.000,00	204.000,00	(26.000,00)	88,70		
01.2.02.02.5.1	BELANJA OPERASI	230.000,00	204.000,00	(26.000,00)	88,70		
01.2.02.02.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	230.000,00	204.000,00	(26.000,00)	88,70		
01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	75.270.680,00	73.735.584,00	(1.535.096,00)	97,96		
01.2.02.03.5.1	BELANJA OPERASI	75.270.680,00	73.735.584,00	(1.535.096,00)	97,96		
01.2.02.03.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	75.270.680,00	73.735.584,00	(1.535.096,00)	97,96		
01.2.02.04	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	67.650.428,00	67.261.750,00	(388.678,00)	99,43		
01.2.02.04.5.1	BELANJA OPERASI	67.650.428,00	67.261.750,00	(388.678,00)	99,43		
01.2.02.04.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	67.650.428,00	67.261.750,00	(388.678,00)	99,43		
01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	282.578.400,00	263.124.896,00	(19.453.504,00)	93,12		
01.2.02.05.5.1	BELANJA OPERASI	282.578.400,00	263.124.896,00	(19.453.504,00)	93,12		
01.2.02.05.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	282.578.400,00	263.124.896,00	(19.453.504,00)	93,12		

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM	KETERANGAN
		ANGGARAN	REALISASI	(Rp)	(%)		
01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	962.477.808,00	922.694.736,00	(39.783.072,00)	95,87		
01.2.02.07.5.1	BELANJA OPERASI	962.477.808,00	922.694.736,00	(39.783.072,00)	95,87		
01.2.02.07.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	962.477.808,00	922.694.736,00	(39.783.072,00)	95,87		
01.2.02.08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	105.498.185,00	102.607.135,00	(2.891.050,00)	97,26		
01.2.02.08.5.1	BELANJA OPERASI	105.498.185,00	102.607.135,00	(2.891.050,00)	97,26		
01.2.02.08.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	105.498.185,00	102.607.135,00	(2.891.050,00)	97,26		
01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	1.065.247.648,00	1.033.382.417,00	(31.865.231,00)	97,01		
01.2.03.01	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	5.766.100,00	4.360.700,00	(1.405.400,00)	75,63		
01.2.03.01.5.1	BELANJA OPERASI	5.766.100,00	4.360.700,00	(1.405.400,00)	75,63		
01.2.03.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	5.766.100,00	4.360.700,00	(1.405.400,00)	75,63		
01.2.03.02	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	291.759.341,00	278.467.010,00	(13.292.331,00)	95,44		
01.2.03.02.5.1	BELANJA OPERASI	281.759.341,00	268.467.010,00	(13.292.331,00)	95,28		
01.2.03.02.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	281.759.341,00	268.467.010,00	(13.292.331,00)	95,28		
01.2.03.02.5.2	BELANJA MODAL	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	100,00		
01.2.03.02.5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	100,00		
01.2.03.03	Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	15.000.200,00	14.659.600,00	(340.600,00)	97,73		
01.2.03.03.5.1	BELANJA OPERASI	15.000.200,00	14.659.600,00	(340.600,00)	97,73		
01.2.03.03.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	15.000.200,00	14.659.600,00	(340.600,00)	97,73		
01.2.03.04	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	210.322.388,00	196.611.151,00	(13.711.237,00)	93,48		
01.2.03.04.5.1	BELANJA OPERASI	163.122.388,00	149.411.151,00	(13.711.237,00)	91,59		
01.2.03.04.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	163.122.388,00	149.411.151,00	(13.711.237,00)	91,59		
01.2.03.04.5.2	BELANJA MODAL	47.200.000,00	47.200.000,00	0,00	100,00		
01.2.03.04.5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	47.200.000,00	47.200.000,00	0,00	100,00		
01.2.03.05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	23.894.320,00	23.446.714,00	(447.606,00)	98,13		
01.2.03.05.5.1	BELANJA OPERASI	23.894.320,00	23.446.714,00	(447.606,00)	98,13		
01.2.03.05.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	23.894.320,00	23.446.714,00	(447.606,00)	98,13		
01.2.03.06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	518.505.299,00	515.837.242,00	(2.668.057,00)	99,49		
01.2.03.06.5.1	BELANJA OPERASI	518.505.299,00	515.837.242,00	(2.668.057,00)	99,49		
01.2.03.06.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	518.505.299,00	515.837.242,00	(2.668.057,00)	99,49		
01.2.04	Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	47.932.548,00	46.229.144,00	(1.703.404,00)	96,45		
01.2.04.05	Pengolahan Data Retribusi Daerah	36.971.808,00	35.935.744,00	(1.036.064,00)	97,20		
01.2.04.05.5.1	BELANJA OPERASI	36.971.808,00	35.935.744,00	(1.036.064,00)	97,20		
01.2.04.05.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	36.971.808,00	35.935.744,00	(1.036.064,00)	97,20		
01.2.04.07	Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	10.960.740,00	10.293.400,00	(667.340,00)	93,91		

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM	KETERANGAN
		ANGGARAN	REALISASI	(Rp)	(%)		
01.2.04.07.5.1	BELANJA OPERASI	10.960.740,00	10.293.400,00	(667.340,00)	93,91		
01.2.04.07.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	10.960.740,00	10.293.400,00	(667.340,00)	93,91		
01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	6.224.311.097,00	5.592.156.594,00	(632.154.503,00)	89,84		
01.2.05.01	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	24.686.400,00	24.686.400,00	0,00	100,00		
01.2.05.01.5.1	BELANJA OPERASI	24.686.400,00	24.686.400,00	0,00	100,00		
01.2.05.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	24.686.400,00	24.686.400,00	0,00	100,00		
01.2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	1.227.775.959,00	1.178.851.088,00	(48.924.871,00)	96,02		
01.2.05.02.5.1	BELANJA OPERASI	1.227.775.959,00	1.178.851.088,00	(48.924.871,00)	96,02		
01.2.05.02.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.227.775.959,00	1.178.851.088,00	(48.924.871,00)	96,02		
01.2.05.03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	1.859.799.404,00	1.557.748.576,00	(302.050.828,00)	83,76		
01.2.05.03.5.1	BELANJA OPERASI	1.859.799.404,00	1.557.748.576,00	(302.050.828,00)	83,76		
01.2.05.03.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.859.799.404,00	1.557.748.576,00	(302.050.828,00)	83,76		
01.2.05.04	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	186.972.628,00	185.131.043,00	(1.841.585,00)	99,02		
01.2.05.04.5.1	BELANJA OPERASI	186.972.628,00	185.131.043,00	(1.841.585,00)	99,02		
01.2.05.04.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	186.972.628,00	185.131.043,00	(1.841.585,00)	99,02		
01.2.05.05	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	257.467.356,00	253.768.995,00	(3.698.361,00)	98,56		
01.2.05.05.5.1	BELANJA OPERASI	257.467.356,00	253.768.995,00	(3.698.361,00)	98,56		
01.2.05.05.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	257.467.356,00	253.768.995,00	(3.698.361,00)	98,56		
01.2.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	717.876.700,00	659.061.507,00	(58.815.193,00)	91,81		
01.2.05.09.5.1	BELANJA OPERASI	717.876.700,00	659.061.507,00	(58.815.193,00)	91,81		
01.2.05.09.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	717.876.700,00	659.061.507,00	(58.815.193,00)	91,81		
01.2.05.11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	1.949.732.650,00	1.732.908.985,00	(216.823.665,00)	88,88		
01.2.05.11.5.1	BELANJA OPERASI	1.949.732.650,00	1.732.908.985,00	(216.823.665,00)	88,88		
01.2.05.11.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.949.732.650,00	1.732.908.985,00	(216.823.665,00)	88,88		
01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	32.821.878.614,00	31.953.872.520,00	(868.006.094,00)	97,36		
01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	419.743.604,00	408.219.468,00	(11.524.136,00)	97,25		
01.2.06.01.5.1	BELANJA OPERASI	417.261.067,00	405.760.518,00	(11.500.549,00)	97,24		
01.2.06.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	417.261.067,00	405.760.518,00	(11.500.549,00)	97,24		
01.2.06.01.5.2	BELANJA MODAL	2.482.537,00	2.458.950,00	(23.587,00)	99,05		
01.2.06.01.5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	2.482.537,00	2.458.950,00	(23.587,00)	99,05		
01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	4.040.211.338,00	3.886.693.815,00	(153.517.523,00)	96,20		
01.2.06.02.5.1	BELANJA OPERASI	846.293.952,00	820.756.150,00	(25.537.802,00)	96,98		
01.2.06.02.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	846.293.952,00	820.756.150,00	(25.537.802,00)	96,98		
01.2.06.02.5.2	BELANJA MODAL	3.193.917.386,00	3.065.937.665,00	(127.979.721,00)	95,99		
01.2.06.02.5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	3.193.917.386,00	3.065.937.665,00	(127.979.721,00)	95,99		

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM	KETERANGAN
		ANGGARAN	REALISASI	(Rp)	(%)		
01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	553.464.943,00	511.855.962,00	(41.608.981,00)	92,48		
01.2.06.03.5.1	BELANJA OPERASI	509.990.526,00	468.712.895,00	(41.277.631,00)	91,91		
01.2.06.03.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	509.990.526,00	468.712.895,00	(41.277.631,00)	91,91		
01.2.06.03.5.2	BELANJA MODAL	43.474.417,00	43.143.067,00	(331.350,00)	99,24		
01.2.06.03.5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	43.474.417,00	43.143.067,00	(331.350,00)	99,24		
01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	4.680.929.025,00	4.562.797.894,00	(118.131.131,00)	97,48		
01.2.06.04.5.1	BELANJA OPERASI	4.520.050.195,00	4.405.568.114,00	(114.482.081,00)	97,47		
01.2.06.04.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	4.520.050.195,00	4.405.568.114,00	(114.482.081,00)	97,47		
01.2.06.04.5.2	BELANJA MODAL	160.878.830,00	157.229.780,00	(3.649.050,00)	97,73		
01.2.06.04.5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	160.878.830,00	157.229.780,00	(3.649.050,00)	97,73		
01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	967.100.966,00	927.289.966,00	(39.811.000,00)	95,88		
01.2.06.05.5.1	BELANJA OPERASI	967.100.966,00	927.289.966,00	(39.811.000,00)	95,88		
01.2.06.05.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	967.100.966,00	927.289.966,00	(39.811.000,00)	95,88		
01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	660.081.720,00	586.361.000,00	(73.720.720,00)	88,83		
01.2.06.06.5.1	BELANJA OPERASI	660.081.720,00	586.361.000,00	(73.720.720,00)	88,83		
01.2.06.06.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	660.081.720,00	586.361.000,00	(73.720.720,00)	88,83		
01.2.06.07	Penyediaan Bahan/Material	2.510.210.952,00	2.356.010.083,00	(154.200.869,00)	93,86		
01.2.06.07.5.1	BELANJA OPERASI	2.502.935.952,00	2.348.810.083,00	(154.125.869,00)	93,84		
01.2.06.07.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.502.935.952,00	2.348.810.083,00	(154.125.869,00)	93,84		
01.2.06.07.5.2	BELANJA MODAL	7.275.000,00	7.200.000,00	(75.000,00)	98,97		
01.2.06.07.5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	7.275.000,00	7.200.000,00	(75.000,00)	98,97		
01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	795.497.687,00	783.553.194,00	(11.944.493,00)	98,50		
01.2.06.08.5.1	BELANJA OPERASI	795.497.687,00	783.553.194,00	(11.944.493,00)	98,50		
01.2.06.08.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	795.497.687,00	783.553.194,00	(11.944.493,00)	98,50		
01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	17.658.477.031,00	17.488.822.889,00	(169.654.142,00)	99,04		
01.2.06.09.5.1	BELANJA OPERASI	17.658.477.031,00	17.488.822.889,00	(169.654.142,00)	99,04		
01.2.06.09.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	17.658.477.031,00	17.488.822.889,00	(169.654.142,00)	99,04		
01.2.06.10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	494.404.976,00	401.774.849,00	(92.630.127,00)	81,26		
01.2.06.10.5.1	BELANJA OPERASI	494.404.976,00	401.774.849,00	(92.630.127,00)	81,26		
01.2.06.10.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	494.404.976,00	401.774.849,00	(92.630.127,00)	81,26		
01.2.06.11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	41.756.372,00	40.493.400,00	(1.262.972,00)	96,98		
01.2.06.11.5.1	BELANJA OPERASI	41.756.372,00	40.493.400,00	(1.262.972,00)	96,98		
01.2.06.11.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	41.756.372,00	40.493.400,00	(1.262.972,00)	96,98		
01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	23.137.063.497,00	22.619.905.681,00	(517.157.816,00)	97,76		
01.2.07.01	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	4.717.168.154,00	4.676.360.750,00	(40.807.404,00)	99,13		
01.2.07.01.5.2	BELANJA MODAL	4.717.168.154,00	4.676.360.750,00	(40.807.404,00)	99,13		

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM	KETERANGAN
		ANGGARAN	REALISASI	(Rp)	(%)		
01.2.07.01.5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	4.717.168.154,00	4.676.360.750,00	(40.807.404,00)	99,13		
01.2.07.02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	10.033.538.182,00	9.828.712.535,00	(204.825.647,00)	97,96		
01.2.07.02.5.1	BELANJA OPERASI	6.039.934.480,00	5.883.266.200,00	(156.668.280,00)	97,41		
01.2.07.02.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	6.039.934.480,00	5.883.266.200,00	(156.668.280,00)	97,41		
01.2.07.02.5.2	BELANJA MODAL	3.993.603.702,00	3.945.446.335,00	(48.157.367,00)	98,79		
01.2.07.02.5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	3.993.603.702,00	3.945.446.335,00	(48.157.367,00)	98,79		
01.2.07.05	Pengadaan Mebel	117.032.362,00	116.731.500,00	(300.862,00)	99,74		
01.2.07.05.5.2	BELANJA MODAL	117.032.362,00	116.731.500,00	(300.862,00)	99,74		
01.2.07.05.5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	117.032.362,00	116.731.500,00	(300.862,00)	99,74		
01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	2.123.793.824,00	2.089.876.496,00	(33.917.328,00)	98,40		
01.2.07.06.5.1	BELANJA OPERASI	83.037.270,00	77.196.550,00	(5.840.720,00)	92,97		
01.2.07.06.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	83.037.270,00	77.196.550,00	(5.840.720,00)	92,97		
01.2.07.06.5.2	BELANJA MODAL	2.040.756.554,00	2.012.679.946,00	(28.076.608,00)	98,62		
01.2.07.06.5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	2.040.756.554,00	2.012.679.946,00	(28.076.608,00)	98,62		
01.2.07.09	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	455.287.572,00	453.454.000,00	(1.833.572,00)	99,60		
01.2.07.09.5.2	BELANJA MODAL	455.287.572,00	453.454.000,00	(1.833.572,00)	99,60		
01.2.07.09.5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	255.580.812,00	254.854.000,00	(726.812,00)	99,72		
01.2.07.09.5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	199.706.760,00	198.600.000,00	(1.106.760,00)	99,45		
01.2.07.10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	238.032.366,00	236.214.000,00	(1.818.366,00)	99,24		
01.2.07.10.5.1	BELANJA OPERASI	40.974.002,00	40.135.000,00	(839.002,00)	97,95		
01.2.07.10.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	40.974.002,00	40.135.000,00	(839.002,00)	97,95		
01.2.07.10.5.2	BELANJA MODAL	197.058.364,00	196.079.000,00	(979.364,00)	99,50		
01.2.07.10.5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	197.058.364,00	196.079.000,00	(979.364,00)	99,50		
01.2.07.11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	5.452.211.037,00	5.218.556.400,00	(233.654.637,00)	95,71		
01.2.07.11.5.1	BELANJA OPERASI	66.755.000,00	65.300.000,00	(1.455.000,00)	97,82		
01.2.07.11.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	66.755.000,00	65.300.000,00	(1.455.000,00)	97,82		
01.2.07.11.5.2	BELANJA MODAL	5.385.456.037,00	5.153.256.400,00	(232.199.637,00)	95,69		
01.2.07.11.5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	1.537.355.279,00	1.481.303.900,00	(56.051.379,00)	96,35		
01.2.07.11.5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	3.731.402.400,00	3.555.495.000,00	(175.907.400,00)	95,29		
01.2.07.11.5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	116.698.358,00	116.457.500,00	(240.858,00)	99,79		
01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	20.360.967.219,00	18.958.580.697,00	(1.402.386.522,00)	93,11		
01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	417.589.966,00	381.932.420,00	(35.657.546,00)	91,46		
01.2.08.01.5.1	BELANJA OPERASI	373.847.086,00	353.034.420,00	(20.812.666,00)	94,43		
01.2.08.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	373.847.086,00	353.034.420,00	(20.812.666,00)	94,43		
01.2.08.01.5.2	BELANJA MODAL	43.742.880,00	28.898.000,00	(14.844.880,00)	66,06		
01.2.08.01.5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	43.742.880,00	28.898.000,00	(14.844.880,00)	66,06		
01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	4.788.105.630,00	4.228.077.877,00	(560.027.753,00)	88,30		

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM	KETERANGAN
		ANGGARAN	REALISASI	(Rp)	(%)		
01.2.08.02.5.1	BELANJA OPERASI	4.788.105.630,00	4.228.077.877,00	(560.027.753,00)	88,30		
01.2.08.02.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	4.788.105.630,00	4.228.077.877,00	(560.027.753,00)	88,30		
01.2.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	1.355.196.547,00	1.317.008.582,00	(38.187.965,00)	97,18		
01.2.08.03.5.1	BELANJA OPERASI	633.585.347,00	600.064.382,00	(33.520.965,00)	94,71		
01.2.08.03.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	633.585.347,00	600.064.382,00	(33.520.965,00)	94,71		
01.2.08.03.5.2	BELANJA MODAL	721.611.200,00	716.944.200,00	(4.667.000,00)	99,35		
01.2.08.03.5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	721.611.200,00	716.944.200,00	(4.667.000,00)	99,35		
01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	13.800.075.076,00	13.031.561.818,00	(768.513.258,00)	94,43		
01.2.08.04.5.1	BELANJA OPERASI	13.300.153.466,00	12.532.625.918,00	(767.527.548,00)	94,23		
01.2.08.04.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	13.300.153.466,00	12.532.625.918,00	(767.527.548,00)	94,23		
01.2.08.04.5.2	BELANJA MODAL	499.921.610,00	498.935.900,00	(985.710,00)	99,80		
01.2.08.04.5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	499.921.610,00	498.935.900,00	(985.710,00)	99,80		
01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	14.166.819.433,00	13.552.307.716,04	(614.511.716,96)	95,66		
01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	2.977.463.114,00	2.833.235.030,00	(144.228.084,00)	95,16		
01.2.09.01.5.1	BELANJA OPERASI	2.977.463.114,00	2.833.235.030,00	(144.228.084,00)	95,16		
01.2.09.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.977.463.114,00	2.833.235.030,00	(144.228.084,00)	95,16		
01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	4.583.156.615,00	4.363.179.940,00	(219.976.675,00)	95,20		
01.2.09.02.5.1	BELANJA OPERASI	4.583.156.615,00	4.363.179.940,00	(219.976.675,00)	95,20		
01.2.09.02.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	4.583.156.615,00	4.363.179.940,00	(219.976.675,00)	95,20		
01.2.09.03	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar	645.258.000,00	529.744.500,00	(115.513.500,00)	82,10		
01.2.09.03.5.1	BELANJA OPERASI	645.258.000,00	529.744.500,00	(115.513.500,00)	82,10		
01.2.09.03.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	645.258.000,00	529.744.500,00	(115.513.500,00)	82,10		
01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	1.349.897.605,00	1.304.830.821,00	(45.066.784,00)	96,66		
01.2.09.06.5.1	BELANJA OPERASI	1.349.897.605,00	1.304.830.821,00	(45.066.784,00)	96,66		
01.2.09.06.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.349.897.605,00	1.304.830.821,00	(45.066.784,00)	96,66		
01.2.09.07	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	69.537.171,00	69.462.000,00	(75.171,00)	99,89		
01.2.09.07.5.1	BELANJA OPERASI	69.537.171,00	69.462.000,00	(75.171,00)	99,89		
01.2.09.07.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	69.537.171,00	69.462.000,00	(75.171,00)	99,89		
01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	3.961.387.743,00	3.876.281.492,04	(85.106.250,96)	97,85		
01.2.09.09.5.1	BELANJA OPERASI	3.391.102.952,00	3.307.830.659,04	(83.272.292,96)	97,54		
01.2.09.09.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	3.391.102.952,00	3.307.830.659,04	(83.272.292,96)	97,54		
01.2.09.09.5.2	BELANJA MODAL	570.284.791,00	568.450.833,00	(1.833.958,00)	99,68		
01.2.09.09.5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	147.113.650,00	146.989.000,00	(124.650,00)	99,92		

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM	KETERANGAN
		ANGGARAN	REALISASI	(Rp)	(%)		
01.2.09.09.5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	423.171.141,00	421.461.833,00	(1.709.308,00)	99,60		
01.2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	342.015.085,00	338.525.933,00	(3.489.152,00)	98,98		
01.2.09.10.5.1	BELANJA OPERASI	142.015.085,00	140.536.343,00	(1.478.742,00)	98,96		
01.2.09.10.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	142.015.085,00	140.536.343,00	(1.478.742,00)	98,96		
01.2.09.10.5.2	BELANJA MODAL	200.000.000,00	197.989.590,00	(2.010.410,00)	98,99		
01.2.09.10.5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	200.000.000,00	197.989.590,00	(2.010.410,00)	98,99		
01.2.09.11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	238.104.100,00	237.048.000,00	(1.056.100,00)	99,56		
01.2.09.11.5.1	BELANJA OPERASI	235.604.100,00	234.548.000,00	(1.056.100,00)	99,55		
01.2.09.11.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	235.604.100,00	234.548.000,00	(1.056.100,00)	99,55		
01.2.09.11.5.2	BELANJA MODAL	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	100,00		
01.2.09.11.5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	100,00		
01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	21.612.493.129,00	17.246.474.487,00	(4.366.018.642,00)	79,80		
01.2.10.01	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	21.612.493.129,00	17.246.474.487,00	(4.366.018.642,00)	79,80		
01.2.10.01.5.1	BELANJA OPERASI	18.847.493.129,00	14.934.420.711,00	(3.913.072.418,00)	79,24		
01.2.10.01.5.1.01	Belanja Pegawai	436.647.312,00	260.826.239,00	(175.821.073,00)	59,73		
01.2.10.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	18.410.845.817,00	14.673.594.472,00	(3.737.251.345,00)	79,70		
01.2.10.01.5.2	BELANJA MODAL	2.765.000.000,00	2.312.053.776,00	(452.946.224,00)	83,62		
01.2.10.01.5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	2.765.000.000,00	2.312.053.776,00	(452.946.224,00)	83,62		
01.2.11	Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	1.469.449.000,00	1.257.090.118,00	(212.358.882,00)	85,55		
01.2.11.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	691.955.000,00	568.331.474,00	(123.623.526,00)	82,13		
01.2.11.01.5.1	BELANJA OPERASI	691.955.000,00	568.331.474,00	(123.623.526,00)	82,13		
01.2.11.01.5.1.01	Belanja Pegawai	691.955.000,00	568.331.474,00	(123.623.526,00)	82,13		
01.2.11.02	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	88.134.000,00	87.991.000,00	(143.000,00)	99,84		
01.2.11.02.5.1	BELANJA OPERASI	88.134.000,00	87.991.000,00	(143.000,00)	99,84		
01.2.11.02.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	88.134.000,00	87.991.000,00	(143.000,00)	99,84		
01.2.11.03	Pelaksanaan Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	689.360.000,00	600.767.644,00	(88.592.356,00)	87,15		
01.2.11.03.5.1	BELANJA OPERASI	689.360.000,00	600.767.644,00	(88.592.356,00)	87,15		
01.2.11.03.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	689.360.000,00	600.767.644,00	(88.592.356,00)	87,15		
01.2.12	Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah	1.292.269.474,00	1.088.905.400,00	(203.364.074,00)	84,26		
01.2.12.01	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah	687.275.720,00	541.164.800,00	(146.110.920,00)	78,74		
01.2.12.01.5.1	BELANJA OPERASI	546.114.245,00	541.164.800,00	(4.949.445,00)	99,09		
01.2.12.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	546.114.245,00	541.164.800,00	(4.949.445,00)	99,09		
01.2.12.01.5.2	BELANJA MODAL	141.161.475,00	0,00	(141.161.475,00)	0		
01.2.12.01.5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	141.161.475,00	0,00	(141.161.475,00)	0		

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM	KETERANGAN
		ANGGARAN	REALISASI	(Rp)	(%)		
01.2.12.02	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah	479.353.853,00	440.150.600,00	(39.203.253,00)	91,82		
01.2.12.02.5.1	BELANJA OPERASI	472.693.853,00	440.150.600,00	(32.543.253,00)	93,12		
01.2.12.02.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	472.693.853,00	440.150.600,00	(32.543.253,00)	93,12		
01.2.12.02.5.2	BELANJA MODAL	6.660.000,00	0,00	(6.660.000,00)	0		
01.2.12.02.5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	6.660.000,00	0,00	(6.660.000,00)	0		
01.2.12.03	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah	125.639.901,00	107.590.000,00	(18.049.901,00)	85,63		
01.2.12.03.5.2	BELANJA MODAL	125.639.901,00	107.590.000,00	(18.049.901,00)	85,63		
01.2.12.03.5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	125.639.901,00	107.590.000,00	(18.049.901,00)	85,63		
01.2.13	Penataan Organisasi	1.093.148.892,00	1.042.765.964,00	(50.382.928,00)	95,39		
01.2.13.01	Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	354.986.907,00	348.584.806,00	(6.402.101,00)	98,20		
01.2.13.01.5.1	BELANJA OPERASI	354.986.907,00	348.584.806,00	(6.402.101,00)	98,20		
01.2.13.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	354.986.907,00	348.584.806,00	(6.402.101,00)	98,20		
01.2.13.02	Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	365.794.877,00	349.098.505,00	(16.696.372,00)	95,44		
01.2.13.02.5.1	BELANJA OPERASI	365.794.877,00	349.098.505,00	(16.696.372,00)	95,44		
01.2.13.02.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	365.794.877,00	349.098.505,00	(16.696.372,00)	95,44		
01.2.13.03	Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	119.726.729,00	114.125.881,00	(5.600.848,00)	95,32		
01.2.13.03.5.1	BELANJA OPERASI	119.726.729,00	114.125.881,00	(5.600.848,00)	95,32		
01.2.13.03.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	119.726.729,00	114.125.881,00	(5.600.848,00)	95,32		
01.2.13.04	Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana	9.082.400,00	1.598.400,00	(7.484.000,00)	17,60		
01.2.13.04.5.1	BELANJA OPERASI	9.082.400,00	1.598.400,00	(7.484.000,00)	17,60		
01.2.13.04.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	9.082.400,00	1.598.400,00	(7.484.000,00)	17,60		
01.2.13.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah	243.557.979,00	229.358.372,00	(14.199.607,00)	94,17		
01.2.13.05.5.1	BELANJA OPERASI	243.557.979,00	229.358.372,00	(14.199.607,00)	94,17		
01.2.13.05.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	243.557.979,00	229.358.372,00	(14.199.607,00)	94,17		
01.2.14	Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan	1.226.850.241,00	1.218.357.300,00	(8.492.941,00)	99,31		
01.2.14.01	Fasilitasi Keprotokolan	983.339.441,00	976.749.713,00	(6.589.728,00)	99,33		
01.2.14.01.5.1	BELANJA OPERASI	983.339.441,00	976.749.713,00	(6.589.728,00)	99,33		
01.2.14.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	983.339.441,00	976.749.713,00	(6.589.728,00)	99,33		
01.2.14.02	Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	243.510.800,00	241.607.587,00	(1.903.213,00)	99,22		
01.2.14.02.5.1	BELANJA OPERASI	243.510.800,00	241.607.587,00	(1.903.213,00)	99,22		
01.2.14.02.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	243.510.800,00	241.607.587,00	(1.903.213,00)	99,22		
01.2.15	Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD	13.444.173.830,00	13.340.454.968,00	(103.718.862,00)	99,23		
01.2.15.01	Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD	12.332.111.830,00	12.240.263.568,00	(91.848.262,00)	99,26		
01.2.15.01.5.1	BELANJA OPERASI	12.332.111.830,00	12.240.263.568,00	(91.848.262,00)	99,26		
01.2.15.01.5.1.01	Belanja Pegawai	12.332.111.830,00	12.240.263.568,00	(91.848.262,00)	99,26		
01.2.15.02	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD	641.358.000,00	638.045.500,00	(3.312.500,00)	99,48		

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM	KETERANGAN
		ANGGARAN	REALISASI	(Rp)	(%)		
01.2.15.02.5.1	BELANJA OPERASI	641.358.000,00	638.045.500,00	(3.312.500,00)	99,48		
01.2.15.02.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	641.358.000,00	638.045.500,00	(3.312.500,00)	99,48		
01.2.15.03	Pelaksanaan Medical Check Up DPRD	470.704.000,00	462.145.900,00	(8.558.100,00)	98,18		
01.2.15.03.5.1	BELANJA OPERASI	470.704.000,00	462.145.900,00	(8.558.100,00)	98,18		
01.2.15.03.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	470.704.000,00	462.145.900,00	(8.558.100,00)	98,18		
01.2.16	Layanan Administrasi DPRD	1.374.636.730,00	1.353.262.396,00	(21.374.334,00)	98,45		
01.2.16.02	Fasilitasi Fraksi DPRD	343.095.558,00	331.784.640,00	(11.310.918,00)	96,70		
01.2.16.02.5.1	BELANJA OPERASI	343.095.558,00	331.784.640,00	(11.310.918,00)	96,70		
01.2.16.02.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	343.095.558,00	331.784.640,00	(11.310.918,00)	96,70		
01.2.16.03	Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	152.624.437,00	146.714.700,00	(5.909.737,00)	96,13		
01.2.16.03.5.1	BELANJA OPERASI	152.624.437,00	146.714.700,00	(5.909.737,00)	96,13		
01.2.16.03.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	152.624.437,00	146.714.700,00	(5.909.737,00)	96,13		
01.2.16.04	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga DPRD	878.916.735,00	874.763.056,00	(4.153.679,00)	99,53		
01.2.16.04.5.1	BELANJA OPERASI	878.916.735,00	874.763.056,00	(4.153.679,00)	99,53		
01.2.16.04.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	878.916.735,00	874.763.056,00	(4.153.679,00)	99,53		
02	**PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN**	85.529.242.342,00	80.015.649.570,71	(5.513.592.771,29)	93,55		
02.2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	46.433.292.943,00	45.109.910.897,71	(1.323.382.045,29)	97,15		
02.2.01.02	Penambahan Ruang Kelas Baru	3.684.146.000,00	3.672.508.750,00	(11.637.250,00)	99,68		
02.2.01.02.5.2	BELANJA MODAL	3.684.146.000,00	3.672.508.750,00	(11.637.250,00)	99,68		
02.2.01.02.5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	3.684.146.000,00	3.672.508.750,00	(11.637.250,00)	99,68		
02.2.01.03	Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	1.968.656.000,00	1.926.458.503,00	(42.197.497,00)	97,86		
02.2.01.03.5.2	BELANJA MODAL	1.968.656.000,00	1.926.458.503,00	(42.197.497,00)	97,86		
02.2.01.03.5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	1.968.656.000,00	1.926.458.503,00	(42.197.497,00)	97,86		
02.2.01.04	Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah	786.386.000,00	701.139.499,00	(85.246.501,00)	89,16		
02.2.01.04.5.2	BELANJA MODAL	786.386.000,00	701.139.499,00	(85.246.501,00)	89,16		
02.2.01.04.5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	786.386.000,00	701.139.499,00	(85.246.501,00)	89,16		
02.2.01.05	Pembangunan Perpustakaan Sekolah	1.708.564.000,00	1.704.725.465,00	(3.838.535,00)	99,78		
02.2.01.05.5.2	BELANJA MODAL	1.708.564.000,00	1.704.725.465,00	(3.838.535,00)	99,78		
02.2.01.05.5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	1.708.564.000,00	1.704.725.465,00	(3.838.535,00)	99,78		
02.2.01.06	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	3.579.167.000,00	3.562.933.883,00	(16.233.117,00)	99,55		
02.2.01.06.5.2	BELANJA MODAL	3.579.167.000,00	3.562.933.883,00	(16.233.117,00)	99,55		
02.2.01.06.5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	3.579.167.000,00	3.562.933.883,00	(16.233.117,00)	99,55		
02.2.01.08	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas	4.712.727.000,00	4.677.069.490,00	(35.657.510,00)	99,24		
02.2.01.08.5.2	BELANJA MODAL	4.712.727.000,00	4.677.069.490,00	(35.657.510,00)	99,24		
02.2.01.08.5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	4.712.727.000,00	4.677.069.490,00	(35.657.510,00)	99,24		
02.2.01.09	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	170.000.000,00	169.231.650,00	(768.350,00)	99,55		
02.2.01.09.5.2	BELANJA MODAL	170.000.000,00	169.231.650,00	(768.350,00)	99,55		
02.2.01.09.5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	170.000.000,00	169.231.650,00	(768.350,00)	99,55		

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM	KETERANGAN
		ANGGARAN	REALISASI	(Rp)	(%)		
02.2.01.13	Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah	573.940.000,00	570.574.500,00	(3.365.500,00)	99,41		
02.2.01.13.5.2	BELANJA MODAL	573.940.000,00	570.574.500,00	(3.365.500,00)	99,41		
02.2.01.13.5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	573.940.000,00	570.574.500,00	(3.365.500,00)	99,41		
02.2.01.14	Pengadaan Mebel Sekolah	542.250.000,00	532.650.000,00	(9.600.000,00)	98,23		
02.2.01.14.5.2	BELANJA MODAL	542.250.000,00	532.650.000,00	(9.600.000,00)	98,23		
02.2.01.14.5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	542.250.000,00	532.650.000,00	(9.600.000,00)	98,23		
02.2.01.21	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar	2.034.834.264,00	2.033.844.264,00	(990.000,00)	99,95		
02.2.01.21.5.1	BELANJA OPERASI	2.034.834.264,00	2.033.844.264,00	(990.000,00)	99,95		
02.2.01.21.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.034.834.264,00	2.033.844.264,00	(990.000,00)	99,95		
02.2.01.22	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa	348.886.050,00	272.350.000,00	(76.536.050,00)	78,06		
02.2.01.22.5.2	BELANJA MODAL	348.886.050,00	272.350.000,00	(76.536.050,00)	78,06		
02.2.01.22.5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	348.886.050,00	272.350.000,00	(76.536.050,00)	78,06		
02.2.01.23	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	184.275.670,00	182.115.400,00	(2.160.270,00)	98,83		
02.2.01.23.5.1	BELANJA OPERASI	184.275.670,00	182.115.400,00	(2.160.270,00)	98,83		
02.2.01.23.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	184.275.670,00	182.115.400,00	(2.160.270,00)	98,83		
02.2.01.24	Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan Dasar	63.326.000,00	61.166.400,00	(2.159.600,00)	96,59		
02.2.01.24.5.1	BELANJA OPERASI	63.326.000,00	61.166.400,00	(2.159.600,00)	96,59		
02.2.01.24.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	63.326.000,00	61.166.400,00	(2.159.600,00)	96,59		
02.2.01.26	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	3.945.204.458,00	3.674.730.026,00	(270.474.432,00)	93,14		
02.2.01.26.5.1	BELANJA OPERASI	3.945.204.458,00	3.674.730.026,00	(270.474.432,00)	93,14		
02.2.01.26.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	3.945.204.458,00	3.674.730.026,00	(270.474.432,00)	93,14		
02.2.01.27	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	784.330.276,00	595.923.532,00	(188.406.744,00)	75,98		
02.2.01.27.5.1	BELANJA OPERASI	784.330.276,00	595.923.532,00	(188.406.744,00)	75,98		
02.2.01.27.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	784.330.276,00	595.923.532,00	(188.406.744,00)	75,98		
02.2.01.28	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	3.208.596.085,00	2.927.979.363,00	(280.616.722,00)	91,25		
02.2.01.28.5.1	BELANJA OPERASI	3.044.571.545,00	2.766.879.363,00	(277.692.182,00)	90,88		
02.2.01.28.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	3.044.571.545,00	2.766.879.363,00	(277.692.182,00)	90,88		
02.2.01.28.5.2	BELANJA MODAL	164.024.540,00	161.100.000,00	(2.924.540,00)	98,22		
02.2.01.28.5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	164.024.540,00	161.100.000,00	(2.924.540,00)	98,22		
02.2.01.29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	16.591.119.548,00	16.310.460.000,71	(280.659.547,29)	98,31		
02.2.01.29.5.1	BELANJA OPERASI	13.909.569.420,00	13.547.657.844,71	(361.911.575,29)	97,40		
02.2.01.29.5.1.01	Belanja Pegawai	2.562.787.000,00	2.353.876.500,00	(208.910.500,00)	91,85		
02.2.01.29.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	11.346.782.420,00	11.193.781.344,71	(153.001.075,29)	98,65		
02.2.01.29.5.2	BELANJA MODAL	2.681.550.128,00	2.762.802.156,00	81.252.028,00	103,03		
02.2.01.29.5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	2.186.061.450,00	1.928.267.919,00	(257.793.531,00)	88,21		

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM	KETERANGAN
		ANGGARAN	REALISASI	(Rp)	(%)		
02.2.01.29.5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	495.488.678,00	834.534.237,00	339.045.559,00	168,43		
02.2.01.30	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	404.936.592,00	398.906.392,00	(6.030.200,00)	98,51		
02.2.01.30.5.1	BELANJA OPERASI	404.936.592,00	398.906.392,00	(6.030.200,00)	98,51		
02.2.01.30.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	404.936.592,00	398.906.392,00	(6.030.200,00)	98,51		
02.2.01.31	Pembangunan Laboratorium Sekolah Dasar	1.141.948.000,00	1.135.143.780,00	(6.804.220,00)	99,40		
02.2.01.31.5.1	BELANJA OPERASI	369.650.000,00	368.799.000,00	(851.000,00)	99,77		
02.2.01.31.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	369.650.000,00	368.799.000,00	(851.000,00)	99,77		
02.2.01.31.5.2	BELANJA MODAL	772.298.000,00	766.344.780,00	(5.953.220,00)	99,23		
02.2.01.31.5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	772.298.000,00	766.344.780,00	(5.953.220,00)	99,23		
02.2.02	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	31.335.731.387,00	30.258.038.857,00	(1.077.692.530,00)	96,56		
02.2.02.02	Penambahan Ruang Kelas Baru	1.430.438.154,00	1.337.819.737,00	(92.618.417,00)	93,53		
02.2.02.02.5.1	BELANJA OPERASI	592.874.154,00	564.202.475,00	(28.671.679,00)	95,16		
02.2.02.02.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	592.874.154,00	564.202.475,00	(28.671.679,00)	95,16		
02.2.02.02.5.2	BELANJA MODAL	837.564.000,00	773.617.262,00	(63.946.738,00)	92,37		
02.2.02.02.5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	837.564.000,00	773.617.262,00	(63.946.738,00)	92,37		
02.2.02.03	Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	1.817.530.000,00	1.804.104.800,00	(13.425.200,00)	99,26		
02.2.02.03.5.2	BELANJA MODAL	1.817.530.000,00	1.804.104.800,00	(13.425.200,00)	99,26		
02.2.02.03.5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	1.817.530.000,00	1.804.104.800,00	(13.425.200,00)	99,26		
02.2.02.04	Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah	1.658.032.000,00	1.653.249.500,00	(4.782.500,00)	99,71		
02.2.02.04.5.2	BELANJA MODAL	1.658.032.000,00	1.653.249.500,00	(4.782.500,00)	99,71		
02.2.02.04.5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	1.658.032.000,00	1.653.249.500,00	(4.782.500,00)	99,71		
02.2.02.05	Pembangunan Perpustakaan Sekolah	423.869.000,00	422.810.750,00	(1.058.250,00)	99,75		
02.2.02.05.5.2	BELANJA MODAL	423.869.000,00	422.810.750,00	(1.058.250,00)	99,75		
02.2.02.05.5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	423.869.000,00	422.810.750,00	(1.058.250,00)	99,75		
02.2.02.06	Pembangunan Laboratorium	5.350.974.000,00	5.313.065.730,00	(37.908.270,00)	99,29		
02.2.02.06.5.2	BELANJA MODAL	5.350.974.000,00	5.313.065.730,00	(37.908.270,00)	99,29		
02.2.02.06.5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	5.350.974.000,00	5.313.065.730,00	(37.908.270,00)	99,29		
02.2.02.12	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	1.622.164.000,00	1.603.838.000,00	(18.326.000,00)	98,87		
02.2.02.12.5.2	BELANJA MODAL	1.622.164.000,00	1.603.838.000,00	(18.326.000,00)	98,87		
02.2.02.12.5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	1.622.164.000,00	1.603.838.000,00	(18.326.000,00)	98,87		
02.2.02.14	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	3.208.205.000,00	3.113.329.000,00	(94.876.000,00)	97,04		
02.2.02.14.5.2	BELANJA MODAL	3.208.205.000,00	3.113.329.000,00	(94.876.000,00)	97,04		
02.2.02.14.5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	3.208.205.000,00	3.113.329.000,00	(94.876.000,00)	97,04		
02.2.02.15	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru Sekolah	55.855.000,00	55.700.000,00	(155.000,00)	99,72		
02.2.02.15.5.2	BELANJA MODAL	55.855.000,00	55.700.000,00	(155.000,00)	99,72		
02.2.02.15.5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	55.855.000,00	55.700.000,00	(155.000,00)	99,72		
02.2.02.16	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Unit Kesehatan Sekolah	215.750.000,00	215.245.617,00	(504.383,00)	99,77		
02.2.02.16.5.2	BELANJA MODAL	215.750.000,00	215.245.617,00	(504.383,00)	99,77		

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM	KETERANGAN
		ANGGARAN	REALISASI	(Rp)	(%)		
02.2.02.16.5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	215.750.000,00	215.245.617,00	(504.383,00)	99,77		
02.2.02.17	Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah	537.878.000,00	534.687.000,00	(3.191.000,00)	99,41		
02.2.02.17.5.2	BELANJA MODAL	537.878.000,00	534.687.000,00	(3.191.000,00)	99,41		
02.2.02.17.5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	537.878.000,00	534.687.000,00	(3.191.000,00)	99,41		
02.2.02.19	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Serba Guna/Aula	168.000.000,00	167.504.000,00	(496.000,00)	99,70		
02.2.02.19.5.2	BELANJA MODAL	168.000.000,00	167.504.000,00	(496.000,00)	99,70		
02.2.02.19.5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	168.000.000,00	167.504.000,00	(496.000,00)	99,70		
02.2.02.25	Pengadaan Mebel Sekolah	190.500.000,00	189.580.000,00	(920.000,00)	99,52		
02.2.02.25.5.2	BELANJA MODAL	190.500.000,00	189.580.000,00	(920.000,00)	99,52		
02.2.02.25.5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	190.500.000,00	189.580.000,00	(920.000,00)	99,52		
02.2.02.32	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama	1.034.854.264,00	1.033.864.264,00	(990.000,00)	99,90		
02.2.02.32.5.1	BELANJA OPERASI	1.034.854.264,00	1.033.864.264,00	(990.000,00)	99,90		
02.2.02.32.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.034.854.264,00	1.033.864.264,00	(990.000,00)	99,90		
02.2.02.35	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa	501.746.550,00	501.188.000,00	(558.550,00)	99,89		
02.2.02.35.5.2	BELANJA MODAL	501.746.550,00	501.188.000,00	(558.550,00)	99,89		
02.2.02.35.5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	501.746.550,00	501.188.000,00	(558.550,00)	99,89		
02.2.02.36	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	185.403.670,00	176.493.600,00	(8.910.070,00)	95,19		
02.2.02.36.5.1	BELANJA OPERASI	185.403.670,00	176.493.600,00	(8.910.070,00)	95,19		
02.2.02.36.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	185.403.670,00	176.493.600,00	(8.910.070,00)	95,19		
02.2.02.37	Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	186.466.000,00	185.018.900,00	(1.447.100,00)	99,22		
02.2.02.37.5.1	BELANJA OPERASI	152.236.000,00	151.318.900,00	(917.100,00)	99,40		
02.2.02.37.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	152.236.000,00	151.318.900,00	(917.100,00)	99,40		
02.2.02.37.5.2	BELANJA MODAL	34.230.000,00	33.700.000,00	(530.000,00)	98,45		
02.2.02.37.5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	34.230.000,00	33.700.000,00	(530.000,00)	98,45		
02.2.02.38	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	235.825.200,00	234.507.319,00	(1.317.881,00)	99,44		
02.2.02.38.5.1	BELANJA OPERASI	115.015.200,00	114.907.319,00	(107.881,00)	99,91		
02.2.02.38.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	115.015.200,00	114.907.319,00	(107.881,00)	99,91		
02.2.02.38.5.2	BELANJA MODAL	120.810.000,00	119.600.000,00	(1.210.000,00)	99,00		
02.2.02.38.5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	120.810.000,00	119.600.000,00	(1.210.000,00)	99,00		
02.2.02.39	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	2.927.454.410,00	2.276.948.372,00	(650.506.038,00)	77,78		
02.2.02.39.5.1	BELANJA OPERASI	2.927.454.410,00	2.276.948.372,00	(650.506.038,00)	77,78		
02.2.02.39.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.927.454.410,00	2.276.948.372,00	(650.506.038,00)	77,78		
02.2.02.40	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	398.843.130,00	285.798.951,00	(113.044.179,00)	71,66		
02.2.02.40.5.1	BELANJA OPERASI	398.843.130,00	285.798.951,00	(113.044.179,00)	71,66		

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM	KETERANGAN
		ANGGARAN	REALISASI	(Rp)	(%)		
02.2.02.40.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	398.843.130,00	285.798.951,00	(113.044.179,00)	71,66		
02.2.02.41	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	110.455.196,00	89.110.800,00	(21.344.396,00)	80,68		
02.2.02.41.5.1	BELANJA OPERASI	110.455.196,00	89.110.800,00	(21.344.396,00)	80,68		
02.2.02.41.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	60.072.196,00	38.727.800,00	(21.344.396,00)	64,47		
02.2.02.41.5.1.05	Belanja Hibah	50.383.000,00	50.383.000,00	0,00	100,00		
02.2.02.42	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	8.737.154.913,00	8.726.341.000,00	(10.813.913,00)	99,88		
02.2.02.42.5.1	BELANJA OPERASI	7.393.389.863,00	7.275.182.775,00	(118.207.088,00)	98,40		
02.2.02.42.5.1.01	Belanja Pegawai	1.526.365.800,00	1.422.632.000,00	(103.733.800,00)	93,20		
02.2.02.42.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	5.867.024.063,00	5.852.550.775,00	(14.473.288,00)	99,75		
02.2.02.42.5.2	BELANJA MODAL	1.343.765.050,00	1.451.158.225,00	107.393.175,00	107,99		
02.2.02.42.5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	916.111.950,00	904.876.709,00	(11.235.241,00)	98,77		
02.2.02.42.5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	427.653.100,00	546.281.516,00	118.628.416,00	127,74		
02.2.02.43	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	338.332.900,00	337.833.517,00	(499.383,00)	99,85		
02.2.02.43.5.1	BELANJA OPERASI	338.332.900,00	337.833.517,00	(499.383,00)	99,85		
02.2.02.43.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	338.332.900,00	337.833.517,00	(499.383,00)	99,85		
02.2.03	Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	7.484.811.767,00	4.533.939.916,00	(2.950.871.851,00)	60,58		
02.2.03.01	Pembangunan Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD	888.633.000,00	877.740.940,00	(10.892.060,00)	98,77		
02.2.03.01.5.1	BELANJA OPERASI	16.376.000,00	13.530.000,00	(2.846.000,00)	82,62		
02.2.03.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	16.376.000,00	13.530.000,00	(2.846.000,00)	82,62		
02.2.03.01.5.2	BELANJA MODAL	872.257.000,00	864.210.940,00	(8.046.060,00)	99,08		
02.2.03.01.5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	872.257.000,00	864.210.940,00	(8.046.060,00)	99,08		
02.2.03.02	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD	514.728.490,00	498.860.716,00	(15.867.774,00)	96,92		
02.2.03.02.5.1	BELANJA OPERASI	433.458.490,00	431.480.517,00	(1.977.973,00)	99,54		
02.2.03.02.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	75.371.560,00	74.500.617,00	(870.943,00)	98,84		
02.2.03.02.5.1.05	Belanja Hibah	358.086.930,00	356.979.900,00	(1.107.030,00)	99,69		
02.2.03.02.5.2	BELANJA MODAL	81.270.000,00	67.380.199,00	(13.889.801,00)	82,91		
02.2.03.02.5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	81.270.000,00	67.380.199,00	(13.889.801,00)	82,91		
02.2.03.03	Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD	293.500.000,00	279.556.131,00	(13.943.869,00)	95,25		
02.2.03.03.5.1	BELANJA OPERASI	228.250.000,00	227.918.749,00	(331.251,00)	99,85		
02.2.03.03.5.1.05	Belanja Hibah	228.250.000,00	227.918.749,00	(331.251,00)	99,85		
02.2.03.03.5.2	BELANJA MODAL	65.250.000,00	51.637.382,00	(13.612.618,00)	79,14		
02.2.03.03.5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	65.250.000,00	51.637.382,00	(13.612.618,00)	79,14		
02.2.03.04	Rehabilitasi Sedang/Berat Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD	469.750.000,00	348.566.550,00	(121.183.450,00)	74,20		
02.2.03.04.5.1	BELANJA OPERASI	298.250.000,00	199.530.350,00	(98.719.650,00)	66,90		
02.2.03.04.5.1.05	Belanja Hibah	298.250.000,00	199.530.350,00	(98.719.650,00)	66,90		
02.2.03.04.5.2	BELANJA MODAL	171.500.000,00	149.036.200,00	(22.463.800,00)	86,90		
02.2.03.04.5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	171.500.000,00	149.036.200,00	(22.463.800,00)	86,90		

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM	KETERANGAN
		ANGGARAN	REALISASI	(Rp)	(%)		
02.2.03.07	Pengadaan Mebel PAUD	61.550.000,00	60.090.000,00	(1.460.000,00)	97,63		
02.2.03.07.5.2	BELANJA MODAL	61.550.000,00	60.090.000,00	(1.460.000,00)	97,63		
02.2.03.07.5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	61.550.000,00	60.090.000,00	(1.460.000,00)	97,63		
02.2.03.12	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa PAUD	458.316.000,00	455.553.200,00	(2.762.800,00)	99,40		
02.2.03.12.5.1	BELANJA OPERASI	353.334.000,00	351.253.000,00	(2.081.000,00)	99,41		
02.2.03.12.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	39.834.000,00	38.909.000,00	(925.000,00)	97,68		
02.2.03.12.5.1.05	Belanja Hibah	313.500.000,00	312.344.000,00	(1.156.000,00)	99,63		
02.2.03.12.5.2	BELANJA MODAL	104.982.000,00	104.300.200,00	(681.800,00)	99,35		
02.2.03.12.5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	36.000.000,00	35.700.000,00	(300.000,00)	99,17		
02.2.03.12.5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	68.982.000,00	68.600.200,00	(381.800,00)	99,45		
02.2.03.13	Penyelenggaraan Proses Belajar PAUD	467.964.764,00	429.597.500,00	(38.367.264,00)	91,80		
02.2.03.13.5.1	BELANJA OPERASI	467.964.764,00	429.597.500,00	(38.367.264,00)	91,80		
02.2.03.13.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	467.964.764,00	429.597.500,00	(38.367.264,00)	91,80		
02.2.03.14	Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan PAUD	772.012.198,00	740.741.123,00	(31.271.075,00)	95,95		
02.2.03.14.5.1	BELANJA OPERASI	772.012.198,00	740.741.123,00	(31.271.075,00)	95,95		
02.2.03.14.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	547.012.198,00	515.741.123,00	(31.271.075,00)	94,28		
02.2.03.14.5.1.05	Belanja Hibah	225.000.000,00	225.000.000,00	0,00	100,00		
02.2.03.15	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan PAUD	353.205.426,00	271.806.156,00	(81.399.270,00)	76,95		
02.2.03.15.5.1	BELANJA OPERASI	353.205.426,00	271.806.156,00	(81.399.270,00)	76,95		
02.2.03.15.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	353.205.426,00	271.806.156,00	(81.399.270,00)	76,95		
02.2.03.17	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD	573.159.889,00	546.427.000,00	(26.732.889,00)	95,34		
02.2.03.17.5.1	BELANJA OPERASI	573.159.889,00	546.427.000,00	(26.732.889,00)	95,34		
02.2.03.17.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	573.159.889,00	546.427.000,00	(26.732.889,00)	95,34		
02.2.03.18	Pengelolaan Dana BOP PAUD	2.631.992.000,00	25.000.600,00	(2.606.991.400,00)	0,95		
02.2.03.18.5.1	BELANJA OPERASI	2.631.992.000,00	25.000.600,00	(2.606.991.400,00)	0,95		
02.2.03.18.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	30.752.000,00	25.000.600,00	(5.751.400,00)	81,30		
02.2.03.18.5.1.05	Belanja Hibah	2.601.240.000,00	0,00	(2.601.240.000,00)	0		
02.2.04	Pengelolaan Pendidikan Non Formal/Kesetaraan	275.406.245,00	113.759.900,00	(161.646.345,00)	41,31		
02.2.04.17	Pengelolaan Dana BOP Sekolah Non Formal/Kesetaraan	125.600.000,00	0,00	(125.600.000,00)	0		
02.2.04.17.5.1	BELANJA OPERASI	125.600.000,00	0,00	(125.600.000,00)	0		
02.2.04.17.5.1.05	Belanja Hibah	125.600.000,00	0,00	(125.600.000,00)	0		
02.2.04.18	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOP Sekolah Non Formal/Kesetaraan	97.099.560,00	71.190.700,00	(25.908.860,00)	73,32		
02.2.04.18.5.1	BELANJA OPERASI	97.099.560,00	71.190.700,00	(25.908.860,00)	73,32		
02.2.04.18.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	97.099.560,00	71.190.700,00	(25.908.860,00)	73,32		
02.2.04.27	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	52.706.685,00	42.569.200,00	(10.137.485,00)	80,77		
02.2.04.27.5.1	BELANJA OPERASI	52.706.685,00	42.569.200,00	(10.137.485,00)	80,77		
02.2.04.27.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	52.706.685,00	42.569.200,00	(10.137.485,00)	80,77		

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM	KETERANGAN
		ANGGARAN	REALISASI	(Rp)	(%)		
02	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**	73.327.333.568,00	66.673.072.619,00	(6.654.260.949,00)	90,93		
02.2.01	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	20.136.293.685,00	19.730.037.619,00	(406.256.066,00)	97,98		
02.2.01.03	Pembangunan Fasilitas Kesehatan Lainnya	2.150.212.834,00	2.083.568.000,00	(66.644.834,00)	96,90		
02.2.01.03.5.1	BELANJA OPERASI	56.000.000,00	0,00	(56.000.000,00)	0		
02.2.01.03.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	56.000.000,00	0,00	(56.000.000,00)	0		
02.2.01.03.5.2	BELANJA MODAL	2.094.212.834,00	2.083.568.000,00	(10.644.834,00)	99,49		
02.2.01.03.5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	2.094.212.834,00	2.083.568.000,00	(10.644.834,00)	99,49		
02.2.01.04	Pembangunan Rumah Dinas Tenaga Kesehatan	248.840.000,00	248.200.000,00	(640.000,00)	99,74		
02.2.01.04.5.2	BELANJA MODAL	248.840.000,00	248.200.000,00	(640.000,00)	99,74		
02.2.01.04.5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	248.840.000,00	248.200.000,00	(640.000,00)	99,74		
02.2.01.11	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Dinas Tenaga Kesehatan	69.903.800,00	69.593.000,00	(310.800,00)	99,56		
02.2.01.11.5.1	BELANJA OPERASI	69.903.800,00	69.593.000,00	(310.800,00)	99,56		
02.2.01.11.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	69.903.800,00	69.593.000,00	(310.800,00)	99,56		
02.2.01.13	Pengadaan Prasarana dan Pendukung Fasilitas Pelayanan Kesehatan	1.795.999.980,00	1.767.000.000,00	(28.999.980,00)	98,39		
02.2.01.13.5.2	BELANJA MODAL	1.795.999.980,00	1.767.000.000,00	(28.999.980,00)	98,39		
02.2.01.13.5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	1.795.999.980,00	1.767.000.000,00	(28.999.980,00)	98,39		
02.2.01.14	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	9.236.658.153,00	9.186.767.200,00	(49.890.953,00)	99,46		
02.2.01.14.5.2	BELANJA MODAL	9.236.658.153,00	9.186.767.200,00	(49.890.953,00)	99,46		
02.2.01.14.5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	9.236.658.153,00	9.186.767.200,00	(49.890.953,00)	99,46		
02.2.01.16	Pengadaan Obat, Vaksin	1.200.001.100,00	1.198.485.042,00	(1.516.058,00)	99,87		
02.2.01.16.5.1	BELANJA OPERASI	1.200.001.100,00	1.198.485.042,00	(1.516.058,00)	99,87		
02.2.01.16.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.200.001.100,00	1.198.485.042,00	(1.516.058,00)	99,87		
02.2.01.17	Pengadaan Bahan Habis Pakai	3.517.183.894,00	3.383.703.564,00	(133.480.330,00)	96,20		
02.2.01.17.5.1	BELANJA OPERASI	3.517.183.894,00	3.383.703.564,00	(133.480.330,00)	96,20		
02.2.01.17.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	3.517.183.894,00	3.383.703.564,00	(133.480.330,00)	96,20		
02.2.01.20	Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	936.276.095,00	822.164.350,00	(114.111.745,00)	87,81		
02.2.01.20.5.1	BELANJA OPERASI	936.276.095,00	822.164.350,00	(114.111.745,00)	87,81		
02.2.01.20.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	936.276.095,00	822.164.350,00	(114.111.745,00)	87,81		
02.2.01.21	Distribusi Alat Kesehatan, Obat, Vaksin, Bahan Medis Habis Pakai (BMHP), Makanan dan Minuman ke Puskesmas serta Fasilitas Kesehatan Lainnya	981.217.829,00	970.556.463,00	(10.661.366,00)	98,91		
02.2.01.21.5.1	BELANJA OPERASI	891.792.829,00	881.256.463,00	(10.536.366,00)	98,82		
02.2.01.21.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	891.792.829,00	881.256.463,00	(10.536.366,00)	98,82		

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM	KETERANGAN
		ANGGARAN	REALISASI	(Rp)	(%)		
02.2.01.21.5.2	BELANJA MODAL	89.425.000,00	89.300.000,00	(125.000,00)	99,86		
02.2.01.21.5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	89.425.000,00	89.300.000,00	(125.000,00)	99,86		
02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	52.961.435.883,00	46.759.970.440,00	(6.201.465.443,00)	88,29		
02.2.02.01	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	1.231.561.200,00	1.089.342.326,40	(142.218.873,60)	88,45		
02.2.02.01.5.1	BELANJA OPERASI	1.231.561.200,00	1.089.342.326,40	(142.218.873,60)	88,45		
02.2.02.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.231.561.200,00	1.089.342.326,40	(142.218.873,60)	88,45		
02.2.02.02	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	1.549.048.116,00	1.215.664.107,40	(333.384.008,60)	78,48		
02.2.02.02.5.1	BELANJA OPERASI	1.549.048.116,00	1.215.664.107,40	(333.384.008,60)	78,48		
02.2.02.02.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.549.048.116,00	1.215.664.107,40	(333.384.008,60)	78,48		
02.2.02.03	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	129.865.204,00	110.644.445,00	(19.220.759,00)	85,20		
02.2.02.03.5.1	BELANJA OPERASI	129.865.204,00	110.644.445,00	(19.220.759,00)	85,20		
02.2.02.03.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	129.865.204,00	110.644.445,00	(19.220.759,00)	85,20		
02.2.02.04	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	411.371.606,00	174.685.837,00	(236.685.769,00)	42,46		
02.2.02.04.5.1	BELANJA OPERASI	411.371.606,00	174.685.837,00	(236.685.769,00)	42,46		
02.2.02.04.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	411.371.606,00	174.685.837,00	(236.685.769,00)	42,46		
02.2.02.05	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	610.632.000,00	506.786.249,00	(103.845.751,00)	82,99		
02.2.02.05.5.1	BELANJA OPERASI	610.632.000,00	506.786.249,00	(103.845.751,00)	82,99		
02.2.02.05.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	610.632.000,00	506.786.249,00	(103.845.751,00)	82,99		
02.2.02.06	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	1.303.378.700,00	1.128.560.991,80	(174.817.708,20)	86,59		
02.2.02.06.5.1	BELANJA OPERASI	1.303.378.700,00	1.128.560.991,80	(174.817.708,20)	86,59		
02.2.02.06.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.303.378.700,00	1.128.560.991,80	(174.817.708,20)	86,59		
02.2.02.07	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	297.183.500,00	329.109.541,80	31.926.041,80	110,74		
02.2.02.07.5.1	BELANJA OPERASI	297.183.500,00	329.109.541,80	31.926.041,80	110,74		
02.2.02.07.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	297.183.500,00	329.109.541,80	31.926.041,80	110,74		
02.2.02.08	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	113.375.641,00	107.307.800,00	(6.067.841,00)	94,65		
02.2.02.08.5.1	BELANJA OPERASI	113.375.641,00	107.307.800,00	(6.067.841,00)	94,65		
02.2.02.08.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	113.375.641,00	107.307.800,00	(6.067.841,00)	94,65		
02.2.02.09	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	91.371.299,00	87.160.700,00	(4.210.599,00)	95,39		
02.2.02.09.5.1	BELANJA OPERASI	91.371.299,00	87.160.700,00	(4.210.599,00)	95,39		
02.2.02.09.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	91.371.299,00	87.160.700,00	(4.210.599,00)	95,39		
02.2.02.10	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	530.929.300,00	528.008.552,60	(2.920.747,40)	99,45		
02.2.02.10.5.1	BELANJA OPERASI	530.929.300,00	528.008.552,60	(2.920.747,40)	99,45		
02.2.02.10.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	530.929.300,00	528.008.552,60	(2.920.747,40)	99,45		
02.2.02.11	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	592.245.880,00	564.908.018,40	(27.337.861,60)	95,38		
02.2.02.11.5.1	BELANJA OPERASI	592.245.880,00	564.908.018,40	(27.337.861,60)	95,38		

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM	KETERANGAN
		ANGGARAN	REALISASI	(Rp)	(%)		
02.2.02.11.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	592.245.880,00	564.908.018,40	(27.337.861,60)	95,38		
02.2.02.12	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	358.682.158,00	344.827.200,00	(13.854.958,00)	96,14		
02.2.02.12.5.1	BELANJA OPERASI	358.682.158,00	344.827.200,00	(13.854.958,00)	96,14		
02.2.02.12.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	273.682.158,00	259.827.200,00	(13.854.958,00)	94,94		
02.2.02.12.5.1.05	Belanja Hibah	85.000.000,00	85.000.000,00	0,00	100,00		
02.2.02.15	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	1.666.811.764,00	1.201.699.750,00	(465.112.014,00)	72,10		
02.2.02.15.5.1	BELANJA OPERASI	1.666.811.764,00	1.201.699.750,00	(465.112.014,00)	72,10		
02.2.02.15.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.666.811.764,00	1.201.699.750,00	(465.112.014,00)	72,10		
02.2.02.16	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	527.228.894,00	345.134.500,00	(182.094.394,00)	65,46		
02.2.02.16.5.1	BELANJA OPERASI	527.228.894,00	345.134.500,00	(182.094.394,00)	65,46		
02.2.02.16.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	527.228.894,00	345.134.500,00	(182.094.394,00)	65,46		
02.2.02.17	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	1.097.868.595,00	969.021.114,60	(128.847.480,40)	88,26		
02.2.02.17.5.1	BELANJA OPERASI	1.097.868.595,00	969.021.114,60	(128.847.480,40)	88,26		
02.2.02.17.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	897.868.595,00	769.021.114,60	(128.847.480,40)	85,65		
02.2.02.17.5.1.05	Belanja Hibah	200.000.000,00	200.000.000,00	0,00	100,00		
02.2.02.18	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	527.214.300,00	495.494.852,00	(31.719.448,00)	93,98		
02.2.02.18.5.1	BELANJA OPERASI	527.214.300,00	495.494.852,00	(31.719.448,00)	93,98		
02.2.02.18.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	527.214.300,00	495.494.852,00	(31.719.448,00)	93,98		
02.2.02.20	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	82.157.720,00	66.871.280,00	(15.286.440,00)	81,39		
02.2.02.20.5.1	BELANJA OPERASI	82.157.720,00	66.871.280,00	(15.286.440,00)	81,39		
02.2.02.20.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	82.157.720,00	66.871.280,00	(15.286.440,00)	81,39		
02.2.02.21	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)	34.827.500,00	26.280.400,00	(8.547.100,00)	75,46		
02.2.02.21.5.1	BELANJA OPERASI	34.827.500,00	26.280.400,00	(8.547.100,00)	75,46		
02.2.02.21.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	34.827.500,00	26.280.400,00	(8.547.100,00)	75,46		
02.2.02.22	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA	178.104.434,00	117.836.000,00	(60.268.434,00)	66,16		
02.2.02.22.5.1	BELANJA OPERASI	178.104.434,00	117.836.000,00	(60.268.434,00)	66,16		
02.2.02.22.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	178.104.434,00	117.836.000,00	(60.268.434,00)	66,16		
02.2.02.23	Pengelolaan Upaya Kesehatan Khusus	397.644.410,00	376.364.125,00	(21.280.285,00)	94,65		
02.2.02.23.5.1	BELANJA OPERASI	397.644.410,00	376.364.125,00	(21.280.285,00)	94,65		
02.2.02.23.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	397.644.410,00	376.364.125,00	(21.280.285,00)	94,65		
02.2.02.25	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	1.519.336.413,00	1.065.560.397,00	(453.776.016,00)	70,13		
02.2.02.25.5.1	BELANJA OPERASI	1.519.336.413,00	1.065.560.397,00	(453.776.016,00)	70,13		
02.2.02.25.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.519.336.413,00	1.065.560.397,00	(453.776.016,00)	70,13		
02.2.02.26	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	21.008.507.361,00	20.728.410.776,00	(280.096.585,00)	98,67		
02.2.02.26.5.1	BELANJA OPERASI	21.008.507.361,00	20.728.410.776,00	(280.096.585,00)	98,67		
02.2.02.26.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	21.008.507.361,00	20.728.410.776,00	(280.096.585,00)	98,67		

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM	KETERANGAN
		ANGGARAN	REALISASI	(Rp)	(%)		
02.2.02.28	Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Laboratorium Rujukan/Nasional	80.690.600,00	42.576.980,00	(38.113.620,00)	52,77		
02.2.02.28.5.1	BELANJA OPERASI	80.690.600,00	42.576.980,00	(38.113.620,00)	52,77		
02.2.02.28.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	80.690.600,00	42.576.980,00	(38.113.620,00)	52,77		
02.2.02.32	Operasional Pelayanan Rumah Sakit	2.359.198.212,00	1.665.932.365,00	(693.265.847,00)	70,61		
02.2.02.32.5.1	BELANJA OPERASI	2.092.343.556,00	1.402.699.365,00	(689.644.191,00)	67,04		
02.2.02.32.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.092.343.556,00	1.402.699.365,00	(689.644.191,00)	67,04		
02.2.02.32.5.2	BELANJA MODAL	266.854.656,00	263.233.000,00	(3.621.656,00)	98,64		
02.2.02.32.5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	266.854.656,00	263.233.000,00	(3.621.656,00)	98,64		
02.2.02.33	Operasional Pelayanan Puskesmas	13.381.372.743,00	11.226.841.346,00	(2.154.531.397,00)	83,90		
02.2.02.33.5.1	BELANJA OPERASI	13.381.372.743,00	11.226.841.346,00	(2.154.531.397,00)	83,90		
02.2.02.33.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	13.381.372.743,00	11.226.841.346,00	(2.154.531.397,00)	83,90		
02.2.02.34	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	22.564.672,00	0,00	(22.564.672,00)	0		
02.2.02.34.5.1	BELANJA OPERASI	22.564.672,00	0,00	(22.564.672,00)	0		
02.2.02.34.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	22.564.672,00	0,00	(22.564.672,00)	0		
02.2.02.35	Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota	958.989.801,00	682.308.785,00	(276.681.016,00)	71,15		
02.2.02.35.5.1	BELANJA OPERASI	958.989.801,00	682.308.785,00	(276.681.016,00)	71,15		
02.2.02.35.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	958.989.801,00	682.308.785,00	(276.681.016,00)	71,15		
02.2.02.36	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	103.591.200,00	71.505.000,00	(32.086.200,00)	69,03		
02.2.02.36.5.1	BELANJA OPERASI	103.591.200,00	71.505.000,00	(32.086.200,00)	69,03		
02.2.02.36.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	103.591.200,00	71.505.000,00	(32.086.200,00)	69,03		
02.2.02.37	Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah	1.768.847.460,00	1.474.791.000,00	(294.056.460,00)	83,38		
02.2.02.37.5.1	BELANJA OPERASI	1.768.847.460,00	1.474.791.000,00	(294.056.460,00)	83,38		
02.2.02.37.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.768.847.460,00	1.474.791.000,00	(294.056.460,00)	83,38		
02.2.02.40	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis	12.459.200,00	9.121.000,00	(3.338.200,00)	73,21		
02.2.02.40.5.1	BELANJA OPERASI	12.459.200,00	9.121.000,00	(3.338.200,00)	73,21		
02.2.02.40.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	12.459.200,00	9.121.000,00	(3.338.200,00)	73,21		
02.2.02.41	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)	6.708.800,00	2.015.000,00	(4.693.800,00)	30,04		
02.2.02.41.5.1	BELANJA OPERASI	6.708.800,00	2.015.000,00	(4.693.800,00)	30,04		
02.2.02.41.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	6.708.800,00	2.015.000,00	(4.693.800,00)	30,04		
02.2.02.42	Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria	7.667.200,00	5.200.000,00	(2.467.200,00)	67,82		
02.2.02.42.5.1	BELANJA OPERASI	7.667.200,00	5.200.000,00	(2.467.200,00)	67,82		
02.2.02.42.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	7.667.200,00	5.200.000,00	(2.467.200,00)	67,82		
02.2.03	Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi	156.195.300,00	110.158.260,00	(46.037.040,00)	70,53		
02.2.03.02	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	156.195.300,00	110.158.260,00	(46.037.040,00)	70,53		

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM	KETERANGAN
		ANGGARAN	REALISASI	(Rp)	(%)		
02.2.03.02.5.1	BELANJA OPERASI	156.195.300,00	110.158.260,00	(46.037.040,00)	70,53		
02.2.03.02.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	156.195.300,00	110.158.260,00	(46.037.040,00)	70,53		
02.2.04	Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	73.408.700,00	72.906.300,00	(502.400,00)	99,32		
02.2.04.03	Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan	73.408.700,00	72.906.300,00	(502.400,00)	99,32		
02.2.04.03.5.1	BELANJA OPERASI	73.408.700,00	72.906.300,00	(502.400,00)	99,32		
02.2.04.03.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	73.408.700,00	72.906.300,00	(502.400,00)	99,32		
02	**PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)**	5.653.335.489,00	5.578.108.687,00	(75.226.802,00)	98,67		
02.2.01	Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	1.253.000.000,00	1.237.373.100,00	(15.626.900,00)	98,75		
02.2.01.02	Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Air Tanah dan Air Baku	803.000.000,00	792.939.000,00	(10.061.000,00)	98,75		
02.2.01.02.5.1	BELANJA OPERASI	250.000.000,00	246.550.000,00	(3.450.000,00)	98,62		
02.2.01.02.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	250.000.000,00	246.550.000,00	(3.450.000,00)	98,62		
02.2.01.02.5.2	BELANJA MODAL	553.000.000,00	546.389.000,00	(6.611.000,00)	98,80		
02.2.01.02.5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	553.000.000,00	546.389.000,00	(6.611.000,00)	98,80		
02.2.01.04	Penyusunan Pola dan Rencana Pengelolaan SDA WS Kewenangan Kabupaten/Kota	450.000.000,00	444.434.100,00	(5.565.900,00)	98,76		
02.2.01.04.5.1	BELANJA OPERASI	450.000.000,00	444.434.100,00	(5.565.900,00)	98,76		
02.2.01.04.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	450.000.000,00	444.434.100,00	(5.565.900,00)	98,76		
02.2.02	Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya di Bawah 1000 Ha dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	4.400.335.489,00	4.340.735.587,00	(59.599.902,00)	98,65		
02.2.02.08	Peningkatan Jaringan Irigasi Permukaan	300.000.000,00	298.450.900,00	(1.549.100,00)	99,48		
02.2.02.08.5.2	BELANJA MODAL	300.000.000,00	298.450.900,00	(1.549.100,00)	99,48		
02.2.02.08.5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	300.000.000,00	298.450.900,00	(1.549.100,00)	99,48		
02.2.02.14	Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan	150.000.000,00	148.000.000,00	(2.000.000,00)	98,67		
02.2.02.14.5.2	BELANJA MODAL	150.000.000,00	148.000.000,00	(2.000.000,00)	98,67		
02.2.02.14.5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	150.000.000,00	148.000.000,00	(2.000.000,00)	98,67		
02.2.02.15	Rehabilitasi Bendung Irigasi	2.079.217.000,00	2.057.339.150,00	(21.877.850,00)	98,95		
02.2.02.15.5.1	BELANJA OPERASI	103.960.850,00	102.339.150,00	(1.621.700,00)	98,44		
02.2.02.15.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	103.960.850,00	102.339.150,00	(1.621.700,00)	98,44		
02.2.02.15.5.2	BELANJA MODAL	1.975.256.150,00	1.955.000.000,00	(20.256.150,00)	98,97		
02.2.02.15.5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	1.975.256.150,00	1.955.000.000,00	(20.256.150,00)	98,97		
02.2.02.21	Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan	1.585.713.089,00	1.561.273.924,00	(24.439.165,00)	98,46		
02.2.02.21.5.1	BELANJA OPERASI	503.560.257,00	482.465.924,00	(21.094.333,00)	95,81		
02.2.02.21.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	503.560.257,00	482.465.924,00	(21.094.333,00)	95,81		
02.2.02.21.5.2	BELANJA MODAL	1.082.152.832,00	1.078.808.000,00	(3.344.832,00)	99,69		
02.2.02.21.5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	39.573.720,00	39.118.000,00	(455.720,00)	98,85		

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM	KETERANGAN
		ANGGARAN	REALISASI	(Rp)	(%)		
02.2.02.21.5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	1.042.579.112,00	1.039.690.000,00	(2.889.112,00)	99,72		
02.2.02.29	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pemeliharaan Kawasan Rawa	285.405.400,00	275.671.613,00	(9.733.787,00)	96,59		
02.2.02.29.5.1	BELANJA OPERASI	285.405.400,00	275.671.613,00	(9.733.787,00)	96,59		
02.2.02.29.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	285.405.400,00	275.671.613,00	(9.733.787,00)	96,59		
02	**PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN**	328.201.428,00	297.839.938,00	(30.361.490,00)	90,75		
02.2.01	Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	109.852.128,00	102.923.928,00	(6.928.200,00)	93,69		
02.2.01.05	Pendataan dan Verifikasi Penerima Rumah bagi Korban Bencana Alam atau Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota	109.852.128,00	102.923.928,00	(6.928.200,00)	93,69		
02.2.01.05.5.1	BELANJA OPERASI	109.852.128,00	102.923.928,00	(6.928.200,00)	93,69		
02.2.01.05.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	109.852.128,00	102.923.928,00	(6.928.200,00)	93,69		
02.2.06	Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan	218.349.300,00	194.916.010,00	(23.433.290,00)	89,27		
02.2.06.03	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pembangunan dan Pengembangan Perumahan	218.349.300,00	194.916.010,00	(23.433.290,00)	89,27		
02.2.06.03.5.1	BELANJA OPERASI	218.349.300,00	194.916.010,00	(23.433.290,00)	89,27		
02.2.06.03.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	218.349.300,00	194.916.010,00	(23.433.290,00)	89,27		
02	**PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**	3.148.913.256,00	3.018.006.809,00	(130.906.447,00)	95,84		
02.2.01	Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	2.677.088.608,00	2.576.814.044,00	(100.274.564,00)	96,25		
02.2.01.01	Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawalan	2.563.327.308,00	2.470.338.844,00	(92.988.464,00)	96,37		
02.2.01.01.5.1	BELANJA OPERASI	2.503.775.808,00	2.414.890.544,00	(88.885.264,00)	96,45		
02.2.01.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.503.775.808,00	2.414.890.544,00	(88.885.264,00)	96,45		
02.2.01.01.5.2	BELANJA MODAL	59.551.500,00	55.448.300,00	(4.103.200,00)	93,11		
02.2.01.01.5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	59.551.500,00	55.448.300,00	(4.103.200,00)	93,11		
02.2.01.04	Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketentraman dan Ketertiban Umum	113.761.300,00	106.475.200,00	(7.286.100,00)	93,60		
02.2.01.04.5.1	BELANJA OPERASI	113.761.300,00	106.475.200,00	(7.286.100,00)	93,60		
02.2.01.04.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	113.761.300,00	106.475.200,00	(7.286.100,00)	93,60		
02.2.02	Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota	471.824.648,00	441.192.765,00	(30.631.883,00)	93,51		
02.2.02.01	Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	268.158.048,00	242.595.848,00	(25.562.200,00)	90,47		
02.2.02.01.5.1	BELANJA OPERASI	268.158.048,00	242.595.848,00	(25.562.200,00)	90,47		

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM	KETERANGAN
		ANGGARAN	REALISASI	(Rp)	(%)		
02.2.02.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	268.158.048,00	242.595.848,00	(25.562.200,00)	90,47		
02.2.02.02	Pengawasan Atas Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	62.313.600,00	62.257.000,00	(56.600,00)	99,91		
02.2.02.02.5.1	BELANJA OPERASI	62.313.600,00	62.257.000,00	(56.600,00)	99,91		
02.2.02.02.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	62.313.600,00	62.257.000,00	(56.600,00)	99,91		
02.2.02.03	Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	141.353.000,00	136.339.917,00	(5.013.083,00)	96,45		
02.2.02.03.5.1	BELANJA OPERASI	141.353.000,00	136.339.917,00	(5.013.083,00)	96,45		
02.2.02.03.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	141.353.000,00	136.339.917,00	(5.013.083,00)	96,45		
02	**PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL**	1.288.447.916,00	1.266.250.420,00	(22.197.496,00)	98,28		
02.2.03	Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota	1.288.447.916,00	1.266.250.420,00	(22.197.496,00)	98,28		
02.2.03.01	Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	419.891.200,00	419.245.000,00	(646.200,00)	99,85		
02.2.03.01.5.1	BELANJA OPERASI	419.891.200,00	419.245.000,00	(646.200,00)	99,85		
02.2.03.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	419.891.200,00	419.245.000,00	(646.200,00)	99,85		
02.2.03.02	Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota	267.425.708,00	262.356.592,00	(5.069.116,00)	98,10		
02.2.03.02.5.1	BELANJA OPERASI	267.425.708,00	262.356.592,00	(5.069.116,00)	98,10		
02.2.03.02.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	267.425.708,00	262.356.592,00	(5.069.116,00)	98,10		
02.2.03.03	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	394.119.108,00	378.850.928,00	(15.268.180,00)	96,13		
02.2.03.03.5.1	BELANJA OPERASI	394.119.108,00	378.850.928,00	(15.268.180,00)	96,13		
02.2.03.03.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	394.119.108,00	378.850.928,00	(15.268.180,00)	96,13		
02.2.03.04	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	207.011.900,00	205.797.900,00	(1.214.000,00)	99,41		
02.2.03.04.5.1	BELANJA OPERASI	207.011.900,00	205.797.900,00	(1.214.000,00)	99,41		
02.2.03.04.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	143.416.900,00	142.202.900,00	(1.214.000,00)	99,15		
02.2.03.04.5.1.05	Belanja Hibah	63.595.000,00	63.595.000,00	0,00	100,00		
02	**PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA**	115.000.000,00	111.974.548,00	(3.025.452,00)	97,37		
02.2.01	Penyusunan Rencana Tenaga Kerja (RTK)	115.000.000,00	111.974.548,00	(3.025.452,00)	97,37		
02.2.01.01	Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Makro	115.000.000,00	111.974.548,00	(3.025.452,00)	97,37		
02.2.01.01.5.1	BELANJA OPERASI	115.000.000,00	111.974.548,00	(3.025.452,00)	97,37		
02.2.01.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	115.000.000,00	111.974.548,00	(3.025.452,00)	97,37		
02	**PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN**	624.999.770,00	624.135.300,00	(864.470,00)	99,86		
02.2.01	Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota	49.999.880,00	49.424.400,00	(575.480,00)	98,85		

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM	KETERANGAN
		ANGGARAN	REALISASI	(Rp)	(%)		
02.2.01.03	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan PUG termasuk PPRG	49.999.880,00	49.424.400,00	(575.480,00)	98,85		
02.2.01.03.5.1	BELANJA OPERASI	49.999.880,00	49.424.400,00	(575.480,00)	98,85		
02.2.01.03.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	49.999.880,00	49.424.400,00	(575.480,00)	98,85		
02.2.02	Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota	49.999.890,00	49.710.900,00	(288.990,00)	99,42		
02.2.02.02	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Peningkatan Partisipasi Perempuan dan Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi	49.999.890,00	49.710.900,00	(288.990,00)	99,42		
02.2.02.02.5.1	BELANJA OPERASI	49.999.890,00	49.710.900,00	(288.990,00)	99,42		
02.2.02.02.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	49.999.890,00	49.710.900,00	(288.990,00)	99,42		
02.2.03	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	525.000.000,00	525.000.000,00	0,00	100,00		
02.2.03.01	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan kepada Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	525.000.000,00	525.000.000,00	0,00	100,00		
02.2.03.01.5.1	BELANJA OPERASI	525.000.000,00	525.000.000,00	0,00	100,00		
02.2.03.01.5.1.05	Belanja Hibah	525.000.000,00	525.000.000,00	0,00	100,00		
02	**PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP**	317.165.827,00	281.653.808,00	(35.512.019,00)	88,80		
02.2.01	Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten/Kota	93.385.928,00	90.895.728,00	(2.490.200,00)	97,33		
02.2.01.01	Penyusunan dan Penetapan RPPLH Kabupaten/Kota	93.385.928,00	90.895.728,00	(2.490.200,00)	97,33		
02.2.01.01.5.1	BELANJA OPERASI	93.385.928,00	90.895.728,00	(2.490.200,00)	97,33		
02.2.01.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	93.385.928,00	90.895.728,00	(2.490.200,00)	97,33		
02.2.02	Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kabupaten/Kota	223.779.899,00	190.758.080,00	(33.021.819,00)	85,24		
02.2.02.01	Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS Rencana Tata Ruang	25.909.020,00	4.661.700,00	(21.247.320,00)	17,99		
02.2.02.01.5.1	BELANJA OPERASI	25.909.020,00	4.661.700,00	(21.247.320,00)	17,99		
02.2.02.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	25.909.020,00	4.661.700,00	(21.247.320,00)	17,99		
02.2.02.02	Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS RPJPD/RPJMD	197.870.879,00	186.096.380,00	(11.774.499,00)	94,05		
02.2.02.02.5.1	BELANJA OPERASI	197.870.879,00	186.096.380,00	(11.774.499,00)	94,05		
02.2.02.02.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	197.870.879,00	186.096.380,00	(11.774.499,00)	94,05		
02	**PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK**	1.002.481.380,00	981.813.184,00	(20.668.196,00)	97,94		
02.2.01	Pelayanan Pendaftaran Penduduk	769.047.124,00	752.348.928,00	(16.698.196,00)	97,83		
02.2.01.01	Pendataan Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi Kependudukan	253.728.384,00	247.653.396,00	(6.074.988,00)	97,61		
02.2.01.01.5.1	BELANJA OPERASI	253.728.384,00	247.653.396,00	(6.074.988,00)	97,61		

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM	KETERANGAN
		ANGGARAN	REALISASI	(Rp)	(%)		
02.2.01.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	253.728.384,00	247.653.396,00	(6.074.988,00)	97,61		
02.2.01.03	Penyelesaian Masalah Pendaftaran Penduduk	226.874.620,00	222.068.600,00	(4.806.020,00)	97,88		
02.2.01.03.5.1	BELANJA OPERASI	226.874.620,00	222.068.600,00	(4.806.020,00)	97,88		
02.2.01.03.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	226.874.620,00	222.068.600,00	(4.806.020,00)	97,88		
02.2.01.04	Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk	288.444.120,00	282.626.932,00	(5.817.188,00)	97,98		
02.2.01.04.5.1	BELANJA OPERASI	288.444.120,00	282.626.932,00	(5.817.188,00)	97,98		
02.2.01.04.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	288.444.120,00	282.626.932,00	(5.817.188,00)	97,98		
02.2.03	Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk	233.434.256,00	229.464.256,00	(3.970.000,00)	98,30		
02.2.03.02	Pelayanan Secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting Terkait Pendaftaran Penduduk	233.434.256,00	229.464.256,00	(3.970.000,00)	98,30		
02.2.03.02.5.1	BELANJA OPERASI	233.434.256,00	229.464.256,00	(3.970.000,00)	98,30		
02.2.03.02.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	233.434.256,00	229.464.256,00	(3.970.000,00)	98,30		
02	**PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK**	319.800.082,00	303.155.764,00	(16.644.318,00)	94,80		
02.2.02	Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	319.800.082,00	303.155.764,00	(16.644.318,00)	94,80		
02.2.02.02	Penyediaan dan Pengolahan Data Kependudukan	79.800.082,00	74.920.764,00	(4.879.318,00)	93,89		
02.2.02.02.5.1	BELANJA OPERASI	79.800.082,00	74.920.764,00	(4.879.318,00)	93,89		
02.2.02.02.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	79.800.082,00	74.920.764,00	(4.879.318,00)	93,89		
02.2.02.09	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Sistem Informasi Keluarga	64.200.000,00	58.435.000,00	(5.765.000,00)	91,02		
02.2.02.09.5.1	BELANJA OPERASI	64.200.000,00	58.435.000,00	(5.765.000,00)	91,02		
02.2.02.09.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	64.200.000,00	58.435.000,00	(5.765.000,00)	91,02		
02.2.02.12	Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga	103.800.000,00	97.800.000,00	(6.000.000,00)	94,22		
02.2.02.12.5.1	BELANJA OPERASI	103.800.000,00	97.800.000,00	(6.000.000,00)	94,22		
02.2.02.12.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	103.800.000,00	97.800.000,00	(6.000.000,00)	94,22		
02.2.02.13	Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB	72.000.000,00	72.000.000,00	0,00	100,00		
02.2.02.13.5.1	BELANJA OPERASI	72.000.000,00	72.000.000,00	0,00	100,00		
02.2.02.13.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	72.000.000,00	72.000.000,00	0,00	100,00		
02	**PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)**	639.489.156,00	567.807.326,00	(71.681.830,00)	88,79		
02.2.05	Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	290.489.320,00	282.483.470,00	(8.005.850,00)	97,24		
02.2.05.01	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	240.443.420,00	232.691.470,00	(7.751.950,00)	96,78		
02.2.05.01.5.1	BELANJA OPERASI	240.443.420,00	232.691.470,00	(7.751.950,00)	96,78		
02.2.05.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	240.443.420,00	232.691.470,00	(7.751.950,00)	96,78		
02.2.05.07	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	50.045.900,00	49.792.000,00	(253.900,00)	99,49		
02.2.05.07.5.1	BELANJA OPERASI	50.045.900,00	49.792.000,00	(253.900,00)	99,49		

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM	KETERANGAN
		ANGGARAN	REALISASI	(Rp)	(%)		
02.2.05.07.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	50.045.900,00	49.792.000,00	(253.900,00)	99,49		
02.2.06	Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	348.999.836,00	285.323.856,00	(63.675.980,00)	81,75		
02.2.06.04	Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/Kota	186.573.556,00	183.135.556,00	(3.438.000,00)	98,16		
02.2.06.04.5.1	BELANJA OPERASI	186.573.556,00	183.135.556,00	(3.438.000,00)	98,16		
02.2.06.04.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	186.573.556,00	183.135.556,00	(3.438.000,00)	98,16		
02.2.06.05	Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kabupaten/Kota	162.426.280,00	102.188.300,00	(60.237.980,00)	62,91		
02.2.06.05.5.1	BELANJA OPERASI	162.426.280,00	102.188.300,00	(60.237.980,00)	62,91		
02.2.06.05.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	162.426.280,00	102.188.300,00	(60.237.980,00)	62,91		
02	**PROGRAM INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK**	2.827.271.866,00	2.775.995.442,00	(51.276.424,00)	98,19		
02.2.01	Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	2.827.271.866,00	2.775.995.442,00	(51.276.424,00)	98,19		
02.2.01.04	Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik	321.163.079,00	316.958.695,00	(4.204.384,00)	98,69		
02.2.01.04.5.1	BELANJA OPERASI	321.163.079,00	316.958.695,00	(4.204.384,00)	98,69		
02.2.01.04.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	321.163.079,00	316.958.695,00	(4.204.384,00)	98,69		
02.2.01.05	Pengelolaan Media Komunikasi Publik	409.643.780,00	366.149.310,00	(43.494.470,00)	89,38		
02.2.01.05.5.1	BELANJA OPERASI	409.643.780,00	366.149.310,00	(43.494.470,00)	89,38		
02.2.01.05.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	409.643.780,00	366.149.310,00	(43.494.470,00)	89,38		
02.2.01.12	Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat, Media dan Kemitraan Komunitas	2.096.465.007,00	2.092.887.437,00	(3.577.570,00)	99,83		
02.2.01.12.5.1	BELANJA OPERASI	2.096.465.007,00	2.092.887.437,00	(3.577.570,00)	99,83		
02.2.01.12.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.036.465.007,00	2.032.934.007,00	(3.531.000,00)	99,83		
02.2.01.12.5.1.05	Belanja Hibah	60.000.000,00	59.953.430,00	(46.570,00)	99,92		
02	**PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL**	255.982.080,00	239.319.570,00	(16.662.510,00)	93,49		
02.2.01	Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	131.100.000,00	123.945.000,00	(7.155.000,00)	94,54		
02.2.01.01	Penetapan Kebijakan Daerah Mengenai Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	131.100.000,00	123.945.000,00	(7.155.000,00)	94,54		
02.2.01.01.5.1	BELANJA OPERASI	131.100.000,00	123.945.000,00	(7.155.000,00)	94,54		
02.2.01.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	131.100.000,00	123.945.000,00	(7.155.000,00)	94,54		
02.2.02	Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	124.882.080,00	115.374.570,00	(9.507.510,00)	92,39		
02.2.02.01	Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	40.811.630,00	33.362.138,00	(7.449.492,00)	81,75		
02.2.02.01.5.1	BELANJA OPERASI	40.811.630,00	33.362.138,00	(7.449.492,00)	81,75		
02.2.02.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	40.811.630,00	33.362.138,00	(7.449.492,00)	81,75		

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM	KETERANGAN
		ANGGARAN	REALISASI	(Rp)	(%)		
02.2.02.02	Penyediaan Peta Potensi dan Peluang Usaha Kabupaten/Kota	84.070.450,00	82.012.432,00	(2.058.018,00)	97,55		
02.2.02.02.5.1	BELANJA OPERASI	62.775.100,00	60.862.432,00	(1.912.668,00)	96,95		
02.2.02.02.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	62.775.100,00	60.862.432,00	(1.912.668,00)	96,95		
02.2.02.02.5.2	BELANJA MODAL	21.295.350,00	21.150.000,00	(145.350,00)	99,32		
02.2.02.02.5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	21.295.350,00	21.150.000,00	(145.350,00)	99,32		
02	**PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN**	2.448.275.636,00	2.424.627.648,00	(23.647.988,00)	99,03		
02.2.01	Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota	1.907.380.560,00	1.896.054.058,00	(11.326.502,00)	99,41		
02.2.01.03	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Pemuda Kader Kabupaten/Kota	632.938.000,00	632.013.972,00	(924.028,00)	99,85		
02.2.01.03.5.1	BELANJA OPERASI	632.938.000,00	632.013.972,00	(924.028,00)	99,85		
02.2.01.03.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	632.938.000,00	632.013.972,00	(924.028,00)	99,85		
02.2.01.04	Pemenuhan Hak Setiap Pemuda Melalui Perlindungan Pemuda, Advokasi, Akses Pengembangan Diri, Penggunaan Prasarana dan Sarana Tanpa Diskiriminatif, Partisipasi Pemuda dalam Proses Perencanaan, Pelaksanaan Evaluasi dan Pengambilan Keputusan Program Strategis Kepemudaan	159.399.060,00	159.377.886,00	(21.174,00)	99,99		
02.2.01.04.5.1	BELANJA OPERASI	148.849.060,00	148.827.886,00	(21.174,00)	99,99		
02.2.01.04.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	148.849.060,00	148.827.886,00	(21.174,00)	99,99		
02.2.01.04.5.2	BELANJA MODAL	10.550.000,00	10.550.000,00	0,00	100,00		
02.2.01.04.5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	10.550.000,00	10.550.000,00	0,00	100,00		
02.2.01.07	Pemberian Penghargaan Pemuda dan Organisasi Pemuda yang Berjasa dan/atau Berprestasi	105.246.400,00	99.991.400,00	(5.255.000,00)	95,01		
02.2.01.07.5.1	BELANJA OPERASI	105.246.400,00	99.991.400,00	(5.255.000,00)	95,01		
02.2.01.07.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	105.246.400,00	99.991.400,00	(5.255.000,00)	95,01		
02.2.01.08	Peningkatan Kepemimpinan, Kepeloporan dan Kesukarelawanan Pemuda	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	100,00		
02.2.01.08.5.1	BELANJA OPERASI	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	100,00		
02.2.01.08.5.1.05	Belanja Hibah	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	100,00		
02.2.01.09	Penyelenggaraan Seleksi dan Pelatihan Pasukan Pengibar Bendera	909.797.100,00	904.670.800,00	(5.126.300,00)	99,44		
02.2.01.09.5.1	BELANJA OPERASI	909.797.100,00	904.670.800,00	(5.126.300,00)	99,44		
02.2.01.09.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	909.797.100,00	904.670.800,00	(5.126.300,00)	99,44		

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM	KETERANGAN
		ANGGARAN	REALISASI	(Rp)	(%)		
02.2.02	Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	540.895.076,00	528.573.590,00	(12.321.486,00)	97,72		
02.2.02.01	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pemberdayaan Pemuda atau Organisasi Kepemudaan Melalui Kemitraan dengan Dunia Usaha	470.895.076,00	458.573.590,00	(12.321.486,00)	97,38		
02.2.02.01.5.1	BELANJA OPERASI	470.895.076,00	458.573.590,00	(12.321.486,00)	97,38		
02.2.02.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	470.895.076,00	458.573.590,00	(12.321.486,00)	97,38		
02.2.02.02	Peningkatan Kapasitas Pemuda dan Organisasi Kepemudaan Kabupaten/Kota	70.000.000,00	70.000.000,00	0,00	100,00		
02.2.02.02.5.1	BELANJA OPERASI	70.000.000,00	70.000.000,00	0,00	100,00		
02.2.02.02.5.1.05	Belanja Hibah	70.000.000,00	70.000.000,00	0,00	100,00		
02	**PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL**	157.324.836,00	138.302.264,00	(19.022.572,00)	87,91		
02.2.01	Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	157.324.836,00	138.302.264,00	(19.022.572,00)	87,91		
02.2.01.01	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral	87.029.974,00	85.880.764,00	(1.149.210,00)	98,68		
02.2.01.01.5.1	BELANJA OPERASI	87.029.974,00	85.880.764,00	(1.149.210,00)	98,68		
02.2.01.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	87.029.974,00	85.880.764,00	(1.149.210,00)	98,68		
02.2.01.04	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Statistik Sektoral	70.294.862,00	52.421.500,00	(17.873.362,00)	74,57		
02.2.01.04.5.1	BELANJA OPERASI	70.294.862,00	52.421.500,00	(17.873.362,00)	74,57		
02.2.01.04.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	70.294.862,00	52.421.500,00	(17.873.362,00)	74,57		
02	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI**	108.045.319,00	95.850.497,00	(12.194.822,00)	88,71		
02.2.01	Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	108.045.319,00	95.850.497,00	(12.194.822,00)	88,71		
02.2.01.01	Penetapan Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	6.626.600,00	5.018.800,00	(1.607.800,00)	75,74		
02.2.01.01.5.1	BELANJA OPERASI	6.626.600,00	5.018.800,00	(1.607.800,00)	75,74		
02.2.01.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	6.626.600,00	5.018.800,00	(1.607.800,00)	75,74		
02.2.01.02	Pelaksanaan Analisis Kebutuhan dan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	83.537.628,00	72.950.606,00	(10.587.022,00)	87,33		
02.2.01.02.5.1	BELANJA OPERASI	83.537.628,00	72.950.606,00	(10.587.022,00)	87,33		
02.2.01.02.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	83.537.628,00	72.950.606,00	(10.587.022,00)	87,33		
02.2.01.04	Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	17.881.091,00	17.881.091,00	0,00	100,00		
02.2.01.04.5.2	BELANJA MODAL	17.881.091,00	17.881.091,00	0,00	100,00		
02.2.01.04.5.2.06	Belanja Modal Aset Lainnya	17.881.091,00	17.881.091,00	0,00	100,00		

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM	KETERANGAN
		ANGGARAN	REALISASI	(Rp)	(%)		
02	**PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN**	3.738.318.790,00	3.702.496.265,00	(35.822.525,00)	99,04		
02.2.01	Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	1.188.318.790,00	1.157.551.865,00	(30.766.925,00)	97,41		
02.2.01.01	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan	1.188.318.790,00	1.157.551.865,00	(30.766.925,00)	97,41		
02.2.01.01.5.1	BELANJA OPERASI	1.152.318.790,00	1.124.851.865,00	(27.466.925,00)	97,62		
02.2.01.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.152.318.790,00	1.124.851.865,00	(27.466.925,00)	97,62		
02.2.01.01.5.2	BELANJA MODAL	36.000.000,00	32.700.000,00	(3.300.000,00)	90,83		
02.2.01.01.5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	36.000.000,00	32.700.000,00	(3.300.000,00)	90,83		
02.2.02	Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	2.550.000.000,00	2.544.944.400,00	(5.055.600,00)	99,80		
02.2.02.01	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Tradisi Budaya	1.000.000.000,00	994.944.400,00	(5.055.600,00)	99,49		
02.2.02.01.5.1	BELANJA OPERASI	1.000.000.000,00	994.944.400,00	(5.055.600,00)	99,49		
02.2.02.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.000.000.000,00	994.944.400,00	(5.055.600,00)	99,49		
02.2.02.02	Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Tradisional	1.550.000.000,00	1.550.000.000,00	0,00	100,00		
02.2.02.02.5.1	BELANJA OPERASI	1.550.000.000,00	1.550.000.000,00	0,00	100,00		
02.2.02.02.5.1.05	Belanja Hibah	1.550.000.000,00	1.550.000.000,00	0,00	100,00		
02	**PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN**	14.382.085.423,00	14.220.005.441,00	(162.079.982,00)	98,87		
02.2.01	Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	1.388.855.513,00	1.379.623.325,00	(9.232.188,00)	99,34		
02.2.01.01	Pengembangan dan Pemeliharaan Layanan Perpustakaan Elektronik	430.487.640,00	430.336.002,00	(151.638,00)	99,96		
02.2.01.01.5.1	BELANJA OPERASI	61.656.300,00	61.584.502,00	(71.798,00)	99,88		
02.2.01.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	61.656.300,00	61.584.502,00	(71.798,00)	99,88		
02.2.01.01.5.2	BELANJA MODAL	368.831.340,00	368.751.500,00	(79.840,00)	99,98		
02.2.01.01.5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	368.831.340,00	368.751.500,00	(79.840,00)	99,98		
02.2.01.02	Pengembangan Perpustakaan di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	547.402.500,00	539.309.991,00	(8.092.509,00)	98,52		
02.2.01.02.5.2	BELANJA MODAL	547.402.500,00	539.309.991,00	(8.092.509,00)	98,52		
02.2.01.02.5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	547.402.500,00	539.309.991,00	(8.092.509,00)	98,52		
02.2.01.08	Pengembangan Bahan Pustaka	65.826.550,00	64.981.150,00	(845.400,00)	98,72		
02.2.01.08.5.1	BELANJA OPERASI	65.826.550,00	64.981.150,00	(845.400,00)	98,72		
02.2.01.08.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	65.826.550,00	64.981.150,00	(845.400,00)	98,72		
02.2.01.09	Pengelolaan dan Pengembangan Bahan Pustaka	275.468.000,00	275.330.165,00	(137.835,00)	99,95		
02.2.01.09.5.1	BELANJA OPERASI	75.968.000,00	75.889.665,00	(78.335,00)	99,90		
02.2.01.09.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	75.968.000,00	75.889.665,00	(78.335,00)	99,90		
02.2.01.09.5.2	BELANJA MODAL	199.500.000,00	199.440.500,00	(59.500,00)	99,97		
02.2.01.09.5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	199.500.000,00	199.440.500,00	(59.500,00)	99,97		

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM	KETERANGAN
		ANGGARAN	REALISASI	(Rp)	(%)		
02.2.01.10	Penyusunan Data dan Informasi Perpustakaan, Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	69.670.823,00	69.666.017,00	(4.806,00)	99,99		
02.2.01.10.5.1	BELANJA OPERASI	69.670.823,00	69.666.017,00	(4.806,00)	99,99		
02.2.01.10.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	69.670.823,00	69.666.017,00	(4.806,00)	99,99		
02.2.02	Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	12.993.229.910,00	12.840.382.116,00	(152.847.794,00)	98,82		
02.2.02.01	Sosiaisasi Budaya Baca dan Literasi pada Satuan Pendidikan Dasar dan Pendidikan Khusus serta Masyarakat	134.476.129,00	131.493.130,00	(2.982.999,00)	97,78		
02.2.02.01.5.1	BELANJA OPERASI	134.476.129,00	131.493.130,00	(2.982.999,00)	97,78		
02.2.02.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	134.476.129,00	131.493.130,00	(2.982.999,00)	97,78		
02.2.02.02	Pembangunan dan Pemeliharaan Sarana Perpustakaan di Tempat-Tempat Umum yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	12.576.910.240,00	12.429.793.511,00	(147.116.729,00)	98,83		
02.2.02.02.5.1	BELANJA OPERASI	909.360.978,00	865.029.911,00	(44.331.067,00)	95,13		
02.2.02.02.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	909.360.978,00	865.029.911,00	(44.331.067,00)	95,13		
02.2.02.02.5.2	BELANJA MODAL	11.667.549.262,00	11.564.763.600,00	(102.785.662,00)	99,12		
02.2.02.02.5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	9.999.191.512,00	9.919.163.600,00	(80.027.912,00)	99,20		
02.2.02.02.5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	1.668.357.750,00	1.645.600.000,00	(22.757.750,00)	98,64		
02.2.02.04	Pengembangan Literasi Berbasis Inklusi Sosial	143.531.244,00	142.674.054,00	(857.190,00)	99,40		
02.2.02.04.5.1	BELANJA OPERASI	143.531.244,00	142.674.054,00	(857.190,00)	99,40		
02.2.02.04.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	143.531.244,00	142.674.054,00	(857.190,00)	99,40		
02.2.02.05	Pemilihan Duta Baca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	138.312.297,00	136.421.421,00	(1.890.876,00)	98,63		
02.2.02.05.5.1	BELANJA OPERASI	138.312.297,00	136.421.421,00	(1.890.876,00)	98,63		
02.2.02.05.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	138.312.297,00	136.421.421,00	(1.890.876,00)	98,63		
02	**PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP**	621.290.762,00	616.425.423,00	(4.865.339,00)	99,22		
02.2.01	Pengelolaan Arsip Dinamis Daerah Kabupaten/Kota	426.766.981,00	423.392.896,00	(3.374.085,00)	99,21		
02.2.01.01	Penciptaan dan Penggunaan Arsip Dinamis	162.020.477,00	160.576.453,00	(1.444.024,00)	99,11		
02.2.01.01.5.1	BELANJA OPERASI	162.020.477,00	160.576.453,00	(1.444.024,00)	99,11		
02.2.01.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	162.020.477,00	160.576.453,00	(1.444.024,00)	99,11		
02.2.01.02	Pemeliharaan dan Penyusutan Arsip Dinamis	18.422.436,00	17.896.336,00	(526.100,00)	97,14		
02.2.01.02.5.1	BELANJA OPERASI	18.422.436,00	17.896.336,00	(526.100,00)	97,14		
02.2.01.02.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	18.422.436,00	17.896.336,00	(526.100,00)	97,14		
02.2.01.03	Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Kabupaten/Kota	246.324.068,00	244.920.107,00	(1.403.961,00)	99,43		
02.2.01.03.5.1	BELANJA OPERASI	246.324.068,00	244.920.107,00	(1.403.961,00)	99,43		
02.2.01.03.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	246.324.068,00	244.920.107,00	(1.403.961,00)	99,43		
02.2.02	Pengelolaan Arsip Statis Daerah Kabupaten/Kota	44.523.781,00	44.459.027,00	(64.754,00)	99,85		
02.2.02.02	Akuisisi, Pengolahan, Preservasi, dan Akses Arsip Statis	44.523.781,00	44.459.027,00	(64.754,00)	99,85		

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM	KETERANGAN
		ANGGARAN	REALISASI	(Rp)	(%)		
02.2.02.02.5.1	BELANJA OPERASI	44.523.781,00	44.459.027,00	(64.754,00)	99,85		
02.2.02.02.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	44.523.781,00	44.459.027,00	(64.754,00)	99,85		
02.2.03	Pengelolaan Simpul Jaringan Informasi Kearsipan Nasional Tingkat Kabupaten/Kota	150.000.000,00	148.573.500,00	(1.426.500,00)	99,05		
02.2.03.02	Pemberdayaan Kapasitas Unit Kearsipan dan Lembaga Kearsipan Daerah Kabupaten/Kota	150.000.000,00	148.573.500,00	(1.426.500,00)	99,05		
02.2.03.02.5.1	BELANJA OPERASI	150.000.000,00	148.573.500,00	(1.426.500,00)	99,05		
02.2.03.02.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	150.000.000,00	148.573.500,00	(1.426.500,00)	99,05		
02	**PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA**	177.865.377,00	175.418.744,00	(2.446.633,00)	98,62		
02.2.01	Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota	38.736.000,00	38.429.000,00	(307.000,00)	99,21		
02.2.01.04	Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota	38.736.000,00	38.429.000,00	(307.000,00)	99,21		
02.2.01.04.5.1	BELANJA OPERASI	38.736.000,00	38.429.000,00	(307.000,00)	99,21		
02.2.01.04.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	38.736.000,00	38.429.000,00	(307.000,00)	99,21		
02.2.02	Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	84.475.884,00	82.441.584,00	(2.034.300,00)	97,59		
02.2.02.05	Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	84.475.884,00	82.441.584,00	(2.034.300,00)	97,59		
02.2.02.05.5.1	BELANJA OPERASI	84.475.884,00	82.441.584,00	(2.034.300,00)	97,59		
02.2.02.05.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	84.475.884,00	82.441.584,00	(2.034.300,00)	97,59		
02.2.03	Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	54.653.493,00	54.548.160,00	(105.333,00)	99,81		
02.2.03.04	Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	22.309.333,00	22.204.000,00	(105.333,00)	99,53		
02.2.03.04.5.1	BELANJA OPERASI	22.309.333,00	22.204.000,00	(105.333,00)	99,53		
02.2.03.04.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	22.309.333,00	22.204.000,00	(105.333,00)	99,53		
02.2.03.06	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	32.344.160,00	32.344.160,00	0,00	100,00		
02.2.03.06.5.1	BELANJA OPERASI	32.344.160,00	32.344.160,00	0,00	100,00		
02.2.03.06.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	32.344.160,00	32.344.160,00	0,00	100,00		
02	**PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN**	12.150.080.196,00	12.036.572.926,00	(113.507.270,00)	99,07		
02.2.01	Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian	3.477.239.260,00	3.419.760.929,00	(57.478.331,00)	98,35		
02.2.01.01	Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi	1.001.262.464,00	962.469.968,00	(38.792.496,00)	96,13		
02.2.01.01.5.1	BELANJA OPERASI	1.001.262.464,00	962.469.968,00	(38.792.496,00)	96,13		
02.2.01.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.001.262.464,00	962.469.968,00	(38.792.496,00)	96,13		
02.2.01.02	Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	2.475.976.796,00	2.457.290.961,00	(18.685.835,00)	99,25		
02.2.01.02.5.1	BELANJA OPERASI	1.192.334.804,00	1.184.372.961,00	(7.961.843,00)	99,33		

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM	KETERANGAN
		ANGGARAN	REALISASI	(Rp)	(%)		
02.2.01.02.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.192.334.804,00	1.184.372.961,00	(7.961.843,00)	99,33		
02.2.01.02.5.2	BELANJA MODAL	1.283.641.992,00	1.272.918.000,00	(10.723.992,00)	99,16		
02.2.01.02.5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	419.115.992,00	415.568.000,00	(3.547.992,00)	99,15		
02.2.01.02.5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	864.526.000,00	857.350.000,00	(7.176.000,00)	99,17		
02.2.06	Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Lain	8.672.840.936,00	8.616.811.997,00	(56.028.939,00)	99,35		
02.2.06.01	Pengadaan Benih/Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain	7.397.334.436,00	7.364.990.997,00	(32.343.439,00)	99,56		
02.2.06.01.5.1	BELANJA OPERASI	7.397.334.436,00	7.364.990.997,00	(32.343.439,00)	99,56		
02.2.06.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	684.615.570,00	681.090.997,00	(3.524.573,00)	99,49		
02.2.06.01.5.1.05	Belanja Hibah	6.712.718.866,00	6.683.900.000,00	(28.818.866,00)	99,57		
02.2.06.02	Pengadaan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain	1.275.506.500,00	1.251.821.000,00	(23.685.500,00)	98,14		
02.2.06.02.5.1	BELANJA OPERASI	483.031.500,00	463.584.000,00	(19.447.500,00)	95,97		
02.2.06.02.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	483.031.500,00	463.584.000,00	(19.447.500,00)	95,97		
02.2.06.02.5.2	BELANJA MODAL	792.475.000,00	788.237.000,00	(4.238.000,00)	99,47		
02.2.06.02.5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	42.735.000,00	39.740.000,00	(2.995.000,00)	92,99		
02.2.06.02.5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	669.740.000,00	668.597.000,00	(1.143.000,00)	99,83		
02.2.06.02.5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	80.000.000,00	79.900.000,00	(100.000,00)	99,88		
02	**PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN**	150.653.592,00	145.286.332,00	(5.367.260,00)	96,44		
02.2.05	Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol Golongan B dan C untuk Pengecer dan Penjual Langsung Minum di Tempat	150.653.592,00	145.286.332,00	(5.367.260,00)	96,44		
02.2.05.01	Fasilitasi Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol Golongan B dan C	150.653.592,00	145.286.332,00	(5.367.260,00)	96,44		
02.2.05.01.5.1	BELANJA OPERASI	150.653.592,00	145.286.332,00	(5.367.260,00)	96,44		
02.2.05.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	150.653.592,00	145.286.332,00	(5.367.260,00)	96,44		
02	**PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI**	386.425.830,00	364.697.972,00	(21.727.858,00)	94,38		
02.2.01	Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	386.425.830,00	364.697.972,00	(21.727.858,00)	94,38		
02.2.01.03	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	257.834.608,00	249.783.672,00	(8.050.936,00)	96,88		
02.2.01.03.5.1	BELANJA OPERASI	257.834.608,00	249.783.672,00	(8.050.936,00)	96,88		
02.2.01.03.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	257.834.608,00	249.783.672,00	(8.050.936,00)	96,88		
02.2.01.04	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri	33.558.700,00	26.802.000,00	(6.756.700,00)	79,87		
02.2.01.04.5.1	BELANJA OPERASI	33.558.700,00	26.802.000,00	(6.756.700,00)	79,87		

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM	KETERANGAN
		ANGGARAN	REALISASI	(Rp)	(%)		
02.2.01.04.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	33.558.700,00	26.802.000,00	(6.756.700,00)	79,87		
02.2.01.05	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	95.032.522,00	88.112.300,00	(6.920.222,00)	92,72		
02.2.01.05.5.1	BELANJA OPERASI	73.515.300,00	66.762.300,00	(6.753.000,00)	90,81		
02.2.01.05.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	73.515.300,00	66.762.300,00	(6.753.000,00)	90,81		
02.2.01.05.5.2	BELANJA MODAL	21.517.222,00	21.350.000,00	(167.222,00)	99,22		
02.2.01.05.5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	21.517.222,00	21.350.000,00	(167.222,00)	99,22		
02	**PROGRAM PERENCANAAN KAWASAN TRANSMIGRASI**	259.854.264,00	258.678.937,00	(1.175.327,00)	99,55		
02.2.01	Pencadangan Tanah untuk Kawasan Transmigrasi	259.854.264,00	258.678.937,00	(1.175.327,00)	99,55		
02.2.01.01	Identifikasi Potensi Kawasan Transmigrasi	50.000.300,00	49.897.600,00	(102.700,00)	99,79		
02.2.01.01.5.1	BELANJA OPERASI	50.000.300,00	49.897.600,00	(102.700,00)	99,79		
02.2.01.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	50.000.300,00	49.897.600,00	(102.700,00)	99,79		
02.2.01.02	Advokasi dan Musyawarah Penetapan Kawasan	209.853.964,00	208.781.337,00	(1.072.627,00)	99,49		
02.2.01.02.5.1	BELANJA OPERASI	209.853.964,00	208.781.337,00	(1.072.627,00)	99,49		
02.2.01.02.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	209.853.964,00	208.781.337,00	(1.072.627,00)	99,49		
02	**PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT**	19.674.270.844,00	19.058.191.527,00	(616.079.317,00)	96,87		
02.2.01	Administrasi Tata Pemerintahan	1.254.798.990,00	1.248.170.490,00	(6.628.500,00)	99,47		
02.2.01.01	Penataan Administrasi Pemerintahan	419.268.218,00	416.709.748,00	(2.558.470,00)	99,39		
02.2.01.01.5.1	BELANJA OPERASI	419.268.218,00	416.709.748,00	(2.558.470,00)	99,39		
02.2.01.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	419.268.218,00	416.709.748,00	(2.558.470,00)	99,39		
02.2.01.02	Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	140.703.052,00	138.613.040,00	(2.090.012,00)	98,51		
02.2.01.02.5.1	BELANJA OPERASI	140.703.052,00	138.613.040,00	(2.090.012,00)	98,51		
02.2.01.02.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	140.703.052,00	138.613.040,00	(2.090.012,00)	98,51		
02.2.01.03	Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	694.827.720,00	692.847.702,00	(1.980.018,00)	99,72		
02.2.01.03.5.1	BELANJA OPERASI	694.827.720,00	692.847.702,00	(1.980.018,00)	99,72		
02.2.01.03.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	694.827.720,00	692.847.702,00	(1.980.018,00)	99,72		
02.2.02	Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	17.582.818.811,00	16.994.222.918,00	(588.595.893,00)	96,65		
02.2.02.01	Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	16.651.232.111,00	16.125.375.418,00	(525.856.693,00)	96,84		
02.2.02.01.5.1	BELANJA OPERASI	16.651.232.111,00	16.125.375.418,00	(525.856.693,00)	96,84		
02.2.02.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.641.254.567,00	1.280.802.874,00	(360.451.693,00)	78,04		
02.2.02.01.5.1.05	Belanja Hibah	15.009.977.544,00	14.844.572.544,00	(165.405.000,00)	98,90		
02.2.02.02	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial	107.753.200,00	106.594.100,00	(1.159.100,00)	98,92		
02.2.02.02.5.1	BELANJA OPERASI	107.753.200,00	106.594.100,00	(1.159.100,00)	98,92		
02.2.02.02.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	107.753.200,00	106.594.100,00	(1.159.100,00)	98,92		
02.2.02.03	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat	823.833.500,00	762.253.400,00	(61.580.100,00)	92,53		
02.2.02.03.5.1	BELANJA OPERASI	823.833.500,00	762.253.400,00	(61.580.100,00)	92,53		
02.2.02.03.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	514.767.700,00	473.753.400,00	(41.014.300,00)	92,03		

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM	KETERANGAN
		ANGGARAN	REALISASI	(Rp)	(%)		
02.2.02.03.5.1.05	Belanja Hibah	105.000.000,00	85.000.000,00	(20.000.000,00)	80,95		
02.2.02.03.5.1.06	Belanja Bantuan Sosial	204.065.800,00	203.500.000,00	(565.800,00)	99,72		
02.2.03	Fasilitasi dan Koordinasi Hukum	773.720.903,00	754.521.919,00	(19.198.984,00)	97,52		
02.2.03.01	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah	305.349.900,00	301.335.451,00	(4.014.449,00)	98,69		
02.2.03.01.5.1	BELANJA OPERASI	305.349.900,00	301.335.451,00	(4.014.449,00)	98,69		
02.2.03.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	305.349.900,00	301.335.451,00	(4.014.449,00)	98,69		
02.2.03.02	Fasilitasi Bantuan Hukum	206.377.155,00	199.521.720,00	(6.855.435,00)	96,68		
02.2.03.02.5.1	BELANJA OPERASI	206.377.155,00	199.521.720,00	(6.855.435,00)	96,68		
02.2.03.02.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	206.377.155,00	199.521.720,00	(6.855.435,00)	96,68		
02.2.03.03	Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum	261.993.848,00	253.664.748,00	(8.329.100,00)	96,82		
02.2.03.03.5.1	BELANJA OPERASI	261.993.848,00	253.664.748,00	(8.329.100,00)	96,82		
02.2.03.03.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	261.993.848,00	253.664.748,00	(8.329.100,00)	96,82		
02.2.04	Fasilitasi Kerja Sama Daerah	62.932.140,00	61.276.200,00	(1.655.940,00)	97,37		
02.2.04.01	Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri	62.932.140,00	61.276.200,00	(1.655.940,00)	97,37		
02.2.04.01.5.1	BELANJA OPERASI	62.932.140,00	61.276.200,00	(1.655.940,00)	97,37		
02.2.04.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	62.932.140,00	61.276.200,00	(1.655.940,00)	97,37		
02	**PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD**	17.150.189.585,00	16.693.672.706,00	(456.516.879,00)	97,34		
02.2.01	Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD	1.001.692.448,00	969.016.296,00	(32.676.152,00)	96,74		
02.2.01.01	Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah	10.985.624,00	1.458.800,00	(9.526.824,00)	13,28		
02.2.01.01.5.1	BELANJA OPERASI	10.985.624,00	1.458.800,00	(9.526.824,00)	13,28		
02.2.01.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	10.985.624,00	1.458.800,00	(9.526.824,00)	13,28		
02.2.01.02	Pembahasan Rancangan Perda	174.640.355,00	162.949.106,00	(11.691.249,00)	93,31		
02.2.01.02.5.1	BELANJA OPERASI	174.640.355,00	162.949.106,00	(11.691.249,00)	93,31		
02.2.01.02.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	174.640.355,00	162.949.106,00	(11.691.249,00)	93,31		
02.2.01.03	Penyelenggaraan Kajian Perundang-Undangan	342.980.777,00	342.603.902,00	(376.875,00)	99,89		
02.2.01.03.5.1	BELANJA OPERASI	342.980.777,00	342.603.902,00	(376.875,00)	99,89		
02.2.01.03.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	342.980.777,00	342.603.902,00	(376.875,00)	99,89		
02.2.01.04	Fasilitasi Penyusunan Penjelasan/Keterangan Naskah Akademik	473.085.692,00	462.004.488,00	(11.081.204,00)	97,66		
02.2.01.04.5.1	BELANJA OPERASI	473.085.692,00	462.004.488,00	(11.081.204,00)	97,66		
02.2.01.04.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	473.085.692,00	462.004.488,00	(11.081.204,00)	97,66		
02.2.02	Pembahasan Kebijakan Anggaran	210.355.810,00	207.663.000,00	(2.692.810,00)	98,72		
02.2.02.01	Pembahasan KUA dan PPAS	13.213.832,00	13.099.200,00	(114.632,00)	99,13		
02.2.02.01.5.1	BELANJA OPERASI	13.213.832,00	13.099.200,00	(114.632,00)	99,13		
02.2.02.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	13.213.832,00	13.099.200,00	(114.632,00)	99,13		
02.2.02.02	Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	13.609.330,00	13.338.500,00	(270.830,00)	98,01		
02.2.02.02.5.1	BELANJA OPERASI	13.609.330,00	13.338.500,00	(270.830,00)	98,01		

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM	KETERANGAN
		ANGGARAN	REALISASI	(Rp)	(%)		
02.2.02.02.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	13.609.330,00	13.338.500,00	(270.830,00)	98,01		
02.2.02.03	Pembahasan APBD	126.569.776,00	124.970.000,00	(1.599.776,00)	98,74		
02.2.02.03.5.1	BELANJA OPERASI	126.569.776,00	124.970.000,00	(1.599.776,00)	98,74		
02.2.02.03.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	126.569.776,00	124.970.000,00	(1.599.776,00)	98,74		
02.2.02.04	Pembahasan APBD Perubahan	43.587.758,00	43.067.800,00	(519.958,00)	98,81		
02.2.02.04.5.1	BELANJA OPERASI	43.587.758,00	43.067.800,00	(519.958,00)	98,81		
02.2.02.04.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	43.587.758,00	43.067.800,00	(519.958,00)	98,81		
02.2.02.06	Pembahasan Pertanggungjawaban APBD	13.375.114,00	13.187.500,00	(187.614,00)	98,60		
02.2.02.06.5.1	BELANJA OPERASI	13.375.114,00	13.187.500,00	(187.614,00)	98,60		
02.2.02.06.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	13.375.114,00	13.187.500,00	(187.614,00)	98,60		
02.2.03	Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan	1.417.477.167,00	1.400.625.631,00	(16.851.536,00)	98,81		
02.2.03.01	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum	449.547.448,00	448.667.620,00	(879.828,00)	99,80		
02.2.03.01.5.1	BELANJA OPERASI	449.547.448,00	448.667.620,00	(879.828,00)	99,80		
02.2.03.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	449.547.448,00	448.667.620,00	(879.828,00)	99,80		
02.2.03.02	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur	501.892.527,00	501.027.560,00	(864.967,00)	99,83		
02.2.03.02.5.1	BELANJA OPERASI	501.892.527,00	501.027.560,00	(864.967,00)	99,83		
02.2.03.02.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	501.892.527,00	501.027.560,00	(864.967,00)	99,83		
02.2.03.03	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat	449.547.448,00	435.096.651,00	(14.450.797,00)	96,79		
02.2.03.03.5.1	BELANJA OPERASI	449.547.448,00	435.096.651,00	(14.450.797,00)	96,79		
02.2.03.03.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	449.547.448,00	435.096.651,00	(14.450.797,00)	96,79		
02.2.03.08	Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah	16.489.744,00	15.833.800,00	(655.944,00)	96,02		
02.2.03.08.5.1	BELANJA OPERASI	16.489.744,00	15.833.800,00	(655.944,00)	96,02		
02.2.03.08.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	16.489.744,00	15.833.800,00	(655.944,00)	96,02		
02.2.04	Peningkatan Kapasitas DPRD	6.397.575.870,00	6.294.047.214,00	(103.528.656,00)	98,38		
02.2.04.02	Pendalaman Tugas DPRD	3.511.985.600,00	3.430.989.996,00	(80.995.604,00)	97,69		
02.2.04.02.5.1	BELANJA OPERASI	3.511.985.600,00	3.430.989.996,00	(80.995.604,00)	97,69		
02.2.04.02.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	3.511.985.600,00	3.430.989.996,00	(80.995.604,00)	97,69		
02.2.04.03	Publikasi dan Dokumentasi Dewan	2.624.706.400,00	2.624.159.718,00	(546.682,00)	99,98		
02.2.04.03.5.1	BELANJA OPERASI	2.624.706.400,00	2.624.159.718,00	(546.682,00)	99,98		
02.2.04.03.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.624.706.400,00	2.624.159.718,00	(546.682,00)	99,98		
02.2.04.05	Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi	180.677.600,00	180.000.000,00	(677.600,00)	99,62		
02.2.04.05.5.1	BELANJA OPERASI	180.677.600,00	180.000.000,00	(677.600,00)	99,62		
02.2.04.05.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	180.677.600,00	180.000.000,00	(677.600,00)	99,62		
02.2.04.06	Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat	69.426.504,00	49.050.000,00	(20.376.504,00)	70,65		
02.2.04.06.5.1	BELANJA OPERASI	69.426.504,00	49.050.000,00	(20.376.504,00)	70,65		
02.2.04.06.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	69.426.504,00	49.050.000,00	(20.376.504,00)	70,65		
02.2.04.07	Penyusunan Program Kerja DPRD	10.779.766,00	9.847.500,00	(932.266,00)	91,35		

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM	KETERANGAN
		ANGGARAN	REALISASI	(Rp)	(%)		
02.2.04.07.5.1	BELANJA OPERASI	10.779.766,00	9.847.500,00	(932.266,00)	91,35		
02.2.04.07.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	10.779.766,00	9.847.500,00	(932.266,00)	91,35		
02.2.05	Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat	2.325.121.300,00	2.214.808.040,00	(110.313.260,00)	95,26		
02.2.05.01	Kunjungan Kerja dalam Daerah	819.345.600,00	744.090.540,00	(75.255.060,00)	90,82		
02.2.05.01.5.1	BELANJA OPERASI	819.345.600,00	744.090.540,00	(75.255.060,00)	90,82		
02.2.05.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	819.345.600,00	744.090.540,00	(75.255.060,00)	90,82		
02.2.05.03	Pelaksanaan Reses	1.505.775.700,00	1.470.717.500,00	(35.058.200,00)	97,67		
02.2.05.03.5.1	BELANJA OPERASI	1.505.775.700,00	1.470.717.500,00	(35.058.200,00)	97,67		
02.2.05.03.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.505.775.700,00	1.470.717.500,00	(35.058.200,00)	97,67		
02.2.06	Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD	90.325.420,00	82.214.294,00	(8.111.126,00)	91,02		
02.2.06.01	Penyusunan Kode Etik DPRD	90.325.420,00	82.214.294,00	(8.111.126,00)	91,02		
02.2.06.01.5.1	BELANJA OPERASI	90.325.420,00	82.214.294,00	(8.111.126,00)	91,02		
02.2.06.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	90.325.420,00	82.214.294,00	(8.111.126,00)	91,02		
02.2.08	Fasilitasi Tugas DPRD	5.707.641.570,00	5.525.298.231,00	(182.343.339,00)	96,81		
02.2.08.01	Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	4.844.566.200,00	4.695.817.619,00	(148.748.581,00)	96,93		
02.2.08.01.5.1	BELANJA OPERASI	4.844.566.200,00	4.695.817.619,00	(148.748.581,00)	96,93		
02.2.08.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	4.844.566.200,00	4.695.817.619,00	(148.748.581,00)	96,93		
02.2.08.03	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah	112.685.390,00	108.102.750,00	(4.582.640,00)	95,93		
02.2.08.03.5.1	BELANJA OPERASI	22.775.390,00	19.275.000,00	(3.500.390,00)	84,63		
02.2.08.03.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	22.775.390,00	19.275.000,00	(3.500.390,00)	84,63		
02.2.08.03.5.2	BELANJA MODAL	89.910.000,00	88.827.750,00	(1.082.250,00)	98,80		
02.2.08.03.5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	4.440.000,00	4.440.000,00	0,00	100,00		
02.2.08.03.5.2.06	Belanja Modal Aset Lainnya	85.470.000,00	84.387.750,00	(1.082.250,00)	98,73		
02.2.08.04	Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD	750.389.980,00	721.377.862,00	(29.012.118,00)	96,13		
02.2.08.04.5.1	BELANJA OPERASI	750.389.980,00	721.377.862,00	(29.012.118,00)	96,13		
02.2.08.04.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	750.389.980,00	721.377.862,00	(29.012.118,00)	96,13		
02	**PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH**	1.726.684.568,00	1.648.479.682,00	(78.204.886,00)	95,47		
02.2.01	Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	1.397.308.158,00	1.354.512.650,00	(42.795.508,00)	96,94		
02.2.01.01	Analisis Kondisi Daerah, Permasalahan, dan Isu Strategis Pembangunan Daerah	564.171.914,00	555.240.868,00	(8.931.046,00)	98,42		
02.2.01.01.5.1	BELANJA OPERASI	564.171.914,00	555.240.868,00	(8.931.046,00)	98,42		
02.2.01.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	564.171.914,00	555.240.868,00	(8.931.046,00)	98,42		
02.2.01.02	Koordinasi Penelaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Dokumen Kebijakan Lainnya	46.377.033,00	43.670.000,00	(2.707.033,00)	94,16		
02.2.01.02.5.1	BELANJA OPERASI	46.377.033,00	43.670.000,00	(2.707.033,00)	94,16		
02.2.01.02.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	46.377.033,00	43.670.000,00	(2.707.033,00)	94,16		
02.2.01.03	Pelaksanaan Konsultasi Publik	59.174.440,00	35.464.218,00	(23.710.222,00)	59,93		
02.2.01.03.5.1	BELANJA OPERASI	59.174.440,00	35.464.218,00	(23.710.222,00)	59,93		

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM	KETERANGAN
		ANGGARAN	REALISASI	(Rp)	(%)		
02.2.01.03.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	59.174.440,00	35.464.218,00	(23.710.222,00)	59,93		
02.2.01.04	Koordinasi Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah	36.952.457,00	35.602.500,00	(1.349.957,00)	96,35		
02.2.01.04.5.1	BELANJA OPERASI	36.952.457,00	35.602.500,00	(1.349.957,00)	96,35		
02.2.01.04.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	36.952.457,00	35.602.500,00	(1.349.957,00)	96,35		
02.2.01.05	Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota	46.021.700,00	45.498.350,00	(523.350,00)	98,86		
02.2.01.05.5.1	BELANJA OPERASI	46.021.700,00	45.498.350,00	(523.350,00)	98,86		
02.2.01.05.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	46.021.700,00	45.498.350,00	(523.350,00)	98,86		
02.2.01.06	Penyiapan Bahan Koordinasi Musrenbang Kecamatan	42.511.800,00	42.321.000,00	(190.800,00)	99,55		
02.2.01.06.5.1	BELANJA OPERASI	42.511.800,00	42.321.000,00	(190.800,00)	99,55		
02.2.01.06.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	42.511.800,00	42.321.000,00	(190.800,00)	99,55		
02.2.01.07	Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	602.098.814,00	596.715.714,00	(5.383.100,00)	99,11		
02.2.01.07.5.1	BELANJA OPERASI	602.098.814,00	596.715.714,00	(5.383.100,00)	99,11		
02.2.01.07.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	602.098.814,00	596.715.714,00	(5.383.100,00)	99,11		
02.2.02	Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	96.102.557,00	73.571.904,00	(22.530.653,00)	76,56		
02.2.02.02	Pembinaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah	82.665.322,00	66.350.804,00	(16.314.518,00)	80,26		
02.2.02.02.5.1	BELANJA OPERASI	82.665.322,00	66.350.804,00	(16.314.518,00)	80,26		
02.2.02.02.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	82.665.322,00	66.350.804,00	(16.314.518,00)	80,26		
02.2.02.03	Penyusunan Profil Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	13.437.235,00	7.221.100,00	(6.216.135,00)	53,74		
02.2.02.03.5.1	BELANJA OPERASI	13.437.235,00	7.221.100,00	(6.216.135,00)	53,74		
02.2.02.03.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	13.437.235,00	7.221.100,00	(6.216.135,00)	53,74		
02.2.03	Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	219.975.688,00	207.577.928,00	(12.397.760,00)	94,36		
02.2.03.01	Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten/Kota	91.813.280,00	82.550.650,00	(9.262.630,00)	89,91		
02.2.03.01.5.1	BELANJA OPERASI	91.813.280,00	82.550.650,00	(9.262.630,00)	89,91		
02.2.03.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	91.813.280,00	82.550.650,00	(9.262.630,00)	89,91		
02.2.03.03	Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	128.162.408,00	125.027.278,00	(3.135.130,00)	97,55		
02.2.03.03.5.1	BELANJA OPERASI	128.162.408,00	125.027.278,00	(3.135.130,00)	97,55		
02.2.03.03.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	128.162.408,00	125.027.278,00	(3.135.130,00)	97,55		
02.2.04	Implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah	13.298.165,00	12.817.200,00	(480.965,00)	96,38		
02.2.04.01	Pengelolaan Data dalam Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah	13.298.165,00	12.817.200,00	(480.965,00)	96,38		
02.2.04.01.5.1	BELANJA OPERASI	13.298.165,00	12.817.200,00	(480.965,00)	96,38		

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM	KETERANGAN
		ANGGARAN	REALISASI	(Rp)	(%)		
02.2.04.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	13.298.165,00	12.817.200,00	(480.965,00)	96,38		
02	**PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH**	195.582.593.470,00	85.360.562.905,00	(110.222.030.565,00)	43,64		
02.2.01	Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	691.040.850,00	676.357.244,00	(14.683.606,00)	97,88		
02.2.01.01	Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS	23.272.815,00	23.247.880,00	(24.935,00)	99,89		
02.2.01.01.5.1	BELANJA OPERASI	23.272.815,00	23.247.880,00	(24.935,00)	99,89		
02.2.01.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	23.272.815,00	23.247.880,00	(24.935,00)	99,89		
02.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	23.272.815,00	23.247.700,00	(25.115,00)	99,89		
02.2.01.02.5.1	BELANJA OPERASI	23.272.815,00	23.247.700,00	(25.115,00)	99,89		
02.2.01.02.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	23.272.815,00	23.247.700,00	(25.115,00)	99,89		
02.2.01.03	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA- SKPD	11.468.076,00	11.427.400,00	(40.676,00)	99,65		
02.2.01.03.5.1	BELANJA OPERASI	11.468.076,00	11.427.400,00	(40.676,00)	99,65		
02.2.01.03.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	11.468.076,00	11.427.400,00	(40.676,00)	99,65		
02.2.01.04	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan RKA-SKPD	11.468.076,00	11.405.000,00	(63.076,00)	99,45		
02.2.01.04.5.1	BELANJA OPERASI	11.468.076,00	11.405.000,00	(63.076,00)	99,45		
02.2.01.04.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	11.468.076,00	11.405.000,00	(63.076,00)	99,45		
02.2.01.05	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA- SKPD	11.948.928,00	11.766.400,00	(182.528,00)	98,47		
02.2.01.05.5.1	BELANJA OPERASI	11.948.928,00	11.766.400,00	(182.528,00)	98,47		
02.2.01.05.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	11.948.928,00	11.766.400,00	(182.528,00)	98,47		
02.2.01.06	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan DPA-SKPD	16.412.630,00	16.269.200,00	(143.430,00)	99,13		
02.2.01.06.5.1	BELANJA OPERASI	16.412.630,00	16.269.200,00	(143.430,00)	99,13		
02.2.01.06.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	16.412.630,00	16.269.200,00	(143.430,00)	99,13		
02.2.01.07	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	144.027.547,00	134.009.668,00	(10.017.879,00)	93,04		
02.2.01.07.5.1	BELANJA OPERASI	144.027.547,00	134.009.668,00	(10.017.879,00)	93,04		
02.2.01.07.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	144.027.547,00	134.009.668,00	(10.017.879,00)	93,04		
02.2.01.08	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	158.861.617,00	156.877.468,00	(1.984.149,00)	98,75		
02.2.01.08.5.1	BELANJA OPERASI	158.861.617,00	156.877.468,00	(1.984.149,00)	98,75		
02.2.01.08.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	158.861.617,00	156.877.468,00	(1.984.149,00)	98,75		
02.2.01.09	Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	160.944.606,00	160.358.828,00	(585.778,00)	99,64		
02.2.01.09.5.1	BELANJA OPERASI	160.944.606,00	160.358.828,00	(585.778,00)	99,64		
02.2.01.09.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	160.944.606,00	160.358.828,00	(585.778,00)	99,64		
02.2.01.10	Koordinasi Perencanaan Anggaran Pendapatan	11.421.900,00	11.003.400,00	(418.500,00)	96,34		
02.2.01.10.5.1	BELANJA OPERASI	11.421.900,00	11.003.400,00	(418.500,00)	96,34		

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM	KETERANGAN
		ANGGARAN	REALISASI	(Rp)	(%)		
02.2.01.10.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	11.421.900,00	11.003.400,00	(418.500,00)	96,34		
02.2.01.11	Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah	10.154.500,00	9.870.800,00	(283.700,00)	97,21		
02.2.01.11.5.1	BELANJA OPERASI	10.154.500,00	9.870.800,00	(283.700,00)	97,21		
02.2.01.11.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	10.154.500,00	9.870.800,00	(283.700,00)	97,21		
02.2.01.12	Koordinasi Perencanaan Anggaran Pembiayaan	7.024.100,00	6.912.600,00	(111.500,00)	98,41		
02.2.01.12.5.1	BELANJA OPERASI	7.024.100,00	6.912.600,00	(111.500,00)	98,41		
02.2.01.12.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	7.024.100,00	6.912.600,00	(111.500,00)	98,41		
02.2.01.13	Pembinaan Perencanaan Penganggaran Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	100.763.240,00	99.960.900,00	(802.340,00)	99,20		
02.2.01.13.5.1	BELANJA OPERASI	100.763.240,00	99.960.900,00	(802.340,00)	99,20		
02.2.01.13.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	100.763.240,00	99.960.900,00	(802.340,00)	99,20		
02.2.02	Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	926.345.759,00	908.138.230,00	(18.207.529,00)	98,03		
02.2.02.01	Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	97.038.052,00	95.319.582,00	(1.718.470,00)	98,23		
02.2.02.01.5.1	BELANJA OPERASI	97.038.052,00	95.319.582,00	(1.718.470,00)	98,23		
02.2.02.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	97.038.052,00	95.319.582,00	(1.718.470,00)	98,23		
02.2.02.03	Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD	5.348.868,00	5.318.000,00	(30.868,00)	99,42		
02.2.02.03.5.1	BELANJA OPERASI	5.348.868,00	5.318.000,00	(30.868,00)	99,42		
02.2.02.03.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	5.348.868,00	5.318.000,00	(30.868,00)	99,42		
02.2.02.05	Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	57.683.500,00	57.182.800,00	(500.700,00)	99,13		
02.2.02.05.5.1	BELANJA OPERASI	57.683.500,00	57.182.800,00	(500.700,00)	99,13		
02.2.02.05.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	57.683.500,00	57.182.800,00	(500.700,00)	99,13		
02.2.02.06	Koordinasi, Pelaksanaan Kerja Sama dan Pemantauan Transaksi Non Tunai dengan Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank	6.582.300,00	6.551.200,00	(31.100,00)	99,53		
02.2.02.06.5.1	BELANJA OPERASI	6.582.300,00	6.551.200,00	(31.100,00)	99,53		
02.2.02.06.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	6.582.300,00	6.551.200,00	(31.100,00)	99,53		
02.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/ Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	91.507.551,00	91.223.300,00	(284.251,00)	99,69		
02.2.02.07.5.1	BELANJA OPERASI	91.507.551,00	91.223.300,00	(284.251,00)	99,69		
02.2.02.07.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	91.507.551,00	91.223.300,00	(284.251,00)	99,69		
02.2.02.08	Koordinasi Pelaksanaan Piutang dan Utang Daerah yang Timbul Akibat Pengelolaan Kas, Pelaksanaan Analisis Pembiayaan dan Penempatan Uang Daerah sebagai Optimalisasi Kas	10.442.880,00	10.302.800,00	(140.080,00)	98,66		
02.2.02.08.5.1	BELANJA OPERASI	10.442.880,00	10.302.800,00	(140.080,00)	98,66		

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM	KETERANGAN
		ANGGARAN	REALISASI	(Rp)	(%)		
02.2.02.08.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	10.442.880,00	10.302.800,00	(140.080,00)	98,66		
02.2.02.09	Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait	144.729.556,00	144.072.500,00	(657.056,00)	99,55		
02.2.02.09.5.1	BELANJA OPERASI	144.729.556,00	144.072.500,00	(657.056,00)	99,55		
02.2.02.09.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	144.729.556,00	144.072.500,00	(657.056,00)	99,55		
02.2.02.11	Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota	513.013.052,00	498.168.048,00	(14.845.004,00)	97,11		
02.2.02.11.5.1	BELANJA OPERASI	435.313.052,00	420.493.048,00	(14.820.004,00)	96,60		
02.2.02.11.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	435.313.052,00	420.493.048,00	(14.820.004,00)	96,60		
02.2.02.11.5.2	BELANJA MODAL	77.700.000,00	77.675.000,00	(25.000,00)	99,97		
02.2.02.11.5.2.06	Belanja Modal Aset Lainnya	77.700.000,00	77.675.000,00	(25.000,00)	99,97		
02.2.03	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	660.576.865,00	584.453.181,00	(76.123.684,00)	88,48		
02.2.03.02	Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO dan Beban	42.045.100,00	40.805.600,00	(1.239.500,00)	97,05		
02.2.03.02.5.1	BELANJA OPERASI	42.045.100,00	40.805.600,00	(1.239.500,00)	97,05		
02.2.03.02.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	42.045.100,00	40.805.600,00	(1.239.500,00)	97,05		
02.2.03.03	Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran	28.813.000,00	27.852.900,00	(960.100,00)	96,67		
02.2.03.03.5.1	BELANJA OPERASI	28.813.000,00	27.852.900,00	(960.100,00)	96,67		
02.2.03.03.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	28.813.000,00	27.852.900,00	(960.100,00)	96,67		
02.2.03.04	Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	153.626.440,00	129.754.400,00	(23.872.040,00)	84,46		
02.2.03.04.5.1	BELANJA OPERASI	153.626.440,00	129.754.400,00	(23.872.040,00)	84,46		
02.2.03.04.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	153.626.440,00	129.754.400,00	(23.872.040,00)	84,46		
02.2.03.05	Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	266.702.709,00	248.693.181,00	(18.009.528,00)	93,25		
02.2.03.05.5.1	BELANJA OPERASI	266.702.709,00	248.693.181,00	(18.009.528,00)	93,25		
02.2.03.05.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	266.702.709,00	248.693.181,00	(18.009.528,00)	93,25		
02.2.03.06	Penyusunan Tanggapan/Tindak Lanjut Terhadap LHP BPK atas Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	11.404.500,00	7.916.200,00	(3.488.300,00)	69,41		
02.2.03.06.5.1	BELANJA OPERASI	11.404.500,00	7.916.200,00	(3.488.300,00)	69,41		
02.2.03.06.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	11.404.500,00	7.916.200,00	(3.488.300,00)	69,41		

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM	KETERANGAN
		ANGGARAN	REALISASI	(Rp)	(%)		
02.2.03.09	Penyusunan Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah	34.502.820,00	34.360.800,00	(142.020,00)	99,59		
02.2.03.09.5.1	BELANJA OPERASI	34.502.820,00	34.360.800,00	(142.020,00)	99,59		
02.2.03.09.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	34.502.820,00	34.360.800,00	(142.020,00)	99,59		
02.2.03.10	Penyusunan Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah	24.887.130,00	0,00	(24.887.130,00)	0		
02.2.03.10.5.1	BELANJA OPERASI	24.887.130,00	0,00	(24.887.130,00)	0		
02.2.03.10.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	24.887.130,00	0,00	(24.887.130,00)	0		
02.2.03.11	Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota	98.595.166,00	95.070.100,00	(3.525.066,00)	96,42		
02.2.03.11.5.1	BELANJA OPERASI	98.595.166,00	95.070.100,00	(3.525.066,00)	96,42		
02.2.03.11.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	98.595.166,00	95.070.100,00	(3.525.066,00)	96,42		
02.2.04	Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	192.877.290.930,00	82.766.929.782,00	(110.110.361.148,00)	42,91		
02.2.04.08	Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	183.297.290.930,00	82.554.429.782,00	(100.742.861.148,00)	45,04		
02.2.04.08.5.1	BELANJA OPERASI	100.000.000,00	0,00	(100.000.000,00)	0		
02.2.04.08.5.1.04	Belanja Subsidi	100.000.000,00	0,00	(100.000.000,00)	0		
02.2.04.08.5.4	BELANJA TRANSFER	183.197.290.930,00	82.554.429.782,00	(100.642.861.148,00)	45,06		
02.2.04.08.5.4.01	Belanja Bagi Hasil	10.655.216.000,00	5.391.902.399,00	(5.263.313.601,00)	50,60		
02.2.04.08.5.4.02	Belanja Bantuan Keuangan	172.542.074.930,00	77.162.527.383,00	(95.379.547.547,00)	44,72		
02.2.04.09	Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	9.580.000.000,00	212.500.000,00	(9.367.500.000,00)	2,22		
02.2.04.09.5.3	BELANJA TIDAK TERDUGA	9.580.000.000,00	212.500.000,00	(9.367.500.000,00)	2,22		
02.2.04.09.5.3.01	Belanja Tidak Terduga	9.580.000.000,00	212.500.000,00	(9.367.500.000,00)	2,22		
02.2.05	Pengelolaan Data dan Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah Lingkup Keuangan Daerah	427.339.066,00	424.684.468,00	(2.654.598,00)	99,38		
02.2.05.02	Implementasi dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah	427.339.066,00	424.684.468,00	(2.654.598,00)	99,38		
02.2.05.02.5.1	BELANJA OPERASI	293.617.783,00	291.354.598,00	(2.263.185,00)	99,23		
02.2.05.02.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	293.617.783,00	291.354.598,00	(2.263.185,00)	99,23		
02.2.05.02.5.2	BELANJA MODAL	133.721.283,00	133.329.870,00	(391.413,00)	99,71		
02.2.05.02.5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	133.721.283,00	133.329.870,00	(391.413,00)	99,71		
02	**PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH**	2.067.495.948,00	2.019.101.207,00	(48.394.741,00)	97,66		
02.2.01	Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN	580.756.864,00	578.016.064,00	(2.740.800,00)	99,53		
02.2.01.02	Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN	210.764.400,00	210.401.127,00	(363.273,00)	99,83		
02.2.01.02.5.1	BELANJA OPERASI	210.764.400,00	210.401.127,00	(363.273,00)	99,83		
02.2.01.02.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	210.764.400,00	210.401.127,00	(363.273,00)	99,83		
02.2.01.03	Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK	173.235.700,00	172.254.630,00	(981.070,00)	99,43		

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM	KETERANGAN
		ANGGARAN	REALISASI	(Rp)	(%)		
02.2.01.03.5.1	BELANJA OPERASI	173.235.700,00	172.254.630,00	(981.070,00)	99,43		
02.2.01.03.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	173.235.700,00	172.254.630,00	(981.070,00)	99,43		
02.2.01.06	Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian	103.226.000,00	103.167.017,00	(58.983,00)	99,94		
02.2.01.06.5.1	BELANJA OPERASI	103.226.000,00	103.167.017,00	(58.983,00)	99,94		
02.2.01.06.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	48.226.000,00	48.167.017,00	(58.983,00)	99,88		
02.2.01.06.5.1.05	Belanja Hibah	55.000.000,00	55.000.000,00	0,00	100,00		
02.2.01.11	Pengelolaan Data Kepegawaian	93.530.764,00	92.193.290,00	(1.337.474,00)	98,57		
02.2.01.11.5.1	BELANJA OPERASI	93.530.764,00	92.193.290,00	(1.337.474,00)	98,57		
02.2.01.11.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	93.530.764,00	92.193.290,00	(1.337.474,00)	98,57		
02.2.02	Mutasi dan Promosi ASN	621.589.392,00	607.688.341,00	(13.901.051,00)	97,76		
02.2.02.01	Pengelolaan Mutasi ASN	84.242.164,00	74.746.250,00	(9.495.914,00)	88,73		
02.2.02.01.5.1	BELANJA OPERASI	84.242.164,00	74.746.250,00	(9.495.914,00)	88,73		
02.2.02.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	84.242.164,00	74.746.250,00	(9.495.914,00)	88,73		
02.2.02.02	Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	134.602.064,00	131.500.671,00	(3.101.393,00)	97,70		
02.2.02.02.5.1	BELANJA OPERASI	134.602.064,00	131.500.671,00	(3.101.393,00)	97,70		
02.2.02.02.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	134.602.064,00	131.500.671,00	(3.101.393,00)	97,70		
02.2.02.03	Pengelolaan Promosi ASN	402.745.164,00	401.441.420,00	(1.303.744,00)	99,68		
02.2.02.03.5.1	BELANJA OPERASI	402.745.164,00	401.441.420,00	(1.303.744,00)	99,68		
02.2.02.03.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	402.745.164,00	401.441.420,00	(1.303.744,00)	99,68		
02.2.03	Pengembangan Kompetensi ASN	707.823.328,00	677.338.273,00	(30.485.055,00)	95,69		
02.2.03.01	Peningkatan Kapasitas Kinerja ASN	418.386.264,00	417.199.358,00	(1.186.906,00)	99,72		
02.2.03.01.5.1	BELANJA OPERASI	418.386.264,00	417.199.358,00	(1.186.906,00)	99,72		
02.2.03.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	418.386.264,00	417.199.358,00	(1.186.906,00)	99,72		
02.2.03.04	Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN	153.076.764,00	123.905.283,00	(29.171.481,00)	80,94		
02.2.03.04.5.1	BELANJA OPERASI	153.076.764,00	123.905.283,00	(29.171.481,00)	80,94		
02.2.03.04.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	153.076.764,00	123.905.283,00	(29.171.481,00)	80,94		
02.2.03.05	Koordinasi dan Kerja Sama Pelaksanaan Diklat	88.489.200,00	88.455.400,00	(33.800,00)	99,96		
02.2.03.05.5.1	BELANJA OPERASI	88.489.200,00	88.455.400,00	(33.800,00)	99,96		
02.2.03.05.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	88.489.200,00	88.455.400,00	(33.800,00)	99,96		
02.2.03.14	Fasilitasi Pengembangan Karir dalam Jabatan Fungsional	47.871.100,00	47.778.232,00	(92.868,00)	99,81		
02.2.03.14.5.1	BELANJA OPERASI	47.871.100,00	47.778.232,00	(92.868,00)	99,81		
02.2.03.14.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	47.871.100,00	47.778.232,00	(92.868,00)	99,81		
02.2.04	Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	157.326.364,00	156.058.529,00	(1.267.835,00)	99,19		
02.2.04.04	Pengelolaan Pemberian Penghargaan bagi Pegawai	34.406.700,00	34.333.223,00	(73.477,00)	99,79		
02.2.04.04.5.1	BELANJA OPERASI	34.406.700,00	34.333.223,00	(73.477,00)	99,79		
02.2.04.04.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	34.406.700,00	34.333.223,00	(73.477,00)	99,79		
02.2.04.07	Pembinaan Disiplin ASN	66.562.200,00	66.524.042,00	(38.158,00)	99,94		
02.2.04.07.5.1	BELANJA OPERASI	66.562.200,00	66.524.042,00	(38.158,00)	99,94		
02.2.04.07.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	66.562.200,00	66.524.042,00	(38.158,00)	99,94		

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM	KETERANGAN
		ANGGARAN	REALISASI	(Rp)	(%)		
02.2.04.08	Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN	56.357.464,00	55.201.264,00	(1.156.200,00)	97,95		
02.2.04.08.5.1	BELANJA OPERASI	56.357.464,00	55.201.264,00	(1.156.200,00)	97,95		
02.2.04.08.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	56.357.464,00	55.201.264,00	(1.156.200,00)	97,95		
02	**PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA**	1.310.887.400,00	1.310.559.524,00	(327.876,00)	99,97		
02.2.02	Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional	1.310.887.400,00	1.310.559.524,00	(327.876,00)	99,97		
02.2.02.07	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan	1.310.887.400,00	1.310.559.524,00	(327.876,00)	99,97		
02.2.02.07.5.1	BELANJA OPERASI	1.310.887.400,00	1.310.559.524,00	(327.876,00)	99,97		
02.2.02.07.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.310.887.400,00	1.310.559.524,00	(327.876,00)	99,97		
02	**PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH**	768.565.270,00	741.994.253,00	(26.571.017,00)	96,54		
02.2.01	Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan	9.589.200,00	7.190.800,00	(2.398.400,00)	74,99		
02.2.01.03	Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Kelembagaan dan Ketatalaksanaan	9.589.200,00	7.190.800,00	(2.398.400,00)	74,99		
02.2.01.03.5.1	BELANJA OPERASI	9.589.200,00	7.190.800,00	(2.398.400,00)	74,99		
02.2.01.03.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	9.589.200,00	7.190.800,00	(2.398.400,00)	74,99		
02.2.02	Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan	385.172.980,00	366.043.600,00	(19.129.380,00)	95,03		
02.2.02.01	Penelitian dan Pengembangan Bidang Aspek- Aspek Sosial	385.172.980,00	366.043.600,00	(19.129.380,00)	95,03		
02.2.02.01.5.1	BELANJA OPERASI	385.172.980,00	366.043.600,00	(19.129.380,00)	95,03		
02.2.02.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	385.172.980,00	366.043.600,00	(19.129.380,00)	95,03		
02.2.04	Pengembangan Inovasi dan Teknologi	373.803.090,00	368.759.853,00	(5.043.237,00)	98,65		
02.2.04.03	Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Bersifat Inovatif	278.440.766,00	275.048.089,00	(3.392.677,00)	98,78		
02.2.04.03.5.1	BELANJA OPERASI	278.440.766,00	275.048.089,00	(3.392.677,00)	98,78		
02.2.04.03.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	278.440.766,00	275.048.089,00	(3.392.677,00)	98,78		
02.2.04.04	Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan	95.362.324,00	93.711.764,00	(1.650.560,00)	98,27		
02.2.04.04.5.1	BELANJA OPERASI	95.362.324,00	93.711.764,00	(1.650.560,00)	98,27		
02.2.04.04.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	95.362.324,00	93.711.764,00	(1.650.560,00)	98,27		
02	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN**	1.719.733.750,00	1.657.620.128,00	(62.113.622,00)	96,39		
02.2.01	Penyelenggaraan Pengawasan Internal	1.253.042.754,00	1.221.217.528,00	(31.825.226,00)	97,46		
02.2.01.01	Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	137.896.968,00	130.041.600,00	(7.855.368,00)	94,30		
02.2.01.01.5.1	BELANJA OPERASI	137.896.968,00	130.041.600,00	(7.855.368,00)	94,30		
02.2.01.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	137.896.968,00	130.041.600,00	(7.855.368,00)	94,30		

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM	KETERANGAN
		ANGGARAN	REALISASI	(Rp)	(%)		
02.2.01.02	Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	97.777.600,00	96.765.000,00	(1.012.600,00)	98,96		
02.2.01.02.5.1	BELANJA OPERASI	97.777.600,00	96.765.000,00	(1.012.600,00)	98,96		
02.2.01.02.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	97.777.600,00	96.765.000,00	(1.012.600,00)	98,96		
02.2.01.03	Reviu Laporan Kinerja	154.068.716,00	134.317.884,00	(19.750.832,00)	87,18		
02.2.01.03.5.1	BELANJA OPERASI	154.068.716,00	134.317.884,00	(19.750.832,00)	87,18		
02.2.01.03.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	154.068.716,00	134.317.884,00	(19.750.832,00)	87,18		
02.2.01.04	Reviu Laporan Keuangan	51.123.170,00	49.992.400,00	(1.130.770,00)	97,79		
02.2.01.04.5.1	BELANJA OPERASI	51.123.170,00	49.992.400,00	(1.130.770,00)	97,79		
02.2.01.04.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	51.123.170,00	49.992.400,00	(1.130.770,00)	97,79		
02.2.01.05	Pengawasan Desa	496.954.640,00	495.917.000,00	(1.037.640,00)	99,79		
02.2.01.05.5.1	BELANJA OPERASI	496.954.640,00	495.917.000,00	(1.037.640,00)	99,79		
02.2.01.05.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	496.954.640,00	495.917.000,00	(1.037.640,00)	99,79		
02.2.01.06	Kerja Sama Pengawasan Internal	70.260.060,00	69.441.294,00	(818.766,00)	98,83		
02.2.01.06.5.1	BELANJA OPERASI	70.260.060,00	69.441.294,00	(818.766,00)	98,83		
02.2.01.06.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	70.260.060,00	69.441.294,00	(818.766,00)	98,83		
02.2.01.07	Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	244.961.600,00	244.742.350,00	(219.250,00)	99,91		
02.2.01.07.5.1	BELANJA OPERASI	244.961.600,00	244.742.350,00	(219.250,00)	99,91		
02.2.01.07.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	244.961.600,00	244.742.350,00	(219.250,00)	99,91		
02.2.02	Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	466.690.996,00	436.402.600,00	(30.288.396,00)	93,51		
02.2.02.01	Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah	64.275.660,00	44.550.000,00	(19.725.660,00)	69,31		
02.2.02.01.5.1	BELANJA OPERASI	64.275.660,00	44.550.000,00	(19.725.660,00)	69,31		
02.2.02.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	64.275.660,00	44.550.000,00	(19.725.660,00)	69,31		
02.2.02.02	Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	402.415.336,00	391.852.600,00	(10.562.736,00)	97,38		
02.2.02.02.5.1	BELANJA OPERASI	402.415.336,00	391.852.600,00	(10.562.736,00)	97,38		
02.2.02.02.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	402.415.336,00	391.852.600,00	(10.562.736,00)	97,38		
02	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	106.655.404,00	105.742.504,00	(912.900,00)	99,14		
02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	83.897.146,00	83.081.144,00	(816.002,00)	99,03		
02.2.01.01	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	12.534.800,00	12.534.800,00	0,00	100,00		
02.2.01.01.5.1	BELANJA OPERASI	12.534.800,00	12.534.800,00	0,00	100,00		
02.2.01.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	12.534.800,00	12.534.800,00	0,00	100,00		
02.2.01.02	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	71.362.346,00	70.546.344,00	(816.002,00)	98,86		
02.2.01.02.5.1	BELANJA OPERASI	71.362.346,00	70.546.344,00	(816.002,00)	98,86		
02.2.01.02.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	71.362.346,00	70.546.344,00	(816.002,00)	98,86		

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM	KETERANGAN
		ANGGARAN	REALISASI	(Rp)	(%)		
02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	22.758.258,00	22.661.360,00	(96.898,00)	99,57		
02.2.02.01	Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan	17.668.131,00	17.615.360,00	(52.771,00)	99,70		
02.2.02.01.5.1	BELANJA OPERASI	17.668.131,00	17.615.360,00	(52.771,00)	99,70		
02.2.02.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	17.668.131,00	17.615.360,00	(52.771,00)	99,70		
02.2.02.03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	5.090.127,00	5.046.000,00	(44.127,00)	99,13		
02.2.02.03.5.1	BELANJA OPERASI	5.090.127,00	5.046.000,00	(44.127,00)	99,13		
02.2.02.03.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	5.090.127,00	5.046.000,00	(44.127,00)	99,13		
02	**PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN**	483.068.425,00	428.828.365,00	(54.240.060,00)	88,77		
02.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	483.068.425,00	428.828.365,00	(54.240.060,00)	88,77		
02.2.01.01	Penyusunan Program Kerja di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	97.958.397,00	74.744.156,00	(23.214.241,00)	76,30		
02.2.01.01.5.1	BELANJA OPERASI	97.958.397,00	74.744.156,00	(23.214.241,00)	76,30		
02.2.01.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	97.958.397,00	74.744.156,00	(23.214.241,00)	76,30		
02.2.01.04	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	385.110.028,00	354.084.209,00	(31.025.819,00)	91,94		
02.2.01.04.5.1	BELANJA OPERASI	385.110.028,00	354.084.209,00	(31.025.819,00)	91,94		
02.2.01.04.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	385.110.028,00	354.084.209,00	(31.025.819,00)	91,94		
03	**PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN**	8.981.959.284,00	7.724.696.671,00	(1.257.262.613,00)	86,00		
03.2.02	Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota	8.144.705.745,00	6.902.164.860,00	(1.242.540.885,00)	84,74		
03.2.02.02	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar	8.144.705.745,00	6.902.164.860,00	(1.242.540.885,00)	84,74		
03.2.02.02.5.1	BELANJA OPERASI	8.144.705.745,00	6.902.164.860,00	(1.242.540.885,00)	84,74		
03.2.02.02.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	8.144.705.745,00	6.902.164.860,00	(1.242.540.885,00)	84,74		
03.2.03	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	837.253.539,00	822.531.811,00	(14.721.728,00)	98,24		

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM	KETERANGAN
		ANGGARAN	REALISASI	(Rp)	(%)		
03.2.03.01	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	837.253.539,00	822.531.811,00	(14.721.728,00)	98,24		
03.2.03.01.5.1	BELANJA OPERASI	837.253.539,00	822.531.811,00	(14.721.728,00)	98,24		
03.2.03.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	837.253.539,00	822.531.811,00	(14.721.728,00)	98,24		
03	**PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM**	8.681.600.000,00	8.398.126.169,00	(283.473.831,00)	96,73		
03.2.01	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota	8.681.600.000,00	8.398.126.169,00	(283.473.831,00)	96,73		
03.2.01.04	Pembangunan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan	2.690.600.000,00	2.545.030.600,00	(145.569.400,00)	94,59		
03.2.01.04.5.1	BELANJA OPERASI	216.000.000,00	214.395.600,00	(1.604.400,00)	99,26		
03.2.01.04.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	216.000.000,00	214.395.600,00	(1.604.400,00)	99,26		
03.2.01.04.5.2	BELANJA MODAL	2.474.600.000,00	2.330.635.000,00	(143.965.000,00)	94,18		
03.2.01.04.5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	2.474.600.000,00	2.330.635.000,00	(143.965.000,00)	94,18		
03.2.01.05	Peningkatan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perkotaan	5.991.000.000,00	5.853.095.569,00	(137.904.431,00)	97,70		
03.2.01.05.5.1	BELANJA OPERASI	5.442.000.000,00	5.353.175.569,00	(88.824.431,00)	98,37		
03.2.01.05.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	5.442.000.000,00	5.353.175.569,00	(88.824.431,00)	98,37		
03.2.01.05.5.2	BELANJA MODAL	549.000.000,00	499.920.000,00	(49.080.000,00)	91,06		
03.2.01.05.5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	549.000.000,00	499.920.000,00	(49.080.000,00)	91,06		
03	**PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN**	975.413.200,00	964.447.600,00	(10.965.600,00)	98,88		
03.2.02	Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	50.000.000,00	48.512.600,00	(1.487.400,00)	97,03		
03.2.02.02	Penyusunan Rencana Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh	50.000.000,00	48.512.600,00	(1.487.400,00)	97,03		
03.2.02.02.5.1	BELANJA OPERASI	50.000.000,00	48.512.600,00	(1.487.400,00)	97,03		
03.2.02.02.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	50.000.000,00	48.512.600,00	(1.487.400,00)	97,03		
03.2.03	Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	925.413.200,00	915.935.000,00	(9.478.200,00)	98,98		
03.2.03.02	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni	925.413.200,00	915.935.000,00	(9.478.200,00)	98,98		
03.2.03.02.5.1	BELANJA OPERASI	925.413.200,00	915.935.000,00	(9.478.200,00)	98,98		
03.2.03.02.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	925.413.200,00	915.935.000,00	(9.478.200,00)	98,98		
03	**PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA**	2.233.833.654,00	2.160.996.490,00	(72.837.164,00)	96,74		
03.2.01	Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota	618.028.700,00	613.522.100,00	(4.506.600,00)	99,27		
03.2.01.01	Penyusunan Kajian Risiko Bencana Kabupaten/Kota	618.028.700,00	613.522.100,00	(4.506.600,00)	99,27		
03.2.01.01.5.1	BELANJA OPERASI	618.028.700,00	613.522.100,00	(4.506.600,00)	99,27		
03.2.01.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	618.028.700,00	613.522.100,00	(4.506.600,00)	99,27		
03.2.02	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	664.475.740,00	621.132.693,00	(43.343.047,00)	93,48		

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM	KETERANGAN
		ANGGARAN	REALISASI	(Rp)	(%)		
03.2.02.02	Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota	16.192.800,00	16.185.000,00	(7.800,00)	99,95		
03.2.02.02.5.1	BELANJA OPERASI	16.192.800,00	16.185.000,00	(7.800,00)	99,95		
03.2.02.02.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	16.192.800,00	16.185.000,00	(7.800,00)	99,95		
03.2.02.03	Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/Kota	528.252.695,00	484.982.652,00	(43.270.043,00)	91,81		
03.2.02.03.5.1	BELANJA OPERASI	499.995.980,00	456.757.752,00	(43.238.228,00)	91,35		
03.2.02.03.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	499.995.980,00	456.757.752,00	(43.238.228,00)	91,35		
03.2.02.03.5.2	BELANJA MODAL	28.256.715,00	28.224.900,00	(31.815,00)	99,89		
03.2.02.03.5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	28.256.715,00	28.224.900,00	(31.815,00)	99,89		
03.2.02.04	Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	104.720.204,00	104.655.000,00	(65.204,00)	99,94		
03.2.02.04.5.1	BELANJA OPERASI	104.720.204,00	104.655.000,00	(65.204,00)	99,94		
03.2.02.04.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	104.720.204,00	104.655.000,00	(65.204,00)	99,94		
03.2.02.08	Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana Kabupaten/Kota	15.310.041,00	15.310.041,00	0,00	100,00		
03.2.02.08.5.1	BELANJA OPERASI	15.310.041,00	15.310.041,00	0,00	100,00		
03.2.02.08.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	15.310.041,00	15.310.041,00	0,00	100,00		
03.2.03	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	433.863.840,00	419.063.189,00	(14.800.651,00)	96,59		
03.2.03.02	Respon Cepat Darurat Bencana Kabupaten/Kota	32.990.775,00	32.990.775,00	0,00	100,00		
03.2.03.02.5.1	BELANJA OPERASI	32.990.775,00	32.990.775,00	0,00	100,00		
03.2.03.02.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	32.990.775,00	32.990.775,00	0,00	100,00		
03.2.03.03	Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	400.873.065,00	386.072.414,00	(14.800.651,00)	96,31		
03.2.03.03.5.1	BELANJA OPERASI	365.908.065,00	352.712.414,00	(13.195.651,00)	96,39		
03.2.03.03.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	365.908.065,00	352.712.414,00	(13.195.651,00)	96,39		
03.2.03.03.5.2	BELANJA MODAL	34.965.000,00	33.360.000,00	(1.605.000,00)	95,41		
03.2.03.03.5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	34.965.000,00	33.360.000,00	(1.605.000,00)	95,41		
03.2.04	Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana	517.465.374,00	507.278.508,00	(10.186.866,00)	98,03		
03.2.04.06	Penanganan Pasca Bencana Kabupaten/Kota	517.465.374,00	507.278.508,00	(10.186.866,00)	98,03		
03.2.04.06.5.1	BELANJA OPERASI	517.465.374,00	507.278.508,00	(10.186.866,00)	98,03		
03.2.04.06.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	517.465.374,00	507.278.508,00	(10.186.866,00)	98,03		
03	**PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA**	280.000.130,00	277.818.654,00	(2.181.476,00)	99,22		
03.2.01	Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi	280.000.130,00	277.818.654,00	(2.181.476,00)	99,22		
03.2.01.01	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi	280.000.130,00	277.818.654,00	(2.181.476,00)	99,22		
03.2.01.01.5.1	BELANJA OPERASI	280.000.130,00	277.818.654,00	(2.181.476,00)	99,22		

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM	KETERANGAN
		ANGGARAN	REALISASI	(Rp)	(%)		
03.2.01.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	280.000.130,00	277.818.654,00	(2.181.476,00)	99,22		
03	**PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT**	1.057.872.279,00	985.550.535,00	(72.321.744,00)	93,16		
03.2.01	Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan	50.412.499,00	45.719.999,00	(4.692.500,00)	90,69		
03.2.01.01	Penyediaan Informasi Harga Pangan dan Neraca Bahan Makanan	50.412.499,00	45.719.999,00	(4.692.500,00)	90,69		
03.2.01.01.5.1	BELANJA OPERASI	50.412.499,00	45.719.999,00	(4.692.500,00)	90,69		
03.2.01.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	50.412.499,00	45.719.999,00	(4.692.500,00)	90,69		
03.2.02	Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Kabupaten/Kota	751.555.100,00	692.874.700,00	(58.680.400,00)	92,19		
03.2.02.03	Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota	751.555.100,00	692.874.700,00	(58.680.400,00)	92,19		
03.2.02.03.5.1	BELANJA OPERASI	751.555.100,00	692.874.700,00	(58.680.400,00)	92,19		
03.2.02.03.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	751.555.100,00	692.874.700,00	(58.680.400,00)	92,19		
03.2.04	Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi	255.904.680,00	246.955.836,00	(8.948.844,00)	96,50		
03.2.04.02	Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	255.904.680,00	246.955.836,00	(8.948.844,00)	96,50		
03.2.04.02.5.1	BELANJA OPERASI	231.309.300,00	227.835.836,00	(3.473.464,00)	98,50		
03.2.04.02.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	231.309.300,00	227.835.836,00	(3.473.464,00)	98,50		
03.2.04.02.5.2	BELANJA MODAL	24.595.380,00	19.120.000,00	(5.475.380,00)	77,74		
03.2.04.02.5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	24.595.380,00	19.120.000,00	(5.475.380,00)	77,74		
03	**PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP**	442.553.320,00	425.861.935,00	(16.691.385,00)	96,23		
03.2.01	Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	442.553.320,00	425.861.935,00	(16.691.385,00)	96,23		
03.2.01.01	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	183.149.300,00	171.827.715,00	(11.321.585,00)	93,82		
03.2.01.01.5.1	BELANJA OPERASI	183.149.300,00	171.827.715,00	(11.321.585,00)	93,82		
03.2.01.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	183.149.300,00	171.827.715,00	(11.321.585,00)	93,82		
03.2.01.03	Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	259.404.020,00	254.034.220,00	(5.369.800,00)	97,93		
03.2.01.03.5.1	BELANJA OPERASI	259.404.020,00	254.034.220,00	(5.369.800,00)	97,93		
03.2.01.03.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	259.404.020,00	254.034.220,00	(5.369.800,00)	97,93		
03	**PROGRAM PENCATATAN SIPIL**	712.167.464,00	695.901.533,00	(16.265.931,00)	97,72		
03.2.01	Pelayanan Pencatatan Sipil	712.167.464,00	695.901.533,00	(16.265.931,00)	97,72		

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM	KETERANGAN
		ANGGARAN	REALISASI	(Rp)	(%)		
03.2.01.01	Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Penting	637.379.264,00	621.332.685,00	(16.046.579,00)	97,48		
03.2.01.01.5.1	BELANJA OPERASI	637.379.264,00	621.332.685,00	(16.046.579,00)	97,48		
03.2.01.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	637.379.264,00	621.332.685,00	(16.046.579,00)	97,48		
03.2.01.02	Peningkatan dalam Pelayanan Pencatatan Sipil	74.788.200,00	74.568.848,00	(219.352,00)	99,71		
03.2.01.02.5.1	BELANJA OPERASI	74.788.200,00	74.568.848,00	(219.352,00)	99,71		
03.2.01.02.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	74.788.200,00	74.568.848,00	(219.352,00)	99,71		
03	**PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)**	3.026.281.055,00	2.618.907.271,00	(407.373.784,00)	86,54		
03.2.01	Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai Kearifan Budaya Lokal	1.263.430.000,00	1.038.357.424,00	(225.072.576,00)	82,19		
03.2.01.01	Advokasi Program KKBPK kepada Stakeholders dan Mitra Kerja	80.000.000,00	62.688.400,00	(17.311.600,00)	78,36		
03.2.01.01.5.1	BELANJA OPERASI	80.000.000,00	62.688.400,00	(17.311.600,00)	78,36		
03.2.01.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	80.000.000,00	62.688.400,00	(17.311.600,00)	78,36		
03.2.01.02	Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Program KKBPK Sesuai Kearifan Budaya Lokal	46.000.000,00	12.517.100,00	(33.482.900,00)	27,21		
03.2.01.02.5.1	BELANJA OPERASI	46.000.000,00	12.517.100,00	(33.482.900,00)	27,21		
03.2.01.02.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	46.000.000,00	12.517.100,00	(33.482.900,00)	27,21		
03.2.01.04	Promosi dan KIE Program KKBPK Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang	150.000.000,00	125.140.000,00	(24.860.000,00)	83,43		
03.2.01.04.5.1	BELANJA OPERASI	150.000.000,00	125.140.000,00	(24.860.000,00)	83,43		
03.2.01.04.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	150.000.000,00	125.140.000,00	(24.860.000,00)	83,43		
03.2.01.06	Pelaksanaan Mekanisme Operasional Program KKBPK Melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok)	156.000.000,00	116.144.010,00	(39.855.990,00)	74,45		
03.2.01.06.5.1	BELANJA OPERASI	156.000.000,00	116.144.010,00	(39.855.990,00)	74,45		
03.2.01.06.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	156.000.000,00	116.144.010,00	(39.855.990,00)	74,45		
03.2.01.07	Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan KKBPK	577.800.000,00	553.121.656,00	(24.678.344,00)	95,73		
03.2.01.07.5.1	BELANJA OPERASI	577.800.000,00	553.121.656,00	(24.678.344,00)	95,73		
03.2.01.07.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	577.800.000,00	553.121.656,00	(24.678.344,00)	95,73		
03.2.01.08	Pengendalian Program KKBPK	253.630.000,00	168.746.258,00	(84.883.742,00)	66,53		
03.2.01.08.5.1	BELANJA OPERASI	242.055.197,00	166.346.258,00	(75.708.939,00)	68,72		
03.2.01.08.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	242.055.197,00	166.346.258,00	(75.708.939,00)	68,72		
03.2.01.08.5.2	BELANJA MODAL	11.574.803,00	2.400.000,00	(9.174.803,00)	20,73		
03.2.01.08.5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	11.574.803,00	2.400.000,00	(9.174.803,00)	20,73		
03.2.02	Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)	1.156.260.099,00	979.162.094,00	(177.098.005,00)	84,68		

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM	KETERANGAN
		ANGGARAN	REALISASI	(Rp)	(%)		
03.2.02.01	Pembinaan IMP dan Program KKBPK di Lini Lapangan oleh PKB/PLKB	176.000.000,00	72.000.000,00	(104.000.000,00)	40,91		
03.2.02.01.5.1	BELANJA OPERASI	176.000.000,00	72.000.000,00	(104.000.000,00)	40,91		
03.2.02.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	176.000.000,00	72.000.000,00	(104.000.000,00)	40,91		
03.2.02.03	Penguatan Pelaksanaan Penyuluhan, Penggerakan, Pelayanan dan Pengembangan Program KKBPK untuk Petugas Keluarga Berencana/Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana (PKB/PLKB)	726.260.099,00	653.162.094,00	(73.098.005,00)	89,94		
03.2.02.03.5.1	BELANJA OPERASI	726.260.099,00	653.162.094,00	(73.098.005,00)	89,94		
03.2.02.03.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	726.260.099,00	653.162.094,00	(73.098.005,00)	89,94		
03.2.02.04	Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)	254.000.000,00	254.000.000,00	0,00	100,00		
03.2.02.04.5.1	BELANJA OPERASI	254.000.000,00	254.000.000,00	0,00	100,00		
03.2.02.04.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	254.000.000,00	254.000.000,00	0,00	100,00		
03.2.03	Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota	189.076.000,00	187.550.073,00	(1.525.927,00)	99,19		
03.2.03.01	Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	49.800.000,00	48.939.664,00	(860.336,00)	98,27		
03.2.03.01.5.1	BELANJA OPERASI	49.800.000,00	48.939.664,00	(860.336,00)	98,27		
03.2.03.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	49.800.000,00	48.939.664,00	(860.336,00)	98,27		
03.2.03.03	Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	65.776.000,00	65.455.467,00	(320.533,00)	99,51		
03.2.03.03.5.1	BELANJA OPERASI	65.776.000,00	65.455.467,00	(320.533,00)	99,51		
03.2.03.03.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	65.776.000,00	65.455.467,00	(320.533,00)	99,51		
03.2.03.08	Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	13.500.000,00	13.277.792,00	(222.208,00)	98,35		
03.2.03.08.5.1	BELANJA OPERASI	13.500.000,00	13.277.792,00	(222.208,00)	98,35		
03.2.03.08.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	13.500.000,00	13.277.792,00	(222.208,00)	98,35		
03.2.03.11	Dukungan Operasional Pelayanan KB Bergerak	60.000.000,00	59.877.150,00	(122.850,00)	99,80		
03.2.03.11.5.1	BELANJA OPERASI	60.000.000,00	59.877.150,00	(122.850,00)	99,80		
03.2.03.11.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	60.000.000,00	59.877.150,00	(122.850,00)	99,80		
03.2.04	Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	417.514.956,00	413.837.680,00	(3.677.276,00)	99,12		
03.2.04.02	Integrasi Pembangunan Lintas Sektor di Kampung KB	9.000.000,00	8.503.260,00	(496.740,00)	94,48		
03.2.04.02.5.1	BELANJA OPERASI	9.000.000,00	8.503.260,00	(496.740,00)	94,48		
03.2.04.02.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	9.000.000,00	8.503.260,00	(496.740,00)	94,48		

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM	KETERANGAN
		ANGGARAN	REALISASI	(Rp)	(%)		
03.2.04.03	Pelaksanaan dan Pengelolaan Program KKBPK di Kampung KB	356.500.000,00	353.589.120,00	(2.910.880,00)	99,18		
03.2.04.03.5.1	BELANJA OPERASI	356.500.000,00	353.589.120,00	(2.910.880,00)	99,18		
03.2.04.03.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	356.500.000,00	353.589.120,00	(2.910.880,00)	99,18		
03.2.04.04	Pembinaan Terpadu Kampung KB	52.014.956,00	51.745.300,00	(269.656,00)	99,48		
03.2.04.04.5.1	BELANJA OPERASI	52.014.956,00	51.745.300,00	(269.656,00)	99,48		
03.2.04.04.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	52.014.956,00	51.745.300,00	(269.656,00)	99,48		
03	**PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN**	248.748.512,00	243.988.612,00	(4.759.900,00)	98,09		
03.2.03	Penerbitan Izin Usaha Penyelenggaraan Angkutan Sungai dan Danau Sesuai dengan Domisili Orang Perseorangan Warga Negara Indonesia atau Badan Usaha	184.748.512,00	181.156.912,00	(3.591.600,00)	98,06		
03.2.03.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Penyelenggaraan Angkutan Sungai dan Danau Sesuai dengan Domisili Orang Perseorangan Warga Negara Indonesia atau Badan Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	184.748.512,00	181.156.912,00	(3.591.600,00)	98,06		
03.2.03.02.5.1	BELANJA OPERASI	184.748.512,00	181.156.912,00	(3.591.600,00)	98,06		
03.2.03.02.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	184.748.512,00	181.156.912,00	(3.591.600,00)	98,06		
03.2.05	Penerbitan Izin Usaha Penyelenggaraan Angkutan Penyeberangan Sesuai dengan Domisili Badan Usaha	64.000.000,00	62.831.700,00	(1.168.300,00)	98,17		
03.2.05.01	Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Usaha Penyelenggaraan Angkutan Penyeberangan Sesuai dengan Domisili Badan Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	64.000.000,00	62.831.700,00	(1.168.300,00)	98,17		
03.2.05.01.5.1	BELANJA OPERASI	20.532.400,00	19.831.700,00	(700.700,00)	96,59		
03.2.05.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	20.532.400,00	19.831.700,00	(700.700,00)	96,59		
03.2.05.01.5.2	BELANJA MODAL	43.467.600,00	43.000.000,00	(467.600,00)	98,92		
03.2.05.01.5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	43.467.600,00	43.000.000,00	(467.600,00)	98,92		
03	**PROGRAM APLIKASI INFORMATIKA**	3.286.561.532,00	2.897.646.636,00	(388.914.896,00)	88,17		
03.2.01	Pengelolaan Nama Domain yang Telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	2.650.279.446,00	2.347.978.603,00	(302.300.843,00)	88,59		
03.2.01.02	Penatalaksanaan dan Pengawasan Nama Domain dan Sub Domain dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	74.011.446,00	59.170.523,00	(14.840.923,00)	79,95		
03.2.01.02.5.1	BELANJA OPERASI	54.945.946,00	46.647.000,00	(8.298.946,00)	84,90		
03.2.01.02.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	54.945.946,00	46.647.000,00	(8.298.946,00)	84,90		
03.2.01.02.5.2	BELANJA MODAL	19.065.500,00	12.523.523,00	(6.541.977,00)	65,69		
03.2.01.02.5.2.06	Belanja Modal Aset Lainnya	19.065.500,00	12.523.523,00	(6.541.977,00)	65,69		

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM	KETERANGAN
		ANGGARAN	REALISASI	(Rp)	(%)		
03.2.01.03	Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah	2.576.268.000,00	2.288.808.080,00	(287.459.920,00)	88,84		
03.2.01.03.5.1	BELANJA OPERASI	2.576.268.000,00	2.288.808.080,00	(287.459.920,00)	88,84		
03.2.01.03.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.576.268.000,00	2.288.808.080,00	(287.459.920,00)	88,84		
03.2.02	Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	636.282.086,00	549.668.033,00	(86.614.053,00)	86,39		
03.2.02.01	Penatalaksanaan dan Pengawasan E-government dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	35.739.546,00	24.567.000,00	(11.172.546,00)	68,74		
03.2.02.01.5.1	BELANJA OPERASI	35.739.546,00	24.567.000,00	(11.172.546,00)	68,74		
03.2.02.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	35.739.546,00	24.567.000,00	(11.172.546,00)	68,74		
03.2.02.02	Sinkronisasi Pengelolaan Rencana Induk dan Anggaran Pemerintahan Berbasis Elektronik	43.076.427,00	31.176.200,00	(11.900.227,00)	72,37		
03.2.02.02.5.1	BELANJA OPERASI	38.758.527,00	26.866.200,00	(11.892.327,00)	69,32		
03.2.02.02.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	38.758.527,00	26.866.200,00	(11.892.327,00)	69,32		
03.2.02.02.5.2	BELANJA MODAL	4.317.900,00	4.310.000,00	(7.900,00)	99,82		
03.2.02.02.5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	4.317.900,00	4.310.000,00	(7.900,00)	99,82		
03.2.02.03	Pengelolaan Pusat Data Pemerintahan Daerah	295.711.326,00	268.282.772,00	(27.428.554,00)	90,72		
03.2.02.03.5.1	BELANJA OPERASI	244.651.326,00	229.151.020,00	(15.500.306,00)	93,66		
03.2.02.03.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	244.651.326,00	229.151.020,00	(15.500.306,00)	93,66		
03.2.02.03.5.2	BELANJA MODAL	51.060.000,00	39.131.752,00	(11.928.248,00)	76,64		
03.2.02.03.5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	1.110.000,00	980.000,00	(130.000,00)	88,29		
03.2.02.03.5.2.06	Belanja Modal Aset Lainnya	49.950.000,00	38.151.752,00	(11.798.248,00)	76,38		
03.2.02.07	Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik	62.943.085,00	59.240.100,00	(3.702.985,00)	94,12		
03.2.02.07.5.1	BELANJA OPERASI	25.178.085,00	21.777.600,00	(3.400.485,00)	86,49		
03.2.02.07.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	25.178.085,00	21.777.600,00	(3.400.485,00)	86,49		
03.2.02.07.5.2	BELANJA MODAL	37.765.000,00	37.462.500,00	(302.500,00)	99,20		
03.2.02.07.5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	12.765.000,00	12.765.000,00	0,00	100,00		
03.2.02.07.5.2.06	Belanja Modal Aset Lainnya	25.000.000,00	24.697.500,00	(302.500,00)	98,79		
03.2.02.08	Penyelenggaraan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah	30.494.200,00	11.002.200,00	(19.492.000,00)	36,08		
03.2.02.08.5.1	BELANJA OPERASI	30.494.200,00	11.002.200,00	(19.492.000,00)	36,08		
03.2.02.08.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	30.494.200,00	11.002.200,00	(19.492.000,00)	36,08		
03.2.02.10	Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah	168.317.502,00	155.399.761,00	(12.917.741,00)	92,33		
03.2.02.10.5.1	BELANJA OPERASI	148.060.002,00	135.142.561,00	(12.917.441,00)	91,28		
03.2.02.10.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	148.060.002,00	135.142.561,00	(12.917.441,00)	91,28		
03.2.02.10.5.2	BELANJA MODAL	20.257.500,00	20.257.200,00	(300,00)	100,00		
03.2.02.10.5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	20.257.500,00	20.257.200,00	(300,00)	100,00		

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM	KETERANGAN
		ANGGARAN	REALISASI	(Rp)	(%)		
03	**PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI**	164.198.874,00	162.924.264,00	(1.274.610,00)	99,22		
03.2.01	Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota	164.198.874,00	162.924.264,00	(1.274.610,00)	99,22		
03.2.01.01	Pengawasan Kekuatan, Kesehatan, Kemandirian, Ketangguhan, serta Akuntabilitas Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	116.783.400,00	116.773.900,00	(9.500,00)	99,99		
03.2.01.01.5.1	BELANJA OPERASI	116.783.400,00	116.773.900,00	(9.500,00)	99,99		
03.2.01.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	116.783.400,00	116.773.900,00	(9.500,00)	99,99		
03.2.01.02	Pemeriksaan Kepatuhan Koperasi Terhadap Peraturan Perundang-Undangan Kewenangan Kabupaten/Kota	47.415.474,00	46.150.364,00	(1.265.110,00)	97,33		
03.2.01.02.5.1	BELANJA OPERASI	47.415.474,00	46.150.364,00	(1.265.110,00)	97,33		
03.2.01.02.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	47.415.474,00	46.150.364,00	(1.265.110,00)	97,33		
03	**PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL**	279.488.632,00	267.608.454,00	(11.880.178,00)	95,75		
03.2.01	Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	279.488.632,00	267.608.454,00	(11.880.178,00)	95,75		
03.2.01.01	Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal	73.110.200,00	67.841.019,00	(5.269.181,00)	92,79		
03.2.01.01.5.1	BELANJA OPERASI	73.110.200,00	67.841.019,00	(5.269.181,00)	92,79		
03.2.01.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	73.110.200,00	67.841.019,00	(5.269.181,00)	92,79		
03.2.01.02	Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	206.378.432,00	199.767.435,00	(6.610.997,00)	96,80		
03.2.01.02.5.1	BELANJA OPERASI	206.378.432,00	199.767.435,00	(6.610.997,00)	96,80		
03.2.01.02.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	206.378.432,00	199.767.435,00	(6.610.997,00)	96,80		
03	**PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN**	4.654.825.651,00	4.553.587.636,00	(101.238.015,00)	97,83		
03.2.01	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	372.463.841,00	289.381.056,00	(83.082.785,00)	77,69		
03.2.01.03	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Penyediaan Sarana dan Prasarana Olahraga Kabupaten/Kota	372.463.841,00	289.381.056,00	(83.082.785,00)	77,69		
03.2.01.03.5.1	BELANJA OPERASI	207.174.936,00	124.391.056,00	(82.783.880,00)	60,04		
03.2.01.03.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	207.174.936,00	124.391.056,00	(82.783.880,00)	60,04		
03.2.01.03.5.2	BELANJA MODAL	165.288.905,00	164.990.000,00	(298.905,00)	99,82		
03.2.01.03.5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	165.288.905,00	164.990.000,00	(298.905,00)	99,82		
03.2.02	Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	1.377.516.826,00	1.367.871.960,00	(9.644.866,00)	99,30		
03.2.02.02	Penyelenggaraan Kejuaraan dan Pekan Olahraga Tingkat Kabupaten/Kota	440.177.446,00	439.303.500,00	(873.946,00)	99,80		
03.2.02.02.5.1	BELANJA OPERASI	438.877.446,00	438.003.500,00	(873.946,00)	99,80		

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM	KETERANGAN
		ANGGARAN	REALISASI	(Rp)	(%)		
03.2.02.02.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	438.877.446,00	438.003.500,00	(873.946,00)	99,80		
03.2.02.02.5.2	BELANJA MODAL	1.300.000,00	1.300.000,00	0,00	100,00		
03.2.02.02.5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	1.300.000,00	1.300.000,00	0,00	100,00		
03.2.02.03	Partisipasi dan Keikutsertaan dalam Penyelenggaraan Kejuaraan	937.339.380,00	928.568.460,00	(8.770.920,00)	99,06		
03.2.02.03.5.1	BELANJA OPERASI	937.339.380,00	928.568.460,00	(8.770.920,00)	99,06		
03.2.02.03.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	937.339.380,00	928.568.460,00	(8.770.920,00)	99,06		
03.2.04	Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga	800.000.000,00	800.000.000,00	0,00	100,00		
03.2.04.02	Pengembangan Organisasi Keolahragaan	800.000.000,00	800.000.000,00	0,00	100,00		
03.2.04.02.5.1	BELANJA OPERASI	800.000.000,00	800.000.000,00	0,00	100,00		
03.2.04.02.5.1.05	Belanja Hibah	800.000.000,00	800.000.000,00	0,00	100,00		
03.2.05	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi	2.104.844.984,00	2.096.334.620,00	(8.510.364,00)	99,60		
03.2.05.03	Penyediaan, Pengembangan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Olahraga Rekreasi	1.504.844.984,00	1.496.334.620,00	(8.510.364,00)	99,43		
03.2.05.03.5.1	BELANJA OPERASI	1.006.895.000,00	1.000.120.500,00	(6.774.500,00)	99,33		
03.2.05.03.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.006.895.000,00	1.000.120.500,00	(6.774.500,00)	99,33		
03.2.05.03.5.2	BELANJA MODAL	497.949.984,00	496.214.120,00	(1.735.864,00)	99,65		
03.2.05.03.5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	497.949.984,00	496.214.120,00	(1.735.864,00)	99,65		
03.2.05.04	Pengembangan Olahraga Wisata, Tantangan dan Petualangan	600.000.000,00	600.000.000,00	0,00	100,00		
03.2.05.04.5.1	BELANJA OPERASI	600.000.000,00	600.000.000,00	0,00	100,00		
03.2.05.04.5.1.05	Belanja Hibah	600.000.000,00	600.000.000,00	0,00	100,00		
03	**PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL**	668.933.305,00	660.152.100,00	(8.781.205,00)	98,69		
03.2.01	Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	668.933.305,00	660.152.100,00	(8.781.205,00)	98,69		
03.2.01.01	Peningkatan Pendidikan dan Pelatihan Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional	112.188.500,00	106.425.000,00	(5.763.500,00)	94,86		
03.2.01.01.5.1	BELANJA OPERASI	112.188.500,00	106.425.000,00	(5.763.500,00)	94,86		
03.2.01.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	112.188.500,00	106.425.000,00	(5.763.500,00)	94,86		
03.2.01.03	Peningkatan Kapasitas Tata Kelola Lembaga Kesenian Tradisional	556.744.805,00	553.727.100,00	(3.017.705,00)	99,46		
03.2.01.03.5.1	BELANJA OPERASI	143.294.600,00	142.943.500,00	(351.100,00)	99,75		
03.2.01.03.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	143.294.600,00	142.943.500,00	(351.100,00)	99,75		
03.2.01.03.5.2	BELANJA MODAL	413.450.205,00	410.783.600,00	(2.666.605,00)	99,36		
03.2.01.03.5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	16.883.655,00	16.860.000,00	(23.655,00)	99,86		
03.2.01.03.5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	321.920.000,00	319.280.600,00	(2.639.400,00)	99,18		
03.2.01.03.5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	74.646.550,00	74.643.000,00	(3.550,00)	100,00		
03	**PROGRAM PELESTARIAN KOLEKSI NASIONAL DAN NASKAH KUNO**	79.289.301,00	79.153.141,00	(136.160,00)	99,83		
03.2.02	Pengembangan Koleksi Budaya Etnis Nusantara yang Ditemukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	79.289.301,00	79.153.141,00	(136.160,00)	99,83		

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM	KETERANGAN
		ANGGARAN	REALISASI	(Rp)	(%)		
03.2.02.01	Seleksi dan Pengadaan Koleksi Budaya Etnis Nusantara	43.175.644,00	43.132.400,00	(43.244,00)	99,90		
03.2.02.01.5.1	BELANJA OPERASI	43.175.644,00	43.132.400,00	(43.244,00)	99,90		
03.2.02.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	43.175.644,00	43.132.400,00	(43.244,00)	99,90		
03.2.02.02	Pengolahan dan Penyiangan Koleksi Budaya Etnis Nusantara	36.113.657,00	36.020.741,00	(92.916,00)	99,74		
03.2.02.02.5.1	BELANJA OPERASI	36.113.657,00	36.020.741,00	(92.916,00)	99,74		
03.2.02.02.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	36.113.657,00	36.020.741,00	(92.916,00)	99,74		
03	**PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP**	372.801.622,00	357.711.892,00	(15.089.730,00)	95,95		
03.2.01	Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota	131.551.692,00	127.028.892,00	(4.522.800,00)	96,56		
03.2.01.01	Penyediaan Data dan Informasi Sumber Daya Ikan	131.551.692,00	127.028.892,00	(4.522.800,00)	96,56		
03.2.01.01.5.1	BELANJA OPERASI	131.551.692,00	127.028.892,00	(4.522.800,00)	96,56		
03.2.01.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	131.551.692,00	127.028.892,00	(4.522.800,00)	96,56		
03.2.02	Pemberdayaan Nelayan Kecil dalam Daerah Kabupaten/Kota	241.249.930,00	230.683.000,00	(10.566.930,00)	95,62		
03.2.02.01	Pengembangan Kapasitas Nelayan Kecil	241.249.930,00	230.683.000,00	(10.566.930,00)	95,62		
03.2.02.01.5.1	BELANJA OPERASI	241.249.930,00	230.683.000,00	(10.566.930,00)	95,62		
03.2.02.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	241.249.930,00	230.683.000,00	(10.566.930,00)	95,62		
03	**PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA**	386.380.428,00	382.452.508,00	(3.927.920,00)	98,98		
03.2.01	Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	386.380.428,00	382.452.508,00	(3.927.920,00)	98,98		
03.2.01.01	Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri	207.173.056,00	203.843.636,00	(3.329.420,00)	98,39		
03.2.01.01.5.1	BELANJA OPERASI	207.173.056,00	203.843.636,00	(3.329.420,00)	98,39		
03.2.01.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	207.173.056,00	203.843.636,00	(3.329.420,00)	98,39		
03.2.01.02	Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri Pariwisata Kabupaten/Kota	121.103.372,00	121.103.372,00	0,00	100,00		
03.2.01.02.5.1	BELANJA OPERASI	121.103.372,00	121.103.372,00	0,00	100,00		
03.2.01.02.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	121.103.372,00	121.103.372,00	0,00	100,00		
03.2.01.03	Penyediaan Data dan Penyebaran Informasi Pariwisata Kabupaten/Kota, Baik Dalam dan Luar Negeri	58.104.000,00	57.505.500,00	(598.500,00)	98,97		
03.2.01.03.5.1	BELANJA OPERASI	58.104.000,00	57.505.500,00	(598.500,00)	98,97		
03.2.01.03.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	58.104.000,00	57.505.500,00	(598.500,00)	98,97		
03	**PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN**	6.914.674.906,00	6.835.950.246,00	(78.724.660,00)	98,86		
03.2.01	Pengembangan Prasarana Pertanian	2.046.325.528,00	1.982.322.221,00	(64.003.307,00)	96,87		

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM	KETERANGAN
		ANGGARAN	REALISASI	(Rp)	(%)		
03.2.01.01	Pengelolaan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B, Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan/KP2B dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LCP2B	1.590.914.000,00	1.570.094.745,00	(20.819.255,00)	98,69		
03.2.01.01.5.1	BELANJA OPERASI	1.590.914.000,00	1.570.094.745,00	(20.819.255,00)	98,69		
03.2.01.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.590.914.000,00	1.570.094.745,00	(20.819.255,00)	98,69		
03.2.01.03	Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya	455.411.528,00	412.227.476,00	(43.184.052,00)	90,52		
03.2.01.03.5.1	BELANJA OPERASI	449.166.528,00	406.507.476,00	(42.659.052,00)	90,50		
03.2.01.03.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	449.166.528,00	406.507.476,00	(42.659.052,00)	90,50		
03.2.01.03.5.2	BELANJA MODAL	6.245.000,00	5.720.000,00	(525.000,00)	91,59		
03.2.01.03.5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	6.245.000,00	5.720.000,00	(525.000,00)	91,59		
03.2.02	Pembangunan Prasarana Pertanian	4.868.349.378,00	4.853.628.025,00	(14.721.353,00)	99,70		
03.2.02.03	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani	1.601.433.100,00	1.601.433.000,00	(100,00)	100,00		
03.2.02.03.5.1	BELANJA OPERASI	1.601.433.100,00	1.601.433.000,00	(100,00)	100,00		
03.2.02.03.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.601.433.100,00	1.601.433.000,00	(100,00)	100,00		
03.2.02.09	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya	3.266.916.278,00	3.252.195.025,00	(14.721.253,00)	99,55		
03.2.02.09.5.1	BELANJA OPERASI	3.266.916.278,00	3.252.195.025,00	(14.721.253,00)	99,55		
03.2.02.09.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	316.792.612,00	311.928.825,00	(4.863.787,00)	98,46		
03.2.02.09.5.1.05	Belanja Hibah	2.950.123.666,00	2.940.266.200,00	(9.857.466,00)	99,67		
03	**PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI KABUPATEN/KOTA**	125.364.128,00	122.247.672,00	(3.116.456,00)	97,51		
03.2.01	Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Kabupaten/Kota	125.364.128,00	122.247.672,00	(3.116.456,00)	97,51		
03.2.01.01	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Perolehan IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas) yang Terintegrasi dengan Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	125.364.128,00	122.247.672,00	(3.116.456,00)	97,51		
03.2.01.01.5.1	BELANJA OPERASI	125.364.128,00	122.247.672,00	(3.116.456,00)	97,51		
03.2.01.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	125.364.128,00	122.247.672,00	(3.116.456,00)	97,51		
03	**PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN**	2.004.937.711,00	1.862.887.470,00	(142.050.241,00)	92,91		
03.2.01	Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian	384.756.555,00	356.979.398,00	(27.777.157,00)	92,78		
03.2.01.01	Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD	92.905.420,00	65.632.000,00	(27.273.420,00)	70,64		
03.2.01.01.5.1	BELANJA OPERASI	92.905.420,00	65.632.000,00	(27.273.420,00)	70,64		

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM	KETERANGAN
		ANGGARAN	REALISASI	(Rp)	(%)		
03.2.01.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	92.905.420,00	65.632.000,00	(27.273.420,00)	70,64		
03.2.01.02	Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	291.851.135,00	291.347.398,00	(503.737,00)	99,83		
03.2.01.02.5.1	BELANJA OPERASI	291.851.135,00	291.347.398,00	(503.737,00)	99,83		
03.2.01.02.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	291.851.135,00	291.347.398,00	(503.737,00)	99,83		
03.2.02	Pelaksanaan Administrasi Pembangunan	464.918.646,00	455.637.378,00	(9.281.268,00)	98,00		
03.2.02.01	Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan	372.840.058,00	363.709.778,00	(9.130.280,00)	97,55		
03.2.02.01.5.1	BELANJA OPERASI	372.840.058,00	363.709.778,00	(9.130.280,00)	97,55		
03.2.02.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	372.840.058,00	363.709.778,00	(9.130.280,00)	97,55		
03.2.02.03	Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan	92.078.588,00	91.927.600,00	(150.988,00)	99,84		
03.2.02.03.5.1	BELANJA OPERASI	92.078.588,00	91.927.600,00	(150.988,00)	99,84		
03.2.02.03.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	92.078.588,00	91.927.600,00	(150.988,00)	99,84		
03.2.03	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	1.075.359.930,00	971.276.394,00	(104.083.536,00)	90,32		
03.2.03.01	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	338.767.320,00	337.682.713,00	(1.084.607,00)	99,68		
03.2.03.01.5.1	BELANJA OPERASI	289.668.632,00	288.890.713,00	(777.919,00)	99,73		
03.2.03.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	289.668.632,00	288.890.713,00	(777.919,00)	99,73		
03.2.03.01.5.2	BELANJA MODAL	49.098.688,00	48.792.000,00	(306.688,00)	99,38		
03.2.03.01.5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	49.098.688,00	48.792.000,00	(306.688,00)	99,38		
03.2.03.02	Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik	196.378.218,00	191.459.152,00	(4.919.066,00)	97,50		
03.2.03.02.5.1	BELANJA OPERASI	196.378.218,00	191.459.152,00	(4.919.066,00)	97,50		
03.2.03.02.5.1.01	Belanja Pegawai	12.109.434,00	12.000.000,00	(109.434,00)	99,10		
03.2.03.02.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	184.268.784,00	179.459.152,00	(4.809.632,00)	97,39		
03.2.03.03	Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	540.214.392,00	442.134.529,00	(98.079.863,00)	81,84		
03.2.03.03.5.1	BELANJA OPERASI	540.214.392,00	442.134.529,00	(98.079.863,00)	81,84		
03.2.03.03.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	540.214.392,00	442.134.529,00	(98.079.863,00)	81,84		
03.2.04	Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam	79.902.580,00	78.994.300,00	(908.280,00)	98,86		
03.2.04.03	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Energi dan Air	79.902.580,00	78.994.300,00	(908.280,00)	98,86		
03.2.04.03.5.1	BELANJA OPERASI	79.902.580,00	78.994.300,00	(908.280,00)	98,86		
03.2.04.03.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	79.902.580,00	78.994.300,00	(908.280,00)	98,86		
03	**PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH**	1.285.996.613,00	1.233.323.757,00	(52.672.856,00)	95,90		
03.2.01	Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	545.687.608,00	524.167.720,00	(21.519.888,00)	96,06		
03.2.01.04	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan	191.758.948,00	187.833.684,00	(3.925.264,00)	97,95		
03.2.01.04.5.1	BELANJA OPERASI	191.758.948,00	187.833.684,00	(3.925.264,00)	97,95		
03.2.01.04.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	191.758.948,00	187.833.684,00	(3.925.264,00)	97,95		

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM	KETERANGAN
		ANGGARAN	REALISASI	(Rp)	(%)		
03.2.01.08	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia	353.928.660,00	336.334.036,00	(17.594.624,00)	95,03		
03.2.01.08.5.1	BELANJA OPERASI	353.928.660,00	336.334.036,00	(17.594.624,00)	95,03		
03.2.01.08.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	353.928.660,00	336.334.036,00	(17.594.624,00)	95,03		
03.2.02	Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	354.124.053,00	325.604.799,00	(28.519.254,00)	91,95		
03.2.02.04	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian	224.624.862,00	197.451.608,00	(27.173.254,00)	87,90		
03.2.02.04.5.1	BELANJA OPERASI	224.624.862,00	197.451.608,00	(27.173.254,00)	87,90		
03.2.02.04.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	224.624.862,00	197.451.608,00	(27.173.254,00)	87,90		
03.2.02.08	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA	129.499.191,00	128.153.191,00	(1.346.000,00)	98,96		
03.2.02.08.5.1	BELANJA OPERASI	129.499.191,00	128.153.191,00	(1.346.000,00)	98,96		
03.2.02.08.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	129.499.191,00	128.153.191,00	(1.346.000,00)	98,96		
03.2.03	Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	386.184.952,00	383.551.238,00	(2.633.714,00)	99,32		
03.2.03.04	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur	192.031.052,00	190.672.295,00	(1.358.757,00)	99,29		
03.2.03.04.5.1	BELANJA OPERASI	192.031.052,00	190.672.295,00	(1.358.757,00)	99,29		
03.2.03.04.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	192.031.052,00	190.672.295,00	(1.358.757,00)	99,29		
03.2.03.08	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan	194.153.900,00	192.878.943,00	(1.274.957,00)	99,34		
03.2.03.08.5.1	BELANJA OPERASI	194.153.900,00	192.878.943,00	(1.274.957,00)	99,34		
03.2.03.08.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	194.153.900,00	192.878.943,00	(1.274.957,00)	99,34		
03	**PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH**	900.811.487,00	753.431.707,00	(147.379.780,00)	83,64		
03.2.01	Pengelolaan Barang Milik Daerah	900.811.487,00	753.431.707,00	(147.379.780,00)	83,64		
03.2.01.01	Penyusunan Standar Harga	108.083.719,00	84.489.535,00	(23.594.184,00)	78,17		
03.2.01.01.5.1	BELANJA OPERASI	108.083.719,00	84.489.535,00	(23.594.184,00)	78,17		
03.2.01.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	108.083.719,00	84.489.535,00	(23.594.184,00)	78,17		
03.2.01.03	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah	21.017.590,00	19.750.970,00	(1.266.620,00)	93,97		
03.2.01.03.5.1	BELANJA OPERASI	21.017.590,00	19.750.970,00	(1.266.620,00)	93,97		
03.2.01.03.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	21.017.590,00	19.750.970,00	(1.266.620,00)	93,97		
03.2.01.05	Penatausahaan Barang Milik Daerah	116.931.950,00	95.478.382,00	(21.453.568,00)	81,65		
03.2.01.05.5.1	BELANJA OPERASI	116.931.950,00	95.478.382,00	(21.453.568,00)	81,65		
03.2.01.05.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	116.931.950,00	95.478.382,00	(21.453.568,00)	81,65		
03.2.01.06	Inventarisasi Barang Milik Daerah	136.484.500,00	79.117.400,00	(57.367.100,00)	57,97		

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM	KETERANGAN
		ANGGARAN	REALISASI	(Rp)	(%)		
03.2.01.06.5.1	BELANJA OPERASI	136.484.500,00	79.117.400,00	(57.367.100,00)	57,97		
03.2.01.06.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	136.484.500,00	79.117.400,00	(57.367.100,00)	57,97		
03.2.01.08	Penilaian Barang Milik Daerah	39.326.082,00	36.179.400,00	(3.146.682,00)	92,00		
03.2.01.08.5.1	BELANJA OPERASI	39.326.082,00	36.179.400,00	(3.146.682,00)	92,00		
03.2.01.08.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	39.326.082,00	36.179.400,00	(3.146.682,00)	92,00		
03.2.01.09	Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah	354.527.190,00	318.857.129,00	(35.670.061,00)	89,94		
03.2.01.09.5.1	BELANJA OPERASI	354.527.190,00	318.857.129,00	(35.670.061,00)	89,94		
03.2.01.09.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	354.527.190,00	318.857.129,00	(35.670.061,00)	89,94		
03.2.01.10	Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	46.499.294,00	45.001.891,00	(1.497.403,00)	96,78		
03.2.01.10.5.1	BELANJA OPERASI	46.499.294,00	45.001.891,00	(1.497.403,00)	96,78		
03.2.01.10.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	46.499.294,00	45.001.891,00	(1.497.403,00)	96,78		
03.2.01.11	Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	37.158.434,00	36.258.800,00	(899.634,00)	97,58		
03.2.01.11.5.1	BELANJA OPERASI	37.158.434,00	36.258.800,00	(899.634,00)	97,58		
03.2.01.11.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	37.158.434,00	36.258.800,00	(899.634,00)	97,58		
03.2.01.12	Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	40.782.728,00	38.298.200,00	(2.484.528,00)	93,91		
03.2.01.12.5.1	BELANJA OPERASI	40.782.728,00	38.298.200,00	(2.484.528,00)	93,91		
03.2.01.12.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	40.782.728,00	38.298.200,00	(2.484.528,00)	93,91		
03	**PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI**	452.628.616,00	382.950.007,00	(69.678.609,00)	84,61		
03.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan	60.918.140,00	46.570.500,00	(14.347.640,00)	76,45		
03.2.01.01	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan	60.918.140,00	46.570.500,00	(14.347.640,00)	76,45		
03.2.01.01.5.1	BELANJA OPERASI	60.918.140,00	46.570.500,00	(14.347.640,00)	76,45		
03.2.01.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	60.918.140,00	46.570.500,00	(14.347.640,00)	76,45		
03.2.02	Pendampingan dan Asistensi	391.710.476,00	336.379.507,00	(55.330.969,00)	85,87		
03.2.02.01	Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	91.489.252,00	44.354.300,00	(47.134.952,00)	48,48		
03.2.02.01.5.1	BELANJA OPERASI	91.489.252,00	44.354.300,00	(47.134.952,00)	48,48		
03.2.02.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	91.489.252,00	44.354.300,00	(47.134.952,00)	48,48		
03.2.02.02	Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	78.473.490,00	74.322.500,00	(4.150.990,00)	94,71		
03.2.02.02.5.1	BELANJA OPERASI	78.473.490,00	74.322.500,00	(4.150.990,00)	94,71		
03.2.02.02.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	78.473.490,00	74.322.500,00	(4.150.990,00)	94,71		
03.2.02.03	Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	221.747.734,00	217.702.707,00	(4.045.027,00)	98,18		
03.2.02.03.5.1	BELANJA OPERASI	221.747.734,00	217.702.707,00	(4.045.027,00)	98,18		

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM	KETERANGAN
		ANGGARAN	REALISASI	(Rp)	(%)		
03.2.02.03.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	221.747.734,00	217.702.707,00	(4.045.027,00)	98,18		
03	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	8.861.354.242,00	8.492.017.247,00	(369.336.995,00)	95,83		
03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	349.165.150,00	333.831.786,00	(15.333.364,00)	95,61		
03.2.01.01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	103.252.069,00	102.987.496,00	(264.573,00)	99,74		
03.2.01.01.5.1	BELANJA OPERASI	103.252.069,00	102.987.496,00	(264.573,00)	99,74		
03.2.01.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	103.252.069,00	102.987.496,00	(264.573,00)	99,74		
03.2.01.02	Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan	13.514.900,00	13.441.300,00	(73.600,00)	99,46		
03.2.01.02.5.1	BELANJA OPERASI	13.514.900,00	13.441.300,00	(73.600,00)	99,46		
03.2.01.02.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	13.514.900,00	13.441.300,00	(73.600,00)	99,46		
03.2.01.03	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	232.398.181,00	217.402.990,00	(14.995.191,00)	93,55		
03.2.01.03.5.1	BELANJA OPERASI	232.398.181,00	217.402.990,00	(14.995.191,00)	93,55		
03.2.01.03.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	232.398.181,00	217.402.990,00	(14.995.191,00)	93,55		
03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	5.963.274.857,00	5.672.472.463,00	(290.802.394,00)	95,12		
03.2.02.01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	105.077.177,00	103.518.027,00	(1.559.150,00)	98,52		
03.2.02.01.5.1	BELANJA OPERASI	105.077.177,00	103.518.027,00	(1.559.150,00)	98,52		
03.2.02.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	105.077.177,00	103.518.027,00	(1.559.150,00)	98,52		
03.2.02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	2.518.293.404,00	2.481.327.639,00	(36.965.765,00)	98,53		
03.2.02.02.5.1	BELANJA OPERASI	559.117.563,00	549.993.301,00	(9.124.262,00)	98,37		
03.2.02.02.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	559.117.563,00	549.993.301,00	(9.124.262,00)	98,37		
03.2.02.02.5.2	BELANJA MODAL	1.959.175.841,00	1.931.334.338,00	(27.841.503,00)	98,58		
03.2.02.02.5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	472.244.358,00	452.218.878,00	(20.025.480,00)	95,76		
03.2.02.02.5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	97.469.100,00	96.900.000,00	(569.100,00)	99,42		
03.2.02.02.5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	1.389.462.383,00	1.382.215.460,00	(7.246.923,00)	99,48		
03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	3.336.732.676,00	3.084.462.597,00	(252.270.079,00)	92,44		
03.2.02.03.5.1	BELANJA OPERASI	3.221.268.164,00	2.977.091.620,00	(244.176.544,00)	92,42		
03.2.02.03.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	3.221.268.164,00	2.977.091.620,00	(244.176.544,00)	92,42		
03.2.02.03.5.2	BELANJA MODAL	115.464.512,00	107.370.977,00	(8.093.535,00)	92,99		
03.2.02.03.5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	104.364.512,00	96.270.977,00	(8.093.535,00)	92,24		
03.2.02.03.5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	11.100.000,00	11.100.000,00	0,00	100,00		
03.2.02.04	Evaluasi Kelurahan	3.171.600,00	3.164.200,00	(7.400,00)	99,77		
03.2.02.04.5.1	BELANJA OPERASI	3.171.600,00	3.164.200,00	(7.400,00)	99,77		
03.2.02.04.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	3.171.600,00	3.164.200,00	(7.400,00)	99,77		
03.2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	2.548.914.235,00	2.485.712.998,00	(63.201.237,00)	97,52		
03.2.03.01	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	2.325.847.544,00	2.280.698.151,00	(45.149.393,00)	98,06		

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM	KETERANGAN
		ANGGARAN	REALISASI	(Rp)	(%)		
03.2.03.01.5.1	BELANJA OPERASI	2.325.847.544,00	2.280.698.151,00	(45.149.393,00)	98,06		
03.2.03.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.325.847.544,00	2.280.698.151,00	(45.149.393,00)	98,06		
03.2.03.02	Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	107.079.454,00	96.895.010,00	(10.184.444,00)	90,49		
03.2.03.02.5.1	BELANJA OPERASI	107.079.454,00	96.895.010,00	(10.184.444,00)	90,49		
03.2.03.02.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	107.079.454,00	96.895.010,00	(10.184.444,00)	90,49		
03.2.03.03	Penyediaan Sarana dan Prasarana Lembaga Kemasyarakatan	5.764.611,00	5.764.611,00	0,00	100,00		
03.2.03.03.5.1	BELANJA OPERASI	5.764.611,00	5.764.611,00	0,00	100,00		
03.2.03.03.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	5.764.611,00	5.764.611,00	0,00	100,00		
03.2.03.04	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	110.222.626,00	102.355.226,00	(7.867.400,00)	92,86		
03.2.03.04.5.1	BELANJA OPERASI	110.222.626,00	102.355.226,00	(7.867.400,00)	92,86		
03.2.03.04.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	110.222.626,00	102.355.226,00	(7.867.400,00)	92,86		
03	**PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK**	16.224.370.801,00	16.208.538.504,00	(15.832.297,00)	99,90		
03.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik	16.224.370.801,00	16.208.538.504,00	(15.832.297,00)	99,90		
03.2.01.01	Penyusunan Program Kerja di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	72.762.179,00	58.304.625,00	(14.457.554,00)	80,13		
03.2.01.01.5.1	BELANJA OPERASI	72.762.179,00	58.304.625,00	(14.457.554,00)	80,13		
03.2.01.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	72.762.179,00	58.304.625,00	(14.457.554,00)	80,13		
03.2.01.02	Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	40.578.200,00	40.329.900,00	(248.300,00)	99,39		
03.2.01.02.5.1	BELANJA OPERASI	40.578.200,00	40.329.900,00	(248.300,00)	99,39		
03.2.01.02.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	40.578.200,00	40.329.900,00	(248.300,00)	99,39		

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM	KETERANGAN
		ANGGARAN	REALISASI	(Rp)	(%)		
03.2.01.04	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	16.111.030.422,00	16.109.903.979,00	(1.126.443,00)	99,99		
03.2.01.04.5.1	BELANJA OPERASI	16.111.030.422,00	16.109.903.979,00	(1.126.443,00)	99,99		
03.2.01.04.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	93.526.800,00	93.213.800,00	(313.000,00)	99,67		
03.2.01.04.5.1.05	Belanja Hibah	16.017.503.622,00	16.016.690.179,00	(813.443,00)	99,99		
04	**PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN**	402.648.000,00	321.342.300,00	(81.305.700,00)	79,81		
04.2.01	Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	135.180.000,00	122.736.000,00	(12.444.000,00)	90,79		
04.2.01.01	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	135.180.000,00	122.736.000,00	(12.444.000,00)	90,79		
04.2.01.01.5.1	BELANJA OPERASI	135.180.000,00	122.736.000,00	(12.444.000,00)	90,79		
04.2.01.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	135.180.000,00	122.736.000,00	(12.444.000,00)	90,79		
04.2.03	Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	109.796.000,00	91.368.500,00	(18.427.500,00)	83,22		
04.2.03.01	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	109.796.000,00	91.368.500,00	(18.427.500,00)	83,22		
04.2.03.01.5.1	BELANJA OPERASI	109.796.000,00	91.368.500,00	(18.427.500,00)	83,22		
04.2.03.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	109.796.000,00	91.368.500,00	(18.427.500,00)	83,22		
04.2.06	Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Post Market pada Produksi dan Produk Makanan Minuman Industri Rumah Tangga	157.672.000,00	107.237.800,00	(50.434.200,00)	68,01		
04.2.06.01	Pemeriksaan Post Market pada Produk Makanan-Minuman Industri Rumah Tangga yang Beredar dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan	157.672.000,00	107.237.800,00	(50.434.200,00)	68,01		
04.2.06.01.5.1	BELANJA OPERASI	157.672.000,00	107.237.800,00	(50.434.200,00)	68,01		
04.2.06.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	157.672.000,00	107.237.800,00	(50.434.200,00)	68,01		
04	**PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN**	2.808.641.594,00	2.741.753.779,00	(66.887.815,00)	97,62		

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM	KETERANGAN
		ANGGARAN	REALISASI	(Rp)	(%)		
04.2.01	Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	2.288.283.391,00	2.228.971.648,00	(59.311.743,00)	97,41		
04.2.01.02	Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	39.150.860,00	38.530.000,00	(620.860,00)	98,41		
04.2.01.02.5.1	BELANJA OPERASI	39.150.860,00	38.530.000,00	(620.860,00)	98,41		
04.2.01.02.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	39.150.860,00	38.530.000,00	(620.860,00)	98,41		
04.2.01.06	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri	256.756.875,00	249.350.000,00	(7.406.875,00)	97,12		
04.2.01.06.5.1	BELANJA OPERASI	256.756.875,00	249.350.000,00	(7.406.875,00)	97,12		
04.2.01.06.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	256.756.875,00	249.350.000,00	(7.406.875,00)	97,12		
04.2.01.07	Pembinaan Aparatur Pemadam Kebakaran	12.869.895,00	6.679.400,00	(6.190.495,00)	51,90		
04.2.01.07.5.1	BELANJA OPERASI	12.869.895,00	6.679.400,00	(6.190.495,00)	51,90		
04.2.01.07.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	12.869.895,00	6.679.400,00	(6.190.495,00)	51,90		
04.2.01.08	Pengelolaan Sistem Komunikasi dan Informasi Kebakaran dan Penyelamatan (SKIK)	543.144.200,00	538.201.000,00	(4.943.200,00)	99,09		
04.2.01.08.5.1	BELANJA OPERASI	543.144.200,00	538.201.000,00	(4.943.200,00)	99,09		
04.2.01.08.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	543.144.200,00	538.201.000,00	(4.943.200,00)	99,09		
04.2.01.09	Penyelenggaraan Kerja Sama dan Koordinasi antar Daerah Berbatasan, antar Lembaga, dan Kemitraan dalam Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran	1.436.361.561,00	1.396.211.248,00	(40.150.313,00)	97,20		
04.2.01.09.5.1	BELANJA OPERASI	1.400.119.173,00	1.359.970.448,00	(40.148.725,00)	97,13		
04.2.01.09.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.400.119.173,00	1.359.970.448,00	(40.148.725,00)	97,13		
04.2.01.09.5.2	BELANJA MODAL	36.242.388,00	36.240.800,00	(1.588,00)	100,00		
04.2.01.09.5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	36.242.388,00	36.240.800,00	(1.588,00)	100,00		
04.2.04	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran	520.358.203,00	512.782.131,00	(7.576.072,00)	98,54		
04.2.04.01	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Melalui Sosialisasi dan Edukasi Masyarakat	187.374.959,00	181.476.381,00	(5.898.578,00)	96,85		
04.2.04.01.5.1	BELANJA OPERASI	187.374.959,00	181.476.381,00	(5.898.578,00)	96,85		
04.2.04.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	187.374.959,00	181.476.381,00	(5.898.578,00)	96,85		
04.2.04.02	Pembentukan dan Pembinaan Relawan Pemadam Kebakaran	332.983.244,00	331.305.750,00	(1.677.494,00)	99,50		
04.2.04.02.5.1	BELANJA OPERASI	332.983.244,00	331.305.750,00	(1.677.494,00)	99,50		
04.2.04.02.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	332.983.244,00	331.305.750,00	(1.677.494,00)	99,50		
04	**PROGRAM REHABILITASI SOSIAL**	1.547.216.628,00	1.486.970.003,00	(60.246.625,00)	96,11		
04.2.01	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	431.427.964,00	385.816.764,00	(45.611.200,00)	89,43		
04.2.01.01	Penyediaan Permakanan	45.845.200,00	44.432.600,00	(1.412.600,00)	96,92		

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM	KETERANGAN
		ANGGARAN	REALISASI	(Rp)	(%)		
04.2.01.01.5.1	BELANJA OPERASI	45.845.200,00	44.432.600,00	(1.412.600,00)	96,92		
04.2.01.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	45.845.200,00	44.432.600,00	(1.412.600,00)	96,92		
04.2.01.02	Penyediaan Sandang	13.302.700,00	11.155.000,00	(2.147.700,00)	83,86		
04.2.01.02.5.1	BELANJA OPERASI	13.302.700,00	11.155.000,00	(2.147.700,00)	83,86		
04.2.01.02.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	13.302.700,00	11.155.000,00	(2.147.700,00)	83,86		
04.2.01.03	Penyediaan Alat Bantu	212.139.000,00	190.546.400,00	(21.592.600,00)	89,82		
04.2.01.03.5.1	BELANJA OPERASI	212.139.000,00	190.546.400,00	(21.592.600,00)	89,82		
04.2.01.03.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	212.139.000,00	190.546.400,00	(21.592.600,00)	89,82		
04.2.01.04	Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	52.603.300,00	48.665.500,00	(3.937.800,00)	92,51		
04.2.01.04.5.1	BELANJA OPERASI	52.603.300,00	48.665.500,00	(3.937.800,00)	92,51		
04.2.01.04.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	52.603.300,00	48.665.500,00	(3.937.800,00)	92,51		
04.2.01.05	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	9.567.200,00	7.186.800,00	(2.380.400,00)	75,12		
04.2.01.05.5.1	BELANJA OPERASI	9.567.200,00	7.186.800,00	(2.380.400,00)	75,12		
04.2.01.05.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	9.567.200,00	7.186.800,00	(2.380.400,00)	75,12		
04.2.01.06	Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat	732.600,00	732.400,00	(200,00)	99,97		
04.2.01.06.5.1	BELANJA OPERASI	732.600,00	732.400,00	(200,00)	99,97		
04.2.01.06.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	732.600,00	732.400,00	(200,00)	99,97		
04.2.01.07	Fasilitasi Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan Kartu Identitas Anak	908.400,00	908.400,00	0,00	100,00		
04.2.01.07.5.1	BELANJA OPERASI	908.400,00	908.400,00	0,00	100,00		
04.2.01.07.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	908.400,00	908.400,00	0,00	100,00		
04.2.01.08	Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	1.481.300,00	0,00	(1.481.300,00)	0		
04.2.01.08.5.1	BELANJA OPERASI	1.481.300,00	0,00	(1.481.300,00)	0		
04.2.01.08.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.481.300,00	0,00	(1.481.300,00)	0		
04.2.01.11	Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga	11.800.800,00	6.026.000,00	(5.774.800,00)	51,06		
04.2.01.11.5.1	BELANJA OPERASI	11.800.800,00	6.026.000,00	(5.774.800,00)	51,06		
04.2.01.11.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	11.800.800,00	6.026.000,00	(5.774.800,00)	51,06		
04.2.01.12	Pemberian Layanan Rujukan	83.047.464,00	76.163.664,00	(6.883.800,00)	91,71		
04.2.01.12.5.1	BELANJA OPERASI	83.047.464,00	76.163.664,00	(6.883.800,00)	91,71		
04.2.01.12.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	83.047.464,00	76.163.664,00	(6.883.800,00)	91,71		
04.2.02	Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial	1.115.788.664,00	1.101.153.239,00	(14.635.425,00)	98,69		
04.2.02.03	Penyediaan Permakanan	970.267.100,00	965.258.075,00	(5.009.025,00)	99,48		
04.2.02.03.5.1	BELANJA OPERASI	970.267.100,00	965.258.075,00	(5.009.025,00)	99,48		
04.2.02.03.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	522.707.100,00	517.698.075,00	(5.009.025,00)	99,04		

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM	KETERANGAN
		ANGGARAN	REALISASI	(Rp)	(%)		
04.2.02.03.5.1.05	Belanja Hibah	447.560.000,00	447.560.000,00	0,00	100,00		
04.2.02.04	Penyediaan Sandang	61.792.200,00	60.855.000,00	(937.200,00)	98,48		
04.2.02.04.5.1	BELANJA OPERASI	61.792.200,00	60.855.000,00	(937.200,00)	98,48		
04.2.02.04.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	61.792.200,00	60.855.000,00	(937.200,00)	98,48		
04.2.02.06	Penyediaan Perbekalan Kesehatan di Luar Panti	4.186.400,00	4.040.000,00	(146.400,00)	96,50		
04.2.02.06.5.1	BELANJA OPERASI	4.186.400,00	4.040.000,00	(146.400,00)	96,50		
04.2.02.06.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	4.186.400,00	4.040.000,00	(146.400,00)	96,50		
04.2.02.14	Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Kabupaten/Kota	79.542.964,00	71.000.164,00	(8.542.800,00)	89,26		
04.2.02.14.5.1	BELANJA OPERASI	79.542.964,00	71.000.164,00	(8.542.800,00)	89,26		
04.2.02.14.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	79.542.964,00	71.000.164,00	(8.542.800,00)	89,26		
04	**PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA**	119.708.398,00	117.275.437,00	(2.432.961,00)	97,97		
04.2.05	Penerbitan Perpanjangan IMTA yang Lokasi Kerja dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	119.708.398,00	117.275.437,00	(2.432.961,00)	97,97		
04.2.05.01	Koordinasi dan Sinkronisasi Perpanjangan IMTA yang Lokasi Kerja dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	119.708.398,00	117.275.437,00	(2.432.961,00)	97,97		
04.2.05.01.5.1	BELANJA OPERASI	119.708.398,00	117.275.437,00	(2.432.961,00)	97,97		
04.2.05.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	119.708.398,00	117.275.437,00	(2.432.961,00)	97,97		
04	**PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN**	131.339.354,00	127.737.514,00	(3.601.840,00)	97,26		
04.2.02	Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Kabupaten/Kota	131.339.354,00	127.737.514,00	(3.601.840,00)	97,26		
04.2.02.01	Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan Kerawanan Pangan Kabupaten/Kota	131.339.354,00	127.737.514,00	(3.601.840,00)	97,26		
04.2.02.01.5.1	BELANJA OPERASI	131.339.354,00	127.737.514,00	(3.601.840,00)	97,26		
04.2.02.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	131.339.354,00	127.737.514,00	(3.601.840,00)	97,26		
04	**PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)**	3.849.986.060,00	3.777.366.416,00	(72.619.644,00)	98,11		
04.2.01	Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota	3.849.986.060,00	3.777.366.416,00	(72.619.644,00)	98,11		
04.2.01.04	Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	3.849.986.060,00	3.777.366.416,00	(72.619.644,00)	98,11		
04.2.01.04.5.1	BELANJA OPERASI	269.192.660,00	246.159.360,00	(23.033.300,00)	91,44		
04.2.01.04.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	269.192.660,00	246.159.360,00	(23.033.300,00)	91,44		
04.2.01.04.5.2	BELANJA MODAL	3.580.793.400,00	3.531.207.056,00	(49.586.344,00)	98,62		
04.2.01.04.5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	3.580.793.400,00	3.531.207.056,00	(49.586.344,00)	98,62		
04	**PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN**	287.935.433,00	285.685.340,00	(2.250.093,00)	99,22		
04.2.03	Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	287.935.433,00	285.685.340,00	(2.250.093,00)	99,22		
04.2.03.02	Penerimaan dan Permintaan Data Kependudukan dari Perwakilan Republik Indonesia Melalui Menteri	26.262.705,00	26.187.305,00	(75.400,00)	99,71		
04.2.03.02.5.1	BELANJA OPERASI	26.262.705,00	26.187.305,00	(75.400,00)	99,71		

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM	KETERANGAN
		ANGGARAN	REALISASI	(Rp)	(%)		
04.2.03.02.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	26.262.705,00	26.187.305,00	(75.400,00)	99,71		
04.2.03.05	Sosialisasi Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	54.480.700,00	54.241.125,00	(239.575,00)	99,56		
04.2.03.05.5.1	BELANJA OPERASI	54.480.700,00	54.241.125,00	(239.575,00)	99,56		
04.2.03.05.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	54.480.700,00	54.241.125,00	(239.575,00)	99,56		
04.2.03.08	Penyajian Data Kependudukan yang Akurat dan dapat Dipertanggungjawabkan	207.192.028,00	205.256.910,00	(1.935.118,00)	99,07		
04.2.03.08.5.1	BELANJA OPERASI	203.093.328,00	201.158.910,00	(1.934.418,00)	99,05		
04.2.03.08.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	203.093.328,00	201.158.910,00	(1.934.418,00)	99,05		
04.2.03.08.5.2	BELANJA MODAL	4.098.700,00	4.098.000,00	(700,00)	99,98		
04.2.03.08.5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	4.098.700,00	4.098.000,00	(700,00)	99,98		
04	**PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA**	4.352.629.814,00	3.960.264.292,00	(392.365.522,00)	90,99		
04.2.01	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	4.352.629.814,00	3.960.264.292,00	(392.365.522,00)	90,99		
04.2.01.01	Fasilitasi Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	629.252.231,00	581.253.169,00	(47.999.062,00)	92,37		
04.2.01.01.5.1	BELANJA OPERASI	629.252.231,00	581.253.169,00	(47.999.062,00)	92,37		
04.2.01.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	629.252.231,00	581.253.169,00	(47.999.062,00)	92,37		
04.2.01.03	Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa	261.926.051,00	252.356.178,00	(9.569.873,00)	96,35		
04.2.01.03.5.1	BELANJA OPERASI	261.926.051,00	252.356.178,00	(9.569.873,00)	96,35		
04.2.01.03.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	261.926.051,00	252.356.178,00	(9.569.873,00)	96,35		
04.2.01.04	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	396.260.956,00	389.343.874,00	(6.917.082,00)	98,25		
04.2.01.04.5.1	BELANJA OPERASI	396.260.956,00	389.343.874,00	(6.917.082,00)	98,25		
04.2.01.04.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	396.260.956,00	389.343.874,00	(6.917.082,00)	98,25		
04.2.01.05	Pembinaan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa	2.741.143.663,00	2.420.222.893,00	(320.920.770,00)	88,29		
04.2.01.05.5.1	BELANJA OPERASI	2.741.143.663,00	2.420.222.893,00	(320.920.770,00)	88,29		
04.2.01.05.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.741.143.663,00	2.420.222.893,00	(320.920.770,00)	88,29		
04.2.01.08	Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja Sama antar Desa	125.100.433,00	120.524.578,00	(4.575.855,00)	96,34		
04.2.01.08.5.1	BELANJA OPERASI	125.100.433,00	120.524.578,00	(4.575.855,00)	96,34		
04.2.01.08.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	125.100.433,00	120.524.578,00	(4.575.855,00)	96,34		
04.2.01.11	Fasilitasi Penyusunan Profil Desa	44.854.074,00	43.193.000,00	(1.661.074,00)	96,30		
04.2.01.11.5.1	BELANJA OPERASI	44.854.074,00	43.193.000,00	(1.661.074,00)	96,30		
04.2.01.11.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	44.854.074,00	43.193.000,00	(1.661.074,00)	96,30		
04.2.01.13	Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa	54.039.300,00	53.367.400,00	(671.900,00)	98,76		
04.2.01.13.5.1	BELANJA OPERASI	54.039.300,00	53.367.400,00	(671.900,00)	98,76		
04.2.01.13.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	54.039.300,00	53.367.400,00	(671.900,00)	98,76		
04.2.01.18	Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan	100.053.106,00	100.003.200,00	(49.906,00)	99,95		
04.2.01.18.5.1	BELANJA OPERASI	100.053.106,00	100.003.200,00	(49.906,00)	99,95		

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM	KETERANGAN
		ANGGARAN	REALISASI	(Rp)	(%)		
04.2.01.18.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	100.053.106,00	100.003.200,00	(49.906,00)	99,95		
04	**PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)**	1.870.864.006,00	1.674.283.437,00	(196.580.569,00)	89,49		
04.2.01	Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	1.870.864.006,00	1.674.283.437,00	(196.580.569,00)	89,49		
04.2.01.02	Pengadaan Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	360.000.000,00	349.260.000,00	(10.740.000,00)	97,02		
04.2.01.02.5.1	BELANJA OPERASI	360.000.000,00	349.260.000,00	(10.740.000,00)	97,02		
04.2.01.02.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	360.000.000,00	349.260.000,00	(10.740.000,00)	97,02		
04.2.01.03	Orientasi dan Pelatihan Teknis Pengelola Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	160.000.000,00	122.097.954,00	(37.902.046,00)	76,31		
04.2.01.03.5.1	BELANJA OPERASI	121.067.860,00	83.457.954,00	(37.609.906,00)	68,93		
04.2.01.03.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	121.067.860,00	83.457.954,00	(37.609.906,00)	68,93		
04.2.01.03.5.2	BELANJA MODAL	38.932.140,00	38.640.000,00	(292.140,00)	99,25		
04.2.01.03.5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	38.932.140,00	38.640.000,00	(292.140,00)	99,25		
04.2.01.04	Orientasi/Pelatihan Teknis Pelaksana/Kader Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	200.000.000,00	182.833.200,00	(17.166.800,00)	91,42		
04.2.01.04.5.1	BELANJA OPERASI	200.000.000,00	182.833.200,00	(17.166.800,00)	91,42		
04.2.01.04.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	200.000.000,00	182.833.200,00	(17.166.800,00)	91,42		
04.2.01.06	Penyediaan Biaya Operasional bagi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	800.100.000,00	730.800.000,00	(69.300.000,00)	91,34		
04.2.01.06.5.1	BELANJA OPERASI	800.100.000,00	730.800.000,00	(69.300.000,00)	91,34		
04.2.01.06.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	800.100.000,00	730.800.000,00	(69.300.000,00)	91,34		
04.2.01.07	Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	113.764.006,00	89.920.218,00	(23.843.788,00)	79,04		
04.2.01.07.5.1	BELANJA OPERASI	113.764.006,00	89.920.218,00	(23.843.788,00)	79,04		
04.2.01.07.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	113.764.006,00	89.920.218,00	(23.843.788,00)	79,04		
04.2.01.08	Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Menjadi Orang Tua Hebat, Generasi Berencana, Kelanjutusiaan serta Pengelolaan Keuangan Keluarga)	237.000.000,00	199.372.065,00	(37.627.935,00)	84,12		
04.2.01.08.5.1	BELANJA OPERASI	237.000.000,00	199.372.065,00	(37.627.935,00)	84,12		
04.2.01.08.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	237.000.000,00	199.372.065,00	(37.627.935,00)	84,12		
04	**PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL**	514.315.480,00	477.644.683,00	(36.670.797,00)	92,87		

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM	KETERANGAN
		ANGGARAN	REALISASI	(Rp)	(%)		
04.2.01	Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	514.315.480,00	477.644.683,00	(36.670.797,00)	92,87		
04.2.01.01	Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Nonperizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	264.601.188,00	242.042.528,00	(22.558.660,00)	91,47		
04.2.01.01.5.1	BELANJA OPERASI	244.477.998,00	222.642.528,00	(21.835.470,00)	91,07		
04.2.01.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	244.477.998,00	222.642.528,00	(21.835.470,00)	91,07		
04.2.01.01.5.2	BELANJA MODAL	20.123.190,00	19.400.000,00	(723.190,00)	96,41		
04.2.01.01.5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	20.123.190,00	19.400.000,00	(723.190,00)	96,41		
04.2.01.02	Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal	167.284.528,00	162.056.435,00	(5.228.093,00)	96,87		
04.2.01.02.5.1	BELANJA OPERASI	167.284.528,00	162.056.435,00	(5.228.093,00)	96,87		
04.2.01.02.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	167.284.528,00	162.056.435,00	(5.228.093,00)	96,87		
04.2.01.03	Penyediaan Layanan Konsultasi dan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat Terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan	82.429.764,00	73.545.720,00	(8.884.044,00)	89,22		
04.2.01.03.5.1	BELANJA OPERASI	82.429.764,00	73.545.720,00	(8.884.044,00)	89,22		
04.2.01.03.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	82.429.764,00	73.545.720,00	(8.884.044,00)	89,22		
04	**PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN**	800.590.000,00	800.590.000,00	0,00	100,00		
04.2.01	Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan	800.590.000,00	800.590.000,00	0,00	100,00		
04.2.01.05	Penyelenggaraan Kegiatan Kepramukaan Tingkat Daerah	800.590.000,00	800.590.000,00	0,00	100,00		
04.2.01.05.5.1	BELANJA OPERASI	800.590.000,00	800.590.000,00	0,00	100,00		
04.2.01.05.5.1.05	Belanja Hibah	800.590.000,00	800.590.000,00	0,00	100,00		
04	**PROGRAM PEMBINAAN SEJARAH**	221.127.107,00	208.399.464,00	(12.727.643,00)	94,24		
04.2.01	Pembinaan Sejarah Lokal dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	221.127.107,00	208.399.464,00	(12.727.643,00)	94,24		
04.2.01.03	Peningkatan Akses Masyarakat Terhadap Data dan Informasi Sejarah	221.127.107,00	208.399.464,00	(12.727.643,00)	94,24		
04.2.01.03.5.1	BELANJA OPERASI	221.127.107,00	208.399.464,00	(12.727.643,00)	94,24		
04.2.01.03.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	221.127.107,00	208.399.464,00	(12.727.643,00)	94,24		
04	**PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA**	2.314.049.118,00	2.275.359.841,95	(38.689.276,05)	98,33		
04.2.02	Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil	330.008.856,00	325.438.856,00	(4.570.000,00)	98,62		
04.2.02.02	Pelaksanaan Fasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan Pembudi Daya Ikan Kecil	330.008.856,00	325.438.856,00	(4.570.000,00)	98,62		
04.2.02.02.5.1	BELANJA OPERASI	330.008.856,00	325.438.856,00	(4.570.000,00)	98,62		
04.2.02.02.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	330.008.856,00	325.438.856,00	(4.570.000,00)	98,62		
04.2.04	Pengelolaan Pembudidayaan Ikan	1.984.040.262,00	1.949.920.985,95	(34.119.276,05)	98,28		

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM	KETERANGAN
		ANGGARAN	REALISASI	(Rp)	(%)		
04.2.04.01	Penyediaan Data dan Informasi Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	80.185.464,00	75.015.864,00	(5.169.600,00)	93,55		
04.2.04.01.5.1	BELANJA OPERASI	80.185.464,00	75.015.864,00	(5.169.600,00)	93,55		
04.2.04.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	80.185.464,00	75.015.864,00	(5.169.600,00)	93,55		
04.2.04.02	Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	385.558.221,00	381.415.923,95	(4.142.297,05)	98,93		
04.2.04.02.5.1	BELANJA OPERASI	183.268.988,00	180.028.173,95	(3.240.814,05)	98,23		
04.2.04.02.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	183.268.988,00	180.028.173,95	(3.240.814,05)	98,23		
04.2.04.02.5.2	BELANJA MODAL	202.289.233,00	201.387.750,00	(901.483,00)	99,55		
04.2.04.02.5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	202.289.233,00	201.387.750,00	(901.483,00)	99,55		
04.2.04.03	Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	902.624.268,00	887.243.268,00	(15.381.000,00)	98,30		
04.2.04.03.5.1	BELANJA OPERASI	878.426.268,00	863.186.268,00	(15.240.000,00)	98,27		
04.2.04.03.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	878.426.268,00	863.186.268,00	(15.240.000,00)	98,27		
04.2.04.03.5.2	BELANJA MODAL	24.198.000,00	24.057.000,00	(141.000,00)	99,42		
04.2.04.03.5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	24.198.000,00	24.057.000,00	(141.000,00)	99,42		
04.2.04.06	Perencanaan, Pengembangan, Pemanfaatan dan Perlindungan Lahan untuk Pembudidayaan Ikan di Darat	615.672.309,00	606.245.930,00	(9.426.379,00)	98,47		
04.2.04.06.5.1	BELANJA OPERASI	615.672.309,00	606.245.930,00	(9.426.379,00)	98,47		
04.2.04.06.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	615.672.309,00	606.245.930,00	(9.426.379,00)	98,47		
04	**PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER**	707.648.097,00	590.611.820,00	(117.036.277,00)	83,46		
04.2.01	Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam daerah Kabupaten/Kota	427.910.982,00	391.339.820,00	(36.571.162,00)	91,45		
04.2.01.01	Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan dan Zoonosis	283.218.632,00	260.038.820,00	(23.179.812,00)	91,82		
04.2.01.01.5.1	BELANJA OPERASI	283.218.632,00	260.038.820,00	(23.179.812,00)	91,82		
04.2.01.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	283.218.632,00	260.038.820,00	(23.179.812,00)	91,82		
04.2.01.02	Pembebasan Penyakit Hewan Menular dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	144.692.350,00	131.301.000,00	(13.391.350,00)	90,74		
04.2.01.02.5.1	BELANJA OPERASI	144.692.350,00	131.301.000,00	(13.391.350,00)	90,74		
04.2.01.02.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	144.692.350,00	131.301.000,00	(13.391.350,00)	90,74		
04.2.03	Pengelolaan Pelayanan Jasa Laboratorium dan Jasa Medik Veteriner dalam Daerah Kabupaten/Kota	150.575.000,00	76.564.400,00	(74.010.600,00)	50,85		
04.2.03.02	Penyediaan Pelayanan Jasa Medik Veteriner	150.575.000,00	76.564.400,00	(74.010.600,00)	50,85		
04.2.03.02.5.1	BELANJA OPERASI	150.575.000,00	76.564.400,00	(74.010.600,00)	50,85		
04.2.03.02.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	150.575.000,00	76.564.400,00	(74.010.600,00)	50,85		
04.2.04	Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner	79.796.000,00	76.096.500,00	(3.699.500,00)	95,36		
04.2.04.01	Pendampingan Unit Usaha Hewan dan Produk Hewan	79.796.000,00	76.096.500,00	(3.699.500,00)	95,36		

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM	KETERANGAN
		ANGGARAN	REALISASI	(Rp)	(%)		
04.2.04.01.5.1	BELANJA OPERASI	37.061.000,00	36.356.500,00	(704.500,00)	98,10		
04.2.04.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	37.061.000,00	36.356.500,00	(704.500,00)	98,10		
04.2.04.01.5.2	BELANJA MODAL	42.735.000,00	39.740.000,00	(2.995.000,00)	92,99		
04.2.04.01.5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	42.735.000,00	39.740.000,00	(2.995.000,00)	92,99		
04.2.05	Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesejahteraan Hewan	49.366.115,00	46.611.100,00	(2.755.015,00)	94,42		
04.2.05.01	Pendampingan Penerapan Unit Kesejahteraan Hewan	49.366.115,00	46.611.100,00	(2.755.015,00)	94,42		
04.2.05.01.5.1	BELANJA OPERASI	49.366.115,00	46.611.100,00	(2.755.015,00)	94,42		
04.2.05.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	49.366.115,00	46.611.100,00	(2.755.015,00)	94,42		
04	**PROGRAM KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM HAYATI DAN EKOSISTEMNYA**	4.675.303.318,00	4.443.308.048,00	(231.995.270,00)	95,04		
04.2.01	Pengelolaan Taman Hutan Raya (TAHURA) Kabupaten/Kota	4.675.303.318,00	4.443.308.048,00	(231.995.270,00)	95,04		
04.2.01.01	Pencegahan, Penanggulangan dan Pembatasan Kerusakan Kawasan TAHURA	302.228.362,00	233.539.300,00	(68.689.062,00)	77,27		
04.2.01.01.5.1	BELANJA OPERASI	302.228.362,00	233.539.300,00	(68.689.062,00)	77,27		
04.2.01.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	302.228.362,00	233.539.300,00	(68.689.062,00)	77,27		
04.2.01.02	Pengamanan Kawasan TAHURA Kabupaten/Kota	943.116.995,00	907.836.895,00	(35.280.100,00)	96,26		
04.2.01.02.5.1	BELANJA OPERASI	943.116.995,00	907.836.895,00	(35.280.100,00)	96,26		
04.2.01.02.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	943.116.995,00	907.836.895,00	(35.280.100,00)	96,26		
04.2.01.05	Pemulihan Ekosistem atau Penutupan Kawasan Sesuai Rencana Pengelolaan TAHURA Kabupaten/Kota	129.424.890,00	129.033.500,00	(391.390,00)	99,70		
04.2.01.05.5.1	BELANJA OPERASI	129.424.890,00	129.033.500,00	(391.390,00)	99,70		
04.2.01.05.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	129.424.890,00	129.033.500,00	(391.390,00)	99,70		
04.2.01.06	Pemanfaatan Jasa Lingkungan TAHURA Kabupaten/Kota	2.429.945.110,00	2.390.197.240,00	(39.747.870,00)	98,36		
04.2.01.06.5.1	BELANJA OPERASI	484.987.914,00	478.335.198,00	(6.652.716,00)	98,63		
04.2.01.06.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	484.987.914,00	478.335.198,00	(6.652.716,00)	98,63		
04.2.01.06.5.2	BELANJA MODAL	1.944.957.196,00	1.911.862.042,00	(33.095.154,00)	98,30		
04.2.01.06.5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	465.478.600,00	465.341.402,00	(137.198,00)	99,97		
04.2.01.06.5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	1.479.478.596,00	1.446.520.640,00	(32.957.956,00)	97,77		
04.2.01.08	Penguatan Kapasitas dan Pemberdayaan Masyarakat di Sekitar TAHURA Kabupaten/Kota	53.288.340,00	43.967.000,00	(9.321.340,00)	82,51		
04.2.01.08.5.1	BELANJA OPERASI	53.288.340,00	43.967.000,00	(9.321.340,00)	82,51		
04.2.01.08.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	53.288.340,00	43.967.000,00	(9.321.340,00)	82,51		
04.2.01.11	Perencanaan Pengelolaan TAHURA	817.299.621,00	738.734.113,00	(78.565.508,00)	90,39		
04.2.01.11.5.1	BELANJA OPERASI	817.299.621,00	738.734.113,00	(78.565.508,00)	90,39		
04.2.01.11.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	817.299.621,00	738.734.113,00	(78.565.508,00)	90,39		
04	**PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING**	740.493.059,00	730.003.183,00	(10.489.876,00)	98,58		

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM	KETERANGAN
		ANGGARAN	REALISASI	(Rp)	(%)		
04.2.01	Menjamin Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	21.910.400,00	20.119.830,00	(1.790.570,00)	91,83		
04.2.01.03	Pengendalian Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat	21.910.400,00	20.119.830,00	(1.790.570,00)	91,83		
04.2.01.03.5.1	BELANJA OPERASI	21.910.400,00	20.119.830,00	(1.790.570,00)	91,83		
04.2.01.03.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	21.910.400,00	20.119.830,00	(1.790.570,00)	91,83		
04.2.02	Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota	699.040.459,00	691.109.953,00	(7.930.506,00)	98,87		
04.2.02.02	Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pasar Rakyat yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan	142.320.878,00	139.416.422,00	(2.904.456,00)	97,96		
04.2.02.02.5.1	BELANJA OPERASI	142.320.878,00	139.416.422,00	(2.904.456,00)	97,96		
04.2.02.02.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	142.320.878,00	139.416.422,00	(2.904.456,00)	97,96		
04.2.02.03	Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	556.719.581,00	551.693.531,00	(5.026.050,00)	99,10		
04.2.02.03.5.1	BELANJA OPERASI	556.719.581,00	551.693.531,00	(5.026.050,00)	99,10		
04.2.02.03.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	556.719.581,00	551.693.531,00	(5.026.050,00)	99,10		
04.2.03	Pengawasan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	19.542.200,00	18.773.400,00	(768.800,00)	96,07		
04.2.03.01	Pemeriksaan Kelengkapan Legalitas Dokumen Perizinan	19.542.200,00	18.773.400,00	(768.800,00)	96,07		
04.2.03.01.5.1	BELANJA OPERASI	19.542.200,00	18.773.400,00	(768.800,00)	96,07		
04.2.03.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	19.542.200,00	18.773.400,00	(768.800,00)	96,07		
04	**PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL**	116.548.366,00	112.022.572,00	(4.525.794,00)	96,12		
04.2.01	Penyediaan Informasi Industri untuk Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota	116.548.366,00	112.022.572,00	(4.525.794,00)	96,12		
04.2.01.01	Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten/Kota Melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)	24.028.990,00	23.705.000,00	(323.990,00)	98,65		
04.2.01.01.5.1	BELANJA OPERASI	24.028.990,00	23.705.000,00	(323.990,00)	98,65		
04.2.01.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	24.028.990,00	23.705.000,00	(323.990,00)	98,65		
04.2.01.02	Diseminasi, Publikasi Data Informasi dan Analisa Industri Kabupaten/Kota Melalui SIINas	92.519.376,00	88.317.572,00	(4.201.804,00)	95,46		
04.2.01.02.5.1	BELANJA OPERASI	92.519.376,00	88.317.572,00	(4.201.804,00)	95,46		
04.2.01.02.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	92.519.376,00	88.317.572,00	(4.201.804,00)	95,46		
04	**PROGRAM PENGEMBANGAN KAWASAN TRANSMIGRASI**	182.574.264,00	181.446.189,00	(1.128.075,00)	99,38		
04.2.01	Pengembangan Satuan Permukiman pada Tahap Kemandirian	182.574.264,00	181.446.189,00	(1.128.075,00)	99,38		

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM	KETERANGAN
		ANGGARAN	REALISASI	(Rp)	(%)		
04.2.01.01	Penguatan SDM dalam rangka Kemandirian Satuan Pemukiman	182.574.264,00	181.446.189,00	(1.128.075,00)	99,38		
04.2.01.01.5.1	BELANJA OPERASI	182.574.264,00	181.446.189,00	(1.128.075,00)	99,38		
04.2.01.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	182.574.264,00	181.446.189,00	(1.128.075,00)	99,38		
04	**PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH**	3.705.163.770,00	3.664.461.312,00	(40.702.458,00)	98,90		
04.2.01	Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	3.705.163.770,00	3.664.461.312,00	(40.702.458,00)	98,90		
04.2.01.01	Perencanaan Pengelolaan Pajak Daerah	419.762.746,00	415.208.985,00	(4.553.761,00)	98,92		
04.2.01.01.5.1	BELANJA OPERASI	419.762.746,00	415.208.985,00	(4.553.761,00)	98,92		
04.2.01.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	419.762.746,00	415.208.985,00	(4.553.761,00)	98,92		
04.2.01.02	Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah	235.863.343,00	231.068.228,00	(4.795.115,00)	97,97		
04.2.01.02.5.1	BELANJA OPERASI	235.863.343,00	231.068.228,00	(4.795.115,00)	97,97		
04.2.01.02.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	235.863.343,00	231.068.228,00	(4.795.115,00)	97,97		
04.2.01.03	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	65.248.800,00	64.735.600,00	(513.200,00)	99,21		
04.2.01.03.5.1	BELANJA OPERASI	65.248.800,00	64.735.600,00	(513.200,00)	99,21		
04.2.01.03.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	65.248.800,00	64.735.600,00	(513.200,00)	99,21		
04.2.01.04	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	399.577.356,00	399.577.140,00	(216,00)	100,00		
04.2.01.04.5.1	BELANJA OPERASI	399.577.356,00	399.577.140,00	(216,00)	100,00		
04.2.01.04.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	399.577.356,00	399.577.140,00	(216,00)	100,00		
04.2.01.05	Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	123.813.464,00	122.092.264,00	(1.721.200,00)	98,61		
04.2.01.05.5.1	BELANJA OPERASI	123.813.464,00	122.092.264,00	(1.721.200,00)	98,61		
04.2.01.05.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	123.813.464,00	122.092.264,00	(1.721.200,00)	98,61		
04.2.01.06	Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	717.103.613,00	713.326.879,00	(3.776.734,00)	99,47		
04.2.01.06.5.1	BELANJA OPERASI	317.103.613,00	315.326.879,00	(1.776.734,00)	99,44		
04.2.01.06.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	317.103.613,00	315.326.879,00	(1.776.734,00)	99,44		
04.2.01.06.5.2	BELANJA MODAL	400.000.000,00	398.000.000,00	(2.000.000,00)	99,50		
04.2.01.06.5.2.06	Belanja Modal Aset Lainnya	400.000.000,00	398.000.000,00	(2.000.000,00)	99,50		
04.2.01.07	Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	594.392.164,00	592.489.184,00	(1.902.980,00)	99,68		
04.2.01.07.5.1	BELANJA OPERASI	594.392.164,00	592.489.184,00	(1.902.980,00)	99,68		
04.2.01.07.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	594.392.164,00	592.489.184,00	(1.902.980,00)	99,68		
04.2.01.08	Penetapan Wajib Pajak Daerah	66.048.664,00	63.714.264,00	(2.334.400,00)	96,47		
04.2.01.08.5.1	BELANJA OPERASI	66.048.664,00	63.714.264,00	(2.334.400,00)	96,47		
04.2.01.08.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	66.048.664,00	63.714.264,00	(2.334.400,00)	96,47		
04.2.01.09	Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah	178.941.492,00	172.898.192,00	(6.043.300,00)	96,62		
04.2.01.09.5.1	BELANJA OPERASI	129.546.492,00	123.701.192,00	(5.845.300,00)	95,49		

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM	KETERANGAN
		ANGGARAN	REALISASI	(Rp)	(%)		
04.2.01.09.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	129.546.492,00	123.701.192,00	(5.845.300,00)	95,49		
04.2.01.09.5.2	BELANJA MODAL	49.395.000,00	49.197.000,00	(198.000,00)	99,60		
04.2.01.09.5.2.06	Belanja Modal Aset Lainnya	49.395.000,00	49.197.000,00	(198.000,00)	99,60		
04.2.01.10	Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah	110.013.076,00	108.528.964,00	(1.484.112,00)	98,65		
04.2.01.10.5.1	BELANJA OPERASI	110.013.076,00	108.528.964,00	(1.484.112,00)	98,65		
04.2.01.10.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	110.013.076,00	108.528.964,00	(1.484.112,00)	98,65		
04.2.01.11	Penagihan Pajak Daerah	602.509.914,00	592.270.904,00	(10.239.010,00)	98,30		
04.2.01.11.5.1	BELANJA OPERASI	602.509.914,00	592.270.904,00	(10.239.010,00)	98,30		
04.2.01.11.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	602.509.914,00	592.270.904,00	(10.239.010,00)	98,30		
04.2.01.12	Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah	12.146.620,00	11.034.700,00	(1.111.920,00)	90,85		
04.2.01.12.5.1	BELANJA OPERASI	12.146.620,00	11.034.700,00	(1.111.920,00)	90,85		
04.2.01.12.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	12.146.620,00	11.034.700,00	(1.111.920,00)	90,85		
04.2.01.13	Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	122.645.054,00	121.431.744,00	(1.213.310,00)	99,01		
04.2.01.13.5.1	BELANJA OPERASI	122.645.054,00	121.431.744,00	(1.213.310,00)	99,01		
04.2.01.13.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	122.645.054,00	121.431.744,00	(1.213.310,00)	99,01		
04.2.01.14	Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	57.097.464,00	56.084.264,00	(1.013.200,00)	98,23		
04.2.01.14.5.1	BELANJA OPERASI	57.097.464,00	56.084.264,00	(1.013.200,00)	98,23		
04.2.01.14.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	57.097.464,00	56.084.264,00	(1.013.200,00)	98,23		
04	**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**	57.790.864,00	52.865.344,00	(4.925.520,00)	91,48		
04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	46.964.864,00	42.088.344,00	(4.876.520,00)	89,62		
04.2.01.01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	11.628.100,00	7.755.000,00	(3.873.100,00)	66,69		
04.2.01.01.5.1	BELANJA OPERASI	11.628.100,00	7.755.000,00	(3.873.100,00)	66,69		
04.2.01.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	11.628.100,00	7.755.000,00	(3.873.100,00)	66,69		
04.2.01.02	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	35.336.764,00	34.333.344,00	(1.003.420,00)	97,16		
04.2.01.02.5.1	BELANJA OPERASI	35.336.764,00	34.333.344,00	(1.003.420,00)	97,16		
04.2.01.02.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	35.336.764,00	34.333.344,00	(1.003.420,00)	97,16		
04.7.03	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	10.826.000,00	10.777.000,00	(49.000,00)	99,55		
04.7.03.01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	10.826.000,00	10.777.000,00	(49.000,00)	99,55		
04.7.03.01.5.1	BELANJA OPERASI	10.826.000,00	10.777.000,00	(49.000,00)	99,55		
04.7.03.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	10.826.000,00	10.777.000,00	(49.000,00)	99,55		

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM	KETERANGAN
		ANGGARAN	REALISASI	(Rp)	(%)		
04	**PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN**	338.783.000,00	335.671.696,00	(3.111.304,00)	99,08		
04.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	338.783.000,00	335.671.696,00	(3.111.304,00)	99,08		
04.2.01.04	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	284.967.900,00	283.819.996,00	(1.147.904,00)	99,60		
04.2.01.04.5.1	BELANJA OPERASI	284.967.900,00	283.819.996,00	(1.147.904,00)	99,60		
04.2.01.04.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	59.967.900,00	58.819.996,00	(1.147.904,00)	98,09		
04.2.01.04.5.1.05	Belanja Hibah	225.000.000,00	225.000.000,00	0,00	100,00		
04.2.01.05	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	53.815.100,00	51.851.700,00	(1.963.400,00)	96,35		
04.2.01.05.5.1	BELANJA OPERASI	53.815.100,00	51.851.700,00	(1.963.400,00)	96,35		
04.2.01.05.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	53.815.100,00	51.851.700,00	(1.963.400,00)	96,35		
05	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN**	1.270.966.419,00	1.090.174.849,00	(180.791.570,00)	85,78		
05.2.01	Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	595.724.520,00	534.345.449,00	(61.379.071,00)	89,70		
05.2.01.01	Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	595.724.520,00	534.345.449,00	(61.379.071,00)	89,70		
05.2.01.01.5.1	BELANJA OPERASI	595.724.520,00	534.345.449,00	(61.379.071,00)	89,70		
05.2.01.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	220.724.520,00	159.345.449,00	(61.379.071,00)	72,19		
05.2.01.01.5.1.05	Belanja Hibah	375.000.000,00	375.000.000,00	0,00	100,00		
05.2.02	Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	465.696.099,00	420.380.400,00	(45.315.699,00)	90,27		
05.2.02.01	Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat	465.696.099,00	420.380.400,00	(45.315.699,00)	90,27		
05.2.02.01.5.1	BELANJA OPERASI	465.696.099,00	420.380.400,00	(45.315.699,00)	90,27		
05.2.02.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	465.696.099,00	420.380.400,00	(45.315.699,00)	90,27		
05.2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	209.545.800,00	135.449.000,00	(74.096.800,00)	64,64		
05.2.03.01	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	209.545.800,00	135.449.000,00	(74.096.800,00)	64,64		
05.2.03.01.5.1	BELANJA OPERASI	209.545.800,00	135.449.000,00	(74.096.800,00)	64,64		

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM	KETERANGAN
		ANGGARAN	REALISASI	(Rp)	(%)		
05.2.03.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	209.545.800,00	135.449.000,00	(74.096.800,00)	64,64		
05	**PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH**	2.284.638.400,00	2.242.532.500,00	(42.105.900,00)	98,16		
05.2.01	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	2.284.638.400,00	2.242.532.500,00	(42.105.900,00)	98,16		
05.2.01.05	Rehabilitasi/Peningkatan/Perluasan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat Skala Permukiman	2.284.638.400,00	2.242.532.500,00	(42.105.900,00)	98,16		
05.2.01.05.5.1	BELANJA OPERASI	2.084.638.400,00	2.044.032.500,00	(40.605.900,00)	98,05		
05.2.01.05.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.084.638.400,00	2.044.032.500,00	(40.605.900,00)	98,05		
05.2.01.05.5.2	BELANJA MODAL	200.000.000,00	198.500.000,00	(1.500.000,00)	99,25		
05.2.01.05.5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	200.000.000,00	198.500.000,00	(1.500.000,00)	99,25		
05	**PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)**	18.538.287.581,00	18.304.079.101,00	(234.208.480,00)	98,74		
05.2.01	Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan	18.538.287.581,00	18.304.079.101,00	(234.208.480,00)	98,74		
05.2.01.01	Perencanaan Penyediaan PSU Perumahan	371.547.100,00	368.015.900,00	(3.531.200,00)	99,05		
05.2.01.01.5.1	BELANJA OPERASI	163.547.100,00	160.907.900,00	(2.639.200,00)	98,39		
05.2.01.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	163.547.100,00	160.907.900,00	(2.639.200,00)	98,39		
05.2.01.01.5.2	BELANJA MODAL	208.000.000,00	207.108.000,00	(892.000,00)	99,57		
05.2.01.01.5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	8.000.000,00	8.000.000,00	0,00	100,00		
05.2.01.01.5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	200.000.000,00	199.108.000,00	(892.000,00)	99,55		
05.2.01.02	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian	15.071.355.551,00	15.001.646.771,00	(69.708.780,00)	99,54		
05.2.01.02.5.1	BELANJA OPERASI	1.783.707.650,00	1.752.580.971,00	(31.126.679,00)	98,25		
05.2.01.02.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.783.707.650,00	1.752.580.971,00	(31.126.679,00)	98,25		
05.2.01.02.5.2	BELANJA MODAL	13.287.647.901,00	13.249.065.800,00	(38.582.101,00)	99,71		
05.2.01.02.5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	13.287.647.901,00	13.249.065.800,00	(38.582.101,00)	99,71		
05.2.01.03	Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan	3.095.384.930,00	2.934.416.430,00	(160.968.500,00)	94,80		
05.2.01.03.5.1	BELANJA OPERASI	1.729.648.730,00	1.568.871.430,00	(160.777.300,00)	90,70		
05.2.01.03.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.729.648.730,00	1.568.871.430,00	(160.777.300,00)	90,70		
05.2.01.03.5.2	BELANJA MODAL	1.365.736.200,00	1.365.545.000,00	(191.200,00)	99,99		
05.2.01.03.5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	1.365.736.200,00	1.365.545.000,00	(191.200,00)	99,99		
05	**PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL**	483.297.556,00	480.899.200,00	(2.398.356,00)	99,50		
05.2.02	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	483.297.556,00	480.899.200,00	(2.398.356,00)	99,50		
05.2.02.01	Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	438.519.556,00	436.754.200,00	(1.765.356,00)	99,60		
05.2.02.01.5.1	BELANJA OPERASI	438.519.556,00	436.754.200,00	(1.765.356,00)	99,60		
05.2.02.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	438.519.556,00	436.754.200,00	(1.765.356,00)	99,60		

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM	KETERANGAN
		ANGGARAN	REALISASI	(Rp)	(%)		
05.2.02.02	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	44.778.000,00	44.145.000,00	(633.000,00)	98,59		
05.2.02.02.5.1	BELANJA OPERASI	44.778.000,00	44.145.000,00	(633.000,00)	98,59		
05.2.02.02.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	44.778.000,00	44.145.000,00	(633.000,00)	98,59		
05	**PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL**	207.574.264,00	206.037.993,00	(1.536.271,00)	99,26		
05.2.01	Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang Hanya Beroperasi dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	128.081.200,00	127.540.029,00	(541.171,00)	99,58		
05.2.01.03	Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja serta Pengupahan	128.081.200,00	127.540.029,00	(541.171,00)	99,58		
05.2.01.03.5.1	BELANJA OPERASI	128.081.200,00	127.540.029,00	(541.171,00)	99,58		
05.2.01.03.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	128.081.200,00	127.540.029,00	(541.171,00)	99,58		
05.2.02	Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota	79.493.064,00	78.497.964,00	(995.100,00)	98,75		
05.2.02.01	Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	67.566.064,00	66.592.864,00	(973.200,00)	98,56		
05.2.02.01.5.1	BELANJA OPERASI	67.566.064,00	66.592.864,00	(973.200,00)	98,56		
05.2.02.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	67.566.064,00	66.592.864,00	(973.200,00)	98,56		
05.2.02.02	Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	11.927.000,00	11.905.100,00	(21.900,00)	99,82		
05.2.02.02.5.1	BELANJA OPERASI	11.927.000,00	11.905.100,00	(21.900,00)	99,82		
05.2.02.02.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	11.927.000,00	11.905.100,00	(21.900,00)	99,82		
05	**PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK**	82.572.224,00	81.301.064,00	(1.271.160,00)	98,46		
05.2.01	Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak Dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	82.572.224,00	81.301.064,00	(1.271.160,00)	98,46		
05.2.01.01	Penyediaan Data Gender dan Anak di Kewenangan Kabupaten/Kota	82.572.224,00	81.301.064,00	(1.271.160,00)	98,46		
05.2.01.01.5.1	BELANJA OPERASI	82.572.224,00	81.301.064,00	(1.271.160,00)	98,46		
05.2.01.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	82.572.224,00	81.301.064,00	(1.271.160,00)	98,46		
05	**PROGRAM PENYELESAIAN GANTI KERUGIAN DAN SANTUNAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN**	450.000.000,00	442.276.425,00	(7.723.575,00)	98,28		

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM	KETERANGAN
		ANGGARAN	REALISASI	(Rp)	(%)		
05.2.01	Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	450.000.000,00	442.276.425,00	(7.723.575,00)	98,28		
05.2.01.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	450.000.000,00	442.276.425,00	(7.723.575,00)	98,28		
05.2.01.02.5.1	BELANJA OPERASI	87.408.000,00	82.559.425,00	(4.848.575,00)	94,45		
05.2.01.02.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	87.408.000,00	82.559.425,00	(4.848.575,00)	94,45		
05.2.01.02.5.2	BELANJA MODAL	362.592.000,00	359.717.000,00	(2.875.000,00)	99,21		
05.2.01.02.5.2.01	Belanja Modal Tanah	362.592.000,00	359.717.000,00	(2.875.000,00)	99,21		
05	**PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)**	166.961.136,00	140.451.623,00	(26.509.513,00)	84,12		
05.2.01	Penyimpanan sementara Limbah B3	166.961.136,00	140.451.623,00	(26.509.513,00)	84,12		
05.2.01.02	Verifikasi Lapangan untuk Memastikan Pemenuhan Persyaratan Administrasi dan Teknis Penyimpanan sementara Limbah B3	166.961.136,00	140.451.623,00	(26.509.513,00)	84,12		
05.2.01.02.5.1	BELANJA OPERASI	166.961.136,00	140.451.623,00	(26.509.513,00)	84,12		
05.2.01.02.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	166.961.136,00	140.451.623,00	(26.509.513,00)	84,12		
05	**PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN**	23.766.075,00	23.113.675,00	(652.400,00)	97,25		
05.2.01	Penyusunan Profil Kependudukan	23.766.075,00	23.113.675,00	(652.400,00)	97,25		
05.2.01.02	Penyusunan Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan serta Kebutuhan yang Lain	23.766.075,00	23.113.675,00	(652.400,00)	97,25		
05.2.01.02.5.1	BELANJA OPERASI	23.766.075,00	23.113.675,00	(652.400,00)	97,25		
05.2.01.02.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	23.766.075,00	23.113.675,00	(652.400,00)	97,25		
05	**PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT**	1.351.642.745,00	1.304.660.067,00	(46.982.678,00)	96,52		
05.2.01	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota	1.351.642.745,00	1.304.660.067,00	(46.982.678,00)	96,52		
05.2.01.03	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	215.659.614,00	205.933.050,00	(9.726.564,00)	95,49		
05.2.01.03.5.1	BELANJA OPERASI	215.659.614,00	205.933.050,00	(9.726.564,00)	95,49		
05.2.01.03.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	215.659.614,00	205.933.050,00	(9.726.564,00)	95,49		

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM	KETERANGAN
		ANGGARAN	REALISASI	(Rp)	(%)		
05.2.01.05	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa	81.912.379,00	78.627.764,00	(3.284.615,00)	95,99		
05.2.01.05.5.1	BELANJA OPERASI	81.912.379,00	78.627.764,00	(3.284.615,00)	95,99		
05.2.01.05.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	81.912.379,00	78.627.764,00	(3.284.615,00)	95,99		
05.2.01.06	Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	137.813.882,00	116.780.382,00	(21.033.500,00)	84,74		
05.2.01.06.5.1	BELANJA OPERASI	137.813.882,00	116.780.382,00	(21.033.500,00)	84,74		
05.2.01.06.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	137.813.882,00	116.780.382,00	(21.033.500,00)	84,74		
05.2.01.07	Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat	151.108.457,00	150.600.500,00	(507.957,00)	99,66		
05.2.01.07.5.1	BELANJA OPERASI	151.108.457,00	150.600.500,00	(507.957,00)	99,66		
05.2.01.07.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	151.108.457,00	150.600.500,00	(507.957,00)	99,66		
05.2.01.09	Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	765.148.413,00	752.718.371,00	(12.430.042,00)	98,38		
05.2.01.09.5.1	BELANJA OPERASI	765.148.413,00	752.718.371,00	(12.430.042,00)	98,38		
05.2.01.09.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	765.148.413,00	752.718.371,00	(12.430.042,00)	98,38		
05	**PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN**	318.370.000,00	318.370.000,00	0,00	100,00		
05.2.01	Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	238.800.000,00	238.800.000,00	0,00	100,00		
05.2.01.01	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi	238.800.000,00	238.800.000,00	0,00	100,00		
05.2.01.01.5.1	BELANJA OPERASI	238.800.000,00	238.800.000,00	0,00	100,00		
05.2.01.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	238.800.000,00	238.800.000,00	0,00	100,00		
05.2.03	Pendidikan dan Pelatihan SDM Usaha Mikro dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	79.570.000,00	79.570.000,00	0,00	100,00		
05.2.03.01	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Usaha Mikro serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Usaha Mikro	79.570.000,00	79.570.000,00	0,00	100,00		
05.2.03.01.5.1	BELANJA OPERASI	79.570.000,00	79.570.000,00	0,00	100,00		
05.2.03.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	79.570.000,00	79.570.000,00	0,00	100,00		
05	**PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL**	599.174.428,00	574.548.852,00	(24.625.576,00)	95,89		
05.2.01	Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	599.174.428,00	574.548.852,00	(24.625.576,00)	95,89		
05.2.01.01	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal	129.674.428,00	127.763.752,00	(1.910.676,00)	98,53		
05.2.01.01.5.1	BELANJA OPERASI	129.674.428,00	127.763.752,00	(1.910.676,00)	98,53		
05.2.01.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	129.674.428,00	127.763.752,00	(1.910.676,00)	98,53		

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM	KETERANGAN
		ANGGARAN	REALISASI	(Rp)	(%)		
05.2.01.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal	388.396.400,00	378.358.400,00	(10.038.000,00)	97,42		
05.2.01.02.5.1	BELANJA OPERASI	388.396.400,00	378.358.400,00	(10.038.000,00)	97,42		
05.2.01.02.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	388.396.400,00	378.358.400,00	(10.038.000,00)	97,42		
05.2.01.03	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal	81.103.600,00	68.426.700,00	(12.676.900,00)	84,37		
05.2.01.03.5.1	BELANJA OPERASI	81.103.600,00	68.426.700,00	(12.676.900,00)	84,37		
05.2.01.03.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	81.103.600,00	68.426.700,00	(12.676.900,00)	84,37		
05	**PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA**	826.139.116,00	794.914.138,00	(31.224.978,00)	96,22		
05.2.01	Penetapan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota	70.378.900,00	70.050.731,00	(328.169,00)	99,53		
05.2.01.01	Pendaftaran Objek Diduga Cagar Budaya	70.378.900,00	70.050.731,00	(328.169,00)	99,53		
05.2.01.01.5.1	BELANJA OPERASI	70.378.900,00	70.050.731,00	(328.169,00)	99,53		
05.2.01.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	70.378.900,00	70.050.731,00	(328.169,00)	99,53		
05.2.02	Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota	755.760.216,00	724.863.407,00	(30.896.809,00)	95,91		
05.2.02.01	Pelindungan Cagar Budaya	269.681.728,00	247.123.462,00	(22.558.266,00)	91,64		
05.2.02.01.5.1	BELANJA OPERASI	269.681.728,00	247.123.462,00	(22.558.266,00)	91,64		
05.2.02.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	269.681.728,00	247.123.462,00	(22.558.266,00)	91,64		
05.2.02.02	Pengembangan Cagar Budaya	486.078.488,00	477.739.945,00	(8.338.543,00)	98,28		
05.2.02.02.5.1	BELANJA OPERASI	271.373.408,00	263.830.445,00	(7.542.963,00)	97,22		
05.2.02.02.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	271.373.408,00	263.830.445,00	(7.542.963,00)	97,22		
05.2.02.02.5.2	BELANJA MODAL	214.705.080,00	213.909.500,00	(795.580,00)	99,63		
05.2.02.02.5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	2.775.000,00	2.775.000,00	0,00	100,00		
05.2.02.02.5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	211.930.080,00	211.134.500,00	(795.580,00)	99,62		
05	**PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN**	405.142.682,00	396.561.200,00	(8.581.482,00)	97,88		
05.2.01	Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota	405.142.682,00	396.561.200,00	(8.581.482,00)	97,88		
05.2.01.01	Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	351.386.832,00	348.205.600,00	(3.181.232,00)	99,09		
05.2.01.01.5.1	BELANJA OPERASI	151.386.832,00	148.905.600,00	(2.481.232,00)	98,36		
05.2.01.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	151.386.832,00	148.905.600,00	(2.481.232,00)	98,36		
05.2.01.01.5.2	BELANJA MODAL	200.000.000,00	199.300.000,00	(700.000,00)	99,65		
05.2.01.01.5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	200.000.000,00	199.300.000,00	(700.000,00)	99,65		
05.2.01.03	Pencegahan, Penanganan Kebakaran Lahan, dan Gangguan Usaha Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	53.755.850,00	48.355.600,00	(5.400.250,00)	89,95		
05.2.01.03.5.1	BELANJA OPERASI	53.755.850,00	48.355.600,00	(5.400.250,00)	89,95		
05.2.01.03.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	53.755.850,00	48.355.600,00	(5.400.250,00)	89,95		

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM	KETERANGAN
		ANGGARAN	REALISASI	(Rp)	(%)		
05	**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**	1.324.942.871,00	1.311.995.679,00	(12.947.192,00)	99,02		
05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	1.324.942.871,00	1.311.995.679,00	(12.947.192,00)	99,02		
05.2.01.01	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	656.955.694,00	645.138.116,00	(11.817.578,00)	98,20		
05.2.01.01.5.1	BELANJA OPERASI	656.955.694,00	645.138.116,00	(11.817.578,00)	98,20		
05.2.01.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	656.955.694,00	645.138.116,00	(11.817.578,00)	98,20		
05.2.01.02	Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	23.276.675,00	23.253.500,00	(23.175,00)	99,90		
05.2.01.02.5.1	BELANJA OPERASI	23.276.675,00	23.253.500,00	(23.175,00)	99,90		
05.2.01.02.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	23.276.675,00	23.253.500,00	(23.175,00)	99,90		
05.2.01.03	Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	90.156.260,00	90.075.732,00	(80.528,00)	99,91		
05.2.01.03.5.1	BELANJA OPERASI	90.156.260,00	90.075.732,00	(80.528,00)	99,91		
05.2.01.03.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	90.156.260,00	90.075.732,00	(80.528,00)	99,91		
05.2.01.04	Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	519.885.301,00	518.917.831,00	(967.470,00)	99,81		
05.2.01.04.5.1	BELANJA OPERASI	519.885.301,00	518.917.831,00	(967.470,00)	99,81		
05.2.01.04.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	519.885.301,00	518.917.831,00	(967.470,00)	99,81		
05.2.01.08	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	34.668.941,00	34.610.500,00	(58.441,00)	99,83		
05.2.01.08.5.1	BELANJA OPERASI	34.668.941,00	34.610.500,00	(58.441,00)	99,83		
05.2.01.08.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	34.668.941,00	34.610.500,00	(58.441,00)	99,83		
05	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA**	608.832.047,00	606.434.586,00	(2.397.461,00)	99,61		
05.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	608.832.047,00	606.434.586,00	(2.397.461,00)	99,61		
05.2.01.03	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	523.113.458,00	521.010.769,00	(2.102.689,00)	99,60		
05.2.01.03.5.1	BELANJA OPERASI	523.113.458,00	521.010.769,00	(2.102.689,00)	99,60		

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM	KETERANGAN
		ANGGARAN	REALISASI	(Rp)	(%)		
05.2.01.03.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	523.113.458,00	521.010.769,00	(2.102.689,00)	99,60		
05.2.01.04	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	85.718.589,00	85.423.817,00	(294.772,00)	99,66		
05.2.01.04.5.1	BELANJA OPERASI	85.718.589,00	85.423.817,00	(294.772,00)	99,66		
05.2.01.04.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	85.718.589,00	85.423.817,00	(294.772,00)	99,66		
06	**PROGRAM PENANGANAN BENCANA**	223.062.600,00	199.398.700,00	(23.663.900,00)	89,39		
06.2.01	Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota	52.392.000,00	43.930.500,00	(8.461.500,00)	83,85		
06.2.01.01	Penyediaan Makanan	52.392.000,00	43.930.500,00	(8.461.500,00)	83,85		
06.2.01.01.5.1	BELANJA OPERASI	52.392.000,00	43.930.500,00	(8.461.500,00)	83,85		
06.2.01.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	52.392.000,00	43.930.500,00	(8.461.500,00)	83,85		
06.2.02	Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat Terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota	170.670.600,00	155.468.200,00	(15.202.400,00)	91,09		
06.2.02.02	Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana	170.670.600,00	155.468.200,00	(15.202.400,00)	91,09		
06.2.02.02.5.1	BELANJA OPERASI	170.670.600,00	155.468.200,00	(15.202.400,00)	91,09		
06.2.02.02.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	170.670.600,00	155.468.200,00	(15.202.400,00)	91,09		
06	**PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)**	127.015.905,00	117.063.928,00	(9.951.977,00)	92,16		
06.2.02	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	127.015.905,00	117.063.928,00	(9.951.977,00)	92,16		
06.2.02.01	Penyediaan Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	80.892.628,00	79.086.628,00	(1.806.000,00)	97,77		
06.2.02.01.5.1	BELANJA OPERASI	80.892.628,00	79.086.628,00	(1.806.000,00)	97,77		
06.2.02.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	80.892.628,00	79.086.628,00	(1.806.000,00)	97,77		
06.2.02.03	Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi Pemenuhan Hak Anak bagi Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	46.123.277,00	37.977.300,00	(8.145.977,00)	82,34		
06.2.02.03.5.1	BELANJA OPERASI	46.123.277,00	37.977.300,00	(8.145.977,00)	82,34		
06.2.02.03.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	46.123.277,00	37.977.300,00	(8.145.977,00)	82,34		
06	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)**	235.773.198,00	233.600.310,00	(2.172.888,00)	99,08		
06.2.01	Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	235.773.198,00	233.600.310,00	(2.172.888,00)	99,08		

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM	KETERANGAN
		ANGGARAN	REALISASI	(Rp)	(%)		
06.2.01.03	Pengawasan Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan Hidup, Izin PPLH yang Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	235.773.198,00	233.600.310,00	(2.172.888,00)	99,08		
06.2.01.03.5.1	BELANJA OPERASI	235.773.198,00	233.600.310,00	(2.172.888,00)	99,08		
06.2.01.03.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	235.773.198,00	233.600.310,00	(2.172.888,00)	99,08		
06	**PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL**	53.853.864,00	52.746.264,00	(1.107.600,00)	97,94		
06.2.01	Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	53.853.864,00	52.746.264,00	(1.107.600,00)	97,94		
06.2.01.01	Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	53.853.864,00	52.746.264,00	(1.107.600,00)	97,94		
06.2.01.01.5.1	BELANJA OPERASI	53.853.864,00	52.746.264,00	(1.107.600,00)	97,94		
06.2.01.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	53.853.864,00	52.746.264,00	(1.107.600,00)	97,94		
06	**PROGRAM PENGELOLAAN PERMUSEUMAN**	5.160.170,00	4.395.000,00	(765.170,00)	85,17		
06.2.01	Pengelolaan Museum Kabupaten/Kota	5.160.170,00	4.395.000,00	(765.170,00)	85,17		
06.2.01.04	Penyediaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Museum	5.160.170,00	4.395.000,00	(765.170,00)	85,17		
06.2.01.04.5.1	BELANJA OPERASI	1.698.070,00	1.695.000,00	(3.070,00)	99,82		
06.2.01.04.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.698.070,00	1.695.000,00	(3.070,00)	99,82		
06.2.01.04.5.2	BELANJA MODAL	3.462.100,00	2.700.000,00	(762.100,00)	77,99		
06.2.01.04.5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	3.462.100,00	2.700.000,00	(762.100,00)	77,99		
06	**PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN**	186.187.655,00	174.507.878,00	(11.679.777,00)	93,73		
06.2.01	Penerbitan Tanda Daftar Usaha Pengolahan Hasil Perikanan bagi Usaha Skala Mikro dan Kecil	98.730.000,00	94.918.028,00	(3.811.972,00)	96,14		
06.2.01.01	Penyediaan Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	98.730.000,00	94.918.028,00	(3.811.972,00)	96,14		
06.2.01.01.5.1	BELANJA OPERASI	98.730.000,00	94.918.028,00	(3.811.972,00)	96,14		
06.2.01.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	98.730.000,00	94.918.028,00	(3.811.972,00)	96,14		
06.2.03	Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota	87.457.655,00	79.589.850,00	(7.867.805,00)	91,00		
06.2.03.01	Peningkatan Ketersediaan Ikan untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	87.457.655,00	79.589.850,00	(7.867.805,00)	91,00		
06.2.03.01.5.1	BELANJA OPERASI	87.457.655,00	79.589.850,00	(7.867.805,00)	91,00		
06.2.03.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	87.457.655,00	79.589.850,00	(7.867.805,00)	91,00		

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM	KETERANGAN
		ANGGARAN	REALISASI	(Rp)	(%)		
06	**PROGRAM PERIZINAN USAHA PERTANIAN**	622.939.552,00	610.468.805,00	(12.470.747,00)	98,00		
06.2.01	Penerbitan Izin Usaha Pertanian yang Kegiatan Usahanya dalam Daerah Kabupaten/Kota	622.939.552,00	610.468.805,00	(12.470.747,00)	98,00		
06.2.01.02	Penilaian Kelayakan dan Pemberian Pertimbangan Teknis Izin Usaha Pertanian	536.418.752,00	525.371.930,00	(11.046.822,00)	97,94		
06.2.01.02.5.1	BELANJA OPERASI	536.418.752,00	525.371.930,00	(11.046.822,00)	97,94		
06.2.01.02.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	536.418.752,00	525.371.930,00	(11.046.822,00)	97,94		
06.2.01.03	Pembinaan dan Pengawasan Penerapan Izin Usaha Pertanian	86.520.800,00	85.096.875,00	(1.423.925,00)	98,35		
06.2.01.03.5.1	BELANJA OPERASI	86.520.800,00	85.096.875,00	(1.423.925,00)	98,35		
06.2.01.03.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	86.520.800,00	85.096.875,00	(1.423.925,00)	98,35		
06	**PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN**	345.112.068,00	338.454.308,00	(6.657.760,00)	98,07		
06.2.01	Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan	345.112.068,00	338.454.308,00	(6.657.760,00)	98,07		
06.2.01.01	Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang	193.113.028,00	187.995.322,00	(5.117.706,00)	97,35		
06.2.01.01.5.1	BELANJA OPERASI	158.653.028,00	156.355.322,00	(2.297.706,00)	98,55		
06.2.01.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	158.653.028,00	156.355.322,00	(2.297.706,00)	98,55		
06.2.01.01.5.2	BELANJA MODAL	34.460.000,00	31.640.000,00	(2.820.000,00)	91,82		
06.2.01.01.5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	34.460.000,00	31.640.000,00	(2.820.000,00)	91,82		
06.2.01.02	Pengawasan/Penyuluhan Metrologi Legal	151.999.040,00	150.458.986,00	(1.540.054,00)	98,99		
06.2.01.02.5.1	BELANJA OPERASI	151.999.040,00	150.458.986,00	(1.540.054,00)	98,99		
06.2.01.02.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	151.999.040,00	150.458.986,00	(1.540.054,00)	98,99		
06	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**	804.513.066,00	772.779.093,00	(31.733.973,00)	96,06		
06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	804.513.066,00	772.779.093,00	(31.733.973,00)	96,06		
06.2.01.01	Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	11.892.430,00	11.732.430,00	(160.000,00)	98,65		
06.2.01.01.5.1	BELANJA OPERASI	11.892.430,00	11.732.430,00	(160.000,00)	98,65		
06.2.01.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	11.892.430,00	11.732.430,00	(160.000,00)	98,65		
06.2.01.02	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	151.630.092,00	147.423.392,00	(4.206.700,00)	97,23		
06.2.01.02.5.1	BELANJA OPERASI	151.630.092,00	147.423.392,00	(4.206.700,00)	97,23		
06.2.01.02.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	151.630.092,00	147.423.392,00	(4.206.700,00)	97,23		
06.2.01.03	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	418.494.432,00	402.634.700,00	(15.859.732,00)	96,21		
06.2.01.03.5.1	BELANJA OPERASI	418.494.432,00	402.634.700,00	(15.859.732,00)	96,21		
06.2.01.03.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	418.494.432,00	402.634.700,00	(15.859.732,00)	96,21		
06.2.01.11	Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	103.039.048,00	100.441.748,00	(2.597.300,00)	97,48		
06.2.01.11.5.1	BELANJA OPERASI	103.039.048,00	100.441.748,00	(2.597.300,00)	97,48		

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM	KETERANGAN
		ANGGARAN	REALISASI	(Rp)	(%)		
06.2.01.11.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	103.039.048,00	100.441.748,00	(2.597.300,00)	97,48		
06.2.01.13	Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif	18.683.920,00	17.549.600,00	(1.134.320,00)	93,93		
06.2.01.13.5.1	BELANJA OPERASI	18.683.920,00	17.549.600,00	(1.134.320,00)	93,93		
06.2.01.13.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	18.683.920,00	17.549.600,00	(1.134.320,00)	93,93		
06.2.01.16	Fasilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa	100.136.844,00	92.361.223,00	(7.775.621,00)	92,24		
06.2.01.16.5.1	BELANJA OPERASI	100.136.844,00	92.361.223,00	(7.775.621,00)	92,24		
06.2.01.16.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	100.136.844,00	92.361.223,00	(7.775.621,00)	92,24		
06.2.01.17	Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	636.300,00	636.000,00	(300,00)	99,95		
06.2.01.17.5.1	BELANJA OPERASI	636.300,00	636.000,00	(300,00)	99,95		
06.2.01.17.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	636.300,00	636.000,00	(300,00)	99,95		
06	**PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL**	619.334.211,00	567.068.681,00	(52.265.530,00)	91,56		
06.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	619.334.211,00	567.068.681,00	(52.265.530,00)	91,56		
06.2.01.02	Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	47.964.290,00	45.615.335,00	(2.348.955,00)	95,10		
06.2.01.02.5.1	BELANJA OPERASI	47.964.290,00	45.615.335,00	(2.348.955,00)	95,10		
06.2.01.02.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	47.964.290,00	45.615.335,00	(2.348.955,00)	95,10		
06.2.01.03	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	207.227.008,00	193.828.638,00	(13.398.370,00)	93,53		
06.2.01.03.5.1	BELANJA OPERASI	207.227.008,00	193.828.638,00	(13.398.370,00)	93,53		
06.2.01.03.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	207.227.008,00	193.828.638,00	(13.398.370,00)	93,53		
06.2.01.04	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	76.454.119,00	74.400.569,00	(2.053.550,00)	97,31		
06.2.01.04.5.1	BELANJA OPERASI	55.158.769,00	53.200.669,00	(1.958.100,00)	96,45		

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM	KETERANGAN
		ANGGARAN	REALISASI	(Rp)	(%)		
06.2.01.04.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	55.158.769,00	53.200.669,00	(1.958.100,00)	96,45		
06.2.01.04.5.2	BELANJA MODAL	21.295.350,00	21.199.900,00	(95.450,00)	99,55		
06.2.01.04.5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	21.295.350,00	21.199.900,00	(95.450,00)	99,55		
06.2.01.05	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	65.201.108,00	62.395.900,00	(2.805.208,00)	95,70		
06.2.01.05.5.1	BELANJA OPERASI	65.201.108,00	62.395.900,00	(2.805.208,00)	95,70		
06.2.01.05.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	65.201.108,00	62.395.900,00	(2.805.208,00)	95,70		
06.2.01.06	Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota	222.487.686,00	190.828.239,00	(31.659.447,00)	85,77		
06.2.01.06.5.1	BELANJA OPERASI	222.487.686,00	190.828.239,00	(31.659.447,00)	85,77		
06.2.01.06.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	222.487.686,00	190.828.239,00	(31.659.447,00)	85,77		
07	**PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK**	270.233.862,00	260.580.942,00	(9.652.920,00)	96,43		
07.2.02	Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	232.804.848,00	229.849.142,00	(2.955.706,00)	98,73		
07.2.02.01	Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	210.862.391,00	208.593.842,00	(2.268.549,00)	98,92		
07.2.02.01.5.1	BELANJA OPERASI	119.884.395,00	118.371.842,00	(1.512.553,00)	98,74		
07.2.02.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	119.884.395,00	118.371.842,00	(1.512.553,00)	98,74		
07.2.02.01.5.2	BELANJA MODAL	90.977.996,00	90.222.000,00	(755.996,00)	99,17		
07.2.02.01.5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	90.977.996,00	90.222.000,00	(755.996,00)	99,17		
07.2.02.04	Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota	21.942.457,00	21.255.300,00	(687.157,00)	96,87		
07.2.02.04.5.1	BELANJA OPERASI	21.942.457,00	21.255.300,00	(687.157,00)	96,87		
07.2.02.04.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	21.942.457,00	21.255.300,00	(687.157,00)	96,87		
07.2.03	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	37.429.014,00	30.731.800,00	(6.697.214,00)	82,11		
07.2.03.03	Koordinasi dan Sinkronisasi Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	37.429.014,00	30.731.800,00	(6.697.214,00)	82,11		
07.2.03.03.5.1	BELANJA OPERASI	37.429.014,00	30.731.800,00	(6.697.214,00)	82,11		
07.2.03.03.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	37.429.014,00	30.731.800,00	(6.697.214,00)	82,11		

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM	KETERANGAN
		ANGGARAN	REALISASI	(Rp)	(%)		
07	**PROGRAM PENGAKUAN KEBERADAAN MASYARAKAT HUKUM ADAT (MHA), KEARIFAN LOKAL DAN HAK MHA YANG TERKAIT DENGAN PPLH**	337.716.802,00	256.592.154,00	(81.124.648,00)	75,98		
07.2.01	Pengakuan MHA, Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional, dan Hak MHA yang Terkait dengan PPLH	337.716.802,00	256.592.154,00	(81.124.648,00)	75,98		
07.2.01.01	Koordinasi, Sinkronisasi, Penyediaan Data, dan Informasi Pengakuan Keberadaan MHA Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA Terkait dengan PPLH	337.716.802,00	256.592.154,00	(81.124.648,00)	75,98		
07.2.01.01.5.1	BELANJA OPERASI	337.716.802,00	256.592.154,00	(81.124.648,00)	75,98		
07.2.01.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	337.716.802,00	256.592.154,00	(81.124.648,00)	75,98		
07	**PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)**	371.154.800,00	370.158.615,00	(996.185,00)	99,73		
07.2.01	Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan	371.154.800,00	370.158.615,00	(996.185,00)	99,73		
07.2.01.01	Pendataan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	371.154.800,00	370.158.615,00	(996.185,00)	99,73		
07.2.01.01.5.1	BELANJA OPERASI	371.154.800,00	370.158.615,00	(996.185,00)	99,73		
07.2.01.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	371.154.800,00	370.158.615,00	(996.185,00)	99,73		
07	**PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN**	1.145.907.606,00	1.105.530.139,00	(40.377.467,00)	96,48		
07.2.01	Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian	1.145.907.606,00	1.105.530.139,00	(40.377.467,00)	96,48		
07.2.01.01	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa	593.725.296,00	574.968.396,00	(18.756.900,00)	96,84		
07.2.01.01.5.1	BELANJA OPERASI	593.725.296,00	574.968.396,00	(18.756.900,00)	96,84		
07.2.01.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	593.725.296,00	574.968.396,00	(18.756.900,00)	96,84		
07.2.01.02	Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa	397.279.760,00	390.798.753,00	(6.481.007,00)	98,37		
07.2.01.02.5.1	BELANJA OPERASI	397.279.760,00	390.798.753,00	(6.481.007,00)	98,37		
07.2.01.02.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	237.279.760,00	230.798.753,00	(6.481.007,00)	97,27		
07.2.01.02.5.1.05	Belanja Hibah	160.000.000,00	160.000.000,00	0,00	100,00		
07.2.01.03	Penyediaan dan Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian	34.450.100,00	27.659.750,00	(6.790.350,00)	80,29		
07.2.01.03.5.1	BELANJA OPERASI	34.450.100,00	27.659.750,00	(6.790.350,00)	80,29		
07.2.01.03.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	34.450.100,00	27.659.750,00	(6.790.350,00)	80,29		
07.2.01.04	Pembentukan Badan Usaha Milik Petani	33.246.800,00	31.472.440,00	(1.774.360,00)	94,66		
07.2.01.04.5.1	BELANJA OPERASI	33.246.800,00	31.472.440,00	(1.774.360,00)	94,66		
07.2.01.04.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	33.246.800,00	31.472.440,00	(1.774.360,00)	94,66		

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM	KETERANGAN
		ANGGARAN	REALISASI	(Rp)	(%)		
07.2.01.05	Pembentukan dan Penyelenggaraan Sekolah Lapang Kelompok Tani Tingkat Kabupaten/Kota	87.205.650,00	80.630.800,00	(6.574.850,00)	92,46		
07.2.01.05.5.1	BELANJA OPERASI	87.205.650,00	80.630.800,00	(6.574.850,00)	92,46		
07.2.01.05.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	87.205.650,00	80.630.800,00	(6.574.850,00)	92,46		
07	**PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI**	217.572.900,00	212.253.403,00	(5.319.497,00)	97,56		
07.2.01	Pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri	217.572.900,00	212.253.403,00	(5.319.497,00)	97,56		
07.2.01.01	Pelaksanaan Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota	217.572.900,00	212.253.403,00	(5.319.497,00)	97,56		
07.2.01.01.5.1	BELANJA OPERASI	217.572.900,00	212.253.403,00	(5.319.497,00)	97,56		
07.2.01.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	217.572.900,00	212.253.403,00	(5.319.497,00)	97,56		
08	**PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG**	13.659.239.831,00	13.541.462.818,00	(117.777.013,00)	99,14		
08.2.01	Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung	13.659.239.831,00	13.541.462.818,00	(117.777.013,00)	99,14		
08.2.01.02	Perencanaan, Pembangunan, Pengawasan, dan Pemanfaatan Bangunan Gedung Daerah Kabupaten/Kota	13.659.239.831,00	13.541.462.818,00	(117.777.013,00)	99,14		
08.2.01.02.5.1	BELANJA OPERASI	9.406.389.831,00	9.314.483.818,00	(91.906.013,00)	99,02		
08.2.01.02.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	9.406.389.831,00	9.314.483.818,00	(91.906.013,00)	99,02		
08.2.01.02.5.2	BELANJA MODAL	4.252.850.000,00	4.226.979.000,00	(25.871.000,00)	99,39		
08.2.01.02.5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	63.000.000,00	61.925.000,00	(1.075.000,00)	98,29		
08.2.01.02.5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	4.189.850.000,00	4.165.054.000,00	(24.796.000,00)	99,41		
08	**PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT**	83.444.560,00	61.527.300,00	(21.917.260,00)	73,73		
08.2.01	Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	83.444.560,00	61.527.300,00	(21.917.260,00)	73,73		
08.2.01.01	Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Bidang Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan	83.444.560,00	61.527.300,00	(21.917.260,00)	73,73		
08.2.01.01.5.1	BELANJA OPERASI	83.444.560,00	61.527.300,00	(21.917.260,00)	73,73		
08.2.01.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	83.444.560,00	61.527.300,00	(21.917.260,00)	73,73		
09	**PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA**	2.225.817.000,00	2.209.970.978,00	(15.846.022,00)	99,29		
09.2.01	Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungannya di Daerah Kabupaten/Kota	2.225.817.000,00	2.209.970.978,00	(15.846.022,00)	99,29		

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM	KETERANGAN
		ANGGARAN	REALISASI	(Rp)	(%)		
09.2.01.01	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kabupaten/Kota	2.225.817.000,00	2.209.970.978,00	(15.846.022,00)	99,29		
09.2.01.01.5.1	BELANJA OPERASI	1.752.267.000,00	1.736.420.978,00	(15.846.022,00)	99,10		
09.2.01.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.752.267.000,00	1.736.420.978,00	(15.846.022,00)	99,10		
09.2.01.01.5.2	BELANJA MODAL	473.550.000,00	473.550.000,00	0,00	100,00		
09.2.01.01.5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	473.550.000,00	473.550.000,00	0,00	100,00		
09	**PROGRAM PENGELOLAAN IZIN MEMBUKA TANAH**	283.456.928,00	278.133.835,00	(5.323.093,00)	98,12		
09.2.01	Penerbitan Izin Membuka Tanah	283.456.928,00	278.133.835,00	(5.323.093,00)	98,12		
09.2.01.02	Pengendalian Pemanfaatan Tanah Negara	283.456.928,00	278.133.835,00	(5.323.093,00)	98,12		
09.2.01.02.5.1	BELANJA OPERASI	283.456.928,00	278.133.835,00	(5.323.093,00)	98,12		
09.2.01.02.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	283.456.928,00	278.133.835,00	(5.323.093,00)	98,12		
10	**PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN**	159.385.781.333,00	145.761.419.827,39	(13.624.361.505,61)	91,45		
10.2.01	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	159.385.781.333,00	145.761.419.827,39	(13.624.361.505,61)	91,45		
10.2.01.05	Pembangunan Jalan	12.724.919.865,00	12.352.934.130,00	(371.985.735,00)	97,08		
10.2.01.05.5.1	BELANJA OPERASI	172.784.205,00	171.453.950,00	(1.330.255,00)	99,23		
10.2.01.05.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	172.784.205,00	171.453.950,00	(1.330.255,00)	99,23		
10.2.01.05.5.2	BELANJA MODAL	12.552.135.660,00	12.181.480.180,00	(370.655.480,00)	97,05		
10.2.01.05.5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	12.552.135.660,00	12.181.480.180,00	(370.655.480,00)	97,05		
10.2.01.08	Rekonstruksi Jalan	119.334.944.187,00	106.752.382.629,07	(12.582.561.557,93)	89,46		
10.2.01.08.5.1	BELANJA OPERASI	1.123.094.257,00	989.895.429,00	(133.198.828,00)	88,14		
10.2.01.08.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.123.094.257,00	989.895.429,00	(133.198.828,00)	88,14		
10.2.01.08.5.2	BELANJA MODAL	118.211.849.930,00	105.762.487.200,07	(12.449.362.729,93)	89,47		
10.2.01.08.5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	118.211.849.930,00	105.762.487.200,07	(12.449.362.729,93)	89,47		
10.2.01.10	Pemeliharaan Berkala Jalan	498.595.013,00	498.335.960,00	(259.053,00)	99,95		
10.2.01.10.5.1	BELANJA OPERASI	498.595.013,00	498.335.960,00	(259.053,00)	99,95		
10.2.01.10.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	498.595.013,00	498.335.960,00	(259.053,00)	99,95		
10.2.01.11	Pemeliharaan Rutin Jalan	2.053.044.926,00	2.027.318.250,00	(25.726.676,00)	98,75		
10.2.01.11.5.1	BELANJA OPERASI	27.409.926,00	25.316.250,00	(2.093.676,00)	92,36		
10.2.01.11.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	27.409.926,00	25.316.250,00	(2.093.676,00)	92,36		
10.2.01.11.5.2	BELANJA MODAL	2.025.635.000,00	2.002.002.000,00	(23.633.000,00)	98,83		
10.2.01.11.5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	233.921.400,00	231.400.000,00	(2.521.400,00)	98,92		
10.2.01.11.5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	1.791.713.600,00	1.770.602.000,00	(21.111.600,00)	98,82		
10.2.01.12	Pembangunan Jembatan	9.874.556.000,00	9.874.556.000,00	0,00	100,00		
10.2.01.12.5.2	BELANJA MODAL	9.874.556.000,00	9.874.556.000,00	0,00	100,00		
10.2.01.12.5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	9.874.556.000,00	9.874.556.000,00	0,00	100,00		
10.2.01.18	Rehabilitasi Jembatan	13.246.173.401,00	12.850.635.258,32	(395.538.142,68)	97,01		
10.2.01.18.5.1	BELANJA OPERASI	33.107.965,00	30.397.600,00	(2.710.365,00)	91,81		
10.2.01.18.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	33.107.965,00	30.397.600,00	(2.710.365,00)	91,81		
10.2.01.18.5.2	BELANJA MODAL	13.213.065.436,00	12.820.237.658,32	(392.827.777,68)	97,03		

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM	KETERANGAN
		ANGGARAN	REALISASI	(Rp)	(%)		
10.2.01.18.5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	13.213.065.436,00	12.820.237.658,32	(392.827.777,68)	97,03		
10.2.01.19	Pemeliharaan Rutin Jembatan	1.147.534.508,00	922.520.450,00	(225.014.058,00)	80,39		
10.2.01.19.5.1	BELANJA OPERASI	32.534.508,00	23.841.100,00	(8.693.408,00)	73,28		
10.2.01.19.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	32.534.508,00	23.841.100,00	(8.693.408,00)	73,28		
10.2.01.19.5.2	BELANJA MODAL	1.115.000.000,00	898.679.350,00	(216.320.650,00)	80,60		
10.2.01.19.5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	1.115.000.000,00	898.679.350,00	(216.320.650,00)	80,60		
10.2.01.21	Penanggulangan Bencana/Tanggap Darurat	506.013.433,00	482.737.150,00	(23.276.283,00)	95,40		
10.2.01.21.5.1	BELANJA OPERASI	16.013.433,00	1.781.650,00	(14.231.783,00)	11,13		
10.2.01.21.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	16.013.433,00	1.781.650,00	(14.231.783,00)	11,13		
10.2.01.21.5.2	BELANJA MODAL	490.000.000,00	480.955.500,00	(9.044.500,00)	98,15		
10.2.01.21.5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	490.000.000,00	480.955.500,00	(9.044.500,00)	98,15		
11	**PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI**	630.188.512,00	599.140.958,00	(31.047.554,00)	95,07		
11.2.01	Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi	165.958.363,00	149.405.600,00	(16.552.763,00)	90,03		
11.2.01.04	Pelaksanaan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi	165.958.363,00	149.405.600,00	(16.552.763,00)	90,03		
11.2.01.04.5.1	BELANJA OPERASI	165.958.363,00	149.405.600,00	(16.552.763,00)	90,03		
11.2.01.04.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	165.958.363,00	149.405.600,00	(16.552.763,00)	90,03		
11.2.02	Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	424.199.526,00	409.956.258,00	(14.243.268,00)	96,64		
11.2.02.01	Pengelolaan Operasional Layanan Informasi Jasa Konstruksi	27.378.344,00	27.082.900,00	(295.444,00)	98,92		
11.2.02.01.5.1	BELANJA OPERASI	20.718.344,00	20.582.900,00	(135.444,00)	99,35		
11.2.02.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	20.718.344,00	20.582.900,00	(135.444,00)	99,35		
11.2.02.01.5.2	BELANJA MODAL	6.660.000,00	6.500.000,00	(160.000,00)	97,60		
11.2.02.01.5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	6.660.000,00	6.500.000,00	(160.000,00)	97,60		
11.2.02.02	Penyediaan Perangkat Pendukung Layanan Informasi Jasa Konstruksi	223.581.331,00	213.521.030,00	(10.060.301,00)	95,50		
11.2.02.02.5.1	BELANJA OPERASI	202.285.981,00	192.521.030,00	(9.764.951,00)	95,17		
11.2.02.02.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	202.285.981,00	192.521.030,00	(9.764.951,00)	95,17		
11.2.02.02.5.2	BELANJA MODAL	21.295.350,00	21.000.000,00	(295.350,00)	98,61		
11.2.02.02.5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	21.295.350,00	21.000.000,00	(295.350,00)	98,61		
11.2.02.03	Penyelenggaraan Pelatihan untuk Peningkatan Kapasitas Administrator SIPJAKI	13.609.900,00	13.462.000,00	(147.900,00)	98,91		
11.2.02.03.5.1	BELANJA OPERASI	13.609.900,00	13.462.000,00	(147.900,00)	98,91		
11.2.02.03.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	13.609.900,00	13.462.000,00	(147.900,00)	98,91		
11.2.02.07	Penyusunan Data dan Informasi Ketersediaan/Penggunaan Material dan Peralatan	159.629.951,00	155.890.328,00	(3.739.623,00)	97,66		
11.2.02.07.5.1	BELANJA OPERASI	159.629.951,00	155.890.328,00	(3.739.623,00)	97,66		
11.2.02.07.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	159.629.951,00	155.890.328,00	(3.739.623,00)	97,66		
11.2.04	Pengawasan Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi	40.030.623,00	39.779.100,00	(251.523,00)	99,37		

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM	KETERANGAN
		ANGGARAN	REALISASI	(Rp)	(%)		
11.2.04.03	Pengawasan dan Evaluasi Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan, dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi	40.030.623,00	39.779.100,00	(251.523,00)	99,37		
11.2.04.03.5.1	BELANJA OPERASI	40.030.623,00	39.779.100,00	(251.523,00)	99,37		
11.2.04.03.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	40.030.623,00	39.779.100,00	(251.523,00)	99,37		
11	**PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN**	3.836.334.019,00	3.828.115.956,00	(8.218.063,00)	99,79		
11.2.01	Pengelolaan Sampah	3.836.334.019,00	3.828.115.956,00	(8.218.063,00)	99,79		
11.2.01.02	Pengurangan Sampah dengan Melakukan Pembatasan, Pendauran Ulang dan Pemanfaatan Kembali	49.711.750,00	49.649.000,00	(62.750,00)	99,87		
11.2.01.02.5.1	BELANJA OPERASI	49.711.750,00	49.649.000,00	(62.750,00)	99,87		
11.2.01.02.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	49.711.750,00	49.649.000,00	(62.750,00)	99,87		
11.2.01.03	Penanganan Sampah dengan Melakukan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir Sampah di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota	2.914.092.969,00	2.905.948.636,00	(8.144.333,00)	99,72		
11.2.01.03.5.1	BELANJA OPERASI	2.914.092.969,00	2.905.948.636,00	(8.144.333,00)	99,72		
11.2.01.03.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.914.092.969,00	2.905.948.636,00	(8.144.333,00)	99,72		
11.2.01.07	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota	872.529.300,00	872.518.320,00	(10.980,00)	100,00		
11.2.01.07.5.1	BELANJA OPERASI	7.284.300,00	7.284.300,00	0,00	100,00		
11.2.01.07.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	7.284.300,00	7.284.300,00	0,00	100,00		
11.2.01.07.5.2	BELANJA MODAL	865.245.000,00	865.234.020,00	(10.980,00)	100,00		
11.2.01.07.5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	865.245.000,00	865.234.020,00	(10.980,00)	100,00		
12	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG**	779.662.230,00	740.070.633,00	(39.591.597,00)	94,92		
12.2.01	Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota	150.354.000,00	147.663.973,00	(2.690.027,00)	98,21		
12.2.01.01	Pelaksanaan Persetujuan Substansi, Evaluasi, Konsultasi Evaluasi dan Penetapan RTRW Kabupaten/Kota	150.354.000,00	147.663.973,00	(2.690.027,00)	98,21		
12.2.01.01.5.1	BELANJA OPERASI	150.354.000,00	147.663.973,00	(2.690.027,00)	98,21		
12.2.01.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	150.354.000,00	147.663.973,00	(2.690.027,00)	98,21		
12.2.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang Daerah Kabupaten/Kota	58.139.600,00	55.893.013,00	(2.246.587,00)	96,14		
12.2.02.01	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyusunan RTRW Kabupaten/Kota	58.139.600,00	55.893.013,00	(2.246.587,00)	96,14		
12.2.02.01.5.1	BELANJA OPERASI	58.139.600,00	55.893.013,00	(2.246.587,00)	96,14		
12.2.02.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	58.139.600,00	55.893.013,00	(2.246.587,00)	96,14		
12.2.03	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	137.303.190,00	132.655.690,00	(4.647.500,00)	96,62		
12.2.03.01	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang untuk Investasi dan Pembangunan Daerah	137.303.190,00	132.655.690,00	(4.647.500,00)	96,62		

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM	KETERANGAN
		ANGGARAN	REALISASI	(Rp)	(%)		
12.2.03.01.5.1	BELANJA OPERASI	21.603.300,00	21.114.200,00	(489.100,00)	97,74		
12.2.03.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	21.603.300,00	21.114.200,00	(489.100,00)	97,74		
12.2.03.01.5.2	BELANJA MODAL	115.699.890,00	111.541.490,00	(4.158.400,00)	96,41		
12.2.03.01.5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	111.814.890,00	109.000.000,00	(2.814.890,00)	97,48		
12.2.03.01.5.2.06	Belanja Modal Aset Lainnya	3.885.000,00	2.541.490,00	(1.343.510,00)	65,42		
12.2.04	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	433.865.440,00	403.857.957,00	(30.007.483,00)	93,08		
12.2.04.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Penertiban dan Penegakan Hukum Bidang Penataan Ruang	272.421.044,00	264.593.584,00	(7.827.460,00)	97,13		
12.2.04.02.5.1	BELANJA OPERASI	236.346.044,00	229.093.584,00	(7.252.460,00)	96,93		
12.2.04.02.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	236.346.044,00	229.093.584,00	(7.252.460,00)	96,93		
12.2.04.02.5.2	BELANJA MODAL	36.075.000,00	35.500.000,00	(575.000,00)	98,41		
12.2.04.02.5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	36.075.000,00	35.500.000,00	(575.000,00)	98,41		
12.2.04.04	Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang	161.444.396,00	139.264.373,00	(22.180.023,00)	86,26		
12.2.04.04.5.1	BELANJA OPERASI	161.444.396,00	139.264.373,00	(22.180.023,00)	86,26		
12.2.04.04.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	161.444.396,00	139.264.373,00	(22.180.023,00)	86,26		
	SURPLUS / DEFISIT	(123.579.383.201,00)	(74.101.310.602,51)	49.478.072.598,49	0		
	PEMBIAYAAN						
00.0.00.00.6.1	**PENERIMAAN PEMBIAYAAN**	135.547.383.201,00	135.547.383.201,20	0,20	100,00		
00.0.00.00.6.1.01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	135.547.383.201,00	135.547.383.201,20	0,20	100,00		
00.0.00.00.6.2	**PENGELUARAN PEMBIAYAAN**	11.968.000.000,00	11.968.000.000,00	0,00	100,00		
00.0.00.00.6.2.02	Penyertaan Modal Daerah	11.968.000.000,00	11.968.000.000,00	0,00	100,00		
	PEMBIAYAAN NETTO	123.579.383.201,00	123.579.383.201,20	0,20	100,00		
	SISA LEBIH / KURANG PEMBIAYAAN TAHUN BERKENAAN	**0,00**	**49.478.072.598,69**	**49.478.072.598,69**	**0**		

Pj. BUPATI GUNUNG MAS

ttd

HERSON B. ADEN

LAMPIRAN 1.4

PERATURAN DAERAH KABUPATEN GUNUNG MAS
NOMOR 3 TAHUN 2024
TENTANG
PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2023

PEMERINTAH KABUPATEN GUNUNG MAS

REKAPITULASI REALISASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, DAN SUBKEGIATAN

Tahun Anggaran 2023

KODE	URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN	ANGGARAN / REALISASI	KELOMPOK BELANJA			
			OPERASI	MODAL	TDK TERDUGA	TRANSFER
1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**	ANGGARAN	514.061.824.614,00	250.198.074.699,00	0,00	0,00
		REALISASI	477.814.813.187,71	235.221.169.218,39	0,00	0,00
1.01	**PENDIDIKAN**	ANGGARAN	278.836.890.777,00	42.175.460.201,00	0,00	0,00
		REALISASI	263.378.829.650,71	41.738.916.564,00	0,00	0,00
1.01.00	**Non Program**	ANGGARAN	0,00	0,00	0,00	0,00
		REALISASI	455.280.000,00	0,00	0,00	0,00
1.01.00.0.00	Non Kegiatan	ANGGARAN	0,00	0,00	0,00	0,00
		REALISASI	455.280.000,00	0,00	0,00	0,00
1.01.00.0.00.00	Non Sub Kegiatan	ANGGARAN	0,00	0,00	0,00	0,00
		REALISASI	455.280.000,00	0,00	0,00	0,00
1.01.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	ANGGARAN	234.443.924.753,00	1.039.183.883,00	0,00	0,00
		REALISASI	223.636.821.561,00	1.009.995.083,00	0,00	0,00
1.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	ANGGARAN	99.214.928,00	0,00	0,00	0,00
		REALISASI	63.350.664,00	0,00	0,00	0,00
1.01.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	ANGGARAN	74.166.528,00	0,00	0,00	0,00
		REALISASI	38.322.264,00	0,00	0,00	0,00
1.01.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	ANGGARAN	6.000.000,00	0,00	0,00	0,00
		REALISASI	6.000.000,00	0,00	0,00	0,00
1.01.01.2.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	ANGGARAN	6.000.000,00	0,00	0,00	0,00
		REALISASI	6.000.000,00	0,00	0,00	0,00
1.01.01.2.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	ANGGARAN	6.125.000,00	0,00	0,00	0,00
		REALISASI	6.105.000,00	0,00	0,00	0,00
1.01.01.2.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	ANGGARAN	6.923.400,00	0,00	0,00	0,00
		REALISASI	6.923.400,00	0,00	0,00	0,00
1.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	ANGGARAN	230.697.217.144,00	0,00	0,00	0,00
		REALISASI	220.326.004.982,00	0,00	0,00	0,00
1.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	ANGGARAN	230.622.127.616,00	0,00	0,00	0,00
		REALISASI	220.253.065.454,00	0,00	0,00	0,00

KODE	URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN	ANGGARAN / REALISASI / KELOMPOK BELANJA			
		OPERASI	MODAL	TDK TERDUGA	TRANSFER
1.01.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	3.900.000,00	0,00	0,00	0,00
		3.830.000,00	0,00	0,00	0,00
1.01.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	71.189.528,00	0,00	0,00	0,00
		69.109.528,00	0,00	0,00	0,00
1.01.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	44.256.064,00	0,00	0,00	0,00
		43.440.064,00	0,00	0,00	0,00
1.01.01.2.03.05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	6.272.000,00	0,00	0,00	0,00
		6.272.000,00	0,00	0,00	0,00
1.01.01.2.03.06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	37.984.064,00	0,00	0,00	0,00
		37.168.064,00	0,00	0,00	0,00
1.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	1.302.594.246,00	0,00	0,00	0,00
		1.020.037.614,00	0,00	0,00	0,00
1.01.01.2.05.03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	1.302.594.246,00	0,00	0,00	0,00
		1.020.037.614,00	0,00	0,00	0,00
1.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	1.671.802.656,00	235.282.742,00	0,00	0,00
		1.618.538.092,00	231.717.000,00	0,00	0,00
1.01.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	29.522.807,00	0,00	0,00	0,00
		26.134.000,00	0,00	0,00	0,00
1.01.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	82.319.800,00	203.796.392,00	0,00	0,00
		70.000.000,00	200.637.000,00	0,00	0,00
1.01.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	49.810.105,00	28.711.350,00	0,00	0,00
		33.565.000,00	28.380.000,00	0,00	0,00
1.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	22.200.000,00	0,00	0,00	0,00
		22.157.400,00	0,00	0,00	0,00
1.01.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	13.248.000,00	0,00	0,00	0,00
		9.720.000,00	0,00	0,00	0,00
1.01.01.2.06.07	Penyediaan Bahan/Material	145.051.476,00	2.775.000,00	0,00	0,00
		139.153.000,00	2.700.000,00	0,00	0,00
1.01.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	55.512.000,00	0,00	0,00	0,00
		48.794.000,00	0,00	0,00	0,00
1.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1.256.990.300,00	0,00	0,00	0,00
		1.252.184.692,00	0,00	0,00	0,00
1.01.01.2.06.10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	17.148.168,00	0,00	0,00	0,00
		16.830.000,00	0,00	0,00	0,00
1.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	0,00	380.730.000,00	0,00	0,00
		0,00	356.816.250,00	0,00	0,00
1.01.01.2.07.01	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	0,00	380.730.000,00	0,00	0,00
		0,00	356.816.250,00	0,00	0,00

KODE	URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN	ANGGARAN / REALISASI	KELOMPOK BELANJA			
			OPERASI	MODAL	TDK TERDUGA	TRANSFER
1.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	ANGGARAN	386.630.998,00	0,00	0,00	0,00
		REALISASI	329.015.834,00	0,00	0,00	0,00
1.01.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	ANGGARAN	10.000.000,00	0,00	0,00	0,00
		REALISASI	10.000.000,00	0,00	0,00	0,00
1.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	ANGGARAN	156.720.000,00	0,00	0,00	0,00
		REALISASI	100.060.834,00	0,00	0,00	0,00
1.01.01.2.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	ANGGARAN	213.130.878,00	0,00	0,00	0,00
		REALISASI	212.855.000,00	0,00	0,00	0,00
1.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	ANGGARAN	6.780.120,00	0,00	0,00	0,00
		REALISASI	6.100.000,00	0,00	0,00	0,00
1.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	ANGGARAN	242.208.717,00	423.171.141,00	0,00	0,00
		REALISASI	236.434.311,00	421.461.833,00	0,00	0,00
1.01.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	ANGGARAN	29.314.656,00	0,00	0,00	0,00
		REALISASI	29.314.656,00	0,00	0,00	0,00
1.01.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	ANGGARAN	84.970.514,00	0,00	0,00	0,00
		REALISASI	81.288.655,00	0,00	0,00	0,00
1.01.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	ANGGARAN	90.845.952,00	0,00	0,00	0,00
		REALISASI	89.672.000,00	0,00	0,00	0,00
1.01.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	ANGGARAN	37.077.595,00	423.171.141,00	0,00	0,00
		REALISASI	36.159.000,00	421.461.833,00	0,00	0,00
1.01.02	**PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN**	ANGGARAN	44.392.966.024,00	41.136.276.318,00	0,00	0,00
		REALISASI	39.286.728.089,71	40.728.921.481,00	0,00	0,00
1.01.02.2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	ANGGARAN	24.740.698.225,00	21.692.594.718,00	0,00	0,00
		REALISASI	23.630.022.221,71	21.479.888.676,00	0,00	0,00
1.01.02.2.01.02	Penambahan Ruang Kelas Baru	ANGGARAN	0,00	3.684.146.000,00	0,00	0,00
		REALISASI	0,00	3.672.508.750,00	0,00	0,00
1.01.02.2.01.03	Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	ANGGARAN	0,00	1.968.656.000,00	0,00	0,00
		REALISASI	0,00	1.926.458.503,00	0,00	0,00
1.01.02.2.01.04	Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah	ANGGARAN	0,00	786.386.000,00	0,00	0,00
		REALISASI	0,00	701.139.499,00	0,00	0,00
1.01.02.2.01.05	Pembangunan Perpustakaan Sekolah	ANGGARAN	0,00	1.708.564.000,00	0,00	0,00
		REALISASI	0,00	1.704.725.465,00	0,00	0,00
1.01.02.2.01.06	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	ANGGARAN	0,00	3.579.167.000,00	0,00	0,00
		REALISASI	0,00	3.562.933.883,00	0,00	0,00
1.01.02.2.01.08	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas	ANGGARAN	0,00	4.712.727.000,00	0,00	0,00
		REALISASI	0,00	4.677.069.490,00	0,00	0,00

KODE	URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN	ANGGARAN / REALISASI	KELOMPOK BELANJA			
			OPERASI	MODAL	TDK TERDUGA	TRANSFER
1.01.02.2.01.09	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	ANGGARAN	0,00	170.000.000,00	0,00	0,00
		REALISASI	0,00	169.231.650,00	0,00	0,00
1.01.02.2.01.13	Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah	ANGGARAN	0,00	573.940.000,00	0,00	0,00
		REALISASI	0,00	570.574.500,00	0,00	0,00
1.01.02.2.01.14	Pengadaan Mebel Sekolah	ANGGARAN	0,00	542.250.000,00	0,00	0,00
		REALISASI	0,00	532.650.000,00	0,00	0,00
1.01.02.2.01.21	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar	ANGGARAN	2.034.834.264,00	0,00	0,00	0,00
		REALISASI	2.033.844.264,00	0,00	0,00	0,00
1.01.02.2.01.22	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa	ANGGARAN	0,00	348.886.050,00	0,00	0,00
		REALISASI	0,00	272.350.000,00	0,00	0,00
1.01.02.2.01.23	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	ANGGARAN	184.275.670,00	0,00	0,00	0,00
		REALISASI	182.115.400,00	0,00	0,00	0,00
1.01.02.2.01.24	Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan Dasar	ANGGARAN	63.326.000,00	0,00	0,00	0,00
		REALISASI	61.166.400,00	0,00	0,00	0,00
1.01.02.2.01.26	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	ANGGARAN	3.945.204.458,00	0,00	0,00	0,00
		REALISASI	3.674.730.026,00	0,00	0,00	0,00
1.01.02.2.01.27	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	ANGGARAN	784.330.276,00	0,00	0,00	0,00
		REALISASI	595.923.532,00	0,00	0,00	0,00
1.01.02.2.01.28	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	ANGGARAN	3.044.571.545,00	164.024.540,00	0,00	0,00
		REALISASI	2.766.879.363,00	161.100.000,00	0,00	0,00
1.01.02.2.01.29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	ANGGARAN	13.909.569.420,00	2.681.550.128,00	0,00	0,00
		REALISASI	13.547.657.844,71	2.762.802.156,00	0,00	0,00
1.01.02.2.01.30	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	ANGGARAN	404.936.592,00	0,00	0,00	0,00
		REALISASI	398.906.392,00	0,00	0,00	0,00
1.01.02.2.01.31	Pembangunan Laboratorium Sekolah Dasar	ANGGARAN	369.650.000,00	772.298.000,00	0,00	0,00
		REALISASI	368.799.000,00	766.344.780,00	0,00	0,00
1.01.02.2.02	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	ANGGARAN	13.248.858.787,00	18.086.872.600,00	0,00	0,00
		REALISASI	12.305.660.973,00	17.952.377.884,00	0,00	0,00
1.01.02.2.02.02	Penambahan Ruang Kelas Baru	ANGGARAN	592.874.154,00	837.564.000,00	0,00	0,00
		REALISASI	564.202.475,00	773.617.262,00	0,00	0,00
1.01.02.2.02.03	Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	ANGGARAN	0,00	1.817.530.000,00	0,00	0,00
		REALISASI	0,00	1.804.104.800,00	0,00	0,00
1.01.02.2.02.04	Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah	ANGGARAN	0,00	1.658.032.000,00	0,00	0,00
		REALISASI	0,00	1.653.249.500,00	0,00	0,00
1.01.02.2.02.05	Pembangunan Perpustakaan Sekolah	ANGGARAN	0,00	423.869.000,00	0,00	0,00
		REALISASI	0,00	422.810.750,00	0,00	0,00
1.01.02.2.02.06	Pembangunan Laboratorium	ANGGARAN	0,00	5.350.974.000,00	0,00	0,00
		REALISASI	0,00	5.313.065.730,00	0,00	0,00

KODE	URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN	ANGGARAN / REALISASI	KELOMPOK BELANJA			
			OPERASI	MODAL	TDK TERDUGA	TRANSFER
1.01.02.2.02.12	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	ANGGARAN	0,00	1.622.164.000,00	0,00	0,00
		REALISASI	0,00	1.603.838.000,00	0,00	0,00
1.01.02.2.02.14	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	ANGGARAN	0,00	3.208.205.000,00	0,00	0,00
		REALISASI	0,00	3.113.329.000,00	0,00	0,00
1.01.02.2.02.15	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru Sekolah	ANGGARAN	0,00	55.855.000,00	0,00	0,00
		REALISASI	0,00	55.700.000,00	0,00	0,00
1.01.02.2.02.16	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Unit Kesehatan Sekolah	ANGGARAN	0,00	215.750.000,00	0,00	0,00
		REALISASI	0,00	215.245.617,00	0,00	0,00
1.01.02.2.02.17	Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah	ANGGARAN	0,00	537.878.000,00	0,00	0,00
		REALISASI	0,00	534.687.000,00	0,00	0,00
1.01.02.2.02.19	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Serba Guna/Aula	ANGGARAN	0,00	168.000.000,00	0,00	0,00
		REALISASI	0,00	167.504.000,00	0,00	0,00
1.01.02.2.02.25	Pengadaan Mebel Sekolah	ANGGARAN	0,00	190.500.000,00	0,00	0,00
		REALISASI	0,00	189.580.000,00	0,00	0,00
1.01.02.2.02.32	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama	ANGGARAN	1.034.854.264,00	0,00	0,00	0,00
		REALISASI	1.033.864.264,00	0,00	0,00	0,00
1.01.02.2.02.35	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa	ANGGARAN	0,00	501.746.550,00	0,00	0,00
		REALISASI	0,00	501.188.000,00	0,00	0,00
1.01.02.2.02.36	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	ANGGARAN	185.403.670,00	0,00	0,00	0,00
		REALISASI	176.493.600,00	0,00	0,00	0,00
1.01.02.2.02.37	Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	ANGGARAN	152.236.000,00	34.230.000,00	0,00	0,00
		REALISASI	151.318.900,00	33.700.000,00	0,00	0,00
1.01.02.2.02.38	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	ANGGARAN	115.015.200,00	120.810.000,00	0,00	0,00
		REALISASI	114.907.319,00	119.600.000,00	0,00	0,00
1.01.02.2.02.39	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	ANGGARAN	2.927.454.410,00	0,00	0,00	0,00
		REALISASI	2.276.948.372,00	0,00	0,00	0,00
1.01.02.2.02.40	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	ANGGARAN	398.843.130,00	0,00	0,00	0,00
		REALISASI	285.798.951,00	0,00	0,00	0,00
1.01.02.2.02.41	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	ANGGARAN	110.455.196,00	0,00	0,00	0,00
		REALISASI	89.110.800,00	0,00	0,00	0,00
1.01.02.2.02.42	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	ANGGARAN	7.393.389.863,00	1.343.765.050,00	0,00	0,00
		REALISASI	7.275.182.775,00	1.451.158.225,00	0,00	0,00
1.01.02.2.02.43	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	ANGGARAN	338.332.900,00	0,00	0,00	0,00
		REALISASI	337.833.517,00	0,00	0,00	0,00
1.01.02.2.03	Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	ANGGARAN	6.128.002.767,00	1.356.809.000,00	0,00	0,00
		REALISASI	3.237.284.995,00	1.296.654.921,00	0,00	0,00

KODE	URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN	ANGGARAN / REALISASI	KELOMPOK BELANJA			
			OPERASI	MODAL	TDK TERDUGA	TRANSFER
1.01.02.2.03.01	Pembangunan Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD	ANGGARAN	16.376.000,00	872.257.000,00	0,00	0,00
		REALISASI	13.530.000,00	864.210.940,00	0,00	0,00
1.01.02.2.03.02	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD	ANGGARAN	433.458.490,00	81.270.000,00	0,00	0,00
		REALISASI	431.480.517,00	67.380.199,00	0,00	0,00
1.01.02.2.03.03	Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD	ANGGARAN	228.250.000,00	65.250.000,00	0,00	0,00
		REALISASI	227.918.749,00	51.637.382,00	0,00	0,00
1.01.02.2.03.04	Rehabilitasi Sedang/Berat Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD	ANGGARAN	298.250.000,00	171.500.000,00	0,00	0,00
		REALISASI	199.530.350,00	149.036.200,00	0,00	0,00
1.01.02.2.03.07	Pengadaan Mebel PAUD	ANGGARAN	0,00	61.550.000,00	0,00	0,00
		REALISASI	0,00	60.090.000,00	0,00	0,00
1.01.02.2.03.12	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa PAUD	ANGGARAN	353.334.000,00	104.982.000,00	0,00	0,00
		REALISASI	351.253.000,00	104.300.200,00	0,00	0,00
1.01.02.2.03.13	Penyelenggaraan Proses Belajar PAUD	ANGGARAN	467.964.764,00	0,00	0,00	0,00
		REALISASI	429.597.500,00	0,00	0,00	0,00
1.01.02.2.03.14	Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan PAUD	ANGGARAN	772.012.198,00	0,00	0,00	0,00
		REALISASI	740.741.123,00	0,00	0,00	0,00
1.01.02.2.03.15	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan PAUD	ANGGARAN	353.205.426,00	0,00	0,00	0,00
		REALISASI	271.806.156,00	0,00	0,00	0,00
1.01.02.2.03.17	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD	ANGGARAN	573.159.889,00	0,00	0,00	0,00
		REALISASI	546.427.000,00	0,00	0,00	0,00
1.01.02.2.03.18	Pengelolaan Dana BOP PAUD	ANGGARAN	2.631.992.000,00	0,00	0,00	0,00
		REALISASI	25.000.600,00	0,00	0,00	0,00
1.01.02.2.04	Pengelolaan Pendidikan Non Formal/Kesetaraan	ANGGARAN	275.406.245,00	0,00	0,00	0,00
		REALISASI	113.759.900,00	0,00	0,00	0,00
1.01.02.2.04.17	Pengelolaan Dana BOP Sekolah Non Formal/Kesetaraan	ANGGARAN	125.600.000,00	0,00	0,00	0,00
		REALISASI	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01.02.2.04.18	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOP Sekolah Non Formal/Kesetaraan	ANGGARAN	97.099.560,00	0,00	0,00	0,00
		REALISASI	71.190.700,00	0,00	0,00	0,00
1.01.02.2.04.27	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	ANGGARAN	52.706.685,00	0,00	0,00	0,00
		REALISASI	42.569.200,00	0,00	0,00	0,00
1.02	**KESEHATAN**	ANGGARAN	169.997.505.555,00	21.287.290.623,00	0,00	0,00
		REALISASI	151.775.168.317,00	20.550.611.976,00	0,00	0,00
1.02.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	ANGGARAN	99.746.588.907,00	7.555.300.000,00	0,00	0,00
		REALISASI	89.603.950.078,00	6.912.543.776,00	0,00	0,00
1.02.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	ANGGARAN	612.465.634,00	0,00	0,00	0,00
		REALISASI	605.957.719,00	0,00	0,00	0,00
1.02.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	ANGGARAN	573.624.834,00	0,00	0,00	0,00
		REALISASI	568.157.319,00	0,00	0,00	0,00

KODE	URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN	ANGGARAN / REALISASI	KELOMPOK BELANJA			
			OPERASI	MODAL	TDK TERDUGA	TRANSFER
1.02.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD		3.331.800,00	0,00	0,00	0,00
			3.233.000,00	0,00	0,00	0,00
1.02.01.2.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD		3.530.600,00	0,00	0,00	0,00
			3.405.300,00	0,00	0,00	0,00
1.02.01.2.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD		27.873.000,00	0,00	0,00	0,00
			27.122.500,00	0,00	0,00	0,00
1.02.01.2.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD		1.423.400,00	0,00	0,00	0,00
			1.393.000,00	0,00	0,00	0,00
1.02.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		2.682.000,00	0,00	0,00	0,00
			2.646.600,00	0,00	0,00	0,00
1.02.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		73.849.914.180,00	0,00	0,00	0,00
			67.965.907.295,00	0,00	0,00	0,00
1.02.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		73.763.986.241,00	0,00	0,00	0,00
			67.880.492.295,00	0,00	0,00	0,00
1.02.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD		85.927.939,00	0,00	0,00	0,00
			85.415.000,00	0,00	0,00	0,00
1.02.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah		370.909.591,00	0,00	0,00	0,00
			370.320.230,00	0,00	0,00	0,00
1.02.01.2.03.06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD		370.909.591,00	0,00	0,00	0,00
			370.320.230,00	0,00	0,00	0,00
1.02.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		242.696.400,00	0,00	0,00	0,00
			237.363.790,00	0,00	0,00	0,00
1.02.01.2.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi		242.696.400,00	0,00	0,00	0,00
			237.363.790,00	0,00	0,00	0,00
1.02.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah		1.865.604.710,00	0,00	0,00	0,00
			1.842.637.130,00	0,00	0,00	0,00
1.02.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		33.489.810,00	0,00	0,00	0,00
			33.393.750,00	0,00	0,00	0,00
1.02.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		32.465.480,00	0,00	0,00	0,00
			32.465.000,00	0,00	0,00	0,00
1.02.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor		337.296.960,00	0,00	0,00	0,00
			337.182.000,00	0,00	0,00	0,00
1.02.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan		90.407.502,00	0,00	0,00	0,00
			90.371.300,00	0,00	0,00	0,00
1.02.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan		24.462.000,00	0,00	0,00	0,00
			11.450.000,00	0,00	0,00	0,00
1.02.01.2.06.07	Penyediaan Bahan/Material		45.239.488,00	0,00	0,00	0,00
			41.838.000,00	0,00	0,00	0,00

KODE	URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN	ANGGARAN / REALISASI	KELOMPOK BELANJA			
			OPERASI	MODAL	TDK TERDUGA	TRANSFER
1.02.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		1.302.243.470,00	0,00	0,00	0,00
			1.295.937.080,00	0,00	0,00	0,00
1.02.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		66.200.000,00	4.790.300.000,00	0,00	0,00
			64.800.000,00	4.600.490.000,00	0,00	0,00
1.02.01.2.07.01	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan		0,00	479.300.000,00	0,00	0,00
			0,00	475.700.000,00	0,00	0,00
1.02.01.2.07.02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		0,00	618.492.000,00	0,00	0,00
			0,00	608.140.000,00	0,00	0,00
1.02.01.2.07.11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		66.200.000,00	3.692.508.000,00	0,00	0,00
			64.800.000,00	3.516.650.000,00	0,00	0,00
1.02.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		2.336.303.282,00	0,00	0,00	0,00
			2.102.188.952,00	0,00	0,00	0,00
1.02.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat		7.938.000,00	0,00	0,00	0,00
			6.413.500,00	0,00	0,00	0,00
1.02.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		1.135.782.160,00	0,00	0,00	0,00
			1.053.215.929,00	0,00	0,00	0,00
1.02.01.2.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor		91.561.902,00	0,00	0,00	0,00
			91.560.000,00	0,00	0,00	0,00
1.02.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		1.101.021.220,00	0,00	0,00	0,00
			950.999.523,00	0,00	0,00	0,00
1.02.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		1.545.919.581,00	0,00	0,00	0,00
			1.478.755.851,00	0,00	0,00	0,00
1.02.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan		62.734.429,00	0,00	0,00	0,00
			43.585.300,00	0,00	0,00	0,00
1.02.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		964.437.567,00	0,00	0,00	0,00
			917.286.551,00	0,00	0,00	0,00
1.02.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya		119.510.345,00	0,00	0,00	0,00
			119.439.000,00	0,00	0,00	0,00
1.02.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		399.237.240,00	0,00	0,00	0,00
			398.445.000,00	0,00	0,00	0,00
1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD		18.847.493.129,00	2.765.000.000,00	0,00	0,00
			14.934.420.711,00	2.312.053.776,00	0,00	0,00
1.02.01.2.10.01	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD		18.847.493.129,00	2.765.000.000,00	0,00	0,00
			14.934.420.711,00	2.312.053.776,00	0,00	0,00
1.02.01.2.13	Penataan Organisasi		9.082.400,00	0,00	0,00	0,00
			1.598.400,00	0,00	0,00	0,00

KODE	URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN	ANGGARAN / REALISASI	KELOMPOK BELANJA			
			OPERASI	MODAL	TDK TERDUGA	TRANSFER
1.02.01.2.13.04	Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana	ANGGARAN	9.082.400,00	0,00	0,00	0,00
		REALISASI	1.598.400,00	0,00	0,00	0,00
1.02.02	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**	ANGGARAN	59.595.342.945,00	13.731.990.623,00	0,00	0,00
		REALISASI	53.035.004.419,00	13.638.068.200,00	0,00	0,00
1.02.02.2.01	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	ANGGARAN	6.671.157.718,00	13.465.135.967,00	0,00	0,00
		REALISASI	6.355.202.419,00	13.374.835.200,00	0,00	0,00
1.02.02.2.01.03	Pembangunan Fasilitas Kesehatan Lainnya	ANGGARAN	56.000.000,00	2.094.212.834,00	0,00	0,00
		REALISASI	0,00	2.083.568.000,00	0,00	0,00
1.02.02.2.01.04	Pembangunan Rumah Dinas Tenaga Kesehatan	ANGGARAN	0,00	248.840.000,00	0,00	0,00
		REALISASI	0,00	248.200.000,00	0,00	0,00
1.02.02.2.01.09	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Puskesmas	ANGGARAN	0,00	0,00	0,00	0,00
		REALISASI	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02.02.2.01.11	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Dinas Tenaga Kesehatan	ANGGARAN	69.903.800,00	0,00	0,00	0,00
		REALISASI	69.593.000,00	0,00	0,00	0,00
1.02.02.2.01.13	Pengadaan Prasarana dan Pendukung Fasilitas Pelayanan Kesehatan	ANGGARAN	0,00	1.795.999.980,00	0,00	0,00
		REALISASI	0,00	1.767.000.000,00	0,00	0,00
1.02.02.2.01.14	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	ANGGARAN	0,00	9.236.658.153,00	0,00	0,00
		REALISASI	0,00	9.186.767.200,00	0,00	0,00
1.02.02.2.01.16	Pengadaan Obat, Vaksin	ANGGARAN	1.200.001.100,00	0,00	0,00	0,00
		REALISASI	1.198.485.042,00	0,00	0,00	0,00
1.02.02.2.01.17	Pengadaan Bahan Habis Pakai	ANGGARAN	3.517.183.894,00	0,00	0,00	0,00
		REALISASI	3.383.703.564,00	0,00	0,00	0,00
1.02.02.2.01.20	Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	ANGGARAN	936.276.095,00	0,00	0,00	0,00
		REALISASI	822.164.350,00	0,00	0,00	0,00
1.02.02.2.01.21	Distribusi Alat Kesehatan, Obat, Vaksin, Bahan Medis Habis Pakai (BMHP), Makanan dan Minuman ke Puskesmas serta Fasilitas Kesehatan Lainnya	ANGGARAN	891.792.829,00	89.425.000,00	0,00	0,00
		REALISASI	881.256.463,00	89.300.000,00	0,00	0,00
1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	ANGGARAN	52.694.581.227,00	266.854.656,00	0,00	0,00
		REALISASI	46.496.737.440,00	263.233.000,00	0,00	0,00
1.02.02.2.02.01	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	ANGGARAN	1.231.561.200,00	0,00	0,00	0,00
		REALISASI	1.089.342.326,40	0,00	0,00	0,00
1.02.02.2.02.02	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	ANGGARAN	1.549.048.116,00	0,00	0,00	0,00
		REALISASI	1.215.664.107,40	0,00	0,00	0,00
1.02.02.2.02.03	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	ANGGARAN	129.865.204,00	0,00	0,00	0,00
		REALISASI	110.644.445,00	0,00	0,00	0,00

KODE	URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN	ANGGARAN / REALISASI / KELOMPOK BELANJA			
		OPERASI	MODAL	TDK TERDUGA	TRANSFER
1.02.02.2.02.04	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	411.371.606,00	0,00	0,00	0,00
		174.685.837,00	0,00	0,00	0,00
1.02.02.2.02.05	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	610.632.000,00	0,00	0,00	0,00
		506.786.249,00	0,00	0,00	0,00
1.02.02.2.02.06	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	1.303.378.700,00	0,00	0,00	0,00
		1.128.560.991,80	0,00	0,00	0,00
1.02.02.2.02.07	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	297.183.500,00	0,00	0,00	0,00
		329.109.541,80	0,00	0,00	0,00
1.02.02.2.02.08	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	113.375.641,00	0,00	0,00	0,00
		107.307.800,00	0,00	0,00	0,00
1.02.02.2.02.09	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	91.371.299,00	0,00	0,00	0,00
		87.160.700,00	0,00	0,00	0,00
1.02.02.2.02.10	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	530.929.300,00	0,00	0,00	0,00
		528.008.552,60	0,00	0,00	0,00
1.02.02.2.02.11	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	592.245.880,00	0,00	0,00	0,00
		564.908.018,40	0,00	0,00	0,00
1.02.02.2.02.12	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	358.682.158,00	0,00	0,00	0,00
		344.827.200,00	0,00	0,00	0,00
1.02.02.2.02.15	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	1.666.811.764,00	0,00	0,00	0,00
		1.201.699.750,00	0,00	0,00	0,00
1.02.02.2.02.16	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	527.228.894,00	0,00	0,00	0,00
		345.134.500,00	0,00	0,00	0,00
1.02.02.2.02.17	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	1.097.868.595,00	0,00	0,00	0,00
		969.021.114,60	0,00	0,00	0,00
1.02.02.2.02.18	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	527.214.300,00	0,00	0,00	0,00
		495.494.852,00	0,00	0,00	0,00
1.02.02.2.02.20	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	82.157.720,00	0,00	0,00	0,00
		66.871.280,00	0,00	0,00	0,00
1.02.02.2.02.21	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)	34.827.500,00	0,00	0,00	0,00
		26.280.400,00	0,00	0,00	0,00
1.02.02.2.02.22	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA	178.104.434,00	0,00	0,00	0,00
		117.836.000,00	0,00	0,00	0,00
1.02.02.2.02.23	Pengelolaan Upaya Kesehatan Khusus	397.644.410,00	0,00	0,00	0,00
		376.364.125,00	0,00	0,00	0,00
1.02.02.2.02.25	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	1.519.336.413,00	0,00	0,00	0,00
		1.065.560.397,00	0,00	0,00	0,00
1.02.02.2.02.26	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	21.008.507.361,00	0,00	0,00	0,00
		20.728.410.776,00	0,00	0,00	0,00

KODE	URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN	ANGGARAN / REALISASI	KELOMPOK BELANJA			
			OPERASI	MODAL	TDK TERDUGA	TRANSFER
1.02.02.2.02.28	Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Laboratorium Rujukan/Nasional	ANGGARAN	80.690.600,00	0,00	0,00	0,00
		REALISASI	42.576.980,00	0,00	0,00	0,00
1.02.02.2.02.32	Operasional Pelayanan Rumah Sakit	ANGGARAN	2.092.343.556,00	266.854.656,00	0,00	0,00
		REALISASI	1.402.699.365,00	263.233.000,00	0,00	0,00
1.02.02.2.02.33	Operasional Pelayanan Puskesmas	ANGGARAN	13.381.372.743,00	0,00	0,00	0,00
		REALISASI	11.226.841.346,00	0,00	0,00	0,00
1.02.02.2.02.34	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	ANGGARAN	22.564.672,00	0,00	0,00	0,00
		REALISASI	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02.02.2.02.35	Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota	ANGGARAN	958.989.801,00	0,00	0,00	0,00
		REALISASI	682.308.785,00	0,00	0,00	0,00
1.02.02.2.02.36	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	ANGGARAN	103.591.200,00	0,00	0,00	0,00
		REALISASI	71.505.000,00	0,00	0,00	0,00
1.02.02.2.02.37	Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah	ANGGARAN	1.768.847.460,00	0,00	0,00	0,00
		REALISASI	1.474.791.000,00	0,00	0,00	0,00
1.02.02.2.02.40	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis	ANGGARAN	12.459.200,00	0,00	0,00	0,00
		REALISASI	9.121.000,00	0,00	0,00	0,00
1.02.02.2.02.41	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)	ANGGARAN	6.708.800,00	0,00	0,00	0,00
		REALISASI	2.015.000,00	0,00	0,00	0,00
1.02.02.2.02.42	Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria	ANGGARAN	7.667.200,00	0,00	0,00	0,00
		REALISASI	5.200.000,00	0,00	0,00	0,00
1.02.02.2.03	Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi	ANGGARAN	156.195.300,00	0,00	0,00	0,00
		REALISASI	110.158.260,00	0,00	0,00	0,00
1.02.02.2.03.02	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	ANGGARAN	156.195.300,00	0,00	0,00	0,00
		REALISASI	110.158.260,00	0,00	0,00	0,00
1.02.02.2.04	Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	ANGGARAN	73.408.700,00	0,00	0,00	0,00
		REALISASI	72.906.300,00	0,00	0,00	0,00
1.02.02.2.04.03	Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan	ANGGARAN	73.408.700,00	0,00	0,00	0,00
		REALISASI	72.906.300,00	0,00	0,00	0,00
1.02.03	**PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN**	ANGGARAN	8.981.959.284,00	0,00	0,00	0,00
		REALISASI	7.724.696.671,00	0,00	0,00	0,00
1.02.03.2.02	Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota	ANGGARAN	8.144.705.745,00	0,00	0,00	0,00
		REALISASI	6.902.164.860,00	0,00	0,00	0,00
1.02.03.2.02.02	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar	ANGGARAN	8.144.705.745,00	0,00	0,00	0,00
		REALISASI	6.902.164.860,00	0,00	0,00	0,00

KODE	URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN	ANGGARAN / REALISASI	KELOMPOK BELANJA			
			OPERASI	MODAL	TDK TERDUGA	TRANSFER
1.02.03.2.03	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	ANGGARAN	837.253.539,00	0,00	0,00	0,00
		REALISASI	822.531.811,00	0,00	0,00	0,00
1.02.03.2.03.01	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	ANGGARAN	837.253.539,00	0,00	0,00	0,00
		REALISASI	822.531.811,00	0,00	0,00	0,00
1.02.04	**PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN**	ANGGARAN	402.648.000,00	0,00	0,00	0,00
		REALISASI	321.342.300,00	0,00	0,00	0,00
1.02.04.2.01	Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	ANGGARAN	135.180.000,00	0,00	0,00	0,00
		REALISASI	122.736.000,00	0,00	0,00	0,00
1.02.04.2.01.01	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	ANGGARAN	135.180.000,00	0,00	0,00	0,00
		REALISASI	122.736.000,00	0,00	0,00	0,00
1.02.04.2.03	Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	ANGGARAN	109.796.000,00	0,00	0,00	0,00
		REALISASI	91.368.500,00	0,00	0,00	0,00
1.02.04.2.03.01	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	ANGGARAN	109.796.000,00	0,00	0,00	0,00
		REALISASI	91.368.500,00	0,00	0,00	0,00
1.02.04.2.06	Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Post Market pada Produksi dan Produk Makanan Minuman Industri Rumah Tangga	ANGGARAN	157.672.000,00	0,00	0,00	0,00
		REALISASI	107.237.800,00	0,00	0,00	0,00
1.02.04.2.06.01	Pemeriksaan Post Market pada Produk Makanan- Minuman Industri Rumah Tangga yang Beredar dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan	ANGGARAN	157.672.000,00	0,00	0,00	0,00
		REALISASI	107.237.800,00	0,00	0,00	0,00
1.02.05	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN**	ANGGARAN	1.270.966.419,00	0,00	0,00	0,00
		REALISASI	1.090.174.849,00	0,00	0,00	0,00
1.02.05.2.01	Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	ANGGARAN	595.724.520,00	0,00	0,00	0,00
		REALISASI	534.345.449,00	0,00	0,00	0,00
1.02.05.2.01.01	Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	ANGGARAN	595.724.520,00	0,00	0,00	0,00
		REALISASI	534.345.449,00	0,00	0,00	0,00
1.02.05.2.02	Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	ANGGARAN	465.696.099,00	0,00	0,00	0,00
		REALISASI	420.380.400,00	0,00	0,00	0,00
1.02.05.2.02.01	Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat	ANGGARAN	465.696.099,00	0,00	0,00	0,00
		REALISASI	420.380.400,00	0,00	0,00	0,00

KODE	URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN	ANGGARAN / REALISASI	KELOMPOK BELANJA			
			OPERASI	MODAL	TDK TERDUGA	TRANSFER
1.02.05.2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	ANGGARAN	209.545.800,00	0,00	0,00	0,00
		REALISASI	135.449.000,00	0,00	0,00	0,00
1.02.05.2.03.01	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	ANGGARAN	209.545.800,00	0,00	0,00	0,00
		REALISASI	135.449.000,00	0,00	0,00	0,00
1.03	**PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG**	ANGGARAN	32.804.169.264,00	169.830.496.225,00	0,00	0,00
		REALISASI	31.934.242.907,00	156.102.661.278,39	0,00	0,00
1.03.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	ANGGARAN	9.176.287.717,00	158.114.977,00	0,00	0,00
		REALISASI	8.814.581.615,00	151.490.000,00	0,00	0,00
1.03.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	ANGGARAN	186.483.128,00	0,00	0,00	0,00
		REALISASI	171.537.862,00	0,00	0,00	0,00
1.03.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	ANGGARAN	15.899.000,00	0,00	0,00	0,00
		REALISASI	15.231.000,00	0,00	0,00	0,00
1.03.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	ANGGARAN	4.034.600,00	0,00	0,00	0,00
		REALISASI	3.225.000,00	0,00	0,00	0,00
1.03.01.2.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	ANGGARAN	4.034.600,00	0,00	0,00	0,00
		REALISASI	3.898.000,00	0,00	0,00	0,00
1.03.01.2.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	ANGGARAN	5.709.600,00	0,00	0,00	0,00
		REALISASI	5.572.900,00	0,00	0,00	0,00
1.03.01.2.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	ANGGARAN	5.709.600,00	0,00	0,00	0,00
		REALISASI	4.900.000,00	0,00	0,00	0,00
1.03.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	ANGGARAN	151.095.728,00	0,00	0,00	0,00
		REALISASI	138.710.962,00	0,00	0,00	0,00
1.03.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	ANGGARAN	6.382.539.979,00	0,00	0,00	0,00
		REALISASI	6.183.454.923,00	0,00	0,00	0,00
1.03.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	ANGGARAN	6.335.881.439,00	0,00	0,00	0,00
		REALISASI	6.137.700.923,00	0,00	0,00	0,00
1.03.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	ANGGARAN	2.727.800,00	0,00	0,00	0,00
		REALISASI	2.727.600,00	0,00	0,00	0,00
1.03.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	ANGGARAN	43.930.740,00	0,00	0,00	0,00
		REALISASI	43.026.400,00	0,00	0,00	0,00
1.03.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	ANGGARAN	249.156.541,00	0,00	0,00	0,00
		REALISASI	236.479.810,00	0,00	0,00	0,00
1.03.01.2.03.02	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	ANGGARAN	249.156.541,00	0,00	0,00	0,00
		REALISASI	236.479.810,00	0,00	0,00	0,00
1.03.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	ANGGARAN	202.015.995,00	0,00	0,00	0,00
		REALISASI	176.887.650,00	0,00	0,00	0,00

KODE	URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN	ANGGARAN / REALISASI	KELOMPOK BELANJA			
			OPERASI	MODAL	TDK TERDUGA	TRANSFER
1.03.01.2.05.03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	ANGGARAN	59.992.095,00	0,00	0,00	0,00
		REALISASI	55.178.500,00	0,00	0,00	0,00
1.03.01.2.05.11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	ANGGARAN	142.023.900,00	0,00	0,00	0,00
		REALISASI	121.709.150,00	0,00	0,00	0,00
1.03.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	ANGGARAN	737.196.579,00	0,00	0,00	0,00
		REALISASI	703.595.767,00	0,00	0,00	0,00
1.03.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	ANGGARAN	17.212.000,00	0,00	0,00	0,00
		REALISASI	17.150.000,00	0,00	0,00	0,00
1.03.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	ANGGARAN	28.265.270,00	0,00	0,00	0,00
		REALISASI	23.723.800,00	0,00	0,00	0,00
1.03.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	ANGGARAN	217.570.765,00	0,00	0,00	0,00
		REALISASI	216.671.000,00	0,00	0,00	0,00
1.03.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	ANGGARAN	20.480.200,00	0,00	0,00	0,00
		REALISASI	17.805.000,00	0,00	0,00	0,00
1.03.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	ANGGARAN	11.426.400,00	0,00	0,00	0,00
		REALISASI	9.570.000,00	0,00	0,00	0,00
1.03.01.2.06.07	Penyediaan Bahan/Material	ANGGARAN	27.207.084,00	0,00	0,00	0,00
		REALISASI	19.090.875,00	0,00	0,00	0,00
1.03.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	ANGGARAN	415.034.860,00	0,00	0,00	0,00
		REALISASI	399.585.092,00	0,00	0,00	0,00
1.03.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	ANGGARAN	58.275.000,00	158.114.977,00	0,00	0,00
		REALISASI	58.125.000,00	151.490.000,00	0,00	0,00
1.03.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	ANGGARAN	58.275.000,00	158.114.977,00	0,00	0,00
		REALISASI	58.125.000,00	151.490.000,00	0,00	0,00
1.03.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	ANGGARAN	602.702.456,00	0,00	0,00	0,00
		REALISASI	562.000.553,00	0,00	0,00	0,00
1.03.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	ANGGARAN	10.650.000,00	0,00	0,00	0,00
		REALISASI	10.075.000,00	0,00	0,00	0,00
1.03.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	ANGGARAN	592.052.456,00	0,00	0,00	0,00
		REALISASI	551.925.553,00	0,00	0,00	0,00
1.03.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	ANGGARAN	757.918.039,00	0,00	0,00	0,00
		REALISASI	722.500.050,00	0,00	0,00	0,00
1.03.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	ANGGARAN	411.618.039,00	0,00	0,00	0,00
		REALISASI	376.837.050,00	0,00	0,00	0,00
1.03.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	ANGGARAN	146.300.000,00	0,00	0,00	0,00
		REALISASI	146.300.000,00	0,00	0,00	0,00
1.03.01.2.09.11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	ANGGARAN	200.000.000,00	0,00	0,00	0,00
		REALISASI	199.363.000,00	0,00	0,00	0,00

KODE	URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN	ANGGARAN / REALISASI / KELOMPOK BELANJA			
		OPERASI	MODAL	TDK TERDUGA	TRANSFER
1.03.02	**PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)**	1.592.926.507,00	4.060.408.982,00	0,00	0,00
		1.551.460.787,00	4.026.647.900,00	0,00	0,00
1.03.02.2.01	Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	700.000.000,00	553.000.000,00	0,00	0,00
		690.984.100,00	546.389.000,00	0,00	0,00
1.03.02.2.01.02	Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Air Tanah dan Air Baku	250.000.000,00	553.000.000,00	0,00	0,00
		246.550.000,00	546.389.000,00	0,00	0,00
1.03.02.2.01.04	Penyusunan Pola dan Rencana Pengelolaan SDA WS Kewenangan Kabupaten/Kota	450.000.000,00	0,00	0,00	0,00
		444.434.100,00	0,00	0,00	0,00
1.03.02.2.02	Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya di Bawah 1000 Ha dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	892.926.507,00	3.507.408.982,00	0,00	0,00
		860.476.687,00	3.480.258.900,00	0,00	0,00
1.03.02.2.02.08	Peningkatan Jaringan Irigasi Permukaan	0,00	300.000.000,00	0,00	0,00
		0,00	298.450.900,00	0,00	0,00
1.03.02.2.02.14	Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan	0,00	150.000.000,00	0,00	0,00
		0,00	148.000.000,00	0,00	0,00
1.03.02.2.02.15	Rehabilitasi Bendung Irigasi	103.960.850,00	1.975.256.150,00	0,00	0,00
		102.339.150,00	1.955.000.000,00	0,00	0,00
1.03.02.2.02.21	Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan	503.560.257,00	1.082.152.832,00	0,00	0,00
		482.465.924,00	1.078.808.000,00	0,00	0,00
1.03.02.2.02.29	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pemeliharaan Kawasan Rawa	285.405.400,00	0,00	0,00	0,00
		275.671.613,00	0,00	0,00	0,00
1.03.03	**PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM**	5.658.000.000,00	3.023.600.000,00	0,00	0,00
		5.567.571.169,00	2.830.555.000,00	0,00	0,00
1.03.03.2.01	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota	5.658.000.000,00	3.023.600.000,00	0,00	0,00
		5.567.571.169,00	2.830.555.000,00	0,00	0,00
1.03.03.2.01.04	Pembangunan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan	216.000.000,00	2.474.600.000,00	0,00	0,00
		214.395.600,00	2.330.635.000,00	0,00	0,00
1.03.03.2.01.05	Peningkatan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perkotaan	5.442.000.000,00	549.000.000,00	0,00	0,00
		5.353.175.569,00	499.920.000,00	0,00	0,00
1.03.05	**PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH**	2.084.638.400,00	200.000.000,00	0,00	0,00
		2.044.032.500,00	198.500.000,00	0,00	0,00
1.03.05.2.01	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	2.084.638.400,00	200.000.000,00	0,00	0,00
		2.044.032.500,00	198.500.000,00	0,00	0,00
1.03.05.2.01.05	Rehabilitasi/Peningkatan/Perluasan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat Skala Permukiman	2.084.638.400,00	200.000.000,00	0,00	0,00
		2.044.032.500,00	198.500.000,00	0,00	0,00

KODE	URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN	ANGGARAN / REALISASI	KELOMPOK BELANJA			
			OPERASI	MODAL	TDK TERDUGA	TRANSFER
1.03.08	**PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG**		9.406.389.831,00	4.252.850.000,00	0,00	0,00
			9.314.483.818,00	4.226.979.000,00	0,00	0,00
1.03.08.2.01	Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung		9.406.389.831,00	4.252.850.000,00	0,00	0,00
			9.314.483.818,00	4.226.979.000,00	0,00	0,00
1.03.08.2.01.02	Perencanaan, Pembangunan, Pengawasan, dan Pemanfaatan Bangunan Gedung Daerah Kabupaten/Kota		9.406.389.831,00	4.252.850.000,00	0,00	0,00
			9.314.483.818,00	4.226.979.000,00	0,00	0,00
1.03.09	**PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA**		1.752.267.000,00	473.550.000,00	0,00	0,00
			1.736.420.978,00	473.550.000,00	0,00	0,00
1.03.09.2.01	Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungannya di Daerah Kabupaten/Kota		1.752.267.000,00	473.550.000,00	0,00	0,00
			1.736.420.978,00	473.550.000,00	0,00	0,00
1.03.09.2.01.01	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kabupaten/Kota		1.752.267.000,00	473.550.000,00	0,00	0,00
			1.736.420.978,00	473.550.000,00	0,00	0,00
1.03.10	**PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN**		1.903.539.307,00	157.482.242.026,00	0,00	0,00
			1.741.021.939,00	144.020.397.888,39	0,00	0,00
1.03.10.2.01	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota		1.903.539.307,00	157.482.242.026,00	0,00	0,00
			1.741.021.939,00	144.020.397.888,39	0,00	0,00
1.03.10.2.01.05	Pembangunan Jalan		172.784.205,00	12.552.135.660,00	0,00	0,00
			171.453.950,00	12.181.480.180,00	0,00	0,00
1.03.10.2.01.08	Rekonstruksi Jalan		1.123.094.257,00	118.211.849.930,00	0,00	0,00
			989.895.429,00	105.762.487.200,07	0,00	0,00
1.03.10.2.01.10	Pemeliharaan Berkala Jalan		498.595.013,00	0,00	0,00	0,00
			498.335.960,00	0,00	0,00	0,00
1.03.10.2.01.11	Pemeliharaan Rutin Jalan		27.409.926,00	2.025.635.000,00	0,00	0,00
			25.316.250,00	2.002.002.000,00	0,00	0,00
1.03.10.2.01.12	Pembangunan Jembatan		0,00	9.874.556.000,00	0,00	0,00
			0,00	9.874.556.000,00	0,00	0,00
1.03.10.2.01.18	Rehabilitasi Jembatan		33.107.965,00	13.213.065.436,00	0,00	0,00
			30.397.600,00	12.820.237.658,32	0,00	0,00
1.03.10.2.01.19	Pemeliharaan Rutin Jembatan		32.534.508,00	1.115.000.000,00	0,00	0,00
			23.841.100,00	898.679.350,00	0,00	0,00
1.03.10.2.01.21	Penanggulangan Bencana/Tanggap Darurat		16.013.433,00	490.000.000,00	0,00	0,00
			1.781.650,00	480.955.500,00	0,00	0,00
1.03.11	**PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI**		602.233.162,00	27.955.350,00	0,00	0,00
			571.640.958,00	27.500.000,00	0,00	0,00
1.03.11.2.01	Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi		165.958.363,00	0,00	0,00	0,00
			149.405.600,00	0,00	0,00	0,00

KODE	URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN	ANGGARAN / REALISASI	KELOMPOK BELANJA			
			OPERASI	MODAL	TDK TERDUGA	TRANSFER
1.03.11.2.01.04	Pelaksanaan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi	ANGGARAN	165.958.363,00	0,00	0,00	0,00
		REALISASI	149.405.600,00	0,00	0,00	0,00
1.03.11.2.02	Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	ANGGARAN	396.244.176,00	27.955.350,00	0,00	0,00
		REALISASI	382.456.258,00	27.500.000,00	0,00	0,00
1.03.11.2.02.01	Pengelolaan Operasional Layanan Informasi Jasa Konstruksi	ANGGARAN	20.718.344,00	6.660.000,00	0,00	0,00
		REALISASI	20.582.900,00	6.500.000,00	0,00	0,00
1.03.11.2.02.02	Penyediaan Perangkat Pendukung Layanan Informasi Jasa Konstruksi	ANGGARAN	202.285.981,00	21.295.350,00	0,00	0,00
		REALISASI	192.521.030,00	21.000.000,00	0,00	0,00
1.03.11.2.02.03	Penyelenggaraan Pelatihan untuk Peningkatan Kapasitas Administrator SIPJAKI	ANGGARAN	13.609.900,00	0,00	0,00	0,00
		REALISASI	13.462.000,00	0,00	0,00	0,00
1.03.11.2.02.07	Penyusunan Data dan Informasi Ketersediaan/Penggunaan Material dan Peralatan	ANGGARAN	159.629.951,00	0,00	0,00	0,00
		REALISASI	155.890.328,00	0,00	0,00	0,00
1.03.11.2.04	Pengawasan Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi	ANGGARAN	40.030.623,00	0,00	0,00	0,00
		REALISASI	39.779.100,00	0,00	0,00	0,00
1.03.11.2.04.03	Pengawasan dan Evaluasi Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan, dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi	ANGGARAN	40.030.623,00	0,00	0,00	0,00
		REALISASI	39.779.100,00	0,00	0,00	0,00
1.03.12	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG**	ANGGARAN	627.887.340,00	151.774.890,00	0,00	0,00
		REALISASI	593.029.143,00	147.041.490,00	0,00	0,00
1.03.12.2.01	Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota	ANGGARAN	150.354.000,00	0,00	0,00	0,00
		REALISASI	147.663.973,00	0,00	0,00	0,00
1.03.12.2.01.01	Pelaksanaan Persetujuan Substansi, Evaluasi, Konsultasi Evaluasi dan Penetapan RTRW Kabupaten/Kota	ANGGARAN	150.354.000,00	0,00	0,00	0,00
		REALISASI	147.663.973,00	0,00	0,00	0,00
1.03.12.2.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang Daerah Kabupaten/Kota	ANGGARAN	58.139.600,00	0,00	0,00	0,00
		REALISASI	55.893.013,00	0,00	0,00	0,00
1.03.12.2.02.01	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyusunan RTRW Kabupaten/Kota	ANGGARAN	58.139.600,00	0,00	0,00	0,00
		REALISASI	55.893.013,00	0,00	0,00	0,00
1.03.12.2.03	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	ANGGARAN	21.603.300,00	115.699.890,00	0,00	0,00
		REALISASI	21.114.200,00	111.541.490,00	0,00	0,00
1.03.12.2.03.01	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang untuk Investasi dan Pembangunan Daerah	ANGGARAN	21.603.300,00	115.699.890,00	0,00	0,00
		REALISASI	21.114.200,00	111.541.490,00	0,00	0,00
1.03.12.2.04	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	ANGGARAN	397.790.440,00	36.075.000,00	0,00	0,00
		REALISASI	368.357.957,00	35.500.000,00	0,00	0,00
1.03.12.2.04.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Penertiban dan Penegakan Hukum Bidang Penataan Ruang	ANGGARAN	236.346.044,00	36.075.000,00	0,00	0,00
		REALISASI	229.093.584,00	35.500.000,00	0,00	0,00
1.03.12.2.04.04	Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang	ANGGARAN	161.444.396,00	0,00	0,00	0,00
		REALISASI	139.264.373,00	0,00	0,00	0,00

KODE	URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN	ANGGARAN / REALISASI	KELOMPOK BELANJA			
			OPERASI	MODAL	TDK TERDUGA	TRANSFER
1.04	**PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN**	ANGGARAN	4.980.518.108,00	14.861.384.101,00	0,00	0,00
		REALISASI	4.744.647.839,00	14.821.718.800,00	0,00	0,00
1.04.02	**PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN**	ANGGARAN	328.201.428,00	0,00	0,00	0,00
		REALISASI	297.839.938,00	0,00	0,00	0,00
1.04.02.2.01	Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	ANGGARAN	109.852.128,00	0,00	0,00	0,00
		REALISASI	102.923.928,00	0,00	0,00	0,00
1.04.02.2.01.05	Pendataan dan Verifikasi Penerima Rumah bagi Korban Bencana Alam atau Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota	ANGGARAN	109.852.128,00	0,00	0,00	0,00
		REALISASI	102.923.928,00	0,00	0,00	0,00
1.04.02.2.06	Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan	ANGGARAN	218.349.300,00	0,00	0,00	0,00
		REALISASI	194.916.010,00	0,00	0,00	0,00
1.04.02.2.06.03	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pembangunan dan Pengembangan Perumahan	ANGGARAN	218.349.300,00	0,00	0,00	0,00
		REALISASI	194.916.010,00	0,00	0,00	0,00
1.04.03	**PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN**	ANGGARAN	975.413.200,00	0,00	0,00	0,00
		REALISASI	964.447.600,00	0,00	0,00	0,00
1.04.03.2.02	Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	ANGGARAN	50.000.000,00	0,00	0,00	0,00
		REALISASI	48.512.600,00	0,00	0,00	0,00
1.04.03.2.02.02	Penyusunan Rencana Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh	ANGGARAN	50.000.000,00	0,00	0,00	0,00
		REALISASI	48.512.600,00	0,00	0,00	0,00
1.04.03.2.03	Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	ANGGARAN	925.413.200,00	0,00	0,00	0,00
		REALISASI	915.935.000,00	0,00	0,00	0,00
1.04.03.2.03.02	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni	ANGGARAN	925.413.200,00	0,00	0,00	0,00
		REALISASI	915.935.000,00	0,00	0,00	0,00
1.04.05	**PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)**	ANGGARAN	3.676.903.480,00	14.861.384.101,00	0,00	0,00
		REALISASI	3.482.360.301,00	14.821.718.800,00	0,00	0,00
1.04.05.2.01	Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan	ANGGARAN	3.676.903.480,00	14.861.384.101,00	0,00	0,00
		REALISASI	3.482.360.301,00	14.821.718.800,00	0,00	0,00
1.04.05.2.01.01	Perencanaan Penyediaan PSU Perumahan	ANGGARAN	163.547.100,00	208.000.000,00	0,00	0,00
		REALISASI	160.907.900,00	207.108.000,00	0,00	0,00
1.04.05.2.01.02	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian	ANGGARAN	1.783.707.650,00	13.287.647.901,00	0,00	0,00
		REALISASI	1.752.580.971,00	13.249.065.800,00	0,00	0,00
1.04.05.2.01.03	Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan	ANGGARAN	1.729.648.730,00	1.365.736.200,00	0,00	0,00
		REALISASI	1.568.871.430,00	1.365.545.000,00	0,00	0,00

KODE	URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN	ANGGARAN / REALISASI	KELOMPOK BELANJA			
			OPERASI	MODAL	TDK TERDUGA	TRANSFER
1.05	**KETENTERAMAN, KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT**	ANGGARAN	20.070.871.428,00	1.780.612.502,00	0,00	0,00
		REALISASI	18.888.683.475,00	1.753.874.900,00	0,00	0,00
1.05.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	ANGGARAN	12.038.498.527,00	1.621.596.899,00	0,00	0,00
		REALISASI	11.121.200.397,00	1.600.600.900,00	0,00	0,00
1.05.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	ANGGARAN	75.755.524,00	32.822.700,00	0,00	0,00
		REALISASI	75.537.700,00	32.800.000,00	0,00	0,00
1.05.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	ANGGARAN	6.000.000,00	0,00	0,00	0,00
		REALISASI	6.000.000,00	0,00	0,00	0,00
1.05.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	ANGGARAN	13.018.324,00	0,00	0,00	0,00
		REALISASI	12.942.400,00	0,00	0,00	0,00
1.05.01.2.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	ANGGARAN	4.697.520,00	0,00	0,00	0,00
		REALISASI	4.656.000,00	0,00	0,00	0,00
1.05.01.2.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	ANGGARAN	4.697.520,00	0,00	0,00	0,00
		REALISASI	4.692.000,00	0,00	0,00	0,00
1.05.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	ANGGARAN	47.342.160,00	32.822.700,00	0,00	0,00
		REALISASI	47.247.300,00	32.800.000,00	0,00	0,00
1.05.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	ANGGARAN	7.825.908.124,00	0,00	0,00	0,00
		REALISASI	7.104.174.316,00	0,00	0,00	0,00
1.05.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	ANGGARAN	7.825.908.124,00	0,00	0,00	0,00
		REALISASI	7.104.174.316,00	0,00	0,00	0,00
1.05.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	ANGGARAN	93.035.428,00	0,00	0,00	0,00
		REALISASI	81.143.862,00	0,00	0,00	0,00
1.05.01.2.03.04	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	ANGGARAN	88.839.428,00	0,00	0,00	0,00
		REALISASI	76.978.862,00	0,00	0,00	0,00
1.05.01.2.03.06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	ANGGARAN	4.196.000,00	0,00	0,00	0,00
		REALISASI	4.165.000,00	0,00	0,00	0,00
1.05.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	ANGGARAN	249.764.832,00	0,00	0,00	0,00
		REALISASI	234.993.424,00	0,00	0,00	0,00
1.05.01.2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	ANGGARAN	65.713.776,00	0,00	0,00	0,00
		REALISASI	62.784.800,00	0,00	0,00	0,00
1.05.01.2.05.03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	ANGGARAN	132.577.056,00	0,00	0,00	0,00
		REALISASI	124.331.568,00	0,00	0,00	0,00
1.05.01.2.05.11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	ANGGARAN	51.474.000,00	0,00	0,00	0,00
		REALISASI	47.877.056,00	0,00	0,00	0,00
1.05.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	ANGGARAN	2.385.361.353,00	40.036.590,00	0,00	0,00
		REALISASI	2.271.221.277,00	37.450.000,00	0,00	0,00
1.05.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	ANGGARAN	14.266.200,00	0,00	0,00	0,00
		REALISASI	14.252.500,00	0,00	0,00	0,00

KODE	URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN	ANGGARAN / REALISASI	KELOMPOK BELANJA			
			OPERASI	MODAL	TDK TERDUGA	TRANSFER
1.05.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	ANGGARAN	0,00	40.036.590,00	0,00	0,00
		REALISASI	0,00	37.450.000,00	0,00	0,00
1.05.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	ANGGARAN	18.776.186,00	0,00	0,00	0,00
		REALISASI	18.710.650,00	0,00	0,00	0,00
1.05.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	ANGGARAN	236.920.082,00	0,00	0,00	0,00
		REALISASI	236.551.400,00	0,00	0,00	0,00
1.05.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	ANGGARAN	74.403.261,00	0,00	0,00	0,00
		REALISASI	74.377.700,00	0,00	0,00	0,00
1.05.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	ANGGARAN	32.151.240,00	0,00	0,00	0,00
		REALISASI	27.960.000,00	0,00	0,00	0,00
1.05.01.2.06.07	Penyediaan Bahan/Material	ANGGARAN	257.498.496,00	0,00	0,00	0,00
		REALISASI	239.387.306,00	0,00	0,00	0,00
1.05.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	ANGGARAN	7.791.000,00	0,00	0,00	0,00
		REALISASI	7.716.000,00	0,00	0,00	0,00
1.05.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	ANGGARAN	1.299.899.300,00	0,00	0,00	0,00
		REALISASI	1.299.672.373,00	0,00	0,00	0,00
1.05.01.2.06.10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	ANGGARAN	443.655.588,00	0,00	0,00	0,00
		REALISASI	352.593.348,00	0,00	0,00	0,00
1.05.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	ANGGARAN	0,00	1.548.737.609,00	0,00	0,00
		REALISASI	0,00	1.530.350.900,00	0,00	0,00
1.05.01.2.07.01	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	ANGGARAN	0,00	389.400.000,00	0,00	0,00
		REALISASI	0,00	380.900.000,00	0,00	0,00
1.05.01.2.07.02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	ANGGARAN	0,00	523.809.000,00	0,00	0,00
		REALISASI	0,00	515.722.000,00	0,00	0,00
1.05.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	ANGGARAN	0,00	635.528.609,00	0,00	0,00
		REALISASI	0,00	633.728.900,00	0,00	0,00
1.05.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	ANGGARAN	897.520.053,00	0,00	0,00	0,00
		REALISASI	853.319.572,00	0,00	0,00	0,00
1.05.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	ANGGARAN	21.420.000,00	0,00	0,00	0,00
		REALISASI	21.400.000,00	0,00	0,00	0,00
1.05.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	ANGGARAN	148.248.500,00	0,00	0,00	0,00
		REALISASI	122.752.554,00	0,00	0,00	0,00
1.05.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	ANGGARAN	727.851.553,00	0,00	0,00	0,00
		REALISASI	709.167.018,00	0,00	0,00	0,00
1.05.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	ANGGARAN	511.153.213,00	0,00	0,00	0,00
		REALISASI	500.810.246,00	0,00	0,00	0,00
1.05.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	ANGGARAN	326.525.541,00	0,00	0,00	0,00
		REALISASI	322.650.200,00	0,00	0,00	0,00

KODE	URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN	ANGGARAN / REALISASI	KELOMPOK BELANJA			
			OPERASI	MODAL	TDK TERDUGA	TRANSFER
1.05.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	ANGGARAN	74.665.071,00	0,00	0,00	0,00
		REALISASI	70.702.850,00	0,00	0,00	0,00
1.05.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	ANGGARAN	68.789.581,00	0,00	0,00	0,00
		REALISASI	68.419.000,00	0,00	0,00	0,00
1.05.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	ANGGARAN	41.173.020,00	0,00	0,00	0,00
		REALISASI	39.038.196,00	0,00	0,00	0,00
1.05.02	**PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**	ANGGARAN	3.089.361.756,00	59.551.500,00	0,00	0,00
		REALISASI	2.962.558.509,00	55.448.300,00	0,00	0,00
1.05.02.2.01	Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	ANGGARAN	2.617.537.108,00	59.551.500,00	0,00	0,00
		REALISASI	2.521.365.744,00	55.448.300,00	0,00	0,00
1.05.02.2.01.01	Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawalan	ANGGARAN	2.503.775.808,00	59.551.500,00	0,00	0,00
		REALISASI	2.414.890.544,00	55.448.300,00	0,00	0,00
1.05.02.2.01.04	Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketentraman dan Ketertiban Umum	ANGGARAN	113.761.300,00	0,00	0,00	0,00
		REALISASI	106.475.200,00	0,00	0,00	0,00
1.05.02.2.02	Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota	ANGGARAN	471.824.648,00	0,00	0,00	0,00
		REALISASI	441.192.765,00	0,00	0,00	0,00
1.05.02.2.02.01	Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	ANGGARAN	268.158.048,00	0,00	0,00	0,00
		REALISASI	242.595.848,00	0,00	0,00	0,00
1.05.02.2.02.02	Pengawasan Atas Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	ANGGARAN	62.313.600,00	0,00	0,00	0,00
		REALISASI	62.257.000,00	0,00	0,00	0,00
1.05.02.2.02.03	Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	ANGGARAN	141.353.000,00	0,00	0,00	0,00
		REALISASI	136.339.917,00	0,00	0,00	0,00
1.05.03	**PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA**	ANGGARAN	2.170.611.939,00	63.221.715,00	0,00	0,00
		REALISASI	2.099.411.590,00	61.584.900,00	0,00	0,00
1.05.03.2.01	Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota	ANGGARAN	618.028.700,00	0,00	0,00	0,00
		REALISASI	613.522.100,00	0,00	0,00	0,00
1.05.03.2.01.01	Penyusunan Kajian Risiko Bencana Kabupaten/Kota	ANGGARAN	618.028.700,00	0,00	0,00	0,00
		REALISASI	613.522.100,00	0,00	0,00	0,00
1.05.03.2.02	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	ANGGARAN	636.219.025,00	28.256.715,00	0,00	0,00
		REALISASI	592.907.793,00	28.224.900,00	0,00	0,00
1.05.03.2.02.02	Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota	ANGGARAN	16.192.800,00	0,00	0,00	0,00
		REALISASI	16.185.000,00	0,00	0,00	0,00
1.05.03.2.02.03	Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/Kota	ANGGARAN	499.995.980,00	28.256.715,00	0,00	0,00
		REALISASI	456.757.752,00	28.224.900,00	0,00	0,00

KODE	URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN	ANGGARAN / REALISASI	KELOMPOK BELANJA			
			OPERASI	MODAL	TDK TERDUGA	TRANSFER
1.05.03.2.02.04	Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	ANGGARAN	104.720.204,00	0,00	0,00	0,00
		REALISASI	104.655.000,00	0,00	0,00	0,00
1.05.03.2.02.08	Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana Kabupaten/Kota	ANGGARAN	15.310.041,00	0,00	0,00	0,00
		REALISASI	15.310.041,00	0,00	0,00	0,00
1.05.03.2.03	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	ANGGARAN	398.898.840,00	34.965.000,00	0,00	0,00
		REALISASI	385.703.189,00	33.360.000,00	0,00	0,00
1.05.03.2.03.02	Respon Cepat Darurat Bencana Kabupaten/Kota	ANGGARAN	32.990.775,00	0,00	0,00	0,00
		REALISASI	32.990.775,00	0,00	0,00	0,00
1.05.03.2.03.03	Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	ANGGARAN	365.908.065,00	34.965.000,00	0,00	0,00
		REALISASI	352.712.414,00	33.360.000,00	0,00	0,00
1.05.03.2.03.04	Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	ANGGARAN	0,00	0,00	0,00	0,00
		REALISASI	0,00	0,00	0,00	0,00
1.05.03.2.04	Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana	ANGGARAN	517.465.374,00	0,00	0,00	0,00
		REALISASI	507.278.508,00	0,00	0,00	0,00
1.05.03.2.04.06	Penanganan Pasca Bencana Kabupaten/Kota	ANGGARAN	517.465.374,00	0,00	0,00	0,00
		REALISASI	507.278.508,00	0,00	0,00	0,00
1.05.04	**PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN**	ANGGARAN	2.772.399.206,00	36.242.388,00	0,00	0,00
		REALISASI	2.705.512.979,00	36.240.800,00	0,00	0,00
1.05.04.2.01	Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	ANGGARAN	2.252.041.003,00	36.242.388,00	0,00	0,00
		REALISASI	2.192.730.848,00	36.240.800,00	0,00	0,00
1.05.04.2.01.02	Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	ANGGARAN	39.150.860,00	0,00	0,00	0,00
		REALISASI	38.530.000,00	0,00	0,00	0,00
1.05.04.2.01.06	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri	ANGGARAN	256.756.875,00	0,00	0,00	0,00
		REALISASI	249.350.000,00	0,00	0,00	0,00
1.05.04.2.01.07	Pembinaan Aparatur Pemadam Kebakaran	ANGGARAN	12.869.895,00	0,00	0,00	0,00
		REALISASI	6.679.400,00	0,00	0,00	0,00
1.05.04.2.01.08	Pengelolaan Sistem Komunikasi dan Informasi Kebakaran dan Penyelamatan (SKIK)	ANGGARAN	543.144.200,00	0,00	0,00	0,00
		REALISASI	538.201.000,00	0,00	0,00	0,00
1.05.04.2.01.09	Penyelenggaraan Kerja Sama dan Koordinasi antar Daerah Berbatasan, antar Lembaga, dan Kemitraan dalam Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran	ANGGARAN	1.400.119.173,00	36.242.388,00	0,00	0,00
		REALISASI	1.359.970.448,00	36.240.800,00	0,00	0,00
1.05.04.2.04	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran	ANGGARAN	520.358.203,00	0,00	0,00	0,00
		REALISASI	512.782.131,00	0,00	0,00	0,00

KODE	URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN	ANGGARAN / REALISASI / KELOMPOK BELANJA			
		OPERASI	MODAL	TDK TERDUGA	TRANSFER
1.05.04.2.04.01	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Melalui Sosialisasi dan Edukasi Masyarakat	187.374.959,00	0,00	0,00	0,00
		181.476.381,00	0,00	0,00	0,00
1.05.04.2.04.02	Pembentukan dan Pembinaan Relawan Pemadam Kebakaran	332.983.244,00	0,00	0,00	0,00
		331.305.750,00	0,00	0,00	0,00
1.06	**SOSIAL**	7.371.869.482,00	262.831.047,00	0,00	0,00
		7.093.240.999,00	253.385.700,00	0,00	0,00
1.06.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	3.829.844.782,00	262.831.047,00	0,00	0,00
		3.659.722.676,00	253.385.700,00	0,00	0,00
1.06.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	37.821.980,00	0,00	0,00	0,00
		37.472.280,00	0,00	0,00	0,00
1.06.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	15.476.900,00	0,00	0,00	0,00
		15.395.250,00	0,00	0,00	0,00
1.06.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	22.345.080,00	0,00	0,00	0,00
		22.077.030,00	0,00	0,00	0,00
1.06.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	2.743.112.720,00	0,00	0,00	0,00
		2.620.409.975,00	0,00	0,00	0,00
1.06.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	2.700.201.256,00	0,00	0,00	0,00
		2.578.503.461,00	0,00	0,00	0,00
1.06.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	42.911.464,00	0,00	0,00	0,00
		41.906.514,00	0,00	0,00	0,00
1.06.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	1.916.000,00	0,00	0,00	0,00
		1.914.000,00	0,00	0,00	0,00
1.06.01.2.03.06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	1.916.000,00	0,00	0,00	0,00
		1.914.000,00	0,00	0,00	0,00
1.06.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	81.723.000,00	0,00	0,00	0,00
		57.723.000,00	0,00	0,00	0,00
1.06.01.2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	54.723.000,00	0,00	0,00	0,00
		54.723.000,00	0,00	0,00	0,00
1.06.01.2.05.11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	27.000.000,00	0,00	0,00	0,00
		3.000.000,00	0,00	0,00	0,00
1.06.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	471.330.103,00	262.831.047,00	0,00	0,00
		468.478.098,00	253.385.700,00	0,00	0,00
1.06.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	4.842.500,00	0,00	0,00	0,00
		4.809.000,00	0,00	0,00	0,00
1.06.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	0,00	262.831.047,00	0,00	0,00
		0,00	253.385.700,00	0,00	0,00
1.06.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	56.748.893,00	0,00	0,00	0,00
		56.735.000,00	0,00	0,00	0,00

KODE	URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN	ANGGARAN / REALISASI	KELOMPOK BELANJA			
			OPERASI	MODAL	TDK TERDUGA	TRANSFER
1.06.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan		18.821.110,00	0,00	0,00	0,00
			17.679.000,00	0,00	0,00	0,00
1.06.01.2.06.07	Penyediaan Bahan/Material		4.689.600,00	0,00	0,00	0,00
			3.323.850,00	0,00	0,00	0,00
1.06.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		386.228.000,00	0,00	0,00	0,00
			385.931.248,00	0,00	0,00	0,00
1.06.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		211.817.855,00	0,00	0,00	0,00
			199.458.589,00	0,00	0,00	0,00
1.06.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat		33.570.264,00	0,00	0,00	0,00
			32.784.264,00	0,00	0,00	0,00
1.06.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		65.985.000,00	0,00	0,00	0,00
			59.536.533,00	0,00	0,00	0,00
1.06.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		112.262.591,00	0,00	0,00	0,00
			107.137.792,00	0,00	0,00	0,00
1.06.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		247.381.260,00	0,00	0,00	0,00
			243.254.992,00	0,00	0,00	0,00
1.06.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan		154.310.979,00	0,00	0,00	0,00
			150.740.392,00	0,00	0,00	0,00
1.06.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya		23.473.281,00	0,00	0,00	0,00
			22.950.000,00	0,00	0,00	0,00
1.06.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		69.597.000,00	0,00	0,00	0,00
			69.564.600,00	0,00	0,00	0,00
1.06.01.2.13	Penataan Organisasi		34.741.864,00	0,00	0,00	0,00
			31.011.742,00	0,00	0,00	0,00
1.06.01.2.13.01	Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan		34.741.864,00	0,00	0,00	0,00
			31.011.742,00	0,00	0,00	0,00
1.06.02	**PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL**		1.288.447.916,00	0,00	0,00	0,00
			1.266.250.420,00	0,00	0,00	0,00
1.06.02.2.03	Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota		1.288.447.916,00	0,00	0,00	0,00
			1.266.250.420,00	0,00	0,00	0,00
1.06.02.2.03.01	Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota		419.891.200,00	0,00	0,00	0,00
			419.245.000,00	0,00	0,00	0,00
1.06.02.2.03.02	Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota		267.425.708,00	0,00	0,00	0,00
			262.356.592,00	0,00	0,00	0,00
1.06.02.2.03.03	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota		394.119.108,00	0,00	0,00	0,00
			378.850.928,00	0,00	0,00	0,00

KODE	URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN	ANGGARAN / REALISASI	KELOMPOK BELANJA			
			OPERASI	MODAL	TDK TERDUGA	TRANSFER
1.06.02.2.03.04	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	ANGGARAN	207.011.900,00	0,00	0,00	0,00
		REALISASI	205.797.900,00	0,00	0,00	0,00
1.06.04	**PROGRAM REHABILITASI SOSIAL**	ANGGARAN	1.547.216.628,00	0,00	0,00	0,00
		REALISASI	1.486.970.003,00	0,00	0,00	0,00
1.06.04.2.01	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	ANGGARAN	431.427.964,00	0,00	0,00	0,00
		REALISASI	385.816.764,00	0,00	0,00	0,00
1.06.04.2.01.01	Penyediaan Permakanan	ANGGARAN	45.845.200,00	0,00	0,00	0,00
		REALISASI	44.432.600,00	0,00	0,00	0,00
1.06.04.2.01.02	Penyediaan Sandang	ANGGARAN	13.302.700,00	0,00	0,00	0,00
		REALISASI	11.155.000,00	0,00	0,00	0,00
1.06.04.2.01.03	Penyediaan Alat Bantu	ANGGARAN	212.139.000,00	0,00	0,00	0,00
		REALISASI	190.546.400,00	0,00	0,00	0,00
1.06.04.2.01.04	Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	ANGGARAN	52.603.300,00	0,00	0,00	0,00
		REALISASI	48.665.500,00	0,00	0,00	0,00
1.06.04.2.01.05	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	ANGGARAN	9.567.200,00	0,00	0,00	0,00
		REALISASI	7.186.800,00	0,00	0,00	0,00
1.06.04.2.01.06	Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat	ANGGARAN	732.600,00	0,00	0,00	0,00
		REALISASI	732.400,00	0,00	0,00	0,00
1.06.04.2.01.07	Fasilitasi Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan Kartu Identitas Anak	ANGGARAN	908.400,00	0,00	0,00	0,00
		REALISASI	908.400,00	0,00	0,00	0,00
1.06.04.2.01.08	Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	ANGGARAN	1.481.300,00	0,00	0,00	0,00
		REALISASI	0,00	0,00	0,00	0,00
1.06.04.2.01.11	Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga	ANGGARAN	11.800.800,00	0,00	0,00	0,00
		REALISASI	6.026.000,00	0,00	0,00	0,00
1.06.04.2.01.12	Pemberian Layanan Rujukan	ANGGARAN	83.047.464,00	0,00	0,00	0,00
		REALISASI	76.163.664,00	0,00	0,00	0,00
1.06.04.2.02	Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial	ANGGARAN	1.115.788.664,00	0,00	0,00	0,00
		REALISASI	1.101.153.239,00	0,00	0,00	0,00
1.06.04.2.02.03	Penyediaan Permakanan	ANGGARAN	970.267.100,00	0,00	0,00	0,00
		REALISASI	965.258.075,00	0,00	0,00	0,00
1.06.04.2.02.04	Penyediaan Sandang	ANGGARAN	61.792.200,00	0,00	0,00	0,00
		REALISASI	60.855.000,00	0,00	0,00	0,00
1.06.04.2.02.06	Penyediaan Perbekalan Kesehatan di Luar Panti	ANGGARAN	4.186.400,00	0,00	0,00	0,00
		REALISASI	4.040.000,00	0,00	0,00	0,00

KODE	URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN	ANGGARAN / REALISASI	KELOMPOK BELANJA			
			OPERASI	MODAL	TDK TERDUGA	TRANSFER
1.06.04.2.02.14	Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Kabupaten/Kota	ANGGARAN	79.542.964,00	0,00	0,00	0,00
		REALISASI	71.000.164,00	0,00	0,00	0,00
1.06.05	**PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL**	ANGGARAN	483.297.556,00	0,00	0,00	0,00
		REALISASI	480.899.200,00	0,00	0,00	0,00
1.06.05.2.02	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	ANGGARAN	483.297.556,00	0,00	0,00	0,00
		REALISASI	480.899.200,00	0,00	0,00	0,00
1.06.05.2.02.01	Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	ANGGARAN	438.519.556,00	0,00	0,00	0,00
		REALISASI	436.754.200,00	0,00	0,00	0,00
1.06.05.2.02.02	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	ANGGARAN	44.778.000,00	0,00	0,00	0,00
		REALISASI	44.145.000,00	0,00	0,00	0,00
1.06.06	**PROGRAM PENANGANAN BENCANA**	ANGGARAN	223.062.600,00	0,00	0,00	0,00
		REALISASI	199.398.700,00	0,00	0,00	0,00
1.06.06.2.01	Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota	ANGGARAN	52.392.000,00	0,00	0,00	0,00
		REALISASI	43.930.500,00	0,00	0,00	0,00
1.06.06.2.01.01	Penyediaan Makanan	ANGGARAN	52.392.000,00	0,00	0,00	0,00
		REALISASI	43.930.500,00	0,00	0,00	0,00
1.06.06.2.02	Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat Terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota	ANGGARAN	170.670.600,00	0,00	0,00	0,00
		REALISASI	155.468.200,00	0,00	0,00	0,00
1.06.06.2.02.02	Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana	ANGGARAN	170.670.600,00	0,00	0,00	0,00
		REALISASI	155.468.200,00	0,00	0,00	0,00
2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**	ANGGARAN	82.570.947.896,00	22.871.474.948,00	0,00	0,00
		REALISASI	78.010.443.918,00	22.596.855.509,00	0,00	0,00
2.07	**TENAGA KERJA**	ANGGARAN	722.282.792,00	0,00	0,00	0,00
		REALISASI	713.106.632,00	0,00	0,00	0,00
2.07.02	**PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA**	ANGGARAN	115.000.000,00	0,00	0,00	0,00
		REALISASI	111.974.548,00	0,00	0,00	0,00
2.07.02.2.01	Penyusunan Rencana Tenaga Kerja (RTK)	ANGGARAN	115.000.000,00	0,00	0,00	0,00
		REALISASI	111.974.548,00	0,00	0,00	0,00
2.07.02.2.01.01	Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Makro	ANGGARAN	115.000.000,00	0,00	0,00	0,00
		REALISASI	111.974.548,00	0,00	0,00	0,00
2.07.03	**PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA**	ANGGARAN	280.000.130,00	0,00	0,00	0,00
		REALISASI	277.818.654,00	0,00	0,00	0,00
2.07.03.2.01	Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi	ANGGARAN	280.000.130,00	0,00	0,00	0,00
		REALISASI	277.818.654,00	0,00	0,00	0,00
2.07.03.2.01.01	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi	ANGGARAN	280.000.130,00	0,00	0,00	0,00
		REALISASI	277.818.654,00	0,00	0,00	0,00

KODE	URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN	ANGGARAN / REALISASI	KELOMPOK BELANJA			
			OPERASI	MODAL	TDK TERDUGA	TRANSFER
2.07.04	**PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA**		119.708.398,00	0,00	0,00	0,00
			117.275.437,00	0,00	0,00	0,00
2.07.04.2.05	Penerbitan Perpanjangan IMTA yang Lokasi Kerja dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota		119.708.398,00	0,00	0,00	0,00
			117.275.437,00	0,00	0,00	0,00
2.07.04.2.05.01	Koordinasi dan Sinkronisasi Perpanjangan IMTA yang Lokasi Kerja dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota		119.708.398,00	0,00	0,00	0,00
			117.275.437,00	0,00	0,00	0,00
2.07.05	**PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL**		207.574.264,00	0,00	0,00	0,00
			206.037.993,00	0,00	0,00	0,00
2.07.05.2.01	Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang Hanya Beroperasi dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota		128.081.200,00	0,00	0,00	0,00
			127.540.029,00	0,00	0,00	0,00
2.07.05.2.01.03	Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja serta Pengupahan		128.081.200,00	0,00	0,00	0,00
			127.540.029,00	0,00	0,00	0,00
2.07.05.2.02	Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota		79.493.064,00	0,00	0,00	0,00
			78.497.964,00	0,00	0,00	0,00
2.07.05.2.02.01	Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota		67.566.064,00	0,00	0,00	0,00
			66.592.864,00	0,00	0,00	0,00
2.07.05.2.02.02	Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota		11.927.000,00	0,00	0,00	0,00
			11.905.100,00	0,00	0,00	0,00
2.08	**PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK**		6.119.309.427,00	797.998.946,00	0,00	0,00
			5.808.403.986,00	788.684.000,00	0,00	0,00
2.08.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**		5.105.465.662,00	707.020.950,00	0,00	0,00
			4.815.544.752,00	698.462.000,00	0,00	0,00
2.08.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		16.399.657,00	0,00	0,00	0,00
			12.942.000,00	0,00	0,00	0,00
2.08.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD		2.254.000,00	0,00	0,00	0,00
			2.004.000,00	0,00	0,00	0,00
2.08.01.2.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD		4.920.357,00	0,00	0,00	0,00
			3.414.000,00	0,00	0,00	0,00
2.08.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		9.225.300,00	0,00	0,00	0,00
			7.524.000,00	0,00	0,00	0,00
2.08.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		3.707.463.688,00	0,00	0,00	0,00
			3.535.893.472,00	0,00	0,00	0,00

KODE	URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN	ANGGARAN / REALISASI	KELOMPOK BELANJA			
			OPERASI	MODAL	TDK TERDUGA	TRANSFER
2.08.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		3.634.438.760,00	0,00	0,00	0,00
			3.471.510.988,00	0,00	0,00	0,00
2.08.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD		37.690.864,00	0,00	0,00	0,00
			35.859.264,00	0,00	0,00	0,00
2.08.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD		35.334.064,00	0,00	0,00	0,00
			28.523.220,00	0,00	0,00	0,00
2.08.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		70.000.000,00	0,00	0,00	0,00
			58.750.000,00	0,00	0,00	0,00
2.08.01.2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya		52.000.000,00	0,00	0,00	0,00
			52.000.000,00	0,00	0,00	0,00
2.08.01.2.05.03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian		0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
2.08.01.2.05.11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan		18.000.000,00	0,00	0,00	0,00
			6.750.000,00	0,00	0,00	0,00
2.08.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah		781.919.039,00	0,00	0,00	0,00
			742.529.116,00	0,00	0,00	0,00
2.08.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		8.337.500,00	0,00	0,00	0,00
			8.337.500,00	0,00	0,00	0,00
2.08.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan		22.221.091,00	0,00	0,00	0,00
			9.618.100,00	0,00	0,00	0,00
2.08.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan		7.176.000,00	0,00	0,00	0,00
			6.720.000,00	0,00	0,00	0,00
2.08.01.2.06.07	Penyediaan Bahan/Material		62.630.256,00	0,00	0,00	0,00
			61.327.678,00	0,00	0,00	0,00
2.08.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		681.554.192,00	0,00	0,00	0,00
			656.525.838,00	0,00	0,00	0,00
2.08.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		0,00	707.020.950,00	0,00	0,00
			0,00	698.462.000,00	0,00	0,00
2.08.01.2.07.02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		0,00	523.809.000,00	0,00	0,00
			0,00	515.722.000,00	0,00	0,00
2.08.01.2.07.05	Pengadaan Mebel		0,00	52.947.000,00	0,00	0,00
			0,00	52.840.000,00	0,00	0,00
2.08.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya		0,00	130.264.950,00	0,00	0,00
			0,00	129.900.000,00	0,00	0,00
2.08.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		301.526.864,00	0,00	0,00	0,00
			276.912.288,00	0,00	0,00	0,00
2.08.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat		2.000.000,00	0,00	0,00	0,00
			2.000.000,00	0,00	0,00	0,00

KODE	URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN	ANGGARAN / REALISASI	KELOMPOK BELANJA			
			OPERASI	MODAL	TDK TERDUGA	TRANSFER
2.08.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		60.030.000,00	0,00	0,00	0,00
			43.249.950,00	0,00	0,00	0,00
2.08.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		239.496.864,00	0,00	0,00	0,00
			231.662.338,00	0,00	0,00	0,00
2.08.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		228.156.414,00	0,00	0,00	0,00
			188.517.876,00	0,00	0,00	0,00
2.08.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan		41.526.405,00	0,00	0,00	0,00
			39.597.899,00	0,00	0,00	0,00
2.08.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		158.130.537,00	0,00	0,00	0,00
			121.184.977,00	0,00	0,00	0,00
2.08.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya		28.499.472,00	0,00	0,00	0,00
			27.735.000,00	0,00	0,00	0,00
2.08.02	**PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN**		624.999.770,00	0,00	0,00	0,00
			624.135.300,00	0,00	0,00	0,00
2.08.02.2.01	Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota		49.999.880,00	0,00	0,00	0,00
			49.424.400,00	0,00	0,00	0,00
2.08.02.2.01.03	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan PUG termasuk PPRG		49.999.880,00	0,00	0,00	0,00
			49.424.400,00	0,00	0,00	0,00
2.08.02.2.02	Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota		49.999.890,00	0,00	0,00	0,00
			49.710.900,00	0,00	0,00	0,00
2.08.02.2.02.02	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Peningkatan Partisipasi Perempuan dan Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi		49.999.890,00	0,00	0,00	0,00
			49.710.900,00	0,00	0,00	0,00
2.08.02.2.03	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota		525.000.000,00	0,00	0,00	0,00
			525.000.000,00	0,00	0,00	0,00
2.08.02.2.03.01	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan kepada Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota		525.000.000,00	0,00	0,00	0,00
			525.000.000,00	0,00	0,00	0,00
2.08.05	**PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK**		82.572.224,00	0,00	0,00	0,00
			81.301.064,00	0,00	0,00	0,00
2.08.05.2.01	Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak Dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		82.572.224,00	0,00	0,00	0,00
			81.301.064,00	0,00	0,00	0,00

KODE	URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN	ANGGARAN / REALISASI	KELOMPOK BELANJA			
			OPERASI	MODAL	TDK TERDUGA	TRANSFER
2.08.05.2.01.01	Penyediaan Data Gender dan Anak di Kewenangan Kabupaten/Kota		82.572.224,00	0,00	0,00	0,00
			81.301.064,00	0,00	0,00	0,00
2.08.06	**PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)**		127.015.905,00	0,00	0,00	0,00
			117.063.928,00	0,00	0,00	0,00
2.08.06.2.02	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota		127.015.905,00	0,00	0,00	0,00
			117.063.928,00	0,00	0,00	0,00
2.08.06.2.02.01	Penyediaan Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota		80.892.628,00	0,00	0,00	0,00
			79.086.628,00	0,00	0,00	0,00
2.08.06.2.02.03	Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi Pemenuhan Hak Anak bagi Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		46.123.277,00	0,00	0,00	0,00
			37.977.300,00	0,00	0,00	0,00
2.08.07	**PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK**		179.255.866,00	90.977.996,00	0,00	0,00
			170.358.942,00	90.222.000,00	0,00	0,00
2.08.07.2.02	Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		141.826.852,00	90.977.996,00	0,00	0,00
			139.627.142,00	90.222.000,00	0,00	0,00
2.08.07.2.02.01	Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		119.884.395,00	90.977.996,00	0,00	0,00
			118.371.842,00	90.222.000,00	0,00	0,00
2.08.07.2.02.04	Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota		21.942.457,00	0,00	0,00	0,00
			21.255.300,00	0,00	0,00	0,00
2.08.07.2.03	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		37.429.014,00	0,00	0,00	0,00
			30.731.800,00	0,00	0,00	0,00
2.08.07.2.03.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
2.08.07.2.03.03	Koordinasi dan Sinkronisasi Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		37.429.014,00	0,00	0,00	0,00
			30.731.800,00	0,00	0,00	0,00
2.09	**PANGAN**		1.164.616.253,00	24.595.380,00	0,00	0,00
			1.094.168.049,00	19.120.000,00	0,00	0,00
2.09.03	**PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT**		1.033.276.899,00	24.595.380,00	0,00	0,00
			966.430.535,00	19.120.000,00	0,00	0,00
2.09.03.2.01	Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan		50.412.499,00	0,00	0,00	0,00
			45.719.999,00	0,00	0,00	0,00

KODE	URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN	ANGGARAN / REALISASI	KELOMPOK BELANJA			
			OPERASI	MODAL	TDK TERDUGA	TRANSFER
2.09.03.2.01.01	Penyediaan Informasi Harga Pangan dan Neraca Bahan Makanan		50.412.499,00	0,00	0,00	0,00
			45.719.999,00	0,00	0,00	0,00
2.09.03.2.02	Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Kabupaten/Kota		751.555.100,00	0,00	0,00	0,00
			692.874.700,00	0,00	0,00	0,00
2.09.03.2.02.03	Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota		751.555.100,00	0,00	0,00	0,00
			692.874.700,00	0,00	0,00	0,00
2.09.03.2.04	Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi		231.309.300,00	24.595.380,00	0,00	0,00
			227.835.836,00	19.120.000,00	0,00	0,00
2.09.03.2.04.02	Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal		231.309.300,00	24.595.380,00	0,00	0,00
			227.835.836,00	19.120.000,00	0,00	0,00
2.09.04	**PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN**		131.339.354,00	0,00	0,00	0,00
			127.737.514,00	0,00	0,00	0,00
2.09.04.2.02	Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Kabupaten/Kota		131.339.354,00	0,00	0,00	0,00
			127.737.514,00	0,00	0,00	0,00
2.09.04.2.02.01	Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan Kerawanan Pangan Kabupaten/Kota		131.339.354,00	0,00	0,00	0,00
			127.737.514,00	0,00	0,00	0,00
2.10	**PERTANAHAN**		370.864.928,00	362.592.000,00	0,00	0,00
			360.693.260,00	359.717.000,00	0,00	0,00
2.10.05	**PROGRAM PENYELESAIAN GANTI KERUGIAN DAN SANTUNAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN**		87.408.000,00	362.592.000,00	0,00	0,00
			82.559.425,00	359.717.000,00	0,00	0,00
2.10.05.2.01	Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota		87.408.000,00	362.592.000,00	0,00	0,00
			82.559.425,00	359.717.000,00	0,00	0,00
2.10.05.2.01.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota		87.408.000,00	362.592.000,00	0,00	0,00
			82.559.425,00	359.717.000,00	0,00	0,00
2.10.09	**PROGRAM PENGELOLAAN IZIN MEMBUKA TANAH**		283.456.928,00	0,00	0,00	0,00
			278.133.835,00	0,00	0,00	0,00
2.10.09.2.01	Penerbitan Izin Membuka Tanah		283.456.928,00	0,00	0,00	0,00
			278.133.835,00	0,00	0,00	0,00
2.10.09.2.01.02	Pengendalian Pemanfaatan Tanah Negara		283.456.928,00	0,00	0,00	0,00
			278.133.835,00	0,00	0,00	0,00
2.11	**LINGKUNGAN HIDUP**		11.758.439.937,00	4.446.038.400,00	0,00	0,00
			11.232.081.121,00	4.396.441.076,00	0,00	0,00
2.11.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**		6.934.543.415,00	0,00	0,00	0,00
			6.623.352.695,00	0,00	0,00	0,00

KODE	URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN	ANGGARAN / REALISASI / KELOMPOK BELANJA			
		OPERASI	MODAL	TDK TERDUGA	TRANSFER
2.11.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	421.636.212,00	0,00	0,00	0,00
		399.086.124,00	0,00	0,00	0,00
2.11.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	421.636.212,00	0,00	0,00	0,00
		399.086.124,00	0,00	0,00	0,00
2.11.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	5.106.058.411,00	0,00	0,00	0,00
		4.849.174.897,00	0,00	0,00	0,00
2.11.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	5.106.058.411,00	0,00	0,00	0,00
		4.849.174.897,00	0,00	0,00	0,00
2.11.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	29.685.200,00	0,00	0,00	0,00
		29.683.400,00	0,00	0,00	0,00
2.11.01.2.03.06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	29.685.200,00	0,00	0,00	0,00
		29.683.400,00	0,00	0,00	0,00
2.11.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	74.123.104,00	0,00	0,00	0,00
		73.429.500,00	0,00	0,00	0,00
2.11.01.2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	53.509.104,00	0,00	0,00	0,00
		53.489.500,00	0,00	0,00	0,00
2.11.01.2.05.11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	20.614.000,00	0,00	0,00	0,00
		19.940.000,00	0,00	0,00	0,00
2.11.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	590.187.061,00	0,00	0,00	0,00
		589.882.920,00	0,00	0,00	0,00
2.11.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	16.511.250,00	0,00	0,00	0,00
		16.511.000,00	0,00	0,00	0,00
2.11.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	31.325.088,00	0,00	0,00	0,00
		31.325.000,00	0,00	0,00	0,00
2.11.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	3.422.400,00	0,00	0,00	0,00
		3.120.000,00	0,00	0,00	0,00
2.11.01.2.06.07	Penyediaan Bahan/Material	67.751.403,00	0,00	0,00	0,00
		67.750.000,00	0,00	0,00	0,00
2.11.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	7.326.000,00	0,00	0,00	0,00
		7.326.000,00	0,00	0,00	0,00
2.11.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	463.850.920,00	0,00	0,00	0,00
		463.850.920,00	0,00	0,00	0,00
2.11.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	529.338.075,00	0,00	0,00	0,00
		505.091.354,00	0,00	0,00	0,00
2.11.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12.000.000,00	0,00	0,00	0,00
		12.000.000,00	0,00	0,00	0,00
2.11.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	163.491.900,00	0,00	0,00	0,00
		147.405.714,00	0,00	0,00	0,00

KODE	URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN	ANGGARAN / REALISASI	KELOMPOK BELANJA			
			OPERASI	MODAL	TDK TERDUGA	TRANSFER
2.11.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	ANGGARAN	353.846.175,00	0,00	0,00	0,00
		REALISASI	345.685.640,00	0,00	0,00	0,00
2.11.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	ANGGARAN	183.515.352,00	0,00	0,00	0,00
		REALISASI	177.004.500,00	0,00	0,00	0,00
2.11.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	ANGGARAN	83.532.828,00	0,00	0,00	0,00
		REALISASI	83.523.500,00	0,00	0,00	0,00
2.11.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	ANGGARAN	7.282.200,00	0,00	0,00	0,00
		REALISASI	795.000,00	0,00	0,00	0,00
2.11.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	ANGGARAN	27.126.624,00	0,00	0,00	0,00
		REALISASI	27.126.000,00	0,00	0,00	0,00
2.11.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	ANGGARAN	65.573.700,00	0,00	0,00	0,00
		REALISASI	65.560.000,00	0,00	0,00	0,00
2.11.02	**PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP**	ANGGARAN	317.165.827,00	0,00	0,00	0,00
		REALISASI	281.653.808,00	0,00	0,00	0,00
2.11.02.2.01	Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten/Kota	ANGGARAN	93.385.928,00	0,00	0,00	0,00
		REALISASI	90.895.728,00	0,00	0,00	0,00
2.11.02.2.01.01	Penyusunan dan Penetapan RPPLH Kabupaten/Kota	ANGGARAN	93.385.928,00	0,00	0,00	0,00
		REALISASI	90.895.728,00	0,00	0,00	0,00
2.11.02.2.02	Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kabupaten/Kota	ANGGARAN	223.779.899,00	0,00	0,00	0,00
		REALISASI	190.758.080,00	0,00	0,00	0,00
2.11.02.2.02.01	Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS Rencana Tata Ruang	ANGGARAN	25.909.020,00	0,00	0,00	0,00
		REALISASI	4.661.700,00	0,00	0,00	0,00
2.11.02.2.02.02	Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS RPJPD/RPJMD	ANGGARAN	197.870.879,00	0,00	0,00	0,00
		REALISASI	186.096.380,00	0,00	0,00	0,00
2.11.03	**PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP**	ANGGARAN	442.553.320,00	0,00	0,00	0,00
		REALISASI	425.861.935,00	0,00	0,00	0,00
2.11.03.2.01	Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	ANGGARAN	442.553.320,00	0,00	0,00	0,00
		REALISASI	425.861.935,00	0,00	0,00	0,00
2.11.03.2.01.01	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	ANGGARAN	183.149.300,00	0,00	0,00	0,00
		REALISASI	171.827.715,00	0,00	0,00	0,00
2.11.03.2.01.03	Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	ANGGARAN	259.404.020,00	0,00	0,00	0,00
		REALISASI	254.034.220,00	0,00	0,00	0,00
2.11.04	**PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)**	ANGGARAN	269.192.660,00	3.580.793.400,00	0,00	0,00
		REALISASI	246.159.360,00	3.531.207.056,00	0,00	0,00
2.11.04.2.01	Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota	ANGGARAN	269.192.660,00	3.580.793.400,00	0,00	0,00
		REALISASI	246.159.360,00	3.531.207.056,00	0,00	0,00

KODE	URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN	ANGGARAN / REALISASI	KELOMPOK BELANJA			
			OPERASI	MODAL	TDK TERDUGA	TRANSFER
2.11.04.2.01.04	Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)		269.192.660,00	3.580.793.400,00	0,00	0,00
			246.159.360,00	3.531.207.056,00	0,00	0,00
2.11.05	**PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)**		166.961.136,00	0,00	0,00	0,00
			140.451.623,00	0,00	0,00	0,00
2.11.05.2.01	Penyimpanan sementara Limbah B3		166.961.136,00	0,00	0,00	0,00
			140.451.623,00	0,00	0,00	0,00
2.11.05.2.01.02	Verifikasi Lapangan untuk Memastikan Pemenuhan Persyaratan Administrasi dan Teknis Penyimpanan sementara Limbah B3		166.961.136,00	0,00	0,00	0,00
			140.451.623,00	0,00	0,00	0,00
2.11.06	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)**		235.773.198,00	0,00	0,00	0,00
			233.600.310,00	0,00	0,00	0,00
2.11.06.2.01	Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota		235.773.198,00	0,00	0,00	0,00
			233.600.310,00	0,00	0,00	0,00
2.11.06.2.01.03	Pengawasan Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan Hidup, Izin PPLH yang Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota		235.773.198,00	0,00	0,00	0,00
			233.600.310,00	0,00	0,00	0,00
2.11.07	**PROGRAM PENGAKUAN KEBERADAAN MASYARAKAT HUKUM ADAT (MHA), KEARIFAN LOKAL DAN HAK MHA YANG TERKAIT DENGAN PPLH**		337.716.802,00	0,00	0,00	0,00
			256.592.154,00	0,00	0,00	0,00
2.11.07.2.01	Pengakuan MHA, Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional, dan Hak MHA yang Terkait dengan PPLH		337.716.802,00	0,00	0,00	0,00
			256.592.154,00	0,00	0,00	0,00
2.11.07.2.01.01	Koordinasi, Sinkronisasi, Penyediaan Data, dan Informasi Pengakuan Keberadaan MHA Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA Terkait dengan PPLH		337.716.802,00	0,00	0,00	0,00
			256.592.154,00	0,00	0,00	0,00
2.11.08	**PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT**		83.444.560,00	0,00	0,00	0,00
			61.527.300,00	0,00	0,00	0,00
2.11.08.2.01	Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		83.444.560,00	0,00	0,00	0,00
			61.527.300,00	0,00	0,00	0,00
2.11.08.2.01.01	Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Bidang Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan		83.444.560,00	0,00	0,00	0,00
			61.527.300,00	0,00	0,00	0,00

KODE	URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN	ANGGARAN / REALISASI	KELOMPOK BELANJA			
			OPERASI	MODAL	TDK TERDUGA	TRANSFER
2.11.11	**PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN**	ANGGARAN	2.971.089.019,00	865.245.000,00	0,00	0,00
		REALISASI	2.962.881.936,00	865.234.020,00	0,00	0,00
2.11.11.2.01	Pengelolaan Sampah	ANGGARAN	2.971.089.019,00	865.245.000,00	0,00	0,00
		REALISASI	2.962.881.936,00	865.234.020,00	0,00	0,00
2.11.11.2.01.02	Pengurangan Sampah dengan Melakukan Pembatasan, Pendauran Ulang dan Pemanfaatan Kembali	ANGGARAN	49.711.750,00	0,00	0,00	0,00
		REALISASI	49.649.000,00	0,00	0,00	0,00
2.11.11.2.01.03	Penanganan Sampah dengan Melakukan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir Sampah di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota	ANGGARAN	2.914.092.969,00	0,00	0,00	0,00
		REALISASI	2.905.948.636,00	0,00	0,00	0,00
2.11.11.2.01.07	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota	ANGGARAN	7.284.300,00	865.245.000,00	0,00	0,00
		REALISASI	7.284.300,00	865.234.020,00	0,00	0,00
2.12	**ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL**	ANGGARAN	6.075.450.289,00	749.019.900,00	0,00	0,00
		REALISASI	5.858.609.647,00	741.642.200,00	0,00	0,00
2.12.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	ANGGARAN	4.053.198.637,00	744.921.200,00	0,00	0,00
		REALISASI	3.876.193.915,00	737.544.200,00	0,00	0,00
2.12.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	ANGGARAN	41.943.800,00	0,00	0,00	0,00
		REALISASI	41.608.900,00	0,00	0,00	0,00
2.12.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	ANGGARAN	4.730.200,00	0,00	0,00	0,00
		REALISASI	4.730.200,00	0,00	0,00	0,00
2.12.01.2.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	ANGGARAN	5.084.400,00	0,00	0,00	0,00
		REALISASI	5.084.400,00	0,00	0,00	0,00
2.12.01.2.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	ANGGARAN	5.628.400,00	0,00	0,00	0,00
		REALISASI	5.628.400,00	0,00	0,00	0,00
2.12.01.2.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	ANGGARAN	11.021.600,00	0,00	0,00	0,00
		REALISASI	11.021.600,00	0,00	0,00	0,00
2.12.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	ANGGARAN	15.479.200,00	0,00	0,00	0,00
		REALISASI	15.144.300,00	0,00	0,00	0,00
2.12.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	ANGGARAN	2.472.290.199,00	0,00	0,00	0,00
		REALISASI	2.327.358.858,00	0,00	0,00	0,00
2.12.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	ANGGARAN	2.455.307.699,00	0,00	0,00	0,00
		REALISASI	2.310.873.858,00	0,00	0,00	0,00
2.12.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	ANGGARAN	7.908.600,00	0,00	0,00	0,00
		REALISASI	7.902.000,00	0,00	0,00	0,00
2.12.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	ANGGARAN	9.073.900,00	0,00	0,00	0,00
		REALISASI	8.583.000,00	0,00	0,00	0,00
2.12.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	ANGGARAN	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00
		REALISASI	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00

KODE	URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN	ANGGARAN / REALISASI / KELOMPOK BELANJA			
		OPERASI	MODAL	TDK TERDUGA	TRANSFER
2.12.01.2.03.01	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00
		2.000.000,00	0,00	0,00	0,00
2.12.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	64.010.000,00	0,00	0,00	0,00
		58.852.778,00	0,00	0,00	0,00
2.12.01.2.05.11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	64.010.000,00	0,00	0,00	0,00
		58.852.778,00	0,00	0,00	0,00
2.12.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	938.878.830,00	0,00	0,00	0,00
		926.404.728,00	0,00	0,00	0,00
2.12.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	10.904.000,00	0,00	0,00	0,00
		8.450.000,00	0,00	0,00	0,00
2.12.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	240.175.000,00	0,00	0,00	0,00
		239.076.100,00	0,00	0,00	0,00
2.12.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	35.753.090,00	0,00	0,00	0,00
		35.399.000,00	0,00	0,00	0,00
2.12.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	40.043.600,00	0,00	0,00	0,00
		38.125.000,00	0,00	0,00	0,00
2.12.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	5.216.400,00	0,00	0,00	0,00
		5.205.000,00	0,00	0,00	0,00
2.12.01.2.06.07	Penyediaan Bahan/Material	71.756.220,00	0,00	0,00	0,00
		67.093.200,00	0,00	0,00	0,00
2.12.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	1.498.000,00	0,00	0,00	0,00
		1.060.000,00	0,00	0,00	0,00
2.12.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	499.931.300,00	0,00	0,00	0,00
		499.644.927,00	0,00	0,00	0,00
2.12.01.2.06.10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	33.601.220,00	0,00	0,00	0,00
		32.351.501,00	0,00	0,00	0,00
2.12.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	0,00	23.310.000,00	0,00	0,00
		0,00	20.600.000,00	0,00	0,00
2.12.01.2.07.01	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	0,00	23.310.000,00	0,00	0,00
		0,00	20.600.000,00	0,00	0,00
2.12.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	342.477.244,00	721.611.200,00	0,00	0,00
		332.473.320,00	716.944.200,00	0,00	0,00
2.12.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	5.400.000,00	0,00	0,00	0,00
		5.200.000,00	0,00	0,00	0,00
2.12.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	51.456.000,00	0,00	0,00	0,00
		49.255.076,00	0,00	0,00	0,00
2.12.01.2.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	0,00	721.611.200,00	0,00	0,00
		0,00	716.944.200,00	0,00	0,00

KODE	URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN	ANGGARAN / REALISASI	KELOMPOK BELANJA			
			OPERASI	MODAL	TDK TERDUGA	TRANSFER
2.12.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	ANGGARAN	285.621.244,00	0,00	0,00	0,00
		REALISASI	278.018.244,00	0,00	0,00	0,00
2.12.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	ANGGARAN	120.248.700,00	0,00	0,00	0,00
		REALISASI	118.317.159,00	0,00	0,00	0,00
2.12.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	ANGGARAN	32.463.700,00	0,00	0,00	0,00
		REALISASI	31.935.259,00	0,00	0,00	0,00
2.12.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	ANGGARAN	55.100.500,00	0,00	0,00	0,00
		REALISASI	54.581.900,00	0,00	0,00	0,00
2.12.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	ANGGARAN	32.684.500,00	0,00	0,00	0,00
		REALISASI	31.800.000,00	0,00	0,00	0,00
2.12.01.2.13	Penataan Organisasi	ANGGARAN	70.349.864,00	0,00	0,00	0,00
		REALISASI	69.178.172,00	0,00	0,00	0,00
2.12.01.2.13.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah	ANGGARAN	70.349.864,00	0,00	0,00	0,00
		REALISASI	69.178.172,00	0,00	0,00	0,00
2.12.02	**PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK**	ANGGARAN	1.002.481.380,00	0,00	0,00	0,00
		REALISASI	981.813.184,00	0,00	0,00	0,00
2.12.02.2.01	Pelayanan Pendaftaran Penduduk	ANGGARAN	769.047.124,00	0,00	0,00	0,00
		REALISASI	752.348.928,00	0,00	0,00	0,00
2.12.02.2.01.01	Pendataan Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi Kependudukan	ANGGARAN	253.728.384,00	0,00	0,00	0,00
		REALISASI	247.653.396,00	0,00	0,00	0,00
2.12.02.2.01.03	Penyelesaian Masalah Pendaftaran Penduduk	ANGGARAN	226.874.620,00	0,00	0,00	0,00
		REALISASI	222.068.600,00	0,00	0,00	0,00
2.12.02.2.01.04	Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk	ANGGARAN	288.444.120,00	0,00	0,00	0,00
		REALISASI	282.626.932,00	0,00	0,00	0,00
2.12.02.2.03	Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk	ANGGARAN	233.434.256,00	0,00	0,00	0,00
		REALISASI	229.464.256,00	0,00	0,00	0,00
2.12.02.2.03.02	Pelayanan Secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting Terkait Pendaftaran Penduduk	ANGGARAN	233.434.256,00	0,00	0,00	0,00
		REALISASI	229.464.256,00	0,00	0,00	0,00
2.12.03	**PROGRAM PENCATATAN SIPIL**	ANGGARAN	712.167.464,00	0,00	0,00	0,00
		REALISASI	695.901.533,00	0,00	0,00	0,00
2.12.03.2.01	Pelayanan Pencatatan Sipil	ANGGARAN	712.167.464,00	0,00	0,00	0,00
		REALISASI	695.901.533,00	0,00	0,00	0,00
2.12.03.2.01.01	Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Penting	ANGGARAN	637.379.264,00	0,00	0,00	0,00
		REALISASI	621.332.685,00	0,00	0,00	0,00
2.12.03.2.01.02	Peningkatan dalam Pelayanan Pencatatan Sipil	ANGGARAN	74.788.200,00	0,00	0,00	0,00
		REALISASI	74.568.848,00	0,00	0,00	0,00

KODE	URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN	ANGGARAN / REALISASI	KELOMPOK BELANJA			
			OPERASI	MODAL	TDK TERDUGA	TRANSFER
2.12.04	**PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN**	ANGGARAN	283.836.733,00	4.098.700,00	0,00	0,00
		REALISASI	281.587.340,00	4.098.000,00	0,00	0,00
2.12.04.2.03	Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	ANGGARAN	283.836.733,00	4.098.700,00	0,00	0,00
		REALISASI	281.587.340,00	4.098.000,00	0,00	0,00
2.12.04.2.03.02	Penerimaan dan Permintaan Data Kependudukan dari Perwakilan Republik Indonesia Melalui Menteri	ANGGARAN	26.262.705,00	0,00	0,00	0,00
		REALISASI	26.187.305,00	0,00	0,00	0,00
2.12.04.2.03.05	Sosialisasi Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	ANGGARAN	54.480.700,00	0,00	0,00	0,00
		REALISASI	54.241.125,00	0,00	0,00	0,00
2.12.04.2.03.08	Penyajian Data Kependudukan yang Akurat dan dapat Dipertanggungjawabkan	ANGGARAN	203.093.328,00	4.098.700,00	0,00	0,00
		REALISASI	201.158.910,00	4.098.000,00	0,00	0,00
2.12.05	**PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN**	ANGGARAN	23.766.075,00	0,00	0,00	0,00
		REALISASI	23.113.675,00	0,00	0,00	0,00
2.12.05.2.01	Penyusunan Profil Kependudukan	ANGGARAN	23.766.075,00	0,00	0,00	0,00
		REALISASI	23.113.675,00	0,00	0,00	0,00
2.12.05.2.01.02	Penyusunan Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan serta Kebutuhan yang Lain	ANGGARAN	23.766.075,00	0,00	0,00	0,00
		REALISASI	23.113.675,00	0,00	0,00	0,00
2.13	**PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA**	ANGGARAN	9.843.159.342,00	270.559.170,00	0,00	0,00
		REALISASI	8.941.757.335,00	236.294.000,00	0,00	0,00
2.13.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	ANGGARAN	4.138.886.783,00	270.559.170,00	0,00	0,00
		REALISASI	3.676.832.976,00	236.294.000,00	0,00	0,00
2.13.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	ANGGARAN	2.619.770.467,00	0,00	0,00	0,00
		REALISASI	2.240.629.123,00	0,00	0,00	0,00
2.13.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	ANGGARAN	2.478.398.701,00	0,00	0,00	0,00
		REALISASI	2.103.217.667,00	0,00	0,00	0,00
2.13.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	ANGGARAN	141.371.766,00	0,00	0,00	0,00
		REALISASI	137.411.456,00	0,00	0,00	0,00
2.13.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	ANGGARAN	104.895.200,00	0,00	0,00	0,00
		REALISASI	98.606.500,00	0,00	0,00	0,00
2.13.01.2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	ANGGARAN	43.200.000,00	0,00	0,00	0,00
		REALISASI	43.200.000,00	0,00	0,00	0,00
2.13.01.2.05.11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	ANGGARAN	61.695.200,00	0,00	0,00	0,00
		REALISASI	55.406.500,00	0,00	0,00	0,00
2.13.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	ANGGARAN	799.310.409,00	226.816.290,00	0,00	0,00
		REALISASI	798.192.091,00	207.396.000,00	0,00	0,00
2.13.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	ANGGARAN	9.234.645,00	0,00	0,00	0,00
		REALISASI	9.167.000,00	0,00	0,00	0,00
2.13.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	ANGGARAN	0,00	226.816.290,00	0,00	0,00
		REALISASI	0,00	207.396.000,00	0,00	0,00

KODE	URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN	ANGGARAN / REALISASI	KELOMPOK BELANJA			
			OPERASI	MODAL	TDK TERDUGA	TRANSFER
2.13.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	ANGGARAN	72.074.245,00	0,00	0,00	0,00
		REALISASI	72.034.000,00	0,00	0,00	0,00
2.13.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	ANGGARAN	33.948.684,00	0,00	0,00	0,00
		REALISASI	33.948.400,00	0,00	0,00	0,00
2.13.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	ANGGARAN	8.300.700,00	0,00	0,00	0,00
		REALISASI	7.860.000,00	0,00	0,00	0,00
2.13.01.2.06.07	Penyediaan Bahan/Material	ANGGARAN	10.082.035,00	0,00	0,00	0,00
		REALISASI	10.029.000,00	0,00	0,00	0,00
2.13.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	ANGGARAN	665.670.100,00	0,00	0,00	0,00
		REALISASI	665.153.691,00	0,00	0,00	0,00
2.13.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	ANGGARAN	349.507.134,00	43.742.880,00	0,00	0,00
		REALISASI	299.884.462,00	28.898.000,00	0,00	0,00
2.13.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	ANGGARAN	24.069.138,00	43.742.880,00	0,00	0,00
		REALISASI	16.435.000,00	28.898.000,00	0,00	0,00
2.13.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	ANGGARAN	71.634.000,00	0,00	0,00	0,00
		REALISASI	64.792.812,00	0,00	0,00	0,00
2.13.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	ANGGARAN	253.803.996,00	0,00	0,00	0,00
		REALISASI	218.656.650,00	0,00	0,00	0,00
2.13.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	ANGGARAN	265.403.573,00	0,00	0,00	0,00
		REALISASI	239.520.800,00	0,00	0,00	0,00
2.13.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	ANGGARAN	119.087.517,00	0,00	0,00	0,00
		REALISASI	116.298.600,00	0,00	0,00	0,00
2.13.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	ANGGARAN	101.587.662,00	0,00	0,00	0,00
		REALISASI	79.797.200,00	0,00	0,00	0,00
2.13.01.2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	ANGGARAN	44.728.394,00	0,00	0,00	0,00
		REALISASI	43.425.000,00	0,00	0,00	0,00
2.13.04	**PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA**	ANGGARAN	4.352.629.814,00	0,00	0,00	0,00
		REALISASI	3.960.264.292,00	0,00	0,00	0,00
2.13.04.2.01	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	ANGGARAN	4.352.629.814,00	0,00	0,00	0,00
		REALISASI	3.960.264.292,00	0,00	0,00	0,00
2.13.04.2.01.01	Fasilitasi Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	ANGGARAN	629.252.231,00	0,00	0,00	0,00
		REALISASI	581.253.169,00	0,00	0,00	0,00
2.13.04.2.01.03	Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa	ANGGARAN	261.926.051,00	0,00	0,00	0,00
		REALISASI	252.356.178,00	0,00	0,00	0,00
2.13.04.2.01.04	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	ANGGARAN	396.260.956,00	0,00	0,00	0,00
		REALISASI	389.343.874,00	0,00	0,00	0,00

KODE	URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN	ANGGARAN / REALISASI	KELOMPOK BELANJA			
			OPERASI	MODAL	TDK TERDUGA	TRANSFER
2.13.04.2.01.05	Pembinaan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa		2.741.143.663,00	0,00	0,00	0,00
			2.420.222.893,00	0,00	0,00	0,00
2.13.04.2.01.08	Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja Sama antar Desa		125.100.433,00	0,00	0,00	0,00
			120.524.578,00	0,00	0,00	0,00
2.13.04.2.01.11	Fasilitasi Penyusunan Profil Desa		44.854.074,00	0,00	0,00	0,00
			43.193.000,00	0,00	0,00	0,00
2.13.04.2.01.13	Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa		54.039.300,00	0,00	0,00	0,00
			53.367.400,00	0,00	0,00	0,00
2.13.04.2.01.18	Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan		100.053.106,00	0,00	0,00	0,00
			100.003.200,00	0,00	0,00	0,00
2.13.05	**PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT**		1.351.642.745,00	0,00	0,00	0,00
			1.304.660.067,00	0,00	0,00	0,00
2.13.05.2.01	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota		1.351.642.745,00	0,00	0,00	0,00
			1.304.660.067,00	0,00	0,00	0,00
2.13.05.2.01.03	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat		215.659.614,00	0,00	0,00	0,00
			205.933.050,00	0,00	0,00	0,00
2.13.05.2.01.05	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa		81.912.379,00	0,00	0,00	0,00
			78.627.764,00	0,00	0,00	0,00
2.13.05.2.01.06	Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna		137.813.882,00	0,00	0,00	0,00
			116.780.382,00	0,00	0,00	0,00
2.13.05.2.01.07	Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat		151.108.457,00	0,00	0,00	0,00
			150.600.500,00	0,00	0,00	0,00
2.13.05.2.01.09	Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga		765.148.413,00	0,00	0,00	0,00
			752.718.371,00	0,00	0,00	0,00
2.14	**PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA**		5.166.438.200,00	50.506.943,00	0,00	0,00
			4.555.306.472,00	41.040.000,00	0,00	0,00
2.14.02	**PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK**		319.800.082,00	0,00	0,00	0,00
			303.155.764,00	0,00	0,00	0,00
2.14.02.2.02	Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota		319.800.082,00	0,00	0,00	0,00
			303.155.764,00	0,00	0,00	0,00
2.14.02.2.02.02	Penyediaan dan Pengolahan Data Kependudukan		79.800.082,00	0,00	0,00	0,00
			74.920.764,00	0,00	0,00	0,00

KODE	URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN	ANGGARAN / REALISASI	KELOMPOK BELANJA			
			OPERASI	MODAL	TDK TERDUGA	TRANSFER
2.14.02.2.02.09	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Sistem Informasi Keluarga		64.200.000,00	0,00	0,00	0,00
			58.435.000,00	0,00	0,00	0,00
2.14.02.2.02.12	Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga		103.800.000,00	0,00	0,00	0,00
			97.800.000,00	0,00	0,00	0,00
2.14.02.2.02.13	Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB		72.000.000,00	0,00	0,00	0,00
			72.000.000,00	0,00	0,00	0,00
2.14.03	**PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)**		3.014.706.252,00	11.574.803,00	0,00	0,00
			2.616.507.271,00	2.400.000,00	0,00	0,00
2.14.03.2.01	Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai Kearifan Budaya Lokal		1.251.855.197,00	11.574.803,00	0,00	0,00
			1.035.957.424,00	2.400.000,00	0,00	0,00
2.14.03.2.01.01	Advokasi Program KKBPK kepada Stakeholders dan Mitra Kerja		80.000.000,00	0,00	0,00	0,00
			62.688.400,00	0,00	0,00	0,00
2.14.03.2.01.02	Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Program KKBPK Sesuai Kearifan Budaya Lokal		46.000.000,00	0,00	0,00	0,00
			12.517.100,00	0,00	0,00	0,00
2.14.03.2.01.04	Promosi dan KIE Program KKBPK Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang		150.000.000,00	0,00	0,00	0,00
			125.140.000,00	0,00	0,00	0,00
2.14.03.2.01.06	Pelaksanaan Mekanisme Operasional Program KKBPK Melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok)		156.000.000,00	0,00	0,00	0,00
			116.144.010,00	0,00	0,00	0,00
2.14.03.2.01.07	Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan KKBPK		577.800.000,00	0,00	0,00	0,00
			553.121.656,00	0,00	0,00	0,00
2.14.03.2.01.08	Pengendalian Program KKBPK		242.055.197,00	11.574.803,00	0,00	0,00
			166.346.258,00	2.400.000,00	0,00	0,00
2.14.03.2.02	Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)		1.156.260.099,00	0,00	0,00	0,00
			979.162.094,00	0,00	0,00	0,00
2.14.03.2.02.01	Pembinaan IMP dan Program KKBPK di Lini Lapangan oleh PKB/PLKB		176.000.000,00	0,00	0,00	0,00
			72.000.000,00	0,00	0,00	0,00
2.14.03.2.02.03	Penguatan Pelaksanaan Penyuluhan, Penggerakan, Pelayanan dan Pengembangan Program KKBPK untuk Petugas Keluarga Berencana/Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana (PKB/PLKB)		726.260.099,00	0,00	0,00	0,00
			653.162.094,00	0,00	0,00	0,00
2.14.03.2.02.04	Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)		254.000.000,00	0,00	0,00	0,00
			254.000.000,00	0,00	0,00	0,00
2.14.03.2.03	Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota		189.076.000,00	0,00	0,00	0,00
			187.550.073,00	0,00	0,00	0,00

KODE	URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN	ANGGARAN / REALISASI	KELOMPOK BELANJA			
			OPERASI	MODAL	TDK TERDUGA	TRANSFER
2.14.03.2.03.01	Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	ANGGARAN	49.800.000,00	0,00	0,00	0,00
		REALISASI	48.939.664,00	0,00	0,00	0,00
2.14.03.2.03.03	Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	ANGGARAN	65.776.000,00	0,00	0,00	0,00
		REALISASI	65.455.467,00	0,00	0,00	0,00
2.14.03.2.03.08	Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	ANGGARAN	13.500.000,00	0,00	0,00	0,00
		REALISASI	13.277.792,00	0,00	0,00	0,00
2.14.03.2.03.11	Dukungan Operasional Pelayanan KB Bergerak	ANGGARAN	60.000.000,00	0,00	0,00	0,00
		REALISASI	59.877.150,00	0,00	0,00	0,00
2.14.03.2.04	Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	ANGGARAN	417.514.956,00	0,00	0,00	0,00
		REALISASI	413.837.680,00	0,00	0,00	0,00
2.14.03.2.04.02	Integrasi Pembangunan Lintas Sektor di Kampung KB	ANGGARAN	9.000.000,00	0,00	0,00	0,00
		REALISASI	8.503.260,00	0,00	0,00	0,00
2.14.03.2.04.03	Pelaksanaan dan Pengelolaan Program KKBPK di Kampung KB	ANGGARAN	356.500.000,00	0,00	0,00	0,00
		REALISASI	353.589.120,00	0,00	0,00	0,00
2.14.03.2.04.04	Pembinaan Terpadu Kampung KB	ANGGARAN	52.014.956,00	0,00	0,00	0,00
		REALISASI	51.745.300,00	0,00	0,00	0,00
2.14.04	**PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)**	ANGGARAN	1.831.931.866,00	38.932.140,00	0,00	0,00
		REALISASI	1.635.643.437,00	38.640.000,00	0,00	0,00
2.14.04.2.01	Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	ANGGARAN	1.831.931.866,00	38.932.140,00	0,00	0,00
		REALISASI	1.635.643.437,00	38.640.000,00	0,00	0,00
2.14.04.2.01.02	Pengadaan Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	ANGGARAN	360.000.000,00	0,00	0,00	0,00
		REALISASI	349.260.000,00	0,00	0,00	0,00
2.14.04.2.01.03	Orientasi dan Pelatihan Teknis Pengelola Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	ANGGARAN	121.067.860,00	38.932.140,00	0,00	0,00
		REALISASI	83.457.954,00	38.640.000,00	0,00	0,00
2.14.04.2.01.04	Orientasi/Pelatihan Teknis Pelaksana/Kader Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	ANGGARAN	200.000.000,00	0,00	0,00	0,00
		REALISASI	182.833.200,00	0,00	0,00	0,00
2.14.04.2.01.06	Penyediaan Biaya Operasional bagi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	ANGGARAN	800.100.000,00	0,00	0,00	0,00
		REALISASI	730.800.000,00	0,00	0,00	0,00
2.14.04.2.01.07	Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	ANGGARAN	113.764.006,00	0,00	0,00	0,00
		REALISASI	89.920.218,00	0,00	0,00	0,00

KODE	URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN	ANGGARAN / REALISASI	KELOMPOK BELANJA			
			OPERASI	MODAL	TDK TERDUGA	TRANSFER
2.14.04.2.01.08	Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Menjadi Orang Tua Hebat, Generasi Berencana, Kelanjutusiaan serta Pengelolaan Keuangan Keluarga)	ANGGARAN	237.000.000,00	0,00	0,00	0,00
		REALISASI	199.372.065,00	0,00	0,00	0,00
2.15	**PERHUBUNGAN**	ANGGARAN	844.770.068,00	43.467.600,00	0,00	0,00
		REALISASI	768.795.938,00	43.000.000,00	0,00	0,00
2.15.02	**PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)**	ANGGARAN	639.489.156,00	0,00	0,00	0,00
		REALISASI	567.807.326,00	0,00	0,00	0,00
2.15.02.2.05	Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	ANGGARAN	290.489.320,00	0,00	0,00	0,00
		REALISASI	282.483.470,00	0,00	0,00	0,00
2.15.02.2.05.01	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	ANGGARAN	240.443.420,00	0,00	0,00	0,00
		REALISASI	232.691.470,00	0,00	0,00	0,00
2.15.02.2.05.07	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	ANGGARAN	50.045.900,00	0,00	0,00	0,00
		REALISASI	49.792.000,00	0,00	0,00	0,00
2.15.02.2.06	Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	ANGGARAN	348.999.836,00	0,00	0,00	0,00
		REALISASI	285.323.856,00	0,00	0,00	0,00
2.15.02.2.06.04	Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/Kota	ANGGARAN	186.573.556,00	0,00	0,00	0,00
		REALISASI	183.135.556,00	0,00	0,00	0,00
2.15.02.2.06.05	Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kabupaten/Kota	ANGGARAN	162.426.280,00	0,00	0,00	0,00
		REALISASI	102.188.300,00	0,00	0,00	0,00
2.15.03	**PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN**	ANGGARAN	205.280.912,00	43.467.600,00	0,00	0,00
		REALISASI	200.988.612,00	43.000.000,00	0,00	0,00
2.15.03.2.03	Penerbitan Izin Usaha Penyelenggaraan Angkutan Sungai dan Danau Sesuai dengan Domisili Orang Perseorangan Warga Negara Indonesia atau Badan Usaha	ANGGARAN	184.748.512,00	0,00	0,00	0,00
		REALISASI	181.156.912,00	0,00	0,00	0,00
2.15.03.2.03.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Penyelenggaraan Angkutan Sungai dan Danau Sesuai dengan Domisili Orang Perseorangan Warga Negara Indonesia atau Badan Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	ANGGARAN	184.748.512,00	0,00	0,00	0,00
		REALISASI	181.156.912,00	0,00	0,00	0,00
2.15.03.2.05	Penerbitan Izin Usaha Penyelenggaraan Angkutan Penyeberangan Sesuai dengan Domisili Badan Usaha	ANGGARAN	20.532.400,00	43.467.600,00	0,00	0,00
		REALISASI	19.831.700,00	43.000.000,00	0,00	0,00
2.15.03.2.05.01	Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Usaha Penyelenggaraan Angkutan Penyeberangan Sesuai dengan Domisili Badan Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	ANGGARAN	20.532.400,00	43.467.600,00	0,00	0,00
		REALISASI	19.831.700,00	43.000.000,00	0,00	0,00
2.16	**KOMUNIKASI & INFORMATIKA**	ANGGARAN	10.734.362.079,00	753.890.357,00	0,00	0,00
		REALISASI	10.024.271.705,00	735.034.975,00	0,00	0,00
2.16.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	ANGGARAN	4.752.994.581,00	621.424.457,00	0,00	0,00
		REALISASI	4.464.314.602,00	621.350.000,00	0,00	0,00

KODE	URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN	ANGGARAN / REALISASI	KELOMPOK BELANJA			
			OPERASI	MODAL	TDK TERDUGA	TRANSFER
2.16.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	ANGGARAN	75.770.613,00	0,00	0,00	0,00
		REALISASI	68.231.064,00	0,00	0,00	0,00
2.16.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	ANGGARAN	17.248.455,00	0,00	0,00	0,00
		REALISASI	15.769.300,00	0,00	0,00	0,00
2.16.01.2.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	ANGGARAN	6.192.276,00	0,00	0,00	0,00
		REALISASI	5.106.500,00	0,00	0,00	0,00
2.16.01.2.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	ANGGARAN	3.352.200,00	0,00	0,00	0,00
		REALISASI	3.018.000,00	0,00	0,00	0,00
2.16.01.2.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	ANGGARAN	2.315.460,00	0,00	0,00	0,00
		REALISASI	2.216.000,00	0,00	0,00	0,00
2.16.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	ANGGARAN	46.662.222,00	0,00	0,00	0,00
		REALISASI	42.121.264,00	0,00	0,00	0,00
2.16.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	ANGGARAN	3.373.698.489,00	0,00	0,00	0,00
		REALISASI	3.232.850.189,00	0,00	0,00	0,00
2.16.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	ANGGARAN	3.362.139.993,00	0,00	0,00	0,00
		REALISASI	3.221.540.873,00	0,00	0,00	0,00
2.16.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	ANGGARAN	1.651.680,00	0,00	0,00	0,00
		REALISASI	1.650.000,00	0,00	0,00	0,00
2.16.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	ANGGARAN	9.906.816,00	0,00	0,00	0,00
		REALISASI	9.659.316,00	0,00	0,00	0,00
2.16.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	ANGGARAN	200.000,00	0,00	0,00	0,00
		REALISASI	200.000,00	0,00	0,00	0,00
2.16.01.2.03.06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	ANGGARAN	200.000,00	0,00	0,00	0,00
		REALISASI	200.000,00	0,00	0,00	0,00
2.16.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	ANGGARAN	116.479.500,00	0,00	0,00	0,00
		REALISASI	80.036.192,00	0,00	0,00	0,00
2.16.01.2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	ANGGARAN	45.273.500,00	0,00	0,00	0,00
		REALISASI	45.273.500,00	0,00	0,00	0,00
2.16.01.2.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	ANGGARAN	71.206.000,00	0,00	0,00	0,00
		REALISASI	34.762.692,00	0,00	0,00	0,00
2.16.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	ANGGARAN	550.103.939,00	240.524.457,00	0,00	0,00
		REALISASI	512.987.345,00	240.450.000,00	0,00	0,00
2.16.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	ANGGARAN	4.999.500,00	0,00	0,00	0,00
		REALISASI	4.950.400,00	0,00	0,00	0,00
2.16.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	ANGGARAN	0,00	240.524.457,00	0,00	0,00
		REALISASI	0,00	240.450.000,00	0,00	0,00
2.16.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	ANGGARAN	5.858.250,00	0,00	0,00	0,00
		REALISASI	4.253.250,00	0,00	0,00	0,00

KODE	URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN	ANGGARAN / REALISASI	KELOMPOK BELANJA			
			OPERASI	MODAL	TDK TERDUGA	TRANSFER
2.16.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan		31.997.082,00	0,00	0,00	0,00
			30.890.000,00	0,00	0,00	0,00
2.16.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan		11.812.800,00	0,00	0,00	0,00
			11.460.000,00	0,00	0,00	0,00
2.16.01.2.06.07	Penyediaan Bahan/Material		80.102.817,00	0,00	0,00	0,00
			60.876.210,00	0,00	0,00	0,00
2.16.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu		9.999.990,00	0,00	0,00	0,00
			9.690.000,00	0,00	0,00	0,00
2.16.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		405.333.500,00	0,00	0,00	0,00
			390.867.485,00	0,00	0,00	0,00
2.16.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		0,00	380.900.000,00	0,00	0,00
			0,00	380.900.000,00	0,00	0,00
2.16.01.2.07.01	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan		0,00	380.900.000,00	0,00	0,00
			0,00	380.900.000,00	0,00	0,00
2.16.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		525.572.477,00	0,00	0,00	0,00
			469.999.445,00	0,00	0,00	0,00
2.16.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat		4.840.000,00	0,00	0,00	0,00
			3.327.000,00	0,00	0,00	0,00
2.16.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		79.253.250,00	0,00	0,00	0,00
			71.476.325,00	0,00	0,00	0,00
2.16.01.2.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor		79.538.451,00	0,00	0,00	0,00
			54.682.242,00	0,00	0,00	0,00
2.16.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		361.940.776,00	0,00	0,00	0,00
			340.513.878,00	0,00	0,00	0,00
2.16.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		110.169.563,00	0,00	0,00	0,00
			99.010.367,00	0,00	0,00	0,00
2.16.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan		90.292.793,00	0,00	0,00	0,00
			79.995.867,00	0,00	0,00	0,00
2.16.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		19.876.770,00	0,00	0,00	0,00
			19.014.500,00	0,00	0,00	0,00
2.16.01.2.13	Penataan Organisasi		1.000.000,00	0,00	0,00	0,00
			1.000.000,00	0,00	0,00	0,00
2.16.01.2.13.01	Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan		1.000.000,00	0,00	0,00	0,00
			1.000.000,00	0,00	0,00	0,00
2.16.02	**PROGRAM INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK**		2.827.271.866,00	0,00	0,00	0,00
			2.775.995.442,00	0,00	0,00	0,00
2.16.02.2.01	Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota		2.827.271.866,00	0,00	0,00	0,00
			2.775.995.442,00	0,00	0,00	0,00

KODE	URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN	ANGGARAN / REALISASI	KELOMPOK BELANJA			
			OPERASI	MODAL	TDK TERDUGA	TRANSFER
2.16.02.2.01.04	Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik	ANGGARAN	321.163.079,00	0,00	0,00	0,00
		REALISASI	316.958.695,00	0,00	0,00	0,00
2.16.02.2.01.05	Pengelolaan Media Komunikasi Publik	ANGGARAN	409.643.780,00	0,00	0,00	0,00
		REALISASI	366.149.310,00	0,00	0,00	0,00
2.16.02.2.01.12	Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat, Media dan Kemitraan Komunitas	ANGGARAN	2.096.465.007,00	0,00	0,00	0,00
		REALISASI	2.092.887.437,00	0,00	0,00	0,00
2.16.03	**PROGRAM APLIKASI INFORMATIKA**	ANGGARAN	3.154.095.632,00	132.465.900,00	0,00	0,00
		REALISASI	2.783.961.661,00	113.684.975,00	0,00	0,00
2.16.03.2.01	Pengelolaan Nama Domain yang Telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	ANGGARAN	2.631.213.946,00	19.065.500,00	0,00	0,00
		REALISASI	2.335.455.080,00	12.523.523,00	0,00	0,00
2.16.03.2.01.02	Penatalaksanaan dan Pengawasan Nama Domain dan Sub Domain dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	ANGGARAN	54.945.946,00	19.065.500,00	0,00	0,00
		REALISASI	46.647.000,00	12.523.523,00	0,00	0,00
2.16.03.2.01.03	Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah	ANGGARAN	2.576.268.000,00	0,00	0,00	0,00
		REALISASI	2.288.808.080,00	0,00	0,00	0,00
2.16.03.2.02	Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	ANGGARAN	522.881.686,00	113.400.400,00	0,00	0,00
		REALISASI	448.506.581,00	101.161.452,00	0,00	0,00
2.16.03.2.02.01	Penatalaksanaan dan Pengawasan E-government dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	ANGGARAN	35.739.546,00	0,00	0,00	0,00
		REALISASI	24.567.000,00	0,00	0,00	0,00
2.16.03.2.02.02	Sinkronisasi Pengelolaan Rencana Induk dan Anggaran Pemerintahan Berbasis Elektronik	ANGGARAN	38.758.527,00	4.317.900,00	0,00	0,00
		REALISASI	26.866.200,00	4.310.000,00	0,00	0,00
2.16.03.2.02.03	Pengelolaan Pusat Data Pemerintahan Daerah	ANGGARAN	244.651.326,00	51.060.000,00	0,00	0,00
		REALISASI	229.151.020,00	39.131.752,00	0,00	0,00
2.16.03.2.02.07	Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik	ANGGARAN	25.178.085,00	37.765.000,00	0,00	0,00
		REALISASI	21.777.600,00	37.462.500,00	0,00	0,00
2.16.03.2.02.08	Penyelenggaraan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah	ANGGARAN	30.494.200,00	0,00	0,00	0,00
		REALISASI	11.002.200,00	0,00	0,00	0,00
2.16.03.2.02.10	Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah	ANGGARAN	148.060.002,00	20.257.500,00	0,00	0,00
		REALISASI	135.142.561,00	20.257.200,00	0,00	0,00
2.17	**KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH**	ANGGARAN	5.919.786.358,00	481.556.000,00	0,00	0,00
		REALISASI	5.680.879.763,00	481.353.856,00	0,00	0,00
2.17.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	ANGGARAN	5.066.062.684,00	481.556.000,00	0,00	0,00
		REALISASI	4.829.426.884,00	481.353.856,00	0,00	0,00
2.17.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	ANGGARAN	10.536.382,00	0,00	0,00	0,00
		REALISASI	10.278.000,00	0,00	0,00	0,00

KODE	URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN	ANGGARAN / REALISASI / KELOMPOK BELANJA			
		OPERASI	MODAL	TDK TERDUGA	TRANSFER
2.17.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	3.205.642,00	0,00	0,00	0,00
		3.047.800,00	0,00	0,00	0,00
2.17.01.2.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	3.090.020,00	0,00	0,00	0,00
		2.993.600,00	0,00	0,00	0,00
2.17.01.2.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	2.122.120,00	0,00	0,00	0,00
		2.121.000,00	0,00	0,00	0,00
2.17.01.2.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	2.118.600,00	0,00	0,00	0,00
		2.115.600,00	0,00	0,00	0,00
2.17.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	3.679.807.748,00	0,00	0,00	0,00
		3.487.391.479,00	0,00	0,00	0,00
2.17.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	3.569.672.810,00	0,00	0,00	0,00
		3.380.132.587,00	0,00	0,00	0,00
2.17.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	69.525.944,00	0,00	0,00	0,00
		67.673.728,00	0,00	0,00	0,00
2.17.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	2.915.130,00	0,00	0,00	0,00
		2.882.100,00	0,00	0,00	0,00
2.17.01.2.02.08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	37.693.864,00	0,00	0,00	0,00
		36.703.064,00	0,00	0,00	0,00
2.17.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	112.540.000,00	0,00	0,00	0,00
		112.381.367,00	0,00	0,00	0,00
2.17.01.2.05.11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	112.540.000,00	0,00	0,00	0,00
		112.381.367,00	0,00	0,00	0,00
2.17.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	718.952.677,00	0,00	0,00	0,00
		717.794.428,00	0,00	0,00	0,00
2.17.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	7.032.738,00	0,00	0,00	0,00
		6.993.074,00	0,00	0,00	0,00
2.17.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	31.468.500,00	0,00	0,00	0,00
		31.377.900,00	0,00	0,00	0,00
2.17.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	11.258.730,00	0,00	0,00	0,00
		10.910.000,00	0,00	0,00	0,00
2.17.01.2.06.07	Penyediaan Bahan/Material	87.810.089,00	0,00	0,00	0,00
		87.423.500,00	0,00	0,00	0,00
2.17.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	581.382.620,00	0,00	0,00	0,00
		581.089.954,00	0,00	0,00	0,00
2.17.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	0,00	8.658.000,00	0,00	0,00
		0,00	8.455.856,00	0,00	0,00
2.17.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	0,00	8.658.000,00	0,00	0,00
		0,00	8.455.856,00	0,00	0,00

KODE	URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN	ANGGARAN / REALISASI	KELOMPOK BELANJA			
			OPERASI	MODAL	TDK TERDUGA	TRANSFER
2.17.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	ANGGARAN	369.118.865,00	472.898.000,00	0,00	0,00
		REALISASI	329.754.784,00	472.898.000,00	0,00	0,00
2.17.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	ANGGARAN	2.390.000,00	0,00	0,00	0,00
		REALISASI	2.290.000,00	0,00	0,00	0,00
2.17.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	ANGGARAN	96.074.412,00	0,00	0,00	0,00
		REALISASI	63.523.192,00	0,00	0,00	0,00
2.17.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	ANGGARAN	270.654.453,00	472.898.000,00	0,00	0,00
		REALISASI	263.941.592,00	472.898.000,00	0,00	0,00
2.17.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	ANGGARAN	171.724.377,00	0,00	0,00	0,00
		REALISASI	168.568.526,00	0,00	0,00	0,00
2.17.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	ANGGARAN	41.526.405,00	0,00	0,00	0,00
		REALISASI	40.626.300,00	0,00	0,00	0,00
2.17.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	ANGGARAN	64.363.472,00	0,00	0,00	0,00
		REALISASI	62.315.226,00	0,00	0,00	0,00
2.17.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	ANGGARAN	19.492.500,00	0,00	0,00	0,00
		REALISASI	19.285.000,00	0,00	0,00	0,00
2.17.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	ANGGARAN	46.342.000,00	0,00	0,00	0,00
		REALISASI	46.342.000,00	0,00	0,00	0,00
2.17.01.2.13	Penataan Organisasi	ANGGARAN	3.382.635,00	0,00	0,00	0,00
		REALISASI	3.258.300,00	0,00	0,00	0,00
2.17.01.2.13.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah	ANGGARAN	3.382.635,00	0,00	0,00	0,00
		REALISASI	3.258.300,00	0,00	0,00	0,00
2.17.03	**PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI**	ANGGARAN	164.198.874,00	0,00	0,00	0,00
		REALISASI	162.924.264,00	0,00	0,00	0,00
2.17.03.2.01	Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota	ANGGARAN	164.198.874,00	0,00	0,00	0,00
		REALISASI	162.924.264,00	0,00	0,00	0,00
2.17.03.2.01.01	Pengawasan Kekuatan, Kesehatan, Kemandirian, Ketangguhan, serta Akuntabilitas Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	ANGGARAN	116.783.400,00	0,00	0,00	0,00
		REALISASI	116.773.900,00	0,00	0,00	0,00
2.17.03.2.01.02	Pemeriksaan Kepatuhan Koperasi Terhadap Peraturan Perundang-Undangan Kewenangan Kabupaten/Kota	ANGGARAN	47.415.474,00	0,00	0,00	0,00
		REALISASI	46.150.364,00	0,00	0,00	0,00
2.17.05	**PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN**	ANGGARAN	318.370.000,00	0,00	0,00	0,00
		REALISASI	318.370.000,00	0,00	0,00	0,00

KODE	URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN	ANGGARAN / REALISASI	KELOMPOK BELANJA			
			OPERASI	MODAL	TDK TERDUGA	TRANSFER
2.17.05.2.01	Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	ANGGARAN	238.800.000,00	0,00	0,00	0,00
		REALISASI	238.800.000,00	0,00	0,00	0,00
2.17.05.2.01.01	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi	ANGGARAN	238.800.000,00	0,00	0,00	0,00
		REALISASI	238.800.000,00	0,00	0,00	0,00
2.17.05.2.03	Pendidikan dan Pelatihan SDM Usaha Mikro dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	ANGGARAN	79.570.000,00	0,00	0,00	0,00
		REALISASI	79.570.000,00	0,00	0,00	0,00
2.17.05.2.03.01	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Usaha Mikro serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Usaha Mikro	ANGGARAN	79.570.000,00	0,00	0,00	0,00
		REALISASI	79.570.000,00	0,00	0,00	0,00
2.17.07	**PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)**	ANGGARAN	371.154.800,00	0,00	0,00	0,00
		REALISASI	370.158.615,00	0,00	0,00	0,00
2.17.07.2.01	Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan	ANGGARAN	371.154.800,00	0,00	0,00	0,00
		REALISASI	370.158.615,00	0,00	0,00	0,00
2.17.07.2.01.01	Pendataan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	ANGGARAN	371.154.800,00	0,00	0,00	0,00
		REALISASI	370.158.615,00	0,00	0,00	0,00
2.18	**PENANAMAN MODAL**	ANGGARAN	5.081.576.948,00	659.422.830,00	0,00	0,00
		REALISASI	4.714.816.675,00	645.459.500,00	0,00	0,00
2.18.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	ANGGARAN	3.420.181.004,00	618.004.290,00	0,00	0,00
		REALISASI	3.143.498.852,00	604.909.500,00	0,00	0,00
2.18.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	ANGGARAN	13.802.400,00	0,00	0,00	0,00
		REALISASI	13.802.400,00	0,00	0,00	0,00
2.18.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	ANGGARAN	4.027.400,00	0,00	0,00	0,00
		REALISASI	4.027.400,00	0,00	0,00	0,00
2.18.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	ANGGARAN	2.550.000,00	0,00	0,00	0,00
		REALISASI	2.550.000,00	0,00	0,00	0,00
2.18.01.2.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	ANGGARAN	1.700.000,00	0,00	0,00	0,00
		REALISASI	1.700.000,00	0,00	0,00	0,00
2.18.01.2.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	ANGGARAN	1.700.000,00	0,00	0,00	0,00
		REALISASI	1.700.000,00	0,00	0,00	0,00
2.18.01.2.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	ANGGARAN	1.700.000,00	0,00	0,00	0,00
		REALISASI	1.700.000,00	0,00	0,00	0,00
2.18.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	ANGGARAN	2.125.000,00	0,00	0,00	0,00
		REALISASI	2.125.000,00	0,00	0,00	0,00
2.18.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	ANGGARAN	2.354.118.295,00	0,00	0,00	0,00
		REALISASI	2.171.259.798,00	0,00	0,00	0,00

KODE	URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN	ANGGARAN / REALISASI	KELOMPOK BELANJA			
			OPERASI	MODAL	TDK TERDUGA	TRANSFER
2.18.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	ANGGARAN	2.349.640.295,00	0,00	0,00	0,00
		REALISASI	2.166.781.798,00	0,00	0,00	0,00
2.18.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	ANGGARAN	1.700.000,00	0,00	0,00	0,00
		REALISASI	1.700.000,00	0,00	0,00	0,00
2.18.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	ANGGARAN	2.778.000,00	0,00	0,00	0,00
		REALISASI	2.778.000,00	0,00	0,00	0,00
2.18.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	ANGGARAN	2.100.000,00	0,00	0,00	0,00
		REALISASI	2.080.000,00	0,00	0,00	0,00
2.18.01.2.03.06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	ANGGARAN	2.100.000,00	0,00	0,00	0,00
		REALISASI	2.080.000,00	0,00	0,00	0,00
2.18.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	ANGGARAN	108.684.700,00	0,00	0,00	0,00
		REALISASI	107.127.753,00	0,00	0,00	0,00
2.18.01.2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	ANGGARAN	41.714.400,00	0,00	0,00	0,00
		REALISASI	41.385.000,00	0,00	0,00	0,00
2.18.01.2.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	ANGGARAN	66.970.300,00	0,00	0,00	0,00
		REALISASI	65.742.753,00	0,00	0,00	0,00
2.18.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	ANGGARAN	355.672.304,00	94.195.290,00	0,00	0,00
		REALISASI	309.301.534,00	91.885.000,00	0,00	0,00
2.18.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	ANGGARAN	3.530.000,00	0,00	0,00	0,00
		REALISASI	3.507.000,00	0,00	0,00	0,00
2.18.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	ANGGARAN	3.885.000,00	94.195.290,00	0,00	0,00
		REALISASI	2.021.560,00	91.885.000,00	0,00	0,00
2.18.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	ANGGARAN	17.090.000,00	0,00	0,00	0,00
		REALISASI	11.780.000,00	0,00	0,00	0,00
2.18.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	ANGGARAN	6.596.400,00	0,00	0,00	0,00
		REALISASI	6.495.000,00	0,00	0,00	0,00
2.18.01.2.06.07	Penyediaan Bahan/Material	ANGGARAN	70.888.304,00	0,00	0,00	0,00
		REALISASI	64.721.800,00	0,00	0,00	0,00
2.18.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	ANGGARAN	6.468.800,00	0,00	0,00	0,00
		REALISASI	6.412.000,00	0,00	0,00	0,00
2.18.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	ANGGARAN	247.213.800,00	0,00	0,00	0,00
		REALISASI	214.364.174,00	0,00	0,00	0,00
2.18.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	ANGGARAN	0,00	523.809.000,00	0,00	0,00
		REALISASI	0,00	513.024.500,00	0,00	0,00
2.18.01.2.07.02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	ANGGARAN	0,00	523.809.000,00	0,00	0,00
		REALISASI	0,00	513.024.500,00	0,00	0,00
2.18.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	ANGGARAN	462.624.498,00	0,00	0,00	0,00
		REALISASI	423.178.637,00	0,00	0,00	0,00

KODE	URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN	ANGGARAN / REALISASI	KELOMPOK BELANJA			
			OPERASI	MODAL	TDK TERDUGA	TRANSFER
2.18.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	ANGGARAN	2.400.000,00	0,00	0,00	0,00
		REALISASI	2.400.000,00	0,00	0,00	0,00
2.18.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	ANGGARAN	130.482.150,00	0,00	0,00	0,00
		REALISASI	105.304.897,00	0,00	0,00	0,00
2.18.01.2.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	ANGGARAN	23.710.000,00	0,00	0,00	0,00
		REALISASI	23.310.000,00	0,00	0,00	0,00
2.18.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	ANGGARAN	306.032.348,00	0,00	0,00	0,00
		REALISASI	292.163.740,00	0,00	0,00	0,00
2.18.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	ANGGARAN	123.178.807,00	0,00	0,00	0,00
		REALISASI	116.748.730,00	0,00	0,00	0,00
2.18.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	ANGGARAN	110.658.007,00	0,00	0,00	0,00
		REALISASI	104.230.730,00	0,00	0,00	0,00
2.18.01.2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	ANGGARAN	12.520.800,00	0,00	0,00	0,00
		REALISASI	12.518.000,00	0,00	0,00	0,00
2.18.01.2.13	Penataan Organisasi	ANGGARAN	0,00	0,00	0,00	0,00
		REALISASI	0,00	0,00	0,00	0,00
2.18.01.2.13.03	Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	ANGGARAN	0,00	0,00	0,00	0,00
		REALISASI	0,00	0,00	0,00	0,00
2.18.01.2.13.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah	ANGGARAN	0,00	0,00	0,00	0,00
		REALISASI	0,00	0,00	0,00	0,00
2.18.02	**PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL**	ANGGARAN	234.686.730,00	21.295.350,00	0,00	0,00
		REALISASI	218.169.570,00	21.150.000,00	0,00	0,00
2.18.02.2.01	Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	ANGGARAN	131.100.000,00	0,00	0,00	0,00
		REALISASI	123.945.000,00	0,00	0,00	0,00
2.18.02.2.01.01	Penetapan Kebijakan Daerah Mengenai Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	ANGGARAN	131.100.000,00	0,00	0,00	0,00
		REALISASI	123.945.000,00	0,00	0,00	0,00
2.18.02.2.02	Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	ANGGARAN	103.586.730,00	21.295.350,00	0,00	0,00
		REALISASI	94.224.570,00	21.150.000,00	0,00	0,00
2.18.02.2.02.01	Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	ANGGARAN	40.811.630,00	0,00	0,00	0,00
		REALISASI	33.362.138,00	0,00	0,00	0,00
2.18.02.2.02.02	Penyediaan Peta Potensi dan Peluang Usaha Kabupaten/Kota	ANGGARAN	62.775.100,00	21.295.350,00	0,00	0,00
		REALISASI	60.862.432,00	21.150.000,00	0,00	0,00
2.18.03	**PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL**	ANGGARAN	279.488.632,00	0,00	0,00	0,00
		REALISASI	267.608.454,00	0,00	0,00	0,00
2.18.03.2.01	Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	ANGGARAN	279.488.632,00	0,00	0,00	0,00
		REALISASI	267.608.454,00	0,00	0,00	0,00

KODE	URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN	ANGGARAN / REALISASI	KELOMPOK BELANJA			
			OPERASI	MODAL	TDK TERDUGA	TRANSFER
2.18.03.2.01.01	Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal	ANGGARAN	73.110.200,00	0,00	0,00	0,00
		REALISASI	67.841.019,00	0,00	0,00	0,00
2.18.03.2.01.02	Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	ANGGARAN	206.378.432,00	0,00	0,00	0,00
		REALISASI	199.767.435,00	0,00	0,00	0,00
2.18.04	**PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL**	ANGGARAN	494.192.290,00	20.123.190,00	0,00	0,00
		REALISASI	458.244.683,00	19.400.000,00	0,00	0,00
2.18.04.2.01	Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	ANGGARAN	494.192.290,00	20.123.190,00	0,00	0,00
		REALISASI	458.244.683,00	19.400.000,00	0,00	0,00
2.18.04.2.01.01	Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Nonperizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	ANGGARAN	244.477.998,00	20.123.190,00	0,00	0,00
		REALISASI	222.642.528,00	19.400.000,00	0,00	0,00
2.18.04.2.01.02	Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal	ANGGARAN	167.284.528,00	0,00	0,00	0,00
		REALISASI	162.056.435,00	0,00	0,00	0,00
2.18.04.2.01.03	Penyediaan Layanan Konsultasi dan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat Terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan	ANGGARAN	82.429.764,00	0,00	0,00	0,00
		REALISASI	73.545.720,00	0,00	0,00	0,00
2.18.05	**PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL**	ANGGARAN	599.174.428,00	0,00	0,00	0,00
		REALISASI	574.548.852,00	0,00	0,00	0,00
2.18.05.2.01	Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	ANGGARAN	599.174.428,00	0,00	0,00	0,00
		REALISASI	574.548.852,00	0,00	0,00	0,00
2.18.05.2.01.01	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal	ANGGARAN	129.674.428,00	0,00	0,00	0,00
		REALISASI	127.763.752,00	0,00	0,00	0,00
2.18.05.2.01.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal	ANGGARAN	388.396.400,00	0,00	0,00	0,00
		REALISASI	378.358.400,00	0,00	0,00	0,00
2.18.05.2.01.03	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal	ANGGARAN	81.103.600,00	0,00	0,00	0,00
		REALISASI	68.426.700,00	0,00	0,00	0,00
2.18.06	**PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL**	ANGGARAN	53.853.864,00	0,00	0,00	0,00
		REALISASI	52.746.264,00	0,00	0,00	0,00
2.18.06.2.01	Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	ANGGARAN	53.853.864,00	0,00	0,00	0,00
		REALISASI	52.746.264,00	0,00	0,00	0,00
2.18.06.2.01.01	Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	ANGGARAN	53.853.864,00	0,00	0,00	0,00
		REALISASI	52.746.264,00	0,00	0,00	0,00
2.19	**KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA**	ANGGARAN	7.228.602.398,00	675.088.889,00	0,00	0,00
		REALISASI	7.105.751.164,00	673.054.120,00	0,00	0,00
2.19.02	**PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN**	ANGGARAN	2.437.725.636,00	10.550.000,00	0,00	0,00
		REALISASI	2.414.077.648,00	10.550.000,00	0,00	0,00

KODE	URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN	ANGGARAN / REALISASI	KELOMPOK BELANJA			
			OPERASI	MODAL	TDK TERDUGA	TRANSFER
2.19.02.2.01	Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota	ANGGARAN	1.896.830.560,00	10.550.000,00	0,00	0,00
		REALISASI	1.885.504.058,00	10.550.000,00	0,00	0,00
2.19.02.2.01.03	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Pemuda Kader Kabupaten/Kota	ANGGARAN	632.938.000,00	0,00	0,00	0,00
		REALISASI	632.013.972,00	0,00	0,00	0,00
2.19.02.2.01.04	Pemenuhan Hak Setiap Pemuda Melalui Perlindungan Pemuda, Advokasi, Akses Pengembangan Diri, Penggunaan Prasarana dan Sarana Tanpa Diskiriminatif, Partisipasi Pemuda dalam Proses Perencanaan, Pelaksanaan Evaluasi dan Pengambilan Keputusan Program Strategis Kepemudaan	ANGGARAN	148.849.060,00	10.550.000,00	0,00	0,00
		REALISASI	148.827.886,00	10.550.000,00	0,00	0,00
2.19.02.2.01.07	Pemberian Penghargaan Pemuda dan Organisasi Pemuda yang Berjasa dan/atau Berprestasi	ANGGARAN	105.246.400,00	0,00	0,00	0,00
		REALISASI	99.991.400,00	0,00	0,00	0,00
2.19.02.2.01.08	Peningkatan Kepemimpinan, Kepeloporan dan Kesukarelawanan Pemuda	ANGGARAN	100.000.000,00	0,00	0,00	0,00
		REALISASI	100.000.000,00	0,00	0,00	0,00
2.19.02.2.01.09	Penyelenggaraan Seleksi dan Pelatihan Pasukan Pengibar Bendera	ANGGARAN	909.797.100,00	0,00	0,00	0,00
		REALISASI	904.670.800,00	0,00	0,00	0,00
2.19.02.2.02	Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	ANGGARAN	540.895.076,00	0,00	0,00	0,00
		REALISASI	528.573.590,00	0,00	0,00	0,00
2.19.02.2.02.01	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pemberdayaan Pemuda atau Organisasi Kepemudaan Melalui Kemitraan dengan Dunia Usaha	ANGGARAN	470.895.076,00	0,00	0,00	0,00
		REALISASI	458.573.590,00	0,00	0,00	0,00
2.19.02.2.02.02	Peningkatan Kapasitas Pemuda dan Organisasi Kepemudaan Kabupaten/Kota	ANGGARAN	70.000.000,00	0,00	0,00	0,00
		REALISASI	70.000.000,00	0,00	0,00	0,00
2.19.03	**PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN**	ANGGARAN	3.990.286.762,00	664.538.889,00	0,00	0,00
		REALISASI	3.891.083.516,00	662.504.120,00	0,00	0,00
2.19.03.2.01	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	ANGGARAN	207.174.936,00	165.288.905,00	0,00	0,00
		REALISASI	124.391.056,00	164.990.000,00	0,00	0,00
2.19.03.2.01.03	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Penyediaan Sarana dan Prasarana Olahraga Kabupaten/Kota	ANGGARAN	207.174.936,00	165.288.905,00	0,00	0,00
		REALISASI	124.391.056,00	164.990.000,00	0,00	0,00
2.19.03.2.02	Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	ANGGARAN	1.376.216.826,00	1.300.000,00	0,00	0,00
		REALISASI	1.366.571.960,00	1.300.000,00	0,00	0,00
2.19.03.2.02.02	Penyelenggaraan Kejuaraan dan Pekan Olahraga Tingkat Kabupaten/Kota	ANGGARAN	438.877.446,00	1.300.000,00	0,00	0,00
		REALISASI	438.003.500,00	1.300.000,00	0,00	0,00
2.19.03.2.02.03	Partisipasi dan Keikutsertaan dalam Penyelenggaraan Kejuaraan	ANGGARAN	937.339.380,00	0,00	0,00	0,00
		REALISASI	928.568.460,00	0,00	0,00	0,00

KODE	URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN	ANGGARAN / REALISASI	KELOMPOK BELANJA			
			OPERASI	MODAL	TDK TERDUGA	TRANSFER
2.19.03.2.04	Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga		800.000.000,00	0,00	0,00	0,00
			800.000.000,00	0,00	0,00	0,00
2.19.03.2.04.02	Pengembangan Organisasi Keolahragaan		800.000.000,00	0,00	0,00	0,00
			800.000.000,00	0,00	0,00	0,00
2.19.03.2.05	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi		1.606.895.000,00	497.949.984,00	0,00	0,00
			1.600.120.500,00	496.214.120,00	0,00	0,00
2.19.03.2.05.03	Penyediaan, Pengembangan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Olahraga Rekreasi		1.006.895.000,00	497.949.984,00	0,00	0,00
			1.000.120.500,00	496.214.120,00	0,00	0,00
2.19.03.2.05.04	Pengembangan Olahraga Wisata, Tantangan dan Petualangan		600.000.000,00	0,00	0,00	0,00
			600.000.000,00	0,00	0,00	0,00
2.19.04	**PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN**		800.590.000,00	0,00	0,00	0,00
			800.590.000,00	0,00	0,00	0,00
2.19.04.2.01	Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan		800.590.000,00	0,00	0,00	0,00
			800.590.000,00	0,00	0,00	0,00
2.19.04.2.01.05	Penyelenggaraan Kegiatan Kepramukaan Tingkat Daerah		800.590.000,00	0,00	0,00	0,00
			800.590.000,00	0,00	0,00	0,00
2.20	**STATISTIK**		157.324.836,00	0,00	0,00	0,00
			138.302.264,00	0,00	0,00	0,00
2.20.02	**PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL**		157.324.836,00	0,00	0,00	0,00
			138.302.264,00	0,00	0,00	0,00
2.20.02.2.01	Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota		157.324.836,00	0,00	0,00	0,00
			138.302.264,00	0,00	0,00	0,00
2.20.02.2.01.01	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral		87.029.974,00	0,00	0,00	0,00
			85.880.764,00	0,00	0,00	0,00
2.20.02.2.01.04	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Statistik Sektoral		70.294.862,00	0,00	0,00	0,00
			52.421.500,00	0,00	0,00	0,00
2.21	**PERSANDIAN**		90.164.228,00	17.881.091,00	0,00	0,00
			77.969.406,00	17.881.091,00	0,00	0,00
2.21.02	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI**		90.164.228,00	17.881.091,00	0,00	0,00
			77.969.406,00	17.881.091,00	0,00	0,00
2.21.02.2.01	Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota		90.164.228,00	17.881.091,00	0,00	0,00
			77.969.406,00	17.881.091,00	0,00	0,00
2.21.02.2.01.01	Penetapan Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota		6.626.600,00	0,00	0,00	0,00
			5.018.800,00	0,00	0,00	0,00
2.21.02.2.01.02	Pelaksanaan Analisis Kebutuhan dan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota		83.537.628,00	0,00	0,00	0,00
			72.950.606,00	0,00	0,00	0,00

KODE	URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN	ANGGARAN / REALISASI	KELOMPOK BELANJA			
			OPERASI	MODAL	TDK TERDUGA	TRANSFER
2.21.02.2.01.04	Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	ANGGARAN	0,00	17.881.091,00	0,00	0,00
		REALISASI	0,00	17.881.091,00	0,00	0,00
2.21.02.2.02	Penetapan Pola Hubungan Komunikasi Sandi Antar Perangkat Daerah Kabupaten/Kota	ANGGARAN	0,00	0,00	0,00	0,00
		REALISASI	0,00	0,00	0,00	0,00
2.21.02.2.02.01	Operasionalisasi Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	ANGGARAN	0,00	0,00	0,00	0,00
		REALISASI	0,00	0,00	0,00	0,00
2.22	**KEBUDAYAAN**	ANGGARAN	4.792.061.103,00	667.617.385,00	0,00	0,00
		REALISASI	4.710.263.867,00	660.093.100,00	0,00	0,00
2.22.02	**PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN**	ANGGARAN	3.702.318.790,00	36.000.000,00	0,00	0,00
		REALISASI	3.669.796.265,00	32.700.000,00	0,00	0,00
2.22.02.2.01	Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	ANGGARAN	1.152.318.790,00	36.000.000,00	0,00	0,00
		REALISASI	1.124.851.865,00	32.700.000,00	0,00	0,00
2.22.02.2.01.01	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan	ANGGARAN	1.152.318.790,00	36.000.000,00	0,00	0,00
		REALISASI	1.124.851.865,00	32.700.000,00	0,00	0,00
2.22.02.2.02	Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	ANGGARAN	2.550.000.000,00	0,00	0,00	0,00
		REALISASI	2.544.944.400,00	0,00	0,00	0,00
2.22.02.2.02.01	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Tradisi Budaya	ANGGARAN	1.000.000.000,00	0,00	0,00	0,00
		REALISASI	994.944.400,00	0,00	0,00	0,00
2.22.02.2.02.02	Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Tradisional	ANGGARAN	1.550.000.000,00	0,00	0,00	0,00
		REALISASI	1.550.000.000,00	0,00	0,00	0,00
2.22.03	**PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL**	ANGGARAN	255.483.100,00	413.450.205,00	0,00	0,00
		REALISASI	249.368.500,00	410.783.600,00	0,00	0,00
2.22.03.2.01	Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	ANGGARAN	255.483.100,00	413.450.205,00	0,00	0,00
		REALISASI	249.368.500,00	410.783.600,00	0,00	0,00
2.22.03.2.01.01	Peningkatan Pendidikan dan Pelatihan Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional	ANGGARAN	112.188.500,00	0,00	0,00	0,00
		REALISASI	106.425.000,00	0,00	0,00	0,00
2.22.03.2.01.03	Peningkatan Kapasitas Tata Kelola Lembaga Kesenian Tradisional	ANGGARAN	143.294.600,00	413.450.205,00	0,00	0,00
		REALISASI	142.943.500,00	410.783.600,00	0,00	0,00
2.22.04	**PROGRAM PEMBINAAN SEJARAH**	ANGGARAN	221.127.107,00	0,00	0,00	0,00
		REALISASI	208.399.464,00	0,00	0,00	0,00
2.22.04.2.01	Pembinaan Sejarah Lokal dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	ANGGARAN	221.127.107,00	0,00	0,00	0,00
		REALISASI	208.399.464,00	0,00	0,00	0,00
2.22.04.2.01.03	Peningkatan Akses Masyarakat Terhadap Data dan Informasi Sejarah	ANGGARAN	221.127.107,00	0,00	0,00	0,00
		REALISASI	208.399.464,00	0,00	0,00	0,00
2.22.05	**PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA**	ANGGARAN	611.434.036,00	214.705.080,00	0,00	0,00
		REALISASI	581.004.638,00	213.909.500,00	0,00	0,00
2.22.05.2.01	Penetapan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota	ANGGARAN	70.378.900,00	0,00	0,00	0,00
		REALISASI	70.050.731,00	0,00	0,00	0,00

KODE	URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN	ANGGARAN / REALISASI	KELOMPOK BELANJA			
			OPERASI	MODAL	TDK TERDUGA	TRANSFER
2.22.05.2.01.01	Pendaftaran Objek Diduga Cagar Budaya		70.378.900,00	0,00	0,00	0,00
			70.050.731,00	0,00	0,00	0,00
2.22.05.2.02	Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota		541.055.136,00	214.705.080,00	0,00	0,00
			510.953.907,00	213.909.500,00	0,00	0,00
2.22.05.2.02.01	Pelindungan Cagar Budaya		269.681.728,00	0,00	0,00	0,00
			247.123.462,00	0,00	0,00	0,00
2.22.05.2.02.02	Pengembangan Cagar Budaya		271.373.408,00	214.705.080,00	0,00	0,00
			263.830.445,00	213.909.500,00	0,00	0,00
2.22.06	**PROGRAM PENGELOLAAN PERMUSEUMAN**		1.698.070,00	3.462.100,00	0,00	0,00
			1.695.000,00	2.700.000,00	0,00	0,00
2.22.06.2.01	Pengelolaan Museum Kabupaten/Kota		1.698.070,00	3.462.100,00	0,00	0,00
			1.695.000,00	2.700.000,00	0,00	0,00
2.22.06.2.01.04	Penyediaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Museum		1.698.070,00	3.462.100,00	0,00	0,00
			1.695.000,00	2.700.000,00	0,00	0,00
2.23	**PERPUSTAKAAN**		5.880.447.948,00	12.871.240.057,00	0,00	0,00
			5.608.841.211,00	12.758.040.591,00	0,00	0,00
2.23.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**		4.202.356.326,00	87.956.955,00	0,00	0,00
			3.981.948.220,00	85.775.000,00	0,00	0,00
2.23.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		212.690.756,00	0,00	0,00	0,00
			208.036.256,00	0,00	0,00	0,00
2.23.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		75.501.364,00	0,00	0,00	0,00
			74.089.864,00	0,00	0,00	0,00
2.23.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		137.189.392,00	0,00	0,00	0,00
			133.946.392,00	0,00	0,00	0,00
2.23.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		2.958.512.542,00	0,00	0,00	0,00
			2.768.726.348,00	0,00	0,00	0,00
2.23.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		2.938.619.483,00	0,00	0,00	0,00
			2.749.779.339,00	0,00	0,00	0,00
2.23.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD		12.191.102,00	0,00	0,00	0,00
			11.406.002,00	0,00	0,00	0,00
2.23.01.2.02.08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran		7.701.957,00	0,00	0,00	0,00
			7.541.007,00	0,00	0,00	0,00
2.23.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah		9.409.920,00	0,00	0,00	0,00
			9.214.614,00	0,00	0,00	0,00
2.23.01.2.03.05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD		9.409.920,00	0,00	0,00	0,00
			9.214.614,00	0,00	0,00	0,00
2.23.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		251.298.820,00	0,00	0,00	0,00
			235.533.436,00	0,00	0,00	0,00

KODE	URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN	ANGGARAN / REALISASI / KELOMPOK BELANJA			
		OPERASI	MODAL	TDK TERDUGA	TRANSFER
2.23.01.2.05.04	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	68.528.028,00	0,00	0,00	0,00
		66.717.828,00	0,00	0,00	0,00
2.23.01.2.05.05	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	101.390.292,00	0,00	0,00	0,00
		98.746.092,00	0,00	0,00	0,00
2.23.01.2.05.11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	81.380.500,00	0,00	0,00	0,00
		70.069.516,00	0,00	0,00	0,00
2.23.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	531.365.046,00	87.956.955,00	0,00	0,00
		527.995.297,00	85.775.000,00	0,00	0,00
2.23.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	12.868.785,00	0,00	0,00	0,00
		12.852.135,00	0,00	0,00	0,00
2.23.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	0,00	87.956.955,00	0,00	0,00
		0,00	85.775.000,00	0,00	0,00
2.23.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	117.586.754,00	0,00	0,00	0,00
		114.785.313,00	0,00	0,00	0,00
2.23.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	21.129.318,00	0,00	0,00	0,00
		21.093.437,00	0,00	0,00	0,00
2.23.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	14.985.000,00	0,00	0,00	0,00
		14.984.400,00	0,00	0,00	0,00
2.23.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	7.700.400,00	0,00	0,00	0,00
		7.650.000,00	0,00	0,00	0,00
2.23.01.2.06.07	Penyediaan Bahan/Material	55.466.589,00	0,00	0,00	0,00
		55.126.485,00	0,00	0,00	0,00
2.23.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	301.628.200,00	0,00	0,00	0,00
		301.503.527,00	0,00	0,00	0,00
2.23.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	128.182.792,00	0,00	0,00	0,00
		125.710.544,00	0,00	0,00	0,00
2.23.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	4.000.000,00	0,00	0,00	0,00
		4.000.000,00	0,00	0,00	0,00
2.23.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	124.182.792,00	0,00	0,00	0,00
		121.710.544,00	0,00	0,00	0,00
2.23.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	110.896.450,00	0,00	0,00	0,00
		106.731.725,00	0,00	0,00	0,00
2.23.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	40.398.507,00	0,00	0,00	0,00
		38.153.382,00	0,00	0,00	0,00
2.23.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	43.386.415,00	0,00	0,00	0,00
		41.518.500,00	0,00	0,00	0,00

KODE	URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN	ANGGARAN / REALISASI	KELOMPOK BELANJA			
			OPERASI	MODAL	TDK TERDUGA	TRANSFER
2.23.01.2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	ANGGARAN	27.111.528,00	0,00	0,00	0,00
		REALISASI	27.059.843,00	0,00	0,00	0,00
2.23.02	**PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN**	ANGGARAN	1.598.802.321,00	12.783.283.102,00	0,00	0,00
		REALISASI	1.547.739.850,00	12.672.265.591,00	0,00	0,00
2.23.02.2.01	Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	ANGGARAN	273.121.673,00	1.115.733.840,00	0,00	0,00
		REALISASI	272.121.334,00	1.107.501.991,00	0,00	0,00
2.23.02.2.01.01	Pengembangan dan Pemeliharaan Layanan Perpustakaan Elektronik	ANGGARAN	61.656.300,00	368.831.340,00	0,00	0,00
		REALISASI	61.584.502,00	368.751.500,00	0,00	0,00
2.23.02.2.01.02	Pengembangan Perpustakaan di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	ANGGARAN	0,00	547.402.500,00	0,00	0,00
		REALISASI	0,00	539.309.991,00	0,00	0,00
2.23.02.2.01.08	Pengembangan Bahan Pustaka	ANGGARAN	65.826.550,00	0,00	0,00	0,00
		REALISASI	64.981.150,00	0,00	0,00	0,00
2.23.02.2.01.09	Pengelolaan dan Pengembangan Bahan Pustaka	ANGGARAN	75.968.000,00	199.500.000,00	0,00	0,00
		REALISASI	75.889.665,00	199.440.500,00	0,00	0,00
2.23.02.2.01.10	Penyusunan Data dan Informasi Perpustakaan, Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	ANGGARAN	69.670.823,00	0,00	0,00	0,00
		REALISASI	69.666.017,00	0,00	0,00	0,00
2.23.02.2.02	Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	ANGGARAN	1.325.680.648,00	11.667.549.262,00	0,00	0,00
		REALISASI	1.275.618.516,00	11.564.763.600,00	0,00	0,00
2.23.02.2.02.01	Sosiaisasi Budaya Baca dan Literasi pada Satuan Pendidikan Dasar dan Pendidikan Khusus serta Masyarakat	ANGGARAN	134.476.129,00	0,00	0,00	0,00
		REALISASI	131.493.130,00	0,00	0,00	0,00
2.23.02.2.02.02	Pembangunan dan Pemeliharaan Sarana Perpustakaan di Tempat-Tempat Umum yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	ANGGARAN	909.360.978,00	11.667.549.262,00	0,00	0,00
		REALISASI	865.029.911,00	11.564.763.600,00	0,00	0,00
2.23.02.2.02.04	Pengembangan Literasi Berbasis Inklusi Sosial	ANGGARAN	143.531.244,00	0,00	0,00	0,00
		REALISASI	142.674.054,00	0,00	0,00	0,00
2.23.02.2.02.05	Pemilihan Duta Baca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	ANGGARAN	138.312.297,00	0,00	0,00	0,00
		REALISASI	136.421.421,00	0,00	0,00	0,00
2.23.03	**PROGRAM PELESTARIAN KOLEKSI NASIONAL DAN NASKAH KUNO**	ANGGARAN	79.289.301,00	0,00	0,00	0,00
		REALISASI	79.153.141,00	0,00	0,00	0,00
2.23.03.2.02	Pengembangan Koleksi Budaya Etnis Nusantara yang Ditemukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	ANGGARAN	79.289.301,00	0,00	0,00	0,00
		REALISASI	79.153.141,00	0,00	0,00	0,00
2.23.03.2.02.01	Seleksi dan Pengadaan Koleksi Budaya Etnis Nusantara	ANGGARAN	43.175.644,00	0,00	0,00	0,00
		REALISASI	43.132.400,00	0,00	0,00	0,00
2.23.03.2.02.02	Pengolahan dan Penyiangan Koleksi Budaya Etnis Nusantara	ANGGARAN	36.113.657,00	0,00	0,00	0,00
		REALISASI	36.020.741,00	0,00	0,00	0,00

KODE	URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN	ANGGARAN / REALISASI	KELOMPOK BELANJA			
			OPERASI	MODAL	TDK TERDUGA	TRANSFER
2.24	**KEARSIPAN**		621.290.762,00	0,00	0,00	0,00
			616.425.423,00	0,00	0,00	0,00
2.24.02	**PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP**		621.290.762,00	0,00	0,00	0,00
			616.425.423,00	0,00	0,00	0,00
2.24.02.2.01	Pengelolaan Arsip Dinamis Daerah Kabupaten/Kota		426.766.981,00	0,00	0,00	0,00
			423.392.896,00	0,00	0,00	0,00
2.24.02.2.01.01	Penciptaan dan Penggunaan Arsip Dinamis		162.020.477,00	0,00	0,00	0,00
			160.576.453,00	0,00	0,00	0,00
2.24.02.2.01.02	Pemeliharaan dan Penyusutan Arsip Dinamis		18.422.436,00	0,00	0,00	0,00
			17.896.336,00	0,00	0,00	0,00
2.24.02.2.01.03	Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Kabupaten/Kota		246.324.068,00	0,00	0,00	0,00
			244.920.107,00	0,00	0,00	0,00
2.24.02.2.02	Pengelolaan Arsip Statis Daerah Kabupaten/Kota		44.523.781,00	0,00	0,00	0,00
			44.459.027,00	0,00	0,00	0,00
2.24.02.2.02.02	Akuisisi, Pengolahan, Preservasi, dan Akses Arsip Statis		44.523.781,00	0,00	0,00	0,00
			44.459.027,00	0,00	0,00	0,00
2.24.02.2.03	Pengelolaan Simpul Jaringan Informasi Kearsipan Nasional Tingkat Kabupaten/Kota		150.000.000,00	0,00	0,00	0,00
			148.573.500,00	0,00	0,00	0,00
2.24.02.2.03.02	Pemberdayaan Kapasitas Unit Kearsipan dan Lembaga Kearsipan Daerah Kabupaten/Kota		150.000.000,00	0,00	0,00	0,00
			148.573.500,00	0,00	0,00	0,00
3	**URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN**		51.123.806.406,00	5.923.814.569,00	0,00	0,00
			49.007.005.536,95	5.852.576.042,00	0,00	0,00
3.25	**KELAUTAN DAN PERIKANAN**		7.447.894.451,00	495.481.376,00	0,00	0,00
			7.179.457.479,95	489.201.750,00	0,00	0,00
3.25.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**		4.801.343.289,00	268.994.143,00	0,00	0,00
			4.597.322.618,00	263.757.000,00	0,00	0,00
3.25.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		91.086.088,00	0,00	0,00	0,00
			88.030.028,00	0,00	0,00	0,00
3.25.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		42.508.824,00	0,00	0,00	0,00
			41.480.764,00	0,00	0,00	0,00
3.25.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		48.577.264,00	0,00	0,00	0,00
			46.549.264,00	0,00	0,00	0,00
3.25.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		3.598.994.887,00	0,00	0,00	0,00
			3.467.573.170,00	0,00	0,00	0,00
3.25.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		3.527.422.669,00	0,00	0,00	0,00
			3.398.515.642,00	0,00	0,00	0,00
3.25.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD		71.572.218,00	0,00	0,00	0,00
			69.057.528,00	0,00	0,00	0,00

KODE	URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN	ANGGARAN / REALISASI	KELOMPOK BELANJA			
			OPERASI	MODAL	TDK TERDUGA	TRANSFER
3.25.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	ANGGARAN	2.348.760,00	0,00	0,00	0,00
		REALISASI	2.109.300,00	0,00	0,00	0,00
3.25.01.2.03.04	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	ANGGARAN	2.348.760,00	0,00	0,00	0,00
		REALISASI	2.109.300,00	0,00	0,00	0,00
3.25.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	ANGGARAN	152.315.618,00	0,00	0,00	0,00
		REALISASI	130.581.528,00	0,00	0,00	0,00
3.25.01.2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	ANGGARAN	56.658.840,00	0,00	0,00	0,00
		REALISASI	51.223.000,00	0,00	0,00	0,00
3.25.01.2.05.03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	ANGGARAN	72.527.928,00	0,00	0,00	0,00
		REALISASI	69.138.528,00	0,00	0,00	0,00
3.25.01.2.05.11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	ANGGARAN	23.128.850,00	0,00	0,00	0,00
		REALISASI	10.220.000,00	0,00	0,00	0,00
3.25.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	ANGGARAN	526.940.260,00	113.401.385,00	0,00	0,00
		REALISASI	497.422.350,00	108.454.500,00	0,00	0,00
3.25.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	ANGGARAN	13.890.540,00	0,00	0,00	0,00
		REALISASI	10.135.000,00	0,00	0,00	0,00
3.25.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	ANGGARAN	13.597.070,00	113.401.385,00	0,00	0,00
		REALISASI	12.741.950,00	108.454.500,00	0,00	0,00
3.25.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	ANGGARAN	7.762.500,00	0,00	0,00	0,00
		REALISASI	7.749.000,00	0,00	0,00	0,00
3.25.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	ANGGARAN	29.912.280,00	0,00	0,00	0,00
		REALISASI	18.311.900,00	0,00	0,00	0,00
3.25.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	ANGGARAN	9.936.000,00	0,00	0,00	0,00
		REALISASI	7.860.000,00	0,00	0,00	0,00
3.25.01.2.06.07	Penyediaan Bahan/Material	ANGGARAN	85.739.756,00	0,00	0,00	0,00
		REALISASI	76.324.400,00	0,00	0,00	0,00
3.25.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	ANGGARAN	9.056.490,00	0,00	0,00	0,00
		REALISASI	8.484.000,00	0,00	0,00	0,00
3.25.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	ANGGARAN	357.045.624,00	0,00	0,00	0,00
		REALISASI	355.816.100,00	0,00	0,00	0,00
3.25.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	ANGGARAN	0,00	155.592.758,00	0,00	0,00
		REALISASI	0,00	155.302.500,00	0,00	0,00
3.25.01.2.07.11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	ANGGARAN	0,00	155.592.758,00	0,00	0,00
		REALISASI	0,00	155.302.500,00	0,00	0,00
3.25.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	ANGGARAN	249.413.594,00	0,00	0,00	0,00
		REALISASI	241.025.112,00	0,00	0,00	0,00
3.25.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	ANGGARAN	4.260.000,00	0,00	0,00	0,00
		REALISASI	4.260.000,00	0,00	0,00	0,00

KODE	URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN	ANGGARAN / REALISASI	KELOMPOK BELANJA			
			OPERASI	MODAL	TDK TERDUGA	TRANSFER
3.25.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		46.925.500,00	0,00	0,00	0,00
			43.490.616,00	0,00	0,00	0,00
3.25.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		198.228.094,00	0,00	0,00	0,00
			193.274.496,00	0,00	0,00	0,00
3.25.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		180.244.082,00	0,00	0,00	0,00
			170.581.130,00	0,00	0,00	0,00
3.25.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		128.076.407,00	0,00	0,00	0,00
			124.366.425,00	0,00	0,00	0,00
3.25.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya		23.967.675,00	0,00	0,00	0,00
			21.360.000,00	0,00	0,00	0,00
3.25.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		28.200.000,00	0,00	0,00	0,00
			24.854.705,00	0,00	0,00	0,00
3.25.03	**PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP**		372.801.622,00	0,00	0,00	0,00
			357.711.892,00	0,00	0,00	0,00
3.25.03.2.01	Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota		131.551.692,00	0,00	0,00	0,00
			127.028.892,00	0,00	0,00	0,00
3.25.03.2.01.01	Penyediaan Data dan Informasi Sumber Daya Ikan		131.551.692,00	0,00	0,00	0,00
			127.028.892,00	0,00	0,00	0,00
3.25.03.2.02	Pemberdayaan Nelayan Kecil dalam Daerah Kabupaten/Kota		241.249.930,00	0,00	0,00	0,00
			230.683.000,00	0,00	0,00	0,00
3.25.03.2.02.01	Pengembangan Kapasitas Nelayan Kecil		241.249.930,00	0,00	0,00	0,00
			230.683.000,00	0,00	0,00	0,00
3.25.04	**PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA**		2.087.561.885,00	226.487.233,00	0,00	0,00
			2.049.915.091,95	225.444.750,00	0,00	0,00
3.25.04.2.02	Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil		330.008.856,00	0,00	0,00	0,00
			325.438.856,00	0,00	0,00	0,00
3.25.04.2.02.02	Pelaksanaan Fasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan Pembudi Daya Ikan Kecil		330.008.856,00	0,00	0,00	0,00
			325.438.856,00	0,00	0,00	0,00
3.25.04.2.04	Pengelolaan Pembudidayaan Ikan		1.757.553.029,00	226.487.233,00	0,00	0,00
			1.724.476.235,95	225.444.750,00	0,00	0,00
3.25.04.2.04.01	Penyediaan Data dan Informasi Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota		80.185.464,00	0,00	0,00	0,00
			75.015.864,00	0,00	0,00	0,00
3.25.04.2.04.02	Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota		183.268.988,00	202.289.233,00	0,00	0,00
			180.028.173,95	201.387.750,00	0,00	0,00
3.25.04.2.04.03	Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota		878.426.268,00	24.198.000,00	0,00	0,00
			863.186.268,00	24.057.000,00	0,00	0,00

KODE	URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN	ANGGARAN / REALISASI	KELOMPOK BELANJA			
			OPERASI	MODAL	TDK TERDUGA	TRANSFER
3.25.04.2.04.06	Perencanaan, Pengembangan, Pemanfaatan dan Perlindungan Lahan untuk Pembudidayaan Ikan di Darat		615.672.309,00	0,00	0,00	0,00
			606.245.930,00	0,00	0,00	0,00
3.25.06	**PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN**		186.187.655,00	0,00	0,00	0,00
			174.507.878,00	0,00	0,00	0,00
3.25.06.2.01	Penerbitan Tanda Daftar Usaha Pengolahan Hasil Perikanan bagi Usaha Skala Mikro dan Kecil		98.730.000,00	0,00	0,00	0,00
			94.918.028,00	0,00	0,00	0,00
3.25.06.2.01.01	Penyediaan Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota		98.730.000,00	0,00	0,00	0,00
			94.918.028,00	0,00	0,00	0,00
3.25.06.2.03	Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota		87.457.655,00	0,00	0,00	0,00
			79.589.850,00	0,00	0,00	0,00
3.25.06.2.03.01	Peningkatan Ketersediaan Ikan untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota		87.457.655,00	0,00	0,00	0,00
			79.589.850,00	0,00	0,00	0,00
3.26	**PARIWISATA**		5.174.870.526,00	384.465.553,00	0,00	0,00
			4.383.520.299,00	383.589.500,00	0,00	0,00
3.26.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**		4.610.624.721,00	384.465.553,00	0,00	0,00
			3.825.649.047,00	383.589.500,00	0,00	0,00
3.26.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		49.176.580,00	0,00	0,00	0,00
			43.877.100,00	0,00	0,00	0,00
3.26.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD		30.854.700,00	0,00	0,00	0,00
			28.065.800,00	0,00	0,00	0,00
3.26.01.2.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD		6.141.000,00	0,00	0,00	0,00
			5.139.000,00	0,00	0,00	0,00
3.26.01.2.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD		5.413.400,00	0,00	0,00	0,00
			5.413.300,00	0,00	0,00	0,00
3.26.01.2.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD		6.767.480,00	0,00	0,00	0,00
			5.259.000,00	0,00	0,00	0,00
3.26.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		3.565.506.125,00	0,00	0,00	0,00
			2.819.344.812,00	0,00	0,00	0,00
3.26.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		3.312.316.777,00	0,00	0,00	0,00
			2.582.214.698,00	0,00	0,00	0,00
3.26.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD		9.689.500,00	0,00	0,00	0,00
			7.364.674,00	0,00	0,00	0,00
3.26.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD		243.499.848,00	0,00	0,00	0,00
			229.765.440,00	0,00	0,00	0,00

KODE	URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN	ANGGARAN / REALISASI	KELOMPOK BELANJA			
			OPERASI	MODAL	TDK TERDUGA	TRANSFER
3.26.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	ANGGARAN	25.314.000,00	0,00	0,00	0,00
		REALISASI	23.418.400,00	0,00	0,00	0,00
3.26.01.2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	ANGGARAN	17.150.000,00	0,00	0,00	0,00
		REALISASI	17.125.000,00	0,00	0,00	0,00
3.26.01.2.05.11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	ANGGARAN	8.164.000,00	0,00	0,00	0,00
		REALISASI	6.293.400,00	0,00	0,00	0,00
3.26.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	ANGGARAN	420.810.300,00	0,00	0,00	0,00
		REALISASI	412.976.543,00	0,00	0,00	0,00
3.26.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	ANGGARAN	21.155.400,00	0,00	0,00	0,00
		REALISASI	21.000.000,00	0,00	0,00	0,00
3.26.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	ANGGARAN	64.270.000,00	0,00	0,00	0,00
		REALISASI	57.615.000,00	0,00	0,00	0,00
3.26.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	ANGGARAN	38.625.000,00	0,00	0,00	0,00
		REALISASI	38.020.000,00	0,00	0,00	0,00
3.26.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	ANGGARAN	6.900.000,00	0,00	0,00	0,00
		REALISASI	6.695.000,00	0,00	0,00	0,00
3.26.01.2.06.07	Penyediaan Bahan/Material	ANGGARAN	0,00	0,00	0,00	0,00
		REALISASI	0,00	0,00	0,00	0,00
3.26.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	ANGGARAN	289.859.900,00	0,00	0,00	0,00
		REALISASI	289.646.543,00	0,00	0,00	0,00
3.26.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	ANGGARAN	0,00	384.465.553,00	0,00	0,00
		REALISASI	0,00	383.589.500,00	0,00	0,00
3.26.01.2.07.01	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	ANGGARAN	0,00	298.900.000,00	0,00	0,00
		REALISASI	0,00	298.489.500,00	0,00	0,00
3.26.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	ANGGARAN	0,00	85.565.553,00	0,00	0,00
		REALISASI	0,00	85.100.000,00	0,00	0,00
3.26.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	ANGGARAN	359.614.372,00	0,00	0,00	0,00
		REALISASI	338.099.992,00	0,00	0,00	0,00
3.26.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	ANGGARAN	107.282.792,00	0,00	0,00	0,00
		REALISASI	101.739.656,00	0,00	0,00	0,00
3.26.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	ANGGARAN	50.686.740,00	0,00	0,00	0,00
		REALISASI	39.566.996,00	0,00	0,00	0,00
3.26.01.2.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	ANGGARAN	201.644.840,00	0,00	0,00	0,00
		REALISASI	196.793.340,00	0,00	0,00	0,00
3.26.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	ANGGARAN	189.161.844,00	0,00	0,00	0,00
		REALISASI	186.890.950,00	0,00	0,00	0,00
3.26.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	ANGGARAN	153.028.100,00	0,00	0,00	0,00
		REALISASI	150.887.950,00	0,00	0,00	0,00

KODE	URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN	ANGGARAN / REALISASI	KELOMPOK BELANJA			
			OPERASI	MODAL	TDK TERDUGA	TRANSFER
3.26.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
3.26.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		36.133.744,00	0,00	0,00	0,00
			36.003.000,00	0,00	0,00	0,00
3.26.01.2.13	Penataan Organisasi		1.041.500,00	0,00	0,00	0,00
			1.041.250,00	0,00	0,00	0,00
3.26.01.2.13.01	Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan		1.041.500,00	0,00	0,00	0,00
			1.041.250,00	0,00	0,00	0,00
3.26.02	**PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA**		177.865.377,00	0,00	0,00	0,00
			175.418.744,00	0,00	0,00	0,00
3.26.02.2.01	Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota		38.736.000,00	0,00	0,00	0,00
			38.429.000,00	0,00	0,00	0,00
3.26.02.2.01.04	Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota		38.736.000,00	0,00	0,00	0,00
			38.429.000,00	0,00	0,00	0,00
3.26.02.2.02	Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota		84.475.884,00	0,00	0,00	0,00
			82.441.584,00	0,00	0,00	0,00
3.26.02.2.02.05	Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota		84.475.884,00	0,00	0,00	0,00
			82.441.584,00	0,00	0,00	0,00
3.26.02.2.03	Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota		54.653.493,00	0,00	0,00	0,00
			54.548.160,00	0,00	0,00	0,00
3.26.02.2.03.04	Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota		22.309.333,00	0,00	0,00	0,00
			22.204.000,00	0,00	0,00	0,00
3.26.02.2.03.06	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota		32.344.160,00	0,00	0,00	0,00
			32.344.160,00	0,00	0,00	0,00
3.26.03	**PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA**		386.380.428,00	0,00	0,00	0,00
			382.452.508,00	0,00	0,00	0,00
3.26.03.2.01	Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota		386.380.428,00	0,00	0,00	0,00
			382.452.508,00	0,00	0,00	0,00
3.26.03.2.01.01	Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri		207.173.056,00	0,00	0,00	0,00
			203.843.636,00	0,00	0,00	0,00
3.26.03.2.01.02	Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri Pariwisata Kabupaten/Kota		121.103.372,00	0,00	0,00	0,00
			121.103.372,00	0,00	0,00	0,00
3.26.03.2.01.03	Penyediaan Data dan Penyebaran Informasi Pariwisata Kabupaten/Kota, Baik Dalam dan Luar Negeri		58.104.000,00	0,00	0,00	0,00
			57.505.500,00	0,00	0,00	0,00

KODE	URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN	ANGGARAN / REALISASI	KELOMPOK BELANJA			
			OPERASI	MODAL	TDK TERDUGA	TRANSFER
3.27	**PERTANIAN**		29.833.548.942,00	2.942.282.462,00	0,00	0,00
			29.099.202.780,00	2.917.558.750,00	0,00	0,00
3.27.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**		10.212.252.895,00	617.185.470,00	0,00	0,00
			9.829.422.644,00	611.643.750,00	0,00	0,00
3.27.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		67.224.511,00	0,00	0,00	0,00
			64.636.600,00	0,00	0,00	0,00
3.27.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		54.455.100,00	0,00	0,00	0,00
			54.446.500,00	0,00	0,00	0,00
3.27.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD		5.290.000,00	0,00	0,00	0,00
			2.712.200,00	0,00	0,00	0,00
3.27.01.2.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD		7.479.411,00	0,00	0,00	0,00
			7.477.900,00	0,00	0,00	0,00
3.27.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		7.873.711.826,00	0,00	0,00	0,00
			7.647.231.387,00	0,00	0,00	0,00
3.27.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		7.872.711.826,00	0,00	0,00	0,00
			7.646.481.387,00	0,00	0,00	0,00
3.27.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD		1.000.000,00	0,00	0,00	0,00
			750.000,00	0,00	0,00	0,00
3.27.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah		36.144.000,00	47.200.000,00	0,00	0,00
			34.714.800,00	47.200.000,00	0,00	0,00
3.27.01.2.03.04	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD		36.144.000,00	47.200.000,00	0,00	0,00
			34.714.800,00	47.200.000,00	0,00	0,00
3.27.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		145.069.200,00	0,00	0,00	0,00
			143.337.450,00	0,00	0,00	0,00
3.27.01.2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya		30.100.000,00	0,00	0,00	0,00
			29.580.000,00	0,00	0,00	0,00
3.27.01.2.05.11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan		114.969.200,00	0,00	0,00	0,00
			113.757.450,00	0,00	0,00	0,00
3.27.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah		647.971.538,00	0,00	0,00	0,00
			638.055.423,00	0,00	0,00	0,00
3.27.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		41.033.860,00	0,00	0,00	0,00
			40.967.000,00	0,00	0,00	0,00
3.27.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor		99.143.000,00	0,00	0,00	0,00
			99.036.400,00	0,00	0,00	0,00
3.27.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan		25.497.400,00	0,00	0,00	0,00
			25.497.400,00	0,00	0,00	0,00
3.27.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan		8.197.200,00	0,00	0,00	0,00
			5.970.000,00	0,00	0,00	0,00

KODE	URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN	ANGGARAN / REALISASI	KELOMPOK BELANJA			
			OPERASI	MODAL	TDK TERDUGA	TRANSFER
3.27.01.2.06.07	Penyediaan Bahan/Material	ANGGARAN	14.971.717,00	0,00	0,00	0,00
		REALISASI	13.240.000,00	0,00	0,00	0,00
3.27.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	ANGGARAN	459.128.361,00	0,00	0,00	0,00
		REALISASI	453.344.623,00	0,00	0,00	0,00
3.27.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	ANGGARAN	0,00	568.481.870,00	0,00	0,00
		REALISASI	0,00	562.943.750,00	0,00	0,00
3.27.01.2.07.01	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	ANGGARAN	0,00	381.612.000,00	0,00	0,00
		REALISASI	0,00	380.900.000,00	0,00	0,00
3.27.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	ANGGARAN	0,00	186.869.870,00	0,00	0,00
		REALISASI	0,00	182.043.750,00	0,00	0,00
3.27.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	ANGGARAN	490.443.166,00	1.503.600,00	0,00	0,00
		REALISASI	469.748.275,00	1.500.000,00	0,00	0,00
3.27.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	ANGGARAN	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00
		REALISASI	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00
3.27.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	ANGGARAN	106.943.600,00	0,00	0,00	0,00
		REALISASI	96.956.959,00	0,00	0,00	0,00
3.27.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	ANGGARAN	378.499.566,00	1.503.600,00	0,00	0,00
		REALISASI	367.791.316,00	1.500.000,00	0,00	0,00
3.27.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	ANGGARAN	951.688.654,00	0,00	0,00	0,00
		REALISASI	831.698.709,00	0,00	0,00	0,00
3.27.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	ANGGARAN	258.876.195,00	0,00	0,00	0,00
		REALISASI	255.994.209,00	0,00	0,00	0,00
3.27.01.2.09.03	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar	ANGGARAN	645.258.000,00	0,00	0,00	0,00
		REALISASI	529.744.500,00	0,00	0,00	0,00
3.27.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	ANGGARAN	32.554.459,00	0,00	0,00	0,00
		REALISASI	31.010.000,00	0,00	0,00	0,00
3.27.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	ANGGARAN	15.000.000,00	0,00	0,00	0,00
		REALISASI	14.950.000,00	0,00	0,00	0,00
3.27.02	**PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN**	ANGGARAN	10.073.963.204,00	2.076.116.992,00	0,00	0,00
		REALISASI	9.975.417.926,00	2.061.155.000,00	0,00	0,00
3.27.02.2.01	Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian	ANGGARAN	2.193.597.268,00	1.283.641.992,00	0,00	0,00
		REALISASI	2.146.842.929,00	1.272.918.000,00	0,00	0,00
3.27.02.2.01.01	Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi	ANGGARAN	1.001.262.464,00	0,00	0,00	0,00
		REALISASI	962.469.968,00	0,00	0,00	0,00
3.27.02.2.01.02	Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	ANGGARAN	1.192.334.804,00	1.283.641.992,00	0,00	0,00
		REALISASI	1.184.372.961,00	1.272.918.000,00	0,00	0,00

KODE	URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN	ANGGARAN / REALISASI	KELOMPOK BELANJA			
			OPERASI	MODAL	TDK TERDUGA	TRANSFER
3.27.02.2.06	Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Lain	ANGGARAN	7.880.365.936,00	792.475.000,00	0,00	0,00
		REALISASI	7.828.574.997,00	788.237.000,00	0,00	0,00
3.27.02.2.06.01	Pengadaan Benih/Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain	ANGGARAN	7.397.334.436,00	0,00	0,00	0,00
		REALISASI	7.364.990.997,00	0,00	0,00	0,00
3.27.02.2.06.02	Pengadaan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain	ANGGARAN	483.031.500,00	792.475.000,00	0,00	0,00
		REALISASI	463.584.000,00	788.237.000,00	0,00	0,00
3.27.03	**PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN**	ANGGARAN	6.908.429.906,00	6.245.000,00	0,00	0,00
		REALISASI	6.830.230.246,00	5.720.000,00	0,00	0,00
3.27.03.2.01	Pengembangan Prasarana Pertanian	ANGGARAN	2.040.080.528,00	6.245.000,00	0,00	0,00
		REALISASI	1.976.602.221,00	5.720.000,00	0,00	0,00
3.27.03.2.01.01	Pengelolaan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B, Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan/KP2B dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LCP2B	ANGGARAN	1.590.914.000,00	0,00	0,00	0,00
		REALISASI	1.570.094.745,00	0,00	0,00	0,00
3.27.03.2.01.03	Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya	ANGGARAN	449.166.528,00	6.245.000,00	0,00	0,00
		REALISASI	406.507.476,00	5.720.000,00	0,00	0,00
3.27.03.2.02	Pembangunan Prasarana Pertanian	ANGGARAN	4.868.349.378,00	0,00	0,00	0,00
		REALISASI	4.853.628.025,00	0,00	0,00	0,00
3.27.03.2.02.03	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani	ANGGARAN	1.601.433.100,00	0,00	0,00	0,00
		REALISASI	1.601.433.000,00	0,00	0,00	0,00
3.27.03.2.02.09	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya	ANGGARAN	3.266.916.278,00	0,00	0,00	0,00
		REALISASI	3.252.195.025,00	0,00	0,00	0,00
3.27.04	**PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER**	ANGGARAN	664.913.097,00	42.735.000,00	0,00	0,00
		REALISASI	550.871.820,00	39.740.000,00	0,00	0,00
3.27.04.2.01	Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam daerah Kabupaten/Kota	ANGGARAN	427.910.982,00	0,00	0,00	0,00
		REALISASI	391.339.820,00	0,00	0,00	0,00
3.27.04.2.01.01	Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan dan Zoonosis	ANGGARAN	283.218.632,00	0,00	0,00	0,00
		REALISASI	260.038.820,00	0,00	0,00	0,00
3.27.04.2.01.02	Pembebasan Penyakit Hewan Menular dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	ANGGARAN	144.692.350,00	0,00	0,00	0,00
		REALISASI	131.301.000,00	0,00	0,00	0,00
3.27.04.2.03	Pengelolaan Pelayanan Jasa Laboratorium dan Jasa Medik Veteriner dalam Daerah Kabupaten/Kota	ANGGARAN	150.575.000,00	0,00	0,00	0,00
		REALISASI	76.564.400,00	0,00	0,00	0,00
3.27.04.2.03.02	Penyediaan Pelayanan Jasa Medik Veteriner	ANGGARAN	150.575.000,00	0,00	0,00	0,00
		REALISASI	76.564.400,00	0,00	0,00	0,00
3.27.04.2.04	Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner	ANGGARAN	37.061.000,00	42.735.000,00	0,00	0,00
		REALISASI	36.356.500,00	39.740.000,00	0,00	0,00

KODE	URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN	ANGGARAN / REALISASI / KELOMPOK BELANJA			
		OPERASI	MODAL	TDK TERDUGA	TRANSFER
3.27.04.2.04.01	Pendampingan Unit Usaha Hewan dan Produk Hewan	37.061.000,00	42.735.000,00	0,00	0,00
		36.356.500,00	39.740.000,00	0,00	0,00
3.27.04.2.05	Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesejahteraan Hewan	49.366.115,00	0,00	0,00	0,00
		46.611.100,00	0,00	0,00	0,00
3.27.04.2.05.01	Pendampingan Penerapan Unit Kesejahteraan Hewan	49.366.115,00	0,00	0,00	0,00
		46.611.100,00	0,00	0,00	0,00
3.27.05	**PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN**	205.142.682,00	200.000.000,00	0,00	0,00
		197.261.200,00	199.300.000,00	0,00	0,00
3.27.05.2.01	Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota	205.142.682,00	200.000.000,00	0,00	0,00
		197.261.200,00	199.300.000,00	0,00	0,00
3.27.05.2.01.01	Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	151.386.832,00	200.000.000,00	0,00	0,00
		148.905.600,00	199.300.000,00	0,00	0,00
3.27.05.2.01.03	Pencegahan, Penanganan Kebakaran Lahan, dan Gangguan Usaha Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	53.755.850,00	0,00	0,00	0,00
		48.355.600,00	0,00	0,00	0,00
3.27.06	**PROGRAM PERIZINAN USAHA PERTANIAN**	622.939.552,00	0,00	0,00	0,00
		610.468.805,00	0,00	0,00	0,00
3.27.06.2.01	Penerbitan Izin Usaha Pertanian yang Kegiatan Usahanya dalam Daerah Kabupaten/Kota	622.939.552,00	0,00	0,00	0,00
		610.468.805,00	0,00	0,00	0,00
3.27.06.2.01.02	Penilaian Kelayakan dan Pemberian Pertimbangan Teknis Izin Usaha Pertanian	536.418.752,00	0,00	0,00	0,00
		525.371.930,00	0,00	0,00	0,00
3.27.06.2.01.03	Pembinaan dan Pengawasan Penerapan Izin Usaha Pertanian	86.520.800,00	0,00	0,00	0,00
		85.096.875,00	0,00	0,00	0,00
3.27.07	**PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN**	1.145.907.606,00	0,00	0,00	0,00
		1.105.530.139,00	0,00	0,00	0,00
3.27.07.2.01	Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian	1.145.907.606,00	0,00	0,00	0,00
		1.105.530.139,00	0,00	0,00	0,00
3.27.07.2.01.01	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa	593.725.296,00	0,00	0,00	0,00
		574.968.396,00	0,00	0,00	0,00
3.27.07.2.01.02	Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa	397.279.760,00	0,00	0,00	0,00
		390.798.753,00	0,00	0,00	0,00
3.27.07.2.01.03	Penyediaan dan Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian	34.450.100,00	0,00	0,00	0,00
		27.659.750,00	0,00	0,00	0,00
3.27.07.2.01.04	Pembentukan Badan Usaha Milik Petani	33.246.800,00	0,00	0,00	0,00
		31.472.440,00	0,00	0,00	0,00
3.27.07.2.01.05	Pembentukan dan Penyelenggaraan Sekolah Lapang Kelompok Tani Tingkat Kabupaten/Kota	87.205.650,00	0,00	0,00	0,00
		80.630.800,00	0,00	0,00	0,00

KODE	URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN	ANGGARAN / REALISASI	KELOMPOK BELANJA			
			OPERASI	MODAL	TDK TERDUGA	TRANSFER
3.28	**KEHUTANAN**		2.730.346.122,00	1.944.957.196,00	0,00	0,00
			2.531.446.006,00	1.911.862.042,00	0,00	0,00
3.28.04	**PROGRAM KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM HAYATI DAN EKOSISTEMNYA**		2.730.346.122,00	1.944.957.196,00	0,00	0,00
			2.531.446.006,00	1.911.862.042,00	0,00	0,00
3.28.04.2.01	Pengelolaan Taman Hutan Raya (TAHURA) Kabupaten/Kota		2.730.346.122,00	1.944.957.196,00	0,00	0,00
			2.531.446.006,00	1.911.862.042,00	0,00	0,00
3.28.04.2.01.01	Pencegahan, Penanggulangan dan Pembatasan Kerusakan Kawasan TAHURA		302.228.362,00	0,00	0,00	0,00
			233.539.300,00	0,00	0,00	0,00
3.28.04.2.01.02	Pengamanan Kawasan TAHURA Kabupaten/Kota		943.116.995,00	0,00	0,00	0,00
			907.836.895,00	0,00	0,00	0,00
3.28.04.2.01.05	Pemulihan Ekosistem atau Penutupan Kawasan Sesuai Rencana Pengelolaan TAHURA Kabupaten/Kota		129.424.890,00	0,00	0,00	0,00
			129.033.500,00	0,00	0,00	0,00
3.28.04.2.01.06	Pemanfaatan Jasa Lingkungan TAHURA Kabupaten/Kota		484.987.914,00	1.944.957.196,00	0,00	0,00
			478.335.198,00	1.911.862.042,00	0,00	0,00
3.28.04.2.01.08	Penguatan Kapasitas dan Pemberdayaan Masyarakat di Sekitar TAHURA Kabupaten/Kota		53.288.340,00	0,00	0,00	0,00
			43.967.000,00	0,00	0,00	0,00
3.28.04.2.01.11	Perencanaan Pengelolaan TAHURA		817.299.621,00	0,00	0,00	0,00
			738.734.113,00	0,00	0,00	0,00
3.30	**PERDAGANGAN**		1.419.371.619,00	34.460.000,00	0,00	0,00
			1.394.357.226,00	31.640.000,00	0,00	0,00
3.30.02	**PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN**		150.653.592,00	0,00	0,00	0,00
			145.286.332,00	0,00	0,00	0,00
3.30.02.2.05	Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol Golongan B dan C untuk Pengecer dan Penjual Langsung Minum di Tempat		150.653.592,00	0,00	0,00	0,00
			145.286.332,00	0,00	0,00	0,00
3.30.02.2.05.01	Fasilitasi Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol Golongan B dan C		150.653.592,00	0,00	0,00	0,00
			145.286.332,00	0,00	0,00	0,00
3.30.04	**PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING**		740.493.059,00	0,00	0,00	0,00
			730.003.183,00	0,00	0,00	0,00
3.30.04.2.01	Menjamin Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota		21.910.400,00	0,00	0,00	0,00
			20.119.830,00	0,00	0,00	0,00
3.30.04.2.01.03	Pengendalian Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat		21.910.400,00	0,00	0,00	0,00
			20.119.830,00	0,00	0,00	0,00
3.30.04.2.02	Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota		699.040.459,00	0,00	0,00	0,00
			691.109.953,00	0,00	0,00	0,00

KODE	URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN	ANGGARAN / REALISASI	KELOMPOK BELANJA			
			OPERASI	MODAL	TDK TERDUGA	TRANSFER
3.30.04.2.02.02	Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pasar Rakyat yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan		142.320.878,00	0,00	0,00	0,00
			139.416.422,00	0,00	0,00	0,00
3.30.04.2.02.03	Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota		556.719.581,00	0,00	0,00	0,00
			551.693.531,00	0,00	0,00	0,00
3.30.04.2.03	Pengawasan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		19.542.200,00	0,00	0,00	0,00
			18.773.400,00	0,00	0,00	0,00
3.30.04.2.03.01	Pemeriksaan Kelengkapan Legalitas Dokumen Perizinan		19.542.200,00	0,00	0,00	0,00
			18.773.400,00	0,00	0,00	0,00
3.30.06	**PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN**		310.652.068,00	34.460.000,00	0,00	0,00
			306.814.308,00	31.640.000,00	0,00	0,00
3.30.06.2.01	Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan		310.652.068,00	34.460.000,00	0,00	0,00
			306.814.308,00	31.640.000,00	0,00	0,00
3.30.06.2.01.01	Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang		158.653.028,00	34.460.000,00	0,00	0,00
			156.355.322,00	31.640.000,00	0,00	0,00
3.30.06.2.01.02	Pengawasan/Penyuluhan Metrologi Legal		151.999.040,00	0,00	0,00	0,00
			150.458.986,00	0,00	0,00	0,00
3.30.07	**PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI**		217.572.900,00	0,00	0,00	0,00
			212.253.403,00	0,00	0,00	0,00
3.30.07.2.01	Pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri		217.572.900,00	0,00	0,00	0,00
			212.253.403,00	0,00	0,00	0,00
3.30.07.2.01.01	Pelaksanaan Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota		217.572.900,00	0,00	0,00	0,00
			212.253.403,00	0,00	0,00	0,00
3.31	**PERINDUSTRIAN**		4.075.346.218,00	122.167.982,00	0,00	0,00
			3.978.896.620,00	118.724.000,00	0,00	0,00
3.31.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**		3.468.525.116,00	100.650.760,00	0,00	0,00
			3.401.278.404,00	97.374.000,00	0,00	0,00
3.31.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		31.605.100,00	0,00	0,00	0,00
			30.495.600,00	0,00	0,00	0,00
3.31.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		13.390.800,00	0,00	0,00	0,00
			12.310.000,00	0,00	0,00	0,00
3.31.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD		2.595.000,00	0,00	0,00	0,00
			2.595.000,00	0,00	0,00	0,00
3.31.01.2.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD		1.348.000,00	0,00	0,00	0,00
			1.341.000,00	0,00	0,00	0,00
3.31.01.2.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD		2.147.800,00	0,00	0,00	0,00
			2.145.000,00	0,00	0,00	0,00

KODE	URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN	ANGGARAN / REALISASI	KELOMPOK BELANJA			
			OPERASI	MODAL	TDK TERDUGA	TRANSFER
3.31.01.2.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	ANGGARAN	6.090.200,00	0,00	0,00	0,00
		REALISASI	6.090.200,00	0,00	0,00	0,00
3.31.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	ANGGARAN	3.449.400,00	0,00	0,00	0,00
		REALISASI	3.449.400,00	0,00	0,00	0,00
3.31.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	ANGGARAN	2.583.900,00	0,00	0,00	0,00
		REALISASI	2.565.000,00	0,00	0,00	0,00
3.31.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	ANGGARAN	2.361.240.987,00	0,00	0,00	0,00
		REALISASI	2.311.467.860,00	0,00	0,00	0,00
3.31.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	ANGGARAN	2.354.686.787,00	0,00	0,00	0,00
		REALISASI	2.304.929.660,00	0,00	0,00	0,00
3.31.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	ANGGARAN	3.545.400,00	0,00	0,00	0,00
		REALISASI	3.545.400,00	0,00	0,00	0,00
3.31.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	ANGGARAN	1.416.000,00	0,00	0,00	0,00
		REALISASI	1.400.000,00	0,00	0,00	0,00
3.31.01.2.02.08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	ANGGARAN	1.592.800,00	0,00	0,00	0,00
		REALISASI	1.592.800,00	0,00	0,00	0,00
3.31.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	ANGGARAN	31.290.900,00	0,00	0,00	0,00
		REALISASI	30.745.589,00	0,00	0,00	0,00
3.31.01.2.03.04	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	ANGGARAN	19.514.500,00	0,00	0,00	0,00
		REALISASI	19.390.589,00	0,00	0,00	0,00
3.31.01.2.03.06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	ANGGARAN	11.776.400,00	0,00	0,00	0,00
		REALISASI	11.355.000,00	0,00	0,00	0,00
3.31.01.2.04	Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	ANGGARAN	1.634.570,00	0,00	0,00	0,00
		REALISASI	1.600.000,00	0,00	0,00	0,00
3.31.01.2.04.05	Pengolahan Data Retribusi Daerah	ANGGARAN	1.634.570,00	0,00	0,00	0,00
		REALISASI	1.600.000,00	0,00	0,00	0,00
3.31.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	ANGGARAN	64.023.000,00	0,00	0,00	0,00
		REALISASI	61.334.000,00	0,00	0,00	0,00
3.31.01.2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	ANGGARAN	32.523.000,00	0,00	0,00	0,00
		REALISASI	32.334.000,00	0,00	0,00	0,00
3.31.01.2.05.11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	ANGGARAN	31.500.000,00	0,00	0,00	0,00
		REALISASI	29.000.000,00	0,00	0,00	0,00
3.31.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	ANGGARAN	411.975.140,00	0,00	0,00	0,00
		REALISASI	411.336.470,00	0,00	0,00	0,00
3.31.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	ANGGARAN	9.868.500,00	0,00	0,00	0,00
		REALISASI	9.864.100,00	0,00	0,00	0,00
3.31.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	ANGGARAN	40.868.900,00	0,00	0,00	0,00
		REALISASI	40.834.100,00	0,00	0,00	0,00

KODE	URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN	ANGGARAN / REALISASI	KELOMPOK BELANJA			
			OPERASI	MODAL	TDK TERDUGA	TRANSFER
3.31.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	ANGGARAN	28.748.100,00	0,00	0,00	0,00
		REALISASI	28.738.600,00	0,00	0,00	0,00
3.31.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	ANGGARAN	4.112.400,00	0,00	0,00	0,00
		REALISASI	4.110.000,00	0,00	0,00	0,00
3.31.01.2.06.07	Penyediaan Bahan/Material	ANGGARAN	38.118.240,00	0,00	0,00	0,00
		REALISASI	37.657.000,00	0,00	0,00	0,00
3.31.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	ANGGARAN	546.000,00	0,00	0,00	0,00
		REALISASI	525.000,00	0,00	0,00	0,00
3.31.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	ANGGARAN	289.713.000,00	0,00	0,00	0,00
		REALISASI	289.607.670,00	0,00	0,00	0,00
3.31.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	ANGGARAN	0,00	77.487.000,00	0,00	0,00
		REALISASI	0,00	74.274.000,00	0,00	0,00
3.31.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	ANGGARAN	0,00	77.487.000,00	0,00	0,00
		REALISASI	0,00	74.274.000,00	0,00	0,00
3.31.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	ANGGARAN	319.062.210,00	20.663.760,00	0,00	0,00
		REALISASI	308.902.722,00	20.600.000,00	0,00	0,00
3.31.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	ANGGARAN	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00
		REALISASI	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00
3.31.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	ANGGARAN	43.464.000,00	0,00	0,00	0,00
		REALISASI	41.173.940,00	0,00	0,00	0,00
3.31.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	ANGGARAN	273.598.210,00	20.663.760,00	0,00	0,00
		REALISASI	265.728.782,00	20.600.000,00	0,00	0,00
3.31.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	ANGGARAN	234.321.209,00	2.500.000,00	0,00	0,00
		REALISASI	232.229.363,00	2.500.000,00	0,00	0,00
3.31.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	ANGGARAN	181.681.025,00	0,00	0,00	0,00
		REALISASI	180.074.363,00	0,00	0,00	0,00
3.31.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	ANGGARAN	17.036.084,00	0,00	0,00	0,00
		REALISASI	16.970.000,00	0,00	0,00	0,00
3.31.01.2.09.11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	ANGGARAN	35.604.100,00	2.500.000,00	0,00	0,00
		REALISASI	35.185.000,00	2.500.000,00	0,00	0,00
3.31.01.2.13	Penataan Organisasi	ANGGARAN	13.372.000,00	0,00	0,00	0,00
		REALISASI	13.166.800,00	0,00	0,00	0,00
3.31.01.2.13.01	Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	ANGGARAN	13.372.000,00	0,00	0,00	0,00
		REALISASI	13.166.800,00	0,00	0,00	0,00
3.31.02	**PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI**	ANGGARAN	364.908.608,00	21.517.222,00	0,00	0,00
		REALISASI	343.347.972,00	21.350.000,00	0,00	0,00

KODE	URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN	ANGGARAN / REALISASI	KELOMPOK BELANJA			
			OPERASI	MODAL	TDK TERDUGA	TRANSFER
3.31.02.2.01	Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	ANGGARAN	364.908.608,00	21.517.222,00	0,00	0,00
		REALISASI	343.347.972,00	21.350.000,00	0,00	0,00
3.31.02.2.01.03	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	ANGGARAN	257.834.608,00	0,00	0,00	0,00
		REALISASI	249.783.672,00	0,00	0,00	0,00
3.31.02.2.01.04	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri	ANGGARAN	33.558.700,00	0,00	0,00	0,00
		REALISASI	26.802.000,00	0,00	0,00	0,00
3.31.02.2.01.05	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	ANGGARAN	73.515.300,00	21.517.222,00	0,00	0,00
		REALISASI	66.762.300,00	21.350.000,00	0,00	0,00
3.31.03	**PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI KABUPATEN/KOTA**	ANGGARAN	125.364.128,00	0,00	0,00	0,00
		REALISASI	122.247.672,00	0,00	0,00	0,00
3.31.03.2.01	Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Kabupaten/Kota	ANGGARAN	125.364.128,00	0,00	0,00	0,00
		REALISASI	122.247.672,00	0,00	0,00	0,00
3.31.03.2.01.01	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Perolehan IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas) yang Terintegrasi dengan Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	ANGGARAN	125.364.128,00	0,00	0,00	0,00
		REALISASI	122.247.672,00	0,00	0,00	0,00
3.31.04	**PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL**	ANGGARAN	116.548.366,00	0,00	0,00	0,00
		REALISASI	112.022.572,00	0,00	0,00	0,00
3.31.04.2.01	Penyediaan Informasi Industri untuk Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota	ANGGARAN	116.548.366,00	0,00	0,00	0,00
		REALISASI	112.022.572,00	0,00	0,00	0,00
3.31.04.2.01.01	Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten/Kota Melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)	ANGGARAN	24.028.990,00	0,00	0,00	0,00
		REALISASI	23.705.000,00	0,00	0,00	0,00
3.31.04.2.01.02	Diseminasi, Publikasi Data Informasi dan Analisa Industri Kabupaten/Kota Melalui SIINas	ANGGARAN	92.519.376,00	0,00	0,00	0,00
		REALISASI	88.317.572,00	0,00	0,00	0,00
3.32	**TRANSMIGRASI**	ANGGARAN	442.428.528,00	0,00	0,00	0,00
		REALISASI	440.125.126,00	0,00	0,00	0,00
3.32.02	**PROGRAM PERENCANAAN KAWASAN TRANSMIGRASI**	ANGGARAN	259.854.264,00	0,00	0,00	0,00
		REALISASI	258.678.937,00	0,00	0,00	0,00
3.32.02.2.01	Pencadangan Tanah untuk Kawasan Transmigrasi	ANGGARAN	259.854.264,00	0,00	0,00	0,00
		REALISASI	258.678.937,00	0,00	0,00	0,00
3.32.02.2.01.01	Identifikasi Potensi Kawasan Transmigrasi	ANGGARAN	50.000.300,00	0,00	0,00	0,00
		REALISASI	49.897.600,00	0,00	0,00	0,00
3.32.02.2.01.02	Advokasi dan Musyawarah Penetapan Kawasan	ANGGARAN	209.853.964,00	0,00	0,00	0,00
		REALISASI	208.781.337,00	0,00	0,00	0,00
3.32.04	**PROGRAM PENGEMBANGAN KAWASAN TRANSMIGRASI**	ANGGARAN	182.574.264,00	0,00	0,00	0,00
		REALISASI	181.446.189,00	0,00	0,00	0,00

KODE	URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN	ANGGARAN / REALISASI	KELOMPOK BELANJA			
			OPERASI	MODAL	TDK TERDUGA	TRANSFER
3.32.04.2.01	Pengembangan Satuan Permukiman pada Tahap Kemandirian	ANGGARAN	182.574.264,00	0,00	0,00	0,00
		REALISASI	181.446.189,00	0,00	0,00	0,00
3.32.04.2.01.01	Penguatan SDM dalam rangka Kemandirian Satuan Pemukiman	ANGGARAN	182.574.264,00	0,00	0,00	0,00
		REALISASI	181.446.189,00	0,00	0,00	0,00
4	**UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN**	ANGGARAN	85.408.059.767,00	4.899.767.907,00	0,00	0,00
		REALISASI	82.199.238.892,00	4.652.652.790,00	0,00	0,00
4.01	**SEKRETARIAT DAERAH**	ANGGARAN	47.176.710.369,00	3.097.652.798,00	0,00	0,00
		REALISASI	44.929.468.862,00	2.909.610.450,00	0,00	0,00
4.01.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	ANGGARAN	25.546.600.502,00	3.048.554.110,00	0,00	0,00
		REALISASI	24.057.181.865,00	2.860.818.450,00	0,00	0,00
4.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	ANGGARAN	363.144.496,00	0,00	0,00	0,00
		REALISASI	345.294.363,00	0,00	0,00	0,00
4.01.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	ANGGARAN	52.287.000,00	0,00	0,00	0,00
		REALISASI	52.138.563,00	0,00	0,00	0,00
4.01.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	ANGGARAN	8.596.080,00	0,00	0,00	0,00
		REALISASI	8.002.500,00	0,00	0,00	0,00
4.01.01.2.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	ANGGARAN	8.596.080,00	0,00	0,00	0,00
		REALISASI	8.595.500,00	0,00	0,00	0,00
4.01.01.2.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	ANGGARAN	7.572.000,00	0,00	0,00	0,00
		REALISASI	7.568.400,00	0,00	0,00	0,00
4.01.01.2.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	ANGGARAN	7.572.000,00	0,00	0,00	0,00
		REALISASI	7.555.500,00	0,00	0,00	0,00
4.01.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	ANGGARAN	278.521.336,00	0,00	0,00	0,00
		REALISASI	261.433.900,00	0,00	0,00	0,00
4.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	ANGGARAN	9.128.924.557,00	0,00	0,00	0,00
		REALISASI	8.296.310.089,00	0,00	0,00	0,00
4.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	ANGGARAN	9.104.595.397,00	0,00	0,00	0,00
		REALISASI	8.272.026.889,00	0,00	0,00	0,00
4.01.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	ANGGARAN	16.576.920,00	0,00	0,00	0,00
		REALISASI	16.555.200,00	0,00	0,00	0,00
4.01.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	ANGGARAN	7.752.240,00	0,00	0,00	0,00
		REALISASI	7.728.000,00	0,00	0,00	0,00
4.01.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	ANGGARAN	74.018.600,00	10.000.000,00	0,00	0,00
		REALISASI	73.010.400,00	10.000.000,00	0,00	0,00
4.01.01.2.03.02	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	ANGGARAN	32.602.800,00	10.000.000,00	0,00	0,00
		REALISASI	31.987.200,00	10.000.000,00	0,00	0,00
4.01.01.2.03.03	Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	ANGGARAN	15.000.200,00	0,00	0,00	0,00
		REALISASI	14.659.600,00	0,00	0,00	0,00

KODE	URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN	ANGGARAN / REALISASI	KELOMPOK BELANJA			
			OPERASI	MODAL	TDK TERDUGA	TRANSFER
4.01.01.2.03.06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD		26.415.600,00	0,00	0,00	0,00
			26.363.600,00	0,00	0,00	0,00
4.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		341.026.487,00	0,00	0,00	0,00
			309.399.300,00	0,00	0,00	0,00
4.01.01.2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya		199.207.287,00	0,00	0,00	0,00
			194.635.300,00	0,00	0,00	0,00
4.01.01.2.05.03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian		22.659.200,00	0,00	0,00	0,00
			22.659.000,00	0,00	0,00	0,00
4.01.01.2.05.04	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian		6.660.000,00	0,00	0,00	0,00
			6.660.000,00	0,00	0,00	0,00
4.01.01.2.05.10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan		0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
4.01.01.2.05.11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan		112.500.000,00	0,00	0,00	0,00
			85.445.000,00	0,00	0,00	0,00
4.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah		4.851.115.899,00	1.207.736.871,00	0,00	0,00
			4.783.747.353,00	1.190.846.450,00	0,00	0,00
4.01.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		33.591.000,00	0,00	0,00	0,00
			33.517.000,00	0,00	0,00	0,00
4.01.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		176.823.000,00	1.207.736.871,00	0,00	0,00
			175.902.500,00	1.190.846.450,00	0,00	0,00
4.01.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor		1.375.611.135,00	0,00	0,00	0,00
			1.373.149.720,00	0,00	0,00	0,00
4.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan		106.593.300,00	0,00	0,00	0,00
			106.590.600,00	0,00	0,00	0,00
4.01.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan		153.562.950,00	0,00	0,00	0,00
			153.456.000,00	0,00	0,00	0,00
4.01.01.2.06.07	Penyediaan Bahan/Material		180.202.842,00	0,00	0,00	0,00
			121.211.550,00	0,00	0,00	0,00
4.01.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu		382.573.200,00	0,00	0,00	0,00
			380.124.400,00	0,00	0,00	0,00
4.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		2.400.402.100,00	0,00	0,00	0,00
			2.399.302.183,00	0,00	0,00	0,00
4.01.01.2.06.11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD		41.756.372,00	0,00	0,00	0,00
			40.493.400,00	0,00	0,00	0,00
4.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		0,00	1.446.355.863,00	0,00	0,00
			0,00	1.441.493.000,00	0,00	0,00
4.01.01.2.07.01	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan		0,00	708.427.863,00	0,00	0,00
			0,00	707.800.000,00	0,00	0,00

KODE	URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN	ANGGARAN / REALISASI	KELOMPOK BELANJA			
			OPERASI	MODAL	TDK TERDUGA	TRANSFER
4.01.01.2.07.02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	ANGGARAN	0,00	737.928.000,00	0,00	0,00
		REALISASI	0,00	733.693.000,00	0,00	0,00
4.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	ANGGARAN	3.891.678.430,00	0,00	0,00	0,00
		REALISASI	3.742.875.325,00	0,00	0,00	0,00
4.01.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	ANGGARAN	36.030.300,00	0,00	0,00	0,00
		REALISASI	36.030.000,00	0,00	0,00	0,00
4.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	ANGGARAN	631.260.000,00	0,00	0,00	0,00
		REALISASI	591.178.915,00	0,00	0,00	0,00
4.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	ANGGARAN	3.224.388.130,00	0,00	0,00	0,00
		REALISASI	3.115.666.410,00	0,00	0,00	0,00
4.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	ANGGARAN	2.656.868.405,00	111.000.000,00	0,00	0,00
		REALISASI	2.557.048.593,00	110.889.000,00	0,00	0,00
4.01.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	ANGGARAN	271.554.110,00	0,00	0,00	0,00
		REALISASI	249.890.335,00	0,00	0,00	0,00
4.01.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	ANGGARAN	1.130.991.553,00	0,00	0,00	0,00
		REALISASI	1.108.135.228,00	0,00	0,00	0,00
4.01.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	ANGGARAN	134.175.912,00	0,00	0,00	0,00
		REALISASI	133.868.000,00	0,00	0,00	0,00
4.01.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	ANGGARAN	1.120.146.830,00	111.000.000,00	0,00	0,00
		REALISASI	1.065.155.030,00	110.889.000,00	0,00	0,00
4.01.01.2.11	Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	ANGGARAN	1.469.449.000,00	0,00	0,00	0,00
		REALISASI	1.257.090.118,00	0,00	0,00	0,00
4.01.01.2.11.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	ANGGARAN	691.955.000,00	0,00	0,00	0,00
		REALISASI	568.331.474,00	0,00	0,00	0,00
4.01.01.2.11.02	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	ANGGARAN	88.134.000,00	0,00	0,00	0,00
		REALISASI	87.991.000,00	0,00	0,00	0,00
4.01.01.2.11.03	Pelaksanaan Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	ANGGARAN	689.360.000,00	0,00	0,00	0,00
		REALISASI	600.767.644,00	0,00	0,00	0,00
4.01.01.2.12	Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah	ANGGARAN	1.018.808.098,00	273.461.376,00	0,00	0,00
		REALISASI	981.315.400,00	107.590.000,00	0,00	0,00
4.01.01.2.12.01	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah	ANGGARAN	546.114.245,00	141.161.475,00	0,00	0,00
		REALISASI	541.164.800,00	0,00	0,00	0,00
4.01.01.2.12.02	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah	ANGGARAN	472.693.853,00	6.660.000,00	0,00	0,00
		REALISASI	440.150.600,00	0,00	0,00	0,00
4.01.01.2.12.03	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah	ANGGARAN	0,00	125.639.901,00	0,00	0,00
		REALISASI	0,00	107.590.000,00	0,00	0,00

KODE	URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN	ANGGARAN / REALISASI	KELOMPOK BELANJA			
			OPERASI	MODAL	TDK TERDUGA	TRANSFER
4.01.01.2.13	Penataan Organisasi	906.138.345,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		869.467.186,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.01.01.2.13.01	Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	288.511.543,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		286.045.164,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.01.01.2.13.02	Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	328.074.593,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		312.374.241,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.01.01.2.13.03	Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	119.726.729,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		114.125.881,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.01.01.2.13.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah	169.825.480,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		156.921.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.01.01.2.14	Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan	845.428.185,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		841.623.738,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.01.01.2.14.01	Fasilitasi Keprotokolan	601.917.385,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		600.016.151,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.01.01.2.14.02	Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	243.510.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		241.607.587,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.01.02	**PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT**	19.674.270.844,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		19.058.191.527,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.01.02.2.01	Administrasi Tata Pemerintahan	1.254.798.990,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.248.170.490,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.01.02.2.01.01	Penataan Administrasi Pemerintahan	419.268.218,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		416.709.748,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.01.02.2.01.02	Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	140.703.052,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		138.613.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.01.02.2.01.03	Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	694.827.720,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		692.847.702,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.01.02.2.02	Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	17.582.818.811,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		16.994.222.918,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.01.02.2.02.01	Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	16.651.232.111,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		16.125.375.418,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.01.02.2.02.02	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial	107.753.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		106.594.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.01.02.2.02.03	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat	823.833.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		762.253.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.01.02.2.03	Fasilitasi dan Koordinasi Hukum	773.720.903,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		754.521.919,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.01.02.2.03.01	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah	305.349.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		301.335.451,00	0,00	0,00	0,00	0,00

KODE	URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN	ANGGARAN / REALISASI	KELOMPOK BELANJA			
			OPERASI	MODAL	TDK TERDUGA	TRANSFER
4.01.02.2.03.02	Fasilitasi Bantuan Hukum	ANGGARAN	206.377.155,00	0,00	0,00	0,00
		REALISASI	199.521.720,00	0,00	0,00	0,00
4.01.02.2.03.03	Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum	ANGGARAN	261.993.848,00	0,00	0,00	0,00
		REALISASI	253.664.748,00	0,00	0,00	0,00
4.01.02.2.04	Fasilitasi Kerja Sama Daerah	ANGGARAN	62.932.140,00	0,00	0,00	0,00
		REALISASI	61.276.200,00	0,00	0,00	0,00
4.01.02.2.04.01	Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri	ANGGARAN	62.932.140,00	0,00	0,00	0,00
		REALISASI	61.276.200,00	0,00	0,00	0,00
4.01.03	**PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN**	ANGGARAN	1.955.839.023,00	49.098.688,00	0,00	0,00
		REALISASI	1.814.095.470,00	48.792.000,00	0,00	0,00
4.01.03.2.01	Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian	ANGGARAN	384.756.555,00	0,00	0,00	0,00
		REALISASI	356.979.398,00	0,00	0,00	0,00
4.01.03.2.01.01	Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD	ANGGARAN	92.905.420,00	0,00	0,00	0,00
		REALISASI	65.632.000,00	0,00	0,00	0,00
4.01.03.2.01.02	Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	ANGGARAN	291.851.135,00	0,00	0,00	0,00
		REALISASI	291.347.398,00	0,00	0,00	0,00
4.01.03.2.02	Pelaksanaan Administrasi Pembangunan	ANGGARAN	464.918.646,00	0,00	0,00	0,00
		REALISASI	455.637.378,00	0,00	0,00	0,00
4.01.03.2.02.01	Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan	ANGGARAN	372.840.058,00	0,00	0,00	0,00
		REALISASI	363.709.778,00	0,00	0,00	0,00
4.01.03.2.02.03	Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan	ANGGARAN	92.078.588,00	0,00	0,00	0,00
		REALISASI	91.927.600,00	0,00	0,00	0,00
4.01.03.2.03	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	ANGGARAN	1.026.261.242,00	49.098.688,00	0,00	0,00
		REALISASI	922.484.394,00	48.792.000,00	0,00	0,00
4.01.03.2.03.01	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	ANGGARAN	289.668.632,00	49.098.688,00	0,00	0,00
		REALISASI	288.890.713,00	48.792.000,00	0,00	0,00
4.01.03.2.03.02	Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik	ANGGARAN	196.378.218,00	0,00	0,00	0,00
		REALISASI	191.459.152,00	0,00	0,00	0,00
4.01.03.2.03.03	Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	ANGGARAN	540.214.392,00	0,00	0,00	0,00
		REALISASI	442.134.529,00	0,00	0,00	0,00
4.01.03.2.04	Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam	ANGGARAN	79.902.580,00	0,00	0,00	0,00
		REALISASI	78.994.300,00	0,00	0,00	0,00
4.01.03.2.04.03	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Energi dan Air	ANGGARAN	79.902.580,00	0,00	0,00	0,00
		REALISASI	78.994.300,00	0,00	0,00	0,00
4.02	**SEKRETARIAT DPRD**	ANGGARAN	38.231.349.398,00	1.802.115.109,00	0,00	0,00
		REALISASI	37.269.770.030,00	1.743.042.340,00	0,00	0,00
4.02.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	ANGGARAN	21.171.069.813,00	1.712.205.109,00	0,00	0,00
		REALISASI	20.664.925.074,00	1.654.214.590,00	0,00	0,00

KODE	URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN	ANGGARAN / REALISASI / KELOMPOK BELANJA			
		OPERASI	MODAL	TDK TERDUGA	TRANSFER
4.02.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	128.148.967,00	0,00	0,00	0,00
		123.107.916,00	0,00	0,00	0,00
4.02.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	44.062.556,00	0,00	0,00	0,00
		43.149.400,00	0,00	0,00	0,00
4.02.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	8.791.405,00	0,00	0,00	0,00
		7.206.000,00	0,00	0,00	0,00
4.02.01.2.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	8.834.605,00	0,00	0,00	0,00
		6.564.000,00	0,00	0,00	0,00
4.02.01.2.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	8.785.993,00	0,00	0,00	0,00
		8.664.700,00	0,00	0,00	0,00
4.02.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	57.674.408,00	0,00	0,00	0,00
		57.523.816,00	0,00	0,00	0,00
4.02.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	2.637.244.639,00	0,00	0,00	0,00
		2.446.032.884,00	0,00	0,00	0,00
4.02.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	2.637.244.639,00	0,00	0,00	0,00
		2.446.032.884,00	0,00	0,00	0,00
4.02.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	353.834.000,00	0,00	0,00	0,00
		332.143.776,00	0,00	0,00	0,00
4.02.01.2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	106.560.000,00	0,00	0,00	0,00
		97.274.400,00	0,00	0,00	0,00
4.02.01.2.05.11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	247.274.000,00	0,00	0,00	0,00
		234.869.376,00	0,00	0,00	0,00
4.02.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	1.278.002.494,00	0,00	0,00	0,00
		1.239.957.268,00	0,00	0,00	0,00
4.02.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	21.870.885,00	0,00	0,00	0,00
		21.806.700,00	0,00	0,00	0,00
4.02.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	62.425.290,00	0,00	0,00	0,00
		61.991.040,00	0,00	0,00	0,00
4.02.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	33.105.000,00	0,00	0,00	0,00
		32.722.000,00	0,00	0,00	0,00
4.02.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	30.295.452,00	0,00	0,00	0,00
		30.268.800,00	0,00	0,00	0,00
4.02.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	261.648.000,00	0,00	0,00	0,00
		230.450.000,00	0,00	0,00	0,00
4.02.01.2.06.07	Penyediaan Bahan/Material	116.003.826,00	0,00	0,00	0,00
		112.332.200,00	0,00	0,00	0,00
4.02.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	90.657.141,00	0,00	0,00	0,00
		89.746.000,00	0,00	0,00	0,00

KODE	URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN	ANGGARAN / REALISASI	KELOMPOK BELANJA			
			OPERASI	MODAL	TDK TERDUGA	TRANSFER
4.02.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	ANGGARAN	661.996.900,00	0,00	0,00	0,00
		REALISASI	660.640.528,00	0,00	0,00	0,00
4.02.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	ANGGARAN	555.000,00	1.512.205.109,00	0,00	0,00
		REALISASI	500.000,00	1.456.225.000,00	0,00	0,00
4.02.01.2.07.11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	ANGGARAN	555.000,00	1.512.205.109,00	0,00	0,00
		REALISASI	500.000,00	1.456.225.000,00	0,00	0,00
4.02.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	ANGGARAN	1.082.992.578,00	0,00	0,00	0,00
		REALISASI	1.010.256.804,00	0,00	0,00	0,00
4.02.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	ANGGARAN	9.000.000,00	0,00	0,00	0,00
		REALISASI	9.000.000,00	0,00	0,00	0,00
4.02.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	ANGGARAN	234.894.000,00	0,00	0,00	0,00
		REALISASI	173.973.902,00	0,00	0,00	0,00
4.02.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	ANGGARAN	839.098.578,00	0,00	0,00	0,00
		REALISASI	827.282.902,00	0,00	0,00	0,00
4.02.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	ANGGARAN	490.059.519,00	200.000.000,00	0,00	0,00
		REALISASI	442.475.500,00	197.989.590,00	0,00	0,00
4.02.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	ANGGARAN	181.826.331,00	0,00	0,00	0,00
		REALISASI	151.112.400,00	0,00	0,00	0,00
4.02.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	ANGGARAN	135.015.690,00	0,00	0,00	0,00
		REALISASI	119.593.100,00	0,00	0,00	0,00
4.02.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	ANGGARAN	82.598.208,00	0,00	0,00	0,00
		REALISASI	81.270.000,00	0,00	0,00	0,00
4.02.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	ANGGARAN	49.926.690,00	0,00	0,00	0,00
		REALISASI	49.900.000,00	0,00	0,00	0,00
4.02.01.2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	ANGGARAN	40.692.600,00	200.000.000,00	0,00	0,00
		REALISASI	40.600.000,00	197.989.590,00	0,00	0,00
4.02.01.2.14	Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan	ANGGARAN	381.422.056,00	0,00	0,00	0,00
		REALISASI	376.733.562,00	0,00	0,00	0,00
4.02.01.2.14.01	Fasilitasi Keprotokolan	ANGGARAN	381.422.056,00	0,00	0,00	0,00
		REALISASI	376.733.562,00	0,00	0,00	0,00
4.02.01.2.15	Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD	ANGGARAN	13.444.173.830,00	0,00	0,00	0,00
		REALISASI	13.340.454.968,00	0,00	0,00	0,00
4.02.01.2.15.01	Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD	ANGGARAN	12.332.111.830,00	0,00	0,00	0,00
		REALISASI	12.240.263.568,00	0,00	0,00	0,00
4.02.01.2.15.02	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD	ANGGARAN	641.358.000,00	0,00	0,00	0,00
		REALISASI	638.045.500,00	0,00	0,00	0,00

KODE	URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN	ANGGARAN / REALISASI	KELOMPOK BELANJA			
			OPERASI	MODAL	TDK TERDUGA	TRANSFER
4.02.01.2.15.03	Pelaksanaan Medical Check Up DPRD	ANGGARAN	470.704.000,00	0,00	0,00	0,00
		REALISASI	462.145.900,00	0,00	0,00	0,00
4.02.01.2.16	Layanan Administrasi DPRD	ANGGARAN	1.374.636.730,00	0,00	0,00	0,00
		REALISASI	1.353.262.396,00	0,00	0,00	0,00
4.02.01.2.16.02	Fasilitasi Fraksi DPRD	ANGGARAN	343.095.558,00	0,00	0,00	0,00
		REALISASI	331.784.640,00	0,00	0,00	0,00
4.02.01.2.16.03	Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	ANGGARAN	152.624.437,00	0,00	0,00	0,00
		REALISASI	146.714.700,00	0,00	0,00	0,00
4.02.01.2.16.04	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga DPRD	ANGGARAN	878.916.735,00	0,00	0,00	0,00
		REALISASI	874.763.056,00	0,00	0,00	0,00
4.02.02	**PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD**	ANGGARAN	17.060.279.585,00	89.910.000,00	0,00	0,00
		REALISASI	16.604.844.956,00	88.827.750,00	0,00	0,00
4.02.02.2.01	Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD	ANGGARAN	1.001.692.448,00	0,00	0,00	0,00
		REALISASI	969.016.296,00	0,00	0,00	0,00
4.02.02.2.01.01	Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah	ANGGARAN	10.985.624,00	0,00	0,00	0,00
		REALISASI	1.458.800,00	0,00	0,00	0,00
4.02.02.2.01.02	Pembahasan Rancangan Perda	ANGGARAN	174.640.355,00	0,00	0,00	0,00
		REALISASI	162.949.106,00	0,00	0,00	0,00
4.02.02.2.01.03	Penyelenggaraan Kajian Perundang-Undangan	ANGGARAN	342.980.777,00	0,00	0,00	0,00
		REALISASI	342.603.902,00	0,00	0,00	0,00
4.02.02.2.01.04	Fasilitasi Penyusunan Penjelasan/Keterangan Naskah Akademik	ANGGARAN	473.085.692,00	0,00	0,00	0,00
		REALISASI	462.004.488,00	0,00	0,00	0,00
4.02.02.2.02	Pembahasan Kebijakan Anggaran	ANGGARAN	210.355.810,00	0,00	0,00	0,00
		REALISASI	207.663.000,00	0,00	0,00	0,00
4.02.02.2.02.01	Pembahasan KUA dan PPAS	ANGGARAN	13.213.832,00	0,00	0,00	0,00
		REALISASI	13.099.200,00	0,00	0,00	0,00
4.02.02.2.02.02	Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	ANGGARAN	13.609.330,00	0,00	0,00	0,00
		REALISASI	13.338.500,00	0,00	0,00	0,00
4.02.02.2.02.03	Pembahasan APBD	ANGGARAN	126.569.776,00	0,00	0,00	0,00
		REALISASI	124.970.000,00	0,00	0,00	0,00
4.02.02.2.02.04	Pembahasan APBD Perubahan	ANGGARAN	43.587.758,00	0,00	0,00	0,00
		REALISASI	43.067.800,00	0,00	0,00	0,00
4.02.02.2.02.06	Pembahasan Pertanggungjawaban APBD	ANGGARAN	13.375.114,00	0,00	0,00	0,00
		REALISASI	13.187.500,00	0,00	0,00	0,00
4.02.02.2.03	Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan	ANGGARAN	1.417.477.167,00	0,00	0,00	0,00
		REALISASI	1.400.625.631,00	0,00	0,00	0,00
4.02.02.2.03.01	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum	ANGGARAN	449.547.448,00	0,00	0,00	0,00
		REALISASI	448.667.620,00	0,00	0,00	0,00

KODE	URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN	ANGGARAN / REALISASI	KELOMPOK BELANJA			
			OPERASI	MODAL	TDK TERDUGA	TRANSFER
4.02.02.2.03.02	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur	ANGGARAN	501.892.527,00	0,00	0,00	0,00
		REALISASI	501.027.560,00	0,00	0,00	0,00
4.02.02.2.03.03	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat	ANGGARAN	449.547.448,00	0,00	0,00	0,00
		REALISASI	435.096.651,00	0,00	0,00	0,00
4.02.02.2.03.08	Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah	ANGGARAN	16.489.744,00	0,00	0,00	0,00
		REALISASI	15.833.800,00	0,00	0,00	0,00
4.02.02.2.04	Peningkatan Kapasitas DPRD	ANGGARAN	6.397.575.870,00	0,00	0,00	0,00
		REALISASI	6.294.047.214,00	0,00	0,00	0,00
4.02.02.2.04.02	Pendalaman Tugas DPRD	ANGGARAN	3.511.985.600,00	0,00	0,00	0,00
		REALISASI	3.430.989.996,00	0,00	0,00	0,00
4.02.02.2.04.03	Publikasi dan Dokumentasi Dewan	ANGGARAN	2.624.706.400,00	0,00	0,00	0,00
		REALISASI	2.624.159.718,00	0,00	0,00	0,00
4.02.02.2.04.05	Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi	ANGGARAN	180.677.600,00	0,00	0,00	0,00
		REALISASI	180.000.000,00	0,00	0,00	0,00
4.02.02.2.04.06	Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat	ANGGARAN	69.426.504,00	0,00	0,00	0,00
		REALISASI	49.050.000,00	0,00	0,00	0,00
4.02.02.2.04.07	Penyusunan Program Kerja DPRD	ANGGARAN	10.779.766,00	0,00	0,00	0,00
		REALISASI	9.847.500,00	0,00	0,00	0,00
4.02.02.2.05	Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat	ANGGARAN	2.325.121.300,00	0,00	0,00	0,00
		REALISASI	2.214.808.040,00	0,00	0,00	0,00
4.02.02.2.05.01	Kunjungan Kerja dalam Daerah	ANGGARAN	819.345.600,00	0,00	0,00	0,00
		REALISASI	744.090.540,00	0,00	0,00	0,00
4.02.02.2.05.03	Pelaksanaan Reses	ANGGARAN	1.505.775.700,00	0,00	0,00	0,00
		REALISASI	1.470.717.500,00	0,00	0,00	0,00
4.02.02.2.06	Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD	ANGGARAN	90.325.420,00	0,00	0,00	0,00
		REALISASI	82.214.294,00	0,00	0,00	0,00
4.02.02.2.06.01	Penyusunan Kode Etik DPRD	ANGGARAN	90.325.420,00	0,00	0,00	0,00
		REALISASI	82.214.294,00	0,00	0,00	0,00
4.02.02.2.06.02	Pengawasan Kode Etik DPRD	ANGGARAN	0,00	0,00	0,00	0,00
		REALISASI	0,00	0,00	0,00	0,00
4.02.02.2.08	Fasilitasi Tugas DPRD	ANGGARAN	5.617.731.570,00	89.910.000,00	0,00	0,00
		REALISASI	5.436.470.481,00	88.827.750,00	0,00	0,00
4.02.02.2.08.01	Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	ANGGARAN	4.844.566.200,00	0,00	0,00	0,00
		REALISASI	4.695.817.619,00	0,00	0,00	0,00
4.02.02.2.08.03	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah	ANGGARAN	22.775.390,00	89.910.000,00	0,00	0,00
		REALISASI	19.275.000,00	88.827.750,00	0,00	0,00
4.02.02.2.08.04	Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD	ANGGARAN	750.389.980,00	0,00	0,00	0,00
		REALISASI	721.377.862,00	0,00	0,00	0,00

KODE	URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN	ANGGARAN / REALISASI	KELOMPOK BELANJA			
			OPERASI	MODAL	TDK TERDUGA	TRANSFER
5	**UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN**	ANGGARAN	46.637.268.529,00	2.606.826.277,00	9.580.000.000,00	183.197.290.930,00
		REALISASI	42.877.827.762,04	2.529.328.160,00	212.500.000,00	177.597.590.972,00
5.01	**PERENCANAAN**	ANGGARAN	9.267.392.370,00	757.327.335,00	0,00	0,00
		REALISASI	8.875.286.567,04	753.411.300,00	0,00	0,00
5.01.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	ANGGARAN	6.254.711.189,00	757.327.335,00	0,00	0,00
		REALISASI	5.993.483.128,04	753.411.300,00	0,00	0,00
5.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	ANGGARAN	84.710.356,00	0,00	0,00	0,00
		REALISASI	78.161.732,00	0,00	0,00	0,00
5.01.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	ANGGARAN	20.062.300,00	0,00	0,00	0,00
		REALISASI	20.031.600,00	0,00	0,00	0,00
5.01.01.2.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	ANGGARAN	6.029.520,00	0,00	0,00	0,00
		REALISASI	5.992.000,00	0,00	0,00	0,00
5.01.01.2.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	ANGGARAN	5.998.440,00	0,00	0,00	0,00
		REALISASI	5.974.000,00	0,00	0,00	0,00
5.01.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	ANGGARAN	14.652.000,00	0,00	0,00	0,00
		REALISASI	14.590.000,00	0,00	0,00	0,00
5.01.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	ANGGARAN	37.968.096,00	0,00	0,00	0,00
		REALISASI	31.574.132,00	0,00	0,00	0,00
5.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	ANGGARAN	3.952.007.696,00	0,00	0,00	0,00
		REALISASI	3.748.057.885,00	0,00	0,00	0,00
5.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	ANGGARAN	3.902.153.556,00	0,00	0,00	0,00
		REALISASI	3.699.201.421,00	0,00	0,00	0,00
5.01.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	ANGGARAN	42.354.140,00	0,00	0,00	0,00
		REALISASI	41.357.264,00	0,00	0,00	0,00
5.01.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	ANGGARAN	7.500.000,00	0,00	0,00	0,00
		REALISASI	7.499.200,00	0,00	0,00	0,00
5.01.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	ANGGARAN	15.000.540,00	0,00	0,00	0,00
		REALISASI	14.998.000,00	0,00	0,00	0,00
5.01.01.2.03.06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	ANGGARAN	15.000.540,00	0,00	0,00	0,00
		REALISASI	14.998.000,00	0,00	0,00	0,00
5.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	ANGGARAN	177.324.657,00	0,00	0,00	0,00
		REALISASI	169.078.850,00	0,00	0,00	0,00
5.01.01.2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	ANGGARAN	115.218.000,00	0,00	0,00	0,00
		REALISASI	107.323.350,00	0,00	0,00	0,00
5.01.01.2.05.03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	ANGGARAN	24.756.657,00	0,00	0,00	0,00
		REALISASI	24.605.500,00	0,00	0,00	0,00
5.01.01.2.05.11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	ANGGARAN	37.350.000,00	0,00	0,00	0,00
		REALISASI	37.150.000,00	0,00	0,00	0,00

KODE	URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN	ANGGARAN / REALISASI	KELOMPOK BELANJA			
			OPERASI	MODAL	TDK TERDUGA	TRANSFER
5.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	ANGGARAN	854.694.008,00	2.482.537,00	0,00	0,00
		REALISASI	852.242.993,00	2.458.950,00	0,00	0,00
5.01.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	ANGGARAN	33.074.200,00	2.482.537,00	0,00	0,00
		REALISASI	33.059.500,00	2.458.950,00	0,00	0,00
5.01.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	ANGGARAN	10.002.740,00	0,00	0,00	0,00
		REALISASI	9.996.900,00	0,00	0,00	0,00
5.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	ANGGARAN	34.887.966,00	0,00	0,00	0,00
		REALISASI	34.814.900,00	0,00	0,00	0,00
5.01.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	ANGGARAN	9.798.000,00	0,00	0,00	0,00
		REALISASI	9.660.000,00	0,00	0,00	0,00
5.01.01.2.06.07	Penyediaan Bahan/Material	ANGGARAN	170.034.302,00	0,00	0,00	0,00
		REALISASI	167.980.562,00	0,00	0,00	0,00
5.01.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	ANGGARAN	9.546.800,00	0,00	0,00	0,00
		REALISASI	9.542.500,00	0,00	0,00	0,00
5.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	ANGGARAN	587.350.000,00	0,00	0,00	0,00
		REALISASI	587.188.631,00	0,00	0,00	0,00
5.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	ANGGARAN	40.058.252,00	744.438.548,00	0,00	0,00
		REALISASI	35.023.950,00	741.464.450,00	0,00	0,00
5.01.01.2.07.02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	ANGGARAN	0,00	517.523.292,00	0,00	0,00
		REALISASI	0,00	515.722.000,00	0,00	0,00
5.01.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	ANGGARAN	6.495.000,00	192.436.650,00	0,00	0,00
		REALISASI	1.598.950,00	191.280.950,00	0,00	0,00
5.01.01.2.07.10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	ANGGARAN	33.563.252,00	34.478.606,00	0,00	0,00
		REALISASI	33.425.000,00	34.461.500,00	0,00	0,00
5.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	ANGGARAN	247.478.696,00	4.856.250,00	0,00	0,00
		REALISASI	219.365.700,00	3.937.900,00	0,00	0,00
5.01.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	ANGGARAN	7.000.000,00	0,00	0,00	0,00
		REALISASI	7.000.000,00	0,00	0,00	0,00
5.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	ANGGARAN	98.502.000,00	0,00	0,00	0,00
		REALISASI	82.271.298,00	0,00	0,00	0,00
5.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	ANGGARAN	141.976.696,00	4.856.250,00	0,00	0,00
		REALISASI	130.094.402,00	3.937.900,00	0,00	0,00
5.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	ANGGARAN	883.436.984,00	5.550.000,00	0,00	0,00
		REALISASI	876.554.018,04	5.550.000,00	0,00	0,00
5.01.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	ANGGARAN	54.315.127,00	0,00	0,00	0,00
		REALISASI	53.746.663,00	0,00	0,00	0,00

KODE	URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN	ANGGARAN / REALISASI	KELOMPOK BELANJA			
			OPERASI	MODAL	TDK TERDUGA	TRANSFER
5.01.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	ANGGARAN	264.993.681,00	0,00	0,00	0,00
		REALISASI	260.547.127,00	0,00	0,00	0,00
5.01.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	ANGGARAN	33.699.643,00	0,00	0,00	0,00
		REALISASI	33.665.000,00	0,00	0,00	0,00
5.01.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	ANGGARAN	530.428.533,00	5.550.000,00	0,00	0,00
		REALISASI	528.595.228,04	5.550.000,00	0,00	0,00
5.01.02	**PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH**	ANGGARAN	1.726.684.568,00	0,00	0,00	0,00
		REALISASI	1.648.479.682,00	0,00	0,00	0,00
5.01.02.2.01	Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	ANGGARAN	1.397.308.158,00	0,00	0,00	0,00
		REALISASI	1.354.512.650,00	0,00	0,00	0,00
5.01.02.2.01.01	Analisis Kondisi Daerah, Permasalahan, dan Isu Strategis Pembangunan Daerah	ANGGARAN	564.171.914,00	0,00	0,00	0,00
		REALISASI	555.240.868,00	0,00	0,00	0,00
5.01.02.2.01.02	Koordinasi Penelaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Dokumen Kebijakan Lainnya	ANGGARAN	46.377.033,00	0,00	0,00	0,00
		REALISASI	43.670.000,00	0,00	0,00	0,00
5.01.02.2.01.03	Pelaksanaan Konsultasi Publik	ANGGARAN	59.174.440,00	0,00	0,00	0,00
		REALISASI	35.464.218,00	0,00	0,00	0,00
5.01.02.2.01.04	Koordinasi Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah	ANGGARAN	36.952.457,00	0,00	0,00	0,00
		REALISASI	35.602.500,00	0,00	0,00	0,00
5.01.02.2.01.05	Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota	ANGGARAN	46.021.700,00	0,00	0,00	0,00
		REALISASI	45.498.350,00	0,00	0,00	0,00
5.01.02.2.01.06	Penyiapan Bahan Koordinasi Musrenbang Kecamatan	ANGGARAN	42.511.800,00	0,00	0,00	0,00
		REALISASI	42.321.000,00	0,00	0,00	0,00
5.01.02.2.01.07	Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	ANGGARAN	602.098.814,00	0,00	0,00	0,00
		REALISASI	596.715.714,00	0,00	0,00	0,00
5.01.02.2.02	Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	ANGGARAN	96.102.557,00	0,00	0,00	0,00
		REALISASI	73.571.904,00	0,00	0,00	0,00
5.01.02.2.02.02	Pembinaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah	ANGGARAN	82.665.322,00	0,00	0,00	0,00
		REALISASI	66.350.804,00	0,00	0,00	0,00
5.01.02.2.02.03	Penyusunan Profil Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	ANGGARAN	13.437.235,00	0,00	0,00	0,00
		REALISASI	7.221.100,00	0,00	0,00	0,00
5.01.02.2.03	Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	ANGGARAN	219.975.688,00	0,00	0,00	0,00
		REALISASI	207.577.928,00	0,00	0,00	0,00
5.01.02.2.03.01	Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten/Kota	ANGGARAN	91.813.280,00	0,00	0,00	0,00
		REALISASI	82.550.650,00	0,00	0,00	0,00

KODE	URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN	ANGGARAN / REALISASI / KELOMPOK BELANJA			
		OPERASI	MODAL	TDK TERDUGA	TRANSFER
5.01.02.2.03.03	Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	128.162.408,00	0,00	0,00	0,00
		125.027.278,00	0,00	0,00	0,00
5.01.02.2.04	Implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah	13.298.165,00	0,00	0,00	0,00
		12.817.200,00	0,00	0,00	0,00
5.01.02.2.04.01	Pengelolaan Data dalam Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah	13.298.165,00	0,00	0,00	0,00
		12.817.200,00	0,00	0,00	0,00
5.01.03	**PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH**	1.285.996.613,00	0,00	0,00	0,00
		1.233.323.757,00	0,00	0,00	0,00
5.01.03.2.01	Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	545.687.608,00	0,00	0,00	0,00
		524.167.720,00	0,00	0,00	0,00
5.01.03.2.01.04	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan	191.758.948,00	0,00	0,00	0,00
		187.833.684,00	0,00	0,00	0,00
5.01.03.2.01.08	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia	353.928.660,00	0,00	0,00	0,00
		336.334.036,00	0,00	0,00	0,00
5.01.03.2.02	Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	354.124.053,00	0,00	0,00	0,00
		325.604.799,00	0,00	0,00	0,00
5.01.03.2.02.04	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian	224.624.862,00	0,00	0,00	0,00
		197.451.608,00	0,00	0,00	0,00
5.01.03.2.02.08	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA	129.499.191,00	0,00	0,00	0,00
		128.153.191,00	0,00	0,00	0,00
5.01.03.2.03	Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	386.184.952,00	0,00	0,00	0,00
		383.551.238,00	0,00	0,00	0,00
5.01.03.2.03.04	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur	192.031.052,00	0,00	0,00	0,00
		190.672.295,00	0,00	0,00	0,00
5.01.03.2.03.08	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan	194.153.900,00	0,00	0,00	0,00
		192.878.943,00	0,00	0,00	0,00
5.02	**KEUANGAN**	28.422.284.631,00	1.731.173.942,00	9.580.000.000,00	183.197.290.930,00
		25.310.157.404,00	1.657.606.860,00	212.500.000,00	177.597.590.972,00
5.02.00	**Non Program**	0,00	0,00	0,00	0,00
		-3.645.000,00	0,00	0,00	95.043.161.190,00
5.02.00.0.00	Non Kegiatan	0,00	0,00	0,00	0,00
		-3.645.000,00	0,00	0,00	95.043.161.190,00

KODE	URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN	ANGGARAN / REALISASI	KELOMPOK BELANJA			
			OPERASI	MODAL	TDK TERDUGA	TRANSFER
5.02.00.0.00.00	Non Sub Kegiatan	ANGGARAN	0,00	0,00	0,00	0,00
		REALISASI	-3.645.000,00	0,00	0,00	95.043.161.190,00
5.02.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	ANGGARAN	21.671.823.117,00	1.070.357.659,00	0,00	0,00
		REALISASI	18.960.478.132,00	999.404.990,00	0,00	0,00
5.02.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	ANGGARAN	158.563.966,00	0,00	0,00	0,00
		REALISASI	153.743.320,00	0,00	0,00	0,00
5.02.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	ANGGARAN	62.442.150,00	0,00	0,00	0,00
		REALISASI	62.301.010,00	0,00	0,00	0,00
5.02.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	ANGGARAN	4.939.500,00	0,00	0,00	0,00
		REALISASI	4.939.320,00	0,00	0,00	0,00
5.02.01.2.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	ANGGARAN	4.717.500,00	0,00	0,00	0,00
		REALISASI	4.712.230,00	0,00	0,00	0,00
5.02.01.2.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	ANGGARAN	10.956.492,00	0,00	0,00	0,00
		REALISASI	10.463.820,00	0,00	0,00	0,00
5.02.01.2.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	ANGGARAN	10.302.924,00	0,00	0,00	0,00
		REALISASI	9.850.360,00	0,00	0,00	0,00
5.02.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	ANGGARAN	65.205.400,00	0,00	0,00	0,00
		REALISASI	61.476.580,00	0,00	0,00	0,00
5.02.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	ANGGARAN	11.599.167.852,00	0,00	0,00	0,00
		REALISASI	9.195.618.129,00	0,00	0,00	0,00
5.02.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	ANGGARAN	11.496.668.632,00	0,00	0,00	0,00
		REALISASI	9.099.732.565,00	0,00	0,00	0,00
5.02.01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	ANGGARAN	75.270.680,00	0,00	0,00	0,00
		REALISASI	73.735.584,00	0,00	0,00	0,00
5.02.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	ANGGARAN	10.733.340,00	0,00	0,00	0,00
		REALISASI	9.021.300,00	0,00	0,00	0,00
5.02.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	ANGGARAN	12.965.100,00	0,00	0,00	0,00
		REALISASI	10.326.180,00	0,00	0,00	0,00
5.02.01.2.02.08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	ANGGARAN	3.530.100,00	0,00	0,00	0,00
		REALISASI	2.802.500,00	0,00	0,00	0,00
5.02.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	ANGGARAN	6.896.430,00	0,00	0,00	0,00
		REALISASI	6.571.470,00	0,00	0,00	0,00
5.02.01.2.03.01	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	ANGGARAN	2.264.400,00	0,00	0,00	0,00
		REALISASI	1.939.500,00	0,00	0,00	0,00
5.02.01.2.03.06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	ANGGARAN	4.632.030,00	0,00	0,00	0,00
		REALISASI	4.631.970,00	0,00	0,00	0,00
5.02.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	ANGGARAN	316.931.668,00	0,00	0,00	0,00
		REALISASI	280.970.388,00	0,00	0,00	0,00

KODE	URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN	ANGGARAN / REALISASI / KELOMPOK BELANJA			
		OPERASI	MODAL	TDK TERDUGA	TRANSFER
5.02.01.2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	98.795.068,00	0,00	0,00	0,00
		90.759.438,00	0,00	0,00	0,00
5.02.01.2.05.11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	218.136.600,00	0,00	0,00	0,00
		190.210.950,00	0,00	0,00	0,00
5.02.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	1.605.696.117,00	361.481.411,00	0,00	0,00
		1.571.626.074,00	302.224.790,00	0,00	0,00
5.02.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	51.675.273,00	0,00	0,00	0,00
		50.564.963,00	0,00	0,00	0,00
5.02.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	20.738.000,00	361.481.411,00	0,00	0,00
		18.466.000,00	302.224.790,00	0,00	0,00
5.02.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	170.094.931,00	0,00	0,00	0,00
		164.112.683,00	0,00	0,00	0,00
5.02.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	46.566.092,00	0,00	0,00	0,00
		45.058.000,00	0,00	0,00	0,00
5.02.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	20.530.671,00	0,00	0,00	0,00
		20.207.500,00	0,00	0,00	0,00
5.02.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	36.018.000,00	0,00	0,00	0,00
		26.520.000,00	0,00	0,00	0,00
5.02.01.2.06.07	Penyediaan Bahan/Material	266.033.868,00	0,00	0,00	0,00
		261.579.192,00	0,00	0,00	0,00
5.02.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	53.948.664,00	0,00	0,00	0,00
		53.600.000,00	0,00	0,00	0,00
5.02.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	940.090.618,00	0,00	0,00	0,00
		931.517.736,00	0,00	0,00	0,00
5.02.01.2.06.10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
5.02.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	6.039.934.480,00	708.876.248,00	0,00	0,00
		5.883.266.200,00	697.180.200,00	0,00	0,00
5.02.01.2.07.02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	6.039.934.480,00	492.386.010,00	0,00	0,00
		5.883.266.200,00	488.226.700,00	0,00	0,00
5.02.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	0,00	123.819.390,00	0,00	0,00
		0,00	116.300.000,00	0,00	0,00
5.02.01.2.07.10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	0,00	92.670.848,00	0,00	0,00
		0,00	92.653.500,00	0,00	0,00
5.02.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	763.971.470,00	0,00	0,00	0,00
		716.357.210,00	0,00	0,00	0,00
5.02.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	25.232.592,00	0,00	0,00	0,00
		22.500.000,00	0,00	0,00	0,00

KODE	URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN	ANGGARAN / REALISASI	KELOMPOK BELANJA			
			OPERASI	MODAL	TDK TERDUGA	TRANSFER
5.02.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		306.951.000,00	0,00	0,00	0,00
			275.137.042,00	0,00	0,00	0,00
5.02.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		431.787.878,00	0,00	0,00	0,00
			418.720.168,00	0,00	0,00	0,00
5.02.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		1.172.891.134,00	0,00	0,00	0,00
			1.144.555.491,00	0,00	0,00	0,00
5.02.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan		201.684.900,00	0,00	0,00	0,00
			196.700.800,00	0,00	0,00	0,00
5.02.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		525.982.212,00	0,00	0,00	0,00
			509.757.720,00	0,00	0,00	0,00
5.02.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya		53.187.870,00	0,00	0,00	0,00
			52.998.271,00	0,00	0,00	0,00
5.02.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		392.036.152,00	0,00	0,00	0,00
			385.098.700,00	0,00	0,00	0,00
5.02.01.2.13	Penataan Organisasi		7.770.000,00	0,00	0,00	0,00
			7.769.850,00	0,00	0,00	0,00
5.02.01.2.13.01	Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan		7.770.000,00	0,00	0,00	0,00
			7.769.850,00	0,00	0,00	0,00
5.02.02	**PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH**		2.593.881.257,00	211.421.283,00	9.580.000.000,00	183.197.290.930,00
			2.382.628.253,00	211.004.870,00	212.500.000,00	82.554.429.782,00
5.02.02.2.01	Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah		691.040.850,00	0,00	0,00	0,00
			676.357.244,00	0,00	0,00	0,00
5.02.02.2.01.01	Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS		23.272.815,00	0,00	0,00	0,00
			23.247.880,00	0,00	0,00	0,00
5.02.02.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS		23.272.815,00	0,00	0,00	0,00
			23.247.700,00	0,00	0,00	0,00
5.02.02.2.01.03	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA- SKPD		11.468.076,00	0,00	0,00	0,00
			11.427.400,00	0,00	0,00	0,00
5.02.02.2.01.04	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan RKA-SKPD		11.468.076,00	0,00	0,00	0,00
			11.405.000,00	0,00	0,00	0,00
5.02.02.2.01.05	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA- SKPD		11.948.928,00	0,00	0,00	0,00
			11.766.400,00	0,00	0,00	0,00
5.02.02.2.01.06	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan DPA-SKPD		16.412.630,00	0,00	0,00	0,00
			16.269.200,00	0,00	0,00	0,00
5.02.02.2.01.07	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD		144.027.547,00	0,00	0,00	0,00
			134.009.668,00	0,00	0,00	0,00

KODE	URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN	ANGGARAN / REALISASI	KELOMPOK BELANJA			
			OPERASI	MODAL	TDK TERDUGA	TRANSFER
5.02.02.2.01.08	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	ANGGARAN	158.861.617,00	0,00	0,00	0,00
		REALISASI	156.877.468,00	0,00	0,00	0,00
5.02.02.2.01.09	Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	ANGGARAN	160.944.606,00	0,00	0,00	0,00
		REALISASI	160.358.828,00	0,00	0,00	0,00
5.02.02.2.01.10	Koordinasi Perencanaan Anggaran Pendapatan	ANGGARAN	11.421.900,00	0,00	0,00	0,00
		REALISASI	11.003.400,00	0,00	0,00	0,00
5.02.02.2.01.11	Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah	ANGGARAN	10.154.500,00	0,00	0,00	0,00
		REALISASI	9.870.800,00	0,00	0,00	0,00
5.02.02.2.01.12	Koordinasi Perencanaan Anggaran Pembiayaan	ANGGARAN	7.024.100,00	0,00	0,00	0,00
		REALISASI	6.912.600,00	0,00	0,00	0,00
5.02.02.2.01.13	Pembinaan Perencanaan Penganggaran Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	ANGGARAN	100.763.240,00	0,00	0,00	0,00
		REALISASI	99.960.900,00	0,00	0,00	0,00
5.02.02.2.02	Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	ANGGARAN	848.645.759,00	77.700.000,00	0,00	0,00
		REALISASI	830.463.230,00	77.675.000,00	0,00	0,00
5.02.02.2.02.01	Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	ANGGARAN	97.038.052,00	0,00	0,00	0,00
		REALISASI	95.319.582,00	0,00	0,00	0,00
5.02.02.2.02.03	Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD	ANGGARAN	5.348.868,00	0,00	0,00	0,00
		REALISASI	5.318.000,00	0,00	0,00	0,00
5.02.02.2.02.05	Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	ANGGARAN	57.683.500,00	0,00	0,00	0,00
		REALISASI	57.182.800,00	0,00	0,00	0,00
5.02.02.2.02.06	Koordinasi, Pelaksanaan Kerja Sama dan Pemantauan Transaksi Non Tunai dengan Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank	ANGGARAN	6.582.300,00	0,00	0,00	0,00
		REALISASI	6.551.200,00	0,00	0,00	0,00
5.02.02.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/ Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	ANGGARAN	91.507.551,00	0,00	0,00	0,00
		REALISASI	91.223.300,00	0,00	0,00	0,00
5.02.02.2.02.08	Koordinasi Pelaksanaan Piutang dan Utang Daerah yang Timbul Akibat Pengelolaan Kas, Pelaksanaan Analisis Pembiayaan dan Penempatan Uang Daerah sebagai Optimalisasi Kas	ANGGARAN	10.442.880,00	0,00	0,00	0,00
		REALISASI	10.302.800,00	0,00	0,00	0,00
5.02.02.2.02.09	Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait	ANGGARAN	144.729.556,00	0,00	0,00	0,00
		REALISASI	144.072.500,00	0,00	0,00	0,00
5.02.02.2.02.11	Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota	ANGGARAN	435.313.052,00	77.700.000,00	0,00	0,00
		REALISASI	420.493.048,00	77.675.000,00	0,00	0,00
5.02.02.2.03	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	ANGGARAN	660.576.865,00	0,00	0,00	0,00
		REALISASI	584.453.181,00	0,00	0,00	0,00

KODE	URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN	ANGGARAN / REALISASI	KELOMPOK BELANJA			
			OPERASI	MODAL	TDK TERDUGA	TRANSFER
5.02.02.2.03.02	Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO dan Beban	ANGGARAN	42.045.100,00	0,00	0,00	0,00
		REALISASI	40.805.600,00	0,00	0,00	0,00
5.02.02.2.03.03	Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran	ANGGARAN	28.813.000,00	0,00	0,00	0,00
		REALISASI	27.852.900,00	0,00	0,00	0,00
5.02.02.2.03.04	Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	ANGGARAN	153.626.440,00	0,00	0,00	0,00
		REALISASI	129.754.400,00	0,00	0,00	0,00
5.02.02.2.03.05	Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	ANGGARAN	266.702.709,00	0,00	0,00	0,00
		REALISASI	248.693.181,00	0,00	0,00	0,00
5.02.02.2.03.06	Penyusunan Tanggapan/Tindak Lanjut Terhadap LHP BPK atas Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	ANGGARAN	11.404.500,00	0,00	0,00	0,00
		REALISASI	7.916.200,00	0,00	0,00	0,00
5.02.02.2.03.09	Penyusunan Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah	ANGGARAN	34.502.820,00	0,00	0,00	0,00
		REALISASI	34.360.800,00	0,00	0,00	0,00
5.02.02.2.03.10	Penyusunan Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah	ANGGARAN	24.887.130,00	0,00	0,00	0,00
		REALISASI	0,00	0,00	0,00	0,00
5.02.02.2.03.11	Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota	ANGGARAN	98.595.166,00	0,00	0,00	0,00
		REALISASI	95.070.100,00	0,00	0,00	0,00
5.02.02.2.04	Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	ANGGARAN	100.000.000,00	0,00	9.580.000.000,00	183.197.290.930,00
		REALISASI	0,00	0,00	212.500.000,00	82.554.429.782,00
5.02.02.2.04.08	Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	ANGGARAN	100.000.000,00	0,00	0,00	183.197.290.930,00
		REALISASI	0,00	0,00	0,00	82.554.429.782,00
5.02.02.2.04.09	Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	ANGGARAN	0,00	0,00	9.580.000.000,00	0,00
		REALISASI	0,00	0,00	212.500.000,00	0,00
5.02.02.2.05	Pengelolaan Data dan Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah Lingkup Keuangan Daerah	ANGGARAN	293.617.783,00	133.721.283,00	0,00	0,00
		REALISASI	291.354.598,00	133.329.870,00	0,00	0,00
5.02.02.2.05.02	Implementasi dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah	ANGGARAN	293.617.783,00	133.721.283,00	0,00	0,00
		REALISASI	291.354.598,00	133.329.870,00	0,00	0,00
5.02.03	**PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH**	ANGGARAN	900.811.487,00	0,00	0,00	0,00
		REALISASI	753.431.707,00	0,00	0,00	0,00
5.02.03.2.01	Pengelolaan Barang Milik Daerah	ANGGARAN	900.811.487,00	0,00	0,00	0,00
		REALISASI	753.431.707,00	0,00	0,00	0,00
5.02.03.2.01.01	Penyusunan Standar Harga	ANGGARAN	108.083.719,00	0,00	0,00	0,00
		REALISASI	84.489.535,00	0,00	0,00	0,00

KODE	URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN	ANGGARAN / REALISASI	KELOMPOK BELANJA			
			OPERASI	MODAL	TDK TERDUGA	TRANSFER
5.02.03.2.01.03	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah		21.017.590,00	0,00	0,00	0,00
			19.750.970,00	0,00	0,00	0,00
5.02.03.2.01.05	Penatausahaan Barang Milik Daerah		116.931.950,00	0,00	0,00	0,00
			95.478.382,00	0,00	0,00	0,00
5.02.03.2.01.06	Inventarisasi Barang Milik Daerah		136.484.500,00	0,00	0,00	0,00
			79.117.400,00	0,00	0,00	0,00
5.02.03.2.01.08	Penilaian Barang Milik Daerah		39.326.082,00	0,00	0,00	0,00
			36.179.400,00	0,00	0,00	0,00
5.02.03.2.01.09	Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah		354.527.190,00	0,00	0,00	0,00
			318.857.129,00	0,00	0,00	0,00
5.02.03.2.01.10	Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah		46.499.294,00	0,00	0,00	0,00
			45.001.891,00	0,00	0,00	0,00
5.02.03.2.01.11	Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah		37.158.434,00	0,00	0,00	0,00
			36.258.800,00	0,00	0,00	0,00
5.02.03.2.01.12	Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah		40.782.728,00	0,00	0,00	0,00
			38.298.200,00	0,00	0,00	0,00
5.02.04	**PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH**		3.255.768.770,00	449.395.000,00	0,00	0,00
			3.217.264.312,00	447.197.000,00	0,00	0,00
5.02.04.2.01	Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah		3.255.768.770,00	449.395.000,00	0,00	0,00
			3.217.264.312,00	447.197.000,00	0,00	0,00
5.02.04.2.01.01	Perencanaan Pengelolaan Pajak Daerah		419.762.746,00	0,00	0,00	0,00
			415.208.985,00	0,00	0,00	0,00
5.02.04.2.01.02	Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah		235.863.343,00	0,00	0,00	0,00
			231.068.228,00	0,00	0,00	0,00
5.02.04.2.01.03	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah		65.248.800,00	0,00	0,00	0,00
			64.735.600,00	0,00	0,00	0,00
5.02.04.2.01.04	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah		399.577.356,00	0,00	0,00	0,00
			399.577.140,00	0,00	0,00	0,00
5.02.04.2.01.05	Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah		123.813.464,00	0,00	0,00	0,00
			122.092.264,00	0,00	0,00	0,00
5.02.04.2.01.06	Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah		317.103.613,00	400.000.000,00	0,00	0,00
			315.326.879,00	398.000.000,00	0,00	0,00
5.02.04.2.01.07	Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)		594.392.164,00	0,00	0,00	0,00
			592.489.184,00	0,00	0,00	0,00
5.02.04.2.01.08	Penetapan Wajib Pajak Daerah		66.048.664,00	0,00	0,00	0,00
			63.714.264,00	0,00	0,00	0,00

KODE	URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN	ANGGARAN / REALISASI	KELOMPOK BELANJA			
			OPERASI	MODAL	TDK TERDUGA	TRANSFER
5.02.04.2.01.09	Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah		129.546.492,00	49.395.000,00	0,00	0,00
			123.701.192,00	49.197.000,00	0,00	0,00
5.02.04.2.01.10	Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah		110.013.076,00	0,00	0,00	0,00
			108.528.964,00	0,00	0,00	0,00
5.02.04.2.01.11	Penagihan Pajak Daerah		602.509.914,00	0,00	0,00	0,00
			592.270.904,00	0,00	0,00	0,00
5.02.04.2.01.12	Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah		12.146.620,00	0,00	0,00	0,00
			11.034.700,00	0,00	0,00	0,00
5.02.04.2.01.13	Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah		122.645.054,00	0,00	0,00	0,00
			121.431.744,00	0,00	0,00	0,00
5.02.04.2.01.14	Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah		57.097.464,00	0,00	0,00	0,00
			56.084.264,00	0,00	0,00	0,00
5.03	**KEPEGAWAIAN**		6.868.138.858,00	118.325.000,00	0,00	0,00
			6.639.830.014,00	118.310.000,00	0,00	0,00
5.03.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**		4.800.642.910,00	118.325.000,00	0,00	0,00
			4.620.728.807,00	118.310.000,00	0,00	0,00
5.03.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		92.484.140,00	0,00	0,00	0,00
			92.078.800,00	0,00	0,00	0,00
5.03.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		17.546.780,00	0,00	0,00	0,00
			17.535.100,00	0,00	0,00	0,00
5.03.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD		6.088.560,00	0,00	0,00	0,00
			6.058.000,00	0,00	0,00	0,00
5.03.01.2.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD		11.488.560,00	0,00	0,00	0,00
			11.467.800,00	0,00	0,00	0,00
5.03.01.2.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD		6.088.440,00	0,00	0,00	0,00
			5.988.300,00	0,00	0,00	0,00
5.03.01.2.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD		11.500.160,00	0,00	0,00	0,00
			11.467.800,00	0,00	0,00	0,00
5.03.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		39.771.640,00	0,00	0,00	0,00
			39.561.800,00	0,00	0,00	0,00
5.03.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		2.778.878.165,00	0,00	0,00	0,00
			2.625.916.028,00	0,00	0,00	0,00
5.03.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		2.655.622.617,00	0,00	0,00	0,00
			2.504.652.200,00	0,00	0,00	0,00
5.03.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD		12.907.420,00	0,00	0,00	0,00
			12.900.000,00	0,00	0,00	0,00
5.03.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD		55.368.664,00	0,00	0,00	0,00
			54.396.064,00	0,00	0,00	0,00

KODE	URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN	ANGGARAN / REALISASI	KELOMPOK BELANJA			
			OPERASI	MODAL	TDK TERDUGA	TRANSFER
5.03.01.2.02.08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran		54.979.464,00	0,00	0,00	0,00
			53.967.764,00	0,00	0,00	0,00
5.03.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah		16.275.700,00	0,00	0,00	0,00
			16.217.600,00	0,00	0,00	0,00
5.03.01.2.03.04	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD		16.275.700,00	0,00	0,00	0,00
			16.217.600,00	0,00	0,00	0,00
5.03.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		522.260.522,00	0,00	0,00	0,00
			517.722.490,00	0,00	0,00	0,00
5.03.01.2.05.03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian		204.057.558,00	0,00	0,00	0,00
			202.153.602,00	0,00	0,00	0,00
5.03.01.2.05.04	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian		111.784.600,00	0,00	0,00	0,00
			111.753.215,00	0,00	0,00	0,00
5.03.01.2.05.05	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai		156.077.064,00	0,00	0,00	0,00
			155.022.903,00	0,00	0,00	0,00
5.03.01.2.05.11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan		50.341.300,00	0,00	0,00	0,00
			48.792.770,00	0,00	0,00	0,00
5.03.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah		667.787.603,00	4.500.000,00	0,00	0,00
			666.052.485,00	4.500.000,00	0,00	0,00
5.03.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		8.333.000,00	0,00	0,00	0,00
			8.318.900,00	0,00	0,00	0,00
5.03.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor		16.813.200,00	0,00	0,00	0,00
			16.789.000,00	0,00	0,00	0,00
5.03.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan		49.340.000,00	0,00	0,00	0,00
			49.315.000,00	0,00	0,00	0,00
5.03.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan		5.175.000,00	0,00	0,00	0,00
			5.100.000,00	0,00	0,00	0,00
5.03.01.2.06.07	Penyediaan Bahan/Material		177.939.803,00	4.500.000,00	0,00	0,00
			176.370.800,00	4.500.000,00	0,00	0,00
5.03.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		410.186.600,00	0,00	0,00	0,00
			410.158.785,00	0,00	0,00	0,00
5.03.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		0,00	113.825.000,00	0,00	0,00
			0,00	113.810.000,00	0,00	0,00
5.03.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya		0,00	113.825.000,00	0,00	0,00
			0,00	113.810.000,00	0,00	0,00
5.03.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		490.318.380,00	0,00	0,00	0,00
			474.379.254,00	0,00	0,00	0,00
5.03.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat		5.200.000,00	0,00	0,00	0,00
			5.200.000,00	0,00	0,00	0,00

KODE	URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN	ANGGARAN / REALISASI / KELOMPOK BELANJA			
		OPERASI	MODAL	TDK TERDUGA	TRANSFER
5.03.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	84.660.000,00	0,00	0,00	0,00
		77.746.394,00	0,00	0,00	0,00
5.03.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	400.458.380,00	0,00	0,00	0,00
		391.432.860,00	0,00	0,00	0,00
5.03.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	224.088.400,00	0,00	0,00	0,00
		219.812.150,00	0,00	0,00	0,00
5.03.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	128.529.200,00	0,00	0,00	0,00
		124.443.200,00	0,00	0,00	0,00
5.03.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	26.202.200,00	0,00	0,00	0,00
		26.180.500,00	0,00	0,00	0,00
5.03.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	69.357.000,00	0,00	0,00	0,00
		69.188.450,00	0,00	0,00	0,00
5.03.01.2.13	Penataan Organisasi	8.550.000,00	0,00	0,00	0,00
		8.550.000,00	0,00	0,00	0,00
5.03.01.2.13.01	Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	8.550.000,00	0,00	0,00	0,00
		8.550.000,00	0,00	0,00	0,00
5.03.02	**PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH**	2.067.495.948,00	0,00	0,00	0,00
		2.019.101.207,00	0,00	0,00	0,00
5.03.02.2.01	Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN	580.756.864,00	0,00	0,00	0,00
		578.016.064,00	0,00	0,00	0,00
5.03.02.2.01.02	Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN	210.764.400,00	0,00	0,00	0,00
		210.401.127,00	0,00	0,00	0,00
5.03.02.2.01.03	Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK	173.235.700,00	0,00	0,00	0,00
		172.254.630,00	0,00	0,00	0,00
5.03.02.2.01.06	Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian	103.226.000,00	0,00	0,00	0,00
		103.167.017,00	0,00	0,00	0,00
5.03.02.2.01.11	Pengelolaan Data Kepegawaian	93.530.764,00	0,00	0,00	0,00
		92.193.290,00	0,00	0,00	0,00
5.03.02.2.02	Mutasi dan Promosi ASN	621.589.392,00	0,00	0,00	0,00
		607.688.341,00	0,00	0,00	0,00
5.03.02.2.02.01	Pengelolaan Mutasi ASN	84.242.164,00	0,00	0,00	0,00
		74.746.250,00	0,00	0,00	0,00
5.03.02.2.02.02	Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	134.602.064,00	0,00	0,00	0,00
		131.500.671,00	0,00	0,00	0,00
5.03.02.2.02.03	Pengelolaan Promosi ASN	402.745.164,00	0,00	0,00	0,00
		401.441.420,00	0,00	0,00	0,00
5.03.02.2.03	Pengembangan Kompetensi ASN	707.823.328,00	0,00	0,00	0,00
		677.338.273,00	0,00	0,00	0,00

KODE	URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN	ANGGARAN / REALISASI	KELOMPOK BELANJA			
			OPERASI	MODAL	TDK TERDUGA	TRANSFER
5.03.02.2.03.01	Peningkatan Kapasitas Kinerja ASN		418.386.264,00	0,00	0,00	0,00
			417.199.358,00	0,00	0,00	0,00
5.03.02.2.03.04	Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN		153.076.764,00	0,00	0,00	0,00
			123.905.283,00	0,00	0,00	0,00
5.03.02.2.03.05	Koordinasi dan Kerja Sama Pelaksanaan Diklat		88.489.200,00	0,00	0,00	0,00
			88.455.400,00	0,00	0,00	0,00
5.03.02.2.03.14	Fasilitasi Pengembangan Karir dalam Jabatan Fungsional		47.871.100,00	0,00	0,00	0,00
			47.778.232,00	0,00	0,00	0,00
5.03.02.2.04	Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur		157.326.364,00	0,00	0,00	0,00
			156.058.529,00	0,00	0,00	0,00
5.03.02.2.04.04	Pengelolaan Pemberian Penghargaan bagi Pegawai		34.406.700,00	0,00	0,00	0,00
			34.333.223,00	0,00	0,00	0,00
5.03.02.2.04.07	Pembinaan Disiplin ASN		66.562.200,00	0,00	0,00	0,00
			66.524.042,00	0,00	0,00	0,00
5.03.02.2.04.08	Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN		56.357.464,00	0,00	0,00	0,00
			55.201.264,00	0,00	0,00	0,00
5.04	**PENDIDIKAN DAN PELATIHAN**		1.310.887.400,00	0,00	0,00	0,00
			1.310.559.524,00	0,00	0,00	0,00
5.04.02	**PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA**		1.310.887.400,00	0,00	0,00	0,00
			1.310.559.524,00	0,00	0,00	0,00
5.04.02.2.02	Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional		1.310.887.400,00	0,00	0,00	0,00
			1.310.559.524,00	0,00	0,00	0,00
5.04.02.2.02.07	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan		1.310.887.400,00	0,00	0,00	0,00
			1.310.559.524,00	0,00	0,00	0,00
5.05	**PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN**		768.565.270,00	0,00	0,00	0,00
			741.994.253,00	0,00	0,00	0,00
5.05.02	**PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH**		768.565.270,00	0,00	0,00	0,00
			741.994.253,00	0,00	0,00	0,00
5.05.02.2.01	Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan		9.589.200,00	0,00	0,00	0,00
			7.190.800,00	0,00	0,00	0,00
5.05.02.2.01.03	Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Kelembagaan dan Ketatalaksanaan		9.589.200,00	0,00	0,00	0,00
			7.190.800,00	0,00	0,00	0,00
5.05.02.2.02	Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan		385.172.980,00	0,00	0,00	0,00
			366.043.600,00	0,00	0,00	0,00
5.05.02.2.02.01	Penelitian dan Pengembangan Bidang Aspek- Aspek Sosial		385.172.980,00	0,00	0,00	0,00
			366.043.600,00	0,00	0,00	0,00

KODE	URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN	ANGGARAN / REALISASI	KELOMPOK BELANJA			
			OPERASI	MODAL	TDK TERDUGA	TRANSFER
5.05.02.2.04	Pengembangan Inovasi dan Teknologi	ANGGARAN	373.803.090,00	0,00	0,00	0,00
		REALISASI	368.759.853,00	0,00	0,00	0,00
5.05.02.2.04.03	Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Bersifat Inovatif	ANGGARAN	278.440.766,00	0,00	0,00	0,00
		REALISASI	275.048.089,00	0,00	0,00	0,00
5.05.02.2.04.04	Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan	ANGGARAN	95.362.324,00	0,00	0,00	0,00
		REALISASI	93.711.764,00	0,00	0,00	0,00
6	**UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN**	ANGGARAN	9.417.118.906,00	2.308.441.841,00	0,00	0,00
		REALISASI	9.028.589.663,00	2.302.839.000,00	0,00	0,00
6.01	**INSPEKTORAT**	ANGGARAN	9.417.118.906,00	2.308.441.841,00	0,00	0,00
		REALISASI	9.028.589.663,00	2.302.839.000,00	0,00	0,00
6.01.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	ANGGARAN	7.244.756.540,00	2.308.441.841,00	0,00	0,00
		REALISASI	6.988.019.528,00	2.302.839.000,00	0,00	0,00
6.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	ANGGARAN	36.454.264,00	0,00	0,00	0,00
		REALISASI	35.464.164,00	0,00	0,00	0,00
6.01.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	ANGGARAN	36.454.264,00	0,00	0,00	0,00
		REALISASI	35.464.164,00	0,00	0,00	0,00
6.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	ANGGARAN	5.102.208.672,00	0,00	0,00	0,00
		REALISASI	4.921.921.525,00	0,00	0,00	0,00
6.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	ANGGARAN	5.065.951.408,00	0,00	0,00	0,00
		REALISASI	4.886.654.361,00	0,00	0,00	0,00
6.01.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	ANGGARAN	36.257.264,00	0,00	0,00	0,00
		REALISASI	35.267.164,00	0,00	0,00	0,00
6.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	ANGGARAN	711.337.600,00	0,00	0,00	0,00
		REALISASI	692.697.868,00	0,00	0,00	0,00
6.01.01.2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	ANGGARAN	82.491.500,00	0,00	0,00	0,00
		REALISASI	80.360.000,00	0,00	0,00	0,00
6.01.01.2.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	ANGGARAN	323.504.000,00	0,00	0,00	0,00
		REALISASI	307.717.272,00	0,00	0,00	0,00
6.01.01.2.05.11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	ANGGARAN	305.342.100,00	0,00	0,00	0,00
		REALISASI	304.620.596,00	0,00	0,00	0,00
6.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	ANGGARAN	601.901.909,00	178.565.978,00	0,00	0,00
		REALISASI	592.216.397,00	175.130.000,00	0,00	0,00
6.01.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	ANGGARAN	0,00	178.565.978,00	0,00	0,00
		REALISASI	0,00	175.130.000,00	0,00	0,00
6.01.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	ANGGARAN	80.255.769,00	0,00	0,00	0,00
		REALISASI	79.949.000,00	0,00	0,00	0,00
6.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	ANGGARAN	21.936.930,00	0,00	0,00	0,00
		REALISASI	20.725.000,00	0,00	0,00	0,00

KODE	URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN	ANGGARAN / REALISASI	KELOMPOK BELANJA			
			OPERASI	MODAL	TDK TERDUGA	TRANSFER
6.01.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	ANGGARAN	11.902.500,00	0,00	0,00	0,00
		REALISASI	9.720.000,00	0,00	0,00	0,00
6.01.01.2.06.07	Penyediaan Bahan/Material	ANGGARAN	50.306.310,00	0,00	0,00	0,00
		REALISASI	48.351.500,00	0,00	0,00	0,00
6.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	ANGGARAN	437.500.400,00	0,00	0,00	0,00
		REALISASI	433.470.897,00	0,00	0,00	0,00
6.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	ANGGARAN	0,00	2.129.875.863,00	0,00	0,00
		REALISASI	0,00	2.127.709.000,00	0,00	0,00
6.01.01.2.07.01	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	ANGGARAN	0,00	1.674.588.291,00	0,00	0,00
		REALISASI	0,00	1.674.255.000,00	0,00	0,00
6.01.01.2.07.09	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	ANGGARAN	0,00	455.287.572,00	0,00	0,00
		REALISASI	0,00	453.454.000,00	0,00	0,00
6.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	ANGGARAN	290.336.245,00	0,00	0,00	0,00
		REALISASI	279.341.761,00	0,00	0,00	0,00
6.01.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	ANGGARAN	2.664.000,00	0,00	0,00	0,00
		REALISASI	2.500.000,00	0,00	0,00	0,00
6.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	ANGGARAN	45.420.000,00	0,00	0,00	0,00
		REALISASI	43.620.935,00	0,00	0,00	0,00
6.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	ANGGARAN	242.252.245,00	0,00	0,00	0,00
		REALISASI	233.220.826,00	0,00	0,00	0,00
6.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	ANGGARAN	502.517.850,00	0,00	0,00	0,00
		REALISASI	466.377.813,00	0,00	0,00	0,00
6.01.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	ANGGARAN	79.743.012,00	0,00	0,00	0,00
		REALISASI	76.623.900,00	0,00	0,00	0,00
6.01.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	ANGGARAN	180.588.933,00	0,00	0,00	0,00
		REALISASI	158.409.413,00	0,00	0,00	0,00
6.01.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	ANGGARAN	26.642.220,00	0,00	0,00	0,00
		REALISASI	26.615.000,00	0,00	0,00	0,00
6.01.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	ANGGARAN	215.543.685,00	0,00	0,00	0,00
		REALISASI	204.729.500,00	0,00	0,00	0,00
6.01.02	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN**	ANGGARAN	1.719.733.750,00	0,00	0,00	0,00
		REALISASI	1.657.620.128,00	0,00	0,00	0,00
6.01.02.2.01	Penyelenggaraan Pengawasan Internal	ANGGARAN	1.253.042.754,00	0,00	0,00	0,00
		REALISASI	1.221.217.528,00	0,00	0,00	0,00
6.01.02.2.01.01	Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	ANGGARAN	137.896.968,00	0,00	0,00	0,00
		REALISASI	130.041.600,00	0,00	0,00	0,00

KODE	URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN	ANGGARAN / REALISASI	KELOMPOK BELANJA			
			OPERASI	MODAL	TDK TERDUGA	TRANSFER
6.01.02.2.01.02	Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	ANGGARAN	97.777.600,00	0,00	0,00	0,00
		REALISASI	96.765.000,00	0,00	0,00	0,00
6.01.02.2.01.03	Reviu Laporan Kinerja	ANGGARAN	154.068.716,00	0,00	0,00	0,00
		REALISASI	134.317.884,00	0,00	0,00	0,00
6.01.02.2.01.04	Reviu Laporan Keuangan	ANGGARAN	51.123.170,00	0,00	0,00	0,00
		REALISASI	49.992.400,00	0,00	0,00	0,00
6.01.02.2.01.05	Pengawasan Desa	ANGGARAN	496.954.640,00	0,00	0,00	0,00
		REALISASI	495.917.000,00	0,00	0,00	0,00
6.01.02.2.01.06	Kerja Sama Pengawasan Internal	ANGGARAN	70.260.060,00	0,00	0,00	0,00
		REALISASI	69.441.294,00	0,00	0,00	0,00
6.01.02.2.01.07	Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	ANGGARAN	244.961.600,00	0,00	0,00	0,00
		REALISASI	244.742.350,00	0,00	0,00	0,00
6.01.02.2.02	Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	ANGGARAN	466.690.996,00	0,00	0,00	0,00
		REALISASI	436.402.600,00	0,00	0,00	0,00
6.01.02.2.02.01	Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah	ANGGARAN	64.275.660,00	0,00	0,00	0,00
		REALISASI	44.550.000,00	0,00	0,00	0,00
6.01.02.2.02.02	Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	ANGGARAN	402.415.336,00	0,00	0,00	0,00
		REALISASI	391.852.600,00	0,00	0,00	0,00
6.01.03	**PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI**	ANGGARAN	452.628.616,00	0,00	0,00	0,00
		REALISASI	382.950.007,00	0,00	0,00	0,00
6.01.03.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan	ANGGARAN	60.918.140,00	0,00	0,00	0,00
		REALISASI	46.570.500,00	0,00	0,00	0,00
6.01.03.2.01.01	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan	ANGGARAN	60.918.140,00	0,00	0,00	0,00
		REALISASI	46.570.500,00	0,00	0,00	0,00
6.01.03.2.02	Pendampingan dan Asistensi	ANGGARAN	391.710.476,00	0,00	0,00	0,00
		REALISASI	336.379.507,00	0,00	0,00	0,00
6.01.03.2.02.01	Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	ANGGARAN	91.489.252,00	0,00	0,00	0,00
		REALISASI	44.354.300,00	0,00	0,00	0,00
6.01.03.2.02.02	Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	ANGGARAN	78.473.490,00	0,00	0,00	0,00
		REALISASI	74.322.500,00	0,00	0,00	0,00
6.01.03.2.02.03	Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	ANGGARAN	221.747.734,00	0,00	0,00	0,00
		REALISASI	217.702.707,00	0,00	0,00	0,00
7	**UNSUR KEWILAYAHAN**	ANGGARAN	42.130.689.573,00	3.000.599.017,00	0,00	0,00
		REALISASI	39.217.856.644,00	2.952.978.412,00	0,00	0,00
7.01	**KECAMATAN**	ANGGARAN	42.130.689.573,00	3.000.599.017,00	0,00	0,00
		REALISASI	39.217.856.644,00	2.952.978.412,00	0,00	0,00
7.01.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	ANGGARAN	33.050.073.479,00	925.958.664,00	0,00	0,00
		REALISASI	30.521.162.092,00	914.273.097,00	0,00	0,00

KODE	URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN	ANGGARAN / REALISASI / KELOMPOK BELANJA			
		OPERASI	MODAL	TDK TERDUGA	TRANSFER
7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	157.151.759,00	0,00	0,00	0,00
		140.378.498,00	0,00	0,00	0,00
7.01.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	102.141.197,00	0,00	0,00	0,00
		92.099.238,00	0,00	0,00	0,00
7.01.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	17.455.944,00	0,00	0,00	0,00
		15.183.700,00	0,00	0,00	0,00
7.01.01.2.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	3.205.000,00	0,00	0,00	0,00
		3.183.600,00	0,00	0,00	0,00
7.01.01.2.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	6.815.800,00	0,00	0,00	0,00
		5.725.700,00	0,00	0,00	0,00
7.01.01.2.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	5.837.060,00	0,00	0,00	0,00
		4.655.000,00	0,00	0,00	0,00
7.01.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	21.696.758,00	0,00	0,00	0,00
		19.531.260,00	0,00	0,00	0,00
7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	22.419.560.136,00	0,00	0,00	0,00
		20.528.016.338,00	0,00	0,00	0,00
7.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	22.222.396.891,00	0,00	0,00	0,00
		20.343.707.498,00	0,00	0,00	0,00
7.01.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	230.000,00	0,00	0,00	0,00
		204.000,00	0,00	0,00	0,00
7.01.01.2.02.04	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	67.650.428,00	0,00	0,00	0,00
		67.261.750,00	0,00	0,00	0,00
7.01.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	49.475.690,00	0,00	0,00	0,00
		39.632.464,00	0,00	0,00	0,00
7.01.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	79.807.127,00	0,00	0,00	0,00
		77.210.626,00	0,00	0,00	0,00
7.01.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	22.403.974,00	0,00	0,00	0,00
		21.339.278,00	0,00	0,00	0,00
7.01.01.2.03.01	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	501.700,00	0,00	0,00	0,00
		421.200,00	0,00	0,00	0,00
7.01.01.2.03.05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	8.212.400,00	0,00	0,00	0,00
		7.960.100,00	0,00	0,00	0,00
7.01.01.2.03.06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	13.689.874,00	0,00	0,00	0,00
		12.957.978,00	0,00	0,00	0,00
7.01.01.2.03.07	Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.01.2.04	Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	46.297.978,00	0,00	0,00	0,00
		44.629.144,00	0,00	0,00	0,00

KODE	URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN	ANGGARAN / REALISASI / KELOMPOK BELANJA			
		OPERASI	MODAL	TDK TERDUGA	TRANSFER
7.01.01.2.04.05	Pengolahan Data Retribusi Daerah	35.337.238,00	0,00	0,00	0,00
		34.335.744,00	0,00	0,00	0,00
7.01.01.2.04.07	Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	10.960.740,00	0,00	0,00	0,00
		10.293.400,00	0,00	0,00	0,00
7.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	434.048.548,00	0,00	0,00	0,00
		379.749.540,00	0,00	0,00	0,00
7.01.01.2.05.01	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	24.686.400,00	0,00	0,00	0,00
		24.686.400,00	0,00	0,00	0,00
7.01.01.2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	132.938.484,00	0,00	0,00	0,00
		125.380.800,00	0,00	0,00	0,00
7.01.01.2.05.03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	40.634.664,00	0,00	0,00	0,00
		39.644.264,00	0,00	0,00	0,00
7.01.01.2.05.05	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.01.2.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	13.500.000,00	0,00	0,00	0,00
		13.475.000,00	0,00	0,00	0,00
7.01.01.2.05.11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	222.289.000,00	0,00	0,00	0,00
		176.563.076,00	0,00	0,00	0,00
7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	5.149.270.470,00	352.216.617,00	0,00	0,00
		4.982.711.879,00	344.296.072,00	0,00	0,00
7.01.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	51.050.534,00	0,00	0,00	0,00
		50.986.996,00	0,00	0,00	0,00
7.01.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	144.566.182,00	176.574.720,00	0,00	0,00
		143.401.200,00	172.303.225,00	0,00	0,00
7.01.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	153.722.550,00	14.763.067,00	0,00	0,00
		137.539.249,00	14.763.067,00	0,00	0,00
7.01.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	1.762.300.256,00	160.878.830,00	0,00	0,00
		1.662.749.907,00	157.229.780,00	0,00	0,00
7.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	131.342.749,00	0,00	0,00	0,00
		130.361.066,00	0,00	0,00	0,00
7.01.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	10.060.200,00	0,00	0,00	0,00
		8.700.000,00	0,00	0,00	0,00
7.01.01.2.06.07	Penyediaan Bahan/Material	417.411.431,00	0,00	0,00	0,00
		416.621.975,00	0,00	0,00	0,00
7.01.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	160.573.602,00	0,00	0,00	0,00
		160.533.294,00	0,00	0,00	0,00
7.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	2.318.242.966,00	0,00	0,00	0,00
		2.271.818.192,00	0,00	0,00	0,00

KODE	URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN	ANGGARAN / REALISASI	KELOMPOK BELANJA			
			OPERASI	MODAL	TDK TERDUGA	TRANSFER
7.01.01.2.06.10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	ANGGARAN	0,00	0,00	0,00	0,00
		REALISASI	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	ANGGARAN	25.678.020,00	543.178.397,00	0,00	0,00
		REALISASI	24.182.600,00	539.427.025,00	0,00	0,00
7.01.01.2.07.01	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	ANGGARAN	0,00	0,00	0,00	0,00
		REALISASI	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.01.2.07.02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	ANGGARAN	0,00	55.847.400,00	0,00	0,00
		REALISASI	0,00	55.196.135,00	0,00	0,00
7.01.01.2.07.05	Pengadaan Mebel	ANGGARAN	0,00	64.085.362,00	0,00	0,00
		REALISASI	0,00	63.891.500,00	0,00	0,00
7.01.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	ANGGARAN	18.267.270,00	328.186.555,00	0,00	0,00
		REALISASI	17.472.600,00	326.296.490,00	0,00	0,00
7.01.01.2.07.10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	ANGGARAN	7.410.750,00	69.908.910,00	0,00	0,00
		REALISASI	6.710.000,00	68.964.000,00	0,00	0,00
7.01.01.2.07.11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	ANGGARAN	0,00	25.150.170,00	0,00	0,00
		REALISASI	0,00	25.078.900,00	0,00	0,00
7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	ANGGARAN	3.467.059.795,00	0,00	0,00	0,00
		REALISASI	3.104.462.108,00	0,00	0,00	0,00
7.01.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	ANGGARAN	29.500.000,00	0,00	0,00	0,00
		REALISASI	29.480.000,00	0,00	0,00	0,00
7.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	ANGGARAN	263.006.170,00	0,00	0,00	0,00
		REALISASI	208.750.967,00	0,00	0,00	0,00
7.01.01.2.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	ANGGARAN	23.999.276,00	0,00	0,00	0,00
		REALISASI	20.863.800,00	0,00	0,00	0,00
7.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	ANGGARAN	3.150.554.349,00	0,00	0,00	0,00
		REALISASI	2.845.367.341,00	0,00	0,00	0,00
7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	ANGGARAN	1.290.882.515,00	30.563.650,00	0,00	0,00
		REALISASI	1.258.968.443,00	30.550.000,00	0,00	0,00
7.01.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	ANGGARAN	515.534.372,00	0,00	0,00	0,00
		REALISASI	493.183.488,00	0,00	0,00	0,00
7.01.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	ANGGARAN	481.903.176,00	0,00	0,00	0,00
		REALISASI	472.825.705,00	0,00	0,00	0,00
7.01.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	ANGGARAN	97.793.040,00	0,00	0,00	0,00
		REALISASI	97.631.000,00	0,00	0,00	0,00
7.01.01.2.09.07	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	ANGGARAN	69.537.171,00	0,00	0,00	0,00
		REALISASI	69.462.000,00	0,00	0,00	0,00

KODE	URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN	ANGGARAN / REALISASI / KELOMPOK BELANJA			
		OPERASI	MODAL	TDK TERDUGA	TRANSFER
7.01.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	109.152.993,00	30.563.650,00	0,00	0,00
		108.932.750,00	30.550.000,00	0,00	0,00
7.01.01.2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	16.961.763,00	0,00	0,00	0,00
		16.933.500,00	0,00	0,00	0,00
7.01.01.2.13	Penataan Organisasi	37.720.284,00	0,00	0,00	0,00
		36.724.264,00	0,00	0,00	0,00
7.01.01.2.13.02	Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	37.720.284,00	0,00	0,00	0,00
		36.724.264,00	0,00	0,00	0,00
7.01.02	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	106.655.404,00	0,00	0,00	0,00
		105.742.504,00	0,00	0,00	0,00
7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	83.897.146,00	0,00	0,00	0,00
		83.081.144,00	0,00	0,00	0,00
7.01.02.2.01.01	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	12.534.800,00	0,00	0,00	0,00
		12.534.800,00	0,00	0,00	0,00
7.01.02.2.01.02	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	71.362.346,00	0,00	0,00	0,00
		70.546.344,00	0,00	0,00	0,00
7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	22.758.258,00	0,00	0,00	0,00
		22.661.360,00	0,00	0,00	0,00
7.01.02.2.02.01	Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan	17.668.131,00	0,00	0,00	0,00
		17.615.360,00	0,00	0,00	0,00
7.01.02.2.02.02	Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.02.2.02.03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	5.090.127,00	0,00	0,00	0,00
		5.046.000,00	0,00	0,00	0,00
7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.02.2.04.01	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.02.2.04.02	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Non Perizinan	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.03	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	6.786.713.889,00	2.074.640.353,00	0,00	0,00
		6.453.311.932,00	2.038.705.315,00	0,00	0,00
7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	349.165.150,00	0,00	0,00	0,00
		333.831.786,00	0,00	0,00	0,00
7.01.03.2.01.01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	103.252.069,00	0,00	0,00	0,00
		102.987.496,00	0,00	0,00	0,00

KODE	URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN	ANGGARAN / REALISASI	KELOMPOK BELANJA			
			OPERASI	MODAL	TDK TERDUGA	TRANSFER
7.01.03.2.01.02	Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan		13.514.900,00	0,00	0,00	0,00
			13.441.300,00	0,00	0,00	0,00
7.01.03.2.01.03	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan		232.398.181,00	0,00	0,00	0,00
			217.402.990,00	0,00	0,00	0,00
7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan		3.888.634.504,00	2.074.640.353,00	0,00	0,00
			3.633.767.148,00	2.038.705.315,00	0,00	0,00
7.01.03.2.02.01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan		105.077.177,00	0,00	0,00	0,00
			103.518.027,00	0,00	0,00	0,00
7.01.03.2.02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan		559.117.563,00	1.959.175.841,00	0,00	0,00
			549.993.301,00	1.931.334.338,00	0,00	0,00
7.01.03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan		3.221.268.164,00	115.464.512,00	0,00	0,00
			2.977.091.620,00	107.370.977,00	0,00	0,00
7.01.03.2.02.04	Evaluasi Kelurahan		3.171.600,00	0,00	0,00	0,00
			3.164.200,00	0,00	0,00	0,00
7.01.03.2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan		2.548.914.235,00	0,00	0,00	0,00
			2.485.712.998,00	0,00	0,00	0,00
7.01.03.2.03.01	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan		2.325.847.544,00	0,00	0,00	0,00
			2.280.698.151,00	0,00	0,00	0,00
7.01.03.2.03.02	Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan		107.079.454,00	0,00	0,00	0,00
			96.895.010,00	0,00	0,00	0,00
7.01.03.2.03.03	Penyediaan Sarana dan Prasarana Lembaga Kemasyarakatan		5.764.611,00	0,00	0,00	0,00
			5.764.611,00	0,00	0,00	0,00
7.01.03.2.03.04	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat		110.222.626,00	0,00	0,00	0,00
			102.355.226,00	0,00	0,00	0,00
7.01.03.2.05	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM)		0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.03.2.05.02	Penanganan Covid-19 di Tingkat Desa dan Kelurahan		0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.04	**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**		57.790.864,00	0,00	0,00	0,00
			52.865.344,00	0,00	0,00	0,00
7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum		46.964.864,00	0,00	0,00	0,00
			42.088.344,00	0,00	0,00	0,00
7.01.04.2.01.01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan		11.628.100,00	0,00	0,00	0,00
			7.755.000,00	0,00	0,00	0,00
7.01.04.2.01.02	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat		35.336.764,00	0,00	0,00	0,00
			34.333.344,00	0,00	0,00	0,00

KODE	URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN	ANGGARAN / REALISASI / KELOMPOK BELANJA			
		OPERASI	MODAL	TDK TERDUGA	TRANSFER
7.01.04.7.03	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	10.826.000,00	0,00	0,00	0,00
		10.777.000,00	0,00	0,00	0,00
7.01.04.7.03.01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	10.826.000,00	0,00	0,00	0,00
		10.777.000,00	0,00	0,00	0,00
7.01.05	**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**	1.324.942.871,00	0,00	0,00	0,00
		1.311.995.679,00	0,00	0,00	0,00
7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	1.324.942.871,00	0,00	0,00	0,00
		1.311.995.679,00	0,00	0,00	0,00
7.01.05.2.01.01	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	656.955.694,00	0,00	0,00	0,00
		645.138.116,00	0,00	0,00	0,00
7.01.05.2.01.02	Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	23.276.675,00	0,00	0,00	0,00
		23.253.500,00	0,00	0,00	0,00
7.01.05.2.01.03	Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	90.156.260,00	0,00	0,00	0,00
		90.075.732,00	0,00	0,00	0,00
7.01.05.2.01.04	Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	519.885.301,00	0,00	0,00	0,00
		518.917.831,00	0,00	0,00	0,00
7.01.05.2.01.08	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	34.668.941,00	0,00	0,00	0,00
		34.610.500,00	0,00	0,00	0,00
7.01.06	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**	804.513.066,00	0,00	0,00	0,00
		772.779.093,00	0,00	0,00	0,00
7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	804.513.066,00	0,00	0,00	0,00
		772.779.093,00	0,00	0,00	0,00
7.01.06.2.01.01	Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	11.892.430,00	0,00	0,00	0,00
		11.732.430,00	0,00	0,00	0,00
7.01.06.2.01.02	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	151.630.092,00	0,00	0,00	0,00
		147.423.392,00	0,00	0,00	0,00
7.01.06.2.01.03	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	418.494.432,00	0,00	0,00	0,00
		402.634.700,00	0,00	0,00	0,00
7.01.06.2.01.07	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.06.2.01.09	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00

KODE	URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN	ANGGARAN / REALISASI	KELOMPOK BELANJA			
			OPERASI	MODAL	TDK TERDUGA	TRANSFER
7.01.06.2.01.11	Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	ANGGARAN	103.039.048,00	0,00	0,00	0,00
		REALISASI	100.441.748,00	0,00	0,00	0,00
7.01.06.2.01.13	Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif	ANGGARAN	18.683.920,00	0,00	0,00	0,00
		REALISASI	17.549.600,00	0,00	0,00	0,00
7.01.06.2.01.16	Fasilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa	ANGGARAN	100.136.844,00	0,00	0,00	0,00
		REALISASI	92.361.223,00	0,00	0,00	0,00
7.01.06.2.01.17	Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	ANGGARAN	636.300,00	0,00	0,00	0,00
		REALISASI	636.000,00	0,00	0,00	0,00
8	**UNSUR PEMERINTAHAN UMUM**	ANGGARAN	18.253.093.134,00	21.295.350,00	0,00	0,00
		REALISASI	18.125.341.932,00	21.199.900,00	0,00	0,00
8.01	**KESATUAN BANGSA DAN POLITIK**	ANGGARAN	18.253.093.134,00	21.295.350,00	0,00	0,00
		REALISASI	18.125.341.932,00	21.199.900,00	0,00	0,00
8.01.02	**PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN**	ANGGARAN	483.068.425,00	0,00	0,00	0,00
		REALISASI	428.828.365,00	0,00	0,00	0,00
8.01.02.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	ANGGARAN	483.068.425,00	0,00	0,00	0,00
		REALISASI	428.828.365,00	0,00	0,00	0,00
8.01.02.2.01.01	Penyusunan Program Kerja di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	ANGGARAN	97.958.397,00	0,00	0,00	0,00
		REALISASI	74.744.156,00	0,00	0,00	0,00
8.01.02.2.01.04	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	ANGGARAN	385.110.028,00	0,00	0,00	0,00
		REALISASI	354.084.209,00	0,00	0,00	0,00
8.01.03	**PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK**	ANGGARAN	16.224.370.801,00	0,00	0,00	0,00
		REALISASI	16.208.538.504,00	0,00	0,00	0,00
8.01.03.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik	ANGGARAN	16.224.370.801,00	0,00	0,00	0,00
		REALISASI	16.208.538.504,00	0,00	0,00	0,00
8.01.03.2.01.01	Penyusunan Program Kerja di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	ANGGARAN	72.762.179,00	0,00	0,00	0,00
		REALISASI	58.304.625,00	0,00	0,00	0,00
8.01.03.2.01.02	Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	ANGGARAN	40.578.200,00	0,00	0,00	0,00
		REALISASI	40.329.900,00	0,00	0,00	0,00

KODE	URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN	ANGGARAN / REALISASI / KELOMPOK BELANJA			
		OPERASI	MODAL	TDK TERDUGA	TRANSFER
8.01.03.2.01.04	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	16.111.030.422,00	0,00	0,00	0,00
		16.109.903.979,00	0,00	0,00	0,00
8.01.04	**PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN**	338.783.000,00	0,00	0,00	0,00
		335.671.696,00	0,00	0,00	0,00
8.01.04.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	338.783.000,00	0,00	0,00	0,00
		335.671.696,00	0,00	0,00	0,00
8.01.04.2.01.04	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	284.967.900,00	0,00	0,00	0,00
		283.819.996,00	0,00	0,00	0,00
8.01.04.2.01.05	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	53.815.100,00	0,00	0,00	0,00
		51.851.700,00	0,00	0,00	0,00
8.01.05	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA**	608.832.047,00	0,00	0,00	0,00
		606.434.586,00	0,00	0,00	0,00
8.01.05.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	608.832.047,00	0,00	0,00	0,00
		606.434.586,00	0,00	0,00	0,00
8.01.05.2.01.03	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	523.113.458,00	0,00	0,00	0,00
		521.010.769,00	0,00	0,00	0,00
8.01.05.2.01.04	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	85.718.589,00	0,00	0,00	0,00
		85.423.817,00	0,00	0,00	0,00
8.01.06	**PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL**	598.038.861,00	21.295.350,00	0,00	0,00
		545.868.781,00	21.199.900,00	0,00	0,00
8.01.06.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	598.038.861,00	21.295.350,00	0,00	0,00
		545.868.781,00	21.199.900,00	0,00	0,00
8.01.06.2.01.02	Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	47.964.290,00	0,00	0,00	0,00
		45.615.335,00	0,00	0,00	0,00

KODE	URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN	ANGGARAN / REALISASI	KELOMPOK BELANJA			
			OPERASI	MODAL	TDK TERDUGA	TRANSFER
8.01.06.2.01.03	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	ANGGARAN	207.227.008,00	0,00	0,00	0,00
		REALISASI	193.828.638,00	0,00	0,00	0,00
8.01.06.2.01.04	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	ANGGARAN	55.158.769,00	21.295.350,00	0,00	0,00
		REALISASI	53.200.669,00	21.199.900,00	0,00	0,00
8.01.06.2.01.05	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	ANGGARAN	65.201.108,00	0,00	0,00	0,00
		REALISASI	62.395.900,00	0,00	0,00	0,00
8.01.06.2.01.06	Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota	ANGGARAN	222.487.686,00	0,00	0,00	0,00
		REALISASI	190.828.239,00	0,00	0,00	0,00
JUMLAH		ANGGARAN	849.602.808.825,00	291.830.294.608,00	9.580.000.000,00	183.197.290.930,00
		REALISASI	796.281.117.535,70	276.129.599.031,39	212.500.000,00	177.597.590.972,00

Pj. BUPATI GUNUNG MAS

ttd

HERSON B. ADEN

LAMPIRAN II
PERATURAN DAERAH KABUPATEN GUNUNG MAS
NOMOR 3 TAHUN 2024
TENTANG
PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2023

PEMERINTAH KABUPATEN GUNUNG MAS

LAPORAN PERUBAHAN SALDO ANGGARAN LEBIH

UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN

31 DESEMBER 2023 DAN 2022

CaLK	Uraian	Tahun 2023 (Rp)	Tahun 2022 (Rp)
5.2.1	Saldo Anggaran Lebih Awal	135.547.383.201,20	105.135.339.446,79
5.2.2	Penggunaan SAL sebagai Penerimaan Pembiayaan Tahun Berjalan	135.547.383.201,20	105.127.111.854,79
	Sub Total (5.2.1 – 5.2.2)	**0,00**	**8.227.592,00**
5.2.3	Sisa Lebih/ Kurang Pembiayaan Anggaran (SiLPA/SiKPA)	49.478.072.598,69	135.547.383.201,20
	Sub Total (5.2.1 – 5.2.2 + 5.2.3)	**49.478.072.598,69**	**135.555.610.793,20**
5.2.4	Koreksi Kesalahan Pembukuan Tahun Sebelumnya	0,00	(9.151.058,00)
5.2.5	Lain-lain	0,00	923.466,00
5.2.6	**Saldo Anggaran Lebih Akhir (5.2.1 – 5.2.2 + 5.2.3 + 5.2.4 + 5.2.5)**	**49.478.072.598,69**	**135.547.383.201,20**

Pj. BUPATI GUNUNG MAS

ttd

HERSON B. ADEN

LAMPIRAN III
PERATURAN DAERAH KABUPATEN GUNUNG MAS
NOMOR 3 TAHUN 2024
TENTANG
PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2023

PEMERINTAH KABUPATEN GUNUNG MAS

LAPORAN OPERASIONAL

UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN

31 DESEMBER 2023 DAN 2022

CaLK	Uraian	2023 (Rp)	2022 (Rp)
	KEGIATAN OPERASIONAL		
5.4.1	**PENDAPATAN DAERAH – LO**		
5.4.1.1	**PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) – LO**		
5.4.1.1.1	Pajak Daerah – LO	12.191.249.035,00	31.080.420.490,00
5.4.1.1.2	Retribusi Daerah – LO	5.971.382.265,20	4.664.776.060,00
5.4.1.1.3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan – LO	81.147.428,96	12.683.801.108,00
5.4.1.1.4	Lain-lain PAD Yang Sah – LO	22.433.174.759,42	18.044.914.417,00
	Jumlah Pendapatan Asli Daerah (PAD) – LO	**40.676.953.488,58**	**66.473.912.075,00**
5.4.1.2	**PENDAPATAN TRANSFER – LO**		
5.4.1.2.1	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat – LO	1.209.871.026.345,00	878.498.676.072,00
5.4.1.2.2	Pendapatan Transfer Antar Daerah – LO	64.820.897.269,00	34.059.216.435,77
	Jumlah Pendapatan Transfer – LO	**1.274.691.923.614,00**	**912.557.892.507,77**
5.4.1.3	**LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH – LO**		
5.4.1.3.1	Pendapatan Hibah – LO	1.827.699.309,00	34.616.052.381,00
5.4.1.3.2	Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan – LO	4.602.655.276,00	1.483.904.656,00
	Jumlah Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah – LO	**6.430.354.585,00**	**36.099.957.037,00**
	Jumlah Pendapatan Daerah – LO	**1.321.799.231.687,58**	**1.015.131.761.619,77**
5.4.2	**BEBAN DAERAH**		
5.4.2.1	**BEBAN OPERASI**		
5.4.2.1.1	Beban Pegawai	412.042.924.617,00	382.850.310.978,00
5.4.2.1.2	Beban Barang dan Jasa	321.360.731.941,81	257.481.111.592,35
5.4.2.1.3	Beban Hibah	51.411.356.916,00	16.111.462.818,00
5.4.2.1.4	Beban Bantuan Sosial	203.500.000,00	863.805.000,00
5.4.2.1.5	Beban Penyisihan Piutang	201.059.914,81	64.443.715,10
5.4.2.1.6	Beban Penyusutan dan Amortisasi	250.358.647.752,00	266.074.829.955,28
5.4.2.1.7	Beban Lain-lain	1.960.555.549,00	4.686.850.477,57
	Jumlah Beban Operasi	**1.037.538.776.690,62**	**928.132.814.536,30**
5.4.2.2	**BEBAN TRANSFER**		
5.4.2.2.1	Beban Bagi Hasil	5.391.902.399,00	0,00
5.4.2.2.2	Beban Bantuan Keuangan	77.162.527.383,00	60.526.396.357,00
	Jumlah Beban Transfer	**82.554.429.782,00**	**60.526.396.357,00**
	Jumlah Beban Daerah	**1.120.093.206.472,62**	**988.659.210.893,30**
	SURPLUS/DEFISIT DARI OPERASI	**201.706.025.214,96**	**26.472.550.726,47**
5.4.3	**KEGIATAN NON OPERASIONAL – LO**		
5.4.3.1	**SURPLUS NON OPERASIONAL – LO**		
5.4.3.1.1	Surplus Penjualan/ Pertukaran/ Pelepasan Aset Non Lancar – LO	21.689.804.470,00	0,00
5.4.3.1.2	Surplus Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang – LO	0,00	0,00
5.4.3.1.3	Surplus dari Kegiatan Non Operasional Lainnya – LO	0,00	0,00
	Jumlah Surplus Non Operasional – LO	**21.689.804.470,00**	**0,00**

LAMPIRAN III
PERATURAN DAERAH KABUPATEN GUNUNG MAS
NOMOR 3 TAHUN 2024
TENTANG
PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2023

CaLK	Uraian	2023 (Rp)	2022 (Rp)
5.4.3.2	**DEFISIT NON OPERASIONAL – LO**		
5.4.3.2.1	Defisit Penjualan/ Pertukaran/ Pelepasan Aset Non Lancar – LO	25.623.200.295,19	0,00
5.4.3.2.2	Defisit Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang – LO	0,00	0,00
5.4.3.2.3	Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya – LO	0,00	4.676.213.805,00
	Jumlah Defisit Non Operasional – LO	**25.623.200.295,19**	**4.676.213.805,00**
	SURPLUS/ DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL	**(3.933.395.825,19)**	**(4.676.213.805,00)**
	SURPLUS/ DEFISIT SEBELUM POS LUAR BIASA	**197.772.629.389,77**	**21.796.336.921,47**
5.4.4	**POS LUAR BIASA**		
5.4.4.1	**BEBAN LUAR BIASA**		
5.4.4.1.1	Beban Tidak Terduga	212.500.000,00	219.010.394,00
	SURPLUS/ DEFISIT DARI POS LUAR BIASA	**(212.500.000,00)**	**(219.010.394,00)**
	SURPLUS/DEFISIT – LO	**197.560.129.389,77**	**21.577.326.527,47**

Pj. BUPATI GUNUNG MAS

ttd

HERSON B. ADEN

LAMPIRAN IV
PERATURAN DAERAH KABUPATEN GUNUNG MAS
NOMOR 3 TAHUN 2024
TENTANG
PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2023

PEMERINTAH KABUPATEN GUNUNG MAS

LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN

PER 31 DESEMBER 2023 DAN 2022

CaLK	Uraian	Tahun 2023 (Rp)	Tahun 2022 (Rp)
5.6	**EKUITAS AWAL**	2.017.336.123.142,54	1.996.385.653.064,57
	SURPLUS/DEFISIT – LO	**197.560.129.389,77**	**21.577.326.527,47**
	DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN/ KESALAHAN MENDASAR:		
	Koreksi Nilai Persediaan	0,00	0,00
	Selisih Revaluasi Aset Tetap	0,00	0,00
	Koreksi Nilai Penyertaan Modal	0,00	0,00
	Koreksi ekuitas lainnya	(98.242.189,50)	(626.856.449,50)
	EKUITAS AKHIR	**2.214.798.010.342,81**	**2.017.336.123.142,54**

Pj. BUPATI GUNUNG MAS

ttd

HERSON B. ADEN

LAMPIRAN V
PERATURAN DAERAH KABUPATEN GUNUNG MAS
NOMOR 3 TAHUN 2024
TENTANG
PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2023

PEMERINTAH KABUPATEN GUNUNG MAS

NERACA

PER 31 DESEMBER 2023 DAN 2022

CaLK	URAIAN	2023 (Rp)	2022 (Rp)
5.3.1	**ASET**		
5.3.1.1	**ASET LANCAR**		
5.3.1.1.1	Kas di Kas Daerah	38.395.026.100,77	124.159.056.219,57
5.3.1.1.2	Kas di Bendahara Penerimaan	35.530.428,00	5.030.500,00
5.3.1.1.3	Kas di Bendahara Pengeluaran	0,00	0,00
5.3.1.1.4	Kas di Badan Layanan Umum Daerah	6.952.304.798,90	10.659.694.172,90
5.3.1.1.5	Kas di Bendahara BOS	24.420.000,00	789.400,71
5.3.1.1.6	Kas di Bendahara FKTP	4.070.787.115,02	722.808.950,02
5.3.1.1.7	Kas Lainnya	75.712,00	6.000,00
5.3.1.1.8	Investasi Jangka Pendek	0,00	10.234.288.235,00
5.3.1.1.9	Piutang Pajak Daerah	1.729.550.343,00	1.425.180.896,00
5.3.1.1.10	Piutang Retribusi Daerah	645.114.000,00	500.714.000,00
5.3.1.1.11	Piutang Lain-lain PAD yang Sah	2.775.305.849,14	2.281.074.041,14
5.3.1.1.12	Piutang Transfer Pemerintah Pusat	0,00	71.050.000,00
5.3.1.1.13	Piutang Transfer Antar Daerah	7.506.010.211,00	0,00
5.3.1.1.14	Piutang Lainnya	144.348.490,00	1.662.884.575,50
5.3.1.1.15	Penyisihan Piutang	(1.412.775.851,51)	(1.211.715.936,70)
5.3.1.1.16	Persediaan	40.227.366.881,66	16.773.614.156,77
	JUMLAH ASET LANCAR	**101.093.064.077,98**	**167.284.475.210,91**
5.3.1.2	**INVESTASI JANGKA PANJANG**		
5.3.1.2.1	**Investasi Jangka Panjang Non Permanen**		
	Dana Bergulir kepada Koperasi	0,00	0,00
	Jumlah Investasi Jangka Panjang Non Permanen	**0,00**	**0,00**
5.3.1.2.2	**Investasi Jangka Panjang Permanen**		
	Penyertaan Modal	104.734.137.905,96	96.757.484.738,15
	Jumlah Investasi Jangka Panjang Permanen	**104.734.137.905,96**	**96.757.484.738,15**
	JUMLAH INVESTASI JANGKA PANJANG	**104.734.137.905,96**	**96.757.484.738,15**
5.3.1.3	**ASET TETAP**		
5.3.1.3.1	Tanah	420.540.504.720,16	421.678.467.720,16
5.3.1.3.2	Peralatan dan Mesin	436.571.297.072,80	403.789.220.779,80
5.3.1.3.3	Gedung dan Bangunan	960.100.012.621,86	909.506.934.290,86
5.3.1.3.4	Jalan, Jaringan, dan Irigasi	2.286.908.977.380,87	2.113.453.245.615,80
5.3.1.3.5	Aset Tetap Lainnya	38.179.968.033,60	36.656.365.378,63
5.3.1.3.6	Konstruksi Dalam Pengerjaan	12.370.552.657,73	58.136.212.299,41
5.3.1.3.7	Akumulasi Penyusutan	(2.396.943.059.037,70)	(2.161.247.375.265,70)
	JUMLAH ASET TETAP	**1.757.728.253.449,32**	**1.781.973.070.818,96**
5.3.1.4	**ASET LAINNYA**		
5.3.1.4.1	Tagihan Penjualan Angsuran	0,00	0,00
5.3.1.4.2	Aset Tidak Berwujud	16.579.778.402,01	15.823.784.900,01
5.3.1.4.3	Aset Lain-lain	14.671.501.449,03	14.286.116.493,00
5.3.1.4.4	Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud	(13.847.689.210,00)	(13.297.490.390,00)
5.3.1.4.5	Dana Transfer Treasury Deposit Facility (TDF)	236.938.772.000,00	0,00
	JUMLAH ASET LAINNYA	**254.342.362.641,04**	**16.812.411.003,01**
	JUMLAH ASET	**2.217.897.818.074,30**	**2.062.827.441.771,03**

LAMPIRAN V
PERATURAN DAERAH KABUPATEN GUNUNG MAS
NOMOR 3 TAHUN 2024
TENTANG
PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2023

CaLK	URAIAN	2023 (Rp)	2022 (Rp)
5.3.2	**KEWAJIBAN**		
5.3.2.1	**KEWAJIBAN JANGKA PENDEK**		
5.3.2.1.1	Utang Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	71.556,00	2.042,00
5.3.2.1.2	Pendapatan Diterima Dimuka	195.876.541,00	196.727.942,00
5.3.2.1.3	Utang Belanja	2.824.509.634,49	45.294.588.644,49
5.3.2.1.4	Utang Jangka Pendek Lainnya	79.350.000,00	0,00
	JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PENDEK	**3.099.807.731,49**	**45.491.318.628,49**
	JUMLAH KEWAJIBAN	**3.099.807.731,49**	**45.491.318.628,49**
5.3.3	**EKUITAS**		
5.3.3.1	EKUITAS	2.214.798.010.342,81	2.017.336.123.142,54
	JUMLAH EKUITAS	**2.214.798.010.342,81**	**2.017.336.123.142,54**
	JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS DANA	**2.217.897.818.074,30**	**2.062.827.441.771,03**

Pj. BUPATI GUNUNG MAS

ttd

HERSON B. ADEN

LAMPIRAN VI
PERATURAN DAERAH KABUPATEN GUNUNG MAS
NOMOR 3 TAHUN 2024
TENTANG
PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2023

PEMERINTAH KABUPATEN GUNUNG MAS

LAPORAN ARUS KAS

UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN

PER 31 DESEMBER 2023 DAN 2022

CaLK	URAIAN	2023 (Rp)	2022 (Rp)
5.5.1	**Arus Kas dari Aktivitas Operasi**		
	Arus Kas Masuk		
	Pendapatan Pajak Daerah	11.888.728.187,00	30.932.700.270,00
	Pendapatan Retribusi Daerah	5.824.282.265,20	4.507.497.060,00
	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	81.147.428,96	12.683.801.108,00
	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	17.970.960.151,42	29.842.854.854,86
	Dana Bagi Hasil Pajak	1.078.209.703.770,00	29.753.957.625,00
	Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam	0,00	131.789.839.495,00
	Dana Alokasi Umum	0,00	508.244.449.070,00
	Dana Alokasi Khusus	0,00	192.622.001.247,00
	Dana Insentif Daerah (DID)	0,00	3.821.039.000,00
	Dana Desa (DD)	0,00	90.215.183.720,00
	Pendapatan Bagi Hasil Pajak	57.314.887.058,00	47.965.994.871,64
	Bantuan Keuangan	0,00	0,00
	Pendapatan Hibah	0,00	5.662.000,00
	Pendapatan Lainnya (JKN)	4.602.655.276,00	1.483.904.656,00
	Jumlah Arus Kas Masuk	**1.175.892.364.136,58**	**1.083.868.884.977,50**
	Arus Kas Keluar		
	Belanja Pegawai	412.033.313.157,00	382.850.310.978,00
	Belanja Barang dan Jasa	335.529.741.026,70	254.015.538.421,61
	Belanja Bunga	0,00	0,00
	Belanja Hibah	48.514.563.352,00	15.018.602.059,00
	Belanja Bantuan Sosial	203.500.000,00	863.805.000,00
	Belanja Tidak Terduga	212.500.000,00	219.933.860,00
	Bagi Hasil Pajak	5.391.902.399,00	0,00
	Bagi Hasil Retribusi	0,00	0,00
	Belanja Bantuan Keuangan Umum kepada Pemerintah Provinsi	172.205.688.573,00	245.000.000,00
	Belanja Bantuan Keuangan Umum Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota	0,00	150.496.580.077,00
	Jumlah Arus Kas Keluar	**974.091.208.507,70**	**803.709.770.395,61**
	Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi	**201.801.155.628,88**	**280.159.114.581,89**
5.5.2	**Arus Kas dari Aktivitas Investasi**		
	Arus Kas Masuk		
	Hasil Penjualan Aset Tetap Lainnya	227.132.800,00	250.219.977,00
	Jumlah Arus Kas Masuk	**227.132.800,00**	**250.219.977,00**
	Arus Kas Keluar		
	Perolehan Tanah	359.717.000,00	549.000.000,00
	Perolehan Peralatan dan Mesin	41.300.725.933,00	46.253.480.479,21
	Perolehan Gedung dan Bangunan	62.575.674.211,00	65.821.245.635,27
	Perolehan Jalan. Irigasi, dan Jaringan	169.522.427.528,39	125.824.467.024,00
	Perolehan Aset Tetap Lainnya	1.665.999.253,00	813.030.274,00
	Perolehan Aset Lainnya	705.055.106,00	377.839.800,00
	Penyertaan Modal Daerah pada BUMD	11.968.000.000,00	10.350.000.000,00
	Jumlah Arus Kas Keluar	**288.097.599.031,39**	**249.989.063.212,48**
	Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi	**(287.870.466.231,39)**	**(249.738.843.235,48)**

LAMPIRAN VI
PERATURAN DAERAH KABUPATEN GUNUNG MAS
NOMOR 3 TAHUN 2024
TENTANG
PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2023

CaLK	URAIAN	2023 (Rp)	2022 (Rp)
5.5.3	**Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan**		
	Arus Kas Masuk	0,00	0,00
	Jumlah Arus Kas Masuk	**0,00**	**0,00**
	Arus Kas Keluar	0,00	0,00
	Jumlah Arus Kas Keluar	**0,00**	**0,00**
	Arus Kas Bersih dari Aktivitas Pendanaan	**0,00**	**0,00**
5.5.4	**Arus Kas dari Aktivitas Transitoris**		
	Arus Kas Masuk		
	Penerimaan Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	82.048.113.088,87	69.558.030.248,00
	Kiriman Uang Masuk	0,00	923.466,00
	Jumlah Arus Kas Masuk	**82.048.113.088,87**	**69.558.953.714,00**
	Arus Kas Keluar		
	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	0,00	0,00
	Koreksi SiLPA	0,00	0,00
	Pengeluaran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	82.048.043.574,87	69.560.842.903,00
	Kiriman Uang Keluar	0,00	9.151.058,00
	Jumlah Arus Kas Keluar	**82.048.043.574,87**	**69.569.993.961,00**
	Arus Kas Bersih dari Aktivitas Transitoris	**69.514,00**	**(11.040.247,00)**
5.5.5	**Kenaikan / (Penurunan) Kas**	**(86.069.241.088,51)**	**30.409.231.099,41**
5.5.6	**Saldo Awal Kas**	**135.547.385.243,20**	**105.138.154.143,79**
5.5.7	**Saldo Akhir Kas (5.5.5 + 5.5.6)**	**49.478.144.154,69**	**135.547.385.243,20**
	Terdiri dari:		
	Saldo Akhir Kas di Kas Daerah	**38.395.026.100,77**	**124.159.056.219,57**
	Kas di Bendahara Pengeluaran	**0,00**	**0,00**
	Kas di Bendahara Penerimaan	**35.530.428,00**	**5.030.500,00**
	Kas di BLUD	**6.952.304.798,90**	**10.659.694.172,90**
	Kas di Bendahara FKTP	**4.070.787.115,02**	**722.808.950,02**
	Kas di Bendahara Dana BOS	**24.420.000,00**	**789.400,71**
	Kas Lainnya	**75.712,00**	**6.000,00**

Pj. BUPATI GUNUNG MAS

ttd

HERSON B. ADEN

PEMERINTAH KABUPATEN GUNUNG MAS

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN
PER 31 DESEMBER 2023 DAN 2022

BAB I PENDAHULUAN

Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan

1. 1. Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan

Sesuai dengan amanat Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Pemerintah Daerah diberikan kewenangan untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas desentralisasi dan tugas pembantuan. Pemberian otonomi yang luas pada dasarnya diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat dalam Sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Selanjutnya sesuai dengan peraturan perundang-perundangan bidang pengelolaan Keuangan Negara yaitu Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, Undang-Undang Nomor 15 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara, Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah dan seiring dengan paradigma penyelenggaraan pemerintahan saat ini, maka upaya untuk mewujudkan kepemerintahan yang baik merupakan suatu tuntutan sehingga sudah menjadi komitmen bersama yang harus dibangun seluruh komponen pemerintahan agar pelayanan pada masyarakat dapat dioptimalkan.

Dalam pelaksanaannya, Pemerintah Daerah memperhatikan tingkat efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan otonomi daerah tersebut dengan memperhatikan hubungan pemerintah pusat-daerah, antar Pemerintah Daerah serta potensi daerah itu sendiri, salah satu diantaranya yang memegang peranan penting adalah aspek keuangan daerah. Aspek keuangan daerah meliputi penggalian potensi, fungsi alokasi, kualitas pengelolaan, dan penatausahaan serta pertanggungjawaban keuangan daerah.

Sebagaimana diamanatkan Pasal 32 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara bahwa bentuk dan isi laporan pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

Penyusunan laporan keuangan Pemerintah Kabupaten Gunung Mas telah mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (SAP).

Laporan keuangan pemerintah Daerah (LKPD) disusun sebanyak tujuh laporan yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LP SAL), Neraca, Laporan Operasional (LO), Laporan Arus Kas (LAK), Laporan Perubahan Ekuitas (LPE), dan Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK).

LKPD tersebut merupakan laporan pokok dan selanjutnya dilampiri dengan laporan keuangan Badan Usaha Milik Daerah dan laporan dana di luar APBD Kabupaten Gunung Mas (Dana Tugas Pembantuan dan Dana Dekonsentrasi).

Adapun maksud dari penyusunan Laporan Keuangan ini adalah:

a. untuk memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan bidang pengelolaan keuangan daerah khususnya Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
b. untuk menyajikan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD dalam rangka meningkatkan keterbandingan laporan keuangan baik terhadap anggaran, antar periode, maupun antar entitas; dan
c. untuk menyajikan informasi mengenai posisi keuangan, realisasi anggaran, arus kas, dan kinerja keuangan sebagai bahan evaluasi dan pengambilan keputusan mengenai alokasi sumber daya.

Sedangkan tujuan penyusunan Laporan Keuangan adalah untuk menyajikan informasi Laporan Keuangan Pemerintah Daerah sebagai perwujudan dalam menilai akuntabilitas dan transparansi entitas yang berguna untuk pengambilan keputusan baik di bidang ekonomi, sosial maupun politik bagi Pemerintah Kabupaten Gunung Mas yaitu dengan:

a. menyediakan informasi mengenai posisi sumber daya ekonomi, kewajiban, dan ekuitas dana pemerintah;
b. menyediakan informasi mengenai perubahan posisi sumber daya ekonomi, kewajiban, dan ekuitas dana pemerintah;
c. menyediakan informasi mengenai sumber, alokasi, dan penggunaan sumber daya ekonomi;
d. menyediakan informasi mengenai ketaatan realisasi terhadap anggarannya;
e. menyediakan informasi mengenai cara entitas pelaporan mendanai aktivitasnya dan memenuhi kebutuhan kasnya;
f. menyediakan informasi mengenai potensi pemerintah untuk membiayai penyelenggaraan kegiatan pemerintahan; dan
g. menyediakan informasi yang berguna untuk mengevaluasi kemampuan entitas pelaporan dalam mendanai aktivitasnya.

Asumsi Dasar Laporan Keuangan

1. 1. 1. Asumsi Dasar Laporan Keuangan

Asumsi dasar dalam pelaporan keuangan di lingkungan pemerintah adalah anggapan yang diterima sebagai suatu kebenaran tanpa perlu dibuktikan agar standar akuntansi dapat diterapkan yang terdiri dari:

a. Asumsi Kemandirian Entitas

Asumsi kemandirian entitas baik entitas pelaporan maupun entitas akuntansi berarti bahwa setiap unit organisasi dianggap sebagai unit yang mandiri dan mempunyai kewajiban untuk menyajikan Laporan Keuangan sehingga tidak terjadi kekacauan antar unit instansi pemerintah dalam pelaporan keuangan. Salah satu indikasi terpenuhinya asumsi ini adalah adanya kewenangan entitas untuk menyusun anggaran dan melaksanakannya dengan tanggung jawab penuh. Entitas bertanggung jawab atas pengelolaan aset dan sumber daya di luar neraca untuk kepentingan yurisdiksi tugas pokoknya termasuk atas kehilangan atau kerusakan aset dan sumber daya dimaksud utang piutang yang terjadi akibat putusan entitas serta terlaksana tidaknya program yang telah ditetapkan.

b. Asumsi Kesinambungan Entitas

Laporan Keuangan disusun dengan asumsi bahwa entitas pelaporan akan berlanjut keberadaannya. Dengan demikian, pemerintah diasumsikan tidak bermaksud melakukan likuidasi atas entitas pelaporan dalam jangka pendek.

c. Asumsi Keterukuran dalam Satuan Uang (*Monetary Measurement*)

Laporan Keuangan entitas pelaporan harus menyajikan setiap kegiatan yang diasumsikan dapat dinilai dengan satuan uang. Hal ini diperlukan agar memungkinkan dilakukannya analisis dan pengukuran dalam akuntansi.

Pendekatan Penyusunan Laporan Keuangan

1. 1. 2. Pendekatan Penyusunan Laporan Keuangan

Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Gunung Mas Tahun 2023 ini merupakan laporan yang mencakup seluruh aspek keuangan yang dikelola oleh Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Gunung Mas sebagai Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang melaksanakan Pengelolaan Keuangan Daerah sekaligus merupakan entitas pelaporan.

Sebagai wujud pelaksanaan tugas dan tanggung jawab sesuai Peraturan Pemerintah Nomr 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) dan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

Laporan Keuangan Pemerintah Daerah ini dihasilkan melalui Sistem Informasi Manajemen Keuangan Daerah *Next Generation* (Simda-NG) atau *Financial Management Information System* (FMIS) yaitu serangkaian prosedur manual maupun yang terkomputerisasi mulai dari pengumpulan data, pencatatan, dan pengikhtisaran sampai dengan pelaporan posisi keuangan dan operasi keuangan pada satuan kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Gunung Mas selaku entitas akuntansi.

Prosedur Penyusunan Laporan Keuangan

1. 1. 3. Prosedur Penyusunan Laporan Keuangan

Dalam proses penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun 2023, Pemerintah Kabupaten Gunung Mas berpedoman kepada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Di sisi lain penyusunan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pengawasan, dan pertanggungjawaban keuangan Pemerintah Kabupaten Gunung Mas berpedoman kepada Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dengan teknis Pengelolaan Keuangan Daerah berpedoman kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah.

Mengingat terdapat perbedaan struktur akun belanja dari kedua peraturan tersebut maka dalam penyajian laporan keuangan dilakukan langkah konversi atau pemetaan sesuai Buletin Teknis Nomor 03 tentang Penyajian Laporan Keuangan Pemerintah Daerah sesuai SAP dengan konversi. Konversi dilakukan dengan cara mentrasir kembali *(trace back)* pos-pos laporan keuangan.

Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan

1. 2. Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan

Landasan hukum penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Gunung Mas atas pelaksanaan APBD Tahun 2023 adalah:

a. Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945 khususnya bagian yang mengatur keuangan negara;
b. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya, dan Kabupaten Barito Timur di Provinsi Kalimantan Tengah;
c. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (PERPU) Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) dan/atau dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan;

d. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (PERPU) Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) dan/atau dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan;
e. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (PERPU) Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) dan/atau dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan;
f. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang;
g. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (PERPU) Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) dan/atau dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan;
h. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan;
i. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan;

j. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah;
k. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
l. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan;
m. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;
n. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
o. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
p. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
q. Peraturan Daerah Kabupaten Gunung Mas Nomor 4 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Gunung Mas Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Gunung Mas Nomor 4 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah;
r. Peraturan Daerah Kabupaten Gunung Mas Nomor 5 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
s. Peraturan Daerah Kabupaten Gunung Mas Nomor 10 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023; dan
t. Peraturan Daerah Kabupaten Gunung Mas Nomor 8 Tahun 2023 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023.

Sistematika Penulisan Catatan atas Laporan Keuangan

1. 3. Sistematika Penulisan Catatan atas Laporan Keuangan

Penyajian dan penulisan Catatan Laporan atas Keuangan ini dibagi dalam beberapa bagian dan sub-sub bagian dengan tujuan untuk mempercepat penyusunan laporan dan mempermudah pencarian informasi yang dibutuhkan serta menunjukkan penyelesaian pekerjaan yang sistematis dan terstruktur. Pembagian bagian dan sub-sub bagian tersebut adalah sebagai berikut:

BAB I Pendahuluan
1.1. Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan
1.1.1. Asumsi Dasar Laporan Keuangan
1.1.2. Pendekatan Penyusunan Laporan Keuangan

1.1.3. Prosedur Penyusunan Laporan Keuangan
1.2. Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan
1.3. Sistematika Penulisan Catatan atas Laporan Keuangan
BAB II Ekonomi Makro, Kebijakan Keuangan, dan Pencapaian Target Kinerja APBD
2.1. Ekonomi Makro
2.1.1. Tingkat Kemiskinan
2.1.2. Tingkat Pengangguran Terbuka
2.1.3. Indeks Gini *(Gini Ratio)*
2.1.4. Indeks Pembangunan Manusia (IPM)
2.1.5. Laju Pertumbuhan Ekonomi
2.1.6. Inflasi
2.1.7. Struktur Perekonomian Kabupaten Gunung Mas
2.2. Kebijakan Keuangan
2.2.1. Arah Kebijakan dan Sasaran Pendapatan Daerah
2.2.2. Arah Kebijakan dan Sasaran Belanja Daerah
2.2.3. Arah Kebijakan dan Sasaran Pembiayaan Daerah
2.2.4. Penjelasan Perubahan Anggaran
2.3. Indikator Pencapaian Target Kinerja APBD
BAB III Ikhtisar Pencapaian Kinerja Keuangan
3.1. Ikhtisar Realisasi Pencapaian Kinerja Keuangan
3.2. Hambatan dan Kendala Dalam Pencapaian Target yang Telah Ditetapkan
BAB IV Kebijakan Akuntansi
4.1. Entitas Akuntansi dan Entitas Pelaporan
4.1.1. Dasar Hukum Entitas
4.2. Basis Akuntansi yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan
4.3. Basis Pengukuran yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan
4.3.1. Proses Penyusunan Laporan Keuangan
4.4. Penerapan Kebijakan Akuntansi Berkaitan Dengan Ketentuan Dalam Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP)
4.4.1. Pendapatan-LRA
4.4.2. Belanja
4.4.3. Pembiayaan
4.4.4. Pendapatan-LO
4.4.5. Beban
4.4.6. Aset
4.4.7. Kewajiban
4.4.8. Ekuitas
4.5. Laporan Konsolidasi
4.6. Penyajian Laporan Arus Kas
BAB V Penjelasan Pos-Pos Laporan Keuangan
5.1. Rincian dan Penjelasan Pos-Pos Laporan Realisasi
5.2. Rincian dan Penjelasan Pos-Pos Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih
5.3. Rincian dan Penjelasan Pos-Pos Neraca
5.4. Rincian dan Penjelasan Pos-Pos Laporan Operasional

5.5. Rincian dan Penjelasan Pos-Pos Laporan Arus Kas
5.6. Rincian dan Penjelasan Pos-Pos Laporan Perubahan Ekuitas
BAB VI INFORMASI TAMBAHAN LAINNYA
BAB VII PENUTUP

BAB II EKONOMI MAKRO, KEBIJAKAN KEUANGAN, DAN PENCAPAIAN TARGET KINERJA APBD

Ekonomi Makro

2. 1. Ekonomi Makro

Ekonomi makro merupakan gambaran perubahan ekonomi yang mempengaruhi masyarakat, perusahaan, dan pasar. Ekonomi makro dapat difungsikan sebagai alat bagi Pemerintah Daerah untuk menentukan dan mengevaluasi arah kebijakan dalam mengalokasikan sumber daya ekonomi dan target pembangunan daerah dalam rangka meningkatkan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.

Asumsi makro ekonomi yang digunakan dalam penyusunan perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 mengacu pada indikator sosial ekonomi Pemerintah Kabupaten Gunung Mas Tahun 2023 atau tahun sebelumnya menurut data Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Gunung Mas, yaitu (minimal):

a. Tingkat Kemiskinan menurut Persentase Penduduk Miskin sebesar 5,47 persen;
b. Tingkat Pengangguran Terbuka sebesar 3,11 persen;
c. Gini Ratio sebesar 0,28 poin;
d. Indeks Pembangunan Manusia sebesar 73,18 poin;
e. Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) sebesar 4,25 persen; dan
f. Tingkat Inflasi dengan acuan Kota Palangka Raya sebesar 0,31 persen.

Tingkat Kemiskinan

2. 1. 1. Tingkat Kemiskinan

Penduduk miskin dihitung berdasarkan garis kemiskinan. Garis kemiskinan adalah nilai rupiah pengeluaran per kapita setiap bulan untuk memenuhi standar minimum kebutuhan-kebutuhan konsumsi pangan dan non pangan yang dibutuhkan oleh individu untuk hidup layak.

Jadi penduduk miskin adalah penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran perkapita perbulan di bawah garis kemiskinan dalam persentase penduduk miskin provinsi/ kabupaten/ kota periode tertentu. Namun memetakan kemiskinan tidak cukup hanya berfokus pada seberapa besar atau kecil angka kemiskinan. Tingkat kedalaman dan keparahan kemiskinan di wilayah-wilayah Indonesia juga perlu mendapat perhatian sekaligus pemahaman yang memadai dari pemerintah.

Tingkat kedalaman dan keparahan kemiskinan di wilayah-wilayah Indonesia juga perlu mendapat perhatian sekaligus pemahaman yang memadai dari pemerintah. Kedalaman kemiskinan, menggambarkan seberapa jauh beda pengeluaran penduduk miskin dari garis kemiskinan.

Sedangkan keparahan kemiskinan adalah seberapa jauh jarak pengeluaran orang termiskin di satu wilayah tertentu relatif terhadap pengeluaran rata-rata kelompok miskin di daerah bersangkutan. Makin tinggi angkanya, makin parah kemiskinannya.

Tabel 7.2.1 Garis Kemiskinan, Jumlah, dan Persentase Penduduk Miskin Kabupaten Gunung Mas

No.	Tahun	Garis Kemiskinan (Rp/Bln/Org)	Jumlah Penduduk Miskin (Ribu Jiwa)	Persentase Penduduk Miskin (%)
1.	2018	388.964,00	5,96	5,10
2.	2019	403.045,00	5,86	4,91
3.	2020	438.881,00	5,78	4,75
4.	2021	456.984,00	6,30	5,35
5.	2022	479,550	6,70	5,64
6.	2023	526,341	6,55	5,47

Sumber Dokumen: BPS Kabupaten Gunung Mas – Kabupaten Gunung Mas Dalam Angka 2024

Tabel 7.2.2 Tingkat Kedalaman Kemiskinan Kabupaten Gunung Mas (indeks)

No.	Uraian	Tahun 2023	Tahun 2022	Naik/ (Turun) (%)
1.	Tingkat Kedalaman Kemiskinan Kab/Kota	0,49	0,99	(0,50)
2.	Tingkat Kedalaman Kemiskinan Provinsi	0,66	0,66	0,00
3.	Tingkat Kedalaman Kemiskinan Nasional	1,53	1,56	(0,03)

Sumber Dokumen: BPS Kabupaten Gunung Mas – Kabupaten Gunung Mas Dalam Angka 2024; BPS Provinsi Kalimantan Tengah – Provinsi Kalimantan Tengah Dalam Angka 2024; BPS RI – Statistik Indonesia 2024

Tabel 7.2.3 Tingkat Keparahan Kemiskinan Kabupaten Gunung Mas (indeks)

No.	Uraian	Tahun 2022	Tahun 2021	Naik/ (Turun) (%)
1.	Tingkat Keparahan Kemiskinan Kab/Kota	0,06	0,26	(0,20)
2.	Tingkat Keparahan Kemiskinan Provinsi	0,14	0,12	0,02
3.	Tingkat Keparahan Kemiskinan Nasional	0,38	0,38	0,00

Sumber Dokumen: BPS Kabupaten Gunung Mas – Kabupaten Gunung Mas Dalam Angka 2024; BPS Provinsi Kalimantan Tengah – Provinsi Kalimantan Tengah Dalam Angka 2024; BPS RI – Statistik Indonesia 2024

Persentase penduduk miskin Kabupaten Gunung Mas pada tahun 2023 sebesar 5,47% mengalami penurunan jika dibandingkan dengan tahun 2022 yang sebesar 5,64%.

Hal tersebut sejalan dengan hasil Kajian Fiskal Regional Provinsi Kalimantan Tengah Tahunan 2023 (2023:31-32) dari Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Provinsi Kalimantan Tengah DJPb Kementerian Keuangan Republik Indonesia.

Bahwa secara spasial, kondisi kemiskinan pada perkotaan mengalami penurunan pada periode Maret 2023 yang sejalan pula dengan pemulihan ekonomi dari dampak pandemi Covid-19, khususnya pada sektor perdagangan dan sektor akomodasi, makan, dan minum.

Lebih lanjut dijelaskan bahwa terdapat beberapa faktor yang berpengaruh terhadap penurunan tingkat kemiskinan Kalimantan Tengah sampai dengan periode Maret 2023, antara lain:

a. pertumbuhan ekonomi Kalimantan Tengah triwulan I 2023 yang tumbuh 3,22% (yoy), yang disertai dengan pertumbuhan komponen Konsumsi Rumah Tangga sebesar 3,18% (yoy) atau 0,26% (qtq);
b. Tingkat Pengangguran Terbuka per Februari 2023 sebesar 3,84%, yang mana mengalami penurunan dibandingkan dengan kondisi Agustus 2022 sebesar 4,26% dan Februari 2022 sebesar 4,20%;
c. konsistensi penyaluran bantuan sosial untuk memberikan bantalan tambahan terhadap penduduk miskin, seperti Program Keluarga Harapan dan bansos sembako; serta
d. Inflasi periode September 2022 s.d. Maret 2023 yang terjaga sebesar 1,09%.

Memperhatikan penurunan persentase penduduk miskin Kabupaten Gunung Mas tahun 2023, maka perlu terus diupayakan dalam perencanaan penganggaran tahun mendatang untuk mendapat prioritas dalam menekan angka kemiskinan antara lain dengan menyediakan sembilan bahan pokok murah dengan memastikan ketersediaan dan kelancaran distribusi dari sentra produksi pangan ke seluruh wilayah Kabupaten Gunung Mas di samping juga terus berupaya menyelesaikan permasalahan ketenagakerjaan untuk mengurangi jumlah pengangguran.

Tingkat Pengangguran Terbuka

2. 1. 2. Tingkat Pengangguran Terbuka

TPT (Tingkat Pengangguran Terbuka) adalah persentase jumlah pengangguran terhadap jumlah angkatan kerja. Penganggur terbuka, terdiri dari:

a. mereka yang tak punya pekerjaan dan mencari pekerjaan.
b. mereka yang tak punya pekerjaan dan mempersiapkan usaha.
c. mereka yang tak punya pekerjaan dan tidak mencari pekerjaan, karena merasa tidak mungkin mendapatkan pekerjaan, dan
d. mereka yang sudah punya pekerjaan, tetapi belum mulai bekerja.

Sesuai dengan data pada Badan Pusat Statistik Kabupaten Gunung Mas Tahun 2023, kondisi Maaret 2023, bahwa tingkat pengangguran terbuka Kabupaten Gunung Mas adalah sebesar 3,11% dengan mengalami kenaikan dari pada tahun 2022 yang sebesar 2,96%, sebagaimana dijelaskan tabel di bawah ini.

Tabel 7.2.4 Tingkat Pengangguran Terbuka Kabupaten Gunung Mas

No.	Uraian	Tahun 2023	Tahun 2022	Naik/ (Turun) (%)
1.	Tingkat Pengangguran Terbuka Kab/ Kota (%)	3,11	2,96	0,15
2.	Tingkat Pengangguran Provinsi (%)	4,10	4,26	(0,16)
3.	Tingkat Pengangguran Nasional (%)	5,30	5,90	(0,60)

Sumber Dokumen: BPS Kabupaten Gunung Mas – Kabupaten Gunung Mas Dalam Angka 2024; BPS Provinsi Kalimantan Tengah – Provinsi Kalimantan Tengah Dalam Angka 2024; BPS RI – Statistik Indonesia 2024

Indeks Gini (Gini Ratio)

2. 1. 3. Indeks Gini (Gini Ratio)

Indeks Gini atau *Gini Ratio* adalah merupakan alat analisis yang digunakan untuk menghitung atau mengukur distribusi pendapatan masyarakat suatu negara atau daerah tertentu pada suatu periode tertentu. Ini didasarkan pada kurva Lorenz, yaitu sebuah kurva pengeluaran kumulatif yang membandingkan distribusi dari suatu nilai pengeluaran konsumsi dengan distribusi uniform (seragam) yang mewakili persentase kumulatif penduduk. Nilai dari Indek Gini berkisar antara 0 dan 1 dimana:

a. Indeks Gini = 0, menunjukkan distribusi pendapatan merata sempurna/mutlak, dimana setiap golongan penduduk menerima bagian pendapatan yang sama; dan
b. Indeks Gini = 1, artinya distribusi pendapatan tidak merata mutlak/timpang, dimana bagian pendapatan hanya dinikmati satu golongan tertentu saja.

Sesuai dengan data pada Badan Pusat Statistik Kabupaten Gunung Mas thun 2023, bahwa realisasi pencapaian Indeks Gini (Gini Ratio) Kabupaten Gunung Mas Tahun 2023 adalah sebesar 0,28 poin, sebagaimana dijelaskan tabel di bawah ini.

Tabel 7.2.5 Indeks Gini (Gini Ratio) Kabupaten Gunung Mas

No.	Tingkat Ketimpangan Pendapatan	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Naik/ (turun)
1.	Tingkat Kab/Kota	0,28	0,28	0,26	0,28	0,02
2.	Tingkat Provinsi	0,33	0,32	0,32	0,32	(0,00)
3.	Tingkat Nasional	0,39	0,38	0,38	0,39	0,01

Sumber Dokumen: BPS Kabupaten Gunung Mas – Kabupaten Gunung Mas Dalam Angka 2024; BPS Provinsi Kalimantan Tengah – Provinsi Kalimantan Tengah Dalam Angka 2024; BPS RI – Statistik Indonesia 2024

Pada tahun 2023, tingkat ketimpangan pendapatan penduduk Kabupaten Gunung Mas yang diukur oleh Gini Ratio adalah sebesar 0,28. Angka ini mengalami kenaikan dari angka Gini Ratio tahun 2022 yang sebesar 0,26 dan lebih rendah jika dibandingkan dengan Gini Ratio Provinsi dan Nasional.

Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

2. 1. 4. Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) merupakan indikator untuk mengukur keberhasilan dalam upaya membangun kualitas hidup manusia. IPM menjelaskan bagaimana penduduk dapat mengakses hasil pembangunan dalam memperoleh pendapatan, kesehatan, dan pendidikan.

IPM dibentuk oleh 3 (tiga) dimensi dasar yaitu harapan hidup/umur panjang dan sehat *(a long and healthy life)*, pengetahuan (knowledge), dan standar hidup layak *(decent standart of living)*. Sesuai dengan UNDP Indeks tersebut dikategorikan menjadi 4 (empat), yaitu:

a. Rendah (< 60);
b. Sedang (60 ≤ IPM < 70);
c. Tinggi (70 ≤ IPM < 80); dan
d. Sangat Tinggi (> 80).

Sesuai dengan data pada Badan Pusat Statistik Kabupaten Gunung Mas tahun 2023, bahwa realisasi pencapaian IPM Kabupaten Gunung Mas Tahun 2023 adalah sebesar 73,18 poin dengan kategori tinggi sebagaimana dijelaskan dalam tabel di bawah ini.

Tabel 7.2.6 Indeks Pembangunan Manusia

No.	IPM (Tingkat)	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Naik/ (turun)
1.	Kabupaten/Kota	71,03	71,40	73,18	1,78
2.	Provinsi	72,81	73,17	73,73	0,56
3.	Indonesia/Nasional	73,20	73,80	74,00	74,40

Sumber Dokumen: BPS Kabupaten Gunung Mas – Kabupaten Gunung Mas Dalam Angka 2024; BPS Provinsi Kalimantan Tengah – Provinsi Kalimantan Tengah Dalam Angka 2024; BPS RI – Statistik Indonesia 2024

Realisasi pencapaian IPM Kabupaten Gunung Mas Tahun 2023 adalah sebesar 73,18 poin dibandingkan tahun 2022 sebesar 71,40 poin mengalami kenaikan sebesar 1,78 poin.

Peningkatan IPM tersebut disebabkan meningkatnya Umur Harapan Hidup saat lahir (AHH), Harapan Lama Sekolah (HLS), dan Rata-rata Lama Sekolah (RLS) serta Standar Hidup, berkaitan dengan PNB per kapita.

Rata-rata umur harapan hidup saat lahir mencapai 70,96 tahun pada tahun 2023, lebih cepat 0,24 tahun dibandingkan dengan mereka yang lahir pada tahun 2022. Kemudian, rata-rata lama sekolah selama 9,25 tahun dengan harapan lama sekolah 12,05 tahun dan Pengeluaran Per Kapita sebesar Rp11.462.000,00 pada tahun 2023.

Laju Pertumbuhan Ekonomi

2. 1. 5. Laju Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi adalah salah satu indikator yang dapat digunakan untuk mengevaluasi keberhasilan pembangunan ekonomi suatu wilayah.

Pertumbuhan ekonomi suatu wilayah menggambarkan sejauh mana aktivitas perekonomian suatu wilayah dalam menghasilkan tambahan pendapatan masyarakat pada periode tertentu.

Sedangkan aktivitas perekonomian merupakan suatu proses penggunaan faktor produksi untuk menghasilkan output. Proses penggunaan faktor produksi akan menghasilkan balas jasa. Oleh karenanya dengan adanya pertumbuhan ekonomi diharapkan pendapatan masyarakat meningkat, sebab masyarakat pemilik faktor produksi. Pertumbuhan ekonomi dihitung berdasarkan PDRB atas dasar harga konstan 2010.

Pada tahun 2023, PDRB Atas Dasar Harga Berlaku Kabupaten Gunung Mas sebesar 8.620,0 miliar rupiah. Penyumbang terbesar PDRB Kabupaten Gunung Mas antara lain dari sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan diikuti oleh sektor pertambangan dan penggalian dan konstruksi.

Bila PDRB suatu daerah dibagi dengan jumlah penduduk yang tinggal di daerah itu, maka akan dihasilkan suatu PDRB per kapita. PDRB per kapita atas dasar harga berlaku menunjukkan rata-rata pendapatan yang diterima per kepala atau per satu orang penduduk selama setahun.

Pada Tahun 2023, PDRB per kapita atas dasar harga berlaku Kabupaten Gunung Mas mencapai 66,18 juta rupiah (PDRB atas dasar harga berlaku dibagi jumlah penduduk) dengan pertumbuhan riil PDRB atau lebih dikenal dengan pertumbuhan ekonomi yang merupakan gambaran kinerja pembangunan di bidang ekonomi sebesar 4,25%.

Tabel 7.2.7 Laju Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Gunung Mas

No.	Uraian	Kabupaten/ Kota			Provinsi	Nasional
		Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2023	Tahun 2023
1.	PDRB (Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha)	7.173,2 miliar rupiah	8.135,3 miliar rupiah	8.620,0 miliar rupiah	208,85 triliun rupiah	20.892,4 triliun rupiah
2.	PDRB per kapita (Atas Dasar Harga Konstan 2010 – juta rupiah)	51,83	57,17	66,18	75,10	75,00
3.	Laju Pertumbuhan Ekonomi (%)	5,09	6,47	4,25	4,14	5,10

Sumber Dokumen: BPS Kabupaten Gunung Mas – Kabupaten Gunung Mas Dalam Angka 2024; BPS Provinsi Kalimantan Tengah – Provinsi Kalimantan Tengah Dalam Angka 2024; BPS RI – Statistik Indonesia 2024

Inflasi

2. 1. 6. Inflasi

Selain ditinjau dari pertumbuhan ekonomi, perekonomian Kabupaten Gunung Mas dapat dilihat melalui tingkat inflasi yang terjadi.

Inflasi merupakan salah satu indikator ekonomi yang mengukur fluktuasi harga beberapa komoditas pokok yang menyangkut kebutuhan hidup masyarakat.

Inflasi yang terlalu tinggi merupakan gejala buruk bagi suatu perekonomian namun apabila besaran inflasi dapat dikendalikan melalui berbagai kebijakan harga serta distribusi barang dan jasa maka inflasi dapat menjadi pendorong bagi pembangunan.

Berdasarkan sifatnya inflasi terbagi 4 (empat) kategori yang meliputi:

(i) inflasi ringan (*creeping inflation*) ditandai dengan peningkatan laju inflasi yang tergolong rendah. Biasanya, persentasenya pun hanya kurang dari 10% dalam satu tahun;

(ii) inflasi Sedang (*Galloping Inflation*), inflasi ini sedikit lebih tinggi dibandingkan inflasi ringan. Lajunya berkisar antara 10-30% setahun;

(iii) inflasi Berat (*High Inflation*) kategori inflasi ini termasuk yang berat. Mencakup hitungan mulai dari 30-100% setahun. Pada tingkat ini, harga kebutuhan masyarakat naik secara signifikan dan sulit dikendalikan; dan

(iv) hiperinflasi (*Hyper Inflation*), jenis inflasi ini sangat dirasakan pengaruhnya karena terjadi secara besar-besaran dan mencapai lebih dari 100% setahun.

Sesuai dengan informasi BPS Kabupaten Gunung Mas, bahwa tingkat inflasi untuk Kabupaten Gunung Mas mengikuti tingkat inflasi kota acuan Provinsi Kalimantan Tengah yaitu Kota Palangka Raya dan Kota Sampit.

Dalam perhitungan tingkat inflasi yang merupakan persentase kenaikan harga sejumlah barang dan jasa yang secara umum dikonsumsi rumah tangga, dimana hitungan perubahan harga tersebut tercakup dalam IHK (Indeks Harga Konsumen) atau CPI *(Customer Price Index)*. Indeks Harga Konsumen (IHK) merupakan indeks yang mengukur harga rata-rata dari barang tertentu yang dibeli oleh konsumen.

Tingkat inflasi Kabupaten Gunung Mas mengacu pada tingkat inflasi Kota Palangka Raya, karena jarak tempuh lebih dekat dan ketersediaan transportasi distribusi barang dan jasa, sehingga menjadi gambaran harga rata-rata barang tertentu di Kabupaten Gunung Mas.

Berdasarkan data dari BPS Kota Palangka Raya dalam Berita Resmi Statistik yang dirilis tanggal 2 Januari 2024 menginformasikan hal-hal penting mengenai inflasi Kota Palangka Raya sebesar 0,31 persen dan Sampit sebesar 0,27 persen pada Desember 2023 dengan penjelasan sebagai berikut:

a. pada Desember 2023, inflasi gabungan Kota Palangka Raya dan Sampit sebesar 0,30 persen dengan Indeks Harga Konsumen (IHK) sebesar 118,69. Dari 90 kota IHK, 85 kota mengalami inflasi, sedangkan 5 kota mengalami deflasi. Inflasi tertinggi terjadi di Ternate sebesar 1,64 persen dengan IHK sebesar 117,18 dan deflasi tertinggi terjadi di Meulaboh sebesar 0,67 persen dengan IHK sebesar 120,38;
b. inflasi gabungan Kota Palangka Raya dan Sampit pada Desember 2023 terjadi karena adanya peningkatan indeks harga pada kelompok makanan, minuman, dan tembakau (0,66 persen), kelompok transportasi (0,60 persen), kelompok perawatan pribadi dan jasa lainnya (0,38 persen), kelompok pakaian dan alas kaki (0,21 persen), kelompok informasi, komunikasi dan jasa keuangan (0,16 persen), kelompok perlengkapan, peralatan, dan pemeliharaan rutin rumah tangga (0,15 persen), serta kelompok rekreasi, olahraga, dan budaya (0,08 persen);
c. inflasi tahun kalender dan inflasi tahun ke tahun (Desember 2023 terhadap Desember 2022) untuk gabungan Kota Palangka Raya dan Sampit sebesar 2,64 persen;
d. komoditas yang memberikan sumbangan inflasi pada Desember 2023 antara lain daging ayam ras, angkutan udara, tomat, emas perhiasan, ikan gabus, ikan nila, bawang merah, gula pasir, rokok kretek filter, dan beras; dan

e. komoditas yang memberikan sumbangan deflasi pada Desember 2023 antara lain bahan bakar rumah tangga, semangka, kacang panjang, daging babi, kangkung, ketimun, solar, tas tangan wanita, ikan lele, dan parfum.

Struktur Perekonomian Kabupaten Gunung Mas

2. 1. 7. Struktur Perekonomian Kabupaten Gunung Mas

Struktur perekonomian Kabupaten Gunung Mas dalam menunjang PDRB dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 7.2.8 Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha (miliar rupiah), 2019 – 2023

No.	Lapangan Usaha/ *Industry*	2019	2020	2021	2022	2023
1	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan/ *Agriculture, Forestry, and Fishing*	1.655,90	1.832,00	2.215,30	2.404,50	2.731,70
2	Pertambangan dan Penggalian/ Mining and Quarrying	695,10	858,90	938,60	1.127,90	746,90
3	Industri Pengolahan/ *Manufacturing*	506,00	519,70	591,20	667,40	734,80
4	Pengadaan Listrik dan Gas/ *Electricity and Gas*	1,30	7,40	25,00	28,20	31,50
5	Pengadaan Air; Pengelolaan Sampah, Limbah, dan Daur Ulang/ *Water Supply; Sewerage, Waste Management, and Remediation*	2,90	3,20	3,70	4,30	4,80
6	Konstruksi/ *Construction*	756,40	745,40	853,40	972,80	1.102,30
7	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor/ *Wholesale and Retail Trade; Repair of Motor Vehicles and Motorcycles*	574,80	632,80	688,30	807,90	879,10
8	Transportasi dan Pergudangan/ *Transportation and Storage*	108,40	113,20	129,20	153,60	178,70
9	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum/ *Accommodation and Food Service Activities*	106,30	103,90	112,80	134,90	146,90
10	Informasi dan Komunikasi/ *Information and Communication*	63,80	77,40	92,70	113,40	124,20
11	Jasa Keuangan dan Asuransi/ *Financial and Insurance Activities*	30,70	32,90	36,80	45,90	52,00
12	Real Estat/Real Estate *Activities*	168,80	185,60	203,20	224,90	250,00
13	Jasa Perusahaan/ *Business Activities*	2,80	2,90	3,00	3,90	4,50

14	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan, dan Jaminan Sosial Wajib/ *Public Administration and Defence; Compulsory Social Security*	391,60	432,90	464,10	476,80	525,90
15	Jasa Pendidikan/ *Education*	457,50	488,90	523,30	634,00	722,80
16	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial/ *Human Health and Social Work Activities*	197,50	219,30	272,80	312,60	358,60
17	Jasa Lainnya/ *Other Services Activities*	18,20	18,40	19,60	22,10	25,50
	Produk Domestik Regional Bruto/ *Gross Domestic Regional Product*	**5.738,00**	**6.274,80**	**7.173,00**	**8.135,10**	**8.620,20**

Sumber Dokumen: BPS Kabupaten Gunung Mas – Kabupaten Gunung Mas Dalam Angka 2024

Kebijakan Keuangan

2. 2. Kebijakan Keuangan

Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintah daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah dalam kerangka anggaran belanja dan pembiayaan.

Hal tersebut menjadikan keuangan Daerah merupakan salah satu faktor penentu dalam penyelenggaraan fungsi-fungsi pemerintahan pelaksanaan pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat.

Kebijakan keuangan Daerah dituangkan dalam Kebijakan Umum APBD dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA PPAS) yang merupakan dokumen pedoman dalam penyusunan APBD, memuat pokok-pokok pikiran melalui proses penjaringan aspirasi masyarakat dengan mempertimbangkan kondisi dan kemampuan Daerah termasuk kinerja pelayanan yang telah dicapai dalam tahun anggaran sebelumnya.

KUA PPAS mempertimbangkan pula rencana stratejik Pemerintah Daerah dan dokumen perencanaan lainnya, kebijakan Pemerintah Pusat, pertimbangan kondisi sosial, politik, ekonomi, dan isu-isu global yang berkembang di masyarakat.

Kebijakan keuangan Daerah diarahkan untuk meningkatkan struktur keuangan yang lebih baik melalui peningkatan kemampuan pengelolaan dan pengawasan keuangan Daerah. Kebijakan tersebut diharapkan meningkatkan kontribusi Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap APBD serta kebijakan belanja Pemerintah Daerah yang lebih efisien, efektif, dan selektif dalam Belanja Modal serta berorientasi pada peningkatan ekonomi masyarakat, transparansi, dan akuntabilitas publik serta penerapan *good governance*.

Untuk pembiayaan mengoptimalkan pemanfaatan sumber penerimaan Daerah dalam menutupi defisit tahun anggaran berjalan dan pengeluaran lainnya. Kebijakan keuangan meliputi komponen-komponen dan kinerja pelayanan yang diharapkan pada setiap kewenangan Pemerintah Daerah yang akan dilaksanakan dalam satu tahun anggaran.

Arah Kebijakan dan Sasaran Pendapatan Daerah

2. 2. 1. Arah Kebijakan dan Sasaran Pendapatan Daerah

Kebijakan pendapatan Daerah diarahkan pada upaya peningkatan kualitas pengelolaan pendapatan dan aset daerah, khususnya penerimaan dari Pendapatan Asli Daerah (PAD).

PAD harus secara terus menerus diupayakan peningkatannya sehingga diharapkan akan dapat memperkecil ketergantungan terhadap penerimaan dari Pemerintah Pusat.

Upaya meningkatkan PAD pada dasarnya ditempuh melalui upaya intensifikasi dan ekstensifikasi dengan sasaran-sasaran sebagai berikut:

a. menyesuaikan aspek kelembagaan/organisasi pengelola PAD sesuai dengan kebutuhan yang berkembang dengan berorientasi pada fungsi-fungsi salah satunya dengan cara peningkatan sistem pembukuan yang memudahkan dalam pencarian data tunggakan Pajak Daerah maupun Retribusi Daerah untuk mempermudah penagihan.
b. menyesuaikan aspek ketatalaksanaan pada sisi administrasi dan operasional dengan cara penyempurnaan administrasi pemungutan dan penyesuaian tarif serta operasional sistem pelaksanaan pemungutan.
c. meningkatkan pengawasan dan pengendalian rencana target PAD yang ingin dicapai dalam proses penetapan dan pemungutannya selalu mengacu pada peraturan dan perundang-undangan yang berlaku seiring dengan pengawasan dan pengendalian terhadap teknis pelaksanaan sistem dan prosedur pemungutan dan pembayaran PAD agar wajib pajak/retribusi terlayani dengan cepat dan cermat serta tertib administrasi.
d. meningkatkan kemampuan sumber daya manusia pengelola pendapatan dengan cara mengikutsertakan pengelola pendapatan dalam kursus-kursus Keuangan Daerah khususnya program pendidikan dan pelatihan pengelolaan Pendapatan Daerah.
e. meningkatkan kegiatan penyuluhan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat untuk membayar Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dengan lebih gencar memanfaatkan media komunikasi elektronik.
f. meningkatkan koordinasi, evaluasi, dan peningkatan potensi pendapatan Daerah dengan Perangkat Daerah terkait yang melakukan pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Arah Kebijakan dan Sasaran Belanja Daerah

2. 2. 2. Arah Kebijakan dan Sasaran Belanja Daerah

Kebijakan belanja Daerah diarahkan untuk mencapai visi dan misi pembangunan Daerah sesuai dengan strategi/prioritas dan program yang telah ditetapkan dalam rangka meningkatkan kualitas dan kuantitas pelayanan publik dengan berlandaskan pada azas pengelolaan keuangan yang efisien, efektif, ekonomis, dan taat pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Adapun strategi, prioritas, dan program pembangunan Kabupaten Gunung Mas menurut Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Gunung Mas Tahun 2019 – 2024 terdapat dalam tabel berikut:

Tabel 7.2.9 Strategi, Prioritas, dan Program Pembangunan 5 Tahun Kabupaten Gunung Mas

No.	Strategi/ Prioritas Pembangunan 5 Tahun	Prioritas Pembangunan Tahunan (Arah Kebijakan)	Program Pembangunan	Indikator
1.	Pemerataan Pembangunan infrastruktur dasar dan aksesibilitas antar wilayah	Peningkatan dan pemerataan kuantitas serta kualitas sarana dan prasarana wilayah dan perdesaan.	Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum	Panjang pipa jaringan distribusi air bersih yang teraliri.
			Program pembangunan jalan dan jembatan	Jumlah Desa Yang Terhubung Dengan Kecamatan
			Program peningkatan Jalan dan Jembatan	Panjang Jalan Dilalui Roda 4 (Km)
			Program Rehabilitasi/ Pemeliharaan Jalan dan Jembatan	Panjang Jalan Dalam Kondisi Baik (km)
			Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan	Rasio Saluran Irigasi yang Berfungsi Optimal
		Pemenuhan pelayanan perhubungan antar wilayah	Program peningkatan pelayanan angkutan	Presentase Penurunan Angka/Jumlah Kecelakaan Lalu Lintas
			Program pengendalian Dan pengamanan lalu	Persentase pemenuhan kebutuhan rambu lalu
			Program pembangunan sarana dan prasarana Perhubungan	Jumlah Pelabuhan Laut/Udara/ Terminal Bis dalam kondisi baik
		Pemenuhan aksesibilitas informasi dan	Program Aplikasi dan Informatika	Cakupan penerapan E-Gov
		Pemenuhan kebutuhan perumahan yang layak bagi masyarakat	Program Pengembangan Perumahan	Rumah Layak Huni (unit)
			Program Sistem Penyediaan Air Minum	Persentase ketersediaan sarana dan prasarana air
			Program pembangunan prasarana sanitasi	Persentase Rumah Tinggal bersanitasi
2.	Peningkatan kualitas pelayanan pendidikan dan kesehatan	Peningkatan kualitas anak usia dini	Program Pendidikan Anak Usia Dini	Angka Partisipasi Kasar PAUD (%)
		Peningkatan Kualitas pelayanan Pendidikan dasar	Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun	Angka Partisipasi Murni SD/ MI/ SDLB; Angka Partisipasi Murni SMP/ MTs/ SMPLB
		Peningkatan kualitas pendidikan non formal	Program Pendidikan Non Formal	Angka Kelulusan Paket A, B dan C
		Peningkatan kualitas dan kapasitas pendidik dan tenaga kependidikan	Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Guru yang memenuhi kualifikasi S1/ D-IV
		Pengembangan Sistem pelayanan pendidikan	Program Manajemen Layanan Pendidikan	Angka Kelulusan pendidikan (SD & SMP
		Peningkatan Budaya baca dan peningkatan wawasan masyarakat	Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan	Jumlah pengunjung
		Peningkatan penyelenggaraan	Program Upaya Kesehatan Masyarakat	Angka Kesakitan

		Peningkatan kualitas sarana dan prasarana pelayanan kesehatan	Program Pengadaan Peningkatan dan Perbaikan Sarana dan Prasarana Puskesmas/ Puskesmas Pembantu	Jumlah ketersediaan alat kesehatan pada tiap unit pelayanan puskesmas/pustu dan jaringannya
			Program obat dan perbekalan Kesehatan	Jumlah ketersediaan obat dan perbekalan kesehatan untuk tiap unit pelayanan
			Program Kemitraan Peningkatan Pelayanan Kesehatan	Cakupan pelayanan kesehatan dasar dan rujukan pasien masyarakat miskin
			Program Pengembangan Lingkungan Sehat	Cakupan wilayah pembinaan pengembangan
		Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular dan tidak menular	Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular	Penemuan Penderita Baru TBC BTA Positif; Penderita DBD yang ditangani; Cakupan Desa/kelurahan mengalami KLB yang dilakukan penyelidikan epidemiologi < 24 jam
			Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat	Cakupan wilayah promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat
		Peningkatan Kualitas kesehatan ibu dan anak	Program peningkatan keselamatan ibu melahirkan dan anak	Cakupan Kunjungan Bayi
		Peningkatan penyelenggaraan pelayanan bidang olah raga bagi kaum pemuda	Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olah Raga	Jumlah organisasi olah raga aktif
			Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olah Raga	Persentase pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana olah raga
3.	Optimalisasi pemberdayaan perempuan dalam pembangunan	Peningkatan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak dalam pembangunan	Program perlindungan Hak Perempuan dan Perlindungan Khusus	Penyelesaian Pengaduan Perempuan dan Anak Tindakan Kekerasan (%)
			Program Peningkatan Pemenuhan Hak Anak	Persentase keterwakilan anak dalam kegiatan
			Program KKBPK	Cakupan Peserta KB Aktif (Orang)
4.	Optimalisasi Pengentasan Kemiskinan	Peningkatan pelayanan pemberian bantuan kesejahteraan yang tepat sasaran	Program Perlindungan dan Jaminan Sosial	Persentase KLB yang tertangani
			Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial	Persentase penangan penyandang masalah kesejahteraan sosial
		Pengurangan kemiskinana melalui pemberdayaan sosial PMKS	Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) lainnya	Rasio PMKS yang memperoleh bantuan sosial
		Peningkatan ketahanan sosial masyarakat desa	Program pengembangan lembaga ekonomi pedesaan	Rata-rata jumlah kelompok binaan lembaga pemberdayaan masyarakat (LPM)
			Program peningkatan pastisipasi masyarakat dalam pembangunan desa	Persentase Keterlibatan Masyarakat terhadap Program pemberdayaan
		Pengembangan usaha mikro bagi masyarakat miskin	Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah	Persentase UMKM Yang Modal dan Omzet Meningkat
5.	Peningkatan pendapatan ekonomi masyarakat	Peningkatan kualitas pembiayaan bagi usaha mikro kecil dan menengah	Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan	Koperasi Aktif (%)
			Program Pembinaan Pedagang Kaki Lima dan Asongan	Persentase PKL yang dibina
		Peningkatan efektivitas sistem perdagangan	Program perlindungan dan pengamanan perdagangan	Cakupan temuan kasus perdagangan yang ditangani
			Program peningkatan efisiensi perdagangan dalam negeri	Ekspor Bersih Perdagangan (juta rupiah)
		Pengembangan industri hasil unggulan daerah	Program pengembangan industri kecil dan	Pertumbuhan IKM

LAMPIRAN VII
PERATURAN DAERAH KABUPATEN GUNUNG MAS
NOMOR 3 TAHUN 2024
TENTANG
PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2023

			Program penataan struktur industri	Luas Kawasan industri yang dikembangkan
6.	Peningkatan daya saing tenaga kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja	Peningkatan kompetensi angkatan kerja potensial	Program peningkatan kompetensi tenaga kerja dan produktivitas	Tingkat pastisipasi angkatan kerja
			Program Peningkatan Kesempatan Kerja	Jumlah tenaga kerja yang terdaftar
		Peningkatan kuantitas lapangan kerja	Program perlindungan dan pengembangan lembaga ketenagakerjaan	Jumlah perselisihan hubungan industrial yang diselesaikan
		Peningkatan ketrampilan hidup wirausaha muda	Program penciptaan iklim usaha Usaha Kecil Menengah yang	Jumlah UMKM
		Peningkatan iklim dan promosi investasi serta pembangunan kemitraan dengan dunia usaha	Program Pengendalian Pelaksanaan Investasi	Persentase pengajuan perizinan dan non perizinan yang diselesaikan tepat waktu
			Program peningkatan promsi dan kerja sama investasi	Jumlah Investor PMDN dan PMA
		Peningkatan kecepatan dan ketepatan pelayanan perijinan	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	Persentase penyelesaian penanganan pengaduan
		Peningkatan kualitas pengelolaan pendapatan dan aset daerah	Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan	Persentase peningkatan PAD
7.	Pengembangan Agribisnis	Peningkatan produksi pertanian pangan	Program kerawanan dan kewaspadaan pangan	Jumah wilayah rawan pangan yang terdeteksi
			Program peningkatan produksi pertanian/ perkebunan	Nilai Produksi Komoditi Perkebunan; Nilai Produksi Komoditi
			Program Peningkatan Kesejahteraan Petani	Rasio kelompok petani yang dibina
		Pemenuhan sarana dan prasarana produksi	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana	Rasio kelompok tani yang terfasilitasi
		Peningkatan produksi perikanan	Program Pengembangan Perikanan Tangkap	Hasil tangkapan alam setiap upaya penangkapan (ton)
			Program pengembangan budidaya perikanan	Produksi perikanan budidaya (ton)
			Program Peningkatan pengelolaan dan pemasaran produksi	Produksi hasil pengolahan produksi perikanan (ton)
		Peningkatan produksifitas perkebunan	Program peningkatan penerapan teknologi pertanian/ perkebunan	Persentase kelompok tani yang menerapkan teknologi pertanian/
			Program Peningkatan Ketahanan Pangan (pertanian/ perkebunan)	Produktivitas Tanaman Pangan
			Program Peningkatan Produksi Perkebunan	Nilai Produksi Komoditi Perkebunan; Nilai Produksi Komoditi Pertanian
		Peningkatan pendistribusian hasil produksi perkebunan Peningkatan produksi peternakan	Program peningkatan pemasaran hasil produksi pertanian/ perkebunan	Nilai produksi pertanian yang dipasarkan
			Program Peningkatan Produksi Hasil	Nilai Produksi Komoditi Peternakan
			Program pencegahan dan penanggulangan penyakit ternak	Persentase kasus temuan penyakit ternak yang ditangani
			Program peningkatan sarana dan prasarana	Rasio kelompok ternak yang terfasilitasi
8.	Peningkatan kualitas pengelolaan pariwisata	Pengembangan potensi kepariwisataan daerah	Program pengembangan destinasi pariwisata	Rasio obyek wisata yang dikembangkan
		Peningkatan pelayanan pariwisata	Program pengembangan pemasaran pariwisata	Jumlah Kunjungan Wisata (orang)
			Program Sarana Promosi Pariwisata	Rasio obyek wisata yang dipromosikan
			Program Pengembangan Pasar Pariwisata	Jumlah kunjungan Wisata (orang)
9.	Percepatan Reformasi Birokrasi	Peningkatan kualitas sistem perencanaan pembangunan daerah	Program perencanaan pembangunan daerah	Rasio Dokumen Perencanaan daerah dan perangkat daerah yang selesai tepat waktu
		Peningkatan sistem pengawasan dan	Program pembinaan dan pengembangan aparatur	Rasio jabatan yang tepenuhi

		Peningkatan efisiensi dan efektifitas penggunaan anggaran	Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan	Proporsi dokumen penganggaran yang ditetapkan tepat waktu
		Pemberdayaan pemerintah desa terkait tertib administrasi kependudukan	Program Penataan Administrasi Kependudukan	Persentase jumlah penduduk yang memiliki KTP Elektronik (e-KTP)
10.	Peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan	Penguatan kapasitas keamanan lingkungan berbasis masyarakat	Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan	Penegakan PERDA
			Program pendidikan politik masyarakat	Rasio pembinaan politik daerah
		Peningkatan kewaspadaan terjadinya bencana alam	Program Peningkatan Kesiagaan dan Pencegahan Bahaya	Persentase kejadian bencana yang tertangani
			Program Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Hutan	Persentase penanganan kebakaran hutan
11.	Pelestarian kebudayaan daerah	Integrasi budaya dan pariwisata	Program Pengelolaan Keragaman Budaya	Jumlah Penyelenggaraan Festival Seni dan Budaya (kali)
			Program Pengembangan Nilai Budaya	Persentase budaya yang dkembangkan
		Peningkatan performa penyelenggaraan kebudayaan daerah	Program Pengelolaan Kekayaan Budaya	Jumlah Benda, Situs dan Kawasan Budaya yang dilestarikan
12.	Peningkatan Pengelolaan Kualitas Lingkungan Hidup	Peningkatan pengelolaan SDA secara lestari dan berkelanjutan	Program perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam	Cakupan pengawasan terhadap pelaksanaan AMDAL
			Program peningkatan pengendalian polusi	Pencemaran status mutu air
			Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup	Penegakan Hukum Lingkungan
		Peningkatan kualitas penanganan persampahan	Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan	Persentase penanganan sampah (%)

Sumber Dokumen: Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Gunung Mas Tahun 2019 – 2024

Arah Kebijakan dan Sasaran Pembiayaan Daerah

2. 2. 3. Arah Kebijakan dan Sasaran Pembiayaan Daerah

APBD Pemerintah Kabupaten Gunung Mas Tahun Anggaran 2023 disusun berdasarkan kinerja yang dengan demikian dimungkinkan adanya defisit maupun surplus. Penerimaan pembiayaan antara lain bersumber dari pinjaman daerah, sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya (SiLPA), dana cadangan, dan penjualan aset. Pengeluaran pembiayaan diprioritaskan pada pengeluaran yang bersifat wajib antara lain untuk pembayaran hutang pokok yang telah jatuh tempo.

Setelah pengeluaran wajib terpenuhi, selanjutnya pengeluaran pembiayaan diarahkan untuk penyertaan modal pada lembaga keuangan dan badan usaha milik daerah (BUMD) yang berorientasi keuntungan dan bertujuan untuk meningkatkan pelayanan ke masyarakat. Penyertaan modal tersebut dengan maksud untuk menghasilkan bagi hasil laba (deviden) untuk meningkatkan PAD sekaligus meningkatkan kinerja pelayanan dari lembaga keuangan dan/atau BUMD kepada masyarakat. Kebijakan pembiayaan Daerah tahun 2023 diarahkan untuk memperoleh deviden sebagai penambah PAD dengan sasaran penyertaan modal kepada PT Bank Pembangunan Kalimantan Tengah.

Penjelasan Perubahan Anggaran

2. 2. 4. Penjelasan Perubahan Anggaran

Dalam tahun 2023, Pemerintah Kabupaten Gunung Mas melakukan perubahan APBD dengan memedomani ketentun Pasal 161 dan Pasal 162 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 bahwa perubahan APBD dapat dilakukan apabila:

a. perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi KUA;
b. keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran anggaran antar organisasi, antar unit organisasi, antar Program, antar Kegiatan, dan antar jenis belanja;
c. keadaan yang menyebabkan SiLPA tahun anggaran sebelumnya harus digunakan dalam tahun anggaran berjalan;
d. keadaan darurat; dan/atau
   keadaan luar biasa.

Perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi KUA dapat berupa terjadinya:

a. pelampauan atau tidak tercapainya proyeksi Pendapatan Daerah;
b. pelampauan atau tidak terealisasinya alokasi Belanja Daerah; dan/atau
c. perubahan sumber dan penggunaan Pembiayaan daerah.

Perubahan APBD Kabupaten Gunung Mas Tahun Anggaran 2023 pula dilandasi karena adanya dinamika kondisi ekonomi global dan nasional menyebabkan perlunya penyesuaian terhadap asumsi kondisi makro ekonomi serta target pendapatan tahun 2023 berdasarkan evaluasi capaian sampai dengan triwulan I tahun 2023.

Implikasi tersebut menyebabkan perlunya penyesuaian target pendapatan, perubahan target kinerja program, kegiatan dan sub kegiatan beserta pagu indikatifnya. Penyesuaian tersebut meliputi perubahan asumsi ekonomi makro, asumsi pendapatan, belanja dan pembiayaan daerah serta untuk mensinkronisasikan dengan Rancangan Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) Kabupaten Gunung Mas Tahun 2019 – 2024.

(dikutip dari Kebijakan Umum Perubahan APBD - KUPA Pemerintah Kabupaten Gunung Mas Tahun Anggaran 2023)

Perubahan Asumsi Dasar

2. 2. 4. 1. Perubahan Asumsi Dasar

Kondisi ekonomi makro yang terjadi di dalam maupun di luar negeri serta adanya serangkaian perubahan kebijakan dari Pemerintah Pusat menyebabkan perlunya dilakukan penyesuaian terhadap kondisi ekonomi Kabupaten Gunung Mas di semester kedua Tahun 2023. Asumsi-asumi yang dipergunakan pada Kebijakan Umum Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (KUPA) Pemerintah Kabupaten Gunung Mas Tahun Anggaran 2023 yang perlu disesuaikan antara lain karena kebijakan pemerintah pusat terkait transfer ke daerah akibat tidak tercapainya asumsi penerimaan negara yang mempengaruhi belanja negara sehingga mengalami defisit serta kondisi ekonomi nasional.

Untuk itu perhitungan besaran perubahan APBD Pemerintah Kabupaten Gunung Mas Tahun Anggaran 2023 dihitung berdasarkan asumsi sebagai berikut:

a. Asumsi Dasar yang digunakan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Republik Indonesia Tahun Anggaran 2023 terdiri dari:
   1) Asumsi Makro Ekonomi: a) Pertumbuhan Ekonomi 5,2%; b) Tingkat Inflasi 3.0%; c) Nilai Tukar Rupiah 14.350,00; d) SBN 10 tahun 6,80%
   2) Target Pembangunan: a) Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) 5.5% s.d. 6,3%; b) Tingkat Kemiskinan 8,5 s.d. 9,0%; c) Rasio Gini 0,376 s.d. 0,378
   3) Indikator Pembangunan: a) Indeks Pembangunan Manusia 73,41 s.d. 73,46; b) NTP (Nilai Tukar Petani) 103 s.d. 105; c) NTN (nilai tukar nelayan) 104 s.d. 106
b. Laju Inflasi Kabupaten Gunung Mas diproyeksi akan sedikit lebih tinggi dari Kota Palangka Raya. Untuk sampai bulan Mei Tahun 2023, inflasi *years of years* untuk Kota Palangka Raya 0,24%.
c. Pertumbuhan PDRB sebagai dasar perhitungan pertumbuhan ekonomi daerah diproyeksikan mencapai 5,50 persen (nilai rata-rata pertumbuhan PDRB tahun 2002 s.d. 2022).

(dikutip dari Kebijakan Umum Perubahan APBD - KUPA Pemerintah Kabupaten Gunung Mas Tahun Anggaran 2023)

Adapun selain hal-hal tersebut di atas, asumsi dasar yang melandasi KUPA Pemerintah Kabupaten Gunung Mas Tahun Anggaran 2023 sebagai berikut:

a. pokok-pokok kebijakan sinkronisasi;
b. hasil musrenbang;
c. isu-isu strategis Perangkat Daerah;
d. konsistensi hasil musrenbang daerah dengan musrenbang pusat; dan
e. pembahasan kesesuaian antara rencana kegiatan di Daerah dengan kegiatan pusat yang pendanaannya melalui dana tugas pembantuan.

Perubahan Kebijakan Pendapatan Daerah

2. 2. 4. 2. Perubahan Kebijakan Pendapatan Daerah

Perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi prioritas pembangunan Daerah, kerangka ekonomi Daerah dan keuangan Daerah, rencana program dan kegiatan RKPD berkenaan, terutama keadaan yang menyebabkan berkurangnya Pendapatan Daerah. Dimana pada tahun 2023 berdasarkan hasil Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Tahunan PT. Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Tengah (PT Bank Kalteng) Tahun Buku 2022 bahwa pembagian dividen atau Laba Bersih PT Bank Kalteng Tahun Buku 2022 ditiadakan atas kesepakatan bersama antara PT Bank Kalteng dan para Pemegang Saham.

Kemudian dividen Tahun Buku 2022 tersebut seluruhnya disisihkan untuk cadangan dalam rangka mendorong pemenuhan modal inti PT Bank Kalteng untuk memenuhi kewajiban Modal Inti sebagaimana yang dipersyaratkan oleh Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 12/POJK03/202 tanggal 16 Maret 2020 tentang Konsolidasi Bank sesuai surat Pengurus PT Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Tengah (PT Bank Kalteng) nomor: DIR.01/SB-0021/V-23 tanggal 19 Mei 2023 perihal Tindak Lanjut Hasil Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Tahunan PT Bank Kalteng Tahun Buku 2022.
(dikutip dari Kebijakan Umum Perubahan APBD - KUPA Pemerintah Kabupaten Gunung Mas Tahun Anggaran 2023)
Sehingga, Pendapatan Daerah dalam APBD Tahun Anggaran 2023 dilakukan perubahan dengan total sebesar Rp1.210.631.011.162,00 dari APBD murni sebesar Rp1.184.704.234.995,00 dengan rincian perubahan pada:

a. Pendapatan Asli Daerah menjadi sebesar Rp74.332.496.530,00 dari awal sebesar Rp84.719.417.995,00;
b. Pendapatan Transfer menjadi sebesar Rp1.132.550.474.632,00 dari awal sebesar Rp1.096.236.777.000,00; dan
c. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah tetap sebesar Rp3.748.040.000,00

Perubahan Kebijakan Belanja Daerah

2. 2. 4. 3. Perubahan Kebijakan Belanja Daerah

Kebijakan Belanja Daerah Tahun 2023 juga dilakukan perubahan dalam rangka menyesuaikan dengan kebijakan nasional dan rasionalisasi Belanja Daerah akibat pengurangan Pendapatan Daerah serta menghadapi perkembangan ekonomi, dengan beberapa kondisi mendasar antara lain sebagai berikut:

a. pergeseran anggaran antar Perangkat Daerah, yang disebabkan perubahan capaian target kinerja program dan kegiatan.
b. program dan kegiatan baru yang merupakan prioritas kegiatan untuk pemerataan pembangunan kesehatan, pendidikan dan infrastruktur dalam rangka percepatan pemulihan ekonomi serta peningkatan kapasitas aparatur dalam rangka pelayanan publik dengan mempertimbangkan sisa waktu pelaksanaan.
c. alokasi Hibah kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) untuk persiapan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Tahun 2024 sesuai Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.9.1/435/SJ tetang Pendanaan Pemilu/Pilkada.
d. penyesuaian terhadap Surat Kemendagri Nomor 900.1.14.3/1483/SJ tentang hasil pemetaan nomenklatur penggunaan DBHCT, DBHDR, dan DAK TA 2023 tanggal 10 Maret 2023.
e. penyesuaian ketentuan DAU Peruntukan (P3K, Kelurahan, PU, Kesehatan, dan Pendidikan) sesuai PMK 212/2022.

f. penyesuaian belanja pegawai terhadap pengangkatan ASN sesuai Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 616 Tahun 2022 Tentang Penetapan Kebutuhan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Gunung Mas.

(dikutip dari Kebijakan Umum Perubahan APBD - KUPA Pemerintah Kabupaten Gunung Mas Tahun Anggaran 2023)

Dengan demikian, Belanja Daerah dalam APBD Tahun Anggaran 2023 dilakukan perubahan dengan total sebesar Rp1.334.210.394.363,00 dari APBD murni sebesar Rp1.280.973.089.733,00 dengan rincian perubahan pada:

a. Belanja Operasi menjadi sebesar Rp849.602.808.825,00 dari awal sebesar Rp835.082.311.742,00;
b. Belanja Modal menjadi sebesar Rp291.830.294.608,00 dari awal sebesar Rp266.134.303.061,00;
c. Belanja Tidak Terduga menjadi sebesar Rp9.580.000.000,00 dari awal sebesar Rp4.750.000.000,00; dan
d. Belanja Transfer menjadi sebesar Rp183.197.290.930,00 dari awal sebesar Rp175.006.474.930,00

Perubahan Kebijakan Pembiayaan Daerah

2. 2. 4. 4. Perubahan Kebijakan Pembiayaan Daerah

Penerimaan Pembiayaan tahun 2023 mengalami perubahan kebijakan bersumber dari penyesuaian nilai Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Lalu (SiLPA) setelah mendapat hasil pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Gunung Mas Tahun 2022 *audited* dengan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) oleh Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI).

Pengeluaran Pembiayaan tahun 2023 tidak terdapat perubahan kebijakan dan tetap digunakan untuk hanya Penyertaan Modal Pemerintah Daerah pada Perusahaan Daerah/BUMD untuk PT Bank Pembangunan Kalimantan Tengah (PT Bank Kalteng).

(dikutip dari Kebijakan Umum Perubahan APBD - KUPA Pemerintah Kabupaten Gunung Mas Tahun Anggaran 2023)

Dengan demikian, nilai perubahan pembiayaan Daerah pada perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 dapat dirinci sebagai berikut:

a. Penerimaan Pembiayaan Daerah menjadi sebesar Rp135.547.383.201,00 dari awal sebesar Rp108.236.854.738,00; dan
b. Pengeluaran Pembiayaan Daerah tetap menjadi Rp11.968.000.000,00

Indikator Pencapaian Target Kinerja APBD

2. 3. Indikator Pencapaian Target Kinerja APBD

Indikator pencapaian kinerja yang disajikan dalam laporan keuangan ini adalah mengacu pada target-target keuangan yang dicanangkan pada masing-masing program pada Urusan Wajib dan Urusan Pilihan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Gunung Mas dalam Tahun Anggaran 2023.

Indikator dan target tersebut tertuang dalam Peraturan Daerah Kabupaten Gunung Mas Nomor 10 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 dan Peraturan Daerah Kabupaten Gunung Mas Nomor 8 Tahun 2023 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 serta pada tiap-tiap Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Pejabat Pengelola Keuangan Daerah.

Sesuai dengan struktur APBD Kabupaten Gunung Mas Tahun Anggaran 2023 yang berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, khususnya Pasal 27 dan Pasal 28, bahwa struktur APBD merupakan satu kesatuan yang terdiri atas Pendapatan Daerah, Belanja Daerah, dan pembiayaan Daerah dengan diklasifikasikan menurut Urusan Pemerintahan daerah dan organisasi yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Urusan Pemerintahan daerah dan organisasi dalam APBD Kabupaten Gunung Mas Tahun Anggaran 2023 terdiri dari Urusan Wajib Pelayanan Dasar, Urusan Wajib yang tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar, Urusan Pilihan, Urusan Pendukung, Urusan Penunjang, Unsur Pengawasan, dan Unsur Kewilayahan serta Unsur Pemerintahan Umum.

Dalam Tahun Anggaran 2023, APBD Kabupaten Gunung Mas menganggarkan Pendapatan Daerah dengan total sebesar Rp1.210.631.011.162,00 untuk melaksanakan 3 Urusan Wajib Pelayanan Dasar, 3 Urusan Wajib yang tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar, 4 Urusan Pilihan, 1 Urusan Pendukung, dan 2 Urusan Penunjang. Kemudian, membiayai Belanja Daerah dengan total anggaran sebesar Rp1.334.210.394.363,00 untuk melaksanakan 5 Urusan Wajib Pelayanan Dasar, 8 Urusan Wajib yang tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar, 4 Urusan Pilihan, 2 Urusan Pendukung, 3 Urusan Penunjang, 1 Unsur Pengawasan, dan 12 Unsur Kewilayahan serta 1 Unsur Pemerintahan Umum. Dan menganggarkan pembiayaan Daerah untuk melaksanakan 1 Urusan Penunjang yang terdiri dari penerimaan Pembiayaan sebesar Rp135.547.383.201,00 dan pengeluaran Pembiayaan sebesar Rp11.968.000.000,00

BAB III IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN

Ikhtisar Realisasi Pencapaian Kinerja Keuangan

3. 1. Ikhtisar Realisasi Pencapaian Kinerja Keuangan

Ikhtisar realisasi pencapaian kinerja keuangan disajikan dengan menggambarkan pencapaian kinerja keuangan masing-masing program pada Urusan Wajib Pelayanan Dasar, Urusan Wajib yang tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar, Urusan Pilihan, Urusan Pendukung, Urusan Penunjang, Unsur Pengawasan, dan Unsur Kewilayahan serta Unsur Pemerintahan Umum yang dilaksanakan Pemerintah Kabupaten Gunung Mas pada Tahun Anggaran 2023. Uraian lengkap kinerja program dan kegiatan dari masing-masing urusan tersebut disajikan terpisah dalam Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Kabupaten Gunung Mas Tahun 2023.

Secara ringkas capaian kinerja keuangan dijelaskan sebagai berikut:

a. Pendapatan Daerah terealisasi sebesar Rp1.176.119.496.936,58 atau mencapai 97,15% dari pagu anggaran sebesar Rp1.210.631.011.162,00;
b. Belanja Daerah terealisasi sebesar Rp1.250.220.807.539,09 atau mencapai 93,70% dari pagu anggaran sebesar Rp1.334.210.394.363,00; dan
c. Pembiayaan Netto terealisasi sebesar Rp123.579.383.201,20 atau mencapai 100,00% dari alokasi anggaran sebesar 123.579.383.201,00 yang merupakan selisih lebih dari realisasi penerimaan Pembiayaan sebesar Rp135.547.383.201,20 dengan realisasi pengeluaran Pembiayaan sebesar Rp11.968.000.000,00 yang merupakan penyertaan modal Pemerintah Daerah.

Hambatan dan Kendala Dalam Pencapaian Target yang Telah Ditetapkan

3. 2. Hambatan dan Kendala Dalam Pencapaian Target yang Telah Ditetapkan

Hambatan dan kendala dalam pencapaian target kinerja adalah sebagai berikut:

a. bidang infrastruktur, pembangunan tata ruang terkendala belum finalnya RTRW Provinsi Kalimantan Tengah dan juga sarana dan prasarana jalan masih kurang;
b. bidang pendidikan, kurang cermatnya dalam penyusunan perencanaan bidang pendidikan; dan
c. bidang data dan pelaporan, masih rendahnya pengembangan sistem akuntabilitas kinerja yang berkesinambungan, belum dikembangkan sistem pengukuran dan pengumpulan data kinerja sebagai sarana untuk dapat menyajikan laporan kinerja yang cepat dan akurat serta sarana evaluasi kinerja secara berkelanjutan.

BAB IV KEBIJAKAN AKUNTANSI

Penjelasan Umum

Kebijakan Akuntansi adalah prinsip-prinsip, dasar-dasar, konvensi-konvensi, aturan-aturan, dan praktik-praktik spesifik yang dipilih oleh suatu entitas pelaporan dalam penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan.

Kebijakan akuntansi yang dipergunakan dalam penyusunan Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2023 ini berpedoman kepada:

1. Kebijakan akuntansi yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang mencakup Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP) Nomor 1 sampai dengan Nomor 11 termasuk Kerangka Konseptual Akuntansi Pemerintahan serta Interpretasi PSAP dan Buletin Teknis yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari SAP; dan
2. Praktik-praktik akuntansi yang selama ini dilaksanakan di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Gunung Mas.

Tujuan kebijakan akuntansi adalah mengatur penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Gunung Mas untuk tujuan umum dalam rangka meningkatkan keterbandingan laporan keuangan terhadap anggaran dan antar periode.

Entitas Akuntansi dan Entitas Pelaporan Keuangan

4. 1. Entitas Akuntansi dan Entitas Pelaporan Keuangan

Informasi keuangan disajikan dalam Laporan Keuangan satuan organisasi di lingkungan pemerintah pusat/daerah atau organisasi lainnya. Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah bahwa satuan organisasi di Pemerintah Daerah wajib menyajikan laporan keuangan sebagai bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan APBD.

Satuan organisasi di Pemerintah Daerah yang berkewajiban menyusun dan menyajikan laporan keuangan disebut dengan entitas. Entitas yang menyusun laporan keuangan terdiri dari 2 (dua) jenis yaitu entitas akuntansi dan entitas pelaporan.

a. **entitas akuntansi** adalah kepala satuan kerja perangkat daerah (SKPD) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Gunung Mas yang mempunyai kewajiban menyusun dan menyajikan laporan keuangan sesuai dengan tanggung jawabnya.

   Laporan keuangan SKPD terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Neraca, Laporan Operasional (LO), Laporan Perubahan Ekuitas (LPE) dan Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) yang selanjutnya disampaikan kepada Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) untuk digabungkan atau dikonsolidasi menjadi Laporan Keuangan Pemerintah Daerah; dan

b. **entitas pelaporan** adalah kepala satuan kerja pengelola keuangan daerah (SKPKD) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Gunung Mas yang merupakan unit Pemerintah Daerah yang terdiri dari satu atau lebih entitas akuntansi yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban berupa laporan keuangan dalam hal ini entitas pelaporan adalah PPKD pada Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Gunung Mas. Laporan keuangan dimaksud terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LP SAL), Neraca, Laporan Operasional (LO), Laporan Perubahan Ekuitas (LPE), Laporan Arus Kas (LAK) dan Catatan aAtas Laporan Keuangan (CaLK).

Penyusunan laporan keuangan ini ditujukan dalam rangka memenuhi pertanggungjawaban atas pengelolaan APBD Kabupaten Gunung Mas Tahun Anggaran 2023 sekaligus merupakan kewajiban Pemerintah Daerah Kabupaten Gunung Mas untuk melaporkan upaya-upaya yang telah dilakukan serta hasil yang dicapai dalam pelaksanaan kegiatan secara sistematis dan terstruktur pada periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2023 untuk memenuhi kepentingan berikut:

a. **Akuntabilitas**
   Mempertanggungjawabkan pengelolaan sumberdaya serta pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepada entitas pelaporan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan secara periodik.
b. **Manajemen**
   Membantu para pengguna untuk mengevaluasi pelaksanaan kegiatan suatu entitas pelaporan dalam periode pelaporan sehingga memudahkan fungsi perencanaan, pengelolaan dan pengendalian atas seluruh aset, kewajiban, dan ekuitas dana pemerintah untuk kepentingan masyarakat.
c. **Transparansi**
   Memberikan informasi keuangan yang terbuka dan jujur kepada masyarakat berdasarkan pertimbangan bahwa masyarakat memiliki hak untuk mengetahui secara terbuka dan menyeluruh atas pertanggungjawaban pemerintah dalam pengelolaan sumberdaya yang dipercayakan kepadanya dan ketaatannya pada peraturan perundang-undangan.
d. **Keseimbangan Antargenerasi (intergenerational equality)**
   Membantu para pengguna dalam mengetahui kecukupan penerimaan pemerintah pada periode pelaporan untuk membiayai seluruh pengeluaran yang dialokasikan dan apakah generasi yang akan datang diasumsikan akan ikut menanggung beban pengeluaran tersebut.

Dasar Hukum Entitas

4. 1. 1. Dasar Hukum Entitas

Kabupaten Gunung Mas dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya, dan Kabupaten Barito Timur di Provinsi Kalimantan Tengah.

Secara administratif maupun geografis, Kabupaten Gunung Mas berbatasan langsung dengan wilayah administratif lain, yaitu sebelah Utara berbatasan dengan Kabupaten Murung Raya dan Kabupaten Sintang Provinsi Kalimantan Barat, sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Kapuas, sebelah Selatan berbatasan dengan dengan Kota Palangka Raya dan Kabupaten Pulang Pisau, dan sebelah Barat berbatasan dengan Kabupaten Katingan dan Kota Palangka Raya.

Sesuai Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah bahwa Bupati Gunung Mas adalah unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dengan tugas antara lain menyusun dan mengajukan rancangan Peraturan Daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah untuk dibahas bersama dengan dilampiri laporan keuangan yang telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun anggaran berakhir.

Laporan keuangan tersebut paling sedikit meliputi laporan realisasi anggaran, laporan perubahan saldo anggaran lebih, neraca, laporan operasional, laporan arus kas, laporan perubahan ekuitas, dan catatan atas laporan keuangan yang dilampiri dengan ikhtisar laporan keuangan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang penyajiannya dilakukan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat dalam Pemerintahan.

Sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah bahwa Bupati Gunung Mas selaku pemegang kekuasaan Pengelolaan Keuangan Daerah melimpahkan sebagian atau seluruh kekuasaannya tersebut berupa pelaporan dan pertanggungjawaban kepada Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Gunung Mas sebagai Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang melaksanakan Pengelolaan Keuangan Daerah.

Proses penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan Pemerintah Daerah dilakukan oleh Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Gunung Mas sebagai entitas pelaporan yang merupakan hasil konsolidasi atas laporan keuangan satuan kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Gunung Mas selaku entitas akuntansi.

Susunan Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Gunung Mas telah beberapa kali mengalami perubahan, terakhir sejak tanggal 15 November 2019 disusun berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Gunung Mas Nomor 7 Tahun 2019 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Gunung Mas yang terdiri dari 2 Sekretariat, 17 Dinas, 1 Inspektorat, 6 Badan, 1 UPTD, 12 Kecamatan, dan 13 Kelurahan. Dengan rincian masing-masing jenis dan nama Perangkat Daerah pada tabel berikut.

Tabel 7.4.1 Satuan Kerja Perangkat Daerah Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Gunung Mas

Jenis Perangkat Daerah	Nama Perangkat Daerah	Lokasi/ Tempat
Sekretariat	1. Sekretariat Daerah	Kuala Kurun
	2. Sekretariat DPRD	Kuala Kurun
Dinas	1. Dinas Kesehatan	Kuala Kurun
	2. Dinas Pekerjaan Umum	Kuala Kurun
	3. Dinas Perikanan dan Ketahan Pangan	Kuala Kurun
	4. Dinas Pertanian	Kuala Kurun
	5. Dinas Lingkungan Hidup, Kehutanan, dan Perhubungan	Kuala Kurun
	6. Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik	Kuala Kurun
	7. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Kuala Kurun
	8. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	Kuala Kurun
	9. Dinas Pendidikan, Kepemudaan, dan Olahraga	Kuala Kurun
	10. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	Kuala Kurun
	11. Dinas Perindustrian dan Perdagangan	Kuala Kurun
	12. Dinas Sosial	Kuala Kurun
	13. Dinas Transmigrasi, Tenaga Kerja, dan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah	Kuala Kurun
	14. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Kuala Kurun
	15. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Kuala Kurun
	16. Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan, dan	Kuala Kurun
	17. Satuan Polisi Pamong Praja	Kuala Kurun
Inspektorat	1. Inspektorat Kabupaten	Kuala Kurun
Badan	1. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	Kuala Kurun
	2. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Penelitian Pengembangan	Kuala Kurun
	3. Badan Keuangan dan Aset Daerah	Kuala Kurun
	4. Badan Pendapatan Daerah	Kuala Kurun
	5. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Kuala Kurun
	6. Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Kuala Kurun
UPTD	1. Rumah Sakit Daerah Kuala Kurun	Kuala Kurun
Kecamatan	1. Kecamatan Rungan Hulu	Tumbang Rahuyan
	2. Kecamatan Rungan	Tumbang Jutuh
	3. Kecamatan Kahayan Hulu Utara	Tumbang Miri
	4. Kecamatan Mihing Raya	Kampuri
	5. Kecamatan Tewah	Tewah
	6. Kecamatan Kurun	Kuala Kurun
	7. Kecamatan Manuhing	Tumbang Talaken
	8. Kecamatan Manuhing Raya	Tehang

	9. Kecamatan Miri Manasa	Tumbang Napoi
	10. Kecamatan Rungan Barat	Rabambang
	11. Kecamatan Sepang	Sepang Simin
	12. Kecamatan Damang Batu	Tumbang Marikoi
Kelurahan	1. Kelurahan Tumbang Rahuyan Kec. Rungan Hulu	Tumbang Rahuyan
	2. Kelurahan Tumbang Jutuh Kec. Rungan	Tumbang Jutuh
	3. Kelurahan Tumbang Miri Kec. Kahayan Hulu Utara	Tumbang Miri
	4. Kelurahan Kampuri Kec. Mihing Raya	Kampuri
	5. Kelurahan Tewah Kec. Tewah	Tewah
	6. Kelurahan Kuala Kurun Kec. Kurun	Kuala Kurun
	7. Kelurahan Tampang Tumbang Anjir Kec. Kurun	Tampang Tbg. Anjir
	8. Kelurahan Tumbang Talaken Kec. Manuhing	Tumbang Talaken
	9. Kelurahan Tehang Kec. Manuhing Raya	Tehang
	10. Kelurahan Tumbang Napoi Kec. Miri Manasa	Tumbang Napoi
	11. Kelurahan Rabambang Kec. Rungan Barat	Rabambang
	12. Kelurahan Sepang Simin Kec. Sepang	Sepang Simin
	13. Kelurahan Tumbang Marikoi Kec. Damang Batu	Tumbang Marikoi

Basis Akuntansi

4. 2. Basis Akuntansi yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan

Dalam menyusun Laporan Keuangan, Pemerintah Kabupaten Gunung Mas mengacu pada 8 (delapan) prinsip, yaitu:

1) Basis Akuntansi

Basis akuntansi yang digunakan dalam laporan keuangan Pemerintah Kabupaten Gunung Mas adalah basis akrual untuk pengakuan pada Neraca, Laporan Operasional (LO), dan Laporan Perubahan Ekuitas (LPE).

Basis akrual adalah pendapatan, beban, dan kewajiban diakui pada saat terjadinya transaksi atau kondisi lingkungan berpengaruh pada keuangan Pemerintah Daerah, bukan pada saat kas diterima/dibayar oleh Kas Daerah.

Basis akrual tercermin pada pendapatan-LO dan beban dalam Laporan Operasional, pengakuan aset, kewajiban, dan ekuitas dana dalam neraca.

Basis akrual mengandung arti bahwa pendapatan diakui pada saat hak untuk memperoleh pendapatan telah terpenuhi walaupun kas belum diterima di Rekening Kas Umum Daerah atau oleh entitas pelaporan dan beban diakui pada saat kewajiban yang mengakibatkan penurunan nilai kekayaan bersih telah terpenuhi walaupun kas belum dikeluarkan dari Rekening Kas Umum Daerah atau entitas pelaporan.

Basis akrual untuk Neraca berarti bahwa aset, kewajiban, dan ekuitas diakui dan dicatat pada saat terjadinya transaksi atau pada saat kejadian atau kondisi lingkungan berpengaruh pada keuangan Pemerintah Daerah tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayar.

Dalam hal anggaran disusun dan dilaksanakan berdasar basis kas, maka Pemerintah Daerah diwajibkan menyusun Laporan Realisasi Anggaran (LRA) disusun berdasarkan basis kas. Artinya bahwa pendapatan dan penerimaan pembiayaan diakui pada saat kas diterima di Rekening Kas Umum Daerah atau oleh entitas pelaporan; demikian pula belanja, transfer, dan pengeluaran pembiayaan diakui pada saat kas dikeluarkan dari Rekening Kas Umum Daerah.

2) **Nilai Historis (*historical cost*)**

Pemerintah Kabupaten Gunung Mas menerapkan nilai historis karena lebih obyektif dan dapat diverifikasi. Dalam hal tidak terdapat nilai historis, dapat digunakan nilai wajar aset atau kewajiban terkait.

Aset Pemerintah Kabupaten Gunung Mas dicatat sebesar pengeluaran kas dan setara kas yang dibayar atau sebesar nilai wajar dari imbalan *(consideration)* untuk memperoleh aset tersebut pada saat perolehan. Kewajiban dicatat sebesar jumlah kas dan setara kas yang diharapkan akan dibayarkan untuk memenuhi kewajiban di masa yang akan datang dalam pelaksanaan kegiatan pemerintah.

3) **Realisasi (*realization*)**

Anggaran pemerintah selama suatu periode akuntansi akan digunakan untuk membayar utang dan belanja dalam periode tersebut. Mengingat Pemerintah Kabupaten Gunung Mas masih diwajibkan menyusun LRA maka pendapatan atau belanja kas diakui setelah diotorisasi melalui anggaran dan telah menambah kas atau mengurangi.

4) **Substansi Mengungguli Bentuk Formal (*substance over form*)**

Penyajian laporan diupayakan dengan wajar yaitu dimana transaksi serta peristiwa lain yang seharusnya disajikan maka transaksi atau peristiwa lain tersebut perlu dicatat dan disajikan sesuai dengan substansi dan realitas ekonomi dan bukan hanya aspek formalitasnya.

Apabila substansi transaksi atau peristiwa lain tidak konsisten/berbeda dengan aspek formalitasnya maka diungkapkan dengan jelas dalam Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK).

5) **Periodisitas (*periodicity*)**

Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Gunung Mas dibagi menjadi periode-periode pelaporan. Periode utama yang digunakan adalah tahunan, triwulanan, dan semesteran. Bulanan untuk laporan pendapatan, triwulan untuk LRA dan penjabarannya, semester untuk LRA, Laporan Operasional (LO), Neraca, Arus Kas yang disusun dan disajikan oleh PPKD. Tahunan untuk LRA, Laporan Operasional (LO), Neraca, Laporan Perubahan Ekuitas (LPE), Laporan Perubahan Sisa Anggaran Lebih (LP SAL), Arus Kas oleh PPKD dan CaLK.

6) Konsistensi (*consistency*)

Konsistensi adalah perlakuan akuntansi yang sama diterapkan pada kejadian yang serupa dari periode ke periode oleh suatu entitas pelaporan (prinsip konsistensi internal).

Hal ini tidak berarti bahwa tidak boleh terjadi perubahan dari satu metode akuntansi ke metode akuntansi yang lain selama dapat memberikan informasi yang lebih baik dibanding metode lama, Pemerintah Kabupaten Gunung Mas pada Tahun 2021 tidak ada perubahan metode akuntansi.

7) Prinsip Pengungkapan Lengkap

Laporan keuangan menyajikan secara lengkap informasi yang dibutuhkan oleh pengguna. Informasi yang dibutuhkan oleh pengguna laporan keuangan dapat ditempatkan pada lembar muka *(on the face)* laporan keuangan maupun Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK).

8) Prinsip Penyajian Wajar

Laporan keuangan menyajikan dengan wajar LRA, Laporan Perubahan Sisa Anggaran Lebih (LP SAL), Neraca, Laporan Operasional (LO), Laporan Perubahan Ekuitas (LPE), Laporan Arus Kas (LAK), dan Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK).

Faktor pertimbangan sehat bagi penyusun laporan keuangan diperlukan ketika menghadapi ketidakpastian peristiwa dan keadaan tertentu. Ketidakpastian seperti itu diakui dengan mengungkapkan hakikat serta tingkatnya dengan menggunakan pertimbangan sehat dalam penyusunan laporan keuangan.

Pertimbangan sehat mengandung unsur kehati-hatian pada saat melakukan prakiraan dalam kondisi ketidakpastian sehingga aset atau pendapatan tidak dinyatakan terlalu tinggi dan kewajiban tidak dinyatakan terlalu rendah.

Namun demikian, penggunaan pertimbangan sehat tidak memperkenankan misalnya pembentukan cadangan tersembunyi sengaja menetapkan aset atau pendapatan yang terlampau rendah atau sengaja mencatat kewajiban atau belanja yang terlampau tinggi sehingga laporan keuangan menjadi tidak netral dan tidak andal.

Basis Pengukuran

4. 3. Basis Pengukuran Yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan

Laporan Keuangan harus menyajikan setiap kegiatan yang diasumsikan dapat dinilai dengan satuan uang, agar memungkinkan dilakukan analisis dan pengukuran dalam akuntansi.

Pengukuran adalah proses penetapan nilai uang untuk mengakui dan memasukkan setiap pos dalam laporan keuangan. Basis pengukuran yang diterapkan Pemerintah Kabupaten Gunung Mas dalam penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan Pemerintah Daerah adalah dengan menggunakan nilai perolehan historis.

Aset dicatat sebesar pengeluaran/penggunaan sumber daya ekonomi atau sebesar nilai wajar dari imbalan yang diberikan untuk memperoleh aset tersebut. Kewajiban dicatat sebesar nilai wajar sumber daya ekonomi yang digunakan pemerintah untuk memenuhi kewajiban yang bersangkutan.

Pengukuran pos-pos laporan keuangan menggunakan mata uang rupiah. Transaksi yang menggunakan mata uang asing ditranslasi terlebih dahulu dan dinyatakan dalam mata uang rupiah.

Proses Penyusunan Laporan Keuangan

4. 3. 1. Proses Penyusunan Laporan Keuangan

Sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah bahwa Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Gunung Mas Tahun 2023 merupakan laporan yang mencakup seluruh aspek keuangan yang dikelola oleh entitas pelaporan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Gunung Mas dalam hal ini adalah PPKD sebagai Bendahara Umum Daerah (BUD) yang dijabat oleh Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Gunung Mas. PPKD menyusun Laporan Keuangan Pemerintah Daerah berdasarkan konsolidasi laporan-laporan keuangan SKPD dan data serta catatan lainnya dari unit-unit yang terkait selaku entitas akuntansi.

Entitas akuntansi yang dicakup dalam Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Gunung Mas Tahun 2023 meliputi 39 (tiga puluh sembilan) SKPD dan Unit SKPD yang berada di lingkungan Pemerintah Kabupaten Gunung Mas yang terdiri dari 2 (dua) Sekretariat, 1 (satu) Inspektorat, 6 (enam) Badan, 16 (enam belas) Dinas, 1 (satu) Satuan, dan 12 (dua belas) Kecamatan serta 1 (satu) Unit SKPD selaku Badan Layanan Umum Daerah (BLUD).

Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah tersebut didasarkan atas data dan informasi yang disediakan oleh PPKD yakni satuan kerja pengelola keuangan daerah yang mempunyai tugas pokok dan fungsi untuk melaksanakan pengelolaan APBD dan seluruh kepala SKPD yang berada di lingkungan Pemerintah Kabupaten Gunung Mas selaku pengguna anggaran.

Penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan ini berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang mencakup Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP) Nomor 1 sampai dengan Nomor 11 dan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

Tahun Anggaran 2023 merupakan tahun ketigabelas bagi SKPD selaku entitas akuntansi menyusun dan menyajikan Laporan Keuangan yang pada hakikatnya merupakan dasar bagi Pemerintah Kabupaten Gunung Mas (dalam hal ini PPKD) untuk menyusun Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Gunung Mas.

Dalam proses penyusunan konsolidasi Laporan Keuangan Pemerintah Daerah tersebut, Bendahara Umum Daerah tetap menyediakan catatan dan dokumen serta informasi lain yang diperlukan dalam proses penyusunan konsolidasi Laporan Keuangan. Proses penyusunan laporan keuangan ini dilakukan melalui proses konsolidasi atau penggabungan keseluruhan laporan keuangan entitas pelaporan dan entitas akuntansi sehingga tersaji sebagai satu entitas tunggal. Penggabungan keseluruhan yang telah disajikan oleh Bendahara Umum Daerah dan laporan keuangan SKPD disertai dengan beberapa penyesuaian *(adjustment)* yang perlu dilakukan maupun penelahaan terhadap buku besar, catatan, dokumen sumber maupun dokumen lainnya yang diperlukan dengan tujuan untuk menjaga keandalan data dan informasi yang disajikan dalam laporan keuangan. Hal ini dilakukan dengan maksud agar penyajian laporan keuangan ini sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) sebagaimana yang dimaksud dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP).

Dalam proses konsolidasi ini juga mempertimbangkan beberapa unsur yang dapat mempengaruhi kewajaran penyajian laporan keuangan, antara lain jenis laporan, basis akuntansi, pengakuan, pengukuran, dan pengungkapan pos-pos laporan keuangan, struktur APBD, klasifikasi anggaran, pelaporan aset, kewajiban, ekuitas, arus kas serta catatan atas laporan keuangan.

Penerapan Kebijakan Akuntansi Berkaitan Dengan Ketentuan Dalam SAP

4. 4. Penerapan Kebijakan Akuntansi Berkaitan Dengan Ketentuan Dalam Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP)

Penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Gunung Mas Tahun 2022 telah mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Kebijakan akuntansi merupakan prinsip-prinsip, dasar-dasar, konvensi-konvensi, aturan-aturan, dan praktik-praktik spesifik yang dipilih oleh suatu entitas pelaporan dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan. Kebijakan akuntansi yang diterapkan dalam laporan keuangan ini adalah merupakan kebijakan yang ditetapkan oleh Pemerintah Kabupaten Gunung Mas. Di samping itu, dalam penyusunannya telah diterapkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan.

Kebijakan-kebijakan akuntansi yang penting yang digunakan dalam penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Gunung Mas Tahun 2023 pada akun pendapatan, belanja, beban, pembiayaan, aset, kewajiban, dan ekuitas adalah sebagai berikut:

Pendapatan-LRA

4. 4. 1. Pendapatan-LRA

Pendapatan-LRA adalah semua penerimaan Rekening Kas Umum Daerah yang menambah Saldo Anggaran Lebih dalam tahun anggaran 2023 yang menjadi hak Pemerintah Kabupaten Gunung Mas dan tidak perlu dibayar kembali.

a. Pendapatan-LRA diakui pada saat:
   1) Kas atas pendapatan telah diterima pada Rekening Kas Umum Daerah.
   2) Kas atas pendapatan telah diterima oleh bendahara penerimaan dan hingga tanggal pelaporan belum disetorkan ke Rekening Kas Umum Daerah, dengan ketentuan bahwa bendahara tersebut merupakan bagian dari Bendahara Umum Daerah.
   3) Kas atas pendapatan telah diterima oleh entitas atau satuan kerja Perangkat Daerah dan digunakan langsung tanpa disetor ke Rekening Kas Umum Daerah, dengan syarat entitas penerima kas atas pendapatan tersebut wajib melaporkan penggunaannya kepada Bendahara Umum Daerah.
   4) Kas atas pendapatan telah diterima oleh entitas lain di luar entitas Pemerintah Kabupaten Gunung Mas berdasarkan otoritas yang diberikan oleh Bendahara Umum Daerah dan Bendahara Umum Daerah mengakuinya sebagai pendapatan.
b. pengembalian yang sifatnya normal dan berulang *(recurring)* atas penerimaan Pendapatan-LRA pada periode penerimaan maupun pada periode sebelumnya dibukukan sebagai pengurang Pendapatan-LRA.
c. koreksi dan pengembalian yang sifatnya tidak berulang *(non-recurring)* atas penerimaan Pendapatan-LRA yang terjadi pada periode penerimaan Pendapatan-LRA dibukukan sebagai pengurang Pendapatan-LRA pada periode yang sama.
d. koreksi dan pengembalian yang sifatnya tidak berulang *(non-recurring)* atas penerimaan Pendapatan-LRA yang terjadi pada periode sebelumnya dibukukan sebagai pengurang ekuitas pada akun SiLPA pada periode ditemukannya koreksi dan pengembalian tersebut.
e. akuntansi Pendapatan-LRA dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto dan tidak mencatat jumlah nettonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
f. Pendapatan-LRA disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.

Belanja

4. 4. 2. Belanja

Belanja adalah semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Daerah yang mengurangi Saldo Anggaran Lebih dalam tahun anggaran 2023 yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh Pemerintah Kabupaten Gunung Mas.

a. Belanja diakui pada saat:
   1) terjadinya pengeluaran dari Rekening Kas Umum Daerah.

2) khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran pengakuannya terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh unit yang mempunyai fungsi perbendaharaan dengan terbitnya Surat Perintah Pencairan Dana Ganti Uang (SP2D GU) atau SP2D Nihil.
3) dalam hal badan layanan umum, belanja diakui dengan mengacu pada peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai badan layanan umum.

b. Belanja disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi akan diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

Pembiayaan

4. 4. 3. Pembiayaan

Pembiayaan *(financing)* adalah seluruh transaksi keuangan Pemerintah Kabupaten Gunung Mas baik penerimaan pembiayaan maupun pengeluaran pembiayaan yang perlu dibayar atau akan diterima kembali baik pada tahun anggaran bersangkutan maupun tahun-tahun anggaran berikutnya yang dalam penganggaran Pemerintah Kabupaten Gunung Mas terutama dimaksudkan untuk menutup defisit atau memanfaatkan surplus anggaran.

Pembiayaan diklasifikasikan menjadi Penerimaan Pembiayaan dan Pengeluaran Pembiayaan.

Pembiayaan Netto adalah selisih antara Penerimaan Pembiayaan setelah dikurangi Pengeluaran Pembiayaan dalam periode tahun anggaran tertentu. Selisih lebih atau kurang antara Penerimaan Pembiayaan dan Pengeluaran Pembiayaan selama satu periode pelaporan dicatat dalam pos Pembiayaan Netto.

Sisa Lebih atau Kurang Pembiayaan Anggaran (SiLPA atau SiKPA) adalah selisih lebih atau kurang antara realisasi Pendapatan-LRA dan Belanja, serta Penerimaan Pembiayaan dan Pengeluaran Pembiayaan dalam APBD selama satu periode pelaporan dicatat dalam Pos SiLPA atau SiKPA.

Penerimaan Pembiayaan

4. 4. 3. 1. Penerimaan Pembiayaan

Penerimaan Pembiayaan adalah semua penerimaan rekening Kas Umum Daerah yang berasal dari penerimaan pinjaman, penjualan obligasi Pemerintah Kabupaten Gunung Mas, hasil privatisasi perusahaan daerah, penerimaan kembali pinjaman yang diberikan kepada entitas lain, penjualan investasi permanen lainnya, dan pencairan dana cadangan.

a. Penerimaan Pembiayaan diakui pada saat diterima pada Rekening Kas Umum Daerah.
b. akuntansi Penerimaan Pembiayaan dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto dan tidak mencatat jumlah nettonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
c. Penerimaan Pembiayaan disajikan menurut klasifikasi sumber Penerimaan Pembiayaan.

Pengeluaran Pembiayaan

4. 4. 3. 2. Pengeluaran Pembiayaan

Pengeluaran Pembiayaan adalah semua pengeluaran-pengeluaran Rekening Kas Umum Daerah antara lain pemberian pinjaman kepada entitas lain, penyertaan modal Pemerintah Kabupaten Gunung Mas, pembayaran kembali pokok pinjaman dalam periode tahun anggaran tertentu, dan pembentukan dana cadangan.

a. Pengeluaran Pembiayaan diakui pada saat terjadinya pengeluaran dari Rekening Kas Umum Daerah.
b. akuntansi Pengeluaran Pembiayaan dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan pengeluaran bruto dan tidak mencatat jumlah nettonya.
c. Pengeluaran Pembiayaan disajikan menurut klasifikasi sumber Pengeluaran Pembiayaan.

Pendapatan-LO

4. 4. 4. Pendapatan-LO

Pendapatan-LO adalah hak Pemerintah Kabupaten Gunung Mas yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam tahun anggaran 2023 dan tidak perlu dibayar kembali. Pengkajian atas keterukuran dan ketersediaan yang melekat dalam arus manfaat ekonomi masa depan dilakukan atas dasar bukti yang dapat diperoleh pada saat penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Derah Kabupaten Gunung Mas.

a. Pendapatan-LO diakui pada saat:
    1) Timbulnya hak atas pendapatan *(earned)* diartikan bahwa pendapatan yang diperoleh berdasarkan peraturan perundang-undangan dan sebagai imbalan atas suatu pelayanan yang telah selesai diberikan dan diakui pada saat timbulnya hak untuk menagih, misalnya hak untuk menagih pendapatan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
    2) Pendapatan direalisasikan, yaitu adanya aliran masuk sumber daya ekonomi yang diartikan bahwa hak yang telah diterima oleh Pemerintah Kabupaten Gunung Mas tanpa terlebih dahulu adanya penagihan.
    3) Pemerintah Kabupaten Gunung Mas menerima kas yang berasal dari pendapatan.
    4) Dalam hal badan layanan umum, pendapatan diakui dengan mengacu pada peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai badan layanan umum.
b. Pendapatan-LO diakui sebelum penerimaan kas dilakukan apabila terjadi perbedaan waktu yang signifikan (1 bulan/akhir bulan) antara penetapan hak pendapatan daerah dan penerimaan kas daerah, dimana penetapan hak pendapatan dilakukan lebih dahulu, maka Pendapatan-LO diakui pada saat terbit dokumen penetapan walaupun kas belum diterima. Atau hingga akhir tahun belum dilakukan pembayaran oleh pihak ketiga atau belum diterima oleh pemerintah daerah. Hal ini merupakan tagihan (piutang) bagi pemerintah daerah dan utang bagi wajib bayar atau pihak yang menerbitkan keputusan/peraturan.

c. Pendapatan-LO diakui setelah penerimaan kas dimana apabila dalam hal proses transaksi pendapatan daerah terjadi perbedaan antara jumlah kas yang diterima dibandingkan barang/jasa yang belum seluruhnya diserahkan oleh Pemerintah Kabupaten Gunung Mas kepada pihak lain atau kas telah diterima terlebih dahulu atas Pendapatan-LO yang telah diakui saat kas diterima di muka.
d. akuntansi Pendapatan-LO dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto dan tidak mencatat jumlah nettonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
e. Pendapatan-LO disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.

Beban

4. 4. 5. Beban

Beban adalah penurunan manfaat ekonomis atau potensi jasa dalam periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2023 yang menurunkan ekuitas yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban.

a. Beban diakui pada saat:
   1)1Timbulnya kewajiban dimaksudkan adalah beban diakui pada saat terjadinya peralihan hak dari pihak lain ke pemerintah tanpa diikuti keluarnya kas dari Kas Umum Daerah. Contohnya tagihan rekening telepon dan rekening listrik yang sudah ada tagihannya belum dibayar pemerintah dapat diakui sebagai beban.
   2) Terjadinya konsumsi aset dimaksudkan adalah saat pengeluaran kas kepada pihak lain yang tidak didahului timbulnya kewajiban dan/atau konsumsi aset nonkas dalam kegiatan operasional pemerintah daerah.
   3) Terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dimaksudkan adalah terjadi pada saat penurunan nilai aset sehubungan dengan penggunaan aset bersangkutan atau berlalunya waktu. Contoh adalah penyusutan atau amortisasi.
   4) Sebelum pengeluaran kas dilakukan apabila dalam hal proses transaksi pengeluaran daerah terjadi perbedaan waktu antara pengakuan beban dan pengeluaran kas, dimana pengakuan beban daerah dilakukan lebih dahulu, maka kebijakan akuntansi untuk pengakuan beban dapat dilakukan pada saat terbit dokumen penetapan/pengakuan beban/kewajiban walaupun kas belum dikeluarkan.

5) Setelah pengeluaran kas dilakukan apabila dalam hal proses transaksi pengeluaran daerah terjadi perbedaan waktu antara pengeluaran kas dan pengakuan beban, dimana pengakuan beban daerah dilakukan setelah pengeluaran kas, maka perlakuan akuntansi pengakuan beban dapat dilakukan pada saat barang atau jasa dimanfaatkan walaupun kas sudah dikeluarkan. Pada saat pengeluaran kas mendahului dari saat barang atau jasa dimanfaatkan, pengeluaran tersebut belum diakui sebagai beban. Pengeluaran kas tersebut diklasifikasikan sebagai Beban Dibayar di Muka (akun neraca), Aset Tetap, dan Aset Lainnya.
6) Dalam hal badan layanan umum, beban diakui dengan mengacu pada peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai badan layanan umum.

b. Beban diukur sesuai dengan harga perolehan atau taksiran nilai wajar pada tanggal transaksi atas barang/jasa atau nilai nominal atas kewajiban beban yang timbul, konsumsi aset, dan penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa.
c. Beban disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

Aset

4. 4. 6. Aset

Aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh Pemerintah Kabupaten Gunung Mas sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi dan/atau sosial di masa depan diharapkan dapat diperoleh oleh Pemerintah Kabupaten Gunung Mas serta dapat diukur dalam satuan uang termasuk sumber daya nonkeuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber daya lainnya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya.

Aset pada Pemerintah Kabupaten Gunung Mas dalam periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2023 disajikan ke dalam klasifikasi Aset Lancar, Investasi Jangka Panjang, Aset Tetap, Dana Cadangan, dan Aset Lainnya.

Aset Lancar

4. 4. 6. 1. Aset Lancar

Aset lancar meliputi kas dan setara kas, investasi jangka pendek, piutang, dan persediaan. Pos-pos investasi jangka pendek antara lain deposito berjangka 3 sampai 12 bulan dan surat berharga yang mudah diperjualbelikan.

Persediaan mencakup barang atau perlengkapan yang dibeli dan disimpan untuk digunakan misalnya barang pakai habis seperti alat tulis kantor, barang tak habis pakai seperti komponen peralatan dan pipa, dan barang bekas pakai seperti komponen bekas.

Kas

4. 4. 6. 1. 1. Kas

Kas adalah uang tunai dan saldo simpanan di bank yang setiap saat dapat digunakan untuk membiayai kegiatan pemerintahan yang sangat likuid yang siap dijabarkan/dicairkan menjadi kas serta bebas dari risiko perubahan nilai yang signifikan.

Kas meliputi pula uang yang harus dipertanggungjawabkan (UYHD) yang wajib dipertangungjawabkan dan dilaporkan dalam Neraca.

a. Kas dicatat sebesar nilai nominal dalam nilai rupiah. Kas dalam bentuk valuta asing dikonversi menjadi nilai rupiah menggunakan kurs tengah Bank Indonesia pada tanggal Neraca.
b. Saldo Kas disajikan dalam Neraca dan Laporan Arus Kas.

Setara kas

4. 4. 6. 1. 2. Setara kas

Setara kas adalah investasi jangka pendek yang sangat likuid yang siap dijabarkan menjadi kas serta bebas dari risiko perubahan nilai yang signifikan. Suatu investasi disebut setara kas apabila investasi tersebut mempunyai masa jatuh tempo kurang dari 3 (tiga) bulan dari tanggal perolehan.

a. Setara Kas dicatat sebesar nilai nominal dalam nilai rupiah. Kas dalam bentuk valuta asing dikonversi menjadi nilai rupiah menggunakan kurs tengah Bank Indonesia pada tanggal Neraca.
b. Setara Kas disajikan dalam Neraca dan Laporan Arus Kas.
c. Investasi Jangka Pendek dalam bentuk surat berharga disajikan sebesar nilai perolehan sedangkan investasi dalam bentuk deposito dicatat sebesar nilai nominal.

Piutang

4. 4. 6. 1. 3. Piutang

Piutang adalah jumlah uang yang wajib dibayar kepada pemerintah daerah dan atau hak pemerintah daerah yang dapat dinilai dengan uang sebagai akibat perjanjian atau akibat lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan atau akibat lainnya yang sah.

Penyisihan piutang tak tertagih adalah taksiran nilai piutang yang kemungkinan tidak dapat diterima pembayarannya di masa akan datang dari seseorang dan/atau korporasi dan/atau entitas lain.

Penilaian kualitas piutang untuk penyisihan piutang tak tertagih dihitung berdasarkan kualitas umur piutang, jenis/karakteristik piutang, dan diterapkan dengan modifikasi tertentu tergantung kondisi dari debiturnya.

a. Piutang diakui pada saat penyusunan laporan laporan keuangan ketika timbul klaim/hak untuk menagih uang atau manfaat ekonomi lainnya kepada entitas apabila menenuhi kriteria sebagai berikut:
   1) Terdapat surat keterangan/dokumen yang sah yang belum dilunasi; dan
   2) Terdapat surat penagihan dan telah dilaksanakan penagihan dan belum dilunasi.

b. Piutang transfer adalah hak suatu entitas pelaporan untuk menerima pembayaran dari entitas pelaporan lain sebagai akibat peraturan perundang-undangan. Pengakuan piutang transfer diakui berdasarkan alokasi defenitif yang telah ditetapkan sesuai dengan dokumen penetapan yang sah menurut ketentuan yang berlaku sebesar hak daerah yang belum dibayarkan.

c. Piutang yang timbul dari Tuntutan Perbendaharaan/ Tuntutan Ganti Rugi apabila telah timbul hak yang didukung dengan Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak dan/atau telah dikeluarkannya surat keputusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.
   1) Piutang disajikan dalam neraca pada nilai yang dapat direalisasikan *(net realizable value)* yaitu selisih antara nilai nominal piutang dengan penyisihan piutang.
   2) Piutang diklasifikasikan menurut Bagan Akun Standar (BAS).
   3) Penyisihan Piutang Tak Tertagih dilakukan saat piutang telah melebihi jatuh tempo yang dinilai menurut kualitas penyisihan/cadangan kerugian piutang dengan besaran persentase sesuai dengan umur piutang tertentu sesuai dengan persentase cadangan penyisihan piutang. Penggolongan kualitas piutang ditentukan berdasarkan jatuh tempo dan upaya penagihan yang dilakukan pemerintah dengan kriteria:

Tabel 7.4.2 Penggolongan Kualitas Piutang

Kualitas Piutang	Kriteria	Penyisihan/ Taksiran Piutang Tak Tertagih
Lancar	Belum jatuh tempo.	0%
Kurang Lancar	1) Umur piutang s.d. 1 tahun/ 12 bulan. 2) Khusus retribusi, 1 bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Pertama tidak dilakukan pelunasan.	10%
Diragukan	1) Umur piutang lebih dari 1 tahun/ 12 bulan s.d. 3 tahun/ 36 bulan. 2) Khusus retribusi, 1 bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Kedua tidak dilakukan pelunasan	50%
Macet	1) Umur piutang di atas atau melebihi 3 tahun/ 36 bulan. 2) Khusus retribusi, 1 bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Ketiga tidak dilakukan pelunasan.	100%

d. Pengukuran piutang Tuntutan Perbendaharaan/ Tuntutan Ganti Rugi berdasarkan pengakuan sesuai dokumen pembebanan yang mempunyai kekuatan hukum tetap dilakukan dengan ketentuan:
   1) Disajikan sebagai Aset Lancar sebesar nilai yang jatuh tempo dalam tahun berjalan dan yang akan ditagih dalam 1 tahun/ 12 bulan ke depan; dan
   2) Disajikan sebagai Aset Lainnya terhadap nilai yang akan dilunasi di atas 1 tahun/ 12 bulan.

Persediaan

4. 4. 6. 1. 4. Persediaan

Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional Pemerintah Kabupaten Gunung Mas dan barang-barang yang dimaksudkan untuk dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.

a. Persediaan diakui pada saat:
   1) Potensi manfaat ekonomi masa depan diperoleh pemerintah daerah dan mempunyai nilai atau biaya yang dapat diukur dengan andal.
   2) Diterima atau hak kepemilikannya dan/atau penguasaannya berpindah.
b. Pengakuan nilai Persediaan pada akhir periode akuntansi dilakukan berdasarkan hasil inventarisasi fisik.
c. Pencatatan nilai Persediaan dilakukan secara periodik, maka pengukuran Persediaan pada saat periode penyusunan laporan keuangan dilakukan berdasarkan hasil inventarisasi dengan menggunakan harga perolehan terakhir apabila diperoleh dengan pembelian atau harga pokok produksi terakhir apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri atau atas nilai wajar.

Aset Nonlancar

4. 4. 6. 2. Aset Nonlancar

Aset nonlancar mencakup aset yang bersifat jangka panjang, dan aset tak berwujud yang digunakan baik langsung maupun tidak langsung untuk kegiatan pemerintah atau yang digunakan masyarakat umum. Aset nonlancar diklasifikasikan menjadi investasi jangka panjang, aset tetap, dana cadangan, dan aset lainnya.

Investasi Jangka Panjang

4. 4. 6. 2. 1. Investasi Jangka Panjang

Investasi Jangka Panjang adalah investasi yang dimaksudkan untuk dimiliki dan mendapatkan manfaat ekonomi serta manfaat sosial dalam jangka waktu selama lebih dari 12 bulan. Investasi jangka panjang terdiri dari investasi nonpermanen dan investasi permanen.

Investasi nonpermanen adalah investasi jangka panjang yang dimaksudkan untuk dimiliki secara tidak berkelanjutan atau suatu waktu akan dijual atau ditarik kembali misalkan antara lain berupa investasi dalam Surat Utang Negara, penyertaan modal dalam proyek pembangunan, dan investasi nonpermanen lainnya.

Investasi permanen adalah investasi jangka panjang yang dimaksudkan untuk dimiliki secara berkelanjutan atau tanpa ada niat untuk diperjualbelikan atau ditarik kembali. Yang termasuk dalam investasi permanen di Pemerintah Kabupaten Gunung Mas adalah penyertaan modal kepada perusahaan, yaitu Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Tirta Bahalap, Perusahaan Daerah Gunung Mas Perkasa, PT Bank Pembangunan Kalimantan Tengah, dan PT Penjaminan Kredit Daerah Kalimantan Tengah (PT JAMKRIDA KALTENG).

a. Investasi Jangka Panjang dicatat sebesar nilai nominal dalam nilai rupiah. Investasi Jangka Panjang dalam bentuk valuta asing dikonversi menjadi nilai rupiah menggunakan kurs tengah Bank Indonesia pada tanggal Neraca.
b. Investasi Jangka Panjang disajikan dalam Neraca dan Laporan Arus Kas.
c. Investasi Jangka Panjang dalam bentuk surat berharga disajikan sebesar nilai perolehan sedangkan investasi dalam bentuk deposito dicatat sebesar nilai nominal biaya atau nilai wajar perolehannya.

Aset Tetap

4. 4. 6. 2. 2. Aset Tetap

Aset tetap adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 bulan untuk digunakan dalam kegiatan Pemerintah Kabupaten Gunung Mas atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum. Aset Tetap diklasifikasikan berdasarkan kesamaaan dalam sifat atau fungsinya dalam aktivitas operasi entitas. Aset Tetap meliputi tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi, dan jaringan, aset tetap lainnya, dan konstruksi dalam pengerjaan.

a. nilai Aset Tetap disajikan berdasarkan harga perolehan atau harga wajar.
b. pengakuan Aset Tetap didasarkan pada batasan nilai satuan minimal kapitalisasi sebagai berikut:
    1) Nilai satuan minimal kapitalisasi aset tetap untuk per satuan peralatan dan mesin dan aset tetap lainnya adalah nilai per unitnya sebesar Rp500.000,00 ke atas;
    2) Nilai satuan minimal kapitalisasi Aset Tetap dikecualikan terhadap pengeluaran untuk tanah, jalan/irigasi/jaringan dan aset tetap lainnya berupa koleksi perpustakaan dan barang bercorak kesenian, peralatan untuk proses belajar mengajar atau dengan kata lain setiap penambahan Rp1,00 (satu rupiah) terhadap Aset Tetap sebagaimana tersebut di atas akan dilakukan kapitalisasi;
    3) Nilai satuan minimal kapitalisasi untuk pemeliharaan gedung dan bangunan sama dengan atau melebihi dari Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);
    4) Nilai satuan minimal kapitalisasi untuk pemeliharaan jalan dan normalisasi sungai sama dengan atau melebihi dari Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
    5) Nilai satuan minimal kapitalisasi Aset Tetap atas perolehan aset tetap konstruksi sebesar Rp10.000.000,00 ke atas.
c. Kontruksi Dalam Pengerjaan mencakup Aset Tetap yang sedang dalam proses pembangunan yang pada tanggal neraca belum selesai dibangun seluruhnya.

    Konstruksi dalam pengerjaan mencakup tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan, dan aset tetap lainnya yang proses perolehannya dan/atau pembangunannya membutuhkan suatu periode waktu tertentu dan belum selesai. Perolehan melalui kontrak konstruksi pada umumnya memerlukan suatu periode tertentu.

d. suatu aset berwujud harus diakui sebagai Konstruksi Dalam Pengerjaan pada saat penyusunan laporan keuangan dengan kriteria:
   1) Besar kemungkinan bahwa manfaat ekonomi masa yang akan datang berkaitan dengan aset tersebut akan diperoleh;
   2) Biaya perolehan tersebut dapat diukur secara andal; dan
   3) Aset tersebut masih dalam proses pengerjaan.
e. Aset Tetap yang tidak digunakan untuk keperluan operasional pemerintah tidak memenuhi definisi Aset Tetap dan harus disajikan di pos Aset Lainnya sesuai dengan nilai tercatatnya.
f. pengakuan aset dari belanja modal terhadap pengadaan barang modal pada tahun berjalan karena penyerahannya rata-rata pada bulan akhir periode tahun pelaporan maka tahun berjalan tidak dilakukan penyusutan. Terhadap aset tersebut baru dilakukan proses penyusutan mulai awal tahun berikutnya dengan menggunakan metode garis lurus.
g. terhadap Konstruksi Dalam Pengerjaan terdapat kegiatan Feasibility Study (FS) dan Detail Engineering Design (DED) merupakan bagian dari aset Konstruksi Dalam Pengerjaan dari Aset Tetap yang bersangkutan sehingga belum diperhitungkan beban penyusutannya. Sedangkan pada saat aset Konstruksi Dalam Pengerjaan tersebut dinyatakan selesai 100% dan telah dikapitalisasi ke dalam jenis Aset Tetap maka FS dan DED yang bersangkutan melekat dan menambah biaya perolehan Aset Tetap dimaksud sebesar nilai FS dan DED.
h. komponen biaya perolehan Aset Tetap menurut jenisnya diuraikan sebagai berikut:
   1) Tanah dengan biaya perolehan berupa harga perolehan atau biaya pembebasan tanah, biaya yang dikeluarkan dalam rangka memperoleh hak, biaya pematangan, pengukuran, penimbunan.
   2) Peralatan dan mesin dengan biaya perolehan berupa pembelian, biaya pengangkutan, dan biaya instalasi serta biaya langsung lainnya untuk memperoleh dan mempersiapkan sampai peralatan dan mesin tersebut siap digunakan.
   3) Gedung dan bangunan dengan biaya perolehan berupa haraga pembelian atau biaya konstruksi, termasuk biaya pengurusan izin mendirikan bangunan, notaris, dan pajak.
   4) Jalan, irigasi, dan jaringan dengan biaya perolehan berupa biaya perolehan atau biaya konstruksi dan biaya-biaya lain yang dikeluarkan sampai dengan jalan, irigasi, dan jaringan tersebut siap pakai.
   5) Aset tetap lainnya dengan biaya perolehan berupa seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh aset tersebut sampai dengan siap pakai.

Biaya perolehan Aset Tetap Lainnya yang diperoleh melalui kontrak meliputi pengeluaran nilai kontrak, biaya perencanaan dan pengawasan, pajak serta biaya perizinan. Biaya perolehan Aset Tetap Lainnya yang diadakan melalui swakelola misalnya untuk Aset Tetap renovasi berupa biaya langsung dan biaya tidak langsung yang terdiri dari biaya bahan baku, tenaga kerja, sewa peralatan, biaya perencanaan dan pengawasan, biaya perizinan, pajak, dan jasa konsultan.

Dana Cadangan

4. 4. 6. 2. 3. Dana Cadangan

Dana Cadangan adalah dana yang disisihkan untuk menampung kebutuhan yang memerlukan dana relatif besar yang tidak dapat dipenuhi dalam satu tahun anggaran. Dana cadangan dirinci menurut tujuan pembentukannya.

a. pembentukan dana cadangan harus berdasarkan peraturan daerah tentang pembentukan dana cadangan.
b. dana cadangan diakui pada saat terbit Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) atau dokumen pemindahbukuan atau sejenisnya atas dana cadangan yang dikeluarkan oleh Bendahara Umum Daerah atau Kuasa Bendahara Umum Daerah atas persetujuan Pejabat Penglola Keuangan Daerah.
c. pencairan dana cadangan mengurangi dana cadangan yang bersangkutan.
d. hasil-hasil yang diperoleh dari pengelolaan dana cadangan merupakan penambah dana cadangan.
e. pembentukan dana cadangan disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran sebagai Pengeluaran Pembiayaan dan disajikan dalam Laporan Arus Kas dalam kelompok arus keluar kas dari aktivitas investasi.
f. pencairan dana cadangan disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran sebagai Penerimaan Pembiayaan dan disajikan dalam Laporan Arus Kas dalam kelompok arus masuk kas dari aktivitas investasi.
g. hasil pengelolaan dana cadangan dicatat dalam Lain-lain Penerimaan Asli Daerah yang Sah sebagai Pendapatan-LO.

Aset Lainnya

4. 4. 6. 2. 4. Aset Lainnya

Aset Lainnya merupakan aset pemerintah daerah yang tidak dapat diklasifikasikan sebagai aset lancar, investasi jangka panjang, aset tetap, dan dana cadangan. Termasuk dalam Aset Lainnya adalah aset tak berwujud, tagihan penjualan angsuran yang jatuh tempo lebih dari 12 (dua belas) bulan, tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi, aset kerja sama dengan fihak ketiga (kemitraan), kas yang dibatasi penggunaannya, dan aset lain-lain.

Aset Tidak Berwujud adalah aset tetap yang secara fisik tidak dapat dinyatakan atau tidak mempunyai wujud fisik serta dimiliki untuk digunakan dalam menghasilkan barang atau jasa atau digunakan untuk tujuan lainnya termasuk hak atas kekayaan intelektual. Contohnya adalah hak paten, hak cipta, hak merek, dan biaya riset serta pengembangan.

Aset Lain-lain yaitu Aset Tetap yang dihentikan dari penggunaan aktif pemerintah daerah karena hilang atau rusak berat sehingga tidak dapat dimanfaatkan lagi tetapi belum dihapuskan atau aset tetap yang dipinjam pakai kepada unit pemerintah lain atau aset yang telah diserahkan ke pihak lain tetapi belum ada dokumen hibah atau serah terima atau dokumen sejenisnya.

a. Aset lainnya diakui pada saat:
   1) Potensi manfaat ekonomi masa depan diperoleh oleh pemerintah daerah dan mempunyai nilai atau biaya yang dapat diukur dengan andal; dan
   2) Diterima atau kepemilikannata dan/atau penguasaannya berpindah.
b. Aset Tak Berwujud disajikan sebesar nilai tercatat neto yaitu sebesar harga perolehan setelah dikurangi akumulasi amortisasi.
c. perhitungan amortisasi Aset Tak Berwujud dilakukan dengan metode garis lurus dengan masa manfaat selama 3 tahun kecuali warisan budaya.
d. tagihan penjualan angsuran dinilai sebesar nilai nominal dari kontrak atau berita acara penjualan aset yang berkenaan setelah dikurangi dengan angsuran yang telah dibayarkan oleh pegawai atau pihak ketiga ke Kas Umum Daerah atau berdasarkan daftar saldo tagihan penjualan angsuran.
e. Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi dinilai sebesar nilai nominal dalam surat keputusan pembebanan atau surat keterangan tanggung jawab mutlak setelah dikurangi dengan setoran yang telah dibayarkan oleh bendahara atau pegawai bukan bendahara atau pihak ketiga yang bersangkutan ke Kas Umum Daerah.
f. Aset Lain-lain berupa Aset Tetap pemerintah disajikan sebesar nilai buku yaitu harga perolehan dikurangi akumulasi penyusutan.

Penyusutan Aset Tetap

4. 4. 6. 3. Penyusutan Aset Tetap

Aset yang digunakan pemerintah, kecuali beberapa jenis aset tertentu seperti tanah, mempunyai masa manfaat dan kapasitas yang terbatas. Seiring dengan penurunan kapasitas dan manfaat dari suatu aset dilakukan penyesuaian nilai.

Penyusutan adalah alokasi yang sistematis atas nilai suatu aset tetap yang dapat disusutkan *(depreciable assets)* selama masa manfaat aset yang bersangkutan. (PSAP 07 Paragraf 4)

Akumulasi Penyusutan *(accumulated despresiation)* adalah bagian dari biaya perolehan aktiva tetap yang dialokasikan ke penyusutan sejak aktiva tersebut diperoleh. Akumulasi Penyusutan aktiva tetap merupakan akun kontra aktiva tetap yang berhubungan.

a. Penyusutan Aset Tetap adalah penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat dari suatu Aset Tetap.

b. Penyusutan Aset Tetap diakui dengan nilai penyusutan untuk masing-masing periode dan diakui sebagai pengurang nilai tercatat aset tetap dalam Neraca dan beban penyusutan dalam Laporan Operasional.
c. Penyusutan Aset Tetap tidak dilakukan terhadap:
   1) Tanah;
   2) Konstruksi dalam Pengerjaan (KDP); dan
   3) Buku-buku perpustakaan;
   4) Hewan;
   5) Ternak;
   6) Tanaman; dan
   7) Aset Tetap yang dinyatakan hilang berdasarkan dokumen sumber sah atau dalam kondisi rusak berat dan/atau usang yang telah diusulkan kepada Pengelola Barang untuk dilakukan penghapusan.
d. untuk Penyusutan Atas Aset Tetap renovasi dilakukan sesuai dengan umur ekonomis mana yang lebih pendek *(which ever is shorter)* dengan membandingkan antara masa manfaat aset dengan masa pinjaman/sewa.
e. perhitungan dan pencatatan Penyusutan Aset Tetap dilakukan setiap akhir semester.
f. Penyusutan Aset Tetap dilakukan dengan menggunakan metode garis lurus *(straight line method)* yaitu dengan mengalokasikan atau menetapkan nilai tarif penyusutan untuk masing-masing periode dengan jumlah yang sama selama masa manfaat. Metode garis lurus *(straight line method)* adalah metode penyusutan dengan besarnya penyusutan selalu sama dari tiap periode akuntansi selama umur ekonomis dari Aset Tetap yang bersangkutan dengan rumusan:

$$\text{Penyusutan per periode} = \frac{\text{Nilai Perolehan / Penilaian}}{\text{Masa Manfaat}}$$

g. masa manfaat Aset Tetap Pemerintah Kabupaten Gunung Mas dapat digambarkan dalam tabel di bawah ini:

Tabel 7.4.3 Masa Manfaat Aset Tetap

Kode Barang	Uraian	Masa Manfaat (Tahun)
01.	**ASET**	
01.03.	**ASET TETAP**	
01.03.02.	**PERALATAN DAN MESIN**	
01.03.02.01.	**Alat Besar**	
01.03.02.01.01.	Alat Besar Darat	10
01.03.02.01.02.	Alat Besar Apung	8
01.03.02.01.03.	Alat Bantu	7
01.03.02.02.	**Alat Angkutan**	
01.03.02.02.01.	Alat Angkutan Darat Bermotor	7
01.03.02.02.02.	Alat Angkutan Darat Tak Bermotor	2
01.03.02.02.03.	Alat Angkutan Apung Bermotor	10
01.03.02.02.04.	Alat Angkutan Apung Tak Bermotor	3
01.03.02.02.05.	Alat Angkutan Bermotor Udara	20
01.03.02.03.	**Alat Bengkel dan Alat Ukur**	

01.03.02.03.01.	Alat Bengkel Bermesin	10
01.03.02.03.02.	Alat Bengkel Tak Bermesin	5
01.03.02.03.03.	Alat Ukur	5
01.03.02.04.	**Alat Pertanian**	
01.03.02.04.01.	Alat Pengolahan	4
01.03.02.05.	**Alat Kantor dan Rumah Tangga**	
01.03.02.05.01.	Alat Kantor	4
01.03.02.05.02.	Alat Rumah Tangga	4
01.03.02.05.03.	Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat	4
01.03.02.06.	**Alat Studio, Komunikasi dan Pemancar**	
01.03.02.06.01.	Alat Studio	5
01.03.02.06.02.	Alat Komunikasi	5
01.03.02.06.03.	Peralatan Pemancar	10
01.03.02.07.	**Alat Kedokteran dan Kesehatan**	
01.03.02.07.01.	Alat Kedokteran	5
01.03.02.07.02.	Alat Kesehatan Umum	5
01.03.02.08.	**Alat Laboratorium**	
01.03.02.08.01.	Unit Alat Laboratorium	8
01.03.02.08.02.	Unit Alat Laboratorium Kimia Nuklir	15
01.03.02.08.03.	Alat Peraga Praktek Sekolah	3
01.03.02.08.04.	Alat Laboratorium Fisika Nuklir/Elektronika	15
01.03.02.08.05.	Alat Proteksi Radiasi/Proteksi Lingkungan	10
01.03.02.08.06.	Radiation Application and Non Destructive Testing	10
01.03.02.08.07.	Alat Laboratorium Lingkungan Hidup	7
01.03.02.08.08.	Peralatan Laboratorium Hydrodinamica	15
01.03.02.08.09.	Alat Laboratorium Standarisasi Kalibrasi dan Instru	8
01.03.02.09.	**Alat Persenjataan**	
01.03.02.09.01.	Senjata Api	10
01.03.02.09.02.	Persenjataan Non Senjata Api	3
01.03.02.09.03.	Senjata Sinar	5
01.03.02.09.04.	Alat Khusus Kepolisian	4
01.03.02.10.	**Komputer**	
01.03.02.10.01.	Komputer Unit	4
01.03.02.10.02.	Peralatan Komputer	4
01.03.02.11.	**Alat Eksplorasi**	
01.03.02.11.01.	Alat Eksplorasi Topografi	5
01.03.02.11.02.	Alat Eksplorasi Geofisika	10
01.03.02.12.	**Alat Pengeboran**	
01.03.02.12.01.	Alat Pengeboran Mesin	10
01.03.02.12.02.	Alat Pengeboran Non Mesin	10
01.03.02.13.	**Alat Produksi, Pengolahan dan Pemurnian**	
01.03.02.13.01.	Sumur	10
01.03.02.13.02.	Produksi	10
01.03.02.13.03.	Pengolahan dan Pemurnian	15
01.03.02.14.	**Alat Bantu Eksplorasi**	
01.03.02.14.01.	Alat Bantu Eksplorasi	10
01.03.02.14.02.	Alat Bantu Produksi	10
01.03.02.15.	**Alat Keselamatan Kerja**	
01.03.02.15.01.	Alat Deteksi	5
01.03.02.15.02.	Alat Pelindung	5
01.03.02.15.03.	Alat SAR	2
01.03.02.15.04.	Alat Kerja Penerbangan	10
01.03.02.16.	**Alat Peraga**	
01.03.02.16.01.	Alat Peraga Pelatihan dan Percontohan	10

01.03.02.17.	**Peralatan Proses/Produksi**	
01.03.02.17.01.	Unit Peralatan Proses/Produksi	8
01.03.02.18.	**Rambu – Rambu**	
01.03.02.18.01.	Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat	3
01.03.02.18.02.	Rambu-Rambu Lalu Lintas Udara	3
01.03.02.18.03.	Rambu-Rambu Lalu Lintas Laut	3
01.03.02.19.	**Peralatan Olah Raga**	
01.03.02.19.01.	Peralatan Olah Raga	3
01.03.03.	**GEDUNG DAN BANGUNAN**	
01.03.03.01.	**Bangunan Gedung**	
01.03.03.01.01.	Bangunan Gedung Tempat Kerja	20
01.03.03.01.02.	Bangunan Gedung Tempat Tinggal	20
01.03.03.02.	**Monumen**	
01.03.03.02.01.	Candi/Tugu Peringatan/Prasasti	20
01.03.03.03.	**Bangunan Menara**	
01.03.03.03.01.	Bangunan Menara Perambuan	20
01.03.03.04.	**Tugu Titik Kontrol/Pasti**	
01.03.03.04.01.	Tugu/Tanda Batas	20
01.03.04.	**JALAN, JARINGAN DAN IRIGASI**	
01.03.04.01.	**Jalan dan Jembatan**	
01.03.04.01.01.	Jalan	5
01.03.04.01.02.	Jembatan	20
01.03.04.02.	**Bangunan Air**	
01.03.04.02.01.	Bangunan Air Irigasi	15
01.03.04.02.02.	Bangunan Pengairan Pasang Surut	15
01.03.04.02.03.	Bangunan Pengembangan Rawa dan Polder	15
01.03.04.02.04.	Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggula	15
01.03.04.02.05.	Bangunan Pengembangan Sumber Air dan Air Tana	15
01.03.04.02.06.	Bangunan Air Bersih/Air Baku	15
01.03.04.02.07.	Bangunan Air Kotor	15
01.03.04.03.	**Instalasi**	
01.03.04.03.01.	Instalasi Air Bersih/Air Baku	10
01.03.04.03.02.	Instalasi Air Kotor	10
01.03.04.03.03.	Instalasi Pengolahan Sampah	10
01.03.04.03.04.	Instalasi Pengolahan Bahan Bangunan	10
01.03.04.03.05.	Instalasi Pembangkit Listrik	10
01.03.04.03.06.	Instalasi Gardu Listrik	10
01.03.04.03.07.	Instalasi Pertahanan	10
01.03.04.03.08.	Instalasi Gas	10
01.03.04.03.09.	Instalasi Pengaman	10
01.03.04.03.10.	Instalasi Lain	10
01.03.04.04.	**Jaringan**	
01.03.04.04.01.	Jaringan Air Minum	10
01.03.04.04.02.	Jaringan Listrik	10
01.03.04.04.03.	Jaringan Telepon	10
01.03.04.04.04.	Jaringan Gas	10
01.03.05.	**ASET TETAP LAINNYA**	
01.03.05.02.	**Barang Bercorak Kesenian/ Kebudayaan/ Olahraga**	
01.03.05.02.01.	Barang Bercorak Kesenian	4

h. Penambahan masa manfaat Aset Tetap Pemerintah Kabupaten Gunung Mas dapat digambarkan dalam tabel di bawah ini:

LAMPIRAN VII
PERATURAN DAERAH KABUPATEN GUNUNG MAS
NOMOR TAHUN 2024
TENTANG
PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2023

Tabel 7.4.4 Penambahan Masa Manfaat Aset Tetap

Kode Barang	Uraian	Persentase Renovasi/ Restorasi/ *Overhaul* dari Nilai Aset Tetap (Di Luar Penyusutan)	Penambah-an Masa Manfaat (Tahun)
01.03.	**ASET TETAP**		
01.03.02.	**PERALATAN DAN MESIN**		
01.03.02.01.	**Alat Besar**		
01.03.02.01.01.	Alat Besar Darat	30% s/d 45%	1
		>45% s/d 65%	3
		>65% s/d 100%	5
01.03.02.01.02.	Alat Besar Apung	30% s/d 45%	1
		>45% s/d 65%	2
		>65% s/d 100%	4
01.03.02.01.03.	Alat Bantu	30% s/d 45%	1
		>45% s/d 65%	2
		>65% s/d 100%	4
01.03.02.02.	**Alat Angkutan**		
01.03.02.02.01.	Alat Angkutan Darat Bermotor	30% s/d 50%	1
		>50% s/d 75%	2
		>75% s/d 100%	3
01.03.02.02.02.	Alat Angkutan Darat Tak Bermotor	30% s/d 60%	1
		>60% s/d 100%	2
01.03.02.02.03.	Alat Angkutan Apung Bermotor	30% s/d 50%	2
		>50% s/d 75%	4
01.03.02.02.04.	Alat Angkutan Apung Tak Bermotor	30% s/d 50%	1
		>50% s/d 75%	2
		>75% s/d 100%	3
01.03.02.02.05.	Alat Angkutan Bermotor Udara	30% s/d 50%	3
		>50% s/d 75%	6
		>75% s/d 100%	9
01.03.02.03.	**Alat Bengkel dan Alat Ukur**		
01.03.02.03.01.	Alat Bengkel Bermesin	30% s/d 50%	1
		>50% s/d 75%	2
		>75% s/d 100%	3
01.03.02.03.02.	Alat Bengkel Tak Bermesin	30% s/d 50%	1
		>50% s/d 75%	2
		>75% s/d 100%	3
01.03.02.03.03.	Alat Ukur	30% s/d 50%	1
		>50% s/d 75%	2
		>75% s/d 100%	3
01.03.02.04.	**Alat Pertanian**		
01.03.02.04.01.	Alat Pengolahan	30% s/d 50%	1
		>50% s/d 75%	2
		>75% s/d 100%	3
01.03.02.05.	**Alat Kantor dan Rumah Tangga**		
01.03.02.05.01.	Alat Kantor	30% s/d 50%	1
		>50% s/d 75%	2
		>75% s/d 100%	3
01.03.02.05.02.	Alat Rumah Tangga	30% s/d 50%	1
		>50% s/d 75%	2
		>75% s/d 100%	3
01.03.02.05.03.	Meja dan Kursi Kerja/ Rapat Pejabat	30% s/d 50%	1

		>50% s/d 75%	2
		>75% s/d 100%	3
01.03.02.06.	**Alat Studio, Komunikasi dan Pemancar**		
01.03.02.06.01.	Alat Studio	30% s/d 50%	1
		>50% s/d 75%	2
		>75% s/d 100%	3
01.03.02.06.02.	Alat Komunikasi	30% s/d 50%	1
		>50% s/d 75%	2
		>75% s/d 100%	3
01.03.02.06.03.	Peralatan Pemancar	30% s/d 50%	2
		>50% s/d 75%	4
		>75% s/d 100%	6
01.03.02.07.	**Alat Kedokteran dan Kesehatan**		
01.03.02.07.01.	Alat Kedokteran	30% s/d 50%	1
		>50% s/d 75%	2
		>75% s/d 100%	3
01.03.02.07.02.	Alat Kesehatan Umum	30% s/d 50%	1
		>50% s/d 75%	2
		>75% s/d 100%	3
01.03.02.08.	**Alat Laboratorium**		
01.03.02.08.01.	Unit Alat Laboratorium	30% s/d 50%	2
		>50% s/d 75%	4
		>75% s/d 100%	6
01.03.02.08.02.	Unit Alat Laboratorium Kimia Nuklir	30% s/d 50%	2
		>50% s/d 75%	4
		>75% s/d 100%	6
01.03.02.08.03.	Alat Peraga Praktek Sekolah	30% s/d 60%	1
		>60% s/d 100%	2
01.03.02.08.04.	Alat Laboratorium Fisika Nuklir/ Elektronika	30% s/d 50%	2
		>50% s/d 75%	4
		>75% s/d 100%	6
01.03.02.08.05.	Alat Proteksi Radiasi/ Proteksi Lingkungan	30% s/d 50%	2
		>50% s/d 75%	4
		>75% s/d 100%	6
01.03.02.08.06.	*Radiation Application and Non Destructive Testing Laboratory*	30% s/d 50%	2
		>50% s/d 75%	4
		>75% s/d 100%	6
01.03.02.08.07.	Alat Laboratorium Lingkungan Hidup	30% s/d 50%	1
		>50% s/d 75%	3
		>75% s/d 100%	5
01.03.02.08.08.	Peralatan Laboratorium Hydrodinamica	30% s/d 50%	2
		>50% s/d 75%	4
		>75% s/d 100%	6
01.03.02.08.09.	Alat Laboratorium Standarisasi Kalibrasi dan Instrumentasi	30% s/d 50%	1
		>50% s/d 75%	3
		>75% s/d 100%	5
01.03.02.09.	**Alat Persenjataan**		
01.03.02.09.01.	Senjata Api	30% s/d 50%	2
		>50% s/d 75%	4
		>75% s/d 100%	6
01.03.02.09.02.	Persenjataan Non Senjata Api	30% s/d 50%	1
		>50% s/d 75%	2

		>75% s/d 100%	3
01.03.02.09.03.	Senjata Sinar	30% s/d 50%	1
		>50% s/d 75%	2
		>75% s/d 100%	3
01.03.02.09.04.	Alat Khusus Kepolisian	30% s/d 50%	1
		>50% s/d 75%	2
		>75% s/d 100%	3
01.03.02.10.	**Komputer**		
01.03.02.10.01.	Komputer Unit	30% s/d 50%	1
		>50% s/d 75%	2
		>75% s/d 100%	3
01.03.02.10.02.	Peralatan Komputer	30% s/d 50%	1
		>50% s/d 75%	2
		>75% s/d 100%	3
01.03.02.11.	**Alat Eksplorasi**		
01.03.02.11.01.	Alat Eksplorasi Topografi	30% s/d 50%	1
		>50% s/d 75%	2
		>75% s/d 100%	3
01.03.02.11.02.	Alat Eksplorasi Geofisika	30% s/d 50%	2
		>50% s/d 75%	4
		>75% s/d 100%	6
01.03.02.12.	**Alat Pengeboran**		
01.03.02.12.01.	Alat Pengeboran Mesin	30% s/d 50%	2
		>50% s/d 75%	4
		>75% s/d 100%	6
01.03.02.12.02.	Alat Pengeboran Non Mesin	30% s/d 50%	2
		>50% s/d 75%	4
		>75% s/d 100%	6
01.03.02.13.	**Alat Produksi, Pengolahan dan Pemurnian**		
01.03.02.13.01.	Sumur	30% s/d 50%	2
		>50% s/d 75%	4
		>75% s/d 100%	6
01.03.02.13.02.	Produksi	30% s/d 50%	2
		>50% s/d 75%	4
		>75% s/d 100%	6
01.03.02.13.03.	Pengolahan dan Pemurnian	30% s/d 50%	3
		>50% s/d 75%	6
		>75% s/d 100%	9
01.03.02.14.	**Alat Bantu Eksplorasi**		
01.03.02.14.01.	Alat Bantu Eksplorasi	30% s/d 50%	2
		>50% s/d 75%	4
		>75% s/d 100%	6
01.03.02.14.02.	Alat Bantu Produksi	30% s/d 50%	2
		>50% s/d 75%	4
		>75% s/d 100%	6
01.03.02.15.	**Alat Keselamatan Kerja**		
01.03.02.15.01.	Alat Deteksi	30% s/d 50%	1
		>50% s/d 75%	2
		>75% s/d 100%	3
01.03.02.15.02.	Alat Pelindung	30% s/d 50%	1
		>50% s/d 75%	2
		>75% s/d 100%	3
01.03.02.15.03.	Alat SAR	30% s/d 100%	1
01.03.02.15.04.	Alat Kerja Penerbangan	30% s/d 50%	2

		>50% s/d 75%	4
		>75% s/d 100%	6
01.03.02.16.	**Alat Peraga**		
01.03.02.16.01.	Alat Peraga Pelatihan dan Percontohan	30% s/d 50%	2
		>50% s/d 75%	4
		>75% s/d 100%	6
01.03.02.17.	**Peralatan Proses/ Produksi**		
01.03.02.17.01.	Unit Peralatan Proses/ Produksi	30% s/d 50%	2
		>50% s/d 75%	4
		>75% s/d 100%	6
01.03.02.18.	**Rambu - Rambu**		
01.03.02.18.01.	Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat	30% s/d 65%	1
		>65% s/d 100%	2
01.03.02.18.02.	Rambu-Rambu Lalu Lintas Udara	30% s/d 65%	1
		>65% s/d 100%	2
01.03.02.18.03.	Rambu-Rambu Lalu Lintas Laut	30% s/d 65%	1
		>65% s/d 100%	2
01.03.02.19.	**Peralatan Olah Raga**		
01.03.02.19.01.	Peralatan Olah Raga	30% s/d 65%	1
		>65% s/d 100%	2
01.03.03.	**GEDUNG DAN BANGUNAN**		
01.03.03.01.	**Bangunan Gedung**		
01.03.03.01.01.	Bangunan Gedung Tempat Kerja	30% s/d 50%	5
		>50% s/d 75%	10
		>75% s/d 100%	15
01.03.03.01.02.	Bangunan Gedung Tempat Tinggal	30% s/d 50%	5
		>50% s/d 75%	10
		>75% s/d 100%	15
01.03.03.02.	**Monumen**		
01.03.03.02.01.	Candi/ Tugu Peringatan/ Prasasti	30% s/d 50%	5
		>50% s/d 75%	10
		>75% s/d 100%	15
01.03.03.03.	**Bangunan Menara**		
01.03.03.03.01.	Bangunan Menara Perambuan	30% s/d 50%	5
		>50% s/d 75%	10
		>75% s/d 100%	15
01.03.03.04.	**Tugu Titik Kontrol/ Pasti**		
01.03.03.04.01.	Tugu/ Tanda Batas	30% s/d 50%	5
		>50% s/d 75%	10
		>75% s/d 100%	15
01.03.04.	**JALAN, JARINGAN DAN IRIGASI**		
01.03.04.01.	**Jalan dan Jembatan**		
01.03.04.01.01.	Jalan	30% s/d 50%	1
		>50% s/d 75%	2
		>75% s/d 100%	3
01.03.04.01.02.	Jembatan	30% s/d 50%	5
		>50% s/d 75%	10
		>75% s/d 100%	15
01.03.04.02.	**Bangunan Air**		
01.03.04.02.01.	Bangunan Air Irigasi	30% s/d 50%	4
		>50% s/d 75%	8
		>75% s/d 100%	12
01.03.04.02.02.	Bangunan Pengairan Pasang Surut	30% s/d 50%	4
		>50% s/d 75%	8

		>75% s/d 100%	12
01.03.04.02.03.	Bangunan Pengembangan Rawa dan Polder	30% s/d 50%	4
		>50% s/d 75%	8
		>75% s/d 100%	12
01.03.04.02.04.	Bangunan Pengaman Sungai/ Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam	30% s/d 50%	4
		>50% s/d 75%	8
		>75% s/d 100%	12
01.03.04.02.05.	Bangunan Pengembangan Sumber Air dan Air Tanah	30% s/d 50%	4
		>50% s/d 75%	8
		>75% s/d 100%	12
01.03.04.02.06.	Bangunan Air Bersih/ Air Baku	30% s/d 50%	4
		>50% s/d 75%	8
		>75% s/d 100%	12
01.03.04.02.07.	Bangunan Air Kotor	30% s/d 50%	4
		>50% s/d 75%	8
		>75% s/d 100%	12
01.03.04.03.	**Instalasi**		
01.03.04.03.01.	Instalasi Air Bersih/ Air Baku	30% s/d 50%	2
		>50% s/d 75%	4
		>75% s/d 100%	6
01.03.04.03.02.	Instalasi Air Kotor	30% s/d 50%	2
		>50% s/d 75%	4
		>75% s/d 100%	6
01.03.04.03.03.	Instalasi Pengolahan Sampah	30% s/d 50%	2
		>50% s/d 75%	4
		>75% s/d 100%	6
01.03.04.03.04.	Instalasi Pengolahan Bahan Bangunan	30% s/d 50%	2
		>50% s/d 75%	4
		>75% s/d 100%	6
01.03.04.03.05.	Instalasi Pembangkit Listrik	30% s/d 50%	2
		>50% s/d 75%	4
		>75% s/d 100%	6
01.03.04.03.06.	Instalasi Gardu Listrik	30% s/d 50%	2
		>50% s/d 75%	4
		>75% s/d 100%	6
01.03.04.03.07.	Instalasi Pertahanan	30% s/d 50%	2
		>50% s/d 75%	4
		>75% s/d 100%	6
01.03.04.03.08.	Instalasi Gas	30% s/d 50%	2
		>50% s/d 75%	4
		>75% s/d 100%	6
01.03.04.03.09.	Instalasi Pengaman	30% s/d 50%	2
		>50% s/d 75%	4
		>75% s/d 100%	6
01.03.04.03.10.	Instalasi Lain	30% s/d 50%	2
		>50% s/d 75%	4
		>75% s/d 100%	6
01.03.04.04.	**Jaringan**		
01.03.04.04.01.	Jaringan Air Minum	30% s/d 50%	2
		>50% s/d 75%	4
		>75% s/d 100%	6
01.03.04.04.02.	Jaringan Listrik	30% s/d 50%	2

		>50% s/d 75%	4
		>75% s/d 100%	6
01.03.04.04.03.	Jaringan Telepon	30% s/d 50%	2
		>50% s/d 75%	4
		>75% s/d 100%	6
01.03.04.04.04.	Jaringan Gas	30% s/d 50%	2
		>50% s/d 75%	4
		>75% s/d 100%	6
01.03.05.	**ASET TETAP LAINNYA**		
01.03.05.02.	**Barang Bercorak Kesenian/ Kebudayaan/ Olah Raga**		
01.03.05.02.01.	Barang Bercorak Kesenian	30% s/d 50%	1
		>50% s/d 75%	2
		>75% s/d 100%	3

Kewajiban

4. 4. 7. Kewajiban

Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi Pemerintah Kabupaten Gunung Mas. Kewajiban dikelompokkan kedalam kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang.

Kewajiban Jangka Pendek merupakan kelompok kewajiban yang diselesaikan dalam waktu kurang dari 12 bulan setelah tanggal pelaporan, misalnya bunga pinjaman, utang jangka pendek dari fihak ketiga, utang perhitungan fihak ketiga (PFK), dan bagian lancar utang jangka panjang. Kewajiban Jangka Pendek dapat dikategorikan dengan cara yang sama seperti aset lancar. Beberapa kewajiban jangka pendek, seperti utang transfer pemerintah atau utang kepada pegawai merupakan suatu bagian yang akan menyerap aset lancar dalam tahun pelaporan berikutnya.

Kewajiban Jangka Panjang adalah kelompok kewajiban yang penyelesaiannya dilakukan setelah 12 bulan sejak tanggal pelaporan.

a. Kewajiban diakui jika besar kemungkinan bahwa pengeluaran sumber daya ekonomi akan dilakukan untuk menyelesaikan kewajiban yang ada sampai saat pelaporan dan perubahan atas kewajiban tersebut mempunyai nilai penyelesaian yang dapat diukur dengan andal.
b. Kewajiban diakui pada saat dana pinjaman diterima oleh pemerintah daerah atau dikeluarkan oleh kreditur sesuai dengan kesepakatan dan/atau pada saat kewajiban timbul.
c. Kewajiban dapat timbul dari:
    1) Transaksi dengan pertukaran (exchange transactions);
    2) Transaksi tanpa pertukaran *(no-exchange transactions)*, sesuai hukum yang berlaku dan kebijakan yang diterapkan belum lunas dibayar sampai dengan saat tanggal pelaporan;
    3) Kejadian yang berkaitan dengan pemerintah (government-related events); dan
    4) Kejadian yang diakui pemerintah (g*overnment-acknowledged events*).

d. utang perhitungan fihak ketiga (PFK) adalah pungutan/potongan PFK yang dilakukan pemerintah daerah yang harus diserahkan kepada pihak lain. PFK diakui pada saat dilakukan pemotongan oleh Bendahara Umum Daerah atas pengeluaran dari Kas Umum Daerah untuk pembayaran seperti gaji dan tunjangan serta pengadaan barang dan jasa. Pada akhir periode pelaporan, saldo pungutan/potongan berupa PFK yang belum disetorkan ke pihak lain harus dicatat sebagai utang perhitungan pihak ketiga pada laporan keuangan sebesar jumlah yang masih harus disetorkan.
e. Pendapatan Diterima Dimuka merupakan kewajiban yang timbul karena adanya kas yang telah diterima tetapi sampai dengan tanggal neraca, seluruh atau sebagian barang/jasa belum diserahkan oleh pemerintah daerah kepada pihak lain. Pendapatan Diterima Dimuka diakui pada saat kas telah diterima pihak ketiga tetapi belum terjadi penyerahan barang/jasa oleh pemerintah daerah.
f. utang Belanja merupakan utang pemerintah daerah yang timbul karena pemerintah daerah mengikat kontrak pengadaan barang/jasa dengan pihak ketiga yang pembayarannya akan dilakukan di kemudian hari atau sampai dengan tanggal pelaporan belum dilakukan pembayaran oleh pemerintah daerah.
g. Utang Jangka Pendek Lainnya diakui pada saat terdapat/timbulnya klaim atau tagihan kepada pemerintah daerah namun belum terjadi pembayaran sampai dengan tanggal pelaoran.
h. nilai yang dicantumkan dalam laporan keuangan untuk Bagian Lancar Utang Jangka Panjang adalah jumlah yang akan jatuh tempo dalam waktu 12 bulan setelah tanggal pelaporan. Termasuk dalam kategori Bagian Lancar Utang Jangka Panjang adalah jumlah bagian Utang Jangka Panjang yang akan jatuh tempo dan harus dibayarkan dalam waktu 12 bulan setelah tanggal pelaporan.

Ekuitas

4. 4. 8. Ekuitas

Ekuitas merupakan merupakan kekayaan bersih pemerintah yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban pada tanggal pelaporan.

Saldo Ekuitas di Neraca berasal dari Saldo Akhir Ekuitas pada Laporan Perubahan Ekuitas.

Pengakuan dan pengukuran Ekuitas telah dijabarkan berkaitan dengan akun investasi jangka pendek, investasi jangka panjang, aset tetap, aset lainnya, dana cadangan, penerimaan pembiayaan, pengeluaran pembiayaan, pendapatan, biaya, dan pengakuan kewajiban.

Pengungkapan lebih lanjut dari Ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas.

Laporan Konsolidasi

4. 5. Laporan Konsolidasi

Entitas pelaporan adalah Pemerintah Kabupaten Gunung Mas sebagaimana ditetapkan di dalam peraturan perundang-undangan. (dalam hal ini Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah selaku BUD).

Entitas pelaporan menyusun Laporan Keuangan dengan menggabungkan Laporan Keuangan seluruh entitas akuntansi yang secara organisatoris berada dibawahnya.

Entitas akuntansi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Gunung Mas adalah satuan kerja Perangkat Daerah yang ada di lingkungan Pemerintah Kabupaten Gunung Mas.

a. laporan keuangan konsolidasian adalah suatu Laporan Keuangan yang merupakan gabungan keseluruhan dari laporan keuangan entitas pelaporan dan entitas akuntansi sehingga tersaji sebagai satu entitas tunggal. Laporan keuangan konsolidasian pada Pemerintah Kabupaten Gunung Mas sebagai entitas pelaporan mencakup laporan keuangan semua entitas akuntansi yang meliputi satuan kerja Perangkat Daerah dan Pejabat Pengelola Keuangan Daerah.
b. prosedur konsolidasi dilaksanakan dengan cara menggabungkan dan menjumlahkan akun yang diselenggarakan oleh entitas akuntansi yang meliputi satuan kerja Perangkat Daerah dan Pejabat Pengelola Keuangan Daerah dengan mengeliminasi akun timbal balik di Neraca. Akun-akun yang dieliminasi adalah R/K satuan kerja Perangkat Daerah dan Pejabat Pengelola Keuangan Daerah dieliminasi menjadi R/K Kasda dan R/K satuan kerja Perangkat Daerah dan Pejabat Pengelola Keuangan Daerah Aset dieliminasi menjadi R/K Aset.
c. laporan keuangan konsolidasian terdiri dari laporan realisasi anggaran, neraca, surplus defisit atau laporan operasional (LO), dan catatan atas laporan keuangan. Laporan keuangan konsolidasian disajikan untuk periode pelaporan yang sama dengan periode pelaporan keuangan entitas pelaporan dan berisi jumlah komparatif dengan periode sebelumnya, dalam kebijakan ini proses konsolidasi diikuti dengan eliminasi akun-akun timbal balik *(reciprocal accounts).*

Penyajian Laporan Arus Kas

4. 6. Penyajian Laporan Arus Kas

Laporan Arus Kas menyajikan informasi Kas sehubungan dengan kegiatan operasional. Investasi Aset Non Keuangan. Pembiayaan dan Transaksi Non Anggaran yang menggambarkan Saldo Awal, Penerimaan, Pengeluaran dan Saldo Akhir Kas Pemerintah pada periode tertentu. Yang dimaksud dengan penerimaan adalah semua peneriman kas daerah yang dibukukan dalam tahun anggaran yang bersangkutan; sedangkan pengeluaran adalah semua pengeluaran Kas Daerah yang dibukukan dalam tahun anggaran yang bersangkutan.

a. klasifikasi Arus Kas disajikan ke dalam 4 (empat) kelompok aktivitas berikut:

1) Aktivitas Operasi mencerminkan penerimaan dan pengeluaran kas bruto yang ditujukan untuk aktivitas operasional pemerintah selama satu periode akuntansi. Arus masuk Kas dari Aktivitas Operasi terutama diperoleh dari: (a) Penerimaan Pajak Daerah; (b) Penerimaan Retribusi Daerah; (c) Penerimaan Hibah; (d) Penerimaan Bagian Laba Perusahaan Negara/Daerah dan Investasi Lainnya; (e) Lain-lain PAD yang Sah, dan (f) Transfer Masuk. Arus keluar Kas untuk Aktivitas Operasi terutama digunakan untuk pengeluaran: (a) Belanja Pegawai; (b) Belanja Barang dan Jasa; (c) Belanja Bunga; (d) Belanja Subsidi; (e) Belanja Hibah; (f) Belanja Bantuan Sosial; (g) Belanja Lain-lain/Tak Terduga; dan (h) Transfer Keluar.
2) Aktivitas Investasi mencerminkan penerimaan dan pengeluaran kas bruto dalam rangka perolehan dan pelepasan sumberdaya ekonomi yang bertujuan untuk meningkatkan dan mendukung pelayanan pemerintah kepada masyarakat di masa yang akan datang. Arus masuk kas dari Aktivitas Investasi Aset Non Keuangan terdiri dari: (a) Penjualan Aset Tetap; dan (b) Penjualan Aset Lainnya. Arus keluar kas dari Aktivitas Investasi Aset Non Keuangan terdiri dari: (a) Perolehan Aset Tetap; dan (b) Perolehan Aset Lainnya.
3) Aktivitas Pendanaan dalam hal pembiayaan mencerminkan penerimaan dan pengeluaran Kas Bruto sehubungan dengan pendanaan defisit anggaran atau penggunaan surplus anggaran yang bertujuan untuk memprediksi klaim pihak lain terhadap Arus Kas pemerintah atau klaim pemerintah terhadap pihak lain di masa yang akan datang.
   Arus masuk Kas dari Aktivitas Pembiayaan antara lain: (a) Penggunaan SiLPA Tahun Lalu; (b) Penerimaan Pinjaman; (c) Penerimaan Hasil Penjualan Obligasi/Surat Utang Negara; (d) Penerimaan dari Divestasi; (e) Penerimaan Kembali Pinjaman; dan (f) Pencairan Dana Cadangan.
   Arus keluar Kas dari Aktivitas Pembiayaan antara lain: (a) Penyertaan Modal Pemerintah Daerah; (b) Pembayaran Pokok Pinjaman; (c) Pemberian Pinjaman Jangka Panjang; dan (d) Pembentukan Dana Cadangan.
4) Aktivitas Transitoris mencerminkan penerimaan dan pengeluaran kas bruto yang tidak mempengaruhi anggaran pendapatan. Belanja dan Pembiayaan Pemerintah. Arus Kas dari Aktivitas Transitoris antara lain perhitungan fihak ketiga (PFK) dan kiriman/transfer uang. Perhitungan fihak ketiga (PFK) menggambarkan Kas yang berasal dari jumlah dana yang dipotong dari Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) atau diterima secara tunai untuk pihak ketiga. Adapun kiriman uang menggambarkan mutasi Kas antar rekening Kas Umum Daerah. Arus keluar Kas dari Aktivitas Transitoris meliputi pengeluaran PFK dan kiriman uang keluar.

b. metode penyajian Laporan Arus Kas oleh Entitas pelaporan dapat menggunakan cara:
   1) Metode Langsung yang mengungkapkan pengelompokan utama atas Penerimaan dan Pengeluaran Kas Bruto.
   2) Metode Tidak Langsung dilakukan dengan cara surplus atau defisit disesuaikan dengan transaksi-transaksi operasional Non Kas, penangguhan *(deferral)* atau pengakuan *(accrual)* penerimaan Kas atau pembayaran yang lalu/yang akan datang, serta unsur pendapatan dan belanja dalam bentuk Kas yang berkaitan dengan aktivitas investasi Aset Non Keuangan dan Pembiayaan.
c. terkait dengan penyajian Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Gunung Mas Tahun 2023, Pemerintah Kabupaten Gunung Mas mempergunakan Metode Langsung dalam menyusun Laporan Arus Kas sebagaimana yang disajikan pada lembar muka *(on the face)* laporan keuangan dengan pertimbangan bahwa penggunaan Metode Langsung ini:
   1) Menyediakan informasi yang lebih baik untuk mengestimasikan Arus Kas di masa yang akan datang;
   2) Lebih mudah dipahami oleh pengguna laporan; dan
   3) Data tentang kelompok Penerimaan dan Pengeluaran Kas Bruto dapat langsung diperoleh dari catatan akuntansi.

BAB V PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN KEUANGAN

Laporan Realisasi Anggaran (LRA)

5. 1. Rincian dan Penjelasan Pos-Pos Laporan Realisasi Anggaran

Selama periode tahun anggaran 2023, Pemerintah Kabupaten Gunung Mas telah mengadakan perubahan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) dari DPA awal. Hal ini disebabkan oleh adanya program penghematan belanja pemerintah dan adanya perubahan kegiatan sesuai dengan kebutuhan dan situasi serta kondisi pada saat pelaksanaan. Perubahan tersebut berdasarkan sumber pendapatan dan jenis belanja serta penggunaan pembiayaan adalah sebagai berikut:

Tabel 7.5.1 APBD Murni dan APBD Perubahan

Uraian	Tahun 2023 (Rp)	
	Anggaran Murni/ Awal	Anggaran Setelah Perubahan
Pendapatan Daerah		
Pendapatan Asli Daerah	84.719.417.995,00	74.332.496.530,00
Pendapatan Transfer	1.096.236.777.000,00	1.132.550.474.632,00
Lain-Lain Pendapatan Yang Sah	3.748.040.000,00	3.748.040.000,00
Jumlah Pendapatan Daerah	**1.184.704.234.995,00**	**1.210.631.011.162,00**
Belanja Daerah		
Belanja Operasi	835.082.311.742,00	849.602.808.825,00
Belanja Modal	266.134.303.061,00	291.830.294.608,00
Belanja Tidak Terduga	4.750.000.000,00	9.580.000.000,00
Belanja Transfer	175.006.474.930,00	183.197.290.930,00
Jumlah Belanja Daerah	**1.280.973.089.733,00**	**1.334.210.394.363,00**
Pembiayaan Daerah		
Penerimaan Pembiayaan	**108.236.854.738,00**	**135.547.383.201,00**
Pengeluaran Pembiayaan	**11.968.000.000,00**	**11.968.000.000,00**

Pendapatan Daerah

5. 1. 1. Pendapatan Daerah

Realisasi Tahun 2023: Rp1.176.119.496.936,58
Realisasi Tahun 2022: Rp1.084.119.104.954,50

Struktur Pendapatan Daerah berdasarkan Standar Akuntansi Pemerintahan terdiri dari 3 (tiga) bagian yaitu Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pendapatan Transfer, dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah.

Realisasi Pendapatan Daerah secara keseluruhan periode 1 Januari 2023 sampai dengan 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp1.176.119.496.936,58 atau mencapai 97,15% dari total jumlah estimasi anggaran Pendapatan Daerah tahun 2023 sebesar Rp1.210.631.011.162,00 yang terdiri dari:

Tabel 7.5.2 Pendapatan Daerah

No.	Uraian	Tahun 2023			Tahun 2022
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)
1.	Pendapatan Asli Daerah	74.332.496.530,00	35.992.250.832,58	48,42	78.217.073.269,86
2.	Pendapatan Transfer	1.132.550.474.632,00	1.135.524.590.828,00	100,26	1.004.412.465.028,64
3.	Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah	3.748.040.000,00	4.602.655.276,00	122,80	1.489.566.656,00
Jumlah		**1.210.631.011.162,00**	**1.176.119.496.936,58**	**97,15**	**1.084.119.104.954,50**

Pendapatan Asli Daerah

5. 1. 1. 1. Pendapatan Asli Daerah

Realisasi Tahun 2023: Rp35.992.250.832,58
Realisasi Tahun 2022: Rp78.217.073.269,86

Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan pendapatan yang diterima periode 1 Januari 2023 sampai dengan 31 Desember 2023 yang dianggarkan sebesar Rp74.332.496.530,00 dan terealisasi sebesar Rp35.992.250.832,58 atau mencapai 48,42% dengan komposisi seperti pada tabel berikut:

Tabel 7.5.3 Pendapatan Asli Daerah

No.	Uraian	Tahun 2023			Tahun 2022
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)
1.	Pajak Daerah	49.230.000.000,00	11.888.728.187,00	24,15	30.932.700.270,00
2.	Retribusi Daerah	4.828.080.000,00	5.824.282.265,20	120,63	4.507.497.060,00
3.	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	24.000.000,00	81.147.428,96	338,11	12.683.801.108,00
4.	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	20.250.416.530,00	18.198.092.951,42	89,87	30.093.074.831,86
Jumlah		**74.332.496.530,00**	**35.992.250.832,58**	**48,42**	**78.217.073.269,86**

Dari tabel di atas terlihat bahwa secara total keseluruhan realisasi PAD Tahun 2023, mengalami penurunan pendapatan dibandingkan dengan Tahun 2022 sebesar 54,04%. Dengan penyumbang penurunan pendapatan terbesar pada Pajak Daerah, namun pada Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan, dan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah justru mengalami kenaikan. Berdasarkan data tersebut menunjukkan bahwa pertumbuhan kegiatan ekonomi di wilayah Kabupaten Gunung Mas mengalami penurunan.

Adapun rincian anggaran dan realisasi PAD Tahun Anggaran 2023 adalah sebagai berikut:

Pajak Daerah

5. 1. 1. 1. 1. Pajak Daerah

Realisasi Tahun 2023: Rp11.888.728.187,00
Realisasi Tahun 2022: Rp30.932.700.270,00

Pajak Daerah selama Tahun Anggaran 2023 terealisasi sebesar Rp11.888.728.187,00 atau mencapai 24,15% dari estimasi anggaran sebesar Rp49.230.000.000,00
Pajak Daerah merupakan pendapatan dari 10 (sepuluh) jenis Pajak Daerah dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 7.5.4 Pajak Daerah

No.	Uraian	Tahun 2023			Tahun 2022
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)
1.	Pajak Hotel	190.000.000,00	117.233.032,00	61,70	112.268.800,00
2.	Pajak Restoran	920.000.000,00	1.734.469.495,00	188,53	1.230.687.795,00
3.	Pajak Hiburan	20.000.000,00	16.913.500,00	84,57	5.654.000,00
4.	Pajak Reklame	605.000.000,00	457.745.094,00	75,66	453.588.384,00
5.	Pajak Penerangan Jalan	3.175.000.000,00	2.807.003.194,00	88,41	2.518.724.974,00
6.	Pajak Air Tanah	120.000.000,00	211.498.938,00	176,25	137.591.755,00
7.	Pajak Sarang Burung Walet	200.000.000,00	123.805.000,00	61,90	142.807.500,00
8.	Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	3.100.000.000,00	4.416.185.432,00	142,46	1.982.298.074,00
9.	Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan (PBBP2)	1.500.000.000,00	1.364.321.493,00	90,95	1.375.195.837,00
10.	Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	39.400.000.000,00	639.553.009,00	1,62	22.973.883.151,00
Jumlah		**49.230.000.000,00**	**11.888.728.187,00**	**24,15**	**30.932.700.270,00**

Retribusi Daerah

5. 1. 1. 1. 2. Retribusi Daerah

Realisasi Tahun 2023: Rp5.824.282.265,20

Realisasi Tahun 2022: Rp4.507.497.060,00

Retribusi Daerah Tahun Anggaran 2023 ditetapkan estimasi anggarannya sebesar Rp4.828.080.000,00 dan terealisasi sebesar Rp5.824.282.265,20 atau mencapai 120,63% dengan rincian pendapatan Retribusi Daerah terdiri dari:

Tabel 7.5.5 Retribusi Daerah

No.	Uraian	Tahun 2023			Tahun 2022
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)
A.	**Retribusi Jasa Umum**	**1.128.000.000,00**	**1.882.981.910,00**	**166,93**	**1.336.918.929,00**
1	Retribusi Pelayanan Kesehatan	300.000.000,00	1.008.019.710,00	336,01	541.540.229,00
2	Retribusi Pelayanan Persampahan/ Kebersihan	320.000.000,00	261.895.000,00	81,84	318.957.500,00
3	Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum	30.000.000,00	30.050.000,00	100,17	30.100.000,00
4	Retribusi Pelayanan Pasar	50.000.000,00	107.825.000,00	215,65	126.992.000,00
5	Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor	200.000.000,00	100.660.000,00	50,33	107.985.000,00
6	Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta	13.000.000,00	300.000,00	2,31	21.600.000,00
7	Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang	10.000.000,00	11.924.000,00	119,24	10.361.000,00
8	Retribusi Pengawasan dan Pengendalian Menara Telekomuni-kasi	205.000.000,00	362.308.200,00	176,74	179.383.200,00
B.	**Retribusi Jasa Usaha**	**2.600.080.000,00**	**2.419.514.500,00**	**93,06**	**1.893.788.400,00**
1	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	2.068.080.000,00	2.004.191.500,00	96,91	1.480.488.400,00
2	Retribusi Pasar Grosir dan/ atau Pertokoan	155.000.000,00	158.600.000,00	102,32	147.700.000,00
3	Retribusi Tempat Khusus Parkir	15.000.000,00	11.261.000,00	75,07	13.630.000,00
4	Retribusi Rumah Potong Hewan	40.000.000,00	5.000.000,00	12,50	5.150.000,00
5	Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah Raga	160.000.000,00	88.103.000,00	55,06	134.060.000,00

6	Retribusi Penyeberangan di Air	10.000.000,00	10.050.000,00	100,50	9.000.000,00
7	Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah	152.000.000,00	142.309.000,00	93,62	103.760.000,00
C.	**Retribusi Perizinan Tertentu**	**1.100.000.000,00**	**1.521.785.855,20**	**138,34**	**1.276.789.731,00**
1	Retribusi Izin Mendirikan Bangunan	150.000.000,00	546.785.855,20	364,52	306.789.731,00
2	Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol	800.000.000,00	975.000.000,00	121,88	970.000.000,00
3	Retribusi Penggunaan Tenaga Kerja Asing (TKA)	150.000.000,00	0,00	0,00	0,00
Jumlah (A+B+C)		**4.828.080.000,00**	**5.824.282.265,20**	**120,63**	**4.507.497.060,00**

Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan

5. 1. 1. 1. 3. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan

Realisasi Tahun 2023: Rp81.147.428,96
Realisasi Tahun 2022: Rp12.683.801.108,00

Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan tahun 2023 merupakan bagian laba yang dibagikan kepada Pemerintah Kabupaten Gunung Mas (deviden) atas penyertaan modal pada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan estimasi penganggaran pada Tahun 2023 sebesar Rp24.000.000,00 dan terealisasi sebesar Rp81.147.428,96 atau mencapai 338,11% yang merupakan pembayaran deviden Pemerintah Kabupaten Gunung Mas pada PT JAMKRIDA Kalimantan Tengah untuk Tahun Buku 2022 yang diterima pada Tahun Anggaran 2023.

Tabel 7.5.6 Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan

No.	Uraian	Tahun 2023			Tahun 2022
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)
1.	Bagian Laba yang dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada Perusahaan Milik Swasta	24.000.000,00	81.147.428,96	338,11	12.683.801.108,00
Jumlah		**24.000.000,00**	**81.147.428,96**	**338,11**	**12.683.801.108,00**

Lain-lain PAD yang Sah

5. 1. 1. 1. 4. Lain-lain PAD yang Sah

Realisasi Tahun 2023: Rp18.198.092.951,42
Realisasi Tahun 2022: Rp30.093.074.831,86

Lain-lain PAD yang Sah tahun 2023 ditetapkan dengan estimasi anggaran sebesar Rp20.250.416.530,00 dan terealisasi sebesar Rp18.198.092.951,42 atau mencapai 89,87% yang terdiri dari:

Tabel 7.5.7 Lain-lain PAD yang Sah

No.	Uraian	Tahun 2023			Tahun 2022
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)
1.	Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan	390.337.995,00	227.132.800,00	58,19	250.219.977,00
2.	Jasa Giro	1.713.078.535,00	1.571.073.547,00	91,71	1.765.891.429,00
3.	Pendapatan Bunga	20.000.000,00	16.213.260,00	81,07	20.888.031,00
4.	Penerimaan atas Tuntutan Ganti Kerugian Keuangan Daerah	12.000.000,00	0,00	0,00	0,00

5.	Penerimaan Komisi, Potongan, atau Bentuk Lain	105.000.000,00	109.490.276,00	104,28	69.084.235,00
6.	Pendapatan Denda Pajak Daerah	10.000.000,00	34.622.891,00	346,23	75.537.785,00
7.	Pendapatan Denda Retribusi Daerah	7.000.000,00	21.400.000,00	305,71	25.500.000,00
8.	Pendapatan BLUD	12.000.000.000,00	13.539.085.113,00	112,83	25.099.894.678,00
9.	Pendapatan Denda atas Pelanggaran Peraturan Daerah	5.993.000.000,00	2.426.546.966,42	40,49	2.786.058.696,86
10.	Remunerasi	0,00	252.528.098,00	0,00	0,00
Jumlah		**20.250.416.530,00**	**18.198.092.951,42**	**89,87**	**30.093.074.831,86**

Realisasi Lain-lain PAD yang Sah sepanjang Tahun 2023 dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Hasil Penjualan Aset Daerah yang Tidak Dipisahkan sebesar Rp227.132.800,00 merupakan pendapatan atas Hasil Penjualan Alat Angkutan atas pelaksanaan lelang non eksekusi wajib Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten Gunung Mas.
2. Jasa Giro sebesar Rp1.571.073.547,00 merupakan pendapatan Jasa Giro dari Rekening Kas Umum Daerah Pemerintah Kabupaten Gunung Mas pada Bank Kalteng Cabang Kuala Kurun.
3. Pendapatan Bunga sebesar Rp16.213.260,00 merupakan Pendapatan Bunga atas Penempatan Uang Pemerintah Daerah berupa setoran bunga bank atas penempatan uang dana kapitasi JKN pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP)/ Pusat Pelayanan Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) milik Pemerintah Kabupaten Gunung Mas.
4. Penerimaan Komisi, Potongan, atau Bentuk Lain sebesar Rp109.490.276,00 merupakan penerimaan pengembalian utang iuran pensiunan PNS Pemerintah Kabupaten Gunung Mas yang dikelola PT. TASPEN yang merupakan hak Pemerintah Kabupaten Gunung Mas.
5. Pendapatan Denda Pajak Daerah sebesar Rp34.622.891,00 merupakan pembayaran Pendapatan Denda PBBP2.
6. Pendapatan Denda Retribusi Daerah sebesar Rp21.400.000,00 merupakan Pendapatan Denda Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol.
7. Pendapatan BLUD sebesar Rp13.539.085.113,00 merupakan pendapatan BLUD RSUD Kuala Kurun.
8. Pendapatan Denda atas Pelanggaran Peraturan Daerah sebesar Rp2.426.546.966,42 merupakan pengembalian kelebihan pembayaran belanja, pengembalian uang hasil temuan pemeriksaan oleh APIP dan auditor BPK serta setoran denda atas keterlambatan penyelesaian pekerjaan dari Pihak Ketiga.
9. Remunerasi sebesar Rp252.528.098,00 merupakan Remunerasi Dana Bagi Hasil Treasury Deposit Facility (TDF) bagian Pemerintah Kabupaten Gunung Mas tahun 2023.

Pendapatan Transfer

5. 1. 1. 2. Pendapatan Transfer

Realisasi Tahun 2023: Rp1.135.524.590.828,00

Realisasi Tahun 2022: Rp1.004.412.465.028,64

Pendapatan Transfer Tahun 2023 ditetapkan estimasi anggaran sebesar Rp1.132.550.474.632,00 dan terealisasi sebesar Rp1.135.524.590.828,00 atau mencapai 100,26% dengan komposisi anggaran dan realisasi seperti pada tabel berikut:

Tabel 7.5.8 Pendapatan Transfer

No.	Uraian	Tahun 2023			Tahun 2022
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)
1.	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	1.073.816.565.000,00	1.078.209.703.770,00	100,41	956.446.470.157,00
2.	Pendapatan Transfer Antar Daerah	58.733.909.632,00	57.314.887.058,00	97,58	47.965.994.871,64
Jumlah		**1.132.550.474.632,00**	**1.135.524.590.828,00**	**100,26**	**1.004.412.465.028,64**

Adapun rincian anggaran dan realiasasi Pendapatan Transfer Tahun Anggaran 2023 adalah sebagai berikut:

Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat

5. 1. 1. 2. 1. Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat
Realisasi Tahun 2023: Rp1.078.209.703.770,00
Realisasi Tahun 2022: Rp956.446.470.157,00

Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat merupakan bagian dari Pendapatan Transfer yang pada Tahun 2023 dianggarkan sebesar Rp1.073.816.565.000,00 dengan realisasi sebesar Rp1.078.209.703.770,00 atau mencapai 100,41%. Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat terdiri dari Dana Perimbangan, Dana Insentif Daerah (DID), dan Dana Desa dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 7.5.9 Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat

No.	Uraian	Tahun 2023			Tahun 2022
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)
1.	Dana Perimbangan	969.050.672.000,00	967.710.343.580,00	99,86	862.410.247.437,00
2.	Dana Insentif Daerah (DID)	9.487.123.000,00	15.456.199.000,00	162,92	3.821.039.000,00
3.	Dana Desa	95.278.770.000,00	95.043.161.190,00	99,75	90.215.183.720,00
Jumlah		**1.073.816.565.000,00**	**1.078.209.703.770,00**	**100,41**	**956.446.470.157,00**

Dana Perimbangan

5. 1. 1. 2. 1. 1. Dana Perimbangan
Realisasi Tahun 2023: Rp967.710.343.580,00
Realisasi Tahun 2022: Rp862.410.247.437,00

Dana Perimbangan merupakan bagian dari Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat yang pada Tahun 2023 dianggarkan sebesar Rp969.050.672.000,00 dengan realisasi sebesar Rp967.710.343.580,00 atau mencapai 99,86%. Dana Perimbangan terdiri dari Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil (DBH), Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum (DAU), dan Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik serta Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 7.5.10 Dana Perimbangan

No.	Uraian	Tahun 2023			Tahun 2022
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)
1.	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil (DBH)	248.332.186.000,00	258.566.474.235,00	104,12	161.543.797.120,00
2.	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum (DAU)	529.366.223.000,00	529.272.767.216,00	99,98	508.244.449.070,00
3.	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik	73.996.025.000,00	72.770.345.330,00	98,34	97.735.626.106,00
4.	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik	117.356.238.000,00	107.100.756.799,00	91,26	94.886.375.141,00
Jumlah		**969.050.672.000,00**	**967.710.343.580,00**	**99,86**	**862.410.247.437,00**

Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil (DBH)

5. 1. 1. 2. 1. 1. 1. Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil (DBH)

Realisasi Tahun 2023: Rp258.566.474.235,00
Realisasi Tahun 2022: Rp161.543.797.120,00

Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil (DBH) merupakan bagian Dana Perimbangan sepanjang Tahun 2023 yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada Daerah berdasarkan angka persentase yang penggunaannya untuk mendanai kebutuhan Pemerintah Kabupaten Gunung Mas dalam rangka pelaksanaan desentralisasi yang terdiri dari Dana Bagi Hasil Pajak dan Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam dengan total anggaran sebesar Rp248.332.186.000,00 dan total terealisasi sebesar Rp258.566.474.235,00 atau mencapai 104,12%.

Adapun rincian anggaran dan realisasi Dana Bagi Hasil Tahun Anggaran 2023 adalah sebagai berikut:

Tabel 7.5.11 Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil (DBH)

No.	Uraian	Tahun 2023			Tahun 2022
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)
1.	Dana Bagi Hasil Pajak	23.041.962.000,00	24.499.232.405,00	106,32	29.753.957.625,00
2.	Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam	225.290.224.000,00	234.067.241.830,00	103,90	131.789.839.495,00
Jumlah		**248.332.186.000,00**	**258.566.474.235,00**	**104,12**	**161.543.797.120,00**

Dana Bagi Hasil Pajak

5. 1. 1. 2. 1. 1. 1. 1. Dana Bagi Hasil Pajak

Realisasi Tahun 2023: Rp24.499.232.405,00
Realisasi Tahun 2022: Rp29.753.957.625,00

Dana Bagi Hasil Pajak merupakan bagian Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil (DBH) sepanjang Tahun 2023 dengan anggaran sebesar Rp23.041.962.000,00 dan terealisasi sebesar Rp24.499.232.405,00 atau mencapai 106,32%. Rincian Dana Bagi Hasil Pajak terdiri dari:

Tabel 7.5.12 Dana Bagi Hasil Pajak

No.	Uraian	Tahun 2023			Tahun 2022
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)
1.	DBH Pajak Bumi dan Bangunan	17.961.614.000,00	19.155.441.741,00	106,65	25.483.802.529,00
2.	DBH PPh Pasal 21	5.080.348.000,00	5.287.850.541,00	104,08	4.209.625.000,00

3.	DBH PPh Pasal 25 dan Pasal 29/WPOPDN	0,00	55.940.000,00	0,00	60.530.096,00
4.	DBH Cukai Hasil Tembakau (CHT)	0,00	123,00	0,00	0,00
Jumlah		**23.041.962.000,00**	**24.499.232.405,00**	**106,32**	**29.753.957.625,00**

Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam

5. 1. 1. 2. 1. 1. 1. 2. Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam

Realisasi Tahun 2023: Rp234.067.241.830,00
Realisasi Tahun 2022: Rp131.789.839.495,00

Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam merupakan bagian Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil (DBH) sepanjang Tahun 2023 dengan anggaran sebesar Rp225.290.224.000,00 dan terealisasi sebesar Rp234.067.241.830,00 atau mencapai 103,90%. Rincian Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam (SDA) terdiri dari:

Tabel 7.5.13 Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam

No.	Uraian	Tahun 2023			Tahun 2022
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)
1.	DBH Sumber Daya Alam (SDA) Minyak Bumi	27.193.000,00	38.223.934,50	140,57	204.030.000,00
2.	DBH Sumber Daya Alam (SDA) Mineral dan Batubara-Landrent	199.722.303.000,00	206.527.722.878,50	103,41	119.498.153.495,00
3.	DBH Sumber Daya Alam (SDA) Kehutanan- Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH)	24.253.979.000,00	25.896.916.200,50	106,77	10.129.345.000,00
4.	DBH Sumber Daya Alam (SDA) Perikanan	1.286.749.000,00	1.604.378.816,50	124,68	1.958.311.000,00
Jumlah		**225.290.224.000,00**	**234.067.241.830,00**	**103,90**	**131.789.839.495,00**

Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum (DAU)

5. 1. 1. 2. 1. 1. 2. Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum (DAU)

Realisasi Tahun 2023: Rp529.272.767.216,00
Realisasi Tahun 2022: Rp508.244.449.070,00

Dana Alokasi Umum merupakan bagian Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat – Dana Perimbangan sepanjang Tahun 2023 yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar-Daerah yang penggunaannya untuk mendanai kebutuhan Pemerintah Kabupaten Gunung Mas dalam rangka pelaksanaan desentralisasi dengan anggaran sebesar Rp529.366.223.000,00 dan terealisasi sebesar Rp529.272.767.216,00 atau mencapai 99,98%.

Tabel 7.5.14 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum (DAU)

No.	Uraian	Tahun 2023			Tahun 2022
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)
1.	DAU	450.487.569.000,00	450.394.113.216,00	99,98	508.244.449.070,00
2.	DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Kelurahan	2.600.000.000,00	2.600.000.000,00	100,00	0,00
3.	DAU Tambahan Dukungan Pendanaan atas Kebijakan Penggajian Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja	76.278.654.000,00	76.278.654.000,00	100,00	0,00
Jumlah		**529.366.223.000,00**	**529.272.767.216,00**	**99,98**	**508.244.449.070,00**

Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik

5. 1. 1. 2. 1. 1. 3. Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik

Realisasi Tahun 2023: Rp72.770.345.330,00
Realisasi Tahun 2022: Rp97.735.626.106,00

Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik merupakan bagian Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat – Dana Perimbangan sepanjang Tahun 2023 yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada Daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus fisik yang merupakan urusan Pemerintah Kabupaten Gunung Mas dan sesuai dengan prioritas nasional.

Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik Tahun 2023 yang diterima Pemerintah Kabupaten Gunung Mas dengan anggaran sebesar Rp73.996.025.000,00 dan terealisasi sebesar Rp72.770.345.330,00 atau mencapai 98,34%.

Dana Alokasi Khusus Fisik (DAK) tahun 2023 terdiri dari DAK Fisik Reguler dan DAK Fisik Penugasan untuk menangani 8 (delapan) bidang dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 7.5.15 Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik

No.	Uraian	Tahun 2023			Tahun 2022
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)
1.	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-PAUD	624.565.000,00	622.205.799,00	99,62	1.266.886.450,00
2.	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SD	1.974.711.000,00	1.802.109.890,00	91,26	12.777.309.068,00
3.	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SMP	4.650.484.000,00	4.624.497.500,00	99,44	12.540.096.750,00
4.	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-Perpustakaan Daerah	10.988.629.000,00	10.896.858.591,00	99,16	0,00
5.	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB- Reguler-Pelayanan Kesehatan Dasar	4.331.740.000,00	4.303.605.400,00	99,35	21.553.952.167,00
6.	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB- Reguler-Pelayanan Kefarmasian	0,00	0,00	0,00	2.948.547.664,00
7.	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB- Reguler-KB	0,00	0,00	0,00	179.313.750,00
8.	DAK Fisik-Bidang Pertanian-Penugasan-Pembangunan/ Renovasi Sarana dan Prasarana Fisik Dasar Pembangunan Pertanian	1.566.933.000,00	1.566.933.000,00	100,00	1.945.092.900,00
9.	DAK Fisik-Bidang Jalan-Reguler-Jalan	18.439.682.000,00	4.609.920.500,00	25,00	10.242.238.300,00
10.	DAK Fisik-Bidang Jalan-Penugasan-Jalan	28.387.914.000,00	41.368.875.500,00	145,73	8.504.426.000,00
11.	DAK Fisik-Bidang Air Minum-Reguler	0,00	0,00	0,00	5.716.646.191,00
12.	DAK Fisik-Bidang Sanitasi-Reguler	0,00	0,00	0,00	2.083.429.000,00
13.	DAK Fisik-Bidang Irigasi-Penugasan	2.079.217.000,00	2.057.339.150,00	98,95	817.000.000,00
14.	DAK Fisik-Bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan-Penugasan-Lingkungan Hidup	0,00	0,00	0,00	2.787.000.000,00

15.	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-Peningkatan Kesiapan Sistem Kesehatan	952.150.000,00	918.000.000,00	96,41	14.373.687.866,00
Jumlah		**73.996.025.000,00**	**72.770.345.330,00**	**98,34**	**97.735.626.106,00**

Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus

5. 1. 1. 2. 1. 1. 4. Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik

Realisasi Tahun 2023: Rp107.100.756.799,00
Realisasi Tahun 2022: Rp94.886.375.141,00

Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik merupakan bagian Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat – Dana Perimbangan sepanjang Tahun 2023 yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada Daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus nonfisik yang merupakan urusan Pemerintah Kabupaten Gunung Mas dan sesuai dengan prioritas nasional dengan anggaran sebesar Rp117.356.238.000,00 dan terealisasi sebesar Rp107.100.756.799,00 atau mencapai 91,26%.
Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik tahun 2023 untuk menangani bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi, dan pelayanan administrasi kependudukan dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 7.5.16 Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik

No.	Uraian	Tahun 2023			Tahun 2022
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)
1.	DAK Non Fisik-BOS Reguler	24.382.800.000,00	23.437.490.600,00	96,12	22.896.528.703,00
2.	DAK Non Fisik-BOS Kinerja	1.722.500.000,00	1.620.000.000,00	94,05	1.355.000.000,00
3.	DAK Non Fisik-TPG PNSD	47.065.461.000,00	46.201.137.540,00	98,16	42.488.713.260,00
4.	DAK Non Fisik-Tamsil Guru PNSD	2.824.500.000,00	1.928.218.302,00	68,27	1.831.749.500,00
5.	DAK Non Fisik-TKG PNSD	11.098.250.000,00	11.098.250.000,00	100,00	10.555.148.000,00
6.	DAK Non Fisik-BOP PAUD	2.601.240.000,00	455.280.000,00	17,50	413.938.000,00
7.	DAK Non Fisik-BOP Pendidikan Kesetaraan	125.600.000,00	0,00	0,00	0,00
8.	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	22.412.318.000,00	3.706.509.217,00	16,54	11.789.367.648,00
9.	DAK Non Fisik-BOKKB-Pengawasan Obat dan Makanan	402.648.000,00	0,00	0,00	0,00
10.	DAK Non Fisik-BOKKB-BOKB	3.338.476.000,00	2.443.630.260,00	73,20	2.525.872.690,00
11.	DAK Non Fisik-Fasilitasi Penanaman Modal	787.870.000,00	715.588.080,00	90,83	747.612.260,00
12.	DAK Non Fisik-Dana Ketahanan Pangan Dan Pertanian	594.575.000,00	593.922.800,00	99,89	282.445.080,00
13.	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	0,00	14.900.730.000,00	0,00	0,00
Jumlah		**117.356.238.000,00**	**107.100.756.799,00**	**91,26**	**94.886.375.141,00**

Dana Insentif Daerah (DID)

5. 1. 1. 2. 2. Dana Insentif Daerah (DID)

Realisasi Tahun 2023: Rp15.456.199.000,00
Realisasi Tahun 2022: Rp3.821.039.000,00

Dana Insentif Daerah (DID) yang diterima Pemerintah Kabupaten Gunung Mas pada tahun 2023 dialokasi dengan anggaran sebesar Rp9.487.123.000,00 dengan realisasi sebesar Rp15.456.199.000,00 atau 162,92%.
Dana Insentif Daerah (DID) tahun 2023 merupakan bagian dari Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat yang yang bersumber dari APBN yang diberikan kepada daerah tertentu berdasarkan kriteria tertentu dengan tujuan untuk memberikan penghargaan atas perbaikan dan/ atau pencapaian kinerja tertentu di bidang tata kelola keuangan dengan alokasi anggaran berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 130 Tahun 2022 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2023 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 75 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 130 Tahun 2022 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2023.

Tabel 7.5.17 Dana Insentif Daerah (DID)

No.	Uraian	Tahun 2023			Tahun 2022
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)
1.	DID	9.487.123.000,00	15.456.199.000,00	162,92	3.821.039.000,00
Jumlah		**9.487.123.000,00**	**15.456.199.000,00**	**162,92**	**3.821.039.000,00**

DID tahun 2023 disalurkan kepada Daerah sebagai Insentif Fiskal sesuai Peraturan Menteri Keuangan nomor 171/PMK.07/2022 tentang Pengelolaan Insentif Fiskal. Insentif Fiskal adalah dana yang bersumber dari APBN yang diberikan kepada Daerah berdasarkan kriteria tertentu berupa perbaikan dan/atau pencapaian kinerja di bidang dapat berupa tata kelola keuangan Daerah, pelayanan umum pemerintahan, dan pelayanan dasar yang mendukung kebijakan strategis nasional dan/ atau pelaksanaan kebijakan fiskal nasional.
Insentif Fiskal tahun 2023 yang diterima Pemerintah Kabupaten Gunung Mas berupa Insentif Fiskal Kinerja Tahun Sebelumnya dan Insentif Fiskal Kesejahteraan Masyarakat.

Dana Desa

5. 1. 1. 2. 3. Dana Desa

Realisasi Tahun 2023: Rp95.043.161.190,00
Realisasi Tahun 2022: Rp90.215.183.720,00

Dana Desa tahun 2023 pada Pemerintah Kabupaten Gunung Mas dengan alokasi anggaran sebesar Rp95.278.770.000,00 untuk 114 Pemerintahan Desa di wilayah Pemerintah Kabupaten Gunung Mas dan terealisasi sebesar Rp95.043.161.190,00 atau mencapai 99,75%.
Dana Desa merupakan bagian dari Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat yang bersumber dari APBN yang diperuntukan bagi Desa yang ditransfer melalui APBD kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan, kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat.

Pada tahun 2023 pengalokasian anggaran berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 130 Tahun 2022 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2023 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 75 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 130 Tahun 2022 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2023.

Tabel 7.5.18 Dana Desa

No.	Uraian	Tahun 2023			Tahun 2022
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)
1.	Dana Desa	95.278.770.000,00	95.043.161.190,00	99,75	90.215.183.720,00
Jumlah		**95.278.770.000,00**	**95.043.161.190,00**	**99,75**	**90.215.183.720,00**

Pendapatan Transfer Antar Daerah

5. 1. 1. 2. 2. Pendapatan Transfer Antar Daerah

Realisasi Tahun 2023: Rp57.314.887.058,00
Realisasi Tahun 2022: Rp47.965.994.871,64

Pendapatan Transfer Antara Daerah sepanjang tahun 2023 yang diterima Pemerintah Kabupaten Gunung Mas adalah Pendapatan Bagi Hasil dari Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah berupa Pendapatan Bagi Hasil Pajak dengan total anggaran sebesar Rp58.733.909.632,00 dan total realisasi sebesar Rp57.314.887.058,00 atau mencapai 97,58%.

Tabel 7.5.19 Pendapatan Transfer Antar Daerah

No.	Uraian	Tahun 2023			Tahun 2022
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)
1.	Pendapatan Bagi Hasil	58.733.909.632,00	57.314.887.058,00	97,58	47.965.994.871,64
Jumlah		**58.733.909.632,00**	**57.314.887.058,00**	**97,58**	**47.965.994.871,64**

Pendapatan Bagi Hasil Pajak

5. 1. 1. 2. 2. 1. Pendapatan Bagi Hasil Pajak

Realisasi Tahun 2023: Rp57.314.887.058,00
Realisasi Tahun 2022: Rp47.965.994.871,64

Pendapatan Bagi Hasil Pajak tahun 2023 adalah bagian Pendapatan Bagi Hasil yang dianggarkan sebesar Rp58.733.909.632,00 dengan realisasi sebesar Rp57.314.887.058,00 atau mencapai 97,58% adalah merupakan pendapatan bagi hasil pajak dari Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah.
Adapun rincian anggaran dan realisasi Pendapatan Bagi Hasil Pajak dari Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah sepanjang tahun 2023 adalah sebagai berikut:

Tabel 7.5.20 Pendapatan Bagi Hasil Pajak

No.	Uraian	Tahun 2023			Tahun 2022
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)
1.	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor	7.280.043.803,00	7.461.975.818,68	102,50	5.561.952.369,98
2.	Pendapatan Bagi Hasil Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor	11.257.129.973,00	11.383.675.186,90	101,12	7.754.481.459,08

3.	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor	32.666.735.856,00	30.386.333.975,06	93,02	24.497.393.468,24
4.	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Air Permukaan	130.000.000,00	171.918.512,36	132,25	103.865.048,34
5.	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Rokok	7.400.000.000,00	7.910.983.565,00	106,91	10.048.302.526,00
Jumlah		**58.733.909.632,00**	**57.314.887.058,00**	**97,58**	**47.965.994.871,64**

Penjelasan dasar ketentuan peraturan penyaluran transfer Bagi Hasil Pajak oleh Provinsi Kalimantan Tengah kepada Pemerintah Kabupaten Gunung Mas tahun 2023 sebagai berikut:

1. Pendapatan Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor sebesar Rp7.461.975.818,68; Pendapatan Bagi Hasil Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor sebesar Rp11.383.675.186,90; dan Pendapatan Bagi Hasil Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor sebesar Rp30.386.333.975,06 serta Pendapatan Bagi Hasil Pajak Air Permukaan sebesar Rp171.918.512,36 berdasarkan:
   a. Surat Keputusan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 188.44/128/2022 tentang Alokasi Definitif Bagi Hasil Pajak Daerah Tahap IV Kepada Kabupaten/Kota Se Kalimantan Tengah Tahun Anggaran 2022 Yang Disalurkan Pada Tahun Anggaran 2023;
   b. Surat Keputusan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 188.44/174/2023 Tentang Alokasi Definitif Bagi Hasil Pajak Daerah Tahap V Kepada Kabupaten/Kota Se Kalimantan Tengah Tahun Anggaran 2022 Yang Disalurkan Pada Tahun Anggaran 2023;
   c. Surat Keputusan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 188.44/189/2023 Tentang Alokasi Definitif Bagi Hasil Pajak Daerah Tahap I Kepada Kabupaten/Kota Se Kalimantan Tengah Tahun Anggaran 2023;
   d. Surat Keputusan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 188.44/304/2023 Tentang Alokasi Definitif Bagi Hasil Pajak Daerah Tahap II Kepada Kabupaten/Kota Se Kalimantan Tengah Tahun Anggaran 2023;
   e. Surat Keputusan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 188.44/508/2023 Tentang Alokasi Definitif Bagi Hasil Pajak Daerah Tahap III Kepada Kabupaten/Kota Se Kalimantan Tengah Tahun Anggaran 2023;
   f. Surat Keputusan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 188.44/597/2023 Tentang Alokasi Definitif Bagi Hasil Pajak Daerah Tahap IV Kepada Kabupaten/Kota Se Kalimantan Tengah Tahun Anggaran 2023;
2. Pendapatan Bagi Hasil Pajak Rokok sebesar Rp7.910.983.565,00 berdasarkan:
   a. Surat Keputusan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 188.44/176/2023 Tentang Alokasi Definitif Pajak Rokok Kepada Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah dan Dana Bagi Hasil Pajak Rokok Kepada Pemerintah Kabupaten/Kota Se-Kalimantan Tengah Triwulan I (Satu) Tahun Anggaran 2023;

b. Surat Keputusan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 188.44/175/2023 Tentang Alokasi Definitif Pajak Rokok Kepada Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah dan Dana Bagi Hasil Pajak Rokok Kepada Pemerintah Kabupaten/Kota Se-Kalimantan Tengah Bulan Desember Tahun Anggaran 2022;
c. Surat Keputusan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 188.44/272/2023 Tentang Alokasi Definitif Pajak Rokok Kepada Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah dan Dana Bagi Hasil Pajak Rokok Kepada Pemerintah Kabupaten/Kota Se-Kalimantan Tengah Triwulan II (Dua) Tahun Anggaran 2023;
d. Surat Keputusan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 188.44/492/2023 Tentang Alokasi Definitif Pajak Rokok Kepada Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah dan Dana Bagi Hasil Pajak Rokok Kepada Pemerintah Kabupaten/Kota Se-Kalimantan Tengah Triwulan III (Tiga) Tahun Anggaran 2023;
e. Surat Keputusan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 188.44/596/2023 Tentang Alokasi Definitif Pajak Rokok Kepada Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah dan Dana Bagi Hasil Pajak Rokok Kepada Pemerintah Kabupaten/Kota Se-Kalimantan Tengah Triwulan IV (Empat) Tahun Anggaran 2023;

Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah

5. 1. 1. 3. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah
Realisasi Tahun 2023: Rp4.602.655.276,00
Realisasi Tahun 2022: Rp1.489.566.656,00

Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah sepanjang tahun 2023 dicatat sebagai Pendapatan Hibah dan Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan dengan anggaran sebesar Rp3.748.040.000,00 dan terealisasi sebesar Rp4.602.655.276,00 atau 122,80% dengan komposisi anggaran dan realisasi seperti pada tabel berikut:

Tabel 7.5.21 Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah

No.	Uraian	Tahun 2023			Tahun 2022
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)
1.	Pendapatan Hibah	0,00	0,00	0,00	5.662.000,00
2.	Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	3.748.040.000,00	4.602.655.276,00	122,80	1.483.904.656,00
Jumlah		**3.748.040.000,00**	**4.602.655.276,00**	**122,80**	**1.489.566.656,00**

Adapun rincian anggaran dan realiasasi Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah Tahun Anggaran 2023 adalah sebagai berikut:

Pendapatan Hibah

5. 1. 1. 3. 1. Pendapatan Hibah
Realisasi Tahun 2023: Rp0,00
Realisasi Tahun 2022: Rp5.662.000,00

Pendapatan Hibah tahun 2023 tidak dianggarkan dan tidak terdapat realisasi.

Tabel 7.5.22 Pendapatan Hibah

No.	Uraian	Tahun 2023			Tahun 2022
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)
1.	Pendapatan Hibah dari Pemerintah Pusat	0,00	0,00	0,00	5.662.000,00
Jumlah		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5.662.000,00**

Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan

5. 1. 1. 3. 2. Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan

Realisasi Tahun 2023: Rp4.602.655.276,00
Realisasi Tahun 2022: Rp1.483.904.656,00

Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan Tahun 2023 merupakan Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP yang ditransfer langsung oleh BPJS Kesehatan ke masing-masing rekening bank Puskesmas di lingkungan Pemerintah Kabupaten Gunung Mas dengan total realisasi sebesar Rp4.602.655.276,00

Tabel 7.5.23 Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan

No.	Uraian	Tahun 2023			Tahun 2022
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)
1.	Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP	3.748.040.000,00	4.602.655.276,00	122,80	1.483.904.656,00
Jumlah		**3.748.040.000,00**	**4.602.655.276,00**	**122,80**	**1.483.904.656,00**

Adapun rincian realisasi penerimaan Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada masing-masing FKTP tahun 2023 sebagai berikut:

Tabel 7.5.24 Rincian Penerimaan Pendapatan Dana Kapitasi JKN FKTP

No.	Nama FKTP	Realisasi Penerimaan Tahun 2023 (Rp)	Realisasi Penerimaan Tahun 2022 (Rp)
1.	RS Pratama Tumbang Talaken	113.590.930,00	0,00
2.	Puskesmas Kurun	584.286.870,00	105.032.628,00
3.	Puskesmas Tewang Pajangan	224.472.214,00	130.414.675,00
4.	Puskesmas Tampang Tumbang Anjir	376.253.018,00	200.568.203,00
5.	Puskesmas Tewah	643.844.060,00	170.417.598,00
6.	Puskesmas Kampuri	237.727.484,00	111.677.540,00
7.	Puskesmas Sepang	319.372.590,00	163.061.122,00
8.	Puskesmas Tumbang Miri	317.911.979,00	140.436.502,00
9.	Puskesmas Tumbang Rahuyan	208.720.695,00	0,00
10.	Puskesmas Tumbang Marikoi	199.494.385,00	56.326.509,00
11.	Puskesmas Tumbang Mahuroi	29.851.450,00	0,00
12.	Puskesmas Tumbang Talaken	370.655.000,00	0,00
13.	Puskesmas Tumbang Jutuh	258.658.354,00	77.188.522,00
14.	Puskesmas Tumbang Napoi	82.550.062,00	58.548.898,00
15.	Puskesmas Tumbang Masukih	65.953.435,00	33.350.496,00
16.	Puskesmas Tehang	276.064.349,00	126.257.761,00
17.	Puskesmas Rabambang	241.148.706,00	99.525.702,00
18.	Puskesmas Tumbang Lapan	52.099.695,00	11.098.500,00
Jumlah		**4.602.655.276,00**	**1.483.904.656,00**

Belanja Daerah

5. 1. 2. Belanja Daerah

Realisasi Tahun 2023: Rp1.250.220.807.539,09
Realisasi Tahun 2022: Rp1.043.348.833.608,09

Total realisasi Belanja Daerah Pemerintah Daerah Kabupaten Gunung Mas tahun 2023 adalah sebesar Rp1.250.220.807.539,09 atau mencapai 93,70% dari total alokasi anggaran sebesar Rp1.334.210.394.363,00 yang terdiri dari Belanja Operasi, Belanja Modal, dan Belanja Tak Terduga serta Belanja Transfer termasuk juga realisasi Belanja Dana Kapitasi JKN pada FKTP dari BPJS Kesehatan yang dikelola oleh 17 Puskesmas, Belanja BLUD RSUD Kuala Kurun, Belanja Dana BOS pada SD Negeri dan SMP Negeri serta Belanja BOP PAUD.

Belanja Daerah Tahun 2023 tersebut terdiri dari Belanja Operasi, Belanja Modal, dan Belanja Tak Terduga serta Belanja Transfer termasuk juga realisasi Belanja Dana Kapitasi JKN pada FKTP dari BPJS Kesehatan yang dikelola oleh 17 Puskesmas, Belanja BLUD RSUD Kuala Kurun, Belanja Dana BOS pada SD Negeri dan SMP Negeri serta Belanja BOP PAUD.

Tabel 7.5.25 Belanja Daerah

No.	Uraian	Tahun 2023			Tahun 2022
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)
1.	Belanja Operasi	849.602.808.825,00	796.281.117.535,70	93,72	652.748.256.458,61
2.	Belanja Modal	291.830.294.608,00	276.129.599.031,39	94,62	239.639.063.212,48
3.	Belanja Tidak Terduga	9.580.000.000,00	212.500.000,00	2,22	219.933.860,00
4.	Belanja Transfer	183.197.290.930,00	177.597.590.972,00	96,94	150.741.580.077,00
Jumlah		**1.334.210.394.363,00**	**1.250.220.807.539,09**	**93,70**	**1.043.348.833.608,09**

Belanja Operasi

5. 1. 2. 1. Belanja Operasi

Realisasi Tahun 2023: Rp796.281.117.535,70
Realisasi Tahun 2022: Rp652.748.256.458,61

Realisasi Belanja Operasi selama periode 1 Januari 2023 sampai dengan 31 Desember 2023 sebesar Rp796.281.117.535,70 atau mencapai 93,72% dari alokasi anggaran sebesar Rp849.602.808.825,00 yang terdiri dari Belanja Pegawai, Belanja Barang dan Jasa, Belanja Hibah, dan Belanja Bantuan Sosial.

Adapun perbandingan anggaran dengan realisasi tahun 2023 pada masing-masing jenis Belanja Operasi dapat di lihat pada tabel berikut ini:

Tabel 7.5.26 Belanja Operasi

No.	Uraian	Tahun 2023			Tahun 2022
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)
1.	Belanja Pegawai	438.640.414.118,00	412.033.313.157,00	93,93	382.850.310.978,00
2.	Belanja Barang dan Jasa	359.545.950.279,00	335.529.741.026,70	93,32	254.015.538.421,61
3.	Belanja Subsidi	100.000.000,00	0,00	0,00	0,00
4.	Belanja Hibah	51.112.378.628,00	48.514.563.352,00	94,92	15.018.602.059,00
5.	Belanja Bantuan Sosial	204.065.800,00	203.500.000,00	99,72	863.805.000,00
Jumlah		**849.602.808.825,00**	**796.281.117.535,70**	**93,72**	**652.748.256.458,61**

Belanja Pegawai

5. 1. 2. 1. 1. Belanja Pegawai

Realisasi Tahun 2023: Rp412.033.313.157,00
Realisasi Tahun 2022: Rp382.850.310.978,00

Belanja Pegawai tahun 2023 dengan realisasi sebesar Rp412.033.313.157,00 atau mencapai 93,93% dari alokasi anggaran sebesar Rp438.640.414.118,00 merupakan realisasi pembayaran gaji dan tunjangan, tambahan penghasilan, dan belanja lainnya bagi Kepala Daerah, Anggota DPRD, dan ASN Pemerintah Kabupaten Gunung Mas.

Tabel 7.5.27 Belanja Pegawai

No.	Uraian	Tahun 2023			Tahun 2022
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)
1.	Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	261.052.856.742,00	248.056.533.705,00	95,02	229.064.294.922,00
2.	Belanja Tambahan Penghasilan ASN	56.442.469.902,00	53.068.706.815,00	94,02	78.393.530.896,00
3.	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	103.290.379.507,00	93.921.377.471,00	90,93	57.915.539.115,00
4.	Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD	12.130.511.830,00	12.038.663.568,00	99,24	11.934.978.558,00
5.	Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH	596.896.025,00	313.096.859,00	52,45	267.074.599,00
6.	Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH	601.500.000,00	597.600.000,00	99,35	597.600.000,00
7.	Belanja Pegawai BOS	4.089.152.800,00	3.776.508.500,00	92,35	4.477.588.750,00
8.	Belanja Pegawai BLUD	436.647.312,00	260.826.239,00	59,73	199.704.138,00
Jumlah		**438.640.414.118,00**	**412.033.313.157,00**	**93,93**	**382.850.310.978,00**

Realisasi Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN tahun 2023 sebesar Rp93.921.377.471,00 dapat dirinci sebagai berikut:

1. Realisasi Belanja Insentif bagi ASN pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Gunung Mas terdiri dari atas:
   a. Pemungutan Pajak Daerah sebesar Rp1.106.493.750,00; dan
   b. Insentif Pemungutan Retribusi Daerah sebesar Rp160.394.715,00
2. Realisasi Belanja Tunjangan Guru PNSD sumber dana Pemerintah Pusat pada Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Gunung Mas terdiri dari:
   a. belanja Tunjangan Profesi Guru (TPG) PNSD sebesar Rp45.173.251.500,00;
   b. belanja Tunjangan Khusus Guru (TKG) PNSD sebesar Rp10.855.626.700,00; dan
   c. belanja Tambahan Penghasilan (Tamsil) Guru PNSD sebesar Rp28.502.352.800,00
3. Realisasi Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan bagi ASN terdapat pada:
   a. Dinas Kesehatan Kabupaten Gunung Mas sebesar Rp1.907.291.006,00; dan
   b. RSUD Kuala Kurun sebesar Rp5.171.036.000,00

4. Realisasi Belanja Honorarium sebesar Rp812.761.000,00 pada SKPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Gunung Mas.
5. Realisasi Belanja Pengelolaan BMD sebesar Rp232.170.000,00 pada SKPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Gunung Mas.

Belanja Barang dan Jasa

5. 1. 2. 1. 2. Belanja Barang dan Jasa

Realisasi Tahun 2023: Rp335.529.741.026,70
Realisasi Tahun 2022: Rp254.015.538.421,61

Belanja Barang dan Jasa tahun 2023 termasuk dalam komponen Belanja Operasi dengan realisasi sebesar Rp335.529.741.026,70 atau mencapai 93,32% dari alokasi anggaran sebesar Rp359.545.950.279,00
Adapun rincian anggaran dan realiasi Belanja Barang dan Jasa tahun 2023 menurut jenis belanja dapat dirinci sebagai berikut:

Tabel 7.5.28 Belanja Barang dan Jasa

No.	Uraian	Tahun 2023			Tahun 2022
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)
1.	Belanja Barang	80.754.241.213,00	77.347.122.117,04	95,78	33.228.855.442,00
2.	Belanja Jasa	142.778.105.331,00	130.354.187.507,60	91,30	114.476.532.679,50
3.	Belanja Pemeliharaan	16.447.873.360,00	15.893.590.473,35	96,63	11.726.904.695,00
4.	Belanja Perjalanan Dinas	79.113.265.557,00	75.484.971.642,00	95,41	55.956.974.851,00
5.	Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	4.830.807.918,00	4.732.883.695,00	97,97	3.925.732.057,00
6.	Belanja Barang dan Jasa BOS	17.210.811.083,00	17.043.391.119,71	99,03	16.599.923.330,11
7.	Belanja Barang dan Jasa BLUD	18.410.845.817,00	14.673.594.472,00	79,70	18.100.615.367,00
Jumlah		**359.545.950.279,00**	**335.529.741.026,70**	**93,32**	**254.015.538.421,61**

Kemudian rincian anggaran dan realiasi Belanja Barang dan Jasa tahun 2023 menurut objek belanja dapat dirinci sebagai berikut:

Tabel 7.5.29 Rincian anggaran dan realiasi Belanja Barang dan Jasa tahun 2023 menurut objek belanja

No.	Uraian	Tahun 2023			Tahun 2022
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)
1.	Belanja Barang Pakai Habis	80.743.546.873,00	77.338.214.874,04	95,78	33.227.625.442,00
2.	Belanja Barang Tak Habis	10.694.340,00	8.907.243,00	83,29	1.230.000,00
3.	Belanja Jasa Kantor	110.029.159.424,00	98.871.535.633,00	89,86	95.469.186.292,00
4.	Belanja Iuran Jaminan/	20.532.478.359,00	20.179.891.968,00	98,28	11.402.366.961,00
5.	Belanja Sewa Peralatan dan Mesin	2.032.765.486,00	1.758.018.217,00	86,48	851.361.476,00
6.	Belanja Sewa Gedung dan Bangunan	602.110.777,00	422.320.079,00	70,14	314.793.376,00
7.	Belanja Sewa Aset Tetap Lainnya	73.980.000,00	73.980.000,00	100,00	3.000.000,00
8.	Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi	2.696.645.785,00	2.657.734.948,60	98,56	1.594.303.580,50
9.	Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi	2.548.881.500,00	2.525.500.402,00	99,08	1.282.625.240,00
10.	Belanja Beasiswa Pendidikan PNS	56.000.000,00	28.000.000,00	50,00	377.658.000,00

11.	Belanja Kursus/ Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan	4.206.084.000,00	3.837.206.260,00	91,23	3.181.237.754,00
12.	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	10.641.461.684,00	10.196.185.919,00	95,82	8.899.596.599,00
13.	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	5.057.018.492,00	4.948.553.257,35	97,86	1.987.812.596,00
14.	Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi	749.393.184,00	748.851.297,00	99,93	839.495.500,00
15.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	79.113.265.557,00	75.484.971.642,00	95,41	55.956.974.851,00
16.	Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/ Pihak Lain/ Masyarakat	4.830.807.918,00	4.732.883.695,00	97,97	3.925.732.057,00
17.	Belanja Barang dan Jasa BOS	17.210.811.083,00	17.043.391.119,71	99,03	16.599.923.330,11
18.	Belanja Barang dan Jasa BLUD	18.410.845.817,00	14.673.594.472,00	79,70	18.100.615.367,00
Jumlah		**359.545.950.279,00**	**335.529.741.026,70**	**93,32**	**254.015.538.421,61**

Realisasi Belanja Barang dan Jasa BOS tahun 2023 sebesar Rp17.043.391.119,71 dapat dirinci sebagai berikut:

1. Realisasi belanja dana BOS pada Sekolah Dasar (SD) Negeri di lingkungan Pemerintah Kabupaten Gunung Mas sebesar Rp11.193.781.344,71
2. Realisasi belanja dana BOS pada Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri di lingkungan Pemerintah Kabupaten Gunung Mas sebesar Rp5.849.609.775,00

Belanja Subsidi

5. 1. 2. 1. 3. Belanja Subsidi

Realisasi Tahun 2023: Rp0,00
Realisasi Tahun 2022: Rp0,00

Tidak terdapat realisasi Belanja Subsidi selama periode 1 Januari 2023 sampai dengan 31 Desember 2023 sebesar Rp0,00 atau mencapai 0,00% dengan alokasi anggaran sebesar Rp100.000.000,00 merupakan Belanja Subsidi kepada BUMD kepada PT Bank Kalteng sebagai Kreditur atas subsidi bunga kredit petani kluster pengembangan pertanian komoditas jagung dan padi dalam Program Ketahanan Pangan Gunung Mas Jaya (Ketapang Jaya).

Tabel 7.5.30 Belanja Subsidi

No.	Uraian	Tahun 2023			Tahun 2022
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)
1.	Belanja Subsidi kepada BUMD	100.000.000,00	0,00	0,00	0,00
Jumlah		**100.000.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Belanja Hibah

5. 1. 2. 1. 4. Belanja Hibah

Realisasi Tahun 2023: Rp48.514.563.352,00
Realisasi Tahun 2022: Rp15.018.602.059,00

Belanja Hibah tahun 2023 termasuk dalam komponen Belanja Operasi dengan realisasi sebesar Rp48.514.563.352,00 atau mencapai 94,92% dari alokasi anggaran sebesar Rp51.112.378.628,00
Rincian anggaran dan realisasi Belanja Hibah menurut rincian objek belanja adalah sebagai berikut:

Tabel 7.5.31 Belanja Hibah

No.	Uraian	Tahun 2023			Tahun 2022
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)
1.	Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia	50.323.717.406,00	47.271.435.573,00	93,93	13.811.154.280,00
2.	Belanja Hibah Dana BOS	0,00	455.280.000,00	0,00	419.600.000,00
3.	Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik	788.661.222,00	787.847.779,00	99,90	787.847.779,00
Jumlah		**51.112.378.628,00**	**48.514.563.352,00**	**94,92**	**15.018.602.059,00**

Realisasi Belanja Hibah Dana BOS yang Diterima oleh Satdikdas Negeri tahun 2023 sebesar Rp455.280.000,00 merupakan realisasi belanja dana BOP PAUD pada TK Negeri di 11 Kecamatan di wilayah Pemerintah Kabupaten Gunung Mas.

Belanja Bantuan Sosial

5. 1. 2. 1. 5. Belanja Bantuan Sosial

Realisasi Tahun 2023: Rp203.500.000,00
Realisasi Tahun 2022: Rp863.805.000,00

Belanja Bantuan Sosial tahun 2023 termasuk dalam komponen Belanja Operasi dengan realisasi sebesar Rp203.500.000,00 atau mencapai 99,72% dari alokasi anggaran sebesar Rp204.065.800,00 yang merupakan realisasi Belanja Bantuan Sosial kepada Individu dan Belanja Bantuan Sosial kepada Keluarga.
Rincian anggaran dan realisasi Belanja Bantuan Sosial menurut rincian objek belanja adalah sebagai berikut:

Tabel 7.5.32 Belanja Bantuan Sosial

No.	Uraian	Tahun 2023			Tahun 2022
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)
1.	Belanja Bantuan Sosial kepada Individu	185.500.000,00	185.500.000,00	100,00	606.225.000,00
2.	Belanja Bantuan Sosial kepada Keluarga	18.565.800,00	18.000.000,00	96,95	257.580.000,00
Jumlah		**204.065.800,00**	**203.500.000,00**	**99,72**	**863.805.000,00**

Realisasi Belanja Bantuan Sosial tahun 2023 sebesar Rp203.500.000,00 dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Realisasi Belanja Bantuan Sosial kepada Individu atas Belanja Bantuan Sosial Uang yang Direncanakan kepada Individu sebesar Rp185.500.000,00 pada Sekretariat Daerah Kabupaten Gunung Mas merupakan bantuan beasiswa untuk mahasiswa dari keluarga tidak mampu.
2. Realisasi Belanja Bantuan Sosial kepada Keluarga atas Belanja Bantuan Sosial Uang yang Direncanakan kepada Keluarga sebesar Rp18.000.000,00 pada Sekretariat Daerah Kabupaten Gunung Mas merupakan bantuan uang untuk mahasiswa menyelesaikan tugas akhir/skripsi.

Belanja Modal

5. 1. 2. 2. Belanja Modal

Realisasi Tahun 2023: Rp276.129.599.031,39
Realisasi Tahun 2022: Rp239.639.063.212,48

Realisasi Belanja Modal selama periode 1 Januari 2023 sampai dengan 31 Desember 2023 sebesar Rp276.129.599.031,39 atau mencapai 94,62% dari alokasi anggaran sebesar Rp291.830.294.608,00 yang terdiri dari Belanja Modal Tanah, Belanja Modal Peralatan dan Mesin, Belanja Modal Gedung dan Bangunan, Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi serta Belanja Modal Aset Tetap Lainnya dan Belanja Modal Aset Lainnya.
Adapun perbandingan anggaran dengan realisasi tahun 2023 pada masing-masing jenis Belanja Modal dapat di lihat pada tabel berikut ini:

Tabel 7.5.33 Belanja Modal

No.	Uraian	Tahun 2023			Tahun 2022
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)
1.	Belanja Modal Tanah	362.592.000,00	359.717.000,00	99,21	549.000.000,00
2.	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	42.778.000.957,00	41.300.725.933,00	96,55	46.253.480.479,21
3.	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	63.436.569.863,00	62.575.674.211,00	98,64	65.821.245.635,27
4.	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	183.316.396.869,00	169.522.427.528,39	92,48	125.824.467.024,00
5.	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	1.208.388.328,00	1.665.999.253,00	137,87	813.030.274,00
6.	Belanja Aset Lainnya	728.346.591,00	705.055.106,00	96,80	377.839.800,00
Jumlah		**291.830.294.608,00**	**276.129.599.031,39**	**94,62**	**239.639.063.212,48**

Belanja Modal Tanah

5. 1. 2. 2. 1. Belanja Modal Tanah
Realisasi Tahun 2023: Rp359.717.000,00
Realisasi Tahun 2022: Rp549.000.000,00

Realisasi Belanja Tanah tahun 2023 sebesar Rp359.717.000,00 merupakan Belanja Modal Tanah Persil - Belanja Modal Tanah Bangunan Perumahan/ Gedung Tempat Tinggal pada Sekretariat Daerah Kabupaten Gunung Mas atas Ganti Rugi Tanah untuk Perluasan Kawasan Sirkuit Antang Sakti Jalan Seth Adji Kel. Kuala Kurun Kec. Kurun Kab. Gunung Mas.

Tabel 7.5.34 Belanja Modal Tanah

No.	Uraian	Tahun 2023			Tahun 2022
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)
1.	Belanja Modal Tanah	362.592.000,00	359.717.000,00	99,21	549.000.000,00
Jumlah		**362.592.000,00**	**359.717.000,00**	**99,21**	**549.000.000,00**

Belanja Modal Peralatan dan Mesin

5. 1. 2. 2. 2. Belanja Modal Peralatan dan Mesin
Realisasi Tahun 2023: Rp41.300.725.933,00
Realisasi Tahun 2022: Rp46.253.480.479,21

Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin sebesar Rp41.300.725.933,00 merupakan total jumlah realisasi pengadaan sepanjang tahun 2023 yang terdiri dari objek:

Tabel 7.5.35 Belanja Modal Peralatan dan Mesin

No.	Uraian	Tahun 2023			Tahun 2022
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)
1.	Belanja Modal Alat Besar	1.591.656.415,00	1.563.322.890,00	98,22	174.968.190,00
2.	Belanja Modal Alat Angkutan	13.306.214.856,00	13.131.598.710,00	98,69	13.696.564.447,00
3.	Belanja Modal Alat Bengkel dan Alat Ukur	205.109.980,00	204.020.000,00	99,47	1.552.800.000,00
4.	Belanja Modal Alat Pertanian	408.899.380,00	403.347.000,00	98,64	220.650.650,00
5.	Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga	9.511.440.782,00	8.551.676.721,00	89,91	3.085.562.436,00
6.	Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi dan Pemancar	596.506.245,00	584.691.816,00	98,02	6.596.942.402,00
7.	Belanja Modal Alat Kedokteran dan Kesehatan	9.991.411.874,00	9.937.835.731,00	99,46	9.986.815.037,00
8.	Belanja Modal Alat Laboratorium	83.994.082,00	80.655.500,00	96,03	2.109.644.000,00
9.	Belanja Modal Komputer	6.790.551.676,00	6.561.995.465,00	96,63	8.723.673.317,21
10.	Belanja Modal Alat Produksi, Pengolahan, dan Pemurnian	0,00	0,00	0,00	16.000.000,00
11.	Belanja Modal Alat Keselamatan Kerja	74.924.667,00	70.820.700,00	94,52	0,00
12.	Belanja Modal Rambu-Rambu	151.464.000,00	150.421.400,00	99,31	89.860.000,00
13.	Belanja Modal Peralatan Olahraga	65.827.000,00	60.340.000,00	91,66	0,00
Jumlah		**42.778.000.957,00**	**41.300.725.933,00**	**96,55**	**46.253.480.479,21**

Belanja Modal Gedung dan Bangunan

5. 1. 2. 2. 3. Belanja Modal Gedung dan Bangunan

Realisasi Tahun 2023: Rp62.575.674.211,00
Realisasi Tahun 2022: Rp65.821.245.635,27

Realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan sebesar Rp62.575.674.211,00 merupakan realisasi Belanja Modal Bangunan Gedung dan Belanja Modal Monumen sepanjang tahun 2023 yang terdiri dari objek:

Tabel 7.5.36 Belanja Modal Gedung dan Bangunan

No.	Uraian	Tahun 2023			Tahun 2022
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)
1.	Belanja Modal Bangunan Gedung	63.426.579.151,00	62.565.684.211,00	98,64	63.918.853.028,27
2.	Belanja Modal Monumen	9.990.712,00	9.990.000,00	99,99	0,00
3.	Belanja Modal Tugu Titik Kontrol/Pasti	0,00	0,00	0,00	1.902.392.607,00
Jumlah		**63.436.569.863,00**	**62.575.674.211,00**	**98,64**	**65.821.245.635,27**

Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi

5. 1. 2. 2. 4. Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi

Realisasi Tahun 2023: Rp169.522.427.528,39
Realisasi Tahun 2022: Rp125.824.467.024,00

Realisasi Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi sebesar Rp169.522.427.528,39 merupakan total jumlah realisasi dari Belanja Modal Jalan dan Jembatan, Belanja Modal Bangunan Air, Belanja Modal Instalasi, dan Belanja Modal Jaringan sepanjang tahun 2023 yang terdiri dari objek:

Tabel 7.5.37 Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi

No.	Uraian	Tahun 2023			Tahun 2022
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)
1.	Belanja Modal Jalan dan Jembatan	175.789.672.374,00	162.224.554.878,39	92,28	113.224.388.033,00
2.	Belanja Modal Bangunan Air	4.223.124.495,00	4.188.917.650,00	99,19	6.169.509.050,00
3.	Belanja Modal Instalasi	280.000.000,00	278.400.000,00	99,43	0,00
4.	Belanja Modal Jaringan	3.023.600.000,00	2.830.555.000,00	93,62	6.430.569.941,00
Jumlah		**183.316.396.869,00**	**169.522.427.528,39**	**92,48**	**125.824.467.024,00**

Belanja Aset Tetap Lainnya

5. 1. 2. 2. 5. Belanja Aset Tetap Lainnya

Realisasi Tahun 2023: Rp1.665.999.253,00
Realisasi Tahun 2022: Rp813.030.274,00

Realisasi Belanja Aset Tetap Lainnya sebesar Rp1.665.999.253,00 merupakan realisasi Belanja Modal Bahan Perpustakaan dan Belanja Modal Barang Bercorak Kesenian/ Kebudayaan/ Olahraga sepanjang tahun 2023 dengan objek sebagai berikut:

Tabel 7.5.38 Belanja Aset Tetap Lainnya

No.	Uraian	Tahun 2023			Tahun 2022
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)
1.	Belanja Modal Bahan Perpustakaan	1.122.641.778,00	1.580.256.253,00	140,76	646.238.649,00
2.	Belanja Modal Barang Bercorak Kesenian/ Kebudayaan/ Olahraga	85.746.550,00	85.743.000,00	100,00	165.569.625,00
3.	Belanja Modal Tanaman	0,00	0,00	0,00	1.222.000,00
Jumlah		**1.208.388.328,00**	**1.665.999.253,00**	**137,87**	**813.030.274,00**

Belanja Aset Lainnya

5. 1. 2. 2. 6. Belanja Aset Lainnya

Realisasi Tahun 2023: Rp705.055.106,00
Realisasi Tahun 2022: Rp377.839.800,00

Realisasi Belanja Aset Lainnya sebesar Rp705.055.106,00 merupakan realisasi Belanja Modal Aset Tidak Berwujud atas Lisensi dan Franchise serta Software sepanjang tahun 2023.

Tabel 7.5.39 Belanja Aset Lainnya

No.	Uraian	Tahun 2023			Tahun 2022
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)
1.	Belanja Modal Aset Tidak Berwujud	728.346.591,00	705.055.106,00	96,80	377.839.800,00
Jumlah		**728.346.591,00**	**705.055.106,00**	**96,80**	**377.839.800,00**

Belanja Tidak Terduga

5. 1. 2. 3. Belanja Tidak Terduga

Realisasi Tahun 2023: Rp212.500.000,00
Realisasi Tahun 2022: Rp219.933.860,00

Realisasi Belanja Tidak Terduga selama periode 1 Januari 2023 sampai dengan 31 Desember 2023 sebesar Rp212.500.000,00 atau mencapai 2,22% dengan alokasi anggaran sebesar Rp9.580.000.000,00 merupakan Belanja Tidak Terduga untuk kegiatan yang sifatnya tidak biasa dan tidak diharapkan berulang seperti penanggulangan bencana alam, bencana sosial, dan pengeluaran tidak terduga lainnya yang sangat diperlukan dalam rangka penyelenggaraan kewenangan Pemerintah Kabupaten Gunung Mas.

Belanja Tidak Terduga

5. 1. 2. 3. 1. Belanja Tidak Terduga

Realisasi Tahun 2023: Rp212.500.000,00
Realisasi Tahun 2022: Rp219.933.860,00

Realisasi Belanja Tidak Terduga tahun 2023 merupakan realisasi Belanja Tidak Terduga selama periode 1 Januari 2023 sampai dengan 31 Desember 2023 untuk warga masyarakat yang mengalami musibah dan bencana alam di lingkungan Pemerintah Kabupaten Gunung Mas dengan total realisasi sebesar Rp212.500.000,00 atau mencapai 2,22%.

Tabel 7.5.40 Belanja Tidak Terduga

No.	Uraian	Tahun 2023			Tahun 2022
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)
1.	Belanja Tidak Terduga	9.580.000.000,00	212.500.000,00	2,22	219.933.860,00
Jumlah		**9.580.000.000,00**	**212.500.000,00**	**2,22**	**219.933.860,00**

Realisasi Belanja Tidak Terduga tahun 2023 sebesar Rp212.500.000,00 dengan rincian pada tabel berikut ini:

Tabel 7.5.41 Rincian Belanja Tidak Terduga

No.	Uraian	Tahun 2023
1.	Pembayaran Belanja Tidak Terduga Tahun 2023 Untuk Korban Bencana Kebakaran Warga Kelurahan Kampuri dan Kelurahan Kuala Kurun (SK. Bup. No. 113 Tahun 2023)	90.000.000,00
2.	Pembayaran Belanja Tidak Terduga Tahun 2023. Untuk Korban Bencana Kebakaran Warga di Desa Batu Nyiwuh Kec. Tewah dan Korban Tenggelam di Kel. Kuala Kurun Kec. Kurun Kab. Gunung Mas (SK. Bup. No. 199 Tahun 2023)	15.000.000,00
3.	Pembayaran Belanja Tidak Terduga Tahun 2023. Untuk Korban Bencana Kebakaran Warga di Kel. Tampang Tumbang Anjir Kec. Kurun, Warga Kel. Kuala Kurun Kec. Kurun , Warga Desa Tanjung Riu Kec. Kurun Kab. Gunung Mas (SK. Bup. No. 217 dan 261 Thn 2023)	63.000.000,00
4.	Pembayaran Belanja Tidak Terduga Tahun 2023. Untuk Korban Bencana Kebakaran Kab. Gunung Mas (SK. Bup. No. 100.3.3.2/602/2023 Tanggal 22 Desember Thn 2023)	44.500.000,00
Jumlah		**212.500.000,00**

Belanja Transfer

5. 1. 2. 4. Belanja Transfer

Realisasi Tahun 2023: Rp177.597.590.972,00
Realisasi Tahun 2022: Rp150.741.580.077,00

Realisasi Belanja Transfer tahun 2023 adalah sebesar Rp177.597.590.972,00 atau mencapai 96,94% dari alokasi anggaran sebesar Rp183.197.290.930,00 dengan realisasi terdiri dari Belanja Bagi Hasil dan Belanja Bantuan Keuangan.

Tabel 7.5.42 Belanja Transfer

No.	Uraian	Tahun 2023			Tahun 2022
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)
1.	Belanja Bagi Hasil	10.655.216.000,00	5.391.902.399,00	50,60	0,00
2.	Belanja Bantuan Keuangan	172.542.074.930,00	172.205.688.573,00	99,81	150.741.580.077,00
Jumlah		**183.197.290.930,00**	**177.597.590.972,00**	**96,94**	**150.741.580.077,00**

Belanja Bagi Hasil

5. 1. 2. 4. 1. Belanja Bagi Hasil

Realisasi Tahun 2023: Rp5.391.902.399,00
Realisasi Tahun 2022: Rp0,00

Realisasi Belanja Bagi Hasil tahun 2023 merupakan realisasi Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Desa dan Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada Pemerintahan Desa selama periode 1 Januari 2023 sampai dengan 31 Desember 2023 untuk Pemerintahan Desa di lingkungan Pemerintah Kabupaten Gunung Mas dengan total realisasi sebesar Rp5.391.902.399,00 atau mencapai 50,60%.
Adapun perbandingan anggaran dengan realisasi tahun 2023 untuk masing-masing jenis Belanja Bagi Hasil pada tabel berikut ini:

Tabel 7.5.43 Belanja Bagi Hasil

No.	Uraian	Tahun 2023			Tahun 2022
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)
1.	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan	9.733.000.000,00	4.952.494.400,00	50,88	0,00
2.	Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada Pemerintahan Desa	922.216.000,00	439.407.999,00	47,65	0,00
Jumlah		**10.655.216.000,00**	**5.391.902.399,00**	**50,60**	**0,00**

Belanja Bantuan Keuangan

5. 1. 2. 4. 2. Belanja Bantuan Keuangan

Realisasi Tahun 2023: Rp172.205.688.573,00
Realisasi Tahun 2022: Rp150.741.580.077,00

Realisasi Belanja Bantuan Keuangan tahun 2023 sebesar Rp172.205.688.573,00 atau mencapai 99,81% dari alokasi anggaran sebesar Rp172.542.074.930,00 merupakan realisasi Belanja Bantuan Keuangan antar Daerah Provinsi dan Belanja Bantuan Keuangan Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa.
Adapun perbandingan anggaran dengan realisasi tahun 2023 untuk masing-masing objek Belanja Bantuan Keuangan pada tabel berikut ini:

Tabel 7.5.44 Belanja Bantuan Keuangan

No.	Uraian	Tahun 2023			Tahun 2022
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)
1.	Belanja Bantuan Keuangan antar Daerah Provinsi	485.000.030,00	485.000.000,00	100,00	245.000.000,00
2.	Belanja Bantuan Keuangan Daerah Provinsi atau Kabupaten/ Kota kepada Desa	172.057.074.900,00	171.720.688.573,00	99,80	150.496.580.077,00
Jumlah		**172.542.074.930,00**	**172.205.688.573,00**	**99,81**	**150.741.580.077,00**

Realisasi Belanja Bantuan Keuangan tahun 2023 sebesar Rp172.205.688.573,00 dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Realisasi Belanja Bantuan Keuangan antar Daerah Provinsi sebesar Rp485.000.000,00 merupakan Belanja Bantuan Keuangan Umum kepada Pemerintah Provinsi terdiri dari:
   a. realisasi pembayaran Bantuan Keuangan Kepada Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2023 untuk Sewa Transponder Satelit Tahun 2023 sebesar Rp245.000.000,00 sesuai Surat Keputusan Gubernur Kalimantan Tengah nomor: 188.44/01/2023 tanggal 2 Januari 2023.
   b. realisasi pembayaran Pendanaan Bersama Rejuvenasi/ Revitalisasi/ Renovasi Ajungan Provinsi Kalimantan Tengah di Taman Mini Indonesia Indah (TMII) Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp245.000.000,00 sesuai Surat Keputusan Gubernur Kalimantan Tengah nomor: 188.44/348/2022.
2. Realisasi Belanja Bantuan Keuangan Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa dengan total nilai sebesar Rp171.720.688.573,00 terdiri dari:
   a. realisasi Belanja Bantuan Keuangan Khusus Kabupaten/Kota kepada Desa yang bersumber dari Dana Desa merupakan penyaluran Dana Desa (DD) secara langsung ke masing-masing Rekening Kas Desa oleh KPPN kepada 114 Desa di wilayah Pemerintah Kabupaten Gunung Mas sebesar Rp95.043.161.190,00 berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 130 Tahun 2022 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2023 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 75 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 130 Tahun 2022 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2023.
   b. realisasi Belanja Bantuan Keuangan Khusus Kabupaten/Kota kepada Desa yang bersumber dari Alokasi Dana Desa merupakan penyaluran Alokasi Dana Desa (ADD) kepada 114 Desa di wilayah Pemerintah Kabupaten Gunung Mas sebesar Rp76.677.527.383,00 berdasarkan Peraturan Bupati Gunung Mas Nomor 15 Tahun 2023 tentang Tata Cara Pengalokasian dan Penetapan Rincian Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2023.

Surplus/ (Defisit) APBD

Surplus/ (Defisit)
Tahun 2023: (Rp74.101.310.602,51)
Tahun 2022: Rp40.770.271.346,41

Dari realisasi Pendapatan Daerah dan realisasi Belanja Daerah yang telah diuraikan sebelumnya, maka sepanjang Tahun Anggaran 2023 dalam APBD Kabupaten Gunung Mas terdapat defisit realisasi anggaran sebesar -Rp74.101.310.602,51 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 7.5.45 Surplus/ (Defisit)

No.	Uraian	Tahun 2023			Tahun 2022
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)
1.	Pendapatan Daerah	1.210.631.011.162,00	1.176.119.496.936,58	97,15	1.084.119.104.954,50
2.	Belanja Daerah	1.334.210.394.363,00	1.250.220.807.539,09	93,70	1.043.348.833.608,09
SURPLUS/ DEFISIT (1–2)		**(123.579.383.201,00)**	**(74.101.310.602,51)**	**59,96**	**40.770.271.346,41**

Pembiayaan Daerah (Netto)

5. 1. 3. Pembiayaan Daerah (Netto)

Realisasi Tahun 2023: Rp123.579.383.201,20
Realisasi Tahun 2022: Rp94.777.111.854,79

Realisasi Pembiayaan Netto Tahun 2023 adalah sebesar Rp123.579.383.201,20 atau mencapai 100,00% dari anggaran sebesar Rp123.579.383.201,00 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 7.5.46 Pembiayaan Daerah (Netto)

No.	Uraian	Tahun 2023			Tahun 2022
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)
1.	Penerimaan Pembiayaan	135.547.383.201,00	135.547.383.201,20	100,00	105.127.111.854,79
2.	Pengeluaran Pembiayaan	11.968.000.000,00	11.968.000.000,00	100,00	10.350.000.000,00
Jumlah Pembiayaan		**147.515.383.201,00**	**147.515.383.201,20**	**100,00**	**115.477.111.854,79**
Pembiayaan Netto (1-2)		**123.579.383.201,00**	**123.579.383.201,20**	**100,00**	**94.777.111.854,79**

Penerimaan Pembiayaan

5. 1. 3. 1. Penerimaan Pembiayaan

Realisasi Tahun 2023: Rp135.547.383.201,20
Realisasi Tahun 2022: Rp105.127.111.854,79

Anggaran Penerimaan Pembiayaan tahun 2023 ditetapkan sebesar Rp135.547.383.201,00 dengan realisasi sebesar Rp135.547.383.201,20 atau mencapai 100,00% yang merupakan realisasi dari penggunaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya (SiLPA).

Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya (SiLPA)

5. 1. 3. 1. 1. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya (SiLPA)

Realisasi Tahun 2023: Rp135.547.383.201,20
Realisasi Tahun 2022: Rp105.127.111.854,79

Realisasi Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya (SiLPA) tahun 2023 sebesar Rp135.547.383.201,20 merupakan realisasi dari Penghematan Belanja dan Sisa Belanja Lainnya. Adapun perbandingan anggaran dengan realisasi SiLPA pada tahun 2023 dapat di lihat pada tabel berikut ini:

Tabel 7.5.47 Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya (SiLPA)

No.	Uraian	Tahun 2023			Tahun 2022
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)
1.	Pelampauan Penerimaan PAD	5.248.175.974,00	0,00	0,00	0,00
2.	Pelampauan Penerimaan Pendapatan Transfer	70.278.019.024,00	0,00	0,00	0,00
3.	Penghematan Belanja	48.021.188.203,00	124.164.090.677,57	258,56	95.309.688.309,84
4.	Sisa Belanja Lainnya	12.000.000.000,00	11.383.292.523,63	94,86	9.825.651.136,95
5.	Koreksi SiLPA	0,00	0,00	0,00	(8.227.592,00)
Jumlah		**135.547.383.201,00**	**135.547.383.201,20**	**100,00**	**105.127.111.854,79**

Realisasi Penggunaan SiLPA sepanjang tahun 2023 dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Realisasi Penghematan Belanja sebesar Rp124.164.090.677,57 merupakan realisasi Penghematan Belanja Modal Gedung dan Bangunan-Bangunan Gedung.
2. Total realisasi Sisa Belanja Lainnya sebesar Rp11.383.292.523,63 dengan rincian sebagai berikut:
   a. realisasi Sisa Lebih Perhitungan Anggaran BLUD sebesar Rp10.659.694.172,90 pada RSUD Kuala Kurun;
   b. realisasi Sisa Dana BOS sebesar Rp789.400,71 pada SD dan SMP Negeri milik Pemerintah Kabupaten Gunung Mas; dan
   c. realisasi Sisa Dana Kapitasi sebesar Rp722.808.950,02 pada FKTP/ Puskesmas milik Pemerintah Kabupaten Gunung Mas.

Pengeluaran Pembiayaan

5. 1. 3. 2. Pengeluaran Pembiayaan
Realisasi Tahun 2023: Rp11.968.000.000,00
Realisasi Tahun 2022: Rp10.350.000.000,00

Alokasi anggaran Pengeluaran Pembiayaan tahun 2023 ditetapkan sebesar Rp11.968.000.000,00 dengan realisasi sebesar Rp11.968.000.000,00 atau mencapai 100,00% yang merupakan realisasi dari Penyertaan Modal Daerah.

Penyertaan Modal Daerah

5. 1. 3. 2. 1. Penyertaan Modal Daerah
Realisasi Tahun 2023: Rp11.968.000.000,00
Realisasi Tahun 2022: Rp10.350.000.000,00

Realisasi Penyertaan Modal Daerah tahun 2023 sebesar Rp11.968.000.000,00 merupakan realisasi Penyertaan Modal Daerah pada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) kepada PT Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Tengah dengan pagu penganggaran tahun 2023 sebesar Rp11.968.000.000,00 berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Gunung Mas Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2019 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Gunung Mas Pada Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Tengah.

Tabel 7.5.48 Penyertaan Modal Daerah

No.	Uraian	Tahun 2023			Tahun 2022
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)
1.	Penyertaan Modal Daerah pada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD)	11.968.000.000,00	11.968.000.000,00	100,00	10.350.000.000,00
Jumlah		**11.968.000.000,00**	**11.968.000.000,00**	**100,00**	**10.350.000.000,00**

SILPA

Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA)
Tahun 2023: Rp49.478.072.598,69
Tahun 2022: Rp135.547.383.201,20

Berdasarkan nilai realisasi Pendapatan Daerah dan Belanja Daerah, surplus serta Pembiayaan Daerah yang telah diuraikan sebelumnya, maka sepanjang Tahun Anggaran 2023 dalam APBD Kabupaten Gunung Mas terdapat Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp49.478.072.598,69 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 7.5.49 Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA)

No.	Uraian	Tahun 2023			Tahun 2022
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)
1.	Pendapatan Daerah	1.210.631.011.162,00	1.176.119.496.936,58	97,15	1.084.119.104.954,50
2.	Belanja Daerah	1.334.210.394.363,00	1.250.220.807.539,09	93,70	1.043.348.833.608,09
3.	**SURPLUS/ DEFISIT (1–2)**	**(123.579.383.201,00)**	**(74.101.310.602,51)**	**59,96**	**40.770.271.346,41**
4.	Penerimaan Pembiayaan	135.547.383.201,00	135.547.383.201,20	100,00	105.127.111.854,79
5.	Pengeluaran Pembiayaan	11.968.000.000,00	11.968.000.000,00	100,00	10.350.000.000,00
6.	**Jumlah Pembiayaan**	**147.515.383.201,00**	**147.515.383.201,20**	**100,00**	**115.477.111.854,79**
7.	**Pembiayaan Netto (4-5)**	**123.579.383.201,00**	**123.579.383.201,20**	**100,00**	**94.777.111.854,79**
8.	**Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) Tahun 2023 (3+7)**	**0,00**	**49.478.072.598,69**	**0,00**	**135.547.383.201,20**

Rincian SiLPA berdasarkan sumber dana per 31 Desember 2023 adalah sebagai berikut.

Tabel 7.5.50 Rincian SiLPA berdasarkan sumber dana

No.	Uraian	Saldo per 31 Des 2022 (Rp)	Penerimaan Tahun 2023 (Rp)	Pengeluaran Tahun 2023 (Rp)	Saldo per 31 Des 2023 (Rp)
a	b	c	d	e	f=c+d-e
1.	DAU, PAD, dan DBH (Kas yang Penggunaanya Umum)	106.992.996.951,57	823.831.492.283,58	898.077.620.136,38	32.746.869.098,77
2.	Kas yang Dibatasi Penggunaanya:				
	a. DBH DR	10.401.138.092,00	0,00	9.424.288.675,00	976.849.417,00
	b. DAK Fisik	366.733.731,00	72.770.345.330,00	73.066.667.311,00	70.411.750,00
	c. Dak Non Fisik:				
	- Tunjangan Profesi Guru (TPG) PNSD	556.908.460,00	46.201.137.540,00	44.819.754.400,00	1.938.291.600,00
	- Tambahan Penghasilan Guru	155.750.000,00	1.928.218.302,00	1.890.430.000,00	193.538.302,00
	- Tunjangan Khusus Guru (TKG)	510.020.300,00	11.098.250.000,00	11.209.591.300,00	398.679.000,00
	- BO Kesehatan (BOK) – Dinas	4.207.726.783,00	3.706.509.217,00	6.268.053.406,00	1.646.182.594,00
	- BO Keluarga Berencana (KB)	894.845.740,00	2.443.630.260,00	3.018.076.518,00	320.399.482,00
	- Dana Peningkatan Kapasitas Koperasi	29.829.200,00	288.540.800,00	318.370.000,00	0,00
	- Dana Fasilitas Penanaman Modal	42.452.720,00	427.047.280,00	446.125.100,00	23.374.900,00
	- Dana Ketahanan Pangan dan Pertanian	652.200,00	593.922.800,00	491.572.382,00	103.002.618,00
	- SILPA di Bendahara Penerimaan	5.030.500,00	35.530.428,00	5.030.500,00	35.530.428,00
	- SILPA Badan Layanan Umum Daerah	10.659.694.172,90	13.539.085.113,00	17.246.474.487,00	6.952.304.798,90
	- BOS Pendidikan	789.400,71	25.057.490.600,00	25.033.860.000,71	24.420.000,00
	- SILPA Dana Kapitasi JKN di FKTP	722.808.950,02	4.602.655.276,00	4.450.835.672,00	874.628.554,02

	- BO Kesehatan (BOK) – Puskesmas	0,00	14.900.730.000,00	11.727.215.656,00	3.173.514.344,00
	d. Kas Lainnya	6.000,00	69.712,00	0,00	75.712,00
	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA)	**135.547.383.201,20**	**1.021.424.654.941,58**	**1.107.493.965.544,09**	**49.478.072.598,69**

Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih/Kurang (LP SAL/LP SAK)

5. 2. Rincian dan Penjelasan Pos-Pos Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih/Kurang (LP SAL/LP SAK)

Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LP SAL) menyajikan informasi kenaikan atau penurunan Saldo Anggaran Lebih (SAL) tahun 2023 dibandingkan dengan tahun 2022.

Saldo Anggaran Lebih Akhir Pemerintah Kabupaten Gunung Mas pada tanggal 31 Desember 2023 sebesar Rp49.478.072.598,69 dengan rincian perolehan pada tabel berikut.

Tabel 7.5.51 Rincian dan Penjelasan Pos-Pos Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih/Kurang (LP SAL/LP SAK)

No.	Uraian	Tahun 2023 (Rp)	Tahun 2022 (Rp)
1.	Saldo Anggaran Lebih Awal	135.547.383.201,20	105.135.339.446,79
2.	Penggunaan SAL sebagai Penerimaan Pembiayaan Tahun Berjalan	135.547.383.201,20	105.127.111.854,79
	Sub Total (1 - 2)	**0,00**	**8.227.592,00**
3.	Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran (SiLPA/SiKPA)	49.478.072.598,69	135.547.383.201,20
	Sub Total (1 - 2 + 3)	**49.478.072.598,69**	**135.555.610.793,20**
4.	Koreksi Kesalahan Pembukuan Tahun Sebelumnya	0,00	(9.151.058,00)
5.	Lain-lain	0,00	923.466,00
	Saldo Anggaran Lebih Akhir (1 - 2 + 3 + 4 + 5)	**49.478.072.598,69**	**135.547.383.201,20**

Saldo Anggaran Lebih Awal

5. 2. 1. Saldo Anggaran Lebih Awal

Per 1 Januari 2023: Rp135.547.383.201,20
Per 1 Januari 2022: Rp105.135.339.446,79

Saldo Anggaran Lebih Awal tahun 2023 per 1 Januari 2023 merupakan Saldo Anggaran Lebih Akhir tahun 2022 per 31 Desember 2022 sebesar Rp135.547.383.201,20 atau juga merupakan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) Tahun 2022 menurut nilai Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Pemerintah Gunung Mas tahun 2022.

Tabel 7.5.52 Saldo Anggaran Lebih Awal

No.	Uraian	Tahun 2022 (Rp)
1.	Saldo Anggaran Lebih Awal	105.135.339.446,79
2.	Penggunaan SAL sebagai Penerimaan Pembiayaan Tahun Berjalan	105.127.111.854,79
	Sub Total (1 - 2)	**8.227.592,00**
3.	Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran (SiLPA/SiKPA)	135.547.383.201,20
	Sub Total (1 - 2 + 3)	**135.555.610.793,20**
4.	Koreksi Kesalahan Pembukuan Tahun Sebelumnya	(9.151.058,00)
5.	Lain-lain	923.466,00
	Saldo Anggaran Lebih Akhir (1 - 2 + 3 + 4 + 5)	**135.547.383.201,20**

Penggunaan SAL sebagai Penerimaan Pembiayaan Tahun Berjalan

5. 2. 2. Penggunaan SAL sebagai Penerimaan Pembiayaan Tahun Berjalan

Per 31 Desember 2023: Rp135.547.383.201,20
Per 31 Desember 2022: Rp105.127.111.854,79

Penggunaan SAL sebagai Penerimaan Pembiayaan Tahun Berjalan (2023) sebesar Rp135.547.383.201,20 merupakan realisasi penggunaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya (SiLPA) Penerimaan Pembiayaan tahun 2023 menurut nilai Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Pemerintah Gunung Mas tahun 2023 dengan rincian sebagai berikut ini:

Tabel 7.5.53 Penggunaan SAL sebagai Penerimaan Pembiayaan Tahun Berjalan

No.	Uraian	Realisasi Tahun 2023 (Rp)	Realisasi Tahun 2022 (Rp)
1.	Pelampauan Penerimaan PAD	0,00	0,00
2.	Pelampauan Penerimaan Pendapatan Transfer	0,00	0,00
3.	Penghematan Belanja	124.164.090.677,57	95.309.688.309,84
4.	Sisa Belanja Lainnya	11.383.292.523,63	9.825.651.136,95
5.	Koreksi SiLPA	0,00	(8.227.592,00)
	Jumlah	**135.547.383.201,20**	**105.127.111.854,79**

Realisasi Penggunaan SAL sebagai Penerimaan Pembiayaan sepanjang tahun 2023 dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Realisasi Penghematan Belanja sebesar Rp124.164.090.677,57 merupakan realisasi Penghematan Belanja Modal Gedung dan Bangunan-Bangunan Gedung.
2. Total realisasi Sisa Belanja Lainnya sebesar Rp11.383.292.523,63 dengan rincian sebagai berikut:
   a. realisasi Sisa Lebih Perhitungan Anggaran BLUD sebesar Rp10.659.694.172,90 pada RSUD Kuala Kurun;
   b. realisasi Sisa Dana BOS sebesar Rp789.400,71 pada SD dan SMP Negeri milik Pemerintah Kabupaten Gunung Mas; dan
   c. realisasi Sisa Dana Kapitasi sebesar Rp722.808.950,02 pada FKTP/ Puskesmas milik Pemerintah Kabupaten Gunung Mas.

Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran (SiLPA/SiKPA)

5. 2. 3. Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran (SiLPA/SiKPA)

Per 31 Desember 2023: Rp49.478.072.598,69
Per 31 Desember 2022: Rp135.547.383.201,20

Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran (SiLPA/SiKPA) sebesar Rp49.478.072.598,69 merupakan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) Tahun Anggaran 2023 menurut nilai Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Pemerintah Kabupaten Gunung Mas Tahun 2023.

Tabel 7.5.54 Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran (SiLPA/SiKPA)

No.	Uraian	Tahun 2023 (Rp)	Tahun 2022 (Rp)
1.	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) - LRA	49.478.072.598,69	135.547.383.201,20
	Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran (SiLPA/SiKPA)	**49.478.072.598,69**	**135.547.383.201,20**

Koreksi Kesalahan Pembukuan Tahun Sebelumnya

5. 2. 4. Koreksi Kesalahan Pembukuan Tahun Sebelumnya

Per 31 Desember 2023: Rp0,00
Per 31 Desember 2022: (Rp9.151.058,00)

Tidak terdapat Koreksi Kesalahan Pembukuan Tahun Sebelumnya selama periode 1 Januari 2023 sampai dengan 31 Desember 2023 sebesar Rp0,00

Tabel 7.5.55 Koreksi Kesalahan Pembukuan Tahun Sebelumnya

No.	Uraian	Tahun 2023 (Rp)	Tahun 2022 (Rp)
1.	Koreksi Kesalahan Pembukuan Tahun Sebelumnya	0,00	(9.151.058,00)
	Jumlah	**0,00**	**(9.151.058,00)**

Lain-lain SAL

5. 2. 5. Lain-lain

Per 31 Desember 2023: Rp0,00
Per 31 Desember 2022: Rp923.466,00

Tidak terdapat nilai Lain-lain SAL selama periode 1 Januari 2023 sampai dengan 31 Desember 2023 sebesar Rp0,00

Tabel 7.5.56 Lain-lain SAL

No.	Uraian	Tahun 2023 (Rp)	Tahun 2022 (Rp)
1.	Lain-lain SAL	0,00	923.466,00
	Jumlah	**0,00**	**923.466,00**

Saldo Anggaran Lebih Akhir

5. 2. 6. Saldo Anggaran Lebih Akhir

Per 31 Desember 2023: Rp49.478.072.598,69
Per 31 Desember 2022: Rp135.547.383.201,20

Saldo Anggaran Lebih Akhir tahun 2023 adalah sebesar Rp49.478.072.598,69 merupakan perhitungan dari nilai Saldo Anggaran Lebih Awal dikurangi nilai Penggunaan SAL sebagai Penerimaan Pembiayaan Tahun Berjalan ditambah nilai Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran (SiLPA/SiKPA) ditambah nilai Koreksi Kesalahan Pembukuan Tahun Sebelumnya.

Tabel 7.5.57 Saldo Anggaran Lebih Akhir

No.	Uraian	Tahun 2023 (Rp)	Tahun 2022 (Rp)
1.	Saldo Anggaran Lebih Akhir	49.478.072.598,69	135.547.383.201,20
	Jumlah	**49.478.072.598,69**	**135.547.383.201,20**

Saldo Anggaran Lebih Akhir tahun 2023 juga merupakan Saldo Akhir Kas pada Lapoaran Arus Kas tahun 2023 dan Kas Setara Kas pada Neraca tahun 2023 setelah dikurangi utang PFK pada Neraca tahun 2023 yang dapat dirinci sebagai berikut:

Tabel 7.5.58 Rincian Saldo Anggaran Lebih Akhir

No.	Uraian	Saldo Kas Tahun 2023 (Rp)	Saldo Kas Tahun 2022 (Rp)
1.	Saldo Akhir Kas di Kas Daerah	38.395.026.100,77	124.159.056.219,57
2.	Kas di Bendahara Pengeluaran	35.530.428,00	0,00
3.	Kas di Bendahara Penerimaan	0,00	5.030.500,00
4.	Kas di BLUD	6.952.304.798,90	10.659.694.172,90
5.	Kas di Bendahara FKTP	4.070.787.115,02	722.808.950,02
6.	Kas Lainnya	75.712,00	
7.	Kas di Bendahara Dana BOS	24.420.000,00	789.400,71
8.	Kas di Bendahara Dana *Block Grant* Pendidikan	0,00	6.000,00
	Jumlah Kas	**49.478.144.154,69**	**135.547.385.243,20**
9.	Utang PFK	71.556,00	2.042,00
	Saldo Anggaran Lebih Akhir	**49.478.072.598,69**	**135.547.383.201,20**

Neraca

5. 3. Rincian dan Penjelasan Pos-Pos Neraca

Neraca menggambarkan posisi keuangan Pemerintah Kabupaten Gunung Mas mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas pada 31 Desember 2023.

Aset

5. 3. 1. Aset

Per 31 Desember 2023: Rp2.217.897.818.074,30
Per 31 Desember 2022: Rp2.062.827.441.771,03

Jumlah total Aset per 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp2.217.897.818.074,30 merupakan nilai dari Aset Lancar, Investasi Jangka Panjang, Aset Tetap, Dana Cadangan, dan Aset Lainnya dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 7.5.59 Aset

No.	Uraian	Nilai Aset 2023 (Rp)	Nilai Aset 2022 (Rp)
1.	Aset Lancar	101.093.064.077,98	167.284.475.210,91
2.	Investasi Jangka Panjang	104.734.137.905,96	96.757.484.738,15
3.	Aset Tetap	1.757.728.253.449,32	1.781.973.070.818,96
4.	Aset Lainnya	254.342.362.641,04	16.812.411.003,01
	Jumlah	**2.217.897.818.074,30**	**2.062.827.441.771,03**

Aset Lancar

5. 3. 1. 1. Aset Lancar

Per 31 Desember 2023: Rp101.093.064.077,98
Per 31 Desember 2022: Rp167.284.475.210,91

Total jumlah saldo Aset Lancar Kabupaten Gunung Mas sampai dengan tanggal Neraca 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp101.093.064.077,98 terdiri dari Kas dan Setara Kas sebesar Rp49.478.144.154,69; Investasi Jangka Pendek sebesar Rp0,00; Piutang sebesar Rp11.387.553.041,63 dan Persediaan sebesar Rp40.227.366.881,66 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 7.5.60 Aset Lancar

No.	Uraian	Tahun 2023 (Rp)	Tahun 2022 (Rp)
A.	**Kas dan Setara Kas**		
1.	Kas di Kas Daerah	38.395.026.100,77	124.159.056.219,57
2.	Kas di Bendahara Penerimaan	35.530.428,00	5.030.500,00

3.	Kas di Bendahara Pengeluaran	0,00	0,00
4.	Kas di Badan Layanan Umum Daerah	6.952.304.798,90	10.659.694.172,90
5.	Kas di Bendahara BOS	24.420.000,00	789.400,71
6.	Kas di Bendahara FKTP	4.070.787.115,02	722.808.950,02
7.	Kas Lainnya	75.712,00	6.000,00
	Jumlah Kas Setara Kas	**49.478.144.154,69**	**135.547.385.243,20**
B.	**Investasi Jangka Pendek**		
1.	Investasi Jangka Pendek	0,00	10.234.288.235,00
	Jumlah Investasi Jangka Pendek	**0,00**	**10.234.288.235,00**
C.	**Piutang**		
1.	Piutang Pajak Daerah	1.729.550.343,00	1.425.180.896,00
2.	Piutang Retribusi Daerah	645.114.000,00	500.714.000,00
3.	Piutang Lain-lain PAD yang Sah	2.775.305.849,14	2.281.074.041,14
4.	Piutang Transfer Pemerintah Pusat	0,00	71.050.000,00
5.	Piutang Transfer Antar Daerah	7.506.010.211,00	0,00
6.	Piutang Lainnya	144.348.490,00	1.662.884.575,50
7.	Penyisihan Piutang	(1.412.775.851,51)	(1.211.715.936,70)
	Jumlah Piutang	**11.387.553.041,63**	**4.729.187.575,94**
D.	**Persediaan**		
1.	Persediaan	40.227.366.881,66	16.773.614.156,77
	Jumlah Persediaan	**40.227.366.881,66**	**16.773.614.156,77**
	Jumlah Aset Lancar	**101.093.064.077,98**	**167.284.475.210,91**

Kas di Kas Daerah

5. 3. 1. 1. 1. Kas di Kas Daerah

Per 31 Desember 2023: Rp38.395.026.100,77
Per 31 Desember 2022: Rp124.159.056.219,57

Saldo pada Kas di Kas Daerah per 31 Desember 2023 sebesar Rp38.395.026.100,77 adalah merupakan saldo Kas Daerah berdasarkan perhitungan Buku Kas Penerimaan dan Pengeluaran Bendahara Umum Daerah Kabupaten Gunung Mas Tahun 2023 sebagai berikut:

Tabel 7.5.61 Kas di Kas Daerah

No.	Subrincian Objek	Tahun 2023 (Rp)	Tahun 2022 (Rp)
1.	Kas di Kas Daerah	38.395.026.100,77	124.159.056.219,57
	Jumlah	**38.395.026.100,77**	**124.159.056.219,57**

Adapun hasil rekonsiliasi antara Bendahara Umum Daerah dengan Bank Kalteng Cabang Kuala Kurun dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 7.5.62 Hasil rekonsiliasi antara Bendahara Umum Daerah dengan Bank Kalteng Cabang Kuala Kurun

No.	Uraian	Saldo Tahun 2023 Menurut BUD (Rp)	Saldo Tahun 2023 Menurut Bank (Rp)
1.	Saldo Awal Kas	124.159.056.219,57	124.159.056.218,57
2.	Penerimaan	1.025.996.883.636,58	1.028.499.417.756,58
3.	Pengeluaran	1.111.760.913.755,38	1.114.263.447.874,38
4.	**Saldo Kas Sebelum Rekonsiliasi 4 = (1+2) - (3)**	**38.395.026.100,77**	**38.395.026.100,77**
5.	Selisih	0,00	0,00
6.	**Saldo Kas Setelah Rekonsiliasi 6 = (1+2) - (3+5)**	**38.395.026.100,77**	**38.395.026.100,77**

Dengan demikian perbandingan jumlah saldo Kas Daerah di rekening Bank Kalteng Cabang Kuala Kurun tahun 2023 dan tahun 2022 adalah sebagai berikut:

Tabel 7.5.63 Perbandingan Saldo Kas Daerah Tahun 2023 dan 2022

Rekening	Nomor Rekening	Kas di Kas Daerah (Rp)	
		Tahun 2023	Tahun 2022
Kas Umum Daerah (Bank Kalteng Kuala Kurun)	103-0101000085	38.395.026.100,77	124.159.056.219,57

Kas di Bendahara Penerimaan

5. 3. 1. 1. 2. Kas di Bendahara Penerimaan

Per 31 Desember 2023: Rp35.530.428,00
Per 31 Desember 2022: Rp5.030.500,00

Saldo Kas di Bendahara Penerimaan per 31 Desember 2023 sebesar Rp35.530.428,00 merupakan penerimaan Retribusi Pelayanan Kesehatan pada Bendahara Penerimaan RSUD Pratama Tumbang Talaken yang belum disetor ke Kas Daerah sampai dengan 31 Desember 2023.

Tabel 7.5.64 Kas di Bendahara Penerimaan

No.	Subrincian Objek	Tahun 2023 (Rp)	Tahun 2022 (Rp)
1.	Kas di Bendahara Penerimaan	35.530.428,00	5.030.500,00
Jumlah		**35.530.428,00**	**5.030.500,00**

Kas di Bendahara Pengeluaran

5. 3. 1. 1. 3. Kas di Bendahara Pengeluaran

Per 31 Desember 2023: Rp0,00
Per 31 Desember 2022: Rp0,00

Kas di Bendahara Pengeluaran per 31 Desember 2023 sebesar Rp0,00 merupakan posisi saldo Kas rekening koran Bendahara Pengeluaran di lingkungan Pemerintah Kabupaten Gunung Mas.

Tabel 7.5.65 Kas di Bendahara Pengeluaran

No.	Subrincian Objek	Tahun 2023 (Rp)	Tahun 2022 (Rp)
1.	Kas di Bendahara Pengeluaran	0,00	0,00
Jumlah		**0,00**	**0,00**

Dapat kami jelaskan juga bahwa per 31 Desember 2023 terdapat Sisa Kas di Rekening Bendahara Pengeluaran Dinas Pertanian Kabupaten Gunung Mas sebesar Rp33.252.500,00 yang merupakan Dana DAK Nonfisik Tahun Anggaran 2023 yang ditransfer pada tanggal 29 Desember 2023 dari BUD ke rekening bendahara pengeluaran, namun kegiatan atas penggunaan Dana DAK Nonfisik tersebut telah dilaksanakan sebelum tanggal 29 Desember 2023 dengan menggunakan uang pribadi masing-masing pelaksana kegiatan dengan didukung bukti pertanggungjawaban belanja.

Kas di Badan Layanan Umum Daerah

5. 3. 1. 1. 4. Kas di Badan Layanan Umum Daerah

Per 31 Desember 2023: Rp6.952.304.798,90
Per 31 Desember 2022: Rp10.659.694.172,90

Saldo pada Kas di Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) per 31 Desember 2023 sebesar Rp6.952.304.798,90 merupakan saldo Kas di Unit Pelaksana Teknis Rumah Sakit Umum Daerah (UPT RSUD) Kuala Kurun sebagai BLUD berdasarkan perhitungan buku kas penerimaan dan pengeluaran BLUD sesuai dengan rekening koran 1030201011696 pada PT Bank Kalteng dengan saldo pendapatan sebesar Rp13.539.085.113,00 dan saldo belanja sebesar Rp17.246.474.487,00 setelah pendapatan ditambah saldo awal sebesar Rp10.659.694.172,90

UPT RSUD Kuala Kurun sebagai BLUD berdasarkan Peraturan Bupati Gunung Mas Nomor 475 Tahun 2013 tentang Penetapan Rumah Sakit Umum Daerah Kuala Kurun Kabupaten Gunung Mas sebagai Satuan Kerja yang Menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (PPK-BLUD) dan Peraturan Bupati Gunung Mas Nomor 651 Tahun 2015 tentang Klasifikasi dan Izin Operasional Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) Rumah Sakit Umum Daerah Kuala Kurun di Kabupaten Gunung Mas.

Tabel 7.5.66 Kas di Badan Layanan Umum Daerah

No.	Subrincian Objek	Tahun 2023 (Rp)	Tahun 2022 (Rp)
1.	Kas di BLUD	6.952.304.798,90	10.659.694.172,90
Jumlah		**6.952.304.798,90**	**10.659.694.172,90**

Berikut rekapitulasi nilai pendapatan, belanja, dan saldo rekening kas nomor 1030201011696 milik UPT RSUD Kuala Kurun sebagai BLUD pada PT Bank Kalteng Cabang Kuala Kurun per 31 Desember 2023:

Tabel 7.5.67 Rekapitulasi nilai pendapatan, belanja, dan saldo Kas di BLUD

Kondisi Kas Per 31 Desember 2023			
Saldo Awal (Rp)	**Pendapatan (Rp)**	**Belanja (Rp)**	**Saldo (Rp)**
10.659.694.172,90	13.539.085.113,00	17.246.474.487,00	6.952.304.798,90

Kas di Bendahara BOS

5. 3. 1. 1. 5. Kas di Bendahara BOS

Per 31 Desember 2023: Rp24.420.000,00
Per 31 Desember 2022: Rp789.400,71

Saldo Kas di Bendahara BOS per 31 Desember 2023 sebesar Rp24.420.000,00 merupakan saldo Kas Dana BOS pada Sekolah Dasar (SD) Negeri Luwuk Andan.

Saldo Kas Dana BOS pada SDN Luwuk Andan merupakan penerimaan Tahap kedua masing-masing dari BOS Reguler dan Kinerja sebesar Rp1.920.000,00 dan Rp22.500.000,00 yang tidak dibelanjakan karena SDN Luwuk Andan sudah tidak beroperasi pada pertenggahan tahun 2023.

Dana BOS yang diterima satuan pendidikan dasar (satdikdas) negeri (SD dan SMP) tahun 2023 berupa dana BOS Reguler dan Kinerja yang ditransfer Pemerintah Pusat langsung ke rekening Bendahara Dana BOS di sekolah penerima dan dipergunakan untuk membiayai operasional sekolah tersebut sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah Pada Pemerintah Daerah dan Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 2 Tahun 2022 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini, Bantuan Operasional Sekolah, dan Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Kesetaraan.

Tabel 7.5.68 Kas di Bendahara BOS

No.	Subrincian Objek	Tahun 2023 (Rp)	Tahun 2022 (Rp)
1.	Kas Dana BOS	24.420.000,00	789.400,71
	Jumlah	**24.420.000,00**	**789.400,71**

Kas di Bendahara FKTP

5. 3. 1. 1. 6. Kas di Bendahara FKTP

Per 31 Desember 2023: Rp4.070.787.115,02
Per 31 Desember 2022: Rp722.808.950,02

Kas di Bendahara Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) per 31 Desember 2023 sebesar Rp4.070.787.115,02 terdiri dari saldo Kas Dana Kapitasi pada FKTP sebesar Rp874.628.554,02 dan saldo kas Dana BOK Puskesmas sebesar Rp3.196.158.561,00 pada 17 (tujuh belas) Puskesmas dan 1 (satu) rumah sakit tingkat pratama milik Pemerintah Kabupaten Gunung Mas, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 7.5.69 Kas di Bendahara FKTP

No.	Subrincian Objek	Tahun 2023 (Rp)	Tahun 2022 (Rp)
1.	Kas Dana Kapitasi pada FKTP	874.628.554,02	722.808.950,02
2.	Kas Dana BOK Puskesmas	3.196.158.561,00	0,00
	Jumlah	**4.070.787.115,02**	**722.808.950,02**

Pencatatan nilai Kas di Bendahara FKTP tahun 2023 sebesar Rp4.070.787.115,02 dapat dijelaskan lebih lanjut sebagai berikut:

1. Nilai saldo Kas Dana Kapitasi pada FKTP tahun 2023 per 31 Desember 2023 sebesar Rp874.628.554,02 terdiri dari saldo kas pada rekening bank atas Dana Kapitasi Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) dari BPJS sebesar Rp519.155.875,16 dan saldo kas tunai di Bendahara dana Kapitasi JKN pada FKTP sebesar Rp355.472.678,86 pada 17 (tujuh belas) Puskesmas dan 1 (satu) rumah sakit tingkat pratama milik Pemerintah Kabupaten Gunung Mas, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 7.5.70 Rincian Kas di Bendahara FKTP

No.	FKTP	Nomor Rekening	(1) Saldo Kas Tunai Dana Kapitasi JKN Tahun 2023 (Rp)	(2) Saldo Kas Rekening Dana Kapitasi JKN Tahun 2023 (Rp)	(3) Saldo Kas Akhir Tahun 2023 (Rp) (1)+(2)=(3)	Saldo Kas Akhir Tahun 2022 (Rp)
1.	RS Pratama Tumbang Talaken	1160201003636	19.415.338,00	34.394.138,00	53.809.476,00	0,00
2.	Kampuri	1030202012188	15.681.945,20	30.083.966,30	45.765.911,50	34.879.509,50
3.	Kurun	1030202012185	6.957.285,60	62.255,60	7.019.541,20	215.692.264,20
4.	Rabambang	1030202012164	5.865.341,00	30.139.495,00	36.004.836,00	33.611.079,00
5.	Sepang	1030202012190	902.426,65	1.008.865,00	1.911.291,65	2.194.438,65
6.	Tampang Tumbang Anjir	1030202012187	4.289.622,00	1.183.699,60	5.473.321,60	38.165.848,60
7.	Tehang	1030202012169	148.233.478,75	492.585,24	148.726.063,99	17.089.712,99
8.	Tewah	1030202012181	1.571.441,50	65.609.842,80	67.181.284,30	85.816.391,30
9.	Tewang Pajangan	1030202012182	2.725.775,35	29.695.611,60	32.421.386,95	27.102.494,95
10.	Tumbang Jutuh	1030202012166	94.871,95	21.469.132,25	21.564.004,20	11.005.828,20
11.	Tumbang Lapan	1130202012973	3.371.757,00	31.622.391,00	34.994.148,00	8.689.679,00
12.	Tumbang Mahuroi	1030202012162	3.031.851,00	27.849.225,00	30.881.076,00	10.958.435,00
13.	Tumbang Marikoi	1030202016819	3.405.697,68	68.570.220,40	71.975.918,08	9.765.125,08
14.	Tumbang Masukih	1030202015861	7.695.063,75	23.846.532,00	31.541.595,75	6.201.365,75
15.	Tumbang Miri	1030202012179	37.916.293,97	41.006.812,03	78.923.106,00	25.715.295,00
16.	Tumbang Napoi	1030202012192	3.259.468,85	3.106.460,80	6.365.929,65	5.319.096,65
17.	Tumbang Rahuyan	1030202012174	66.578.046,85	107.180.475,00	173.758.521,85	97.673.874,85
18.	Tumbang Talaken	1030202012170	24.476.973,76	1.834.167,54	26.311.141,30	92.928.511,30
Jumlah			**355.472.678,86**	**519.155.875,16**	**874.628.554,02**	**722.808.950,02**

2. Nilai saldo Kas Dana BOK Puskesmas tahun 2023 per 31 Desember 2023 sebesar Rp3.196.158.561,00 merupakan total jumlah sisa kas di Bendahara Dana BOK Puskesmas pada 17 (tujuh belas) Puskesmas milik Pemerintah Kabupaten Gunung Mas.

Tabel 7.5.71 Kas Dana BOK Puskesmas

No.	Uraian	Nomor Rekening	Saldo Kas Dana BOK Puskesmas Akhir Tahun 2023 (Rp)	Saldo Kas Dana BOK Puskesmas Akhir Tahun 2022 (Rp)
1.	Kampuri	1590066469	207.434.142,00	0,00
2.	Kurun	1590066492	237.049.214,00	0,00
3.	Rabambang	1590066481	154.636.151,00	0,00
4.	Sepang	1590066516	266.331.316,00	0,00
5.	Tampang Tumbang Anjir	1590066505	222.064.517,00	0,00
6.	Tehang	1590066458	70.809.355,00	0,00
7.	Tewah	1590066550	169.125.270,00	0,00
8.	Tewang Pajangan	1590066470	331.641.443,00	0,00
9.	Tumbang Jutuh	1590066538	218.519.152,00	0,00
10.	Tumbang Lapan	1590066425	279.577.028,00	0,00
11.	Tumbang Mahuroi	1590066390	82.843.400,00	0,00
12.	Tumbang Marikoi	1590066447	68.388.344,00	0,00

13.	Tumbang Masukih	1590066403	72.346.000,00	0,00
14.	Tumbang Miri	1590066527	273.928.683,00	0,00
15.	Tumbang Napoi	1590066414	107.806.336,00	0,00
16.	Tumbang Rahuyan	1590066436	175.160.977,00	0,00
17.	Tumbang Talaken	1590066549	258.497.233,00	0,00
	Jumlah		**3.196.158.561,00**	**0,00**

Kas Lainnya

5. 3. 1. 1. 7. Kas Lainnya

Per 31 Desember 2023: Rp75.712,00
Per 31 Desember 2022: Rp6.000,00

Kas Lainnya per 31 Desember 2022 sebesar Rp75.712,00 merupakan sisa dana Block Grant Pendidikan dan iuran BPJS Ketenagakerjaan Pegawai Tidak Tetap (PTT) pada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Gunung Mas.

Tabel 7.5.72 Kas Lainnya

No.	Subrincian Objek	Tahun 2023 (Rp)	Tahun 2022 (Rp)
1.	Kas Lainnya	75.712,00	6.000,00
	Jumlah	**75.712,00**	**6.000,00**

Pencatatan nilai saldo Kas Lainnya tahun 2023 sebesar Rp75.712,00 dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Sisa dana Block Grant Pendidikan sebesar Rp6.000,00 dari tahun 2016.
2. Iuran BPJS Ketenagakerjaan Pegawai Tidak Tetap (PTT) pada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Gunung Mas sebesar Rp69.712,00 yang belum disetor sampai dengan 31 Desember 2023, namun sudah dibayarkan pada tanggal 20 Februari 2024.

Investasi Jangka Pendek

5. 3. 1. 1. 8. Investasi Jangka Pendek

Per 31 Desember 2023: Rp0,00
Per 31 Desember 2022: Rp10.234.288.235,00

Tidak terdapat Investasi Jangka Pendek tahun 2023 sebesar Rp0,00 merupakan penyelesaian nilai saldo awal Investasi dalam Sertifikat Bank Indonesia (SBI) tahun 2023 atas pencatatan nilai Dana bagi Hasil Treasury Deposit Facility (DBH TDF) tahun 2022 dari Kementerian Keuangan Republik Indonesia kepada Pemerintah Kabupaten Gunung Mas.
Penyaluran untuk penyelesaian DBH TDF tahun 2022 pada tahun 2023 oleh Kementerian Keuangan Republik Indonesia berdasarkan ketentuan sebagai berikut:

1. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 138 Tahun 2023 tentang Penarikan Dana Treasury Deposit Facility Dalam Rangka Mendukung Kemampuan Keuangan Daerah Sebagai Akibat Dari Kebutuhan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023.

2. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 362 Tahun 2023 tentang Penarikan Dana Treasury Deposit Facility Dalam Rangka Mendukung Pelaksanaan Belanja Daerah Pada Akhir Tahun Anggaran 2023.

TDF adalah fasilitas yang disediakan oleh Bendahara Umum Negara (BUN) bagi Pemerintah Daerah untuk menyimpan uang di BUN sebagai bentuk penyaluran Transfer ke Daerah (TKD) nontunai berupa penyimpanan di Bank Indonesia berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 211/PMK.07/2022 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 139/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Bagi Basil, Dana Alokasi Umum, dan Dana Otonomi Khusus serta Keputusan Menteri Keuangan Nomor 10/KM.5/2022 tentang Pembukuan dan Pengelolaan Treasury Deposit Facility dalam rangka Penyaluran Dana Bagi Hasil Tahun Anggaran 2022 dalam bentuk Nontunai.

Sesuai ketentuan Pasal 47 ayat 10 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 211/PMK.07/2022 sebagaimana tersebut di atas, Pemerintah Kabupaten Gunung Mas wajib mencatat realisasi pendapatan transfer Dana Bagi Hasil (DBH) dan mencatat saldo dana TDF-TKD sebagai Kas dan Setara Kas/ Investasi Jangka Pendek (sesuai jangka waktu penyimpanan) dengan mempedomani Standar Akuntansi Pemerintah Buletin Teknis Nomor 21 Tentang Akuntansi Transfer Berbasis Akrual dan Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintah (PSAP) Pernyataan Nomor 06 Akuntansi Investasi.

Tabel 7.5.73 Investasi Jangka Pendek

No.	Subrincian Objek	Saldo Awal (Rp)	Mutasi Tahun 2023 (Rp)		Saldo Akhir (Rp)
			Bertambah	Berkurang	
1.	Investasi dalam SBI	10.234.288.235,00	0,00	10.234.288.235,00	0,00
Jumlah		**10.234.288.235,00**	**0,00**	**10.234.288.235,00**	**0,00**

Umur Investasi Jangka Pendek sampai dengan 31 Desember 2023 untuk subrincian objek di atas sebagai berikut:

Tabel 7.5.74 Umur Investasi Jangka Pendek

No.	Subrincian Objek	Tahun Pengakuan	Piutang Per 31 Des 2023	Umur Piutang			
				< 1 Thn	0 – 1 Thn	1 – 3 Thn	> 3 Thn
1.	Investasi dalam SBI	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Jumlah			**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Piutang Pajak Daerah

5. 3. 1. 1. 9. Piutang Pajak Daerah

Per 31 Desember 2023: Rp1.729.550.343,00

Per 31 Desember 2022: Rp1.425.180.896,00

Piutang Pajak Daerah tahun 2023 sebesar Rp1.729.550.343,00 merupakan jumlah saldo piutang Pajak Daerah sampai dengan tanggal 31 Desember 2023 pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Gunung Mas atas Pajak Reklame Papan/ Bilboard/ Videotron/ Megatron, Pajak Penerangan Jalan Dihasilkan Sendiri, dan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaaan Perkotaan (PBBP2) dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 7.5.75 Piutang Pajak Daerah

No.	Subrincian Objek	Saldo Awal (Rp)	Mutasi Tahun 2023 (Rp)		Saldo Akhir (Rp)
			Bertambah	Berkurang	
1.	Piutang Pajak Reklame Papan/ Bilboard/ Videotron/ Megatron	26.000.000,00	0,00	0,00	26.000.000,00
2.	Piutang Pajak Penerangan Jalan Dihasilkan Sendiri	215.390.280,00	256.588.203,00	215.390.280,00	256.588.203,00
3.	Piutang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaaan Perkotaan (PBBP2)	1.183.790.616,00	378.126.604,00	114.955.080,00	1.446.962.140,00
Jumlah		**1.425.180.896,00**	**634.714.807,00**	**330.345.360,00**	**1.729.550.343,00**

Penjelasan atas penyelesaian masing-masing subrincian objek piutang di atas adalah sebagai berikut:

1. Saldo akhir Piutang Pajak Reklame dari tahun 2011 sampai dengan tanggal 31 Desember 2023 sebesar Rp26.000.000,00 masih belum terdapat pelunasan.
2. Saldo akhir Piutang Pajak Penerangan Jalan Dihasilkan Sendiri tahun 2023 sebesar Rp256.588.203,00 terdiri dari pembayaran penyelesaian piutang tahun 2022 yang diterima pada Kas Daerah sebesar Rp215.390.280,00 kemudian terdapat penambahan piutang pada tahun 2023 sebesar Rp256.588.203,00
3. Saldo akhir Piutang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) tahun 2023 sebesar Rp1.446.962.140,00 terdiri dari pelunasan sebagian atas saldo piutang tahun 2014 sampai dengan tahun 2022 sebesar Rp114.955.080,00 dan terdapat penambahan piutang pada tahun 2023 sebesar Rp378.126.604,00
4. Umur piutang Pajak Daerah sampai dengan 31 Desember 2023 untuk masing-masing subrincian objek piutang di atas tersebut sebagai berikut:

Tabel 7.5.76 Umur piutang Pajak Daerah

No.	Subrincian Objek	Tahun Pengakuan	Piutang Per 31 Des 2023	Umur Piutang			
				< 1 Thn	0 – 1 Thn	1 – 3 Thn	> 3 Thn
1.	Piutang Pajak Reklame Papan/ Bilboard/ Videotron/ Megatron	2011	26.000.000,00	0,00	0,00	0,00	26.000.000,00
2.	Piutang Pajak Penerangan Jalan Dihasilkan Sendiri	2023	256.588.203,00	256.588.203,00	0,00	0,00	0,00
3.	Piutang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaaan Perkotaan (PBBP2)	2014 – 2023	1.446.962.140,00	0,00	378.126.604,00	526.256.451,00	542.579.085,00
Jumlah			**1.729.550.343,00**	**256.588.203,00**	**378.126.604,00**	**526.256.451,00**	**568.579.085,00**

Piutang Retribusi Daerah

5. 3. 1. 1. 10. Piutang Retribusi Daerah

Per 31 Desember 2023: Rp645.114.000,00
Per 31 Desember 2022: Rp500.714.000,00

Piutang Retribusi Daerah sampai dengan tanggal 31 Desember 2023 sebesar Rp645.114.000,00 terdiri dari piutang Retribusi Penyewaan Tanah dan Bangunan serta piutang Retribusi Pelayanan Tempat Rekreasi dan Olahraga dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 7.5.77 Piutang Retribusi Daerah

No.	Subrincian Objek	Saldo Awal (Rp)	Mutasi Tahun 2023 (Rp)		Saldo Akhir (Rp)
			Bertambah	Berkurang	
1.	Piutang Retribusi Penyewaan Tanah dan Bangunan	478.214.000,00	240.360.000,00	95.960.000,00	622.614.000,00
2.	Piutang Retribusi Pelayanan Tempat Rekreasi dan Olahraga	22.500.000,00	0,00	0,00	22.500.000,00
Jumlah		**500.714.000,00**	**240.360.000,00**	**95.960.000,00**	**645.114.000,00**

Penjelasan atas penyelesaian masing-masing subrincian objek piutang di atas adalah sebagai berikut:

1. Saldo akhir Piutang Retribusi Penyewaan Tanah dan Bangunan tahun 2023 sebesar Rp622.614.000,00 terdiri dari:

a. penyelesaian piutang sampai dengan tahun 2023 sebesar Rp95.960.000,00 atas Sewa Rumah Dinas pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Gunung Mas dan sebesar Rp5.310.000,00 dan atas Sewa Rumah Toko (Ruko) Pemerintah Daerah pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Gunung Mas sebesar Rp90.650.000,00;
b. penambahan piutang tahun 2023 sebesar Rp240.360.000,00 atas Sewa Rumah Dinas pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Gunung Mas dan sebesar Rp6.810.000,00 dan atas Sewa Rumah Toko (Ruko) Pemerintah Daerah pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Gunung Mas sebesar Rp233.550.000,00

2. Saldo akhir Piutang Retribusi Pelayanan Tempat Rekreasi dan Olahraga sampai dengan tahun 2023 sebesar Rp22.500.000,00 tidak terdapat pelunasan pada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Gunung Mas.
3. Umur piutang Retribusi Daerah sampai dengan 31 Desember 2023 untuk masing-masing subrincian objek piutang di atas sebagai berikut:

Tabel 7.5.78 Umur piutang Retribusi Daerah

No.	Subrincian Objek	Tahun Pengakuan	Piutang Per 31 Des 2023	Umur Piutang			
				< 1 Thn	0 – 1 Thn	1 – 3 Thn	> 3 Thn
1.	Piutang Retribusi Penyewaan Tanah dan Bangunan	2011 – 2023	622.614.000,00	0,00	240.360.000,00	317.952.000,00	64.302.000,00
2.	Piutang Retribusi Pelayanan Tempat Rekreasi dan Olahraga	2018	22.500.000,00	0,00	0,00	0,00	22.500.000,00
Jumlah			**645.114.000,00**	**0,00**	**240.360.000,00**	**317.952.000,00**	**86.802.000,00**

Piutang Lain-lain PAD yang Sah

5. 3. 1. 1. 11. Piutang Lain-lain PAD yang Sah

Per 31 Desember 2023: Rp2.775.305.849,14
Per 31 Desember 2022: Rp2.281.074.041,14

Piutang Lain-lain PAD yang Sah sampai dengan tanggal 31 Desember 2023 sebesar Rp2.775.305.849,14 merupakan Piutang Pendapatan Bunga atas Penempatan Uang Pemerintah Daerah, Piutang Pendapatan BLUD, dan Piutang Lain-lain PAD Yang Sah Lainnya (2022) atau Piutang Hasil Pengelolaan Dana Bergulir (2023) dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 7.5.79 Piutang Lain-lain PAD yang Sah

No.	Subrincian Objek	Saldo Awal (Rp)	Mutasi Tahun 2023 (Rp)		Saldo Akhir (Rp)
			Bertambah	Berkurang	
1.	Piutang Hasil Pengelolaan Dana Bergulir	4.575.000,00	0,00	0,00	4.575.000,00
2.	Piutang Pendapatan Bunga atas Penempatan Uang Pemerintah Daerah	2.482.126,14	0,00	0,00	2.482.126,14
3.	Piutang Penerimaan Komisi Potongan, atau Bentuk Lain	0,00	103.356.276,00	38.440.276,00	64.916.000,00
4.	Piutang Pendapatan BLUD	2.274.016.915,00	1.148.658.566,00	719.342.758,00	2.703.332.723,00
Jumlah		**2.281.074.041,14**	**1.252.014.842,00**	**757.783.034,00**	**2.775.305.849,14**

Penjelasan atas penyelesaian masing-masing subrincian objek piutang di atas adalah sebagai berikut:

1. Saldo akhir Piutang Hasil Pengelolaan Dana Bergulir sebesar Rp4.575.000,00 merupakan saldo pembagian aset likuidasi PT. Palangka Nusantara atas penyertaan modal Pemerintah Daerah Kabupaten Gunung Mas sebesar 4,5% dari total saham pada Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Gunung Mas.
2. Saldo akhir Piutang Pendapatan Bunga atas Penempatan Uang Pemerintah Daerah tahun 2023 sebesar Rp2.482.126,14 merupakan remunerasi atas saldo pokok Treasury Deposit Facility (TDF) Transfer ke Daerah (TKD) per tanggal 31 Desember 2022 sebesar Rp10.234.288.235,00 milik Pemerintah Kabupaten Gunung Mas pada Bank Indonesia menurut Surat Direktur Dana Transfer Umum Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan nomor: S-46/PK/PK.2/2023 tanggal 30 Maret 2023 hal: Rincian Penyaluran DBH Secara Non Tunai melalui TDF Tahun 2022.

   Sesuai ketentuan Pasal 47 ayat 10 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 211/PMK.07/2022 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 139/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum, dan Dana Otonomi Khusus, bahwa Pemerintah Kabupaten Gunung Mas wajib mencatat realisasi pendapatan transfer Dana Bagi Hasil (DBH) dan mencatat saldo dana TDF-TKD sebagai Kas dan Setara Kas/ Investasi Jangka Pendek (sesuai jangka waktu penyimpanan) dengan mempedomani Standar Akuntansi Pemerintah Buletin Teknis Nomor 21 Tentang Akuntansi Transfer Berbasis Akrual dan Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintah (PSAP) Pernyataan Nomor 06 Akuntansi Investasi.

3. Saldo akhir Piutang Penerimaan Komisi Potongan, atau Bentuk Lain tahun 2023 sebesar Rp64.916.000,00 pada Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Gunung Mas sampai dengan 31 Desember 2023 merupakan angsuran pengembalian uang pensiun Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Kabupaten Gunung Mas yang dikelola PT TASPEN, terdiri dari penyelesaian piutang tahun 2016 sampai dengan tahun 2022 sebesar Rp38.440.276,00 dan penambahan piutang tahun 2023 sebesar Rp103.356.276,00
4. Saldo akhir Piutang Pendapatan BLUD tahun 2023 sebesar Rp2.703.332.723,00 pada BLUD UPT RSUD Kuala Kurun sampai dengan 31 Desember 2023 merupakan saldo awal atas Jasa Layanan Umum dan Jasa Layanan Kesehatan BPJS sebesar Rp2.274.016.915,00 dikurangi penyelesaian piutang tahun 2015 sampai dengan tahun 2022 sebesar Rp719.342.758,00 dan terdapat penambahan sebesar Rp1.148.658.566,00 di tahun 2023.
4. Umur Piutang Lain-lain PAD yang Sah sampai dengan 31 Desember 2023 untuk masing-masing subrincian objek piutang di atas sebagai berikut:

Tabel 7.5.80 Umur Piutang Lain-lain PAD yang Sah

No.	Subrincian Objek	Tahun Pengakuan	Piutang Per 31 Des 2023	Umur Piutang			
				< 1 Thn	0 – 1 Thn	1 – 3 Thn	> 3 Thn
1.	Piutang Hasil Pengelolaan Dana Bergulir	2011	4.575.000,00	0,00	0,00	0,00	4.575.000,00
2.	Piutang Pendapatan Bunga atas Penempatan Uang Pemerintah Daerah	2022	2.482.126,14	0,00	2.482.126,14	0,00	0,00
3.	Piutang Penerimaan Komisi Potongan, atau Bentuk Lain	2023	64.916.000,00	64.916.000,00	0,00	0,00	0,00
4.	Piutang Pendapatan BLUD	2021 - 2023	2.703.332.723,00	2.284.377.986,00	8.335.386,00	250.351.832,00	160.267.519,00
Jumlah			**2.775.305.849,14**	**2.349.293.986,00**	**10.817.512,14**	**250.351.832,00**	**164.842.519,00**

Piutang Transfer Pemerintah Pusat

5. 3. 1. 1. 12. Piutang Transfer Pemerintah Pusat

Per 31 Desember 2023: Rp0,00

Per 31 Desember 2022: Rp71.050.000,00

Piutang Transfer Pemerintah Pusat sampai dengan tanggal 31 Desember 2023 sebesar Rp0,00 merupakan Piutang Pendapatan LainnyaÃ (2022) atau Piutang Dana Transfer Umum-DAU-DAU (2023) atas pengembalian kelebihan pembayaran gaji pensiunan Pegawai Negeri Sipil (PNS) Pemerintah Kabupaten Gunung Mas yang dikelola PT Taspen pada Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Gunung Mas.

Tabel 7.5.81 Piutang Transfer Pemerintah Pusat

No.	Subrincian Objek	Saldo Awal (Rp)	Mutasi Tahun 2023 (Rp)		Saldo Akhir (Rp)
			Bertambah	Berkurang	
1.	Piutang Pendapatan Lainnya (2022) atau Piutang Dana Transfer Umum-DAU-DAU (2023)	71.050.000,00	0,00	71.050.000,00	0,00
Jumlah		**71.050.000,00**	**0,00**	**71.050.000,00**	**0,00**

Saldo akhir Piutang Transfer Pemerintah Pusat tahun 2023 sebesar Rp0,00 karena terdapat pengurangan dengan dilakukan reklas nilai saldo ke Piutang Lain-lain PAD yang Sah subrincian objek Piutang Penerimaan Komisi Potongan, atau Bentuk Lain tahun 2023.
Adapun umur piutang Transfer Pemerintah Pusat sampai dengan 31 Desember 2023 untuk subrincian objek piutang sebagaimana tersebut di atas sebagai berikut:

Tabel 7.5.82 Umur Piutang Transfer Pemerintah Pusat

No.	Subrincian Objek	Tahun Pengakuan	Piutang Per 31 Des 2023	Umur Piutang			
				< 1 Thn	0 – 1 Thn	1 – 3 Thn	> 3 Thn
1.	Piutang Pendapatan Lainnya (2022) atau Piutang Dana Transfer Umum-DAU-DAU (2023)	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Jumlah			**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Piutang Transfer Antar Daerah

5. 3. 1. 1. 13. Piutang Transfer Antar Daerah

Per 31 Desember 2023: Rp7.506.010.211,00
Per 31 Desember 2022: Rp0,00

Piutang Transfer Antar Daerah sampai dengan tanggal 31 Desember 2023 sebesar Rp7.506.010.211,00 merupakan Piutang Bagi Hasil Pajak dari Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah tahun 2023 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 7.5.83 Piutang Transfer Antar Daerah

No.	Subrincian Objek	Saldo Awal (Rp)	Mutasi Tahun 2023 (Rp)		Saldo Akhir (Rp)
			Bertambah	Berkurang	
1.	Piutang Bagi Hasil Pajak Kendaraan	0,00	726.673.132,00	0,00	726.673.132,00
2.	Piutang Bagi Hasil Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor	0,00	893.676.371,00	0,00	893.676.371,00
3.	Piutang Bagi Hasil Pajak Bahan Bakar Kendaraan	0,00	5.880.534.516,00	0,00	5.880.534.516,00
4.	Piutang Bagi Hasil Pajak Air Permukaan	0,00	5.126.192,00	0,00	5.126.192,00
5.	Piutang Bagi Hasil Pajak	0,00	0,00	0,00	0,00
Jumlah		**0,00**	**7.506.010.211,00**	**0,00**	**7.506.010.211,00**

Piutang Lainnya

5. 3. 1. 1. 14. Piutang Lainnya

Per 31 Desember 2023: Rp144.348.490,00
Per 31 Desember 2022: Rp1.662.884.575,50

Nilai Piutang Lainnya sampai dengan tanggal 31 Desember 2023 sebesar Rp144.348.490,00 terdiri dari Bagian Lancar Tuntutan Ganti Kerugian Daerah Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain sebesar Rp9.931.450,00 an. drh. I Wayan Gunadi pada Dinas Perikanan dan Ketahanan Pangan Kabupaten Gunung Mas Tahun 2016 dan Uang Muka Pengadaan Barang/ Jasa tahun 2023 sebesar Rp134.417.040,00 pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Gunung Mas dengan rincian mutasi piutang sebagai berikut:

Tabel 7.5.84 Piutang Lainnya

No.	Jenis Piutang Lainnya	Saldo Awal (Rp)	Mutasi Tahun 2023 (Rp)		Saldo Akhir (Rp)
			Bertambah	Berkurang	
1.	Bagian Lancar Tuntutan Ganti Kerugian Daerah Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain	9.931.450,00	0,00	0,00	9.931.450,00
2.	Uang Muka Pengadaan Barang/ Jasa	1.652.953.125,50	134.417.040,00	1.652.953.125,50	134.417.040,00
Jumlah		**1.662.884.575,50**	**134.417.040,00**	**1.652.953.125,50**	**144.348.490,00**

Adapun umur Piutang Lainnya tersebut sampai dengan 31 Desember 2023 dapat diuraikan sebagai berikut:

Tabel 7.5.85 Umur Piutang Lainnya

No.	Jenis Piutang Lainnya	Tahun Pengakuan	Piutang Per 31 Des 2023	Umur Piutang			
				< 1 Thn	0 – 1 Thn	1 – 3 Thn	> 3 Thn
1.	Bagian Lancar Tuntutan Ganti Kerugian Daerah Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain	2016	9.931.450,00	0,00	0,00	0,00	9.931.450,00
2.	Uang Muka Pengadaan Barang/ Jasa	2020 – 2023	134.417.040,00	134.417.040,00	0,00	0,00	0,00
Jumlah			**144.348.490,00**	**134.417.040,00**	**0,00**	**0,00**	**9.931.450,00**

Penyisihan Piutang

5. 3. 1. 1. 15. Penyisihan Piutang

Per 31 Desember 2023: (Rp1.412.775.851,51)
Per 31 Desember 2022: (Rp1.211.715.936,70)

Jumlah Penyisihan Piutang sampai dengan tanggal 31 Desember 2023 sebesar -Rp1.412.775.851,51 terdiri dari Penyisihan Piutang Pajak Daerah, Penyisihan Piutang Retribusi, Penyisihan Piutang Lain-lain PAD yang Sah, dan Penyisihan Piutang Lainnya dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 7.5.86 Penyisihan Piutang

No.	Jenis Penyisihan Piutang	Saldo Awal (Rp)	Mutasi Tahun 2023 (Rp)		Saldo Akhir (Rp)
			Bertambah	Berkurang	
1.	Penyisihan Piutang Pajak	(693.212.047,70)	(176.307.923,20)	0,00	(869.519.970,90)
2.	Penyisihan Piutang Retribusi	(205.695.000,00)	(64.119.000,00)	0,00	(269.814.000,00)
3.	Penyisihan Piutang Lain-lain PAD yang Sah	(302.877.439,00)	(8.583.598,61)	(47.950.607,00)	(263.510.430,61)
4.	Penyisihan Piutang Lainnya-Bagian lancar Tuntutan Ganti Kerugian Daerah	(9.931.450,00)	0,00	0,00	(9.931.450,00)
Jumlah		**(1.211.715.936,70)**	**(249.010.521,81)**	**(47.950.607,00)**	**(1.412.775.851,51)**

Penjelasan atas penyisihan masing-masing rincian objek piutang di atas adalah sebagai berikut:

1. Nilai jumlah Penyisihan Piutang Pajak Daerah tahun 2023 sebesar -Rp869.519.970,90 terdiri dari:
   a. saldo akhir Penyisihan Piutang Pajak Reklame sebesar Rp26.000.000,00 dari tahun 2011 sampai dengan tahun 2023 belum terdapat pengurangan pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Gunung Mas; dan

b. saldo akhir Penyisihan Piutang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) sebesar Rp843.519.970,90 dari tahun 2014 sampai dengan tahun 2022 setelah saldo awal penyisihan piutang tahun 2023 sebesar Rp667.212.047,70 tidak terdapat pengurangan dan terdapat penambahan sebesar Rp176.307.923,20 pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Gunung Mas.

2. Nilai jumlah Penyisihan Piutang Retribusi Daerah tahun 2023 sebesar -Rp269.814.000,00 terdiri dari:
   a. saldo akhir Penyisihan Piutang Retribusi atas Retribusi Jasa Usaha-Pemakaian Kekayaan Daerah-Penyewaan Tanah dan Bangunan - Sewa Rumah Dinas sebesar Rp11.884.000,00 setelah saldo awal penyisihan piutang tahun 2023 sebesar Rp110.600.000,00 tidak terdapat pengurangan dan terdapat penambahan sebesar Rp11.884.000,00 pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Gunung Mas;
   b. saldo akhir Penyisihan Piutang Retribusi atas Retribusi Penyewaan Tanah dan Bangunan - Sewa Rumah Toko (Ruko) milik Pemerintah Kabupaten Gunung Mas sebesar Rp40.985.000,00 setelah saldo awal penyisihan piutang tahun 2023 sebesar Rp83.845.000,00 tidak terdapat pengurangan dan terdapat penambahan sebesar Rp40.985.000,00 pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Gunung Mas; dan
   c. saldo akhir Penyisihan Piutang Retribusi atas Retribusi Pelayanan Tempat Rekreasi dan Olahraga sebesar Rp11.250.000,00 dari tahun 2018 sampai dengan tahun 2023 belum terdapat pengurangan pada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Gunung Mas.
3. Nilai jumlah Penyisihan Piutang Lain-lain PAD yang Sah tahun 2023 sebesar -Rp263.510.430,61 terdiri dari:
   a. saldo akhir Penyisihan Piutang Lain-lain PAD yang Sah atas Jasa Layanan Umum, Jasa Layanan Kesehatan BPJS, dan Jasa Layanan Covid-19 sebesar Rp258.687.218,00 setelah saldo awal penyisihan piutang tahun 2023 sebesar Rp298.302.439,00 terdapat pengurangan sebesar Rp47.950.607,00 dan terdapat penambahan sebesar Rp8.335.386,00 pada BLUD UPT RSUD Kuala Kurun; dan
   b. saldo akhir Penyisihan Piutang Lain-lain PAD yang Sah atas pembagian asset likuidasi PT. Palangka Nusantara sebesar Rp4.575.000,00 terhadap penyertaan modal Pemerintah Daerah Kabupaten Gunung Mas sebesar 4,5% dari total saham sampai dengan tahun 2023 belum terdapat pengurangan pada Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Gunung Mas.

c. saldo akhir Penyisihan Piutang Lain-lain PAD yang Sah atas umur tunggakan (1 tahun - 10%) Piutang Pendapatan Bunga atas Penempatan Uang Pemerintah Daerah tahun 2023 sebesar Rp248.212,61 dari remunerasi atas saldo pokok Treasury Deposit Facility (TDF) Transfer ke Daerah (TKD) tahun 2022 sebesar Rp2.482.126,14 menurut Surat Direktur Dana Transfer Umum Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan nomor: S-46/PK/PK.2/2023 tanggal 30 Maret 2023 hal: Rincian Penyaluran DBH Secara Non Tunai melalui TDF Tahun 2022.

4. Nilai jumlah Penyisihan Piutang Lainnya merupakan saldo akhir Penyisihan Piutang Lainnya – Bagian Lancar Tuntutan Ganti Kerugian Daerah sebesar -Rp9.931.450,00 atas Tuntutan Ganti Kerugian Daerah Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atas nama drh. I Wayan Gunadi dari tahun 2016 sampai dengan tahun 2023 belum terdapat pengurangan pada Dinas Perikanan dan Ketahanan Pangan Kabupaten Gunung Mas.
5. Umur tunggakan Penyisihan Piutang Tak Tertagih dilakukan saat piutang telah melebihi jatuh tempo yang dinilai menurut kualitas penyisihan/ cadangan kerugian piutang dengan besaran persentase sesuai dengan umur piutang tertentu sesuai dengan persentase cadangan penyisihan piutang. Penggolongan kualitas piutang ditentukan berdasarkan jatuh tempo dan upaya penagihan yang dilakukan pemerintah dengan kriteria pada tabel penggolongan kualitas dan umur piutang di bawah ini:

Tabel 7.5.87 Penggolongan Kualitas dan Umur Piutang

Kualitas dan Umur Piutang	Kriteria	Penyisihan/ Taksiran Piutang Tak Tertagih
Lancar (belum jatuh tempo)	Belum jatuh tempo.	0%
Kurang Lancar (0 – 1 tahun)	1) Umur piutang s.d. 1 tahun/ 12 bulan. 2) Khusus retribusi, 1 bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Pertama tidak dilakukan pelunasan.	10%
Diragukan (1 – 3 tahun)	1) Umur piutang lebih dari 1 tahun/ 12 bulan s.d. 3 tahun/ 36 bulan. 2) Khusus retribusi, 1 bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Kedua tidak dilakukan pelunasan	50%
Macet (> 3 tahun)	1) Umur piutang di atas atau melebihi 3 tahun/ 36 bulan. 2) Khusus retribusi, 1 bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Ketiga tidak dilakukan pelunasan.	100%

6. Khusus terhadap Penyisihan Piutang Lain-lain PAD yang Sah yang berisikan Piutang Jasa Layanan Umum, Jasa Layanan Kesehatan BPJS, dan Jasa Layanan Covid-19 pada BLUD UPT RSUD Kuala Kurun untuk penyisihan piutang diperhitungkan tersendiri berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 10 Tahun 2015 tentang Sistem Akutansi Keuangan Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Kuala Kurun, sehingga umur tunggakan Penyisihan Piutang Tak Tertagih sampai dengan tanggal 31 Desember 2023 dapat diuraikan sebagai berikut:

Tabel 7.5.88 Umur tunggakan Penyisihan Piutang Tak Tertagih

No.	Rincian Penyisihan Piutang Tak Tertagih	Menunggak 0 – 1 Tahun	Menunggak 1 – 3 Tahun	Menunggak > 3 Tahun	Jumlah
1.	Penyisihan Piutang Pajak	(37.812.660,40)	(263.128.225,50)	(568.579.085,00)	(869.519.970,90)
2.	Penyisihan Piutang Retribusi	(24.036.000,00)	(158.976.000,00)	(86.802.000,00)	(269.814.000,00)
3.	Penyisihan Piutang Lain-lain PAD yang Sah	(8.335.386,00)	(250.351.832,00)	(4.575.000,00)	(263.262.218,00)
4.	Penyisihan Piutang Lainnya	(248.212,61)	0,00	(9.931.450,00)	(10.179.662,61)
Jumlah		**(70.432.259,01)**	**(672.456.057,50)**	**(669.887.535,00)**	**(1.412.775.851,51)**

Persediaan

5. 3. 1. 1. 16. Persediaan

Per 31 Desember 2023: Rp40.227.366.881,66
Per 31 Desember 2022: Rp16.773.614.156,77

Saldo Persediaan sampai dengan tanggal 31 Desember 2023 sebesar Rp40.227.366.881,66 merupakan total jumlah persediaan berdasarkan hasil stock opname persediaan pada Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Gunung Mas dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 7.5.89 Persediaan

No.	Perangkat Daerah	Saldo per 31 Desember 2023	Saldo per 31 Desember 2022
1.	DINAS KESEHATAN	1.862.313.831,00	0,00
2.	DINAS KESEHATAN	8.501.126.943,09	6.817.052.709,51
3.	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KUALA KURUN	14.479.635,88	441.002.222,90
4.	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KUALA KURUN (BLUD)	1.566.217.643,69	1.083.645.461,11
5.	DINAS PEKERJAAN UMUM	26.936.538.248,00	7.267.755.120,00
6.	DINAS SOSIAL	48.976.000,00	3.600.000,00
7.	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	170.344.200,00	163.277.750,00
8.	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	537.000,00	1.123.000,00
9.	DINAS PPENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	2.191.300,00	0,00
10.	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	374.522.130,00	625.065.120,00

11.	DINAS PERIKANAN DAN KETAHANAN PANGAN	2.194.000,00	13.937.400,00
12.	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA	0,00	1.429.680,00
13.	DINAS PERTANIAN	62.221.400,00	13.415.200,00
14.	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	5.297.500,00	0,00
15.	SEKRETARIAT DAERAH	10.150.000,00	16.695.725,00
16.	SEKRETARIAT DPRD	1.969.798,00	3.045.794,00
17.	BADAN PENDAPATAN DAERAH	6.445.500,00	3.704.800,00
18.	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	599.179.000,00	128.379.000,00
19.	INSPEKTORAT KABUPATEN	819.000,00	9.264.500,00
20.	KECAMATAN MANUHING	660.500,00	0,00
21.	KECAMATAN MANUHING RAYA	0,00	11.981.800,00
22.	KECAMATAN RUNGAN BARAT	0,00	402.500,00
23.	KECAMATAN TEWAH	505.550,00	264.250,00
24.	KECAMATAN KAHAYAN HULU UTARA	1.663.166,00	1.789.695,00
25.	KECAMATAN SEPANG	0,00	1.170.500,00
26.	KECAMATAN MIHING RAYA	1.102.700,00	1.844.680,00
27.	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	58.107.036,00	163.767.249,25
28.	KELURAHAN TEWAH	-195.200,00	0,00
Jumlah		**40.227.366.881,66**	**16.773.614.156,77**

Sedangkan uraian persediaan per subrincian obyek pada 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah sebagai berikut:

Tabel 7.5.90 Subrincian Persediaan

No.	Perangkat Daerah	Saldo per 31 Desember 2023	Saldo per 31 Desember 2022
1.	Bahan Kimia	0,00	440.000,00
2.	Bahan/Bibit Ternak/Bibit Ikan	0,00	2.183.000,00
3.	Bahan Lainnya	31.400,00	15.856.000,00
4.	Alat Tulis Kantor	170.935.148,00	171.439.532,00
5.	Kertas dan Cover	26.003.891,00	28.868.922,00
6.	Bahan Cetak	132.192.800,00	113.599.850,00
7.	Bahan Komputer	13.661.775,00	9.266.000,00
8.	Perabot Kantor	45.037.950,00	43.943.090,00
9.	Alat Listrik	4.325.000,00	1.006.500,00
10.	Alat/ Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	170.817.500,00	198.744.200,00
11.	Obat	9.443.134.745,07	7.059.570.581,22
12.	Obat-obatan Lainnya	726.588.468,59	1.470.789.311,55
13.	Persediaan untuk Dijual/ Diserahkan Kepada Masyarakat	10.389.425.125,00	377.327.750,00
14.	Persediaan Untuk Dijual/ Diserahkan Lainnya	19.105.213.079,00	7.271.534.420,00
15.	Pakan	0,00	9.045.000,00
Jumlah		**40.227.366.881,66**	**16.773.614.156,77**

Investasi Jangka Panjang

5. 3. 1. 2. Investasi Jangka Panjang

Per 31 Desember 2023: Rp104.734.137.905,96

Per 31 Desember 2022: Rp96.757.484.738,15

Total jumlah saldo Investasi Jangka Panjang Kabupaten Gunung Mas sampai dengan tanggal Neraca 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp104.734.137.905,96 merupakan total jumlah nilai Investasi Jangka Panjang Non Permanen dan Investasi Jangka Panjang Permanen dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 7.5.91 Investasi Jangka Panjang

No.	Uraian	Tahun 2023 (Rp)	Tahun 2022 (Rp)
1.	Investasi Jangka Panjang Non Permanen	0,00	0,00
2.	Investasi Jangka Panjang Permanen	104.734.137.905,96	96.757.484.738,15
Jumlah		**104.734.137.905,96**	**96.757.484.738,15**

Investasi Jangka Panjang Non Permanen

5. 3. 1. 2. 1. Investasi Jangka Panjang Non Permanen

Per 31 Desember 2023: Rp0,00
Per 31 Desember 2022: Rp0,00

Investasi Jangka Panjang Non Permanen pada tahun anggaran 2023 merupakan Dana Bergulir kepada Koperasi.

Tabel 7.5.92 Investasi Jangka Panjang Non Permanen

No.	Subrincian Objek	Saldo Awal (Rp)	Mutasi Tahun 2023 (Rp)		Saldo Akhir (Rp)
			Bertambah	Berkurang	
1.	Dana Bergulir kepada Koperasi	0,00	0,00	0,00	0,00
Jumlah		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Investasi Jangka Panjang Permanen

5. 3. 1. 2. 2. Investasi Jangka Panjang Permanen

Per 31 Desember 2023: Rp104.734.137.905,96
Per 31 Desember 2022: Rp96.757.484.738,15

Total jumlah nilai Investasi Jangka Panjang Permanen per 31 Desember 2023 sebesar Rp104.734.137.905,96 merupakan saldo Penyertaan Modal Kepada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 7.5.93 Investasi Jangka Panjang Permanen

No.	Penyertaan Modal	Saldo Awal (Rp)	Mutasi Tahun 2023 (Rp)		Saldo Akhir (Rp)
			Bertambah	Berkurang	
	Penyertaan Modal kepada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD)	**96.757.484.738,15**	**11.992.188.488,00**	**4.015.535.320,19**	**104.734.137.905,96**
1.	PD Gunung Mas Perkasa	2.556.089.626,59	24.188.488,00	0,00	2.580.278.114,59
2.	PT Bank Pembangunan Kalteng	67.724.000.000,00	11.968.000.000,00	0,00	79.692.000.000,00
3.	PDAM Tirta Bahalap Kabupaten Gunung Mas	23.477.395.111,56	0,00	4.015.535.320,19	19.461.859.791,37

4.	PT. Penjaminan Kredit Daerah Kalimantan Tengah (JAMKRIDA)	3.000.000.000,00	0,00	0,00	3.000.000.000,00
Jumlah		**96.757.484.738,15**	**11.992.188.488,00**	**4.015.535.320,19**	**104.734.137.905,96**

Untuk tahun 2023, Pemerintah Kabupaten Gunung Mas hanya melakukan Penyertaan Modal Daerah kepada PT Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Tengah sebesar Rp11.968.000.000,00 berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Gunung Mas Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2019 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Gunung Mas Pada Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Tengah.

Porsi kepemilikan modal pada masing-masing Pihak Penyertaan, sebagai berikut:

Tabel 7.5.94 Porsi kepemilikan modal pada masing-masing Pihak Penyertaan

No.	Penyertaan Modal	Persentase Kepemilikan Modal (%)
1.	PD Gunung Mas Perkasa	100
2.	PT. Bank Pembangunan Kalteng	4,71
3.	PDAM Tirta Bahalap Kabupaten Gunung Mas	93,94
4.	PT. Penjaminan Kredit Daerah Kalimantan Tengah (JAMKRIDA)	3,4

1. PD Gunung Mas Perkasa

PD Gunung Mas Perkasa merupakan Badan Usaha Milik Daerah yang didirikan berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Gunung Mas Nomor 4 Tahun 2009 tanggal 21 Juli 2009 tentang Pembentukan Perusahaan Daerah Gunung Mas Perkasa.

Penyajian nilai penyertaan modal Pemerintah Daerah Kabupaten Gunung Mas pada PD Gunung Mas Perkasa per 31 Desember 2023 dilakukan dengan metode ekuitas dengan pertimbangan presentase kepemilikan adalah sebesar 100%.

PD Gunung Mas Perkasa tahun 2023 dan 2022 menerbitkan Laporan keuangan unaudited dan tidak dilakukan pemeriksaan oleh Kantor Akuntan Publik. Penyertaan modal pada PD Gunung Mas Perkasa tahun 2023 sebesar Rp2.580.278.114,59 dengan uraian sebagai berikut.

Tabel 7.5.95 Penyertaan Modal pada PD Gunung Mas Perkasa

No.	Uraian	Tahun 2023 (Rp)	Tahun 2022 (Rp)
1.	Saldo Awal	2.556.089.626,590	2.670.022.888,590
2.	Laba (rugi) tahun berjalan	24.188.488,000	(113.933.262,000)
3.	**Saldo Akhir**	**2.580.278.114,590**	**2.556.089.626,590**

2. PT Bank Pembangunan Kalimantan Tengah

Penyertaan modal Pemerintah Kabupaten Gunung Mas pada PT Bank Pembangunan Kalimantan Tengah sebesar Rp Rp79.692.000.000,00 terdiri dari penyertaan modal sampai dengan tanggal 31 Desember 2022 sebesar RpRp67.724.000.000,00 dan pada tahun 2023 ada penambahan untuk penyertaan modal sebesar RpRp11.968.000.000,00. Penyajian nilai penyertaan modal Pemerintah Kabupaten Gunung Mas pada Bank Kalteng per 31 Desember 2023 dilakukan dengan menggunakan metode biaya karena persentase kepemilikan dibawah 20%.

Tabel 7.5.96 Penyertaan Modal pada PT Bank Pembangunan Kalimantan Tengah

No.	Uraian	Tahun 2023 (Rp)	Tahun 2022 (Rp)
1.	Saldo Awal	67.724.000.000,000	57.374.000.000,000
2.	Penambahan Penyertaan Modal	11.968.000.000,000	10.350.000.000,000
3.	**Saldo Akhir**	**79.692.000.000,000**	**67.724.000.000,000**

3. PDAM Tirta Bahalap Kabupaten Gunung Mas

Penilaian investasi permanen pada PDAM Tirta Bahalap Kabupaten Gunung Mas menggunakan metode ekuitas dengan persentase kepemilikan modal Pemerintah Kabupaten Gunung Mas sampai dengan tahun 2023 sebesar Rp101.324.880.326,75 atau mencapai 93,94% dari total penyertaan modal sebesar Rp107.855.594.226,75 dengan komposisi penyertaan modal sebagai berikut:

Tabel 7.5.97 Penyertaan Modal pada PDAM Tirta Bahalap Kabupaten Gunung Mas

No.	Nama Penyerta Modal	Tahun Buku 2023	
		Nilai (Rp)	%
1.	Pemerintah Kabupaten Gunung Mas, berupa:	101.324.880.326,75	93,94
	a. barang	77.516.172.264,00	
	b. modal disetor (uang)	23.808.708.062,75	
2.	Pemerintah Pusat	1.528.000.000,00	1,42
3.	Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah	5.002.713.900,00	4,64
	Jumlah totsl (1+2+3)	**107.855.594.226,75**	**100,00**
4.	Laba (Rugi) Tahun Berjalan	(4.274.349.466,00)	//////////////
5.	Bagian Laba (Rugi) Pemkab Gunung Mas	(4.015.535.320,19)	//////////////
6.	Akumulasi Bagian Laba (Rugi) Pemkab Gunung Mas	(41.420.726.794,14)	//////////////

Nilai penyertaan modal Pemerintah Kabupaten Gunung Mas kepada PDAM Tirta Bahalap Kabupaten Gunung Mas dari tahun 2006 sampai dengan tahun 2021 dalam bentuk uang sebesar Rp23.808.708.062,75 dan dalam bentuk barang aset sebesar Rp22.753.830.923,00 berdasarkan ketentuan Pasal 2B dan Pasal 2C Peraturan Daerah Kabupaten Gunung Mas Nomor 8 Tahun 2020 tentang Perubahan Kesembilan Atas Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2010 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Gunung Mas Pada Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kabupaten Gunung Mas.
Terhadap saldo akhir Investasi Jangka Panjang Permanen per 31 Desember 2023 pada PDAM Tirta Bahalap Kabupaten Gunung Mas sebesar Rp19.461.859.791,37 berdasarkan perhitungan sebagai berikut:

Saldo Per 31 Desember 2022			**Rp**	**23.477.395.111,56**
Penambahan:				
Tindak Lanjut audit BPK tahun lalu	Rp	-		
Perda (Penyertaan Modal 2023)	Rp	-		
Hibah dari provinsi	Rp	-		
Hibah dari satker pusat	Rp	-		
Jumlah			**Rp**	-
Pengurangan:				
Bagian Laba/(Rugi) Tahun 2023		(Rp4.015.535.320,19)		
Koreksi Bagian Laba Tahun Lalu (1,01% x laba/rugi tahun lalu)	Rp	-		
Jumlah				**(4.015.535.320,19)**
Saldo Per 31 Desember 2023			**Rp**	**19.461.859.791,37**

Bagian Laba/(Rugi) tahun 2023 sebesar -Rp4.015.535.320,19 diperoleh dengan perhitungan nilai Laba/(Rugi) Tahun Berjalan sebesar -Rp4.274.349.466,00 dikalikan dengan persentase kepemilikan modal Pemerintah Kabupaten Gunung Mas sebesar 93,94% pada PDAM Tirta Bahalap Kabupaten Gunung Mas.

4. PT. Penjaminan Kredit Daerah Kalimantan Tengah (JAMKRIDA)

Penyertaan modal Pemerintah Kabupaten Gunung Mas pada PT. Penjamin Kredit Daerah Kalimantan Tengah (JAMKRIDA) sampai dengan Tahun 2023 adalah sebesar Rp3.000.000.000,00 yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Gunung Mas Nomor 13 Tahun 2013 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Kabupaten Gunung Mas pada Perseroan Terbatas Penjaminan Kredit Daerah Kalimantan Tengah. Nilai penyertaan modal Pemerintah Kabupaten Gunung Mas pada JAMKRIDA sampai dengan per 31 Desember 2023 dilakukan dengan metode biaya karena persentase kepemilikannya di bawah 20%.

Aset Tetap

5. 3. 1. 3. Aset Tetap

Per 31 Desember 2023: Rp1.757.728.253.449,32
Per 31 Desember 2022: Rp1.781.973.070.818,96

Total jumlah saldo Aset Tetap Pemerintah Kabupaten Gunung Mas sampai dengan tanggal Neraca 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp1.757.728.253.449,32 terdiri dari Tanah, Peralatan dan Mesin, Gedung dan Bangunan, Jalan, Jaringan, dan Irigasi, Aset Tetap Lainnya, Konstruksi Dalam Pengerjaan, dan Akumulasi Penyusutan dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 7.5.98 Aset Tetap

Jenis Aset Tetap	Saldo Awal (31 Desember 2022) (Rp)	Mutasi Tahun 2023 (Rp)		Saldo Akhir 31 Desember 2023 (Rp)
		Bertambah	Berkurang	
Tanah	421.678.467.720,16	359.717.000,00	1.497.680.000,00	420.540.504.720,16
Peralatan dan Mesin	403.789.220.779,80	44.861.794.346,00	12.079.718.053,00	436.571.297.072,80
Gedung dan Bangunan	909.506.934.290,86	67.171.894.311,00	16.578.815.980,00	960.100.012.621,86
Jalan, Jaringan, dan Irigasi	2.113.453.245.615,80	256.137.224.758,07	82.681.492.993,00	2.286.908.977.380,87
Aset Tetap Lainnya	36.656.365.378,63	1.703.210.253,00	179.607.598,03	38.179.968.033,60
Konstruksi Dalam Pengerjaan	58.136.212.299,41	9.336.784.158,32	55.102.443.800,00	12.370.552.657,73
Nilai Perolehan	**3.943.220.446.084,66**	**379.570.624.826,39**	**168.119.758.424,03**	**4.154.671.312.487,02**
Akumulasi Penyusutan	**(2.161.247.375.265,70)**	**10.638.427.765,00**	**246.334.111.537,00**	**(2.396.943.059.037,70)**
Nilai Buku	**1.781.973.070.818,96**	**390.209.052.591,39**	**414.453.869.961,03**	**1.757.728.253.449,32**

Nilai Aset Tetap milik Pemerintah Kabupaten Gunung Mas per 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp1.757.728.253.449,32 merupakan perhitungan dari nilai perolehan saldo awal per 31 Desember 2022 sebesar Rp3.943.220.446.084,66 ditambah mutasi tambah aset tahun 2023 sebesar Rp379.570.624.826,39 dan dikurangi mutasi kurang aset tahun 2023 sebesar Rp168.119.758.424,03 serta ditambah dengan akumulasi penyusutan tahun 2023 sebesar -Rp2.396.943.059.037,70

Tanah

5. 3. 1. 3. 1. Tanah

Per 31 Desember 2023: Rp420.540.504.720,16
Per 31 Desember 2022: Rp421.678.467.720,16

Nilai Aset Tanah per 31 Desember 2023 sebesar Rp420.540.504.720,16 dengan rincian mutasi menurut rincian objeknya selama Tahun Anggaran 2023 adalah sebagai berikut:

Tabel 7.5.99 Rincian mutasi Aset Tetap - Tanah

Rincian Objek	Saldo Awal (31 Desember 2022) (Rp)	Mutasi Tahun 2023 (Rp)		Saldo Akhir 31 Desember 2023 (Rp)
		Bertambah	Berkurang	
Tanah Persil	86.151.188.615,00	359.717.000,00	1.497.680.000,00	85.013.225.615,00
Tanah Non Persil	600.529.400,00	0,00	0,00	600.529.400,00
Lapangan	334.926.749.705,16	0,00	0,00	334.926.749.705,16
Nilai Perolehan	**421.678.467.720,16**	**359.717.000,00**	**1.497.680.000,00**	**420.540.504.720,16**
Akumulasi Penyusutan	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Nilai Buku	**421.678.467.720,16**	**359.717.000,00**	**1.497.680.000,00**	**420.540.504.720,16**

Pencatatan nilai aset Tanah tahun 2023 sebesar Rp420.540.504.720,16 sebagaimana tersebut di atas dapat dirinci sebagai berikut:

Saldo 31 Desember 2022		**421.678.467.720,16**
Mutasi Penambahan:		
- Belanja Modal TA 2023		359.717.000,00
- Penerimaan Hibah		0,00
- Pelaksanaan dari Perjanjian/Hibah		0,00
- Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan		0,00
- Putusan Pengadilan		0,00
- Divestasi		0,00
- Hasil Inventarisasi		0,00
- Hasil Tukar Menukar		0,00
- Pembatalan Penghapusan		0,00
- Perolehan Lainnya		0,00
- Reklasifikasi karena sifat dan jenis sesuai kriteria aset tetap Tanah		0,00
- Kapitalisasi selain dari Belanja Modal		0,00
- Koreksi		0,00
- Reklasifikasi dari belanja selain Belanja Modal		0,00
	Jumlah	**359.717.000,00**
Mutasi Pengurangan:		
- Penghapusan		0,00
- Pemberian Hibah		1.497.680.000,00
- Penjualan		0,00
- Tukar Menukar		0,00
- Penyertaan Modal		0,00
- Penyerahan atau Pengalihan Status Penggunaan		0,00
- Putusan Pengadilan		0,00
- Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan		0,00
- Pemusnahan		0,00
- Sebab Lain		0,00
- Reklasifikasi karena sifat dan jenis tidak sesuai kriteria aset tetap Tanah		0,00
- Koreksi		0,00
- Di Bawah Nilai Kapitalisasi		0,00
	Jumlah	**1.497.680.000,00**
Saldo Akhir Aset Tetap Tanah		**420.540.504.720,16**
Akumulasi Penyusutan		**0,00**
Nilai Buku Aset Tetap Tanah		**420.540.504.720,16**

Penjelasan mutasi tambah Aset Tetap Tanah:

a. Belanja Modal Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp.359.717.000,00 merupakan Belanja Modal pada Perangkat Daerah yang ada di Kabupaten Gunung Mas.

Penjelasan mutasi kurang Aset Tetap Tanah:

a. Hibah keluar yaitu tanah sebesar Rp173.600.000,00 pada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Cq. Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Tengah berdasarkan Berita Acara Serah Terima Barang Milik Daerah Antara Pemerintah Kabupaten Gunung Mas dengan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Cq. Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Tengah Nomor: 000.2.3.1/684/BASTB/D/BKAD/IX/2023 dan Nomor:229/PL.255/K1/09/2023 Tanggal 11 September 2023.
b. Hibah keluar yaitu tanah sebesar Rp124.080.000,00 pada Pemerintah Kabupaten Gunung Mas kepada Majelis Jemaat GKE Sion Kuala Kurun berdasarkan Berita Acara Serah Terima Barang Milik Daerah Antara Pemerintah Kabupaten Gunung Mas dengan Majelis Jemaat GKE Sion Kuala Kurun dengan Nomor:100.3.7.1/243/BAST/D/BKAD/V/2023 dan Nomor:19/MPHJ-GKE/SN/U.IV/05/2023 Tanggal 14 Mei 2023.
c. Hibah keluar yaitu tanah sebesar Rp1.200.000.000,00 pada Sekretariat Daerah kepada Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah berdasarkan Berita Acara Serah Terima Barang Milik Daerah Antara Pemerintah Kabupaten Gunung Mas dengan Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah dengan Nomor:000.2.3.1/873/BAST/D/BKAD/XI/2023 dan Nomor:900/930/BKAD/BAST/2023 Tanggal 23 November 2023.

Peralatan dan Mesin

5. 3. 1. 3. 2. Peralatan dan Mesin

Per 31 Desember 2023: Rp436.571.297.072,80
Per 31 Desember 2022: Rp403.789.220.779,80

Nilai aset Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2023 sebesar Rp436.571.297.072,80 dengan rincian mutasi menurut objeknya selama Tahun Anggaran 2023 adalah sebagai berikut:

Tabel 7.5.100 Rincian mutasi Aset Tetap - Peralatan dan Mesin

Objek	Saldo Awal (31 Desember 2022) (Rp)	Mutasi Tahun 2023 (Rp)		Saldo Akhir 31 Desember 2023 (Rp)
		Bertambah	Berkurang	
Alat Besar	5.879.430.995,00	1.749.092.890,00	918.350.000,00	6.710.173.885,00
Alat Angkutan	110.362.439.951,00	14.727.088.710,00	5.921.629.575,00	119.167.899.086,00
Alat Bengkel dan Alat Ukur	9.175.894.126,80	207.770.000,00	200.100.000,00	9.183.564.126,80
Alat Pertanian	8.863.863.540,00	513.267.000,00	98.720.000,00	9.278.410.540,00
Alat Kantor dan Rumah Tangga	83.125.327.827,43	9.835.825.996,00	3.119.656.200,00	89.841.497.623,43
Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar	10.515.116.032,00	592.791.816,00	55.148.800,00	11.052.759.048,00
Alat Kedokteran dan Kesehatan	72.490.445.907,57	10.181.021.569,00	22.215.928,00	82.649.251.548,57
Alat Laboratorium	19.553.305.639,00	80.655.500,00	0,00	19.633.961.139,00

Komputer	75.658.677.810,00	6.681.348.765,00	1.648.863.150,00	80.691.163.425,00
Alat Eksplorasi	1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00
Alat Produksi, Pengolahan, dan Pemurnian	16.000.000,00	0,00	0,00	16.000.000,00
Alat Keselamatan Kerja	3.148.424.202,00	82.170.700,00	86.914.400,00	3.143.680.502,00
Alat Peraga	850.000,00	0,00	0,00	850.000,00
Rambu-rambu	4.171.991.565,00	150.421.400,00	6.720.000,00	4.315.692.965,00
Peralatan Olahraga	825.953.184,00	60.340.000,00	1.400.000,00	884.893.184,00
Nilai Perolehan	**403.789.220.779,80**	**44.861.794.346,00**	**12.079.718.053,00**	**436.571.297.072,80**
Akumulasi Penyusutan	**(295.012.439.755,60)**	**9.099.979.924,00**	**42.334.644.450,00**	**(328.247.104.281,60)**
Nilai Buku	**108.776.781.024,20**	**53.961.774.270,00**	**54.414.362.503,00**	**108.324.192.791,20**

Pencatatan nilai aset Peralatan dan Mesin tahun 2023 sebesar Rp436.571.297.072,80 sebagaimana tersebut di atas dapat dirinci sebagai berikut:

Saldo 31 Desember 2022		**403.789.220.779,80**
Mutasi Penambahan:		
-	Belanja Modal TA 2023	41.300.725.933,00
-	Penerimaan Hibah	1.827.699.309,00
-	Pelaksanaan dari Perjanjian/Hibah	0,00
-	Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	0,00
-	Putusan Pengadilan	0,00
-	Divestasi	0,00
-	Hasil Inventarisasi	0,00
-	Hasil Tukar Menukar	0,00
-	Pembatalan Penghapusan	0,00
-	Perolehan Lainnya	0,00
-	Pengalihan Status Penggunaan	1.699.234.067,00
-	Reklasifikasi karena sifat dan jenis sesuai kriteria aset tetap Peralatan dan Mesin	1.241.087.675,00
-	Kapitalisasi selain dari Belanja Modal	0,00
-	Koreksi	0,00
-	Reklasifikasi dari belanja selain Belanja Modal	383.798.900,00
	Jumlah	**46.452.545.884,00**
Mutasi Pengurangan:		
-	Penghapusan	0,00
-	Pemberian Hibah	805.250.000,00
-	Penjualan	0,00
-	Tukar Menukar	0,00
-	Penyertaan Modal	0,00
-	Penyerahan atau Pengalihan Status Penggunaan	1.699.234.067,00
-	Putusan Pengadilan	0,00
-	Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	0,00
-	Pemusnahan	0,00
-	Sebab Lain	0,00
-	Reklasifikasi karena sifat dan jenis tidak sesuai kriteria aset tetap Peralatan dan Mesin	9.205.429.975,00
-	Koreksi	0,00
-	Di Bawah Nilai Kapitalisasi	1.960.555.549,00
	Jumlah	**13.670.469.591,00**
Saldo Akhir Aset Tetap Peralatan dan Mesin		**436.571.297.072,80**

Akumulasi Penyusutan	**(328.247.104.281,60)**
Nilai Buku Aset Tetap Peralatan dan Mesin	**108.324.192.791,20**

Penjelasan mutasi tambah Aset Tetap Peralatan dan Mesin:

a. Belanja Modal Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp41.300.725.933,00 merupakan Belanja Modal pada Perangkat Daerah yang ada di Kabupaten Gunung Mas.
b. Penerimaan hibah sebesar Rp.663.000.000,00 yaitu pada:
   1) Dinas Lingkungan Hidup, Kehutanan dan Perhubungan berupa Alat Angkutan sebesar Rp663.000.000,00 dari Kementerian Perhubungan berdasarkan Berita Acara Serah Terima Nomor: PL.201/05/5.Q/AJ/VI/2023 dan Nomor: 000.2.5/311/BAST/D/BKAD/VI/2023 tanggal 09 Juni 2023 dan berupa Alat Angkutan sebesar Rp932.490.000,00 dari Kementerian Perhubungan berdasarkan Berita Acara Serah Terima Nomor: 550/1156/DLHKP/XII/2023.
   2) Dinas Kesehatan berupa Alat Kesehatan Umum Lainnya sebesar Rp232.209.309,00 dari Kementerian Kesehatan RI berdasarakan Berita Acara Serah Terima Nomor: KN.02.03/4.3/532.139/2023 tanggal 25 Januari 2023, Nomor: KN.01.08/H.I/10536/2023 tanggal 12 Juni 2023, Nomor: KN.02.03/4.3/3425.184/2023 tanggal 19 Juni 2023, dan Nomor: BJ.01.04/PPK.4/1034/2023 tanggal 19 Desember 2023.
c. reklasifikasi dari belanja selain Belanja Modal sebesar Rp383.798.900,00 yaitu dari:
   1) Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga dari Belanja Barang dan Jasa sebesar Rp112.561.300,00.
   2) Dinas Pekerjaan Umum dari Belanja Barang dan Jasa sebesar Rp58.125.000,00
   3) Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dari Belanja Barang dan Jasa sebesar Rp29.548.200,00
   4) Dinas Perpustakaan dan Kearsipan dari Belanja Barang dan Jasa sebesar Rp5.550.000,00
   5) Dinas Pertanian dari Belanja Barang dan Jasa sebesar Rp32.740.000,00
   6) Sekretariat Daerah dari Belanja Barang dan Jasa sebesar Rp104.100.000,00
   7) Kecamatan Kurun dari Belanja Barang dan Jasa sebesar Rp1.760.000,00
   8) Kecamatan Rungan dari Belanja Barang dan Jasa sebesar Rp12.860.000,00
   9) Kecamatan Mihing Raya dari Belanja Barang dan Jasa sebesar Rp5.054.400,00
   10 Kecamatan Rungan Hulu dari Belanja Barang dan Jasa sebesar Rp2.775.000,00
   11 Kecamatan Miri Manasa dari Belanja Barang dan Jasa sebesar Rp18.725.000,00

Penjelasan mutasi kurang Aset Tetap Peralatan dan Mesin:

a. Hibah keluar sebesar Rp805.250.000,00 yaitu Peralatan dan Mesin yang tercatat pada Badan Keuangan dan Aset Daerah kepada Kejaksaan Negeri Gunung Mas berdasarkan Berita Acara Serah Terima Nomor: 100.3.7.1/110.c/BAST/D/BKAD/II/2023 dan Nomor: BAST-3A/O.2.22/Cum/02/2023 tanggal 22 Februari 2023.
b. direklasifikasikan ke dalam daftar barang ekstrakomptabel karena nilai satuannya dibawah nilai kapitalisasi yang ditetapkan sebesar Rp1.960.555.549,00 yaitu pada:
   1) Dinas Pendidikan sebesar Rp1.614.183.500,00
   2) Dinas Kesehatan sebesar Rp21.939.399,00
   3) Rumah Sakit Umum Daerah Kuala Kurun sebesar Rp9.968.300,00
   4) Badan Keuangan dan Aset Daerah sebesar Rp123.071.250,00
   5) Satuan Polisi Pamong Praja sebesar Rp12.714.400,00
   6) Dinas Lingkungan Hidup, Kehutanan dan Perhubungan sebesar Rp500.000,00
   7) Dinas Komunikasi Informatika Persandian dan Statistika sebesar Rp1.978.900,00
   8) Dinas Pertanian sebesar Rp7.200.000,00
   9) Dinas Perindustrian dan Perdagangan sebesar Rp600.000,00
   10 Sekretariat Daerah sebesar Rp96.862.000,00
   11 Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah sebesar Rp16.160.000,00
   12 Kecamatan Sepang sebesar Rp14.407.800,00
   13 Kecamatan Mihing Raya sebesar Rp8.245.000,00
   14 Kecamatan Miri Manasa sebesar Rp32.725.000,00
c. reklasifikasi karena sifat dan jenisnya tidak sesuai dengan kriteria Peralatan dan Mesin sebesar Rp9.205.429.975,00 yaitu pada:
   1) Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga sebesar Rp155.778.000,00 ke Persediaan yang akan diserahkan pada pihak lain dan sebesar Rp8.200.000,00 ke Aset Lainnya karena rusak berat.
   2) Dinas Kesehatan sebesar Rp199.000.000,00 ke Barang Persediaan – Obat-obatan Lainnya, Rp918.000.000,00 ke Jalan, Irigasi dan Jaringan.
   3) Badan Pendapatan Daerah sebesar Rp347.035.000,00 ke Aset Lainnya karena rusak berat.
   4) Badan Keuangan dan Aset Daerah sebesar Rp1.555.007.500,00 ke Aset Lainnya karena rusak berat.
   5) Dinas Pekerjaan Umum sebesar Rp6.720.000,00 ke Persediaan - Alat/Bahan Untuk Kegiatan Kantor Lainnya.
   6) Badan Penanggulangan Bencana Daerah sebesar Rp145.086.000,00 ke Aset Lainnya karena Rusak Berat.
   7) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sebesar Rp339.300.000,00 ke Aset Lainnya karena Rusak Berat dan sebesar Rp1.298.000,00 ke Barang dan Jasa.
   8) Dinas Pertanian sebesar Rp322.256.625,00 ke Aset Lainnya karena Rusak Berat.

9) Sekretariat Daerah sebesar Rp110.889.000,00 ke Gedung dan Bangunan dan sebesar Rp3.588.230.450,00 ke Aset Lainnya karena Rusak Berat.
10 Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah sebesar Rp578.927.090,00 ke Aset Lainnya karena Rusak Berat.
11 Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebesar Rp18.474.700,00 ke Aset Lainnya karena Rusak Berat.
12 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik sebesar Rp30.098.000,00 ke Aset Lainnya karena Rusak Berat.
13 Rumah Sakit Umum Daerah Kurun sebesar Rp92.920.000,00 ke Aset Lainnya karena Rusak Berat.
14 Dinas Transmigrasi, Tenaga Kerja dan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah sebesar Rp90.601.500,00 ke Aset
15 Kecamatan Kahayan Hulu Utara sebesar Rp446.089.000,00 ke Aset Lainnya karena Rusak Berat.
16 Kecamatan Sepang sebesar Rp14.875.000,00 ke Aset Lainnya karena Rusak Berat.
17 Kecamatan Manuhing sebesar Rp8.431.560,00 ke Barang dan Jasa.
18 Kecamatan Rungan Hulu sebesar Rp228.212.550,00 ke Aset Lainnya karena Rusak Berat.

Gedung dan Bangunan

5. 3. 1. 3. 3. Gedung dan Bangunan

Per 31 Desember 2023: Rp960.100.012.621,86
Per 31 Desember 2022: Rp909.506.934.290,86

Nilai aset Gedung dan Bangunan per 31 Desember 2023 sebesar Rp960.100.012.621,86 dengan rincian mutasi menurut rincian objeknya selama Tahun Anggaran 2023 adalah sebagai berikut:

Tabel 7.5.101 Rincian mutasi Aset Tetap - Gedung dan Bangunan

Rincian Objek	Saldo Awal (31 Desember 2022) (Rp)	Mutasi Tahun 2023 (Rp)		Saldo Akhir 31 Desember 2023 (Rp)
		Bertambah	Berkurang	
Bangunan Gedung Tempat Kerja	800.718.812.346,77	66.075.180.873,00	15.791.212.980,00	851.002.780.239,77
Bangunan Gedung Tempat Tinggal	86.974.162.967,42	918.514.080,00	787.108.000,00	87.105.569.047,42
Candi/Tugu Peringatan/Prasasti	18.477.143.800,12	152.958.000,00	495.000,00	18.629.606.800,12
Bangunan Menara Perambuan	254.467.000,00	0,00	0,00	254.467.000,00
Tugu/Tanda Batas	3.082.348.176,55	25.241.358,00	0,00	3.107.589.534,55
Nilai Perolehan	**909.506.934.290,86**	**67.171.894.311,00**	**16.578.815.980,00**	**960.100.012.621,86**
Akumulasi Penyusutan	**(417.322.494.311,00)**	**1.506.333.721,00**	**41.890.058.924,00**	**(457.706.219.514,00)**
Nilai Buku	**492.184.439.979,86**	**68.678.228.032,00**	**58.468.874.904,00**	**502.393.793.107,86**

Pencatatan nilai aset Gedung dan Bangunan tahun 2023 sebesar Rp960.100.012.621,86 sebagaimana tersebut di atas dapat dirinci sebagai berikut:

Saldo 31 Desember 2022	**909.506.934.290,86**
Mutasi Penambahan:	
- Belanja Modal TA 2023	62.575.674.211,00
- Penerimaan Hibah	0,00

-	Pelaksanaan dari Perjanjian/Hibah	0,00
-	Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	0,00
-	Putusan Pengadilan	0,00
-	Divestasi	0,00
-	Hasil Inventarisasi	0,00
-	Hasil Tukar Menukar	0,00
-	Pembatalan Penghapusan	0,00
-	Perolehan Lainnya	0,00
-	Pengalihan Status Penggunaan	2.711.200.150,00
-	Reklasifikasi karena sifat dan jenis sesuai kriteria aset tetap Gedung dan Bangunan	1.705.737.205,00
-	Kapitalisasi selain dari Belanja Modal	0,00
-	Koreksi	0,00
-	Reklasifikasi dari belanja selain Belanja Modal	0,00
	Jumlah	**66.992.611.566,00**
Mutasi Pengurangan:		
-	Penghapusan	0,00
-	Pemberian Hibah	1.605.334.900,00
-	Penjualan	0,00
-	Tukar Menukar	0,00
-	Penyertaan Modal	0,00
-	Penyerahan atau Pengalihan Status Penggunaan	2.711.200.150,00
-	Putusan Pengadilan	0,00
-	Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	0,00
-	Pemusnahan	359.125.724,00
-	Sebab Lain	0,00
-	Reklasifikasi karena sifat dan jenis tidak sesuai kriteria aset tetap Gedung dan Bangunan	11.723.872.461,00
-	Koreksi	0,00
-	Di Bawah Nilai Kapitalisasi	0,00
	Jumlah	**16.399.533.235,00**
Saldo Akhir Aset Tetap Gedung dan Bangunan		**960.100.012.621,86**
Akumulasi Penyusutan		**(457.706.219.514,00)**
Nilai Buku Aset Tetap Gedung dan Bangunan		**502.393.793.107,86**

Penjelasan mutasi tambah Aset Tetap Gedung dan Bangunan:

a. Belanja Modal Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp62.575.674.211,00 merupakan Belanja Modal pada Organisasi Perangkat Daerah yang ada di Kabupaten Gunung Mas.
b. reklasifikasi karena sifat dan jenisnya sesuai kriteria Gedung dan Bangunan sebesar Rp1.705.737.205,00 yaitu
   1) Dinas Kesehatan dari Jalan, Irigasi dan Jaringan sebesar Rp19.300.000,00
   2) Dinas Pekerjaan Umum dari Belanja Barang dan Jasa sebesar Rp49.644.000,00 dan dari Jalan, Irigasi dan Jaringan sebesar Rp199.600.000,00
   3) Dinas Lingkungan Hidup, Kehutanan dan Perhubungan dari Jalan, Irigasi dan Jaringan sebesar Rp22.600.000,00 dan dari Konstruksi Dalam Pengerjaan sebesar Rp338.470.000,00

4) Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistika dari Jalan, Irigasi dan Jaringan sebesar Rp54.838.575,00
5) Dinas Perikanan dan Ketahanan Pangan dari Jalan, Irigasi dan Jaringan sebesar Rp7.204.000,00
6) Dinas Kebudayaan dan Pariwisata dari Barang dan Jasa sebesar Rp57.812.700,00
7) Dinas Pertanian dari Barang dan Jasa sebesar Rp225.270.000,00
8) Dinas Perindustrian dan Perdagangan dari Jalan, Irigasi dan Jaringan sebesar Rp57.311.000,00
9) Sekretariat Daerah dari Peralatan dan Mesin sebesar Rp110.889.000,00 dan dari Barang dan Jasa sebesar Rp562.797.930,00

Penjelasan mutasi kurang Aset Tetap Gedung dan Bangunan:

a. Hibah Keluar yaitu Gedung dan Bangunan sebesar Rp.226.200.000,00 pada Badan Keuangan dan Aset Daerah kepada Majelis Jemaat GKE Sion Kuala Kurun berdasarkan Berita Acara Serah Terima Barang Milik Daerah Antara Pemerintah Kabupaten Gunung Mas dengan Majelis Jemaat GKE Sion Kuala Kurun Nomor:100.3.7.1/243/BAST/D/BKAD/V/2023 dan Nomor;19/MPHJ-GKE/SN/U.IV/05/2023, tanggal 14 Mei 2023.
b. Hibah keluar yaitu Gedung dan Bangunan sebesar Rp1.379.134.900,00 pada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Cq. Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Tengah berdasarkan Berita Acara Serah Terima Barang Milik Daerah Antara Pemerintah Kabupaten Gunung Mas dengan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Cq. Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Tengah Nomor:100.2.3.1/684/BASTB/D/BKAD/IX/2023 dan Nomor:229/PL.255/K1/09/2023 Tanggal 11 September 2023.
c. Penghapusan karena pembongkaran/pemusnahan sebesar Rp359.125.724,00 pada Rumah Sakit Umum Daerah Kuala Kurun.
d. Reklasifikasi karena sifat dan jenisnya tidak sesuai kriteria Gedung dan Bangunan sebesar Rp11.723.872.461,00 yaitu pada:
    1) Dinas Pendidikan ke Barang dan Jasa sebesar Rp49.900.000,00, ke Konstruksi Dalam Pengerjaan sebesar Rp312.442.400,00, ke Peralatan Mesin sebesar Rp1.044.497.800,00, ke Persediaan(Untuk Dijual/Diserahkan Lainnya) sebesar Rp1.706.535.861,00, dan ke Aset Lainnya karena Rusak Berat sebesar Rp40.500.000,00
    2) Dinas Kesehatan ke Jalan, Irigasi dan Jaringan sebesar Rp505.500.000,00
    3) Dinas Pekerjaan Umum ke Persediaan(Untuk Dijual/Diserahkan Lainnya) sebesar Rp1.939.775.000,00 dan ke Jalan, Irigasi dan Jaringan sebesar Rp274.300.000,00

4) Dinas Lingkungan Hidup, Kehutanan dan Perhubungan ke Aset Lainnya karena Rusak Berat sebesar Rp495.000,00
5) Dinas Pertanian ke Aset Lainnya karena Rusak Berat sebesar Rp91.800.000,00
6) Rumah Sakit Umum Daerah Kuala Kurun ke Aset Lainnya karena Rusak Berat sebesar Rp5.553.572.400
7) Inspektorat ke Jalan, Irigasi dan Jaringan sebesar Rp56.154.000,00 dan ke Konstruksi Dalam Pengerjaan
8) Kecamatan Kurun ke Aset Lainnya karena Rusak Berat sebesar Rp37.800.000,00
9) Kecamatan Kahayan Hulu Utara ke Aset Lainnya karena Rusak Berat sebesar Rp14.400.000,00

Jalan, Jaringan, dan Irigasi

5. 3. 1. 3. 4. Jalan, Jaringan, dan Irigasi

Per 31 Desember 2023: Rp2.286.908.977.380,87
Per 31 Desember 2022: Rp2.113.453.245.615,80

Nilai aset Jalan, Jaringan, dan Irigasi per 31 Desember 2023 sebesar Rp2.286.908.977.380,87 dengan rincian mutasi menurut rincian objeknya selama Tahun Anggaran 2023 adalah sebagai berikut:

Tabel 7.5.102 Rincian mutasi Aset Tetap - Jalan, Jaringan, dan Irigasi

Rincian Objek	Saldo Awal (31 Desember 2022) (Rp)	Mutasi Tahun 2023 (Rp)		Saldo Akhir 31 Desember 2023 (Rp)
		Bertambah	Berkurang	
Jalan	1.048.652.747.418,39	223.402.539.100,07	70.685.244.860,00	1.201.370.041.658,46
Jembatan	750.007.714.505,80	24.074.428.508,00	10.615.453.558,00	763.466.689.455,80
Bangunan Air Irigasi	77.994.745.649,70	3.642.528.650,00	657.190.000,00	80.980.084.299,70
Bangunan Pengairan Pasang Surut	7.005.436.526,00	0,00	0,00	7.005.436.526,00
Bangunan Pengembangan Rawa dan Polder	7.258.607.364,00	0,00	0,00	7.258.607.364,00
Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam	37.227.758.242,00	170.084.500,00	0,00	37.397.842.742,00
Bangunan Pengembangan Sumber Air dan Air Tanah	7.689.741.543,00	0,00	0,00	7.689.741.543,00
Bangunan Air Bersih/Air Baku	25.208.256.318,91	620.939.000,00	0,00	25.829.195.318,91
Bangunan Air Kotor	9.956.322.965,00	199.750.000,00	0,00	10.156.072.965,00
Instalasi Air Bersih/Air Baku	29.079.369.180,00	79.900.000,00	0,00	29.159.269.180,00
Instalasi Air Kotor	11.659.827.962,00	1.116.500.000,00	0,00	12.776.327.962,00
Instalasi Pengolahan Sampah	17.795.840.950,00	0,00	22.600.000,00	17.773.240.950,00
Instalasi Pembangkit Listrik	12.375.166.072,00	0,00	54.838.575,00	12.320.327.497,00
Instalasi Gardu Listrik	1.320.201.284,00	0,00	57.311.000,00	1.262.890.284,00
Instalasi Pertahanan	310.179.705,00	0,00	0,00	310.179.705,00
Instalasi Pengaman	64.540.350,00	0,00	0,00	64.540.350,00
Jaringan Air Minum	46.518.578.993,00	2.830.555.000,00	569.555.000,00	48.779.578.993,00
Jaringan Listrik	23.289.430.087,00	0,00	19.300.000,00	23.270.130.087,00
Jaringan Telepon	38.780.500,00	0,00	0,00	38.780.500,00

Nilai Perolehan	**2.113.453.245.615,80**	**256.137.224.758,07**	**82.681.492.993,00**	**2.286.908.977.380,87**
Akumulasi Penyusutan	**(1.447.862.568.503,10)**	**17.530.833,00**	**162.067.411.899,00**	**(1.609.912.449.569,10)**
Nilai Buku	**665.590.677.112,70**	**256.154.755.591,07**	**244.748.904.892,00**	**676.996.527.811,77**

Pencatatan nilai aset Jalan, Jaringan, dan Irigasi tahun 2023 sebesar Rp2.286.908.977.380,87 sebagaimana tersebut di atas dapat dirinci sebagai berikut:

Saldo 31 Desember 2022		**2.113.453.245.615,80**
Mutasi Penambahan:		
-	Belanja Modal TA 2023	169.522.427.528,39
-	Penerimaan Hibah	0,00
-	Pelaksanaan dari Perjanjian/Hibah	0,00
-	Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	0,00
-	Putusan Pengadilan	0,00
-	Divestasi	0,00
-	Hasil Inventarisasi	0,00
-	Hasil Tukar Menukar	0,00
-	Pembatalan Penghapusan	0,00
-	Perolehan Lainnya	0,00
-	Pengalihan Status Penggunaan	0,00
-	Reklasifikasi karena sifat dan jenis sesuai kriteria aset tetap Jalan, Irgasi dan Jaringan	56.807.498.300,00
-	Kapitalisasi selain dari Belanja Modal	0,00
-	Koreksi	3.201.970.970,00
-	Reklasifikasi/Penyesuaian selain dari Belanja Modal	0,00
	Jumlah	**229.531.896.798,39**
Mutasi Pengurangan:		
-	Penghapusan	0,00
-	Pemberian Hibah	0,00
-	Penjualan	0,00
-	Tukar Menukar	0,00
-	Penyertaan Modal	0,00
-	Penyerahan atau Pengalihan Status Penggunaan	0,00
-	Putusan Pengadilan	0,00
-	Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	0,00
-	Pemusnahan	0,00
-	Sebab Lain	0,00
-	Reklasifikasi karena sifat dan jenis tidak sesuai kriteria aset tetap Jalan, Irgasi dan Jaringan	15.965.318.683,32
-	Koreksi	40.110.846.350,00
-	Di Bawah Nilai Kapitalisasi	0,00
	Jumlah	**56.076.165.033,32**
Saldo Akhir Aset Tetap Jalan, Jaringan, dan Irigasi		**2.286.908.977.380,87**
Akumulasi Penyusutan		**(1.609.912.449.569,10)**
Nilai Buku Aset Tetap Jalan, Jaringan, dan Irigasi		**676.996.527.811,77**

Penjelasan mutasi tambah Aset Jalan, Jaringan, dan Irigasi:

a. Belanja Modal Tahun 2023 sebesar Rp169.522.427.528,39 merupakan Belanja Modal pada Organisasi Perangkat Daerah yang ada di Kabupaten Gunung Mas.

b. reklasifikasi karena sifat dan jenisnya sesuai kriteria Jalan, Irigasi dan Jaringan sebesar Rp56.807.498.300,00, yaitu pada:
   1) Dinas Kesehatan dari Peralatan dan Mesin sebesar Rp918.000.000,00 dan dari Gedung dan Bangunan sebesar Rp505.500.000,00
   2) Dinas Pekerjaan Umum dari Barang dan Jasa sebesar Rp170.084.500,00, dari Gedung dan Bangunan sebesar Rp274.300.000,00, dan dari Konstruksi Dalam Pengerjaan sebesar Rp54.763.973.800,000
   3) Inspektorat dari Gedung dan Bangunan sebesar Rp56.154.000,00
   4) Kecamatan Kurun dari Barang dan Jasa sebesar Rp9.620.000,00
   5) Kecamatan Mihing Raya dari Barang dan Jasa sebesar Rp109.866.000,00
c. Penyesuaian Koreksi atas Piutang dan Utang sebesar Rp3.167.513.810,00, dan Koreksi atas Utang Belanja Modal sebesar Rp34.457.160,00

Penjelasan mutasi kurang Aset Jalan, Jaringan, dan Irigasi:
a. Reklasifikasi karena sifat dan jenisnya tidak sesuai kriteria Jalan, Irigasi dan Jaringan sebesar Rp15.965.318.683,32 yaitu pada:
   1) Dinas Kesehatan pada Gedung dan Bangunan sebesar Rp19.300.000,00
   2) Dinas Pekerjaan Umum pada Peralatan dan Mesin sebesar Rp196.589.875,00, pada Gedung dan Bangunan sebesar Rp199.600.000,00, pada Konstruksi pada Pengerjaan sebesar Rp8.649.591.758,32, dan pada Barang dan Jasa sebesar Rp6.758.283.475,00
   3) Dinas Lingkungan Hidup, Kehutanan dan Perhubungan pada Gedung dan Bangunan sebesar Rp22.600.000,00
   4) Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistika pada Gedung dan Bangunan sebesar Rp54.838.575,00
   5) Dinas Perikanan dan Ketahanan Pangan pada Gedung dan Bangunan sebesar Rp7.204.000,00
   6) Dinas Perindustrian dan Perdagangan pada Gedung dan Bangunan sebesar Rp57.311.000,00
b. Dinas Pekerjaan Umum, Penyesuaian Koreksi atas Utang Belanja Modal sebesar Rp39.976.429.310,00 dan Koreksi atas Piutang Uang Muka Rp134.417.040,00

Aset Tetap Lainnya

5. 3. 1. 3. 5. Aset Tetap Lainnya

Per 31 Desember 2023: Rp38.179.968.033,60
Per 31 Desember 2022: Rp36.656.365.378,63

Nilai Aset Tetap Lainnya per 31 Desember 2023 sebesar Rp38.179.968.033,60 dengan rincian mutasi menurut rincian objeknya selama Tahun Anggaran 2023 adalah sebagai berikut:

Tabel 7.5.103 Rincian mutasi Aset Tetap - Aset Tetap Lainnya

Rincian Objek	Saldo Awal (31 Desember 2022) (Rp)	Mutasi Tahun 2023 (Rp)		Saldo Akhir 31 Desember 2023 (Rp)
		Bertambah	Berkurang	
Bahan Perpustakaan Tercetak	30.410.022.139,88	1.617.467.253,00	79.607.973,03	31.947.881.419,85
Bahan Perpustakaan Terekam dan Bentuk Mikro	303.769.000,00	0,00	0,00	303.769.000,00
Kartografi Naskah dan Lukisan	680.356.900,00	0,00	0,00	680.356.900,00
Barang Bercorak Kesenian	637.379.625,00	68.693.000,00	99.999.625,00	606.073.000,00
Alat Bercorak Kebudayaan	694.689.700,00	17.050.000,00	0,00	711.739.700,00
Tanaman	2.915.097.613,75	0,00	0,00	2.915.097.613,75
Aset Tetap Dalam Renovasi	1.015.050.400,00	0,00	0,00	1.015.050.400,00
Nilai Perolehan	**36.656.365.378,63**	**1.703.210.253,00**	**179.607.598,03**	**38.179.968.033,60**
Akumulasi Penyusutan	**(1.049.872.696,00)**	**14.583.287,00**	**41.996.264,00**	**(1.077.285.673,00)**
Nilai Buku	**35.606.492.682,63**	**1.717.793.540,00**	**221.603.862,03**	**37.102.682.360,60**

Pencatatan nilai Aset Tetap Lainnya tahun 2023 sebesar Rp38.179.968.033,60 sebagaimana tersebut di atas dapat dirinci sebagai berikut:

Saldo 31 Desember 2022	**36.656.365.378,63**
Mutasi Penambahan:	
- Belanja Modal TA 2023	1.665.999.253,00
- Penerimaan Hibah	0,00
- Pelaksanaan dari Perjanjian/Hibah	0,00
- Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	0,00
- Putusan Pengadilan	0,00
- Divestasi	0,00
- Hasil Inventarisasi	0,00
- Hasil Tukar Menukar	0,00
- Pembatalan Penghapusan	0,00
- Perolehan Lainnya	0,00
- Pengalihan Status Penggunaan	0,00
- Reklasifikasi karena sifat dan jenis sesuai kriteria aset tetap Aset Lainnya	37.211.000,00
- Kapitalisasi selain dari Belanja Modal	0,00
- Koreksi	0,00
- Reklasifikasi/Penyesuaian selain dari Belanja Modal	0,00
Jumlah	**1.703.210.253,00**
Mutasi Pengurangan:	
- Penghapusan	0,00
- Pemberian Hibah	99.999.625,00
- Penjualan	0,00
- Tukar Menukar	0,00
- Penyertaan Modal	0,00
- Penyerahan atau Pengalihan Status Penggunaan	0,00
- Putusan Pengadilan	0,00
- Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	0,00
- Pemusnahan	0,00
- Sebab Lain	0,00

-	Reklasifikasi karena sifat dan jenis tidak sesuai kriteria aset tetap Aset Lainnya	79.607.973,03
-	Koreksi	0,00
-	Di Bawah Nilai Kapitalisasi	0,00
	Jumlah	**179.607.598,03**

Saldo Akhir Aset Tetap Aset Tetap Lainnya	**38.179.968.033,60**
Akumulasi Penyusutan	**(1.077.285.673,00)**
Nilai Buku Aset Tetap Aset Tetap Lainnya	**37.102.682.360,60**

Penjelasan mutasi tambah Aset Tetap Lainnya:

a. Belanja Modal TA 2023 sebesar Rp1.665.999.253,00 merupakan Belanja Modal pada satun organisasi Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Gunung Mas.
b. reklasifikasi karena sifat dan jenisnya sesuai kriteria Aset Tetap Lainnya sebesar Rp37.211.000,00 yaitu pada Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga berupa Buku Umum dari Belanja Barang dan Jasa.

Penjelasan mutasi kurang Aset Tetap Lainnya:

a. Hibah Keluar yaitu Aset Tetap Lainnya berupa Barang Bercorak Kesenian Lainnya sebesar Rp.99.999.625,00 pada Badan Keuangan dan Aset Daerah kepada Kelompok Seni Tari Topeng "Turonggo Mangun Budhoyo" Desa Bangun Sari Kecamatan Manuhing berdasarkan Berita Acara Serah Terima Barang Milik Daerah Antara Pemerintah Kabupaten Gunung Mas dengan Kelompok Seni Tari Topeng "Turonggo Mangun Budhoyo" Desa Bangun Sari Kecamatan Manuhing Nomor:900.1.13.5/89.a/D/BKAD/NPHD-BMD/III/2023 dan Nomor:01/KSTT/TMD/II/2023, tanggal 07 Februari 2023.
b. reklasifikasi karena sifat dan jenisnya sesuai kriteria Aset Tetap Lainnya sebesar Rp79.500.000,00 yaitu pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan berupa Buku Umum dari Belanja Barang dan Jasa.
c. reklasifikasi ke Aset Lainnya karena Rusak Berat sebesar Rp107.973,03 yaitu pada Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga.

Konstruksi dalam Pengerjaan

5. 3. 1. 3. 6. Konstruksi Dalam Pengerjaan

Per 31 Desember 2023: Rp12.370.552.657,73
Per 31 Desember 2022: Rp58.136.212.299,41

Nilai aset Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP) per 31 Desember 2023 sebesar Rp12.370.552.657,73 dengan rincian mutasi menurut objeknya selama Tahun Anggaran 2023 adalah sebagai berikut:

Tabel 7.5.104 Rincian mutasi Aset Tetap - Konstruksi Dalam Pengerjaan

Objek	Saldo Awal (31 Desember 2022) (Rp)	Mutasi Tahun 2023 (Rp)		Saldo Akhir 31 Desember 2023 (Rp)
		Bertambah	Berkurang	
Konstruksi Dalam Pengerjaan Gedung dan Bangunan	1.478.229.000,00	487.992.400,00	338.470.000,00	1.627.751.400,00

Konstruksi Dalam Pengerjaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi	56.657.983.299,41	8.848.791.758,32	54.763.973.800,00	10.742.801.257,73
Nilai Perolehan	**58.136.212.299,41**	**9.336.784.158,32**	**55.102.443.800,00**	**12.370.552.657,73**
Akumulasi Penyusutan	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Nilai Buku	**58.136.212.299,41**	**9.336.784.158,32**	**55.102.443.800,00**	**12.370.552.657,73**

Pencatatan nilai aset Konstruksi dalam Pengerjaan (KDP) tahun 2023 sebesar Rp12.370.552.657,73 sebagaimana tersebut di atas dapat dirinci sebagai berikut:

Saldo 31 Desember 2022		**58.136.212.299,41**
-	Penambahan KDP Baru	9.257.434.158,32
-	Perolehan/Penyesuaian Lainnya	79.350.000,00
-	Penghapusan KDP	0,00
-	KDP Menjadi Aset Tetap	55.102.443.800,00
	Jumlah	**12.370.552.657,73**

Penjelasan mutasi Konstruksi dalam Pengerjaan:

a. penambahan sebesar Rp9.257.434.158,32 yaitu pada:
   1) Dinas Pendidikan dari Gedung dan Bangunan sebesar Rp312.442.400,00
   2) Dinas Pekerjaan Umum dari Jalan, Irigasi dan Jaringan sebesar Rp8.649.591.758,32 dan dari Reklasifikasi Belanja jasa Konsultansi Perencanaan sebesar Rp199.200.000,00
   3) Inspektorat dari Gedung dan Bangunan sebesar Rp96.200.000,00
b. penyesuaian nilai aset tetap Konstruksi Dalam Pengerjaan Gedung dan Bangunan pada Dinas Pendidikan sebesar Rp79.350.000,00 yaitu berupa Koreksi Utang Fisik.
c. pengurangan Konstruksi Dalam Pengerjaan karena menjadi Aset Tetap sebesar Rp55.102.443.800,00 yaitu pada:
   1) Dinas Pekerjaan Umum ke Jalan, Irigasi dan Jaringan sebesar Rp54.763.973.800,00
   2) Dinas Lingkungan Hidup, Kehutanan, dan Perhubungan ke Gedung dan Bangunan sebesar Rp338.470.000,00

Secara detail daftar Konstruksi dalam Pengerjaan sampai dengan 31 Desember 2023 adalah sebagai berikut:

Tabel 7.5.105 Daftar Konstruksi dalam Pengerjaan

No.	Nama Barang	Nomor Dokumen		Tanggal Mulai	Nilai Kontrak (Rp)	Biaya yang sudah Dikeluarkan/ Kemajuan Pekerjaan (Rp)	Sisa Pekerjaan (Rp)	Piutang Uang Muka (Rp)	Retensi (Rp)	Status (Rp)
Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga										
1.	Gedung Olah Raga Tetutup Permanen	426.22/004/DISDIKPORA/I/2020		11 March 2020	99.792.000,00	99.792.000,00	0,00	0,00	0,00	Sedang Dilanjutkan
2.	Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya	-		15 March 2019	17.425.000,00	17.425.000,00	0,00	0,00	0,00	Dihentikan Sementara
3.	Rumah Negara Golongan II Tipe A Permanen	910/021.b/DIKBUD/II/2019		15 March 2019	13.200.000,00	13.200.000,00	0,00	0,00	0,00	Dihentikan Sementara
4	Bangunan Gedung Permanen	000.3.4/425/43/BAST-PRC/Disdikpora/V/2023		02 May 2023	55.700.000,00	55.700.000,00	0,00	0,00	0,00	Sedang Dilanjutkan
5	Bangunan Gedung Permanen	000.3.2/150a/BAST-PRC/Disdikpora/VI/2023		27 July 2023	51.615.000,00	51.615.000,00	0,00	0,00	0,00	Sedang Dilanjutkan
6	Bangunan Gedung Permanen	000.3.2/47.2/SPK/DISDIKPORA/V/2023		31 December 2023	79.350.000,00	79.350.000,00	0,00	0,00	0,00	Sedang Dilanjutkan
7	Bangunan Gedung Pendidikan Semi Permanen	000.3.4/425c/13/BAST-PRC/Disdikpora/IV/2023		12 December 2023	13.120.000,00	13.120.000,00	0,00	0,00	0,00	Sedang Dilanjutkan
8	Bangunan Gedung Pendidikan Semi Permanen	000.3.2/425d/03/BAST-PRC/Disdikpora/V/2023		15 May 2023	12.195.300,00	12.195.300,00	0,00	0,00	0,00	Sedang Dilanjutkan

9	Rumah Negara Golongan II Tipe A Permanen	000.3.2/283/BAST-PRC/Disdikpora/VIII/2023	21 August 2023	8.613.600,00	8.613.600,00	0,00	0,00	0,00	Sedang Dilanjutkan
10	Bangunan Gedung Laboratorium Permanen	000.3.4/957a/BAST-PRC/Disdikpora/V/2023	31 May 2023	16.850.000,00	16.850.000,00	0,00	0,00	0,00	Sedang Dilanjutkan
11	Bangunan Gedung Laboratorium Permanen	000.3.4/957b/BAST-PRC/Disdikpora/V/2023	31 May 2023	16.850.000,00	16.850.000,00	0,00	0,00	0,00	Sedang Dilanjutkan
12	Bangunan Gedung Kantor Semi Permanen	000.3.2/425f/03/BAST-PRC/Disdikpora/V/2023	15 May 2023	12.195.500,00	12.195.500,00	0,00	0,00	0,00	Sedang Dilanjutkan
13	Bangunan Gedung Laboratorium Permanen	000.3.4/957b/BAST-PRC/Disdikpora/V/2023	21 October 2023	16.850.000,00	16.850.000,00	0,00	0,00	0,00	Sedang Dilanjutkan
14	Bangunan Gedung Pendidikan Permanen	000.3.4/425/33/BAST-PRC/Disdikpora/V/2023	02 May 2023	40.350.000,00	40.350.000,00	0,00	0,00	0,00	Sedang Dilanjutkan
15	Pagar Permanen	000.3.4/1260/PRC/Disdikpora/XII/2023	05 December 2023	39.998.000,00	39.998.000,00	0,00	0,00	0,00	Sedang Dilanjutkan
16	Bangunan Gedung Pendidikan Permanen	000.3.4/425b/13/BAST-PRC/Disdikpora/IV/2023	02 December 2023	13.120.000,00	13.120.000,00	0,00	0,00	0,00	Sedang Dilanjutkan
17	Bangunan Tempat Pendidikan Lain-lain (dst)	000.3.2/425b/58/BAST-PRC/Disdikpora/V/2023	03 May 2023	14.985.000,00	14.985.000,00	0,00	0,00	0,00	Sedang Dilanjutkan

LAMPIRAN VII
PERATURAN DAERAH KABUPATEN GUNUNG MAS
NOMOR TAHUN 2024
TENTANG
PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2023

Rumah Sakit Umum Daerah Kuala Kurun									
1.	Bangunan Rumah Sakit Umum	810/43/PPHP/BLUD/ RSUD-KK/XII/2019	20 December 2019	706.986.500,00	706.986.500,00	0,00	0,00	0,00	Dihentikan Sementara
Dinas Pekerjaan Umum									
1.	Bangunan Gedung Kantor Permanen		13 November 2017	147.889.500,00	147.889.500,00	0,00	0,00	0,00	Sedang Dilanjutkan
2.	Bangunan Olah Raga Terbuka Permanen		20 December 2022	99.000.000,00	99.000.000,00	0,00	0,00	0,00	Sedang Dilanjutkan
3.	Bangunan gedung Tempat Kerja Lainnya	608/3.1/SPK/kons/CK /DPU/II/2019	04 February 2019	22.199.000,00	22.199.000,00	0,00	0,00	0,00	Sedang Dilanjutkan
4.	Jalan Kabupaten Lokal	607/293/BM/SPK-Prc/DPU/X/ 2015	12 July 2017	49.235.999,41	49.235.999,41	0,00	0,00	0,00	Sedang Dilanjutkan
5.	Jalan Kabupaten Lokal	607/295/BM/SPK-Pcr/DPU/X/ 2015	22 October 2015	49.313.000,00	49.313.000,00	0,00	0,00	0,00	Sedang Dilanjutkan
6.	Jalan Kabupaten Lokal	607/291/BM/SPK-PRC/DPU/X/ 2015	22 October 2015	49.148.000,00	49.148.000,00	0,00	0,00	0,00	Sedang Dilanjutkan
7.	Jalan Kabupaten Lokal	607/336/BM/KTRK-PRC/DPU/ XI/2015	02 November 2015	95.326.000,00	95.326.000,00	0,00	0,00	0,00	Dihentikan Sementara
8.	Jalan Kabupaten Lokal		13 November 2017	142.191.000,00	142.191.000,00	0,00	0,00	0,00	Sedang Dilanjutkan

9	Jalan Khusus Kompleks		02 December 2022	99.410.000,00	99.410.000,00	0,00	0,00	0,00	Sedang Dilanjutkan
10	Jalan Khusus Lainnya	607/407.f/KTRK-KON/BM/DPU /XI/2014	13 November 2017	49.750.000,00	49.750.000,00	0,00	0,00	0,00	Sedang Dilanjutkan
11	Jalan Khusus Lain-lain	610/181/SPK//DPU-SDA/X/ 2020	13 October 2020	94.000.000,00	94.000.000,00	0,00	0,00	0,00	Sedang Dilanjutkan
12	Jembatan Pada Jalan Kabupaten Arteri		13 November 2017	197.000.000,00	197.000.000,00	0,00	0,00	0,00	Dihentikan Sementara
13	Jembatan Pada Jalan Kabupaten Arteri		15 November 2017	197.169.500,00	197.169.500,00	0,00	0,00	0,00	Dihentikan Sementara
14	Jembatan Pada Jalan Kabupaten Lokal	607/250/BM/KTRK-PRC/DPU /IX/2015	04 September 2015	492.965.000,00	492.965.000,00	0,00	0,00	0,00	Sedang Dilanjutkan
15	Jembatan Pada Jalan Kabupaten Lokal	607/476/BM/BAP-Prec/DPU /XII/2015	18 December 2015	193.077.000,00	193.077.000,00	0,00	0,00	0,00	Sedang Dilanjutkan
16	Bangunan Pengaman Sungai/Pantai & Penanggulangan Bencana Alam Lain-lain (dst)		23 June 2022	76.500.000,00	76.500.000,00	0,00	0,00	0,00	Sedang Dilanjutkan
17	Jaringan Induk Distribusi Kapasitas Kecil	900/22.2/SPK/Kons/CK/DPU/XI/2019	11 November 2019	34.474.000,00	34.474.000,00	0,00	0,00	0,00	Dihentikan permanen
18	Bangunan Air Bersih/Air Baku Lainnya	600.1.4.4/2194/SPK/DPU-SDA/XI/2023	22 December 2023	99.400.000,00	99.400.000,00	0,00	0,00	0,00	Sedang Dilanjutkan

19	Jaringan Air Minum Lainnya	600.1.16.1/05/02/SPK/DPU-CK/AM/XI/2023	27 December 2023	99.800.000,00	99.800.000,00	0,00	0,00	0,00	Sedang Dilanjutkan
20	Jembatan Pada Jalan Kabupaten Lokal	600.1.10.3/2093/KTRK/DPU-BM/XI/2023	27 December 2023	3.474.064.458,00	3.474.064.458,00	0,00	0,00	0,00	Sedang Dilanjutkan
21	Jaringan Air Minum Lainnya	600.1.16.1/03/02/SPK/DPU-CK/AM/XI/2023	27 December 2023	79.800.000,00	79.800.000,00	0,00	0,00	0,00	Sedang Dilanjutkan
22	Jaringan Air Minum Lainnya	600.1.16.1/04/02/SPK/DPU-CK/AM/XI/2023	27 December 2023	79.800.000,00	79.800.000,00	0,00	0,00	0,00	Sedang Dilanjutkan
23	Jembatan Pada Jalan Kabupaten Lokal	600.1.10.3/2088/SP/DPU-BM/X/2023	28 December 2023	2.194.784.100,00	2.194.784.100,00	0,00	0,00	0,00	Sedang Dilanjutkan
24	Bangunan (Box) Culvert	600.1.8/2093/KTRK/DPU-BM/X/2023	28 December 2023	689.143.200,00	689.143.200,00	0,00	0,00	0,00	Sedang Dilanjutkan
25	Jembatan Pada Jalan Kabupaten Lokal	600.1.10.3/2095/KTRK/DPU-BM/XI/2023	31 December 2023	2.132.000.000,32	2.132.000.000,32	0,00	0,00	0,00	Sedang Dilanjutkan
Dinas Lingkungan Hidup, Kehutanan dan Perkebunan									
1.	Bangunan Tempat Pendidikan Lain-lain (dst)	027/236/SPK/DLHKP/III/2020	23 March 2020	4.367.000,00	4.367.000,00	0,00	0,00	0,00	Sedang Dilanjutkan
Dinas Perikanan dan Ketahanan Pangan									
1.	Bangunan Gedung Laboratorium Semi Permanen	523/128/DPKP/III/2020	17 April 2020	28.900.000,00	28.900.000,00	0,00	0,00	0,00	Dihentikan permanen

Inspektorat									
1.	Bangunan Gedung Kantor Permanen	000.4.2/544/SPK/XI/Insp-2023	21 December 2023	96.200.000,00	96.200.000,00	0,00	0,00	0,00	Sedang Dilanjutkan
Kecamatan Damang Batu									
1.	Bangunan Gorong-Gorong (Bangunan Pelengkap Irigasi)	027/07.02/SPK-KEL-TM/X/2019	28 October 2019	39.400.000,00	39.400.000,00	0,00	0,00	0,00	Dihentikan Sementara
Kecamatan Rungan Barat									
1.	Jalan Desa	051/65/K-RB/IX/2019	23 September 2019	20.850.000,00	20.850.000,00	0,00	0,00	0,00	Dihentikan permanen
2.	Jalan Desa	-	23 September 2019	14.200.000,00	14.200.000,00	0,00	0,00	0,00	Dihentikan permanen
Jumlah				**12.370.552.657,73**	**12.370.552.657,73**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	//////////////

Akumulasi Penyusutan

5. 3. 1. 3. 7. Akumulasi Penyusutan

Per 31 Desember 2023: (Rp2.396.943.059.037,70)
Per 31 Desember 2022: (Rp2.161.247.375.265,70)

Nilai Akumulasi Penyusutan per 31 Desember 2023 sebesar -Rp2.396.943.059.037,70 merupakan total jumlah penyusutan dari nilai masing-masing objek Aset Tetap tahun 2023 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 7.5.106 Akumulasi Penyusutan

No.	Uraian	Tahun 2023 (Rp)	Tahun 2022 (Rp)
1.	Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	(328.247.104.281,60)	(295.012.439.755,60)
2.	Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan	(457.706.219.514,00)	(417.322.494.311,00)
3.	Akumulasi Penyusutan Jalan, Jaringan, dan Irigasi	(1.609.912.449.569,10)	(1.447.862.568.503,10)
4.	Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Lainnya	(1.077.285.673,00)	(1.049.872.696,00)
Jumlah		**(2.396.943.059.037,70)**	**(2.161.247.375.265,70)**

Aset Lainnya

5. 3. 1. 4. Aset Lainnya

Per 31 Desember 2023: Rp254.342.362.641,04
Per 31 Desember 2022: Rp16.812.411.003,01

Total jumlah saldo Aset Lainnya Kabupaten Gunung Mas sampai dengan tanggal Neraca 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp254.342.362.641,04 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 7.5.107 Aset Lainnya

No.	Uraian	Tahun 2023 (Rp)	Tahun 2022 (Rp)
1.	Aset Tidak Berwujud	16.579.778.402,01	15.823.784.900,01
2.	Aset Lain-lain	14.671.501.449,03	14.286.116.493,00
3.	Akumulasi Amortisasi Aset Tidak	(13.847.689.210,00)	(13.297.490.390,00)
4.	Dana Transfer Treasury Deposit Facility (TDF)	236.938.772.000,00	0,00
	Jumlah	**254.342.362.641,04**	**16.812.411.003,01**

Aset Tidak Berwujud

5. 3. 1. 4. 1. Aset Tidak Berwujud

Per 31 Desember 2023: Rp16.579.778.402,01
Per 31 Desember 2022: Rp15.823.784.900,01

Nilai Aset Tidak Berwujud per 31 Desember 2023 sebesar Rp16.579.778.402,01 merupakan total jumlah subrincian objek Aset Tidak Berwujud berupa lisensi dan franchise, software, kajian, dan aset tidak berwujud lainnya pada satuan kerja Perangkat Daerah (PD) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Gunung Mas sebagai berikut:

Tabel 7.5.108 Aset Tidak Berwujud

No.	Uraian	Tahun 2023 (Rp)	Tahun 2022 (Rp)
1.	Lisensi dan Franchise	42.536.252,00	0,00
2.	Software	4.175.399.550,01	3.461.942.300,01
3.	Kajian	11.161.842.600,00	11.161.842.600,00
4.	Aset Tidak Berwujud Lainnya	1.200.000.000,00	1.200.000.000,00
	Jumlah	**16.579.778.402,01**	**15.823.784.900,01**

Pencatatan nilai Aset Tidak Berwujud tahun 2023 sebesar Rp16.579.778.402,01 menurut subrincian objek Aset Tidak Berwujud pada satuan kerja Perangkat Daerah (PD) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Gunung Mas dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Total nilai Lisensi dan Franchise sebesar Rp42.536.252,00 dicatat pada Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistika.

2. Total nilai Software sebesar Rp4.175.399.550,01 dicatat pada Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga, Dinas Kesehatan, Rumah Sakit Umum Daerah Kuala Kurun, Dinas Pekerjaan Umum, Satuan Polisi Pamong Praja, Dinas Sosial, Dinas Lingkungan Hidup, Kehutanan, dan Perhubungan, Badan Penanggulangan Bencana Daerah, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa, Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Dinas Perpustakaan dan Kearsipan, Dinas Perikanan dan Ketahanan Pangan, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata, Dinas Pertanian, Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Penelitian Pengembangan, Badan Pendapatan Daerah, Badan Keuangan dan Aset Daerah, Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumberdaya Manusia, Inspektorat Kabupaten, Kecamatan Kurun, Kecamatan Manuhing Raya, Kecamatan Miri Manasa, Kecamatan Rungan Barat, Kecamatan Tewah, Kecamatan Kahayan Hulu Utara, Kecamatan Sepang, Kecamatan Manuhing, Kecamatan Rungan, Kecamatan Mihing Raya, Kecamatan Rungan Hulu, Kecamatan Damang Batu, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik.
3. Total nilai Kajian sebesar Rp11.161.842.600,00 dicatat pada Dinas Pekerjaan Umum, Badan Penanggulangan Bencana Daerah, Dinas Perikanan dan Ketahanan Pangan, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Penelitian Pengembangan.
4. Nilai Aset Tidak Berwujud Lainnya sebesar Rp1.200.000.000,00 dicatat pada Dinas Lingkungan Hidup, Kehutanan, dan Perhubungan.

Aset Lain-lain

5. 3. 1. 4. 2. Aset Lain-lain

Per 31 Desember 2023: Rp14.671.501.449,03
Per 31 Desember 2022: Rp14.286.116.493,00

Nilai Aset Lain-lain per 31 Desember 2023 sebesar Rp14.671.501.449,03 merupakan total nilai Aset Rusak Berat/ Usang pada seluruh Perangkat Daerah di lingkup Pemerintah Kabupaten Gunung Mas setelah dikurangi Akumulasi Penyusutan Aset Lain-lain - Aset Rusak Berat/Usang dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 7.5.109 Aset Lain-lain

No.	Uraian	Tahun 2023 (Rp)	Tahun 2022 (Rp)
1.	Aset Rusak Berat/ Usang	102.210.985.241,03	90.947.639.545,00
2.	Akumulasi Penyusutan Aset Lain-lain - Aset Rusak Berat/Usang	(87.539.483.792,00)	(76.661.523.052,00)
	Jumlah	**14.671.501.449,03**	**14.286.116.493,00**

Pencatatan nilai Aset Lain-lain tahun 2023 atas Aset Rusak Berat/ Usang sebesar Rp102.210.985.241,03 pada satuan kerja Perangkat Daerah (PD) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Gunung Mas terdiri dari Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga, Rumah Sakit Umum Daerah Kuala Kurun, Dinas Lingkungan Hidup, Kehutanan, dan Perhubungan, Badan Penanggulangan Bencana Daerah, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Dinas Pertanian, Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Penelitian Pengembangan, Badan Pendapatan Daerah, Badan Keuangan dan Aset Daerah, Kecamatan Kurun, Kecamatan Manuhing Raya, Kecamatan Miri Manasa, Kecamatan Kahayan Hulu Utara, Kecamatan Sepang, Kecamatan Rungan Hulu.

Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud

5. 3. 1. 4. 3. Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud

Per 31 Desember 2023: (Rp13.847.689.210,00)
Per 31 Desember 2022: (Rp13.297.490.390,00)

Nilai Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud per 31 Desember 2023 sebesar -Rp13.847.689.210,00 merupakan total nilai Amortisasi Aset Tidak Berwujud atas aset Sofware dan Kajian pada seluruh Perangkat Daerah di lingkup Pemerintah Kabupaten Gunung Mas dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 7.5.110 Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud

No.	Uraian	Tahun 2023 (Rp)	Tahun 2022 (Rp)
1.	Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud-Software	(3.455.811.012,00)	(3.295.068.221,00)
2.	Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud-Kajian	(10.391.878.198,00)	(10.002.422.169,00)
	Jumlah	**(13.847.689.210,00)**	**(13.297.490.390,00)**

Pencatatan nilai Amortisasi Aset Tidak Berwujud tahun 2023 sebesar -Rp13.847.689.210,00 menurut objek Amortisasi Aset Tidak Berwujud pada satuan kerja Perangkat Daerah (PD) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Gunung Mas dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Total nilai Amortisasi Aset Tidak Berwujud – Software sebesar -Rp3.455.811.012,00 dicatat pada Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga, Dinas Kesehatan, Rumah Sakit Umum Daerah Kuala Kurun, Dinas Pekerjaan Umum, Satuan Polisi Pamong Praja, Dinas Sosial, Dinas Lingkungan Hidup, Kehutanan, dan Perhubungan, Badan Penanggulangan Bencana Daerah, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa, Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Dinas Perpustakaan dan Kearsipan, Dinas Perikanan dan Ketahanan Pangan, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata, Dinas Pertanian, Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Penelitian Pengembangan, Badan Pendapatan Daerah, Badan Keuangan dan Aset Daerah, Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumberdaya Manusia, Inspektorat Kabupaten, Kecamatan Kurun, Kecamatan Manuhing Raya, Kecamatan Miri Manasa, Kecamatan Rungan Barat, Kecamatan Tewah, Kecamatan Kahayan Hulu Utara, Kecamatan Sepang, Kecamatan Manuhing, Kecamatan Rungan, Kecamatan Mihing Raya, Kecamatan Rungan Hulu, Kecamatan Damang Batu, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik.
2. Total nilai Amortisasi Aset Tidak Berwujud – Kajian sebesar -Rp10.391.878.198,00 dicatat pada Dinas Pekerjaan Umum, Badan Penanggulangan Bencana Daerah, Dinas Perikanan dan Ketahanan Pangan, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Penelitian Pengembangan, Inspektorat Kabupaten.

Dana Transfer Treasury Deposit Facility (TDF)

5. 3. 1. 4. 4. Dana Transfer Treasury Deposit Facility (TDF)

Per 31 Desember 2023: Rp236.938.772.000,00
Per 31 Desember 2022: Rp0,00

Nilai Dana Transfer Treasury Deposit Facility (TDF) per 31 Desember 2023 sebesar Rp236.938.772.000,00 merupakan total nilai Pendapatan transfer Pemerintah Pusat - TDF atas Kurang Bayar Dana Bagi Hasil Tahun 2023 pada Badan Keuangan dan Aset Daerah (PPKD) Kabupaten Gunung Mas dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 7.5.111 Dana Transfer Treasury Deposit Facility (TDF)

No.	Uraian	Tahun 2023 (Rp)	Tahun 2022 (Rp)
1.	Dana Bagi Hasil Treasury Deposit Facility (TDF)	236.938.772.000,00	0,00
	Jumlah	**236.938.772.000,00**	**0,00**

Pencatatan nilai Kurang Bayar Dana Bagi Hasil Tahun 2023 bagian Pemerintah Kabupaten Gunung Mas sebesar Rp236.938.772.000,00 sebagai Dana Bagi Hasil Treasury Deposit Facility (TDF) sesuai ketentuan sebagai berikut:

1. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 90 Tahun 2023 tentang Penetapan Kurang Bayar dan Lebih Bayar Dana Bagi Hasil pada Tahun 2023.
2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 108 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 90 Tahun 2023 tentang Penetapan Kurang Bayar dan Lebih Bayar Dana Bagi Hasil pada Tahun 2023.
3. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 159 Tahun 2023 tentang Perubahan Rincian Dana Bagi Hasil Tahun Anggaran 2023.
4. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 38/KM.7/2023 tentang Penyaluran Kurang Bayar Dana Bagi Hasil dan Penyelesaian Lebih Bayar Dana Bagi Hasil pada Tahun 2023.
5. Surat Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Tipe A1 Palangkaraya Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Kalimantan Tengah nomor: S-19/KPN.1801/2024 tanggal 5 Januari 2024 hal Informasi Penyaluran Dana Bagi Hasil (DBH) Akhir Tahun 2023 Kabupaten Gunung Mas.

Kewajiban

5. 3. 2. Kewajiban

Per 31 Desember 2023: Rp3.099.807.731,49
Per 31 Desember 2022: Rp45.491.318.628,49

Jumlah total Kewajiban per 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp3.099.807.731,49 yang merupakan nilai dari Kewajiban Jangka Pendek dan Kewajiban Jangka Panjang dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 7.5.112 Kewajiban

No.	Uraian	Tahun 2023	Tahun 2022
1.	Kewajiban Jangka Pendek	3.099.807.731,49	45.491.318.628,49
2.	Kewajiban Jangka Panjang	0,00	0,00
	Jumlah	**3.099.807.731,49**	**45.491.318.628,49**

Kewajiban Jangka Pendek

5. 3. 2. 1. Kewajiban Jangka Pendek

Per 31 Desember 2023: Rp3.099.807.731,49
Per 31 Desember 2022: Rp45.491.318.628,49

Kewajiban Jangka Pendek merupakan kewajiban yang diharapkan akan dibayar kembali atau jatuh tempo dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca. Saldo Kewajiban Jangka Pendek tahun 2023 per 31 Desember 2023 sebesar Rp3.099.807.731,49 menurut jenisnya berupa Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK), Pendapatan Diterima Dimuka, Utang Belanja, dan Utang Jangka Pendek Lainnya dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 7.5.113 Kewajiban Jangka Pendek

No.	Uraian	Tahun 2023	Tahun 2022
1.	Utang PFK	71.556,00	2.042,00
2.	Pendapatan Diterima Dimuka	195.876.541,00	196.727.942,00
3.	Utang Belanja	2.824.509.634,49	45.294.588.644,49

4.	Utang Jangka Pendek Lainnya	79.350.000,00	0,00
Jumlah		**3.099.807.731,49**	**45.491.318.628,49**

Utang Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)

5. 3. 2. 1. 1. Utang Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)

Per 31 Desember 2023: Rp71.556,00
Per 31 Desember 2022: Rp2.042,00

Utang Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) per 31 Desember 2023 sebesar Rp71.556,00 merupakan Utang Iuran Jaminan Kesehatan dan Utang PPh 21 pada Badan Keuangan dan Aset Daerah dengan subrincian objek sebagai berikut:

Tabel 7.5.114 Utang Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)

No.	Uraian	Saldo Awal (Rp)	Mutasi Tahun 2023 (Rp)		Saldo Akhir (Rp)
			Bertambah	Berkurang	
1.	Utang Iuran Jaminan Kesehatan	2.042,00	2,00	200,00	1.844,00
2.	Utang Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja	0,00	69.712,00	0,00	69.712,00
Jumlah		**2.042,00**	**69.714,00**	**200,00**	**71.556,00**

Pencatatan nilai Utang Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) tahun 2023 sebagaimana tersebut di atas dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Kurang setor PFK – BPJS Kesehatan Non PNS sebesar Rp2.000,00 dengan SP2D NA nomor: 954/1263/SP2D-NA/LS/4.04.02/VIII/2022 tanggal 15 Agustus 2022 atas Potongan Gaji PTT ub. Juli – Agustus Dinas Perpustakaan dan Kearsipan tahun 2022.
2. Kurang setor PFK – BPJS Kesehatan Non PNS sebesar Rp42,00 dengan SP2D NA nomor: 954/2813/SP2D-NA/LS/4.04.02/XII/2022 tanggal 9 Desember 2022 atas Potongan Gaji PTT Diskominfo an. BERNO RUSTAMI PUTRA, SH dkk ub. November s/d Desember 2022.
3. Kurang setor PFK – BPJS Kesehatan Non PNS sebesar Rp2,00 dengan SP2D NA nomor: 900.1.3.1/3677/SP2D-NA/LS/4.04.02/XII/2023 tanggal 11 Desember 2023 atas Gaji PTT Satpol PP Bidang Damkar Ub. Desember 2023.
4. Lebih setor PPh 21 sebesar Rp200,00 dengan SP2D NA nomor: 900.1.3.1/4115/SP2D-NA/LS/4.04.02/XII/2023 tanggal 22 Desember 2023 atas PFK PPh/PPN a.n. PT. MUTU MANAJEMEN KONSULTAN/ Ir. SULISTYANINGSIH - Dinas Pertanian Kabupaten Gunung Mas.
5. Kurang setor PFK – BPJS Ketenagakerjaan Non PNS atas Iuran BPJS Ketenagakerjaan Pegawai Tidak Tetap (PTT) sebesar Rp69.712,00 pada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Gunung Mas tahun 2023. Atas Utang sebesar Rp69.712,00 sudah dibayarkan pada tanggal 20 Februari 2024.

Pendapatan Diterima Dimuka

5. 3. 2. 1. 2. Pendapatan Diterima Dimuka

Per 31 Desember 2023: Rp195.876.541,00
Per 31 Desember 2022: Rp196.727.942,00

Saldo Pendapatan Diterima Dimuka tahun 2023 sebesar Rp195.876.541,00 merupakan jumlah dari Pendapatan Diterima Dimuka Lainnya pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Gunung Mas dan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Gunung Mas dengan subrincian objek sebagai berikut:

Tabel 7.5.115 Pendapatan Diterima Dimuka

No.	Uraian	Saldo Awal (Rp)	Mutasi Tahun 2023 (Rp)		Saldo Akhir (Rp)
			Bertambah	Berkurang	
1.	Pendapatan Diterima Dimuka-Sewa Tanah-Tanah Persil-Tanah Bangunan Perumahan/ Gedung Tempat Tinggal	32.177.953,00	34.026.552,00	32.177.953,00	34.026.552,00
2.	Pendapatan Diterima Dimuka-Sewa Aset Tidak Berwujud-Aset Tidak Berwujud Lainnya	164.549.989,00	161.849.989,00	164.549.989,00	161.849.989,00
Jumlah		**196.727.942,00**	**195.876.541,00**	**196.727.942,00**	**195.876.541,00**

Pencatatan nilai saldo Pendapatan Diterima Dimuka Lainnya tahun 2023 sebagaimana tersebut di atas dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Penyelesaian atas pengakuan Pendapatan Diterima Dimuka-Sewa Tanah-Tanah Persil-Tanah Bangunan Perumahan/Gedung Tempat Tinggal atas Pajak Reklame Papan/ Billboard/ Videotron/ Megatron-LO yang diterima tahun 2022 sebesar Rp32.177.953,00 kemudian terdapat penambahan pada tahun 2023 sebesar Rp34.026.552,00 pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Gunung Mas.
2. Penyelesaian atas pengakuan Pendapatan Diterima Dimuka-Sewa Aset Tidak Berwujud-Aset Tidak Berwujud Lainnya atas Retribusi Penyewaan Tanah dan Bangunan-LO yang diterima tahun 2022 sebesar Rp164.549.989,00 kemudian terdapat penambahan pada tahun 2023 sebesar Rp161.849.989,00 pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Gunung Mas.

Utang Belanja

5. 3. 2. 1. 3. Utang Belanja

Per 31 Desember 2023: Rp2.824.509.634,49
Per 31 Desember 2022: Rp45.294.588.644,49

Utang Belanja tahun 2023 sebesar Rp2.824.509.634,49 terdiri dari Utang Belanja Pegawai, Belanja Barang dan Jasa serta Utang Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi dengan subrincian objek sebagai berikut:

Tabel 7.5.116 Utang Belanja

No.	Uraian	Saldo Awal (Rp)	Mutasi Tahun 2023 (Rp)		Saldo Akhir (Rp)
			Bertambah	Berkurang	
A.	**Utang Belanja Pegawai**	**0,00**	**9.611.460,00**	**0,00**	**9.611.460,00**
1.	Utang Belanja Gaji Pokok ASN-Gaji Pokok PPPK	0,00	9.611.460,00	0,00	9.611.460,00
B.	**Utang Belanja Barang dan Jasa**	**2.649.448.145,00**	**2.633.690.230,00**	**2.502.697.360,00**	**2.780.441.015,00**
1.	Utang Belanja Jasa Kantor atas Jasa Tenaga Kesehatan	379.749.123,00	481.229.415,00	379.749.123,00	481.229.415,00
2.	Utang Belanja Jasa Kantor-tagihan air	27.283.644,00	23.291.382,00	27.283.644,00	23.291.382,00
3.	Utang Belanja Jasa Kantor-tagihan listrik	241.407.450,00	273.174.482,00	241.407.450,00	273.174.482,00
4.	Utang Belanja Jasa Kantor-Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan	0,00	2.865.200,00	0,00	2.865.200,00
5.	Utang Belanja Barang dan Jasa BLUD	2.001.007.928,00	1.853.129.751,00	1.854.257.143,00	1.999.880.536,00
C.	**Utang Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi**	**42.645.140.499,49**	**1.177.645.970,00**	**43.788.329.310,00**	**34.457.159,49**
1.	Utang Belanja Modal Jalan-Jalan Kabupaten	33.540.757.999,99	1.177.645.970,00	34.683.946.810,50	34.457.159,49
2.	Utang Belanja Modal Jalan-Jalan Kota	923.357.500,00	0,00	923.357.500,00	0,00
3.	Utang Belanja Modal Jembatan-Jembatan pada Jalan Kabupaten	8.181.024.999,50	0,00	8.181.024.999,50	0,00
Jumlah		**45.294.588.644,49**	**3.820.947.660,00**	**46.291.026.670,00**	**2.824.509.634,49**

Pencatatan nilai Utang Belanja tahun 2023 sebesar Rp2.824.509.634,49 menurut subrincian objek Utang Belanja sebagaimana tersebut di atas pada satuan kerja Perangkat Daerah (PD) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Gunung Mas dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Utang Belanja Gaji Pokok ASN-Gaji Pokok PPPK tahun 2023 sebesar Rp9.611.460,00 merupakan penyetoran BPJS Kesehatan 4% Atas Tunjangan Khusus Guru (TKG) Triwulan IV (Empat) Ub. Bulan Oktober - Desember Tahun 2023 Bagi PPPK Guru di Lingkup Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga Kabupaten Gunung Mas yang belum disetor sampai dengan 31 Desember 2023 dengan nomor tagihan: 0805/TGN-LS-TKG/PPPK/1.01.01/XII/2023 dan nomor SPM: 0805/SPM-LS-TKG/PPPK/1.01.01/XII/2023 tanggal 27 Desember 2023.

2. Utang Belanja Jasa Kantor atas Jasa Tenaga Kesehatan sebesar Rp481.229.415,00 merupakan total jumlah uang Jasa Tenaga Kesehatan dana kapitasi JKN kepada FKTP tahun 2023 yang belum dibayarkan pada Puskesmas milik Pemerintah Kabupaten Gunung Mas dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 7.5.117 Utang Belanja Jasa Kantor atas Jasa Tenaga Kesehatan

No.	Nama FKTP	Saldo Awal (Rp)	Mutasi Tahun 2023 (Rp)		Saldo Akhir (Rp)
			Bertambah	Berkurang	
1.	RS PRATAMA TUMBANG TALAKEN	0,00	19.607.690,00	0,00	19.607.690,00
2.	Puskesmas Kurun	176.200.000,00	0,00	176.200.000,00	0,00
3.	Puskesmas Tewang Pajangan	15.122.916,00	0,00	15.122.916,00	0,00
4.	Puskesmas Tampang Tumbang Anjir	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Puskesmas Tewah	25.789.070,00	16.460.256,00	25.789.070,00	16.460.256,00
6.	Puskesmas Kampuri	0,00	19.559.787,00	0,00	19.559.787,00
7.	Puskesmas Sepang	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Puskesmas Tumbang Miri	13.232.006,00	45.566.336,00	13.232.006,00	45.566.336,00
9.	Puskesmas Tumbang Rahuyan	70.897.500,00	112.928.409,00	70.897.500,00	112.928.409,00
10.	Puskesmas Tumbang Marikoi	6.162.421,00	48.964.226,00	6.162.421,00	48.964.226,00
11.	Puskesmas Tumbang	9.760.876,00	0,00	9.760.876,00	0,00
12.	Puskesmas Tumbang Talaken	0,00	23.822.148,00	0,00	23.822.148,00
13.	Puskesmas Tumbang Jutuh	10.376.867,00	10.775.406,00	10.376.867,00	10.775.406,00
14.	Puskesmas Tumbang Napoi	4.459.443,00	0,00	4.459.443,00	0,00
15.	Puskesmas Tumbang Masukih	2.307.565,00	28.978.797,00	2.307.565,00	28.978.797,00
16.	Puskesmas Tehang	9.644.115,00	107.720.416,00	9.644.115,00	107.720.416,00
17.	Puskesmas Rabambang	28.785.914,00	25.097.888,00	28.785.914,00	25.097.888,00
18.	Puskesmas Tumbang Lapan	7.010.430,00	21.748.056,00	7.010.430,00	21.748.056,00
Jumlah		**379.749.123,00**	**481.229.415,00**	**379.749.123,00**	**481.229.415,00**

3. Utang Belanja Jasa Kantor atas tagihan air dan listrik sebesar Rp296.465.864,00 atas pemakaian air dan listrik bulan Desember 2022 terdiri dari tagihan air sebesar Rp23.291.382,00 dan tagihan listrik sebesar Rp273.174.482,00 pada satuan kerja Perangkat Daerah (PD) lingkup Pemerintah Kabupaten Gunung Mas.
4. Utang Belanja Jasa Kantor-Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan sebesar Rp2.865.200,00 atas pemakaian internet tahun 2023 pada Sekretariat Daerah Kabupaten Gunung Mas.

5. Utang Belanja Barang dan Jasa BLUD sebesar Rp1.999.880.536,00 merupakan pengakuan Utang Beban Operasional BLUD tahun 2022 pada BLUD UPT RSUD Kuala Kurun.
6. Utang Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi sebesar Rp34.457.159,49 pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Gunung Mas terdiri dari:
   a. Utang Belanja Modal Jalan-Jalan Kabupaten sebesar Rp34.457.159,49 setelah saldo awal sebesar Rp33.540.757.999,99 dikurangi penyelesaian di tahun 2023 sebesar Rp34.683.946.810,50 kemudian terdapat penambahan pengakuan di tahun 2023 sebesar Rp1.177.645.970,00;
   b. Utang Belanja Modal Jalan-Jalan Kota sebesar Rp0,00 setelah saldo awal sebesar Rp923.357.500,00 dikurangi penyelesaian di tahun 2023 sebesar Rp923.357.500,00 dan tidak terdapat penabahan pengakuan di tahun 2023; dan
   c. Utang Belanja Modal Jembatan-Jembatan pada Jalan Kabupaten sebesar Rp0,00 saldo awal sebesar Rp8.181.024.999,50 dikurangi penyelesai di tahun 2023 sebesar Rp8.181.024.999,50 dan tidak terdapat penambahan pengakuan di tahun 2023.

Utang Jangka Pendek Lainnya

5. 3. 2. 1. 4. Utang Jangka Pendek Lainnya

Per 31 Desember 2023: Rp79.350.000,00
Per 31 Desember 2022: Rp0,00

Utang Jangka Pendek Lainnya tahun 2023 sebesar Rp79.350.000,00 merupakan Utang Pengadaan Aset Tetap pada Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga Kabupaten Gunung Mas atas tagihan Pembayaran 100% Pek Perencanaan Rehab Ruang Kls Dgn Tingkat Kerusakan Sedang & Perabotnya (5 Sekolah) An. PT. ANDAL CENDANAKA / SPK No : 000.3.2/47.2/SPK/DISDIKPORA/V/2023, Tgl 16-05-2023 & BAP No :000.3.4/948/PRC/Disdikpora/XII/2023, Tgl 01-12-2023 dengan nomor 0700/TGN-LS-BL/SPK-DAU-PWS/1.01.01/XII/2023 tanggal 15 Desember 2023.

Tabel 7.5.118 Utang Jangka Pendek Lainnya

No.	Uraian	Saldo Awal (Rp)	Mutasi Tahun 2023 (Rp)		Saldo Akhir (Rp)
			Bertambah	Berkurang	
1.	Utang Pengadaan Aset Tetap	0,00	79.350.000,00	0,00	79.350.000,00
Jumlah		**0,00**	**79.350.000,00**	**0,00**	**79.350.000,00**

Ekuitas

5. 3. 3. Ekuitas

Per 31 Desember 2023: Rp2.214.798.010.342,81
Per 31 Desember 2022: Rp2.017.336.123.142,54

Ekuitas adalah kekayaan bersih Pemerintah Kabupaten Gunung Mas yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban Pemerintah Kabupaten Gunung Mas per tanggal 31 Desember 2023. Saldo ekuitas di Neraca harus sama dengan saldo akhir ekuitas pada Laporan Perubahan Ekuitas per 31 Desember 2023.

5. 3. 3. 1. Ekuitas

Per 31 Desember 2023: Rp2.214.798.010.342,81

Saldo Ekuitas tahun 2023 sebesar Rp2.214.798.010.342,81 merupakan hasil dari perhitungan komponen-komponen sebagai berikut:

Tabel 7.5.119 Ekuitas

No.	Uraian	Tahun 2023	Tahun 2022
1.	Total Jumlah Aset	2.217.897.818.074,30	2.062.827.441.771,03
2.	Total Jumlah Kewajiban	3.099.807.731,49	45.491.318.628,49
Ekuitas dalam Neraca (1+2)		**2.214.798.010.342,81**	**2.017.336.123.142,54**

Ekuitas dalam Neraca per tanggal 31 Desember 2023 sebagai penjelas atas Ekuitas Dana yang terdiri dari:

1. Ekuitas Dana Lancar sebesar Rp97.993.256.346,49 adalah selisih antara aset lancar dan kewajiban jangka pendek. Ekuitas dana lancar antara lain kas atau setara kas/ sisa lebih pembiayaan anggaran, piutang, persediaan, dan dana yang harus disediakan untuk pembayaran utang jangka pendek.
2. Ekuitas Dana Investasi sebesar Rp2.116.804.753.996,32 mencerminkan kekayaan pemerintah yang tertanam dalam investasi jangka panjang, aset tetap, dan aset lainnya, dikurangi dengan kewajiban jangka panjang.
3. Ekuitas Dana Cadangan Rp0,00 mencerminkan kekayaan pemerintah yang dicadangkan untuk tujuan tertentu sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Kewajiban dan Ekuitas

Kewajiban dan Ekuitas

Per 31 Desember 2023: Rp2.217.897.818.074,30
Per 31 Desember 2022: Rp2.062.827.441.771,03

Dari uraian dan penjelasan di atas mengenai Kewajiban dan Ekuitas dalam Neraca tahun 2023 maka didapat jumlah Kewajiban dan Ekuitas per 31 Desember 2023 sebesar Rp2.217.897.818.074,30 merupakan pehitungan antara nilai total jumlah Kewajiban tahun 2023 ditambah dengan nilai Ekuitas dalam Neraca tahun 2023 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 7.5.120 Kewajiban dan Ekuitas

No.	Uraian	Saldo Tahun 2023	Saldo Tahun 2022
1.	Total Jumlah Kewajiban - Neraca	3.099.807.731,49	45.491.318.628,49
2.	Total Jumlah Ekuitas - Neraca	2.214.798.010.342,81	2.017.336.123.142,54
	Jumlah Kewajiban dan Ekuitas (1+2)	**2.217.897.818.074,30**	**2.062.827.441.771,03**

Laporan Operasional (LO)

5. 4. Rincian dan Penjelasan Pos-pos Laporan Operasional (LO)

Laporan Operasional menyajikan ikhtisar sumber daya ekonomi yang menambah ekuitas dan penggunaannya yang dikelola oleh Pemerintah Kabupaten Gunung Mas untuk kegiatan penyelenggaraan pemerintahan dalam tahun anggaran 2023. Unsur yang dicakup secara langsung dalam Laporan Operasional terdiri dari pendapatan-LO, beban, transfer, dan pos-pos luar biasa.

Pendapatan – LO

5. 4. 1. Pendapatan – LO

Per 31 Desember 2023: Rp1.321.799.231.687,58
Per 31 Desember 2022: Rp1.015.131.761.619,77

Jumlah total Pendapatan – LO per 31 Desember 2023 sebesar Rp1.321.799.231.687,58 yang merupakan nilai dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) – LO, Pendapatan Transfer – LO, dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah – LO dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 7.5.121 Pendapatan – LO

No.	Uraian	Tahun 2023	Tahun 2022
1.	Pendapatan Asli Daerah (PAD) – LO	40.676.953.488,58	66.473.912.075,00
2.	Pendapatan Transfer – LO	1.274.691.923.614,00	912.557.892.507,77
3.	Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah – LO	6.430.354.585,00	36.099.957.037,00
	Jumlah	**1.321.799.231.687,58**	**1.015.131.761.619,77**

Pendapatan Asli Daerah (PAD) – LO

5. 4. 1. 1. Pendapatan Asli Daerah (PAD) – LO

Per 31 Desember 2023: Rp40.676.953.488,58
Per 31 Desember 2022: Rp66.473.912.075,00

Pendapatan Asli Daerah (PAD) – LO merupakan pendapatan yang menjadi hak pemerintah periode 1 Januari 2022 sampai dengan 31 Desember 2022 yaitu sebesar Rp40.676.953.488,58 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 7.5.122 Pendapatan Asli Daerah (PAD) – LO

No.	Uraian	Tahun 2023	Tahun 2022
1.	Pajak Daerah – LO	12.191.249.035,00	31.080.420.490,00
2.	Retribusi Daerah – LO	5.971.382.265,20	4.664.776.060,00
3.	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan – LO	81.147.428,96	12.683.801.108,00
4.	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah – LO	22.433.174.759,42	18.044.914.417,00
	Jumlah	**40.676.953.488,58**	**66.473.912.075,00**

Adapun rincian realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) – LO Tahun 2023 adalah sebagai berikut:

Pajak Daerah – LO

5. 4. 1. 1. 1. Pajak Daerah – LO

Per 31 Desember 2023: Rp12.191.249.035,00
Per 31 Desember 2022: Rp31.080.420.490,00

Pajak Daerah – LO Tahun 2023 sebesar Rp12.191.249.035,00 merupakan pendapatan dari 10 (sepuluh) objek Pajak Daerah dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 7.5.123 Pajak Daerah – LO

No.	Uraian	Tahun 2023	Tahun 2022
1.	Pajak Hotel-LO	117.233.032,00	112.268.800,00
2.	Pajak Restoran-LO	1.734.469.495,00	1.230.687.795,00
3.	Pajak Hiburan-LO	16.913.500,00	5.654.000,00
4.	Pajak Reklame-LO	455.896.495,00	460.741.046,00
5.	Pajak Penerangan Jalan-LO	2.848.201.117,00	2.537.367.485,00
6.	Pajak Air Tanah-LO	211.498.938,00	137.591.755,00
7.	Pajak Sarang Burung Walet-LO	123.805.000,00	142.807.500,00
8.	Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan-LO	4.416.185.432,00	1.982.298.074,00
9.	Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2)-	1.627.493.017,00	1.497.120.884,00
10.	Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)-LO	639.553.009,00	22.973.883.151,00
Jumlah		**12.191.249.035,00**	**31.080.420.490,00**

Retribusi Daerah – LO

5. 4. 1. 1. 2. Retribusi Daerah – LO

Per 31 Desember 2023: Rp5.971.382.265,20
Per 31 Desember 2022: Rp4.664.776.060,00

Retribusi Daerah – LO Tahun 2023 sebesar Rp5.971.382.265,20 terdiri dari beberapa rincian objek sebagai berikut:

Tabel 7.5.124 Retribusi Daerah – LO

No.	Uraian	Tahun 2023	Tahun 2022
1.	Retribusi Pelayanan Kesehatan – LO	1.008.019.710,00	541.540.229,00
2.	Retribusi Pelayanan Persampahan/ Kebersihan – LO	261.895.000,00	318.957.500,00
3.	Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum – LO	30.050.000,00	30.100.000,00
4.	Retribusi Pelayanan Pasar – LO	107.825.000,00	126.992.000,00
5.	Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor – LO	100.660.000,00	107.985.000,00
6.	Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta – LO	300.000,00	21.600.000,00
7.	Retribusi Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang – LO	11.924.000,00	10.361.000,00
8.	Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi – LO	362.308.200,00	179.383.200,00
9.	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah – LO	2.151.291.500,00	1.414.206.411,00
10.	Retribusi Pasar Grosir dan/ atau Pertokoan - LO	158.600.000,00	371.260.989,00
11.	Retribusi Tempat Khusus Parkir – LO	11.261.000,00	13.630.000,00

12.	Retribusi Rumah Potong Hewan – LO	5.000.000,00	5.150.000,00
13.	Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah raga- LRA – LO	88.103.000,00	134.060.000,00
14.	Retribusi Penyeberangan Air – LO	10.050.000,00	9.000.000,00
15.	Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah - LO	142.309.000,00	103.760.000,00
16.	Retribusi Izin Mendirikan Bangunan – LO	546.785.855,20	306.789.731,00
17.	Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol – LO	975.000.000,00	970.000.000,00
	Jumlah	**5.971.382.265,20**	**4.664.776.060,00**

Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan – LO

5. 4. 1. 1. 3. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan – LO

Per 31 Desember 2023: Rp81.147.428,96
Per 31 Desember 2022: Rp12.683.801.108,00

Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan – LO tahun 2023 sebesar Rp81.147.428,96 merupakan Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Kabupaten Gunung Mas (deviden) atas penyertaan modal pada PT JAMKRIDA KALTENG untuk Tahun Buku 2021 dan 2022 yang diterima pada tahun 2023.

Tabel 7.5.125 Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan – LO

No.	Uraian	Tahun 2023	Tahun 2022
1.	Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Lembaga Keuangan)-LO	81.147.428,96	12.683.801.108,00
	Jumlah	**81.147.428,96**	**12.683.801.108,00**

Lain-Lain PAD Yang Sah – LO

5. 4. 1. 1. 4. Lain-Lain PAD Yang Sah – LO

Per 31 Desember 2023: Rp22.433.174.759,42
Per 31 Desember 2022: Rp18.044.914.417,00

Lain-lain Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang Sah – LO sebesar Rp22.433.174.759,42 yang menjadi hak Pemerintah Kabupaten Guung Mas selama tahun 2023 terdiri dari subrincian objek sebagai berikut:

Tabel 7.5.126 Lain-Lain PAD Yang Sah – LO

No.	Uraian	Tahun 2023	Tahun 2022
1.	Hasil Penjualan Alat Angkutan-LO	227.132.800,00	250.219.977,00
2.	Jasa Giro pada Kas Daerah-LO	1.571.073.547,00	1.765.891.429,00
3.	Pendapatan Bunga atas Penempatan Uang Pemerintah Daerah-LO	16.213.260,00	23.370.157,14
4.	Penerimaan Komisi, Potongan, atau Bentuk Lain-LO	103.356.276,00	87.334.235,00
5.	Pendapatan Denda Pajak Reklame Papan/ Billboard/ Videotron/ Megatron-LO	0,00	27.002.375,00
6.	Pendapatan Denda PBBP2-LO	34.622.891,00	48.535.410,00
7.	Pendapatan Denda Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol-LO	21.400.000,00	25.500.000,00

8.	Pendapatan Hasil Eksekusi atas Jaminan-LO	3.811.900.000,00	0,00
9.	Pendapatan dari BLUD-LO	13.968.400.921,00	13.031.002.137,00
10.	Pendapatan Denda atas Pelanggaran Peraturan Daerah-LO	2.426.546.966,42	2.786.058.696,86
11.	Remunerasi Dana Bagi Hasil Treasury Deposit Facility (TDF)-LO	252.528.098,00	0,00
	Jumlah	**22.433.174.759,42**	**18.044.914.417,00**

Terdapat selisih atas Perbandingan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang Sah – LO dan LRA serta Piutang Lain-lain PAD yang SahTahun 2023 dan Tahun 2022 dijabarkan sebagai berikut.

Lain-lain Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang Sah – LO	22.433.174.759,42
Lain-lain Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang Sah – LRA	18.198.092.951,42
Selisih (i)	**4.235.081.808,00**
Piutang Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah Tahun 2023	2.775.305.849,14
Piutang Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah Tahun 2022	2.281.074.041,14
Selisih (ii)	**494.231.808,00**
Selisih (i) - Selisih (ii)	**3.740.850.000,00**

Selisih sebesar Rp3.740.850.000,00 dapat dijabarkan sebagai berikut.

Retensi yang tidak dibayarkan atas peningkatan Jalan Tumbang Miri-Tumbang Sian dan Tumbang Napoi Tahun Jamak TA 2020-2022 sesuai dengan LHP BPK Kepatuhan atas Belanja Daerah Tahun 2022 dan 2023 derngan nomor LHP 4/LHP/XIX.PAL/01/2024	3.811.900.000,00
Piutang Transfer Pusat Tahun 2022 direklas ke piutang Lain-lain PAD	(71.050.000,00)
Jumlah	**3.740.850.000,00**

Pendapatan Transfer – LO

5. 4. 1. 2. Pendapatan Transfer – LO

Per 31 Desember 2023: Rp1.274.691.923.614,00
Per 31 Desember 2022: Rp912.557.892.507,77

Pendapatan Transfer – LO Tahun 2023 sebesar Rp1.274.691.923.614,00 teridiri dari Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat – LO dan Pendapatan Transfer Antar Daerah – LO dengan rincian seperti pada tabel berikut:

Tabel 7.5.127 Pendapatan Transfer – LO

No.	Uraian	Tahun 2023	Tahun 2022
1.	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat – LO	1.209.871.026.345,00	878.498.676.072,00
2.	Pendapatan Transfer Antar Daerah – LO	64.820.897.269,00	34.059.216.435,77
	Jumlah	**1.274.691.923.614,00**	**912.557.892.507,77**

Adapun rincian Pendapatan Transfer – LO Tahun 2023 adalah sebagai berikut:

Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat – LO

5. 4. 1. 2. 1. Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat – LO

Per 31 Desember 2023: Rp1.209.871.026.345,00
Per 31 Desember 2022: Rp878.498.676.072,00

Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat – LO tahun 2023 sebesar Rp1.209.871.026.345,00 terdiri dari rincian objek sebagai berikut:

Tabel 7.5.128 Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat – LO

No.	Uraian	Tahun 2023	Tahun 2022
1.	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil (DBH)- LO	485.270.958.000,00	171.778.085.355,00
2.	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum (DAU)-LO	529.272.767.216,00	510.277.550.470,00
3.	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik-LO	72.770.345.330,00	97.735.626.106,00
4.	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik-LO	107.100.756.799,00	94.886.375.141,00
5.	Dana Insentif Daerah (DID)-LO	15.456.199.000,00	3.821.039.000,00
Jumlah		**1.209.871.026.345,00**	**878.498.676.072,00**

Terdapat selisih atas Perbandingan Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat – LO dan LRA serta Piutang Transfer Pemerintah Pusat - Dana Perimbangan Tahun 2023 dan Tahun 2022 dijabarkan sebagai berikut.

Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat – LO	1.209.871.026.345,00
Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat – LRA	1.078.209.703.770,00
Selisih (i)	**131.661.322.575,00**
Piutang Transfer Pemerintah Pusat - Dana Perimbangan Tahun 2023	0,00
Piutang Transfer Pemerintah Pusat - Dana Perimbangan Tahun 2023	71.050.000,00
Selisih (ii)	**(71.050.000,00)**
Selisih (i) - Selisih (ii)	**131.732.372.575,00**

Selisih sebesar Rp131.732.372.575,00 dapat dijabarkan sebagai berikut.

Dana Bagi Hasil Treasury Deposit Facility (TDF) Tahun 2023	236.938.772.000,00
Dana Bagi Hasil Treasury Deposit Facility (TDF) Tahun 2022	(10.234.288.235,00)
Penerimaan dana desa Tahun 2023-LRA	(95.043.161.190,00)
Piutang Transfer Pusat Tahun 2022 direklas ke piutang Lain-lain PAD	71.050.000,00
Jumlah	**131.732.372.575,00**

Pendapatan Transfer Antar Daerah – LO

5. 4. 1. 2. 2. Pendapatan Transfer Antar Daerah – LO

Per 31 Desember 2023: Rp64.820.897.269,00
Per 31 Desember 2022: Rp34.059.216.435,77

Pendapatan Transfer Antar Daerah – LO tahun 2023 merupakan Pendapatan Bagi Hasil Pajak dari Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah tahun 2023 sebesar Rp64.820.897.269,00 dengan subrincian objek sebagai berikut:

Tabel 7.5.129 Pendapatan Transfer Antar Daerah – LO

No.	Uraian	Tahun 2023	Tahun 2022
1.	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor-LO	8.188.648.950,68	3.374.545.157,37
2.	Pendapatan Bagi Hasil Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor-LO	12.277.351.557,90	4.896.004.698,00
3.	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor-LO	36.266.868.491,06	17.044.828.444,71
4.	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Air Permukaan- LO	177.044.704,36	43.645.237,69

5.	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Rokok-LO	7.910.983.565,00	8.700.192.898,00
	Jumlah	**64.820.897.269,00**	**34.059.216.435,77**

Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah – LO

5. 4. 1. 3. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah – LO

Per 31 Desember 2023: Rp6.430.354.585,00
Per 31 Desember 2022: Rp36.099.957.037,00

Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah – LO tahun 2023 sebesar Rp6.430.354.585,00 dengan rincian seperti sebagai berikut:

Tabel 7.5.130 Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah – LO

No.	Uraian	Tahun 2023	Tahun 2022
1.	Pendapatan Hibah – LO	1.827.699.309,00	34.616.052.381,00
2.	Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan – LO	4.602.655.276,00	1.483.904.656,00
	Jumlah	**6.430.354.585,00**	**36.099.957.037,00**

Untuk penjelasan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah – LO tahun 2023 diuraikan sebagai berikut di bawah ini:

Pendapatan Hibah – LO

5. 4. 1. 3. 1. Pendapatan Hibah – LO

Per 31 Desember 2023: Rp1.827.699.309,00
Per 31 Desember 2022: Rp34.616.052.381,00

Jumlah Pendapatan Hibah – LO tahun 2023 sebesar Rp1.827.699.309,00 merupakan Pendapatan Hibah dari Pemerintah Pusat dan Pendapatan Hibah dari Pemerintah Daerah dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 7.5.131 Pendapatan Hibah – LO

No.	Uraian	Tahun 2023	Tahun 2022
1.	Pendapatan Hibah dari Pemerintah Pusat-LO	1.827.699.309,00	30.672.081.976,00
2.	Pendapatan Hibah dari Pemerintah Daerah-LO	0,00	3.943.970.405,00
	Jumlah	**1.827.699.309,00**	**34.616.052.381,00**

Penjelasan Hibah – LO tahun 2023 sebagai berikut:

1. Pendapatan Hibah dari Pemerintah Pusat sebesar Rp1.827.699.309,00 pada Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Gunung Mas terdiri dari:
   a. Penambahan Aset Tetap yang Berasal dari Hibah masuk dari Kementerian Kesehatan RI TA 2023 sebesar Rp232.209.309,00 pada Dinas Kesehatan Kabupaten Gunung Mas;
   b. Penambahan Aset Tetap yang berasal dari Hibah masuk TA 2023 sebesar Rp276.529,00 pada Rumah Sakit Umum Daerah Kuala Kurun; dan
   c. Penambahan Aset Tetap yang berasal dari Hibah masuk TA 2023 sebesar Rp1.595.490.000,00 pada Dinas Lingkungan Hidup, Kehutanan, dan Perhubungan.

Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan – LO

5. 4. 1. 3. 2. Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan – LO

Per 31 Desember 2023: Rp4.602.655.276,00
Per 31 Desember 2022: Rp1.483.904.656,00

Jumlah Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan – LO selama tahun 2023 sebesar Rp4.602.655.276,00 merupakan Pendapatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) yang ditransfer oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan ke masing-masing FKTP atau Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) milik Pemerintah Kabupaten Gunung Mas.

Tabel 7.5.132 Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan – LO

No.	Uraian	Tahun 2023	Tahun 2022
1.	Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP-LO	4.602.655.276,00	1.483.904.656,00
	Jumlah	**4.602.655.276,00**	**1.483.904.656,00**

Terdapat selisih atas Perbandingan Lain - Lain Pendapatan yang Sah Tahun Berjalan (LO) dan LRA serta Piutang Lain - Lain Pendapatan yang Sah Tahun 2023 dan Tahun 2022 dijabarkan sebagai berikut.

Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat – LO	6.430.354.585,00
Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat – LRA	4.602.655.276,00
Selisih (i)	**1.827.699.309,00**
Piutang Lain - Lain Pendapatan yang Sah Tahun 2023	0,00
Piutang Lain - Lain Pendapatan yang Sah Tahun 2022	0,00
Selisih (ii)	**0,00**
Selisih (i) - Selisih (ii)	**1.827.699.309,00**

Selisih sebesar Rp1.827.699.309,00 dapat dijabarkan sebagai berikut.

Penambahan Aset Tetap yang Berasal dari Hibah masuk dari Kementerian Kesehatan RI pada Dinas KesehatanTahun 2023	232.209.309,00
Penambahan Aset Tetap yang berasal dari Hibah Kementerian Pehubungan pada Dinas Lingkungan Hidup, Kehutanan, dan Perhubungan Tahun 2023	1.595.490.000,00
Jumlah	**1.827.699.309,00**

Beban Daerah

5. 4. 2. Beban Daerah

Per 31 Desember 2023: Rp1.120.093.206.472,62
Per 31 Desember 2022: Rp988.659.210.893,30

Jumlah total Beban Daerah per 31 Desember 2023 sebesar Rp1.120.093.206.472,62 yang merupakan nilai dari Beban Operasi dan Beban Transfer dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 7.5.133 Beban Daerah

No.	Uraian	Tahun 2023	Tahun 2022
1.	Beban Operasi	1.037.538.776.690,62	928.132.814.536,30
2.	Beban Transfer	82.554.429.782,00	60.526.396.357,00
	Jumlah	**1.120.093.206.472,62**	**988.659.210.893,30**

Beban Operasi

5. 4. 2. 1. Beban Operasi

Per 31 Desember 2023: Rp1.037.538.776.690,62
Per 31 Desember 2022: Rp928.132.814.536,30

Beban Operasi tahun 2023 sebesar Rp1.037.538.776.690,62 terdiri dari beberapa jenis dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 7.5.134 Beban Operasi

No.	Uraian	Tahun 2023	Tahun 2022
1.	Beban Pegawai	412.042.924.617,00	382.850.310.978,00
2.	Beban Barang dan Jasa	321.360.731.941,81	257.481.111.592,35
3.	Beban Hibah	51.411.356.916,00	16.111.462.818,00
4.	Beban Bantuan Sosial	203.500.000,00	863.805.000,00
5.	Beban Penyisihan Piutang	201.059.914,81	64.443.715,10
6.	Beban Penyusutan dan Amortisasi	250.358.647.752,00	266.074.829.955,28
7.	Beban Lain-lain	1.960.555.549,00	4.686.850.477,57
	Jumlah	**1.037.538.776.690,62**	**928.132.814.536,30**

Beban Pegawai

5. 4. 2. 1. 1. Beban Pegawai

Per 31 Desember 2023: Rp412.042.924.617,00
Per 31 Desember 2022: Rp382.850.310.978,00

Beban Pegawai selama tahun 2023 sebesar Rp412.042.924.617,00 dengan rincian objek sebagai berikut:

Tabel 7.5.135 Beban Pegawai

No.	Uraian	Tahun 2023	Tahun 2022
1.	Beban Gaji dan Tunjangan ASN	248.066.145.165,00	229.064.294.922,00
2.	Beban Tambahan Penghasilan ASN	53.068.706.815,00	78.393.530.896,00
3.	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	93.921.377.471,00	57.915.539.115,00
4.	Beban Gaji dan Tunjangan DPRD	12.038.663.568,00	11.934.978.558,00
5.	Beban Gaji dan Tunjangan KDH/ WKDH	313.096.859,00	267.074.599,00
6.	Beban Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/ WKDH	597.600.000,00	597.600.000,00
7.	Beban Pegawai BOS	3.776.508.500,00	4.477.588.750,00
8.	Beban Pegawai BLUD	260.826.239,00	199.704.138,00
	Jumlah	**412.042.924.617,00**	**382.850.310.978,00**

Beban Barang dan Jasa

5. 4. 2. 1. 2. Beban Barang dan Jasa

Per 31 Desember 2023: Rp321.360.731.941,81
Per 31 Desember 2022: Rp257.481.111.592,35

Beban Barang dan Jasa selama tahun 2023 sebesar Rp321.360.731.941,81 terdiri dari beberapa objek sebagai berikut:

Tabel 7.5.136 Beban Barang dan Jasa

No.	Uraian	Tahun 2023	Tahun 2022
1.	Beban Barang	57.207.304.463,15	39.597.780.701,54
2.	Beban Jasa	129.766.592.243,60	113.553.799.670,70
3.	Beban Pemeliharaan	22.067.053.948,35	16.271.815.545,00
4.	Beban Perjalanan Dinas	75.484.971.642,00	55.956.974.851,00

5.	Beban Uang dan/ atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/ Pihak Lain/ Masyarakat	5.118.951.445,00	3.925.732.057,00
6.	Beban Barang dan Jasa BOS	17.043.391.119,71	16.599.923.330,11
7.	Beban Barang dan Jasa BLUD	14.672.467.080,00	11.575.085.437,00
Jumlah		**321.360.731.941,81**	**257.481.111.592,35**

Berikutnya rincian Beban Barang dan Jasa tahun 2023 menurut rincian objek sebagai berikut:

Tabel 7.5.137 Rincian Beban Barang dan Jasa

No.	Uraian	Tahun 2023	Tahun 2022
1.	Beban Barang Pakai Habis	57.198.397.220,15	39.596.550.701,54
2.	Beban Barang Tak Habis Pakai	8.907.243,00	1.230.000,00
3.	Beban Jasa Kantor	99.056.802.499,00	95.734.245.813,70
4.	Beban Iuran Jaminan/ Asuransi	20.179.891.968,00	11.402.366.961,00
5.	Beban Sewa Peralatan dan Mesin	1.758.018.217,00	851.361.476,00
6.	Beban Sewa Gedung dan Bangunan	422.320.079,00	314.793.376,00
7.	Beban Sewa Aset Tetap Lainnya	73.980.000,00	3.000.000,00
8.	Beban Jasa Konsultansi Konstruksi	1.884.872.818,60	552.954.050,00
9.	Beban Jasa Konsultansi Non Konstruksi	2.525.500.402,00	1.136.182.240,00
10.	Beban Beasiswa Pendidikan PNS	28.000.000,00	377.658.000,00
11.	Beban Kursus/ Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan	3.837.206.260,00	3.181.237.754,00
12.	Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	10.197.483.919,00	8.899.596.599,00
13.	Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	4.679.906.132,35	2.017.812.596,00
14.	Beban Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi	7.189.663.897,00	5.354.406.350,00
15.	Beban Perjalanan Dinas Dalam Daerah	75.484.971.642,00	55.956.974.851,00
16.	Beban Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/ Pihak Lain/ Masyarakat	4.732.883.695,00	3.925.732.057,00
17.	Beban Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/ Pihak Lain/ Masyarakat	386.067.750,00	0,00
17.	Beban Barang dan Jasa BOS	17.043.391.119,71	16.599.923.330,11
18.	Beban Barang dan Jasa BLUD	14.672.467.080,00	11.575.085.437,00
Jumlah		**321.360.731.941,81**	**257.481.111.592,35**

Beban Hibah

5. 4. 2. 1. 3. Beban Hibah

Per 31 Desember 2023: Rp51.411.356.916,00
Per 31 Desember 2022: Rp16.111.462.818,00

Beban Hibah selama tahun 2023 sebesar Rp51.411.356.916,00 terdiri dari beberapa subrincian objek sebagai berikut:

Tabel 7.5.138 Beban Hibah

No.	Uraian	Tahun 2023	Tahun 2022
1.	Beban Hibah Uang kepada Pemerintah Pusat	1.494.455.772,00	338.162.000,00
2.	Beban Hibah Barang kepada Pemerintah Daerah Lainnya	1.200.000.000,00	612.531.407,00

3.	Beban Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan	33.219.523.374,00	7.470.936.600,00
4.	Beban Hibah Barang kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan	4.258.732.953,00	3.865.093.752,00
5.	Beban Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar	0,00	169.839.000,00
6.	Beban Hibah Barang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar	6.683.900.000,00	1.082.140.880,00
7.	Beban Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan	3.330.973.000,00	1.465.000.000,00
8.	Beban Hibah Barang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan	85.416.338,00	0,00
9.	Beban Hibah Uang Dana BOS yang Diterima oleh Satdikdas Negeri	350.507.700,00	319.911.400,00
10.	Beban Hibah Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik	787.847.779,00	787.847.779,00
	Jumlah	**51.411.356.916,00**	**16.111.462.818,00**

Terdapat selisih atas Perbandingan Beban Hibah Tahun 2023 (LO) dan Belanja Hibah LRA dijabarkan sebagai berikut.

Beban Hibah		51.411.356.916,00
Belanja Hibah		48.514.563.352,00
	Selisih (i)	**2.896.793.564,00**

Selisih sebesar Rp2.896.793.564,00 dapat dijabarkan sebagai berikut.

Pemberian hibah barang yang berasal dari aset tetap/aset lainnya yang dimiliki entitas	3.456.845.864,00
Beban hibah dana BOS dicatat sebagai Aset tetap (gedung dan bangunan, jalan dan peralatan dan mesin)	(104.772.300,00)
Beban Hibah PAUD	(455.280.000,00)
Jumlah	**2.896.793.564,00**

Beban Bantuan Sosial

5. 4. 2. 1. 4. Beban Bantuan Sosial

Per 31 Desember 2023: Rp203.500.000,00
Per 31 Desember 2022: Rp863.805.000,00

Beban Bantuan Sosial selama tahun 2023 sebesar Rp203.500.000,00 terdiri dari beberapa subrincian objek sebagai berikut:

Tabel 7.5.139 Beban Bantuan Sosial

No.	Uraian	Tahun 2023	Tahun 2022
1.	Beban Bantuan Sosial Uang yang Direncanakan kepada Individu	185.500.000,00	514.000.000,00
2.	Beban Bantuan Sosial Barang yang Direncanakan kepada Individu	0,00	92.225.000,00
3.	Beban Bantuan Sosial Uang yang Direncanakan kepada Keluarga	18.000.000,00	0,00

4.	Beban Bantuan Sosial Uang yang Direncanakan kepada Kelompok Masyarakat	0,00	210.500.000,00
5.	Beban Bantuan Sosial Barang kepada Kelompok Masyarakat	0,00	47.080.000,00
	Jumlah	**203.500.000,00**	**863.805.000,00**

Beban Bantuan Sosial tahun 2023 sebesar Rp203.500.000,00 dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Beban Belanja Bantuan Sosial Uang yang direncanakan kepada Individu sebesar Rp185.500.000,00 pada Sekretariat Daerah Kabupaten Gunung Mas merupakan bantuan untuk penyelesaian tugas akhir (skripsi) kepada 13 mahasiswa, bantuan untuk mahasiswa dari keluarga kurang mampu berdasarkan SK Bupati Gunung Mas Nomor 430 Tahun 2022, dan bantuan untuk mahasiswa berprestasi dari Pemerintah Kabupaten gunung Mas berdasarkan SK Bupati Gunung Mas Nomor 429 Tahun 2022.
2. Beban Bantuan Sosial kepada Keluarga atas Belanja Bantuan Sosial Uang yang Direncanakan kepada Keluarga sebesar Rp18.000.000,00 pada Sekretariat Daerah Kabupaten Gunung Mas merupakan bantuan uang untuk mahasiswa menyelesaikan tugas akhir/skripsi.

Beban Penyisihan Piutang

5. 4. 2. 1. 5. Beban Penyisihan Piutang

Per 31 Desember 2023: Rp201.059.914,81
Per 31 Desember 2022: Rp64.443.715,10

Beban Penyisihan Piutang selama tahun 2023 sebesar Rp201.059.914,81 terdiri dari beberapa subrincian objek sebagai berikut:

Tabel 7.5.140 Beban Penyisihan Piutang

No.	Uraian	Tahun 2023	Tahun 2022
1.	Beban Penyisihan Piutang Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan (PBBP2)	176.307.923,20	(23.984.891,90)
2.	Beban Penyisihan Piutang Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga	11.250.000,00	0,00
3.	Beban Penyisihan Piutang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah-Penyewaan Tanah dan Bangunan	52.869.000,00	40.478.000,00
4.	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan Bunga atas Penempatan Uang Pemerintah Daerah	248.212,61	0,00
5.	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan BLUD	(39.615.221,00)	47.950.607,00
	Jumlah	**201.059.914,81**	**64.443.715,10**

Beban Penyisihan Piutang tahun 2023 sebesar Rp201.059.914,81 dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Beban Penyisihan Piutang Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan (PBBP2) sebesar Rp176.307.923,20 pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Gunung Mas merupakan penyisihan piutang PBB TA 2023.

2. Beban Penyisihan Piutang Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga sebesar Rp11.250.000,00 pada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Gunung Mas merupakan penyisihan piutang retribusi tempat rekreasi dan olahraga TA 2023.
3. Beban Penyisihan Piutang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah-Penyewaan Tanah dan Bangunan sebesar Rp52.869.000,00 terdiri dari penyisihan piutang pemakaian kekayaan daerah sewa ruko TA 2023 sebesar Rp40.985.000,00 pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Gunung Mas dan penyisihan piutang retribusi sewa rumah dinas TA 2023 sebesar Rp11.884.000,00 pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Gunung Mas.
4. Beban Penyisihan Piutang Pendapatan Bunga atas Penempatan Uang Pemerintah Daerah sebesar Rp248.212,61 pada Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Gunung Mas merupakan penyisihan piutang pendaptan bunga TDF TA 2023.
5. Beban Penyisihan Piutang Pendapatan BLUD sebesar -Rp39.615.221,00 pada BLUD RSUD Kuala merupakan penyisihan piutang jasa layanan kesehatan BLUD TA 2023.

Beban Penyusutan dan Amortisasi

5. 4. 2. 1. 6. Beban Penyusutan dan Amortisasi

Per 31 Desember 2023: Rp250.358.647.752,00
Per 31 Desember 2022: Rp266.074.829.955,28

Beban Penyusutan dan Amortisasi tahun 2023 sebesar Rp250.358.647.752,00 terdiri dari beberapa subrincian objek dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 7.5.141 Beban Penyusutan dan Amortisasi

No.	Uraian	Tahun 2023	Tahun 2022
1.	Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	41.134.505.358,00	39.705.628.665,00
2.	Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	46.455.070.368,00	41.574.123.450,00
3.	Beban Penyusutan Jalan, Jaringan dan Irigasi	162.176.876.942,00	184.003.896.498,28
4.	Beban Penyusutan Aset Tetap Lainnya	41.996.264,00	54.975.512,00
6.	Beban Amortisasi Aset Lainnya-Aset Tidak Berwujud	550.198.820,00	736.205.830,00
	Jumlah	**250.358.647.752,00**	**266.074.829.955,28**

Beban Lain-lain

5. 4. 2. 1. 7. Beban Lain-lain

Per 31 Desember 2023: Rp1.960.555.549,00
Per 31 Desember 2022: Rp4.686.850.477,57

Beban Lain-lain tahun 2023 sebesar Rp1.960.555.549,00 terdiri dari beberapa subrincian objek dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 7.5.142 Beban Lain-lain

No.	Uraian	Tahun 2023	Tahun 2022
1.	Beban Lain-lain	1.960.555.549,00	2.949.578.364,57

2.	Beban Penyusutan Properti Investasi	0,00	1.737.272.113,00
Jumlah		**1.960.555.549,00**	**4.686.850.477,57**

Beban Transfer

5. 4. 2. 2. Beban Transfer

Per 31 Desember 2023: Rp82.554.429.782,00
Per 31 Desember 2022: Rp60.526.396.357,00

Beban Transfer tahun 2023 sebesar Rp82.554.429.782,00 terdiri dari Beban Bagi Hasil dan Beban Bantuan Keuangan dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 7.5.143 Beban Transfer

No.	Uraian	Tahun 2023	Tahun 2022
1.	Beban Bagi Hasil	5.391.902.399,00	0,00
2.	Beban Bantuan Keuangan	77.162.527.383,00	60.526.396.357,00
Jumlah		**82.554.429.782,00**	**60.526.396.357,00**

Terdapat selisih atas Perbandingan Beban Transfer Tahun 2023

(LO) dan Belanja Transfer LRA dijabarkan sebagai berikut.

Beban Transfer		82.554.429.782,00
Belanja Transfer		177.597.590.972,00
	Selisih (i)	**(95.043.161.190,00)**

Selisih sebesar (Rp95.043.161.190,00) dapat dijabarkan sebagai berikut.

Beban atas penerimaan dana desa tahun 2023		(95.043.161.190,00)
	Jumlah	**(95.043.161.190,00)**

Beban Bagi Hasil

5. 4. 2. 2. 1. Beban Bagi Hasil

Per 31 Desember 2023: Rp5.391.902.399,00
Per 31 Desember 2022: Rp0,00

Selama tahun 2023 terdapat Beban Bagi Hasil yang merupakan Beban Bagi Hasil Pajak dan Retribusi kepada Pemerintah Desa sebesar 5.391.902.39Rp9,00 dengan subrincian objek sebagai berikut:

Tabel 7.5.144 Beban Bagi Hasil

No.	Uraian	Tahun 2023	Tahun 2022
1.	Beban Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Desa	4.952.494.400,00	0,00
2.	Beban Bagi Hasil Retribusi Daerah Kabupaten/Kota Kepada Pemerintah Desa	439.407.999,00	0,00
Jumlah		**5.391.902.399,00**	**0,00**

Beban Bantuan Keuangan

5. 4. 2. 2. 2. Beban Bantuan Keuangan

Per 31 Desember 2023: Rp77.162.527.383,00
Per 31 Desember 2022: Rp60.526.396.357,00

Beban Bantuan Keuangan selama tahun 2023 sebesar Rp77.162.527.383,00 terdiri dari subrincian objek sebagai berikut:

Tabel 7.5.145 Beban Bantuan Keuangan

No.	Uraian	Tahun 2023	Tahun 2022
1.	Beban Bantuan Keuangan Umum antar Daerah Provinsi	485.000.000,00	245.000.000,00
2.	Beban Bantuan Keuangan Umum Daerah Provinsi atau Kabupaten/ Kota ke Desa	0,00	60.281.396.357,00
3.	Beban Bantuan Keuangan Khusus Kabupaten/Kota kepada Desa yang bersumber dari Alokasi Dana Desa	76.677.527.383,00	0,00
	Jumlah	**77.162.527.383,00**	**60.526.396.357,00**

Beban Bantuan Keuangan tahun 2023 sebesar Rp77.162.527.383,00 dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Beban Bantuan Keuangan Umum kepada Pemerintah Provinsi sebesar Rp485.000.000,00 merupakan pembayaran Bantuan Keuangan Umum kepada Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah untuk sewa transponder satelit tahun 2022 berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor: 188.44/1/2022 tanggal 3 Januari 2022.
2. Beban Bantuan Keuangan Khusus Kabupaten/Kota kepada Desa yang bersumber dari Alokasi Dana Desa dengan total nilai sebesar Rp76.677.527.383,00 merupakan penyaluran Alokasi Dana Desa (ADD) kepada 114 Desa di wilayah Pemerintah Kabupaten Gunung Mas berdasarkan Peraturan Bupati Gunung Mas Nomor 15 Tahun 2023 tentang Tata Cara Pengalokasian dan Penetapan Rincian Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2023.

Surplus/ (Defisit) dari Operasi

Surplus/ (Defisit) dari Operasi
Per 31 Desember 2023: Rp201.706.025.214,96
Per 31 Desember 2022: Rp26.472.550.726,47

Dari uraian nilai-nilai Laporan Operasional atas Kegiatan Operasional selama tahun 2023, maka diperoleh surplus dari Operasi sebesar Rp201.706.025.214,96 yang merupakan hasil pengurangan dari nilai Pendapatan Daerah – LO oleh nilai Beban Daerah.

Tabel 7.5.146 Surplus/ (Defisit) dari Operasi

No.	Uraian	Tahun 2023	Tahun 2022
1.	Pendapatan Daerah – LO	1.321.799.231.687,58	1.015.131.761.619,77
2.	Beban Daerah	1.120.093.206.472,62	988.659.210.893,30
	Jumlah	**201.706.025.214,96**	**26.472.550.726,47**

Kegiatan Non Operasional – LO

5. 4. 3. Kegiatan Non Operasional – LO
Per 31 Desember 2023: (Rp3.933.395.825,19)
Per 31 Desember 2022: (Rp4.676.213.805,00)

Kegiatan Non Operasional – LO pada tahun 2023 mengalami defisit sebesar -Rp3.933.395.825,19 merupakan perhitungan dari Surplus Non Operasional – LO dikurangi Defisit Non Operasional – LO dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 7.5.147 Kegiatan Non Operasional – LO

No.	Uraian	Tahun 2023	Tahun 2022
1.	Surplus Non Operasional – LO	21.689.804.470,00	0,00
2.	Defisit Non Operasional – LO	25.623.200.295,19	4.676.213.805,00
	Jumlah	**(3.933.395.825,19)**	**(4.676.213.805,00)**

Surplus Non Operasional – LO

5. 4. 3. 1. Surplus Non Operasional – LO

Per 31 Desember 2023: Rp21.689.804.470,00
Per 31 Desember 2022: Rp0,00

Surplus Non Operasional – LO tahun 2023 sebesar Rp21.689.804.470,00 terdiri dari Surplus Penjualan/ Pertukaran/ Pelepasan Aset Non Lancar – LO dan Surplus Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang – LO dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 7.5.148 Surplus Non Operasional – LO

No.	Uraian	Tahun 2023	Tahun 2022
1.	Surplus Penjualan/ Pertukaran/ Pelepasan Aset Non Lancar – LO	21.689.804.470,00	0,00
2.	Surplus Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang – LO	0,00	0,00
3.	Surplus dari Kegiatan Non Operasional Lainnya-LO	0,00	0,00
	Jumlah	**21.689.804.470,00**	**0,00**

Surplus Penjualan/ Pertukaran/ Pelepasan Aset Non Lancar – LO

5. 4. 3. 1. 1. Surplus Penjualan/ Pertukaran/ Pelepasan Aset Non Lancar – LO

Per 31 Desember 2023: Rp21.689.804.470,00
Per 31 Desember 2022: Rp0,00

Surplus Penjualan/ Pertukaran/ Pelepasan Aset Non Lancar – LO selama tahun 2023 sebesar Rp21.689.804.470,00 merupakan Surplus Pelepasan Investasi Jangka Panjang-LO atas Surplus Pelepasan Penyertaan Modal-LO pada Perusahaan Daerah Gunung Mas Perkasa untuk laba bersih (penambah modal) tahun 2023.

Tabel 7.5.149 Surplus Penjualan/ Pertukaran/ Pelepasan Aset Non Lancar – LO

No.	Uraian	Tahun 2023	Tahun 2022
1.	Surplus Penjulan BMD yang Tidak Dipisahkan-LO	0,00	0,00
2.	Surplus Pertukaran BMD yang Tidak Dipisahkan-LO	21.665.615.982,00	0,00
3.	Surplus Pelepasan Investasi Jangka Panjang-LO	24.188.488,00	0,00
	Jumlah	**21.689.804.470,00**	**0,00**

Surplus Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang – LO

5. 4. 3. 1. 2. Surplus Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang – LO

Per 31 Desember 2023: Rp0,00
Per 31 Desember 2022: Rp0,00

Tidak terdapat Surplus Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang – LO selama tahun 2023 dengan demikian pencatatan sebesar Rp0,00

Tabel 7.5.150 Surplus Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang – LO

No.	Uraian	Tahun 2023	Tahun 2022
1.	Surplus Penyelesaian Utang kepada Pemerintah Pusat-LO	0,00	0,00
2.	Surplus Penyelesaian Utang kepada Lembaga Keuangan Bank (LKB)-LO	0,00	0,00
3.	Surplus Penyelesaian Utang kepada Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB)-LO	0,00	0,00
4.	Surplus Penyelesaian Premium (Diskonto) Obligasi-LO	0,00	0,00
	Jumlah	**0,00**	**0,00**

Surplus dari Kegiatan Non Operasional Lainnya-LO

5. 4. 3. 1. 3. Surplus dari Kegiatan Non Operasional Lainnya-LO

Per 31 Desember 2023: Rp0,00
Per 31 Desember 2022: Rp0,00

Tidak terdapat Surplus dari Kegiatan Non Operasional Lainnya-LO selama tahun 2023 dengan demikian pencatatan sebesar Rp0,00

Tabel 7.5.151 Surplus dari Kegiatan Non Operasional Lainnya-LO

No.	Uraian	Tahun 2023	Tahun 2022
1.	Surplus dari Kegiatan Non Operasional Lainnya-LO	0,00	0,00
2.	Surplus Pelepasan Investasi Jangka Pendek-LO	0,00	0,00
	Jumlah	**0,00**	**0,00**

Defisit Non Operasional – LO

5. 4. 3. 2. Defisit Non Operasional – LO

Per 31 Desember 2023: Rp25.623.200.295,19
Per 31 Desember 2022: Rp4.676.213.805,00

Defisit Non Operasional – LO tahun 2023 sebesar Rp25.623.200.295,19 terdiri dari Defisit Penjualan/ Pertukaran/ Pelepasan Aset Non Lancar – LO, Defisit Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang – LO, dan Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya-LO dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 7.5.152 Defisit Non Operasional – LO

No.	Uraian	Tahun 2023	Tahun 2022
1.	Defisit Penjualan/ Pertukaran/ Pelepasan Aset Non Lancar – LO	25.623.200.295,19	0,00
2.	Defisit Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang-LO	0,00	0,00
3.	Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya-LO	0,00	4.676.213.805,00
	Jumlah	**25.623.200.295,19**	**4.676.213.805,00**

Defisit Penjualan/ Pertukaran/ Pelepasan Aset Non Lancar – LO

5. 4. 3. 2. 1. Defisit Penjualan/ Pertukaran/ Pelepasan Aset Non Lancar – LO

Per 31 Desember 2023: Rp25.623.200.295,19
Per 31 Desember 2022: Rp0,00

Defisit Penjualan/ Pertukaran/ Pelepasan Aset Non Lancar – LO selama tahun 2023 sebesar Rp25.623.200.295,19 merupakan Defisit Pelepasan Investasi Jangka Panjang-LO atas Defisit Pelepasan Investasi Jangka Panjang Permanen-LO pada Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Bahalap terhadap rugi bersih tahun 2023.

Tabel 7.5.153 Defisit Penjualan/ Pertukaran/ Pelepasan Aset Non Lancar – LO

No.	Uraian	Tahun 2023	Tahun 2022
1.	Defisit Penjulan BMD yang Tidak Dipisahkan-LO	22.677.412,00	0,00
2.	Defisit Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan-LO	21.227.532.697,00	0,00
3.	Defisit Pelepasan Investasi Jangka Panjang-LO	4.015.535.320,19	0,00
4.	Defisit Penghapusan BMD yang Tidak Dipisahkan-LO	357.454.866,00	0,00
	Jumlah	**25.623.200.295,19**	**0,00**

Defisit Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang – LO

5. 4. 3. 2. 2. Defisit Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang – LO

Per 31 Desember 2023: Rp0,00
Per 31 Desember 2022: Rp0,00

Tidak terdapat defisit Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang – LO selama tahun 2023 dengan demikian pencatatan sebesar Rp0,00

Tabel 7.5.154 Defisit Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang – LO

No.	Uraian	Tahun 2023	Tahun 2022
1.	Defisit Penyelesaian Utang kepada Pemerintah Pusat-LO	0,00	0,00
2.	Defisit Penyelesaian Utang kepada Lembaga Keuangan Bank-LO	0,00	0,00
3.	Defisit Penyelesaian Utang kepada Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB)-LO	0,00	0,00
	Jumlah	**0,00**	**0,00**

Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya-LO

5. 4. 3. 2. 3. Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya-LO

Per 31 Desember 2023: Rp0,00
Per 31 Desember 2022: Rp4.676.213.805,00

Tidak terdapat Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya-LO selama tahun 2023 dengan demikian pencatatan sebesar Rp0,00

Tabel 7.5.155 Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya-LO

No.	Uraian	Tahun 2023	Tahun 2022
1.	Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya-LO	0,00	4.676.213.805,00
2.	Defisit Pelepasan Investasi Jangka Pendek-LO	0,00	0,00
	Jumlah	**0,00**	**4.676.213.805,00**

Surplus/ Defisit Dari Kegiatan Non Operasional

Surplus/ Defisit Dari Kegiatan Non Operasional
Per 31 Desember 2023: (Rp3.933.395.825,19)
Per 31 Desember 2022: (Rp4.676.213.805,00)

Dari uraian nilai-nilai Laporan Operasional dari Kegiatan Non Operasional selama tahun 2023, maka diperoleh defisit Kegiatan Non Operasional sebesar -Rp3.933.395.825,19 yang merupakan hasil pengurangan dari nilai Surplus Non Operasional-LO oleh nilai Defisit Non Operasional-LO.

Tabel 7.5.156 Surplus/ Defisit Dari Kegiatan Non Operasional

No.	Uraian	Tahun 2023	Tahun 2022
1.	Surplus Non Operasional-LO	21.689.804.470,00	0,00
2.	Defisit Non Operasional-LO	25.623.200.295,19	4.676.213.805,00
Jumlah		**(3.933.395.825,19)**	**(4.676.213.805,00)**

Surplus/ (Defisit) Sebelum Pos Luar Biasa

Surplus/ (Defisit) Sebelum Pos Luar Biasa
Per 31 Desember 2023: Rp197.772.629.389,77
Per 31 Desember 2022: Rp21.796.336.921,47

Selanjutnya, dari uraian nilai-nilai Laporan Operasional atas Kegiatan Operasional dan Kegiatan Non Operasional selama tahun 2023, maka diperoleh surplus Sebelum Pos Luar Biasa sebesar Rp197.772.629.389,77 yang merupakan hasil penjumlahan dari nilai Surplus/Defisit dari Operasi dengan nilai Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional.

Tabel 7.5.157 Surplus/ (Defisit) Sebelum Pos Luar Biasa

No.	Uraian	Tahun 2023	Tahun 2022
1.	Surplus/Defisit dari Operasi	201.706.025.214,96	26.472.550.726,47
2.	Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional	(3.933.395.825,19)	(4.676.213.805,00)
Jumlah		**197.772.629.389,77**	**21.796.336.921,47**

Pos Luar Biasa

5. 4. 4. Pos Luar Biasa
Per 31 Desember 2023: (Rp212.500.000,00)
Per 31 Desember 2022: (Rp219.010.394,00)

Pos Luar Biasa pada tahun 2023 terdapat defisit sebesar -Rp212.500.000,00 merupakan nilai Beban Luar Biasa menurut Belanja Tidak Terduga - LRA tahun 2023.

Beban Luar Biasa

5. 4. 4. 1. Beban Luar Biasa
Per 31 Desember 2023: (Rp212.500.000,00)
Per 31 Desember 2022: (Rp219.010.394,00)

Nilai Defisit Beban Luar Biasa sebesar -Rp212.500.000,00 selama tahun 2023 merupakan Beban Tidak terduga dari Belanja Tidak Terduga - LRA tahun 2023.

Tabel 7.5.158 Beban Luar Biasa

No.	Uraian	Tahun 2023	Tahun 2022
1.	Beban Tidak Terduga	212.500.000,00	219.010.394,00
Jumlah		**212.500.000,00**	**219.010.394,00**

Beban Tidak Terduga

5. 4. 4. 1. 1. Beban Tidak Terduga

Per 31 Desember 2023: Rp212.500.000,00

Beban Tidak Terduga selama tahun 2023 sebesar Rp212.500.000,00 merupakan Beban Luar Biasa dari Belanja Tidak Terduga – LRA tahun 2023 dengan rincian sebagai sebagai berikut:

Tabel 7.5.159 Beban Tidak Terduga

No.	Uraian	Tahun 2023 (Rp)
1.	Pembayaran Belanja Tidak Terduga Tahun 2023 Untuk Korban Bencana Kebakaran Warga Kelurahan Kampuri dan Kelurahan Kuala Kurun (SK. Bup. No. 113 Tahun 2023)	90.000.000,00
2.	Pembayaran Belanja Tidak Terduga Tahun 2023. Untuk Korban Bencana Kebakaran Warga di Desa Batu Nyiwuh Kec. Tewah dan Korban Tenggelam di Kel. Kuala Kurun Kec. Kurun Kab. Gunung Mas (SK. Bup. No. 199 Tahun 2023)	15.000.000,00
3.	Pembayaran Belanja Tidak Terduga Tahun 2023. Untuk Korban Bencana Kebakaran Warga di Kel. Tampang Tumbang Anjir Kec. Kurun, Warga Kel. Kuala Kurun Kec. Kurun , Warga Desa Tanjung Riu Kec. Kurun Kab. Gunung Mas (SK. Bup. No. 217 dan 261 Thn 2023)	63.000.000,00
4.	Pembayaran Belanja Tidak Terduga Tahun 2023. Untuk Korban Bencana Kebakaran Kab. Gunung Mas (SK. Bup. No. 100.3.3.2/602/2023 Tanggal 22 Desember Thn 2023)	44.500.000,00
	Jumlah	**212.500.000,00**

Surplus/ (Defisit) -- LO

Surplus/ (Defisit) -- LO

Per 31 Desember 2023: Rp197.560.129.389,77

Per 31 Desember 2022: Rp21.577.326.527,47

Dari uraian dan penjelasan di atas mengenai Laporan Operasional tahun 2023 maka didapat Saldo Surplus/Defisit – LO per 31 Desember 2023 sebesar Rp197.560.129.389,77 merupakan pehitungan antara nilai Surplus/Defisit Sebelum Pos Luar Biasa dengan nilai Surplus/Defisit Dari Pos Luar Biasa dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 7.5.160 Surplus/ (Defisit) -- LO

No.	Uraian	Saldo Tahun 2023	Saldo Tahun 2022
1.	Surplus/Defisit dari Operasi – LO	201.706.025.214,96	26.472.550.726,47
2.	Surplus/Defisit dari kegiatan Non Operasional – LO	(3.933.395.825,19)	(4.676.213.805,00)
3.	Surplus Sebelum Pos Luar Biasa (1+2)	197.772.629.389,77	21.796.336.921,47
4.	Surplus/Defisit dari Pos Luar Biasa – LO	(212.500.000,00)	(219.010.394,00)
	Surplus/Defisit – LO (3+4)	**197.560.129.389,77**	**21.577.326.527,47**

Laporan Arus Kas

5. 5. Rincian dan Penjelasan Pos-Pos Laporan Arus Kas

Laporan Arus Kas Pemerintah Kabupaten Gunung Mas tahun 2023 disusun dengan menggunakan Metode Langsung. Laporan Arus Kas tahun 2023 menunjukkan saldo akhir Kas Pemerintah Kabupaten Gunung Mas sebesar Rp49.478.144.154,69 yang berasal dari Saldo Awal Kas Pemerintah Kabupaten ditambah/dikurangi dengan Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi, Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi, Arus Kas Bersih Aktivitas Pendanaan, dan Arus Kas Aktivitas Transitoris dengan uraian sebagai berikut:

Arus Kas dari Aktivitas Operasi

5. 5. 1. Arus Kas dari Aktivitas Operasi

Per 31 Desember 2023: Rp201.801.155.628,88
Per 31 Desember 2022: Rp280.159.114.581,89

Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi tahun 2023 menunjukkan saldo lebih sebesar Rp201.801.155.628,88 merupakan selisih dari Arus Kas Masuk dan Arus Kas Keluar dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 7.5.161 Arus Kas dari Aktivitas Operasi

No.	Uraian	Realisasi Tahun 2023 (Rp)	Realisasi Tahun 2022 (Rp)
	Arus Kas Masuk dari Aktivitas Operasi:		
a.	Pendapatan Pajak Daerah	11.888.728.187,00	30.932.700.270,00
b.	Pendapatan Retribusi Daerah	5.824.282.265,20	4.507.497.060,00
c.	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	81.147.428,96	12.683.801.108,00
d.	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	17.970.960.151,42	29.842.854.854,86
e.	Dana Bagi Hasil Pajak	1.078.209.703.770,00	29.753.957.625,00
f.	Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam	0,00	131.789.839.495,00
g.	Dana Alokasi Umum	0,00	508.244.449.070,00
h.	Dana Alokasi Khusus	0,00	192.622.001.247,00
i.	Dana Insentif Daerah (DID)	0,00	3.821.039.000,00
j.	Dana Desa (DD)	0,00	90.215.183.720,00
k.	Pendapatan Bagi Hasil Pajak	57.314.887.058,00	47.965.994.871,64
l.	Bantuan Keuangan	0,00	0,00
m.	Pendapatan Hibah	0,00	5.662.000,00
n.	Pendapatan Lainnya (JKN)	4.602.655.276,00	1.483.904.656,00
	Jumlah Arus Kas Masuk	**1.175.892.364.136,58**	**1.083.868.884.977,50**
	Arus Kas Keluar dari Aktivitas Operasi:		
a.	Belanja Pegawai	412.033.313.157,00	382.850.310.978,00
b.	Belanja Barang dan Jasa	335.529.741.026,70	254.015.538.421,61
c.	Belanja Bunga	0,00	0,00
d.	Belanja Hibah	48.514.563.352,00	15.018.602.059,00
e.	Belanja Bantuan Sosial	203.500.000,00	863.805.000,00
f.	Belanja Tidak Terduga	212.500.000,00	219.933.860,00
g.	Bagi Hasil Pajak	5.391.902.399,00	0,00
h.	Bagi Hasil Retribusi	0,00	0,00
i.	Belanja Bantuan Keuangan Umum kepada Pemerintah Provinsi	172.205.688.573,00	245.000.000,00
j.	Belanja Bantuan Keuangan Umum Daerah Provinsi atau Kabupaten/ Kota kepada Desa	0,00	150.496.580.077,00
	Jumlah Arus Kas Keluar	**974.091.208.507,70**	**803.709.770.395,61**

Jumlah Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi	**201.801.155.628,88**	**280.159.114.581,89**

Arus Kas dari Aktivitas Investasi

5. 5. 2. Arus Kas dari Aktivitas Investasi

Per 31 Desember 2023: (Rp287.870.466.231,39)
Per 31 Desember 2022: (Rp249.738.843.235,48)

Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi tahun 2023 menunjukkan saldo kurang sebesar -Rp287.870.466.231,39 merupakan selisih dari Arus Kas Masuk dan Arus Kas Keluar dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 7.5.162 Arus Kas dari Aktivitas Investasi

No.	Uraian	Realisasi Tahun 2023 (Rp)	Realisasi Tahun 2022 (Rp)
	Arus Kas Masuk dari Aktivitas Investasi:		
a.	Hasil Penjualan Aset Tetap Lainnya	227.132.800,00	250.219.977,00
	Jumlah Arus Kas Masuk	**227.132.800,00**	**250.219.977,00**
	Arus Kas Keluar dari Aktivitas Investasi:		
a.	Perolehan Tanah	359.717.000,00	549.000.000,00
b.	Perolehan Peralatan dan Mesin	41.300.725.933,00	46.253.480.479,21
c.	Perolehan Gedung dan Bangunan	62.575.674.211,00	65.821.245.635,27
d.	Perolehan Jalan. Irigasi, dan	169.522.427.528,39	125.824.467.024,00
e.	Perolehan Aset Tetap Lainnya	1.665.999.253,00	813.030.274,00
f.	Perolehan Aset Lainnya	705.055.106,00	377.839.800,00
g.	Penyertaan Modal Daerah pada BUMD	11.968.000.000,00	10.350.000.000,00
	Jumlah Arus Kas Keluar	**288.097.599.031,39**	**249.989.063.212,48**
	Jumlah Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi	**(287.870.466.231,39)**	**(249.738.843.235,48)**

Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan

5. 5. 3. Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan

Per 31 Desember 2023: Rp0,00
Per 31 Desember 2022: Rp0,00

Arus Kas Bersih dari Aktivitas Pendanaan tahun 2023 menunjukkan saldo sebesar Rp0,00

Tabel 7.5.163 Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan

No.	Uraian	Realisasi Tahun 2023 (Rp)	Realisasi Tahun 2022 (Rp)
	Arus Kas Masuk dari Aktivitas Pendanaan:		
a.	Arus Kas Masuk	0,00	0,00
	Jumlah Arus Kas Masuk	**0,00**	**0,00**
	Arus Kas Keluar dari Aktivitas Pendanaan:		
a.	Arus Kas Keluar	0,00	0,00
	Jumlah Arus Kas Keluar	**0,00**	**0,00**
	Jumlah Arus Kas Bersih dari Aktivitas Transitoris	**0,00**	**0,00**

Arus Kas dari Aktivitas Transitoris

5. 5. 4. Arus Kas dari Aktivitas Transitoris

Per 31 Desember 2023: Rp69.514,00
Per 31 Desember 2022: (Rp11.040.247,00)

Arus Kas Bersih dari Aktivitas Transitoris tahun 2023 menunjukkan saldo kurang sebesar Rp69.514,00 merupakan selisih dari Arus Kas Masuk dan Arus Kas Keluar dari Aktivitas Transitoris dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 7.5.164 Arus Kas dari Aktivitas Transitoris

No.	Uraian	Realisasi Tahun 2023 (Rp)	Realisasi Tahun 2022 (Rp)
	Arus Kas Masuk dari Aktivitas Transitoris:		
a.	Penerimaan Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	82.048.113.088,87	69.558.030.248,00
b.	Kiriman Uang Masuk	0,00	923.466,00
	Jumlah Arus Kas Masuk	**82.048.113.088,87**	**69.558.953.714,00**
	Arus Kas Keluar dari Aktivitas Transitoris:		
a.	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	0,00	0,00
b.	Pengeluaran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	82.048.043.574,87	69.560.842.903,00
c.	Kiriman Uang Keluar	0,00	9.151.058,00
	Jumlah Arus Kas Keluar	**82.048.043.574,87**	**69.569.993.961,00**
	Jumlah Arus Kas Bersih dari Aktivitas Transitoris	**69.514,00**	**(11.040.247,00)**

Kenaikan/ (Penurunan) Kas

5. 5. 5. Kenaikan/ (Penurunan) Kas

Per 31 Desember 2023: (Rp86.069.241.088,51)
Per 31 Desember 2022: Rp30.409.231.099,41

Pada Tahun Anggaran 2023 terdapat kenaikan kas di BUD sebesar -Rp86.069.241.088,51 terhadap Saldo Awal Kas tahun 2023 yang berasal dari akumulasi Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi, Investasi, Pendanaan, dan Transitoris dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 7.5.165 Kenaikan/ (Penurunan) Kas

No.	Uraian	Realisasi Tahun 2023 (Rp)	Realisasi Tahun 2022 (Rp)
a.	Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi	201.801.155.628,88	280.159.114.581,89
b.	Arus Kas Bersih Dari Aktivitas Investasi	(287.870.466.231,39)	(249.738.843.235,48)
c.	Arus Kas Bersih dari Aktivitas Pendanaan	0,00	0,00
d.	Arus Kas Bersih dari Aktivitas Transitoris	69.514,00	(11.040.247,00)
	Jumlah Kenaikan/ (Penurunan) Kas	**(86.069.241.088,51)**	**30.409.231.099,41**

Saldo Awal Kas

5. 5. 6. Saldo Awal Kas

Per 31 Desember 2023: Rp135.547.385.243,20
Per 31 Desember 2022: Rp105.138.154.143,79

Saldo Awal Kas per 1 Januari 2023 sebesar Rp135.547.385.243,20 merupakan nilai Saldo Akhir Kas pada Laporan Arus Kas Pemerintah Kabupaten Gunung Mas per 31 Desember 2022.

Tabel 7.5.166 Saldo Awal Kas

No.	Uraian	1 Januari 2023 (Rp)	1 Januari 2022 (Rp)
1.	Saldo Awal Kas	135.547.385.243,20	105.138.154.143,79
	Jumlah Kenaikan/ (Penurunan) Kas	**135.547.385.243,20**	**105.138.154.143,79**

Saldo Akhir Kas

5. 5. 7. Saldo Akhir Kas

Per 31 Desember 2023: Rp49.478.144.154,69
Per 31 Desember 2022: Rp135.547.385.243,20

Pada 31 Desember 2023 Saldo Akhir Kas Pemerintah Kabupaten Gunung Mas adalah sebesar Rp49.478.144.154,69 merupakan penjumlahan dari Kenaikan/Penurunan) Kas Bersih tahun 2023 dengan Saldo Awal Kas tahun 2023, adapun rinciannya sebagai berikut:

Tabel 7.5.167 Saldo Akhir Kas

No.	Saldo Akhir Kas	31 Desember 2023	31 Desember 2022
a.	Kenaikan/ (penurunan) Kas Bersih selama periode	(86.069.241.088,51)	30.409.231.099,41
b.	Saldo Awal Kas	135.547.385.243,20	105.138.154.143,79
	Jumlah Saldo Akhir Kas	**49.478.144.154,69**	**135.547.385.243,20**
	Terdiri dari:		
c.	Saldo akhir Kas di Kas Daerah	38.395.026.100,77	124.159.056.219,57
d.	Kas di Bendahara Pengeluaran	0,00	0,00
e.	Kas di Bendahara Penerimaan	35.530.428,00	5.030.500,00
f.	Kas di BLUD	6.952.304.798,90	10.659.694.172,90
g.	Kas di Bendahara FKTP	4.070.787.115,02	722.808.950,02
h.	Kas di Bendahara BOS	24.420.000,00	789.400,71
i.	Kas Lainnya	75.712,00	6.000,00

Laporan Perubahan Ekuitas

5. 6. Rincian dan Penjelasan Pos-Pos Laporan Perubahan Ekuitas

Saldo Ekuitas akhir per 31 Desember 2023 sebesar Rp2.214.798.010.342,81 merupakan hasil dari perhitungan komponen-komponen sebagai berikut:

Tabel 7.5.168 Rincian Laporan Perubahan Ekuitas

No.	Uraian	Tahun 2023 (Rp)	Tahun 2022 (Rp)
1.	Ekuitas Awal	2.017.336.123.142,54	1.996.385.653.064,57
2.	Surplus/ Defisit – LO	197.560.129.389,77	21.577.326.527,47
	Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/ Kesalahan Mendasar:		
3.	Koreksi Ekuitas	(98.242.189,50)	(626.856.449,50)
	Ekuitas Akhir (1+2+3)	**2.214.798.010.342,81**	**2.017.336.123.142,54**

Nilai Ekuitas awal tahun 2023 per 1 Januari 2023 sebesar Rp2.017.336.123.142,54 merupakan nilai Ekuitas akhir tahun 2022 per 31 Desember 2022 terdiri dari nilai komponen-komponen sebagai berikut:

Tabel 7.5.169 Laporan Perubahan Ekuitas

No.	Uraian	Tahun 2022
1.	Total Jumlah Aset	2.062.827.441.771,03

2.	Total Jumlah Kewajiban	45.491.318.628,49
Ekuitas dalam Neraca (1+2)		**2.017.336.123.142,54**

Surplus/Defisit – LO tahun 2023 per 31 Desember 2023 sebesar Rp197.560.129.389,77 merupakan pehitungan antara nilai Surplus/Defisit Sebelum Pos Luar Biasa dengan nilai Surplus/Defisit Dari Pos Luar Biasa dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 7.5.170 Rincian Surplus/Defisit – LO

No.	Uraian	Saldo Tahun 2023	Saldo Tahun 2022
1.	Surplus/Defisit dari Operasi – LO	201.706.025.214,96	26.472.550.726,47
2.	Surplus/Defisit dari kegiatan Non Operasional – LO	(3.933.395.825,19)	(4.676.213.805,00)
3.	Surplus Sebelum Pos Luar Biasa (1+2)	197.772.629.389,77	21.796.336.921,47
4.	Surplus/Defisit dari Pos Luar Biasa – LO	(212.500.000,00)	(219.010.394,00)
Surplus/Defisit – LO (3+4)		**197.560.129.389,77**	**21.577.326.527,47**

Rincian saldo Koreksi Ekuitas sampai dengan tanggal 31 Desember 2023 sebesar -Rp98.242.189,50 sebagai berikut:

Tabel 7.5.171 Koreksi Ekuitas

No.	Uraian	Saldo Awal (Rp)	Mutasi Tahun 2023 (Rp)		Saldo Akhir (Rp)
			Bertambah	Berkurang	
1.	Koreksi Ekuitas Lainnya	(626.856.449,50)	388.902.707,50	(139.711.552,50)	(98.242.189,50)
Jumlah Koreksi Ekuitas		**(626.856.449,50)**	**388.902.707,50**	**(139.711.552,50)**	**(98.242.189,50)**

Selanjutnya saldo Koreksi Ekuitas atas Koreksi Ekuitas Lainnya tahun 2023 sebesar -Rp98.242.189,50 dapat dirinci menurut jurnal pencatatannya pada akun aset sebagai berikut:

Tabel 7.5.172 Rincian Koreksi Ekuitas Lainnya

No.	Tgl	No. Bukti	Uraian Jurnal	Debet (Rp)	Kredit (Rp)	Saldo per 31 Des 2023 (Rp)
A.	**Koreksi Ekuitas - Akumulasi Penyusutan (Atribusi ke aset Induknya)**					
1.	31/12/2023	5000/Aset Tetap/Inspektorat/XII/2023	Jurnal penyesuaian akumulasi penyusutan karena tindak lanjut atribusi terhadap aset induk	16.675.001,00	0,00	(16.675.001,00)
2.	31/12/2023	5000/JP-Aset Tetap/BKPSDM/XII/2023	Jurnal penyesuaian akumulasi penyusutan karena tindak lanjut atribusi terhadap aset induk	20.615.000,00	0,00	(37.290.001,00)
3.	31/12/2023	5000/JP-Aset Tetap/Dinas	Jurnal penyesuaian akumulasi penyusutan karena tindak lanjut atribusi terhadap aset induk	100.277.406,00	0,00	(137.567.407,00)
4.	31/12/2023	5000/JP-Aset Tetap/Dinsos/XII/2023	Jurnal penyesuaian akumulasi penyusutan karena tindak lanjut atribusi terhadap aset induk	(186.250,00)	0,00	(137.381.157,00)
5.	31/12/2023	5000/JP-Aset Tetap/Kec. Kahut/XII/2023	Jurnal penyesuaian akumulasi penyusutan karena tindak lanjut atribusi terhadap aset induk	144.813,00	0,00	(137.525.970,00)
6.	31/12/2023	5000/JP-Aset Tetap/Kec.Tewah/XII/2023	Jurnal penyesuaian akumulasi penyusutan karena tindak lanjut atribusi terhadap aset induk	(23.231.250,00)	0,00	(114.294.720,00)
7.	31/12/2023	5000a/JP-Aset Tetap/DMPTSP/XII/2023	Jurnal penyesuaian akumulasi penyusutan karena tindak lanjut atribusi terhadap aset induk	3.078.704,00	0,00	(117.373.424,00)

8.	31/12/2023	5000a/JP-Aset Tetap/DP2KBP3A/XII/20	Jurnal penyesuaian akumulasi penyusutan karena tindak lanjut atribusi terhadap aset induk	(11.324.244,00)	0,00	(106.049.180,00)
9.	31/12/2023	5000a/JP-Aset Tetap/Perikanan/XII/2023	Jurnal penyesuaian akumulasi penyusutan karena tindak lanjut atribusi terhadap aset induk	(13.546.625,00)	0,00	(92.502.555,00)
10.	31/12/2023	5000a1/JP-Aset Tetap/BKAD/XII/2023	Jurnal penyesuaian akumulasi penyusutan karena tindak lanjut atribusi terhadap aset induk	261.552.287,00	0,00	(354.054.842,00)
11.	31/12/2023	5000a1/JP-Aset Tetap/BKAD/XII/2023	Jurnal penyesuaian akumulasi penyusutan karena tindak lanjut atribusi terhadap aset induk	2.169.221,00	0,00	(356.224.063,00)
12.	31/12/2023	5000a1/JP-Aset Tetap/BKAD/XII/2023	Jurnal penyesuaian akumulasi penyusutan karena tindak lanjut atribusi terhadap aset induk	78.067.833,00	0,00	(434.291.896,00)
13.	31/12/2023	5000a1/JP-Aset Tetap/BKAD/XII/2023	Jurnal penyesuaian akumulasi penyusutan karena tindak lanjut atribusi terhadap aset induk	17.552.949,00	0,00	(451.844.845,00)
14.	31/12/2023	5000a10/JP-Aset Tetap/DPU/XII/2023	Jurnal penyesuaian akumulasi penyusutan karena tindak lanjut atribusi terhadap aset induk	9.648.845,00	0,00	(461.493.690,00)
15.	31/12/2023	5000a8/JP-Aset Tetap/DPU/XII/2023	Jurnal penyesuaian akumulasi penyusutan karena tindak lanjut atribusi terhadap aset induk	(331.667,00)	0,00	(461.162.023,00)
16.	31/12/2023	5000a9/JP-Aset Tetap/DPU/XII/2023	Jurnal penyesuaian akumulasi penyusutan karena tindak lanjut atribusi terhadap aset induk	7.916.978,00	0,00	(469.079.001,00)
17.	31/12/2023	5000a9/JP-Aset Tetap/DPU/XII/2023	Jurnal penyesuaian akumulasi penyusutan karena tindak lanjut atribusi terhadap aset induk	(3.417.240,00)	0,00	(465.661.761,00)
18.	31/12/2023	5000a9/JP-Aset Tetap/DPU/XII/2023	Jurnal penyesuaian akumulasi penyusutan karena tindak lanjut atribusi terhadap aset induk	96.370,00	0,00	(465.758.131,00)
19.	31/12/2023	5000c/JP-Aset Tetap/Kec.Rungan/XII/20	Jurnal penyesuaian akumulasi penyusutan karena tindak lanjut atribusi terhadap aset induk	10.697.917,00	0,00	(476.456.048,00)
20.	31/12/2023	5000c/JP-Aset Tetap/Kec.Rungan/XII/20	Jurnal penyesuaian akumulasi penyusutan karena tindak lanjut atribusi terhadap aset induk	46.700.000,00	0,00	(523.156.048,00)
21.	31/12/2023	5000c/JP-Aset Tetap/Kec.Sepang/XII/202	Jurnal penyesuaian akumulasi penyusutan karena tindak lanjut atribusi terhadap aset induk	(237.262,00)	0,00	(522.918.786,00)
22.	31/12/2023	5000c/JP-Aset Tetap/Kec.Sepang/XII/202	Jurnal penyesuaian akumulasi penyusutan karena tindak lanjut atribusi terhadap aset induk	157.227,00	0,00	(523.076.013,00)
23.	31/12/2023	5000c/JP-Aset Tetap/Kec.Sepang/XII/202	Jurnal penyesuaian akumulasi penyusutan karena tindak lanjut atribusi terhadap aset induk	2.753.494,00	0,00	(525.829.507,00)
24.	31/12/2023	5000d/JP-Aset Tetap/DUKCAPIL/XII/20	Jurnal penyesuaian akumulasi penyusutan karena tindak lanjut atribusi terhadap aset induk	(2.770.833,00)	0,00	(523.058.674,00)
25.	31/12/2023	5000e/JP-Aset Tetap/Diskominfo/XII/20	Jurnal penyesuaian akumulasi penyusutan karena tindak lanjut atribusi terhadap aset induk	(1.437.333,00)	0,00	(521.621.341,00)
26.	31/12/2023	5000e/JP-Aset Tetap/Diskominfo/XII/20	Jurnal penyesuaian akumulasi penyusutan karena tindak lanjut atribusi terhadap aset induk	24.765.809,00	0,00	(546.387.150,00)
27.	31/12/2023	5000e/JP-Aset Tetap/Diskominfo/XII/20	Jurnal penyesuaian akumulasi penyusutan karena tindak lanjut atribusi terhadap aset induk	(44.784.837,00)	0,00	(501.602.313,00)
28.	31/12/2023	5000f/JP-Aset Tetap/DLHKP/XII/2023	Jurnal penyesuaian akumulasi penyusutan karena tindak lanjut atribusi terhadap aset induk	9.657.084,00	0,00	(511.259.397,00)
29.	31/12/2023	5000g/JP-Aset Tetap/Kec.Kurun/XII/202	Jurnal penyesuaian akumulasi penyusutan karena tindak lanjut atribusi terhadap aset induk	206.695,00	0,00	(511.466.092,00)

LAMPIRAN VII
PERATURAN DAERAH KABUPATEN GUNUNG MAS
NOMOR TAHUN 2024
TENTANG
PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2023

30.	31/12/2023	5000g/JP-Aset Tetap/Kec.Kurun/XII/2023	Jurnal penyesuaian akumulasi penyusutan karena tindak lanjut atribusi terhadap aset induk	2,00	0,00	(511.466.094,00)
31.	31/12/2023	5000i/JP-Aset Tetap/Dinkes/XII/2023	Jurnal penyesuaian akumulasi penyusutan karena tindak lanjut atribusi terhadap aset induk	0,00	17.530.833,00	(493.935.261,00)
32.	31/12/2023	5000j/JP-Aset Tetap/Dinkes/XII/2023	Jurnal penyesuaian akumulasi penyusutan karena tindak lanjut atribusi terhadap aset induk	11.455.748,00	0,00	(505.391.009,00)
33.	31/12/2023	5000r/JP-Aset Tetap/Disdik/XII/2023	Jurnal penyesuaian akumulasi penyusutan karena tindak lanjut atribusi terhadap aset induk	(546.528,00)	0,00	(504.844.481,00)
34.	31/12/2023	5000r/JP-Aset Tetap/Disdik/XII/2023	Jurnal penyesuaian akumulasi penyusutan karena tindak lanjut atribusi terhadap aset induk	(16.624.213,00)	0,00	(488.220.268,00)
35.	31/12/2023	5000r/JP-Aset Tetap/Disdik/XII/2023	Jurnal penyesuaian akumulasi penyusutan karena tindak lanjut atribusi terhadap aset induk	150.289,00	0,00	(488.370.557,00)
36.	31/12/2023	5000r/JP-Aset Tetap/Disdik/XII/2023	Jurnal penyesuaian akumulasi penyusutan karena tindak lanjut atribusi terhadap aset induk	(9.494.338,00)	0,00	(478.876.219,00)
37.	31/12/2023	5000r/JP-Aset Tetap/Disdik/XII/2023	Jurnal penyesuaian akumulasi penyusutan karena tindak lanjut atribusi terhadap aset induk	441.020,00	0,00	(479.317.239,00)
38.	31/12/2023	5000r/JP-Aset Tetap/Disdik/XII/2023	Jurnal penyesuaian akumulasi penyusutan karena tindak lanjut atribusi terhadap aset induk	264.439,00	0,00	(479.581.678,00)
39.	31/12/2023	5000r/JP-Aset Tetap/Pertanian/XII/2023	Jurnal penyesuaian akumulasi penyusutan karena tindak lanjut atribusi terhadap aset induk	10.450.650,00	0,00	(490.032.328,00)
40.	31/12/2023	5000v/JP-Aset Tetap/RSUD/XII/2023	Jurnal penyesuaian akumulasi penyusutan karena tindak lanjut atribusi terhadap aset induk	4.840.070,00	0,00	(494.872.398,00)
			Jumlah A	**512.403.231,00**	**17.530.833,00**	**(494.872.398,00)**
B.	**Koreksi Ekuitas - Kesalahan Pencatatan Tahun sebelumnya (Piutang Uang Muka)**					
1.	01/01/2023	9000/JP-PiutUM/DPU/I/2023	Jurnal Pengesuaian Kesalahan Pencatatan Tahun sebelumnya Piutang Uang Muka	0,00	371.371.874,50	371.371.874,50
			Jumlah B	**0,00**	**371.371.874,50**	**371.371.874,50**
C.	**Koreksi Ekuitas - Reklasifikasi dari jalan, irigasi dan jaringan**					
1.	31/12/2023	5000d/JP-Aset Tetap/DLHKP/XII/2023	Jurnal penyesuaian penambahan koreksi ekuitas lainnya karena reklasifikasi dari Jalan, Irigasi dan Jaringan	(10.385.410,00)	0,00	10.385.410,00
2.	31/12/2023	5000d/JP-Aset Tetap/DLHKP/XII/2023	Jurnal penyesuaian penambahan koreksi ekuitas lainnya karena reklasifikasi dari Jalan, Irigasi dan Jaringan	158.765,00	0,00	10.226.645,00
3.	31/12/2023	5000d/JP-Aset Tetap/DLHKP/XII/2023	Jurnal penyesuaian penambahan koreksi ekuitas lainnya karena reklasifikasi dari Jalan, Irigasi dan Jaringan	(2.719.444,00)	0,00	12.946.089,00
4.	31/12/2023	5000e/JP-Aset Tetap/Disperindag/XII/2023	Jurnal penyesuaian penambahan koreksi ekuitas lainnya karena reklasifikasi dari Jalan, Irigasi dan Jaringan	(12.380.882,00)	0,00	25.326.971,00
5.	31/12/2023	5000e/JP-Aset Tetap/Disperindag/XII/2023	Jurnal penyesuaian penambahan koreksi ekuitas lainnya karena reklasifikasi dari Jalan, Irigasi dan Jaringan	68.637,00	0,00	25.258.334,00
			Jumlah C	**(25.258.334,00)**	**0,00**	**25.258.334,00**
			Jumlah A+B+C	**487.144.897,00**	**388.902.707,50**	**(98.242.189,50)**

BAB VI INFORMASI TAMBAHAN LAINNYA

Mandatory Spending

6. 1. *Mandatory Spending*

Mandatory spending adalah belanja atau pengeluaran negara yang sudah diatur oleh undang-undang dengan tujuan untuk mengurangi masalah ketimpangan sosial dan ekonomi daerah. Lebih lanjut dapat diartikan bahwa *mandatory spending* adalah pengeluaran ataupun belanja wajib yang diatur oleh peraturan perundang-undangan untuk disusun menurut urusan, program dan kegiatan dalam APBN dan APBD dalam rangka mengatasi masalah ketimpangan sosial dan ekonomi daerah.

Mandatory spending atau belanja wajib dalam tata kelola keuangan pemerintah daerah meliputi hal-hal sebagai berikut:

a. alokasi anggaran pendidikan sebesar 20% dari APBD sesuai amanat UUD 1945 pasal 31 ayat (4) dan UU No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional pasal 49 ayat (1).
b. besar anggaran kesehatan pemerintah daerah provinsi, kabupaten/kota dialokasikan minimal 10% (sepuluh persen) dari anggaran pendapatan dan belanja daerah di luar gaji (UU No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan).
c. Dana Transfer Umum (DTU) diarahkan penggunaannya, yaitu paling sedikit 25% (dua puluh lima persen) untuk belanja infrastruktur daerah yang langsung terkait dengan percepatan pembangunan fasilitas pelayanan publik dan ekonomi dalam rangka meningkatkan kesempatan kerja, mengurangi kemiskinan, dan mengurangi kesenjangan penyediaan layanan publik antardaerah (UU APBN).
d. Alokasi Dana Desa (ADD) paling sedikit 10% dari dana perimbangan yang diterima Kabupaten/Kota dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus (UU No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa).

(disadur dari laman resmi Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan Republik Indonesia).

Kebijakan Pengelolaan Keuangan Dalam Rangka Pemenuhan Mandatory Spending

6. 2. Kebijakan Pengelolaan Keuangan Dalam Rangka Pemenuhan *Mandatory Spending* Tahun 2023

Untuk dasar pelaksanaan pengelolaan keuangan Negara/ Daerah dalam rangka pemenuhan amanat peraturan perundang-undangan mengenai *mandatory spending* atau belanja wajib, sampai dengan saat ini Pemerintah telah menerbitkan beberapa kebijakan yang berhubungan untuk mengatur pengelolaan keuangan Daerah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Dasar Tahun 1945 Perubahan Keempat Pasal 31 ayat (4) bahwa Negara memprioritaskan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya dua puluh persen dari anggaran pendapatan dan belanja negara serta dari aggaran pendapatan dan belanja daerah untuk memenuhi kebutuhan penyelenggaraan pendidikan nasional.

2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Pasal 49 bahwa dana pendidikan selain gaji pendidik dan biaya pendidikan kedinasan dialokasikan minimal 20% dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) pada sektor pendidikan dan minimal 20% dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Dana pendidikan dari Pemerintah kepada Pemerintah Daerah diberikan dalam bentuk hibah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa Pasal 72 ayat (1) dan ayat (4) bahwa pendapatan Desa antara lain bersumber dari alokasi dana Desa, paling sedikit 10% (sepuluh perseratus) dari dana perimbangan yang diterima Kabupaten/Kota dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah Pasal 147 bahwa Daerah wajib mengalokasikan belanja infrastruktur pelayanan publik paling rendah 40% (empat puluh persen) dari total belanja APBD di luar belanja bagi hasil dan/atau transfer kepada Daerah dan/atau desa yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan Pasal 6 ayat (1) bahwa Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah bertanggung jawab merencanakan, mengatur, menyelenggarakan, membina, dan mengawasi penyelenggaraan Upaya Kesehatan yang bermutu, aman, elisien, merata, dan terjangkau oleh masyarakat. Tanggung jawab tersebut dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa Pasal 96 ayat (1) dan (2) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, bahwa pemerintah daerah kabupaten/kota mengalokasikan dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten/kota ADD setiap tahun anggaran paling sedikit 10% (sepuluh perseratus) dari dana perimbangan yang diterima kabupaten/kota dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah setelah dikurangi dana alokasi khusus.
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Pasal 50 ayat (1) bahwa Daerah wajib mengalokasikan belanja untuk mendanai Urusan Pemerintahan daerah yang besarannya telah ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

8. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah bahwa Pemerintah Daerah perlu meningkatkan prioritas pendanaan untuk memperkuat peran dan kapasitas inspektorat Daerah agar lebih independen dan obyektif dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme.
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 Lampiran Ruang Lingkup Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 huruf D. Kebijakan Penyusunan Anggaran Belanja Daerah dan huruf G. Hal Khusus Lainnya, bahwa Pemerintah Daerah dalam menyusun APBD TA 2023, selain memperhatikan prinsip dan kebijakan umum penyusunan APBD serta teknis penyusunan APBD, juga memperhatikan hal khusus lainnya, antara lain:
   a) Dalam rangka peningkatan pelayanan bidang pendidikan, Pemerintah Daerah secara konsisten dan berkesinambungan harus mengalokasikan anggaran fungsi pendidikan paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari belanja daerah sebagaimana diamanatkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
   b) Dalam rangka peningkatan bidang kesehatan, Pemerintah Daerah secara konsisten dan berkesinambungan harus mengalokasikan anggaran kesehatan minimal 10% (sepuluh persen) dari total belanja APBD di luar gaji sebagaimana diamanatkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
   c) Pemerintah Daerah mengalokasikan belanja infrastruktur pelayanan publik paling rendah 40% (empat puluh persen) dari total belanja APBD di luar belanja bagi hasil dan/atau transfer kepada daerah dan/atau desa. Belanja bagi hasil dan/atau transfer kepada daerah/desa dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
   d) Pemerintah Daerah kabupaten/kota yang memiliki desa harus menganggarkan Alokasi Dana Desa (ADD) untuk pemerintah desa dalam jenis belanja bantuan keuangan kepada pemerintah desa paling sedikit 10% (sepuluh persen) dari DTU (DAU dan DBH) yang diterima oleh kabupaten/kota yang memiliki desa dalam APBD TA 2023 tidak termasuk DBH-CHT, DBH-SDA Kehutanan Dana Reboisasi, dan Tambahan DBH Minyak dan Gas Bumi dalam rangka otonomi khusus sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

e) Dalam rangka penguatan Pembinaan dan Pengawasan Inspektorat Daerah, sebagai pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan, Pemerintah Daerah mengalokasikan anggaran pengawasan sesuai dengan kewenangannya ke dalam APBD untuk mendanai program, kegiatan dan sub kegiatan pembinaan dan pengawasan, meliputi: 1) kegiatan pengawasan, 2) Peningkatan kapabilitas APIP, dan 3) sarana dan prasarana pengawasan yang ditetapkan berdasarkan besaran dari total belanja daerah, dengan klasifikasi untuk Pemerintah Daerah kabupaten/kota di atas Rp1.000.000.000.000,00 (satu triliun rupiah) sampai dengan Rp2.000.000.000.000,00 (dua triliun rupiah) paling sedikit sebesar 0,75% (nol koma tujuh puluh lima persen) dari total belanja daerah dan di atas Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).

Rincian dan Penjelasan Anggaran Mandatory Spending Bidang Pendidikan

6. 3. Rincian dan Penjelasan Anggaran *Mandatory Spending* Bidang Pendidikan

Dalam rangka pemenuhan *mandatory spending* atau belanja wajib bidang pendidikan tahun 2023 sesuai amanat Undang-Undang Dasar Tahun 1945 Perubahan Keempat Pasal 31 ayat (4) dan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Pasal 49 dengan berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023, bahwa untuk peningkatan pelayanan bidang pendidikan, Pemerintah Daerah harus mengalokasikan anggaran fungsi pendidikan paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari belanja daerah, maka Pemerintah Kabupaten Gunung Mas telah menetapkan alokasi anggaran *mandatory spending* atau belanja wajib bidang pendidikan tahun 2023 dengan Peraturan Daerah Kabupaten Gunung Mas Nomor 10 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Gunung Mas Nomor 8 Tahun 2023 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023.

Total jumlah alokasi anggaran mandatory spending atau belanja wajib bidang pendidikan Pemerintah Kabupaten Gunung Mas tahun 2023 sebesar Rp359.572.101.399,00 dengan total jumlah realisasi sebesar Rp342.280.484.489,71 atau mencapai 95,19% dari total jumlah alokasi anggaran. Dengan rasio anggaran mandatory spending atau belanja wajib bidang pendidikan terpenuhi sebesar 26,95% sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dari total jumlah alokasi dan realisasi anggaran tersebut, selanjutnya dapat dirinci menurut urusan, SKPD pengelola anggaran dan jenis belanja pada tabel berikut ini:

LAMPIRAN VII
PERATURAN DAERAH KABUPATEN GUNUNG MAS
NOMOR TAHUN 2024
TENTANG
PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2023

Tabel 7.6.1 Rincian Anggaran dan Realisasi *Mandatory Spending*
Bidang Pendidikan

No.	SKPD/ Jenis Belanja	Anggaran 2023 (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)	(%)
A.	**Urusan Bidang Pendidikan**			
1.	**Dinas Pendidikan, Pemudaan dan Olah Raga Kabupaten Gunung Mas**			
1.a	Belanja Pegawai	234.711.280.416,00	224.029.573.954,00	95,45
1.b	Belanja Barang dan Jasa	37.554.710.431,00	35.151.229.697,71	93,60
1.c	Belanja Hibah	6.570.899.930,00	4.197.684.999,00	63,88
1.d	Belanja Bantuan Sosial	0,00	0,00	0,00
1.e	Belanja Modal	42.175.460.201,00	41.738.916.564,00	98,96
	Jumlah A	**321.012.350.978,00**	**305.117.405.214,71**	**95,05**
B.	**Urusan Bidang Kepemudaan dan Olah Raga**			
1.	**Dinas Pendidikan, Pemudaan dan Olah Raga Kabupaten Gunung Mas**			
1.a	Belanja Pegawai	0,00	0,00	0,00
1.b	Belanja Barang dan Jasa	7.228.602.398,00	7.105.751.164,00	98,30
1.c	Belanja Hibah	0,00	0,00	0,00
1.d	Belanja Bantuan Sosial	0,00	0,00	0,00
1.e	Belanja Modal	675.088.889,00	673.054.120,00	99,70
	Jumlah B	**7.903.691.287,00**	**7.778.805.284,00**	**98,42**
C.	**Urusan Bidang Kebudayaan**			
1.	**Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Gunung Mas**			
1.a	Belanja Pegawai	3.312.316.777,00	2.582.214.698,00	77,96
1.b	Belanja Barang dan Jasa	5.104.614.852,00	4.961.569.468,00	97,20
1.c	Belanja Hibah	1.550.000.000,00	1.550.000.000,00	100,00
1.d	Belanja Bantuan Sosial	0,00	0,00	0,00
1.e	Belanja Modal	1.052.082.938,00	1.043.682.600,00	99,20
	Jumlah C	**11.019.014.567,00**	**10.137.466.766,00**	**92,00**
D.	**Urusan Bidang Perpustakaan**			
1.	**Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Gunung Mas**			
1.a	Belanja Pegawai	2.938.619.483,00	2.749.779.339,00	93,57
1.b	Belanja Barang dan Jasa	3.563.119.227,00	3.475.487.295,00	97,54
1.c	Belanja Hibah	0,00	0,00	0,00
1.d	Belanja Bantuan Sosial	0,00	0,00	0,00
1.e	Belanja Modal	12.871.240.057,00	12.758.040.591,00	99,12
	Jumlah D	**19.372.978.767,00**	**18.983.307.225,00**	**97,99**
E.	**Belanja di luar Urusan Pendidikan, Urusan Kebudayaan, Urusan Perpustakaan dan Urusan Kepemudaan dan Olah Raga yang menunjang kebutuhan masyarakat di bidang Pendidikan**			
1.	**Sekretariat Daerah Kabupaten Gunung Mas**			
1.a	Belanja Pegawai	0,00	0,00	0,00
1.b	Belanja Barang dan Jasa	0,00	0,00	0,00
1.c	Belanja Hibah	60.000.000,00	60.000.000,00	100,00
1.d	Belanja Bantuan Sosial	204.065.800,00	203.500.000,00	99,72
1.e	Belanja Modal	0,00	0,00	0,00
	Jumlah E	**264.065.800,00**	**263.500.000,00**	**99,79**
F.	**Jumlah *Mandatory Spending* Bidang Pendidikan Tahun 2023 (Total Jlh A+B+C+D+E)**	**359.572.101.399,00**	**342.280.484.489,71**	**95,19**
G.	**Total Belanja Daerah dalam APBD TA 2023**	**1.334.210.394.363,00**	////////////////////////////	////////
H.	**Rasio Anggaran Belanja Wajib Bidang Pendidikan Tahun 2023 (I:II) x 100%**	**26,95**	////////////////////////////	////////

Rincian dan Penjelasan Anggaran Mandatory Spending Bidang Kesehatan

6. 4. Rincian dan Penjelasan Anggaran *Mandatory Spending* Bidang Kesehatan

Dalam rangka pemenuhan *mandatory spending* atau belanja wajib bidang kesehatan tahun 2023 sesuai amanat Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan Pasal 6 ayat (1) dengan berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023, bahwa untuk peningkatan bidang kesehatan, Pemerintah Daerah harus mengalokasikan anggaran kesehatan minimal 10% (sepuluh persen) dari total belanja APBD di luar gaji, maka Pemerintah Kabupaten Gunung Mas telah menetapkan alokasi anggaran *mandatory spending* atau belanja wajib bidang kesehatan tahun 2023 dengan Peraturan Daerah Kabupaten Gunung Mas Nomor 10 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Gunung Mas Nomor 8 Tahun 2023 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023.

Total jumlah alokasi anggaran mandatory spending atau belanja wajib bidang kesehatan Pemerintah Kabupaten Gunung Mas tahun 2023 sebesar Rp191.284.796.178,00 dengan total jumlah realisasi sebesar Rp172.339.560.536,00 atau mencapai 90,10% dari total jumlah alokasi anggaran. Dengan rasio anggaran mandatory spending atau belanja wajib bidang kesehatan terpenuhi sebesar 21,36% sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dari total jumlah alokasi dan realisasi anggaran tersebut, selanjutnya dapat dirinci menurut urusan, SKPD pengelola anggaran dan jenis belanja pada tabel berikut ini:

Tabel 7.6.2 Rincian Anggaran dan Realisasi *Mandatory Spending* Bidang Kesehatan

No.	SKPD/ Jenis Belanja	Anggaran 2023 (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)	(%)
A.	**Urusan Bidang Kesehatan**			
1.	**Dinas Kesehatan Kabupaten Gunung Mas**			
1.a	Belanja Pegawai	51.937.242.937,00	48.063.279.231,00	92,54
1.b	Belanja Barang dan Jasa	65.731.989.736,00	58.718.077.740,00	89,33
1.c	Belanja Hibah	660.000.000,00	660.000.000,00	100,00
1.d	Belanja Bantuan Sosial	0,00	0,00	0,00
1.e	Belanja Modal	14.309.110.623,00	14.212.700.200,00	99,33
	Jumlah 1	**132.638.343.296,00**	**121.654.057.171,00**	**91,72**
2.	**UPT RSUD Kuala Kurun**			
1.a	Belanja Pegawai	22.047.676.331,00	19.862.325.018,00	90,09
1.b	Belanja Barang dan Jasa	29.620.596.551,00	24.484.941.571,00	82,66
1.c	Belanja Hibah	0,00	0,00	0,00
1.d	Belanja Bantuan Sosial	0,00	0,00	0,00
1.e	Belanja Modal	6.978.180.000,00	6.338.236.776,00	90,83
	Jumlah 2	**58.646.452.882,00**	**50.685.503.365,00**	**86,43**
B.	**Jumlah *Mandatory Spending* Bidang Kesehatan Tahun 2023 (Total Jumlah 1+2)**	**191.284.796.178,00**	**172.339.560.536,00**	**90,10**

C.	**Total Belanja Daerah dalam APBD TA 2023**	**1.334.210.394.363,00**	//////////////////////////////	///////
D.	**Total Belanja Gaji ASN dalam APBD TA 2023**	**438.640.414.118,00**	//////////////////////////////	///////
E.	**Total Belanja Daerah di luar Belanja Gaji ASN dalam APBD TA 2023 (C-D)**	**895.569.980.245,00**	//////////////////////////////	///////
F.	**Rasio Anggaran Belanja Wajib Bidang Kesehatan Tahun 2023 (B:E) x 100%**	**21,36**	//////////////////////////////	///////

Rincian dan Penjelasan Anggaran Mandatory Spending Bidang Infrastruktur

6. 5. Rincian dan Penjelasan Anggaran *Mandatory Spending* Bidang Infrastruktur

Dalam rangka pemenuhan *mandatory spending* atau belanja wajib bidang infrastruktur tahun 2023 sesuai amanat Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah Pasal 147 dengan berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023, bahwa Pemerintah Daerah mengalokasikan belanja infrastruktur pelayanan publik paling rendah 40% (empat puluh persen) dari total belanja APBD di luar belanja bagi hasil dan/atau transfer kepada daerah dan/atau desa.

Maka Pemerintah Kabupaten Gunung Mas telah menetapkan alokasi anggaran *mandatory spending* atau belanja wajib bidang infrastruktur tahun 2023 dengan Peraturan Daerah Kabupaten Gunung Mas Nomor 10 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Gunung Mas Nomor 8 Tahun 2023 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023.

Total jumlah alokasi anggaran mandatory spending atau belanja wajib bidang infrastruktur Pemerintah Kabupaten Gunung Mas tahun 2023 sebesar Rp532.136.687.326,00 dengan total jumlah realisasi sebesar Rp512.946.925.429,74 atau mencapai 96,39% dari total jumlah alokasi anggaran. Dengan rasio anggaran mandatory spending atau belanja wajib bidang infrastruktur terpenuhi sebesar 46,23% sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dari total jumlah alokasi dan realisasi anggaran tersebut, selanjutnya dapat dirinci menurut SKPD pengelola anggaran dan jenis belanja pada tabel berikut ini:

Tabel 7.6.3 Rincian Anggaran dan Realisasi *Mandatory Spending* Bidang Infrastruktur

No.	SKPD/ Jenis Belanja	Anggaran 2023 (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)	(%)
1.	**Seluruh SKPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Gunung Mas**			
a.	Belanja Pegawai	0,00	0,00	0,00
b.	Belanja Barang dan Jasa	16.447.873.360,00	15.893.590.473,35	96,63
c.	Belanja Hibah	51.112.378.628,00	48.514.222.352,00	94,92
d.	Belanja Bantuan Sosial	0,00	0,00	0,00

e.	Belanja Modal	291.830.294.608,00	276.129.924.031,39	94,62
	Jumlah 1	**359.390.546.596,00**	**340.537.736.856,74**	**94,75**
2.	**Sekretariat Daerah Kabupaten Gunung Mas**			
a.	Belanja Pegawai	0,00	0,00	0,00
b.	Belanja Barang dan Jasa	0,00	0,00	0,00
c.	Belanja Hibah	0,00	0,00	0,00
d.	Belanja Bantuan Sosial	204.065.800,00	203.500.000,00	99,72
e.	Belanja Modal	0,00	0,00	0,00
	Jumlah 2	**204.065.800,00**	**203.500.000,00**	**99,72**
3.	**Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Gunung Mas**			
a.	Belanja Pegawai	0,00	0,00	0,00
b.	Belanja Barang dan Jasa	0,00	0,00	0,00
c.	Belanja Hibah	0,00	0,00	0,00
d.	Belanja Bantuan Sosial	0,00	0,00	0,00
e.	Belanja Modal	0,00	0,00	0,00
f.	Belanja Transfer	172.542.074.930,00	172.205.688.573,00	99,81
	Jumlah 3	**172.542.074.930,00**	**172.205.688.573,00**	**99,81**
B.	**Jumlah *Mandatory Spending* Bidang Infrastruktur Tahun 2023 (Total Jumlah 1+2+3)**	**532.136.687.326,00**	**512.946.925.429,74**	**96,39**
C.	**Perhitungan Minimal Belanja Infrastruktur Pelayanan Publik Tahun 2023**			
C.1.	Total Belanja Daerah dalam APBD TA 2023	1.334.210.394.363,00	//////////////////////////////	////////
C.2.	Total Belanja Bagi Hasil dalam APBD TA 2023	10.655.216.000,00	//////////////////////////////	////////
C.3.	Total Belanja Bantuan Keuangan dalam APBD TA 2023	172.542.074.930,00	//////////////////////////////	////////
C.4.	Jumlah Belanja Bagi Hasil dan Bantuan Keuangan dalam APBD TA 2023 (C.2 + C.3)	183.197.290.930,00	//////////////////////////////	////////
C.5.	**Selesih Belanja Daerah dengan Jumlah Belanja Bagi Hasil dan Bantuan Keuangan dalam APBD TA 2023 (C.1 - C.4)**	**1.151.013.103.433,00**	//////////////////////////////	////////
C.6.	**Minimal Belanja Infrastruktur Pelayanan Publik Tahun 2023 (40% x C.5)**	**460.405.241.373,20**	//////////////////////////////	////////
D.	**Persentase Anggaran Belanja Wajib Bidang Infrastruktur Daerah Tahun 2023 (B:C.5) x 100%**	**46,23**	//////////////////////////////	////////

Lebih lanjut dari tabel di atas dapat dijelaskan beberapa hal berikut:

1. Belanja Barang dan Jasa sebesar Rp16.447.873.360,00 merupakan anggaran objek Belanja Pemeliharaan dalam APBD TA 2023 pada masing-masing SKPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Gunung Mas.

2. Belanja Transfer sebesar Rp172.542.074.930,00 merupakan jenis Belanja Bantuan Keuangan dalam APBD TA 2023 pada Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Gunung Mas yang dianggarkan untuk: a) Belanja Bantuan Keuangan Umum kepada Pemerintah Provinsi, b) Belanja Bantuan Keuangan Khusus Kabupaten/Kota kepada Desa yang bersumber dari Dana Desa, dan c) Belanja Bantuan Keuangan Khusus Kabupaten/Kota kepada Desa yang bersumber dari Alokasi Dana Desa.
3. Belanja Bagi Hasil sebesar Rp10.655.216.000,00 merupakan jenis Belanja Transfer - Belanja Bagi Hasil dalam APBD TA 2023 pada Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Gunung Mas yang dianggarkan untuk: a) Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Desa, dan b) Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kabupaten/Kota Kepada Pemerintah Desa.

Rincian dan Penjelasan Anggaran Mandatory Spending Alokasi Dana Desa (ADD)

6. 6. Rincian dan Penjelasan Anggaran *Mandatory Spending* Alokasi Dana Desa (ADD)

Dalam rangka pemenuhan *mandatory spending* atau belanja wajib Alokasi Dana Desa (ADD) tahun 2023 sesuai amanat Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa Pasal 72 ayat (1) dan ayat (4) serta Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa Pasal 96 ayat (1) dan ayat (2) dengan berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023, bahwa Pemerintah Daerah kabupaten/kota yang memiliki desa harus menganggarkan Alokasi Dana Desa (ADD) untuk pemerintah desa dalam jenis belanja bantuan keuangan kepada pemerintah desa paling sedikit 10% (sepuluh persen) dari DTU (DAU dan DBH) yang diterima oleh kabupaten/kota yang memiliki desa dalam APBD TA 2023 tidak termasuk DBH-CHT, DBH-SDA Kehutanan Dana Reboisasi, dan Tambahan DBH Minyak dan Gas Bumi dalam rangka otonomi khusus, maka Pemerintah Kabupaten Gunung Mas telah menetapkan alokasi anggaran *mandatory spending* atau belanja wajib Alokasi Dana Desa (ADD) tahun 2023 dengan Peraturan Daerah Kabupaten Gunung Mas Nomor 10 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Gunung Mas Nomor 8 Tahun 2023 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023.

Selanjutnya, untuk tata cara penentuan dan penetapan besaran nilai Alokasi Dana Desa (ADD) tahun 2023 yang diterima masing-masing Desa, Pemerintah Kabupaten Gunung Mas telah menetapkan dengan Peraturan Bupati Gunung Mas Nomor 15 Tahun 2023 tentang Tata Cara Pengalokasian dan Penetapan Rincian Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2023 berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

Total jumlah alokasi anggaran mandatory spending atau belanja wajib Alokasi Dana Desa (ADD) pada Pemerintah Kabupaten Gunung Mas tahun 2023 sebesar Rp76.778.304.900,00 dengan total jumlah realisasi sebesar Rp76.778.304.900,00 atau mencapai 100,00% dari total jumlah alokasi anggaran. Dengan rasio anggaran mandatory spending atau belanja wajib Alokasi Dana Desa (ADD) terpenuhi sebesar 10,00% sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dari total jumlah alokasi dan realisasi anggaran tersebut, selanjutnya dapat dirinci menurut SKPD pengelola anggaran dan jenis belanja pada tabel berikut ini:

Tabel 7.6.4 Rincian Anggaran dan Realisasi *Mandatory Spending* Alokasi Dana Desa (ADD)

No.	SKPD/ Jenis Belanja	Anggaran 2023 (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)	(%)
1.	**Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten Gunung Mas**			
a.	Belanja Pegawai	39.971.748.349,00	39.971.748.349,00	100,00
b.	Belanja Barang dan Jasa	36.806.556.551,00	36.806.556.551,00	100,00
c.	Belanja Hibah	0,00	0,00	0,00
d.	Belanja Bantuan Sosial	0,00	0,00	0,00
e.	Belanja Modal	0,00	0,00	0,00
	Jumlah 1	**76.778.304.900,00**	**76.778.304.900,00**	**100,00**
A.	**Jumlah *Mandatory Spending* Alokasi Dana Desa (ADD) Tahun 2023 (Total Jumlah 1)**	**76.778.304.900,00**	**76.778.304.900,00**	**100,00**
B.	**Perhitungan Minimal Alokasi Dana Desa (ADD) Tahun 2023**			
B.1.	Total Pendapatan Transfer - Dana Perimbangan dalam APBD TA 2023	959.122.292.000,00	//////////////////////////////	////////
B.2.	Total Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik dalam APBD TA 2023	73.996.025.000,00	//////////////////////////////	////////
B.3.	Total Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik dalam APBD TA 2023	117.343.218.000,00	//////////////////////////////	////////
B.4.	**Jumlah Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik dan Non Fisik dalam APBD TA 2023 (B.2 + B.3)**	**191.339.243.000,00**	//////////////////////////////	////////

B.5.	**Selesih Pendapatan Transfer - Dana Perimbangan dengan Jumlah Belanja Bagi Hasil dan Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik dalam APBD TA 2023**	**767.783.049.000,00**	//////////////////////////////	//////////
B.6.	**Minimal Alokasi Dana Desa (ADD) dalam APBD tiap tahun (10% x B.5)**	**76.778.304.900,00**	//////////////////////////////	//////////
C.	**Persentase Anggaran Belanja Wajib Alokasi Dana Desa (ADD) Tahun 2023 (A:B.5 x 100%)**	**10,00**	//////////////////////////////	//////////

Lebih lanjut dari tabel di atas dapat dijelaskan bahwa nilai Pendapatan Daerah atas Pendapatan Transfer - Dana Perimbangan, Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik, dan DAK Nonfisik adalah pagu anggaran murni APBD TA 2023 sebelum perubahan.

Rincian dan Penjelasan Anggaran Mandatory Spending Bidang Pengawasan

6. 7. Rincian dan Penjelasan Anggaran *Mandatory Spending* Bidang Pengawasan

Dalam rangka pemenuhan *mandatory spending* atau belanja wajib bidang pengawasan tahun 2023 sesuai amanat Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah dengan berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023, bahwa Pemerintah Daerah mengalokasikan anggaran pengawasan sesuai dengan kewenangannya ke dalam APBD untuk mendanai program, kegiatan dan sub kegiatan pembinaan dan pengawasan yang ditetapkan berdasarkan besaran dari total belanja daerah, dengan klasifikasi untuk Pemerintah Daerah kabupaten/kota di atas Rp1.000.000.000.000,00 (satu triliun rupiah) sampai dengan Rp2.000.000.000.000,00 (dua triliun rupiah) paling sedikit sebesar 0,75% (nol koma tujuh puluh lima persen) dari total belanja daerah dan di atas Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah), maka Pemerintah Kabupaten Gunung Mas telah menetapkan alokasi anggaran *mandatory spending* atau belanja wajib bidang pengawasan tahun 2023 dengan Peraturan Daerah Kabupaten Gunung Mas Nomor 10 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Gunung Mas Nomor 8 Tahun 2023 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023.

Total jumlah alokasi anggaran mandatory spending atau belanja wajib bidang pengawasan Pemerintah Kabupaten Gunung Mas tahun 2023 sebesar Rp11.725.560.747,00 dengan total jumlah realisasi sebesar Rp11.331.428.663,00 atau mencapai 96,64% dari total jumlah alokasi anggaran. Dengan rasio anggaran mandatory spending atau belanja wajib bidang pengawasan terpenuhi sebesar 0,88% sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dari total jumlah alokasi dan realisasi anggaran tersebut, selanjutnya dapat dirinci menurut SKPD pengelola anggaran dan jenis belanja pada tabel berikut ini:

Tabel 7.6.5 Rincian Anggaran dan Realisasi *Mandatory Spending* Bidang Pengawasan

No.	SKPD/ Jenis Belanja	Anggaran 2023 (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)	(%)
1.	**Inspektorat Kabupaten Gunung Mas**			
a.	Belanja Pegawai	5.065.951.408,00	4.886.654.361,00	96,46
b.	Belanja Barang dan Jasa	4.351.167.498,00	4.141.935.302,00	95,19
c.	Belanja Hibah	0,00	0,00	0,00
d.	Belanja Bantuan Sosial	0,00	0,00	0,00
e.	Belanja Modal	2.308.441.841,00	2.302.839.000,00	99,76
	Jumlah 1	**11.725.560.747,00**	**11.331.428.663,00**	**96,64**
A.	**Jumlah *Mandatory Spending* Bidang Pengawasan Tahun 2023 (Total Jumlah 1)**	**11.725.560.747,00**	**11.331.428.663,00**	**96,64**
B.	**Perhitungan Minimal Belanja Pengawasan Tahun 2023**			
C.1.	Total Belanja Daerah dalam APBD TA 2023	1.334.210.394.363,00	////////////////////////////	////////
C.2.	**Minimal Belanja Pengawasan Tahun 2023 (10% x C.1)**	**10.006.577.957,72**	////////////////////////////	////////
D.	**Persentase Anggaran Belanja Wajib Bidang Pengawasan Tahun 2023 (A:C.1) x 100%**	**0,88**	////////////////////////////	////////

LAMPIRAN VII
PERATURAN DAERAH KABUPATEN GUNUNG MAS
NOMOR TAHUN 2024
TENTANG
PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2023

BAB VII PENUTUP

Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Gunung Mas Tahun 2023 merupakan salah satu bentuk akuntabilitas Pemerintah Kabupaten Gunung Mas dalam hal pengelolaan keuangan bagi pihak-pihak yang berkepentingan terhadap informasi pelaksanaan APBD serta kinerja keuangan pada Tahun Anggaran 2023 yaitu Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Gunung Mas serta masyarakat pada umumnya. Selain itu Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kabupaten Gunung Mas juga bertujuan untuk menyajikan seluruh transaksi keuangan secara wajar dan sesuai dengan prinsip dan standar akuntansi pemerintah yang berlaku.

Dengan demikian penyusunan LKPD Kabupaten Gunung Mas Tahun 2023 diharapkan dapat memenuhi kewajiban Pemerintah Kabupaten Gunung Mas sebagai entitas pelaporan dalam menyajikan seluruh transaksi keuangan secara wajar dan sesuai dengan prinsip dan standar akuntansi pemerintahan berbasis akrual yang berlaku.

Pj. BUPATI GUNUNG MAS

ttd

HERSON B. ADEN

PEMERINTAH KABUPATEN GUNUNG MAS
DAFTAR PIUTANG DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2023
AUDITED

No.	Uraian rincian piutang	Tahun Pengakuan Piutang	Saldo Awal Piutang	Penambahan Piutang	Pengurangan Piutang	Saldo Akhir Piutang Tahun 2022
1	2	3	4	5	6	7 = 4+5-6
1	Piutang Pajak Reklame (Dispenda)	2011	26.000.000,00	-	-	26.000.000,00
2	Piutang Pajak Bumi dan Bangunan (Dispenda)	2014-2023	1.183.790.616,00 -	378.126.604,00	114.955.080,00	1.446.962.140,00 -
3	Piutang atas PPJU Desember 2021	2023	215.390.280,00	256.588.203,00	215.390.280,00	256.588.203,00
4	Piutang Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor dan Air Permukaan dari Provinsi (BKAD)	2021	-	7.506.010.211,00	-	7.506.010.211,00
5	Piutang Bagi Hasil Pajak Rokok TW IV Thn 2020 dari Provinsi (BKAD)-Pendapatan Tranf Pemda Lainnya	2021	-	-	-	-
6	Piutang Retribusi Sewa Rumah Dinas (Dispenda)	2011-2023	184.614.000,00	6.810.000,00	5.310.000,00	186.114.000,00
7	Piutang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah-sewa ruko (Disperindag)	2021	293.600.000,00	233.550.000,00	90.650.000,00	436.500.000,00
8	Piutang Pendapatan Lainnya PT Palangka Nusantara (BKAD)	2011	4.575.000,00			4.575.000,00
9	Piutang atas kelebihan pembayaran gaji bagi pegawai yang pensiun (PPKD) TASPEN	2016, 2017,2018,2019,2020 dan 2021	71.050.000,00	-	71.050.000,00	-
10	Piutang Uang Muka Pengadaan Barang dan Jasa (Dinas PU)	2020	1.652.953.125,50	134.417.040,00	1.652.953.125,50	134.417.040,00
11	Piutang jasa Layanan Umum BLUD (RSUD)	2015-2023	406.902.720,00	37.095.210,00	25.043.193,00	418.954.737,00
12	Piutang jasa Layanan Kesehatan pd BPJS TA 2020 (RSUD)	2023	1.867.114.195,00	1.109.627.396,00	692.363.605,00	2.284.377.986,00
13	Piutang Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah raga	2018	22.500.000,00			22.500.000,00
14	piutang TGR dinas Perikanan	2016	9.931.450,00			9.931.450,00
15	Piutang Pendapatan Bunga TDF (BKAD)	2022	2.482.126,14	-	-	2.482.126,14
16	Piutang PAD Lain-lain PAD yang Sah (Taspen)	2023		103.356.276,00	38.440.276,00	64.916.000,00
JUMLAH			**5.940.903.512,64**	**9.765.580.940,00**	**2.906.155.559,50**	**12.800.328.893,14**

Pj. BUPATI GUNUNG MAS

ttd

HERSON B. ADEN

LAMPIRAN IX
PERATURAN DAERAH KABUPATEN GUNUNG MAS
NOMOR 3 TAHUN 2024
TENTANG
PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2023

PEMERINTAH KABUPATEN GUNUNG MAS
DAFTAR REKAPITULASI PENYISIHAN PIUTANG TIDAK TERTAGIH
TAHUN ANGGARAN 2023

No	Rincian Penyisihan Piutang Tak Tertagih	Menunggak 0-1 Tahun	Menunggak 1-3 Tahun	Menunggak >3 Tahun	Jumlah
1	Penyisihan Piutang Pajak Daerah	37.812.660,40	263.128.225,50	568.579.085,00	869.519.970,90
2	Penyisihan Piutang Retribusi Daerah	24.036.000,00	158.976.000,00	86.802.000,00	269.814.000,00
3	Penyisihan Piutang Uang Muka Pengadaan Barang dan Jasa	-	-	-	-
4	Penyisihan Piutang Pelayanan Kesehatan BLUD	8.335.386,00	250.351.832,00	-	258.687.218,00
5	Penyisihan Piutang Pendapatan Lainnya	-	-	4.575.000,00	- 4.575.000,00
6	Penyisihan Piutang Lainnya	248.212,61		9.931.450,00	10.179.662,61
Jumlah		70.184.046,40	672.456.057,50	669.887.535,00	1.412.775.851,51

Pj. BUPATI GUNUNG MAS

TTD

HERSON B. ADEN

LAMPIRAN X
PERATURAN DAERAH KABUPATEN GUNUNG MAS
NOMOR 3 TAHUN 2024
TENTANG
PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2023

PEMERINTAH KABUPATEN GUNUNG MAS
DAFTAR REKAPITULASI DANA BERGULIR DAN PENYISIHAN DANA BERGULIR
TAHUN ANGGARAN 2023

No	SKPD Pengelola	Saldo 31 Des 2022 (Rp)	Jumlah diragukan tertagih (Rp)	Saldo 31 des 2023 Net Realizable Value (Rp)
1	Disperindagkop -Perkuatan Modal/jaminan untuk UMKM & koperasi	-	-	-
2	Distannak - Kredit ternak	-	-	-
Jumlah		**-**	**-**	**-**

Pj. BUPATI GUNUNG MAS

TTD

HERSON B. ADEN

PEMERINTAH KABUPATEN GUNUNG MAS
DAFTAR PENYERTAAN MODAL (INVESTASI) DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2023

No.	Tahun Penyertaan Modal	Nama Badan/Lembaga/Pihak Ketiga	Dasar Hukum Penyertaan Modal (Investasi Daerah)	Bentuk Penyertaan Modal (Investasi Daerah)	Jumlah Penyertaan Modal (Investasi Daerah)	Jumlah Modal Yang Telah Disertakan Sampai Tahun Anggaran Lalu	Penyertaan Modal Tahun Ini	Penyertaan Modal dari provinsi dan pusat	Laba/Rugi bersih dari thn 2023 didasarkan dengan metode perhitungan ekuitas	Jumlah Modal Yang Telah Disertakan Sampai Dengan Tahun Ini	Sisa Modal Yang Belum Disertakan	Hasil Penyertaan Modal (Investasi) Daerah Tahun ini	Jumlah Modal (Investasi) Yang Akan Diterima Kembali Tahun Ini	Jumlah Sisa Modal (Investasi) Yang Disertakan Sampai Dengan Tahun Ini
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11 = 7+8	10 = 6-9	11	12	13 = 9-12
1	2003, 2005 - 2023	PT. Bank Pembangunan Kalteng	Perda No. 33 Thn 2005 ttg penyertaan modal pemda pd PT. BPK	Saham	79.692.000.000,00	67.724.000.000,00	11.968.000.000,00	-	-	79.692.000.000,00		2007-2023		
2	2006 s/d 2021	PDAM Tirta Bahalap Kuala Kurun	1. Perda Kab. Gunung Mas no. 18 Thn 2013 ttg perubahan atas perda kab. Gunung mas no.11 thn 2010 ttg pentertaan modal pemkab Gunung Mas pd PDAM kab. Gunung Mas	Aset/uang	19.461.859.791,37	23.477.395.111,56	-	-	(4.015.535.320,19)	19.461.859.791,37				
3	2009. '2010. '2011 2014,2020,2021	PT. Gunung Mas Perkasa	Perda No. 5 Tahun 2009 ; Perda No. 2 Tahun 2014	Aset/uang	2.580.278.114,59	2.556.089.626,59	-		24.188.488	2.580.278.114,59				
4	2014 dan 2016	PT. Penjaminan Kredit Daerah (Jamkrida) Kalteng	Perda No. 13 Tahun 2013 TGl 10 Des 2013	Saham	3.000.000.000,00	3.000.000.000,00	-			3.000.000.000,00		2014-2022		
JUMLAH			-	-	104.734.137.905,96	96.757.484.738,15	11.968.000.000,00	-	(3.991.346.832,19)	104.734.137.905,96	-		-	-

Pj. BUPATI GUNUNG MAS

TTD

HERSON B. ADEN

LAMPIRAN XII
PERATURAN DAERAH KABUPATEN GUNUNG MAS
NOMOR 3 TAHUN 2024
TENTANG
PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2023

PEMERINTAH KABUPATEN GUNUNG MAS
DAFTAR PENAMBAHAN DAN PENGURANGAN ASET TETAP DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2023

(Dalam Rupiah)

No	Jenis Aset Tetap Daerah	Saldo Awal	Penambahan	Pengurangan	Saldo Akhir
1	2	3	4	5	6=3+4-5
1	**Tanah**	421.678.467.720,16	2.390.254.560,00	3.528.217.560,00	420.540.504.720,16
2	**Peralatan dan Mesin**	403.789.220.779,80	46.561.028.416,00	13.778.952.123,00	436.571.297.072,80
3	**Gedung dan Bangunan**	909.506.934.290,86	90.973.997.606,00	40.380.919.275,00	960.100.012.621,86
4	**Jalan Irigasi dan Jaringan**	2.113.453.245.615,80	256.137.224.758,39	82.681.492.993,32	2.286.908.977.380,87
5	**Aset Tetap Lainnya**	36.656.365.378,63	1.703.210.253,00	179.607.598,03	38.179.968.033,60
6	**Konstruksi Dalam Pengerjaan**	58.136.212.299,41	9.336.784.158,32	55.102.443.800,00	12.370.552.657,73
JUMLAH		**3.943.220.446.084,66**	**407.102.499.751,71**	**195.651.633.349,35**	**4.154.671.312.487,02**

Pj. BUPATI GUNUNG MAS,

TTD

HERSON B. ADEN

PEMERINTAH KABUPATEN GUNUNG MAS
DAFTAR REKAPITULASI ASET TETAP DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2023

Jenis Aset Tetap Daerah	Saldo 31/12/2022	Mutasi Tahun 2023		Saldo 31/12/2023
		Bertambah	Berkurang	
Tanah	421.678.467.720,16	2.390.254.560,00	3.528.217.560,00	420.540.504.720,16
Peralatan dan Mesin	403.789.220.779,80	46.561.028.416,00	13.778.952.123,00	436.571.297.072,80
Gedung dan Bangunan	909.506.934.290,86	90.973.997.606,00	40.380.919.275,00	960.100.012.621,86
Jalan Irigasi dan Jaringan	2.113.453.245.615,80	256.137.224.758,39	82.681.492.993,32	2.286.908.977.380,87
Aset Tetap Lainnya	36.656.365.378,63	1.703.210.253,00	179.607.598,03	38.179.968.033,60
Konstruksi Dalam Pengerjaan	58.136.212.299,41	9.336.784.158,32	55.102.443.800,00	12.370.552.657,73
Nilai Perolehan	**3.943.220.446.084,66**	**407.102.499.751,71**	**195.651.633.349,35**	**4.154.671.312.487,02**
Akumulasi Penyusutan				
Tanah	-	-	-	-
Peralatan dan Mesin	(295.012.439.755,60)	(42.829.519.451,00)	(9.594.854.925,00)	(328.247.104.281,60)
Gedung dan Bangunan	(417.322.494.311,00)	(53.941.818.779,00)	(13.558.093.576,00)	(457.706.219.514,00)
Jalan Irigasi dan Jaringan	(1.447.862.568.503,10)	(162.139.843.154,00)	(89.962.088,00)	(1.609.912.449.569,10)
Aset Tetap Lainnya	(1.049.872.696,00)	(41.996.264,00)	(14.583.287,00)	(1.077.285.673,00)
Konstruksi Dalam Pengerjaan	-	-	-	-
Jumlah Akumulasi Penyusutan	**(2.161.247.375.265,70)**	**(258.953.177.648,00)**	**(23.257.493.876,00)**	**(2.396.943.059.037,70)**
Nilai Buku	**1.781.973.070.818,96**	**148.149.322.103,71**	**172.394.139.473,35**	**1.757.728.253.449,32**

Pj. BUPATI GUNUNG MAS

TTD

HERSON B. ADEN

LAMPIRAN XIV
PERATURAN DAERAH KABUPATEN GUNUNG MAS
NOMOR 3 TAHUN 2023
TENTANG
PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2022

PEMERINTAH KABUPATEN GUNUNG MAS
DAFTAR REKAPITULASI KONSTRUKSI DALAM PENGERJAAN
TAHUN ANGGARAN 2023

No	Nama Barang	Saldo awal 31 Desember 2022	Mutasi Tahun 2023		Saldo Akhir
			Penambahan	Pengurangan	
1	Tanah	837.403.500,00	426.249.560,00	476.232.100,00	787.420.960,00
2	Peralatan dan Mesin	-	-	-	-
3	Gedung dan Bangunan	640.825.500,00	53.805.966.570,00	53.709.766.570,00	737.025.500,00
4	Jalan, Jaringan dan Irigasi	56.657.983.299,41	116.182.952.746,64	161.994.829.848,32	10.846.106.197,73
5	Aset Tetap lainnya	-	-	-	-
Jumlah		**58.136.212.299,41**	**170.415.168.876,64**	**216.180.828.518,32**	**12.370.552.657,73**

Pj. BUPATI GUNUNG MAS

TTD

HERSON B. ADEN

PEMERINTAH KABUPATEN GUNUNG MAS
DAFTAR REALISASI PENAMBAHAN DAN PENGURANGAN ASET LAINNYA
TAHUN ANGGARAN 2023

(Dalam Rupiah)

No	Jenis Aset Lainnya	Saldo Awal	Penambahan	Pengurangan	Saldo Akhir
1	2	3	4	5	6=3+4+5
1	Tagihan Jangka Panjang - Tuntutan Perbendaharaan	9.931.450,00	-		9.931.450,00
2	Aset Tidak Berwujud	2.526.294.510,05	234.356.286,00	28.561.604,00	2.732.089.192,05
3	Aset Lain-lain	14.286.116.493,00	504.615.411,03	119.230.455,00	14.671.501.449,03
JUMLAH		**16.822.342.453,05**	**738.971.697,03**	**147.792.059,00**	**17.413.522.091,08**

Pj. BUPATI GUNUNG MAS

TTD

HERSON B. ADEN

LAMPIRAN XVI
PERATURAN DAERAH KABUPATEN GUNUNG MAS
NOMOR 3 TAHUN 2024
TENTANG
PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2023

PEMERINTAH KABUPATEN GUNUNG MAS
DAFTAR DANA CADANGAN
TAHUN ANGGARAN 2023

(Dalam Rupiah)

No	Tujuan Pembentukan Dana Cadangan	Dasar Hukum Pembentukan Dana Cadangan	Jumlah Dana Cadangan Yang Direncanakan (Rp)	Saldo Awal (Rp)	Transfer dari Kas Daerah (Rp)	Transfer ke Kas Daerah (Rp)	Saldo Akhir (Rp)	Sisa Dana Yang Belum Dicadangkan (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
JUMLAH			-	-	-	-	-	-

Pj. BUPATI GUNUNG MAS

TTD

HERSON B. ADEN

Lampiran XVII
Peraturan Daerah Kabupaten Gunung Mas
Nomor 3 Tahun 2024
Tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023

PEMERINTAH KABUPATEN GUNUNG MAS
DAFTAR KEWAJIBAN JANGKA PENDEK
TAHUN ANGGARAN 2023

No	Uraian	Saldo Awal	Mutasi Tahun 2023		Saldo Akhir
			Bertambah	Berkurang	
1	Utang PFK	2.042,00	71.556,00	2.042,00	71.556,00
2	Pendapatan Diterima Dimuka	196.727.942,00	195.876.541,00	196.727.942,00	195.876.541,00
3	Utang Belanja	45.294.588.644,49	2.824.509.634,49	45.294.588.644,49	2.824.509.634,49
4	Utang Jangka Pendek Lainnya	-	79.350.000,00	-	79.350.000,00
Jumlah		**45.491.318.628,49**	**3.099.807.731,49**	**45.491.318.628,49**	**3.099.807.731,49**

Pj. BUPATI GUNUNG MAS

TTD

HERSON B. ADEN



LAMPIRAN XVIII
PERATURAN DAERAH KABUPATEN GUNUNG MAS
NOMOR 3 TAHUN 2024
TENTANG
PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN
ANGGARAN 2023

PEMERINTAH KABUPATEN GUNUNG MAS
DAFTAR KEWAJIBAN JANGKA PANJANG
TAHUN ANGGARAN 2023

No	Uraian	Saldo Awal	Mutasi Tahun 2023		Saldo Akhir
			Bertambah	Berkurang	
Jumlah		-	-	-	-

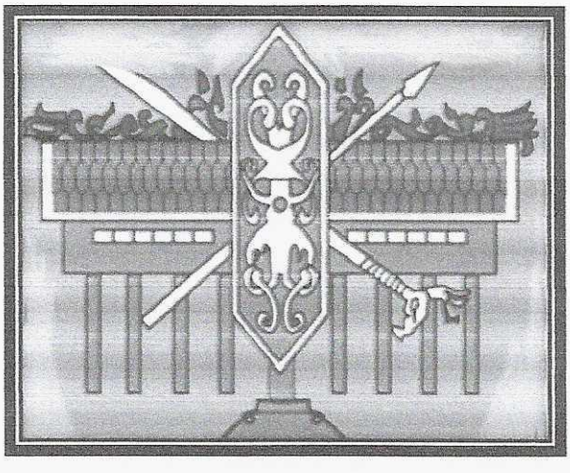
Pj. BUPATI GUNUNG MAS

TTD

HERSON B. ADEN

LAPORAN KEUANGAN

UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2023



PERUSAHAAN DAERAH

GUNUNG MAS PERKASA KABUPATEN GUNUNG MAS

DAFTAR ISI

	HALAMAN
NERACA.....	1 - 2
PENJELASAN NERACA.....	2 - 6
LAPORAN LABA-RUGI.....	7
PENJELASAN LABA-RUGI.....	8 - 9

LAMPIRAN-LAMPIRAN

LAMPIRAN I PERINCIAN LABA-RUGI SERTA PENJELASANNYA

LAMPIRAN II DAFTAR BARANG INVENTARIS PERALATAN DAN PERLENGKAPAN

LAMPIRAN III DAFTAR BARANG INVENTARIS MESIN DAN KENDARAAN

LAMPIRAN IV DAFTAR BARANG INVENTARIS KANTOR

LAMPIRAN V PRA OPERASIONAL PANGKALAN BBM

LAMPIRAN VI PRA OPERASIONAL KAYU SENTRA IKM SEPANG.

LAMPIRAN VII PRA OPERASIONAL LISTRIK SENTRA IKM SEPANG

NERACA

PER 31 DESEMBER 2023

			31/12/2023	31/12/2022
I.		ASET		
A.	3.0.00	ASET LANCAR	*(Belum Audit)*	*(Belum Audit)*
	3.1.00	Kas dan setara Kas	6,026,393	6,822,385
	3.2.00	Piutang Usaha	12,993,000	12,993,000
	3.3 00	Piutang Non Usaha*)	72,511,939	74,511,939
	3.5.00	Jaminan pembayaran dimuka	12,720,000	12,720,000
		Jumlah Aset Lancar	104,251,332	107,047,324
B.	3.6.00	ASET TETAP		
	3.6.01	Tanah.*)	7,500,000	7,500,000
	3.6.02	Gedung dan bangunan *)	172,699,000	172,699,000
	3.6.03	Peralatan dan Perlengkapan	125,853,900	88,098,900
	3.6.04	Kendaraan dan Mesin	591,249,890	591,249,890
	3.6.05	Inventaris Kantor	41,690,000	41,690,000
	3.6.06	Pangkalan BBM	480,156,187	480,156,187
	3.6.07	Pra Operasional *)	1,211,351,997	1,211,351,997
	3.6.07	Pra Ops.Sentra IKM Sepang	41,893,641	41,893,641
	3.6.08	Istalasi listrik Sentra IKM Sepang	70,858,650	70,858,650
		JUMLAH NILAI PEROLEHAN	2,743,253,265	2,705,498,265
	3.6.08	*Akumulasi penyusutan*	*(504,979,559)*	*(504,979,559)*
		JUMLAH NILAI BUKU ASET TETAP	2,238,273,706	2,200,518,706
C	3.7.00	ASET LAIN-LAIN		
	3.7.01	Aset lain-lain *)	1,059,012,450	1,059,012,450
	3.7.02	*Amortisasi Aset Lain-lain*	*(353,044,675)*	*(353,044,675)*
		JUMLAH ASET LAIN-LAIN	705,967,775	705,967,775
		JUMLAH ASET	3,048,492,813	3,013,533,805

			31/12/2023	12/31/2022
			(Belum Audit)	(Belum Audit)
II		KEWAJIBAN DAN EKUITAS		
A		KEWAJIBAN LANCAR		
	3.8.00	Hutang Gaji	62,588,000	62,588,000
	3.9.00	Hutang Pihak III	44,353,814	44,353,814
	3.10.00	Hutang Listrik	10,206,659	10,206,659
	3.11.00	Hutang barang	-	3,952,000
	3.12.00	Hutang Sewa Aset	55,000,000	65,000,000
	3.13.00	Hutang PHR	24,792,520	-
		JUMLAH KEWAJIBAN LANCAR	196,940,993	186,100,473
B.		KEWAJIBAN TIDAK LANCAR		
	3.14.00	Hutang Pembiayaan (Leasing)	513,558,000	513,558,000
	3.15.00	Hutang Usaha	5,000,000	5,000,000
		JUMLAH KEWAJIBAN TIDAK LANCAR	518,558,000	518,558,000
C.		EKUITAS		
	3.16.00	Kekayaan Pemkab yang dipisahkan	6,934,963,635	6,934,963,635
	3.17.00	laba (rugi) tahun lalu	(4,626,088,303)	(4,512,155,041)
	3.18.00	Laba (rugi) tahun berjalan	24,118,488	(113,933,262)
		JUMLAH EKUITAS	2,332,993,820	2,308,875,332
		JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS	3,048,492,813	3,013,533,805

Disusun oleh,

SURADIE H.ERANG,SE

Plt. Direktur

PENJELASAN POS NERACA

PER 31 DESEMBER 2023

I ASET

A. ASET LANCAR

		31/12/2023	31/12/2022
3.1.00	**Kas dan Setara Kas**	**6,026,393.00**	**6,822,385.00**
3.1.01	Kas ditangan Kantor Perusda	2,758,756.00	
3.1.03	Kas yang dibatasi penggunaannya *)	677,500.00	
3.1.04	Kas BPK No.1030103001104	881,065.00	
3.1.05	Kas BPK No.1030103001016 *)	1,709,072.00	
		6,026,393.00	

3.2.00 Piutang Usaha

No.Ak	Uralan		Saldo 31-Dec-23	Penambahan (pengurangan)	Saldo 31-Dec-22
3.2.01	31-Jan	Deni/Petrus	7,293,000.00		7,293,000.00
3.2.03	31-Jan	Mr.X (082149087165)	300,000.00		300,000
3.2.04	31-Jan	Mr.X (082198430029)	1,000,000.00		1,000,000
3.2.05	31-Jan	Mr.X (085389087423)	1,100,000.00		1,100,000.00
3.2.06	31-Jan	Mr.X (082158280963)	3,000,000.00		3,000,000.00
3.2.07	31-Jan	Mr.X (082187626526)	300,000.00		300,000.00
			12,993,000	-	**12,993,000**

3.3.00 Piutang Non Usaha.

No	Tgl	Uralan	Saldo 31-Dec-23	Penambahan (pengurangan)	Saldo 31-Dec-22
3.3.01	Tahun 2016	Salundik Hinting *)	16,600,000.00	-	16,600,000.00
3.3.02	Tahun 2016	Edi Marlin *)	300,000.00	-	300,000.00
3.3.03	Tahun 2016	Supir Joni *)	250,000.00	-	250,000.00
3.3.04	Tahun 2016	Supir Sutarjo *)	6,260,000.00	-	6,260,000.00
3.3.05	Tahun 2016	Supir Bmbang *)	3,930,000.00	-	3,930,000.00
3.3.06	Tahun 2016	Supir Upin *)	1,350,000.00	-	1,350,000.00
3.3.07	Tahun 2016	Supir Dede *)	200,000.00	-	200,000.00
3.3.08	Tahun 2016	Supir Dede *)	500,000.00	-	500,000.00
3.3.09	Tahun 2016	Pengurus Hotel GMP *)	2,000,000.00	-	2,000,000.00
3.3.10	Tahun 2016	Salundik Hinting *)	1,470,604.00	-	1,470,604.00
3.3.11	Tahun 2016	Albert Mahin (Harjo) *)	64,545,600.00	-	64,545,600.00
3.3.12	Tahun 2016	Abul Hasan *)	15,970,887.00	-	15,970,887.00
3.3.13	Tahun 2016	Budi Supri Zonder *)	45,150,000.00	-	45,150,000.00
3.3.14	Tahun 2016	Bu Tetek *)	2,500,000.00	-	2,500,000.00
3.3.15	Tahun 2016	Johar Zen Gafar *)	134,268,400.00	-	134,268,400.00
3.3.16	Tahun 2016	Dian *)	20,000,000.00	-	20,000,000.00
3.3.17	Tahun 2016	Budi *)	10,000,000.00	-	10,000,000.00
3.3.18	Tahun 2020	Sentra IKM (by.mendatangkan)	2,466,339.00	-	2,466,339.00
3.3.19	4-Apr	Andang Taruna (Mantan Karyawan)	5,500,000.00	(2,000,000.00)	7,500,000.00
		JUMLAH	**333,261,830.00**	-	**335,261,830.00**
		Penyisihan piutang	*(260,749,891.00)*	-	*(260,749,891.00)*
		JUMLAH	**72,511,939.00**	**(2,000,000)**	**74,511,939.00**

No.Ak.	Uraian	Saldo 31-Dec-23	Penambahan (pengurangan)	Saldo 30-Nov-23
3.5.00	Jaminan pembayaran dimuka...	12,720,000	-	12,720,000
		12,720,000		**12,720,000**

Keterangan :

Jumlah tersebut adalah jaminan pembayaran dimuka pemakaian listrik PLN, pada Sentra IKM di Sepang.

3.6.00 ASET TETAP

Akun ini terdiri atas :

No.Ak.	Perolehan	Saldo 31-Dec-23	Penambahan (pengurangan)	Saldo 31-Dec-22
3.6.01	Tanah *)	7,500,000.00	-	7,500,000.00
3.6.02	Gedung dan bangunan *)	172,699,000.00	-	172,699,000.00
3.6.03	Peralatan dan Perlengkapan	131,781,900.00	43,683,000.00	88,098,900.00
3.6.04	Kendaraan/Mesin	585,321,890.00	-	585,321,890.00
3.6.05	Perabot/kantor	41,690,000.00	-	41,690,000.00
3.6.06	Pra Operasional *)	1,211,351,997.00	-	1,211,351,997.00
3.6.07	Pra Operasional IKM Sepang	41,893,641.00	-	41,893,641.00
3.6.08	Pra Operasional Pangkalan BBM	480,156,187.00	-	480,156,187.00
3.6.09	Rehabilitasi instalasi Listrik/lain-lain Sentra IKM	70,858,650.00	-	70,858,650.00
	Jumlah	**2,743,253,265**	**43,683,000**	**2,699,570,265**
	***Akumulasi penyusutan** *)*	***(504,979,559)***	-	***(504,979,559)***
	Jumlah	**2,238,273,706**	**43,683,000**	**2,194,590,706**

3.7.00 ASET LAIN-LAIN

Akun ini terdiri atas :

No.Ak.	Perolehan	Saldo 31-Dec-23	Penambahan (pengurangan)	Saldo 31-Dec-22
3.7.01	Aset lain-lain *)	1,059,012,450	-	1,059,012,450
	*Akumulasi penyusutan *)*	*(353,044,675)*	-	*(353,044,675)*
	Jumlah	**705,967,775**	-	**705,967,775**

II KEWAJIBAN DAN EKUITAS

KEWAJIBAN JANGKA PENDEK

3.8.00 Hutang gaji

	Tgl	Uraian	Saldo 31-Dec-23	Penambahan (pengurangan)	Saldo 31-Dec-22
3.8.01	31-Jan	Guanhin (Ketua BP)	6,000,000.00		6,000,000.00
3.8.02	31-Jan	Herbert Y.Asin (Sek.BP)	5,250,000.00		5,250,000.00
3.8.03	31-Jan	Erlambang (Anggota BP)	13,500,000.00		13,500,000.00
3.8.04	31-Jan	Ali Imbron (Dirut)	37,838,000.00		37,838,000.00
			62,588,000		**62,588,000**

		Saldo 31-Dec-23	Penambahan (pengurangan)	Saldo 31-Dec-22
3.9.00	**Hutang Pihak III**			
3.9.01	Ali Imbron	19,853,814.00		19,853,814.00
3.9.02	Dandi	4,500,000.00		4,500,000.00
3.9.02	Herbert Asin	20,000,000.00		20,000,000.00
		44,353,814.00	-	**44,353,814.00**

		Saldo 31-Dec-23	Penambahan (pengurangan)	Saldo 31-Dec-22
3.10.00	**Hutang Listrik**			
3.10.00	Listrik IKM Sepang	**10,206,659**	-	**10,206,659**

		Saldo 31-Dec-23	Penambahan (pengurangan)	Saldo 31-Dec-22
3.11.00	**Hutang Barang**			
3.11.00	Hutang barang	-	**(3,952,000)**	**3,952,000**

		Saldo 31-Dec-23	Penambahan (pengurangan)	Saldo 31-Dec-22
3.12.00	**Hutang Sewa Aset**			
3.12.00	**Hutang Sewa Aset** *(Hotel Gumas)*	55,000,000	(10,000,000)	65,000,000
		55,000,000	(10,000,000)	**65,000,000**

		Saldo 31-Dec-23	Penambahan (pengurangan)	Saldo 31-Dec-22
III	**KEWAJIBAN TIDAK LANCAR**			
3.11.00	**Hutang Pembiyaan (Leasing)*)**	513,558,000	-	513,558,000
		513,558,000	-	**513,558,000**

		Saldo 31-Dec-23	Penambahan (pengurangan)	Saldo 31-Dec-22
3.12.00	**Hutang Usaha*)**			
		5,000,000	-	5,000,000
		5,000,000	-	**5,000,000**

LAPORAN LABA (RUGI)

PER 31 DESEMBER 2023

			31/12/2023 (Belum Audit)	31/12/2022 (Belum Audit)
I.	**PENDAPATAN**			
	A. PENDAPATAN USAHA			
	4.0.00	Pendapatan Jasa Hotel	361,502,381	369,340,391
	4.1.00	Pendapatan Sentra IKM Sepang	-	9,800,000
	4.2.00	Pendapatan Pangkalan BBM	-	4,295,000
	4.3.00	Pendapatan Jasa Parkir	5,900,000	-
	JUMLAH PENDAPATAN USAHA		367,402,381	383,435,391
	B. BEBAN/ BIAYA USAHA			
	4.4.00	Beban Operasional Hotel	225,589,245	213,136,129
	4.4.35	Beban Pemeliharaan Hotel	22,741,000	10,262,900
	4.4.40	Beban Operasional Sentra IKM	28,594,612	103,395,424
	4.4.50	Beban Produksi Sentra IKM	-	12,965,000
	4.4.73	Beban Pemeliharaan Sentra IKM	2,645,000	100,000
	4.4.80	Beban Pokok Pangkalan BBM dan Gas	-	8,221,000
	4.4.81	Beban opersional Pangkalan BBM	500,000	3,738,350
	4.4.94	Beban pemeliharaan Pangkalan BBM dan Gas	2,000,000	9,716,400
		JUMLAH BEBAN USAHA	282,069,857	361,535,203
	4.4.90	LABA KOTOR	85,332,524	21,900,188
	4.4.100	BEBAN ADM DAN UMUM KANTOR PERUSDA	65,954,900	135,693,450
	4.4.101	*Beban Penyusutan Aset Tetap*		-
		JUMLAH BEBAN ADM DAN UMUM	65,954,900	135,693,450
	4.4.102	LABA (RUGI) USAHA	19,377,624	(113,793,262)
	C. PENDAPATAN (BEBAN) NON USAHA			
	4.4.123	Pendapatan Non Usaha	53,596,704	-
	4.4.133	Beban Non Usaha	48,855,840	(140,000)
		JUMLAH PENDAPATAN (BEBAN) NON USAHA	4,740,864	140,000
	4.4.140	LABA (RUGI) USAHA SEBELUM PAJAK	24,118,488	(113,653,262)

Disusun oleh,

SURADIE H.ERANG,SE

Plt. Direktur

EKUITAS

	Saldo 31-Dec-23	Penambahan (pengurangan)	Saldo 31-Dec-22
3.16.00 Kekayaan PEMKAB yang dipisahkan			
3.16.00 Penyertaan I 16 November 2009 *)	1,000,000,000		1,000,000,000
3.16.00 Penyertaan II 15 Desember 2010 *)	125,000,000		125,000,000
3.16.00 Penyertaan III 28 Desember 2011 *)	232,400,000		232,400,000
3.16.00 Penyertaan IV 29 Desember 2011 *)	44,363,635		44,363,635
3.16.00 Penyertaan V 15 Desember 2014 *)	2,700,000,000		2,700,000,000
3.16.00 Penyertaan VI Perda No.08 th 2019			
3.16.00 tanggal 19 November 2019	2,232,000,000		2,232,000,000
Pengembalian Modal	(583,361,933)		(583,361,933)
3.16.00 Penyertaan VII Perda No.3 th 2020			
tanggal 1 September 2020	1,184,561,933		1,184,561,933
	6,934,963,635		**6,934,963,635**

	Saldo 31-Dec-23	Penambahan (pengurangan)	Saldo 31-Dec-22
3.17.00 **Laba (rugi) tahun berjalan**	**(4,601,969,815)**	**24,118,488**	**(4,626,088,303)**

Keterangan :

**) Pengurus manajemen lama (berakhir tahun 2016)*

PENJELASAN POS-POS LABA - RUGI

PER 31 DESEMBER 2023

				31/12/2023	31/12/2022
I.		**PENDAPATAN USAHA**			
	4.0	Pendapatan Jasa Kamar		361,502,381	369,340,391
	4.1	Pendapatan Sentra IKM		-	9,800,000
	4.2	Pendapatan Pangkalan BBM dan Gas		-	4,295,000
	4.3	Pendapatan Jasa Parkir		5,900,000	-
		Jumlah Pendapatan		**367,402,381**	**383,435,391**
		Jumlah tersebut merupakan jumlah Pendapatan Usaha Perusda per 31 Desember 2023			
II		**BEBAN USAHA**			
	4.4.00	***Beban operasional hotel***		**223,315,245**	**213,136,129**
	4.4.02	Beban listrik dan air	65,736,941		
	4.4.03	Beban telepon dan internet	8,974,954		
	4.4.04	Beban alat keperluan hotel	28,797,350		
	4.4.05	Beban promosi hotel	21,506,000		
	4.4.14	Beban upah lembur	400,000		
	4.4.15	Beban upah harian lepas	1,650,000		
	4.4.34	Beban Gaji Pegawai	91,750,000		
	4.4.37	Beban THR	4,500,000		
			223,315,245		
		Jumlah tersebut merupakan jumlah beban operasional hotel Gumas per 31 Desember 2023			
	4.4.35	***Beban pemeliharaan hotel***		**22,741,000**	**10,262,900**
		Jumlah tersebut merupakan jumlah beban pemeliharaan hotel Gumas per 31 Desember 2023			
	4.4.40	***Beban Operasional Sentra IKM Sepang***		**28,594,612**	**103,395,424**
	4.4.42	Beban listrik dan air	14,594,612		
	4.4.67	Beban honor/gaji karyawan lepas	13,500,000		
	4.4.72	THR	500,000		
			28,594,612		
		Jumlah tersebut merupakan jumlah beban Operasional Sentra IKM Sepang per 31 Desember 2023			
	4.4.50	**Beban bahan pokok produksi**		**-**	**12,965,000**
	4.4.73	**Beban Pemeliharaan IKM Sepang**		**2,645,000**	**100,000**
		Jumlah tersebut merupakan jumlah beban Operasional Sentra IKM Sepang per 31 Desember 2023			
	4.4.80	**Beban Pokok Pangkalan BBM dan Gas.**		**-**	**205,719,520**

	4.4.81	**Beban operasional Pangkalan BBM dan Gas**		-	11,959,350
	4.4.94	**Beban pemeliharaan Pangkalan BBM dan Gas**		2,500,000	9,716,400
		Jumlah tersebut merupakan jumlah beban pemeliharaan Pangkalan BBM dan Gas per 31 Desember 2023			
	4.4.99	**Laba kotor.**		87,606,524	21,900,188
		Jumlah tersebut merupakan perolehan laba (rugi) kotor per 31 Desember 2023			
	4.4.100	**Beban Umum Kantor Perusda**		65,954,900	702,351,037
	4.4.106	Beban Transfortasi	9,560,000		
	4.4.110	Beban ATK	6,394,900		
	4.4.114	Beban Gaji	47,500,000		
	4.4.115	Beban Audii	-		
	4.4.117	Beban sewa Hotel Gumas	-		
	4.4.119	Beban THR	2,500,000		
			65,954,900		
		Jumlah tersebut merupakan jumlah beban Umum Kantor Perusda per 31 Desember 2023			
III	4.4.120	**Laba (rugi) Usaha**		21,651,624	(113,793,262)
		Jumlah tersebut merupakan perolehan laba (rugi) usaha per 31 Desember 2023			
		Pendapatan lain-lain (beban lain-lain)		53,596,704	36,670,643.00
	4.4.124	Pendapatan Jasa Giro			
	4.4.127	Pendapatan Pajak Hotel dan Resoran (PHR)	26,798,352		
	4.4.128	Pendapatan Service	26,798,352		
			53,596,704		
		Jumlah tersebut merupakan pendapatan lain-lain per 31 Desember 2023			
		Beban (beban lain-lain)		51,129,840	33,278,621.00
	4.4.134	Beban Adm Bank	-		
	4.4.135	Beban sumbangan	100,000		
	4.4.136	Beban Pajak dan Restoran (PHR)	26,798,352		
	4.4.137	Beban makan karyawan (Service)	23,991,488		
	4.4.138	Retribusi sampah tahun 2023	240,000		
		Jumlah tersebut merupakan beban lain-lain	**51,129,840**		
		per 31 Desember 2023			
IV	4.4.140	**Laba (rugi) sebelum pajak.....**		24,118,488	(113,933,262)
		Jumlah tersebut merupakan laba (rugi) usaha sebelum pajak per 31 Desember 2023			

LAMPIRAN I

LABA (RUGI) TAHUN 2023

LAMPIRAN I

No.Perk	Uraian	BULAN												
		Jan	Peb	Maret	April	Mei	Juni	Juli	Agt	Sept	Okt	Nov	Des	Jumlah
	PENDAPATAN USAHA													
4.0.00	Pendapatan Jasa Hotel	29,469,970	32,089,968	31,954,971	27,937,471	54,220,757	18,633,312	28,362,468	38,045,827	25,841,635	19,802,077	30,577,633	24,566,292	361,502,381
4.1.00	Pendapatan Sentra IKM Sepang	-												-
4.2.00	Pendapatan Pangkalan BBM	-												-
4.3.00	Pendapatan Jasa Parkir	-	150,000	300,000	450,000	450,000	1,500,000	600,000	300,000	-	900,000	950,000	300,000	5,900,000
	JUMLAH PENDAPATAN USAHA	**29,469,970**	**32,239,968**	**32,254,971**	**28,387,471**	**54,670,757**	**20,133,312**	**28,962,468**	**38,345,827**	**25,841,635**	**20,702,077**	**31,527,633**	**24,866,292**	**367,402,381**
4.4.00	**BEBAN/ BIAYA USAHA**													
4.4.35	Beban Operasional Hotel	15,167,574	18,611,688	18,756,030	19,284,366	16,782,667	18,568,854	23,649,374	21,416,526	15,802,718	19,100,408	18,241,170	20,207,870	225,589,245
4.4.40	Beban Pemeliharaan Hotel	285,000	2,956,000	3,065,000	2,712,000		2,560,000	2,845,000	3,020,000	290,000	1,720,000	1,858,000	1,430,000	22,741,000
4.4.50	Beban Operasional Sentra IKM	4,837,612	203,000	1,506,000	1,003,000	1,506,000	203,000	4,006,000	503,000	4,503,000	3,412,000	3,206,000	3,706,000	28,594,612
4.4.73	Beban Produksi Sentra IKM													-
4.4.80	Beban Pemeliharaan Sentra IKM							1,110,000	1,255,000	280,000	-			2,645,000
4.4.81	Beban Pokok Pangkalan BBM dan Gas													-
4.4.94	Beban opersional Pangkalan BBM				500,000									500,000
	Beban pemeliharaan Pangkalan BBM dan Gas							2,000,000						2,000,000
4.4.90	**JUMLAH BEBAN USAHA**	**20,290,186**	**21,770,688**	**23,327,030**	**23,499,366**	**18,288,667**	**21,331,854**	**33,610,374**	**26,194,526**	**20,875,718**	**24,232,408**	**23,305,170**	**25,343,870**	**282,069,857**
4.4.100	**LABA KOTOR**	**9,179,784**	**10,469,280**	**8,927,941**	**4,888,105**	**36,382,090**	**(1,198,542)**	**(4,647,906)**	**12,151,301**	**4,965,917**	**(3,530,331)**	**8,222,463**	**(477,578)**	**85,332,524**
4.4.101	**BEBAN ADM DAN UMUM KANTOR PERUSDA**	5,008,500	5,200,000	5,685,000	7,029,500	5,700,000	5,599,000	5,540,000	5,833,000	4,785,000	4,150,000	5,754,900	5,670,000	65,954,900
	Beban Penyusutan Aset Tetap													
4.4.102	**JUMLAH BEBAN ADM DAN UMUM**	5,008,500	5,200,000	5,685,000	7,029,500	5,700,000	5,599,000	5,540,000	5,833,000	4,785,000	4,150,000	5,754,900	5,670,000	65,954,900
	LABA (RUGI) USAHA	**4,171,284**	**5,269,280**	**3,242,941**	**(2,141,395)**	**30,682,090**	**(6,797,542)**	**(10,187,906)**	**6,318,301**	**180,917**	**(7,680,331)**	**2,467,563**	**(6,147,578)**	**19,377,624**
4.4.123	**PENDAPATAN (BEBAN) NON USAHA**													
4.4.133	Pendapatan Non Usaha	-			5,587,496	10,843,320	3,726,664	5,672,494	7,609,166	5,168,324	3,960,414	6,115,568	4,913,258	53,596,704
	Beban Non Usaha	-			5,065,348	7,355,660	3,689,332	4,825,247	8,139,583	5,539,162	4,030,095	5,571,784	4,639,629	48,855,840
4.4.140	**JUMLAH PENDAPATAN (BEBAN) NON USAHA**	-	-	-	**522,148**	**3,487,660**	**37,332**	**847,247**	**(530,417)**	**(370,838)**	**(69,681)**	**543,784**	**273,629**	**4,740,864**
	LABA (RUGI) USAHA SEBELUM PAJAK	**4,171,284**	**5,269,280**	**3,242,941**	**(1,619,247)**	**34,169,750**	**(6,760,210)**	**(9,340,659)**	**5,787,884**	**(189,921)**	**(7,750,012)**	**3,011,347**	**(5,873,949)**	**24,118,488**

PENJELASAN LABA-RUGI TAHUN 2023

LAMPIRAN I

No.Perk	Uraian	BULAN												
		Jan	Peb	Maret	April	Mei	Juni	Juli	Agt	Sept	Okt	Nov	Des	Jumlah
	PENDAPATAN USAHA													
4.0.00	***PENDAPATAN JASA HOTEL :***													
4.0.01	Pendapatan Jasa Kamar	29,469,970	32,089,968	31,954,971	27,937,471	54,220,757	18,633,312	28,362,468	38,045,827	25,841,635	19,802,077	30,577,633	24,556,292	361,502,381
4.0.02	Pendapatan Jasa Meeting Room	-	-	-	-	-	-	-				-	-	-
4.0.03	Pendapatan Rest & Café	-	-	-	-	-	-	-				-	-	-
	JUMLAH PENDAPATAN HOTEL	**29,469,970**	**32,089,968**	**31,954,971**	**27,937,471**	**54,220,757**	**18,633,312**	**28,362,468**	**38,045,827**	**25,841,635**	**19,802,077**	**30,577,633**	**24,556,292**	**361,502,381**
4.1.00	***PENDAPATAN SENTRA IKM SEPANG :***													
4.1.01	Pendapatan Jasa Mebel	-	-	-	-	-	-	-						
4.1.02	Pendapatan Bricket serbuk kayu	-	-	-	-	-	-	-						
4.1.03	Pendapatan Moulding	-	-	-	-	-	-	-						
4.1.04	Pendapatan Jasa Moulding	-	-	-	-	-	-	-						
	JUMLAH PENDAPATAN SETRA IKM SEPANG	-	-	-	-	-	-							
4.2.00	***PENDAPATAN PANGKALAN BBM DAN GAS :***													
4.2.01	Pendapatan Penjualan BBM	-	-	-	-	-	-	-						
4.2.02	Pendapatan Penjualan Gas ELPIJI	-	-	-	-	-	-	-						
4.2.03	Pendapatan jasa distributor BBM	-	-	-	-	-	-	-						
	JUMLAH PENDAPATAN PANGKALAN BBM DAN GAS													
4.3.00	**PENDAPATAN JASA PARKIR**	-	150,000	300,000	450,000	450,000	1,500,000	600,000	300,000	-	900,000	950,000	300,000	5,900,000
JUMLAH PENDAPATAN USAHA		29,469,970	32,239,968	32,254,971	28,387,471	54,670,757	20,133,312	28,962,468	38,345,827	25,841,635	20,702,077	31,527,633	24,856,292	367,402,381

No.Perk	Uraian	BULAN												
		Jan	Peb	Maret	April	Mei	Juni	Juli	Agt	Sept	Okt	Nov	Des	Jumlah
	BEBAN/BIAYA USAHA													
4.4.00	***BEBAN/BIAYA HOTEL:***													
4.4.02	Beban listrik dan air	4,867,224	5,176,938	4,142,280	4,379,416	4,894,417	7,804,604	6,393,674	6,662,872	5,019,468	5,763,408	5,238,520	5,394,120	65,736,941
4.4.03	Beban telepon dan internet	749,250	749,250	746,250	749,250	751,750	749,250	749,250	731,454	749,250	749,000	749,250	751,750	8,974,954
4.4.04	Beban alat keperluan hotel	2,389,100	3,115,500	2,518,500	1,889,700	1,674,500	1,251,000	2,141,450	2,695,200	1,590,000	3,350,000	3,668,400	2,514,000	28,797,350
4.4.05	Beban promosi hotel	362,000	985,000	1,310,000	1,616,000	1,462,000	664,000	6,865,000	3,327,000	644,000	1,288,000	1,235,000	1,748,000	21,506,000
4.4.11	Beban BPJS Ketenagakerjaan	-											-	-
4.4.12	Beban BPJS Kesehatan	-											-	-
4.4.13	Beban makan Karyawan	-											-	-
4.4.14	Beban upah lembur	50,000	200,000	150,000									-	400,000
4.4.15	Beban upah harian lepas	-			150,000		100,000		250,000	50,000	200,000	350,000	550,000	1,650,000
4.4.20	Beban Alat Tulis Kantor (ATK)	-			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.4.21	Beban cetak bill	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.4.22	Beban Kertas	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.4.23	Beban tinta printer	-			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.4.30	Beban bahan pokok keperluan hotel	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.4.31	Beban Pengharum ruangan	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.4.32	Beban obat nyamuk	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.4.33	Beban keperluan alat ebersihan	-			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.4.34	Beban Gaji Pegawai	6,750,000	8,000,000	8,000,000	8,000,000	8,000,000	8,000,000	7,500,000	7,750,000	7,750,000	7,750,000	7,000,000	7,250,000	91,750,000
4.4.36	Beban Mini bar	-												-
4.4.37	Beban THR	-			2,500,000							-	2,000,000	4,500,000
	JUMLAH BEBAN/BIAYA OPERASIONAL HOTEL	**15,167,574**	**18,226,688**	**16,867,030**	**19,284,366**	**16,782,667**	**18,568,854**	**23,649,374**	**21,416,526**	**15,802,718**	**19,100,408**	**18,241,170**	**20,207,870**	**223,315,245**
4.4.35	**BEBAN PEMELIHARAAN HOTEL**	**285,000**	**2,956,000**	**3,065,000**	**2,712,000**	**-**	**2,560,000**	**2,845,000**	**3,020,000**	**290,000**	**1,720,000**	**1,858,000**	**1,430,000**	**22,741,000**
	BEBAN/BIAYA SENTRA IKM SEPANG													
4.4.41	Beban Operasional	-												
4.4.42	Beban listrik dan air	4,837,612	203,000	1,506,000	1,003,000	1,506,000	203,000	1,506,000	503,000	503,000	1,412,000	706,000	706,000	14,594,612
4.4.43	Beban Internet	-												-
4.4.44	Beban promosi dan pemasaran	-												-

4.4.45	Beban angkutan	-		-										-
4.4.46	Beban BBM Forklift	-		-										-
4.4.47	Beban BBM Mobil Operasional	-		-										-
4.4.48	Beban BBM Senso	-		-										-
4.4.60	Beban Adm & Umum Pegawai	-		-										-
4.4.61	Beban insentif dari mebel	-		-										-
4.4.62	Beban insentif dari moulding	-		-										-
4.4.63	Beban BPJS Kesehatan	-												-
4.4.64	Beban BPJS Ketenagakerjaan	-		-										-
4.4.65	Beban makan karyawan	-												-
4.4.66	Beban kerja lembur	-												-
4.4.67	Beban upah karyawan lepas	-	-	-	-	-	-	2,500,000	-	4,000,000	2,000,000	2,500,000	2,500,000	13,500,000
4.4.68	Beban ATK	-												-
4.4.69	Beban Keperluan Pegawai	-												-
4.4.70	Beban bonus karyawan	-												-
4.4.71	Beban baju seragam karyawan	-												-
4.4.72	Beban Gaji	-												-
4.4.74	Beban Overhead	-												-
4.4.75	Beban THR	-												-
	JUMLAH BEBAN/BIAYA SENTRA IKM SEPANG	4,837,612	203,000	1,506,000	1,003,000	1,506,000	203,000	4,006,000	503,000	4,503,000	3,412,000	3,206,000	500,000 3,706,000	500,000 28,594,612
4.4.73	**PEMELIHARAAN SENTRA IKM SEPANG**	-	-	-	-	-		1,110,000	1,255,000	280,000	-			2,645,000
4.4.50	**BEBAN BAHAN POKOK PRODUKSI**	-	-	-	-	-								
4.4.51	Beban pokok mebel	-		-										
4.4.52	Beban bahan pokok molding	-												

4.4.80	BEBAN POKOK PANGKALAN BBM DAN GAS	-	-	-										
	BEBAN OPS PANGKALAN BBM DAN GAS :	-												
4.4.82	Beban air & Listrik	-		-										
4.4.83	Beban Promosi	-		-										
4.4.84	beban telepon & Internet	-		-										
4.4.85	Beban Adm & Umum Kantor Pangkalan BBM	-		-										
4.4.86	Beban BPJS Kesehatan	-		-										
4.4.87	Beban BPJS Ketenagakerjaan	-		-										
4.4.88	Beban makan karyawan	-		-										
4.4.89	Beban ATK	-		-										
4.4.90	Beban upah lembur	-		-										
4.4.92	Beban Sewa.	-												
4.4.93	Beban Gaji	-												
	JMH BEBAN OPS PANGKALAN BBM DAN GAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.4.94	BEBAN PEMELIHARAAN PANGKALAN BBM DAN GAS	-	-	-	500,000	-		2,000,000						2,500,000
JUMLAH BEBAN/BIAYA USAHA		20,290,186	21,385,688	21,438,030	23,499,366	18,288,667	21,331,854	33,610,374	26,194,526	20,875,718	24,232,408	23,305,170	25,343,870	279,795,857
LABA (RUGI) KOTOR		9,179,784	10,854,280	10,816,941	4,888,105	36,382,090	(1,198,542)	(4,647,906)	12,151,301	4,965,917	(3,530,331)	8,222,463	(477,578)	87,606,524
	BEBAN UMUM KANTOR PERUSDA :													
4.4.101	Beban Operasional	-	-	-										
4.4.102	Beban perjalanan Dinas	-	-	-										
4.4.103	Beban BBM Mobil Dinas	-	-	-										
4.4.104	Beban Pelayanan Tamu	-	-	-										
4.4.105	Beban Promosi	-	-	-										
4.4.106	Beban Transfortasi	850,000	1,200,000	550,000	730,000	1,700,000	-	570,000	1,550,000	500,000	150,000	1,050,000	710,000	9,560,000
4.4.108	Beban BPJS Kesehatan	-	-	-	-	-								
4.4.109	Beban BPJS Ketenagakerjaan	-	-	-	-	-								
4.4.110	Beban ATK	658,500	-	1,135,000	299,500	-	1,599,000	970,000	283,000	285,000	-	704,900	460,000	6,394,900
4.4.111	Beban rapat	-	-	-	-	-								
4.4.112	Beban Gaji Badan Pengawas	-	-	-	-	-								
4.4.113	Beban Gaji Direksi	-	-	-	-	-								
4.4.114	Beban Gaji Karyawan Kantor	3,500,000	4,000,000	4,000,000	4,000,000	4,000,000	4,000,000	4,000,000	4,000,000	4,000,000	4,000,000	4,000,000	4,000,000	47,500,000

4.4.115	Beban Audit.	-	-	-	-	-	-	-	-					
4.4.116	Beban Pemeliharaan	-	-	-		-	-	-	-					
4.4.117	Beban sewa Hotel Gumas	-	-	-		-	-	-	-					
4.4.119	Beban THR	-	-	-	2,000,000	-	-	-	-					
4.4.120	Asesmen Direksi	-	-	-									500,000	2,500,000
	JMH BEBAN ADM & UMUM KANTOR PERUSDA	5,008,500	5,200,000	5,685,000	7,029,500	5,700,000	5,599,000	5,540,000	5,833,000	4,785,000	4,150,000	5,754,900	5,670,000	65,954,900
LABA (RUGI) USAHA		4,171,284	5,654,280	5,131,941	(2,141,395)	30,682,090	(6,797,542)	(10,187,906)	6,318,301	180,917	(7,680,331)	2,467,563	(6,147,578)	21,651,624
	PENDAPATAN LAIN-LAIN :													
4.4.124	Pendapatan Jasa Giro	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.4.127	Pendapatan Pajak Hotel & Restoran (PHR)	-	-	-	2,793,748	5,421,660	1,863,332	2,836,247	3,804,583	2,584,162	1,980,207	3,057,784	2,456,629	26,798,352
4.4.128	Pendapatan Service	-	-	-	2,793,748	5,421,660	1,863,332	2,836,247	3,804,583	2,584,162	1,980,207	3,057,784	2,456,629	26,798,352
4.4.133	JUMLAH PENDAPATAN LAIN-LAIN	-	-	-	5,587,496	10,843,320	3,726,664	5,672,494	7,609,166	5,168,324	3,960,414	6,115,568	4,913,258	53,596,704
	BEBAN/BIAYA LAIN-LAIN :													
4.4.134	Beban Adm Bank	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4.4.135	Beban Sumbangan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4.4.136	Beban Pajak Hotel & Restoran (PHR)	-	-	-	2,793,748	5,421,660	1,863,332	2,836,247	3,804,583	2,584,162	1,980,207	100,000	-	100,000
4.4.137	Beban makan karyawan (Service)	-	385,000	1,889,000	2,271,600	1,934,000	1,826,000	1,989,000	4,335,000	2,955,000	2,049,888	3,057,784	2,456,629	26,798,352
4.4.138	Retribusi sampah tahun 2023	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,174,000	2,183,000	23,991,488
	JUMLAH BEBAN/BIAYA LAIN-LAIN	-	385,000	1,889,000	5,065,348	7,355,660	3,689,332	4,825,247	8,139,583	5,539,162	4,030,095	240,000		240,000
	JMH PEND. (BEBAN/BIAYA) LAIN-LAIN	-	(385,000)	(1,889,000)	522,148	3,487,660	37,332	847,247	(530,417)	(370,838)	(69,681)	5,571,784	4,639,629	51,129,840
												543,784	273,629	2,466,864
4.4.140	LABA (RUGI)	4,171,284	5,269,280	3,242,941	(1,619,247)	34,169,750	(6,760,210)	(9,340,659)	5,787,884	(189,921)	(7,750,012)	3,011,347	(5,873,949)	24,118,488

LAMPIRAN II

DAFTAR BARANG INVENTARIS

PERALATAN DAN PERLENGKAPAN

Per 31 Desember 2023

LAMPIRAN II

NO	NAMA BARANG	Vol/ Unit	PEMBELIAN TGL/BLN	TAHUN	DITEMPATKAN	HARGA
1	Tangga aluminium	1	31 Januari	2020	Hotel	950,000
2	Arco	1	31 Januari	2020	Hotel	550,000
3	Gagang cangkul	1	31 Januari	2020	Hotel	20,000
4	Cetok	1	31 Januari	2020	Hotel	15,000
5	Gunting taman	1	31 Januari	2020	Hotel	100,000
6	Cekrukan	1	31 Januari	2020	Hotel	45,000
7	Hand spager solo	1	31 Januari	2020	Kantor	330,000
8	Talam	1	14 Pebr	2020	Hotel	30,000
9	Sekop	1	19 Pebr	2020	Hotel	95,000
10	Dispenser Arisa Galon	1	22 Pebr	2020	Kantor	1,400,000
11	Parang	1	25 Pebr	2020	Hotel	85,000
12	Cangkul	1	25 Pebr	2020	Hotel	55,000
13	Arit	1	25 Pebr	2020	Hotel	85,000
14	Hand spayer solo	1	25 Pebr	2020	Hotel	330,000
15	Tutup gelas	5	25 Pebr	2020	Hotel	18,240
16	Sendok	1	25 Pebr	2020	Hotel	7,400
17	Sprey	15	25 Pebr	2020	Hotel	5,436,360
18	Tempat tisue	1	25 Pebr	2020	IKM Sepang	12,000
19	Palu	1	07 Maret	2020	IKM Sepang	65,000
20	Betel	1	07 Maret	2020	IKM Sepang	35,000
21	Wanli/Pemb.Smen	1	07 Maret	2020	IKM Sepang	40,000
22	Obeng Kembang	1	07 Maret	2020	Hotel	20,000
23	Ember penyiram	1	12 Maret	2020	Hotel	60,000
24	Galon Air	1	14 Maret	2020	Hotel	50,000
25	Tong Air Granlux	1	16 Maret	2020	IKM Sepang	1,050,000
26	Arco	1	16 Maert	2020	IKM Sepang	550,000
27	Gagang Telpon	1	22 Maret	2020	Hotel	240,000
28	Shower	2	07 Maret	2020	Hotel	170,383
29	Shower	1	07 Maret	2020	Hotel	80,000
30	Ember	1	16 Maret	2020	Hotel	25,000
31	Tempat Air Arizona	1	23 Maret	2020	Hotel	210,000
32	Beli tempat cuci tangan	1	13 April	2020	IKM Sepang	70,000
33	Pisau dapur	1	08 Mei	2020	Hotel	30,000
34	Kasur	2	08 Mei	2020	IKM Sepang	600,000
35	Karpet	1	08 Mei	2020	IKM Sepang	942,617
36	Beli Ragum	1	05 Juni	2020	IKM Sepang	350,000
37	Kereta dorong	1	22 Jni	2020	IKM Sepang	570,000
38	Selang kompresor	1	29 Juni	2020	IKM Sepang	500,000
39	Ragum	1	29 Juni	2020	IKM Sepang	800,000

40	Beli bantal	2	07 Juli	2020	IKM Sepang	70,000
41	Beli Tilam	1	07 Juli	2020	IKM Sepang	200,000
42	Beli Tilam	1	07 Juli	2020	IKM Sepang	130,000
43	Alat pengukur kayu	1	07 Juli	2020	IKM Sepang	220,000
44	Teko listrik	10	08 Juli	2020	Hotel	1,200,000
45	Dispenser Arisa	10	08 Juli	2020	Hotel	1,050,000
46	Contrakter	1	28 Juli	2020	IKM Sepang	575,000
47	Contrakter LC	1	28 Juli	2020	IKM Sepang	530,000
48	Contrakter LC	4	28 Juli	2020	IKM Sepang	1,192,000
49	Rice Coccer Philip	1	01 Agt	2020	Hotel	628,000
50	Selimut Plamingo	10	19 Agt	2020	Hotel	2,000,000
51	Meja tamu	3	28 Agt	2020	Hotel	1,500,000
52	Meja kerja	1	28 Agt	2020	IKM Sepang	700,000
53	Kursi Tamu	1 set	28 Agt	2020	IKM Sepang	1,000,000
54	Beli busa 3 lbr	3	10 Oktober	2020	IKM Sepang	405,000
55	Bantal	50	10 Oktober	2020	Hotel	5,000,000
56	Selimut tebal	20	!0 Oktober	2020	Hotel	4,600,000
57	Kain imitasi	12 m	10 Oktober	2020	IKM Sepang	360,000
58	Sitmat manual	1	10 Oktober	2020	IKM Sepang	125,000
59	Tong Air	2	21 Oktober	2020	IKM Sepang	340,000
60	Gorden	5	7 Oktober	2020	Hotel	1,440,000
61	Selimut	6	Maret	2021	Hotel	900,000
62	Bantal	6	Maret	2021	Hotel	300,000
63	Tabung Gas ELPIJI	1	Maret	2021	IKM Sepang	210,000
64	Kompor Gas ELPIJI	1	Maret	2021	IKM Sepang	350,000
65	Gelas ukur minyak	1	April	2021	Pangkalan BBM	75,000
66	Sprei	10	April	2021	Hotel	1,971,500
67	CCTV	10	April	2021	Hotel	2,820,000
68	CCTV	10	April	2021	Hotel	1,200,000
69	Pasta Air Minyak	10	April	2021	Hotel	790,000
70	Teng minyak 35 liter	7	Mei	2021	Pangkalan BBM	120,000
71	Timing tokai	7	Mei	2021	Pangkalan BBM	400,000
72	Bunga dekorasi	15	Mei	2021	Hotel	1,454,000
73	Teko	25	Mei	2021	Hotel	186,000
74	Mata spidel/mata propil	22	Juni	2021	IKM Sepang	2,100,000
75	Alat untuk molding	7	Juni	2021	IKM Sepang	3,000,000
76	Kasur lipat	11	Juni	2021	Hotel	166,700
77	Sarung meja	21	Juni	2021	Hotel	1,000,000
78	Taplak meja loby	21	Juni	2021	Hotel	240,000
79	Meja Meeting Room	2	Juli	2021	Hotel	4,000,000
80	Meja Meeting Room	7	Juli	2021	Hotel	1,000,000
81	Handuk	12	Juli	2021	Hotel	1,680,000
82	Alat perlengkapan dapur	10	Juli	2021	IKM Sepang	1,200,000
83	Iventaris Hotel	3	Agustus	2021	Hotel	2,079,000

84	Beli Selimut	13	Okt	2021	Hotel	193,200
85	Sprker dan Cash	4	Des	2021	Hotel	1,250,000
86	Gunting taman	1	8 Maret	2022	Hotel	150,000
87	Nomorator bill	1	28 Maret	2022	Hotel	255,000
88	Mata panel	1	30 April	2022	IKM Sepang	300,000
89	Kain lap kaca	1	21 Mei	2022	Hotel	65,000
90	Beli sprey	8	8 Juni	2022	Hotel	2,007,500
91	Tiang Bendera	1	10 Agustus	2022	Hotel	440,000
92	Sprey	30	13 Agustus	2022	Hotel	9,000,000
93	Seragam Karyawan Hotel	5	20 Oktober	2022	Hotel	1,275,000
94	Handuk	50	23 Oktober	2022	Hotel	3,536,000
95	Sprey	10	14 November	2022	Hotel	3,098,000
96	Mesin cuci	1	31 Desember	2022	Hotel	5,165,000
97	Selimut	10	27 Februari	2023	Hotel	3,000,000
98	Spring Bed ukuran besar	1	30 Maret	2023	Hotel	4,500,000
99	Bunga hidup dan tempatnya	10	8-Apr	2023	Hotel	1,000,000
100	Spring Bed ukuran besar	2	01 Agustus	2023	Hotel	7,800,000
101	Spiker U/komputer	1	01 Agustus	2023	Hotel	120,000
102	Mesin pompa air	1	05 Agustus	2023	Hotel	1,100,000
103	Mesin pompa air	1	08 Agustus	2023	IKM Sepang	570,000
104	Handuk	60	6-Sep	2023	Hotel	3,000,000
104	Selimut	15	6-Sep	2023	Hotel	4,000,000
106	Selimut	25	13-Sep	2023	Hotel	7,500,000
	JUMLAH					**125,853,900**

LAMPIRAN III

DAFTAR BARANG INVENTARIS
MESIN DAN KENDARAAN

Per 31 Desember 2023 ***LAMPIRAN III***

NO	NAMA BARANG	Vol/ Unit	PEMBELIAN TGL/BLN	TAHUN	DITEMPATKAN	HARGA
1	AC 1 PK	2	05 Pebr	2020	Hotel	8,600,000
2	AC 1 PK	3	22 Pebr	2020	Hotel	9,750,000
3	AC 2 PK	2	12 Pebr	2020	Hotel	12,500,000
4	Mesin pomp air	2	22 Maret	2020	IKM Sepang	1,300,000
5	Beli mesin moulding	1	06 Mei	2020	IKM Sepang	332,408,900
6	Mesin Amplas	1	19 Agustus	2020	IKM Sepang	2,500,000
7	Beli Dispenser BBM	2	9-Nov	2020	Pangkalan BBM	83,400,000
8	Tangki BBM	3	30 Oktober	2020	Pangkalan BBM	105,500,000
9	Ragum (alat perekat)	2	22Juni	2020	IKM Sepang	721,590
10	Pompa Air	1	10 Desember	2020	IKM Sepang	480,000
11	Mesin asah moulding + Angkutan	1	Januari	2021	IKM Sepang	22,476,400
12	Mesin Pompa	3	Maret	2021	Pangkalan BBM	4,300,000
13	Mesin pompa	1	17 Mei	2021	IKM Sepang	435,000
14	Mesin Gerinda	1	6 Juni	2021	IKM Sepang	450,000
15	Pompa Hitachi	1	30 April	2022	IKM Sepang	500,000
16	Mesin Cuci	1	23-Nov	2022	Hotel	5,928,000
	JUMLAH					**591,249,890**

LAMPIRAN IV

DAFTAR BARANG INVENTARIS

PERABOT KANTOR

Per 31 Desember 2023

LAMPIRAN IV

NO	NAMA BARANG	Vol/ Unit	PEMBELIAN TGL/BLN	TAHUN	DITEMPATKAN	HARGA
1	Meja FO	1	20 Des	2020	Hotel	6,000,000
2	Beli meja tamu	3	28 Agustus	2020	Hotel	1,500,000
3	Beli meja kerja	1	28 Agustus	2020	IKM Sepang	700,000
4	Beli kursi tamu 1set	1	28 Agustus	2020	IKM Sepang	1,000,000
5	Inventaris Manj.lama	-	-			32,490,000
	JUMLAH					**41,690,000**

LAMPIRAN V

PRA OPERASIONAL PANGKALAN BBM

lampiran V

TANGGAL	URAIAN KEGIATAN	JUMLAH
11 Juni 2020	Kontrak Kerja dengan Konsultan UKL-UPL	50,000,000
01 Septemer 2020	Ijin Mendirikan Pangkalan BBM	13,311,100
13 Oktober 2020	Pembangunan tahap I Pangkalan BBM	200,000,000
01 Juli 2021	Pembangunan tahap II Pangkalan BBM	144,063,500
16 Pebruari 2021	Transfer uang ke Mukhtarullah	16,200,000
19 Pebruari 2021	Pembayaran tahap III Pangkalan BBM	22,508,800
19 Pebruari 2021	Pembayaran penerangan	583,187
02 Maret 2021	Biaya pemasangan instalsi Tangki ke Dispenser	3,780,000
05 Marer 2021	Biaya pemasangan listrik pangkalan BBM	9,000,000
05 Maret 2021	Biaya rekayasa lalu lintas di lokasi pangkalan	2,000,000
06 Maret 2021	Biaya pemasangan listrik pangkalan BBM	1,000,000
09 Maret 2021	Beli bola lampu	298,000
12 Maret 2021	Pulsa listrik pangkalan BBM	102,500
16 Maret 2021	Pulsa listrik pangkalan BBM	52,500
19 Maret 2021	Biaya instalatir pipa ke Dispenser	4,500,000
20 Maret 2021	Biaya pulsa listrik	200,000
20 Maret 2021	Beli lem dan peralatan lainnya	100,000
20 Maret 2021	Beli gembok	50,000
20 Maret 2021	Sewa mesin pompa air	150,000
20 Maret 2021	Beli sambungan pipa	15,000
23 Maret 2021	Beli air untuk nguras tangki	160,000
23 Maret 2021	Beli siku 4 x 4	300,000
23 Maret 2021	Biaya instalatir pipa ke Dispenser	5,500,000
27 Maret 2021	Beli peralatan mesin	540,000
27 Maret 2021	Beli peralatan mesin pompa	2,143,000
27 Maret 2021	Beli peralatan mesin	155,600
27 Maret 2021	Sewa mesin pompa air	100,000
28 Maret 2021	Beli kawat las	70,000
29 Maret 2021	Beli balok palepek U/mesin	195,000
29 Maret 2021	Beli papan palepek	480,000
30 Maret 2021	Biaya instalasi	1,003,000
30 Maret 2021	Beli terminal listrik	900,000
31 Maret 2021	Beli bola lampu	95,000
31 Maret 2021	Upah membuat pengaman mesin	600,000
	JUMLAH	**480,156,187**

LAMPIRAN VI

PRA OPERASIONAL SENTRA IKM SEPANG

LAMPIRAN VII

TGL	URAIAN KEGIATAN	JUMLAH
16/03/2020	Sewa mobil bawa material	500,000
23/03/2020	Beli Pipa besi 4 batang	265,000
24/03/2020	Beli tali Kloron	150,000
24/03/2020	Beli karet ucus	25,000
25/03/2020	Sewa mobil bawa material	500,000
27/03/2020	Beli sok mesin pompa	20,000.00
27/03/2020	Beli sok mesin pompa	12,000.00
27/03/2020	Beli sok mesin pompa	5,000.00
27/03/2020	Beli sok mesin pompa	5,000.00
27/03/2020	Beli lem	20,000.00
27/03/2020	Beli isolatif	150,000.00
27/03/2020	Upah tukang bongkar pondasi	400,000.00
1/4/2020	Beli gembok	140,000
1/4/2020	Beli saringan air	25,000
1/4/2020	Beli paku papan	20,000
1/4/2020	Beli smen	1,110,000
1/4/2020	Beli pasir	250,000
04/04/2020	Bongkar alat mesin	550,000
04/04/2020	Beli sok kran	38,000
04/04/2020	Beli sok kran	35,000
04/04/2020	Beli smen gresik	600,000
09/04/2020	Beli kunci gembok	140,000
09/04/2020	Beli saringan air	174,639
09/04/2020	Beli paku papan	27,000
03/05/2020	Upah membuat kosen	390,000
03/05/2020	Upah renovasi gedung	5,000,000
03/05/2020	Upah pemasangan mata listrik	600,000
19/05/2020	Beli smen	240,000
19/05/2020	Beli sambungan pipa	10,000
19/05/2020	Beli sambungan pipa	10,000
19/05/2020	Beli Kran	15,000
19/05/2020	Beli siku2	25,000
19/05/2020	Sewa Exapator	7,100,000
16/07/2020	Beli pasir urug	2,000,000
29/07/2020	Beli paku	75,000
01/08/2020	Beli smen gresik 50 sak	3,000,000
02/08/2020	Beli smen gresik 30 sak	1,800,000
02/08/2020	Beli kawat (warmes)	3,000,000
02/08/2020	Beli bendrat	15,000
02/08/2020	Beli Ember cor	75,000
02/08/2020	Beli slang	227,002
02/08/2020	Beli batu koral	3,000,000
02/08/2020	Beli pasir	1,200,000
04/08/2020	Bayar upah tukang renovasi gudang	8,950,000
	JUMLAH	**41,893,641**

LAMPIRAN VII

PRA OPERASIONAL LISTRIK SENTRA IKM

LAMPIRAN VIII

TANGGAL	URAIAN KEGIATAN	JUMLAH (Rp)
12/01//2021	Transper Uang Tunai ke Toto Suharto	14,500,000
22/01/2021	Transfer Uang Tunai ke TRI BAYU SANTOSO (pembelian alat listrik)	10,000,000
28/01/2021	Transfer Uang Tunai ke TRI BAYU SANTOSO (pembelian alat listrik)	8,000,000
28/01/2021	Transfer Uang Tunai ke Mochammad Ramdhan (pembelian alat listrik)	2,000,000
29/01/2021	Transfer Uang Tunai ke TOTO SUHARTO (APRISAL)	10,000,000
19/02/2021	Transfer uang tunai ke Ginter Limin (Biaya pasang listrik)	26,358,650
	JUMLAH	**70,858,650**

PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM
KABUPATEN GUNUNG MAS
LAPORAN KEUANGAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA
31 DESEMBER 2023
DISERTAI
LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN

PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM
KABUPATEN GUNUNG MAS
LAPORAN KEUANGAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA 31 DESEMBER 2023

DAFTAR ISI

SURAT PERNYATAAN DIREKSI	
LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN	
LAPORAN NERACA	1
LAPORAN PERHITUNGAN LABA - RUGI	2
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS	3
LAPORAN ARUS KAS	4
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN	5 - 25

PEMERINTAH KABUPATEN GUNUNG MAS
PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM
KABUPATEN GUNUNG MAS
Jl. Singa Runjanz No. 72 ☎ (0537) 31260 Kuala Kurun
TIRTA DHARMA

SURAT PERNYATAAN DIREKSI TENTANG
TANGGUNG JAWAB ATAS LAPORAN KEUANGAN
PER 31 DESEMBER 2023
PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM KABUPATEN GUNUNG MAS

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama	:	Hendra Toendan, ST
Alamat Kantor	:	Jln. Singa Runjand No. 72 Kuala kurun
Telepon	:	(0537) 31260
Jabatan	:	Direktur

Untuk dan atas nama PDAM Kabupaten Gunung Mas menyatakan bahwa:

1. Bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan PDAM Kabupaten Gunung Mas;

2. Laporan keuangan PDAM Kabupaten Gunung Mas telah disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK ETAP);

3. a. Semua informasi dalam laporan keuangan PDAM Kabupaten Gunung Mas telah dimuat secara lengkap dan benar;

   b. Laporan Keuangan PDAM Kabupaten Gunung Mas tidak mengandung informasi atau fakta material yang tidak benar, dan tidak menghilangkan informasi atau fakta material;

   c. Semua dokumen transaksi, catatan keuangan dan pembukuan serta dokumen pendukung telah lengkap disusun dan disimpan oleh PDAM Kabupaten Gunung Mas sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku;

4. Bertanggung jawab atas sistem pengendalian internal, pencegahan dan penanggulangan kecurangan, serta kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang relevan bagi PDAM Kabupaten Gunung Mas.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.

Gunung Mas, 12 Februari 2024

10000 METERAI TEMPEL CB4D8ALX004877119

Nama : Hendra Toendan, ST
Jabatar : Direktur

KAP Trisnowati & Mariati

Kep. Men. Keu RI No : KEP-433/KM.6/2003

No : 00002/2.0587/AU.2/05/1794-1/1/II/2024 Jakarta, 12 Januari 2024

LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN

Kepada Yth.
Dewan Pengawas dan Direksi
Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM)
Kabupaten Gunung Mas

Di
Kalimantan Tengah

Opini

Kami telah mengaudit laporan keuangan Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kabupaten Gunung Mas ("Perusahaan"), yang terdiri dari neraca (laporan posisi keuangan) tanggal 31 Desember 2023, serta laporan laba rugi, laporan perubahan ekuitas, dan laporan arus kas untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, serta catatan atas laporan keuangan, termasuk ikhtisar kebijakan akuntansi signifikan.

Menurut opini kami, laporan keuangan terlampir menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan Perusahaan tanggal 31 Desember 2023, serta kinerja keuangan dan arus kasnya untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK - ETAP) di Indonesia.

Basis untuk Opini

Kami melaksanakan audit kami berdasarkan Standar Audit (SA) yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia. Tanggung jawab kami menurut standar tersebut diuraikan lebih lanjut dalam paragraf Tanggung Jawab Auditor Terhadap Audit atas Laporan Keuangan pada laporan kami. Kami independen terhadap Perusahaan sesuai dengan ketentuan etika yang relevan dengan audit kami atas laporan keuangan di Indonesia, dan kami telah memenuhi tanggung jawab etika lainnya sesuai dengan ketentuan tersebut. Kami yakin bahwa bukti audit yang telah kami peroleh adalah cukup dan tepat untuk menyediakan suatu basis bagi opini audit kami.

Hal Lain

Laporan keuangan Perusahaan tanggal 31 Desember 2022 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut diaudit oleh auditor independen lain yang menyatakan opini tanpa modifikasian atas laporan keuangan tersebut pada tanggal 13 Februari 2023.

Tanggung Jawab Manajemen dan Pihak yang Bertanggung Jawab atas Tata Kelola terhadap Laporan Keuangan

Manajemen bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan tersebut sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK - ETAP) di Indonesia, dan atas pengendalian internal yang dianggap perlu oleh manajemen untuk memungkinkan penyusunan laporan keuangan yang bebas dari kesalahan penyajian material, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan.

Dalam penyusunan laporan keuangan, manajemen bertanggung jawab untuk menilai kemampuan Perusahaan dalam mempertahankan kelangsungan usahanya,mengungkapkan, sesuai dengan kondisinya, hal-hal yang berkaitan dengan kelangsungan usaha, dan menggunakan basis akuntansi kelangsungan usaha, kecuali manajemen memiliki intensi untuk melikuidasi Perusahaan atau menghentikan operasi, atau tidak memiliki alternatif yang realistis selain melaksanakannya.

Pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola bertanggung jawab untuk mengawasi proses pelaporan keuangan Perusahaan.

Tanggung Jawab Auditor terhadap Audit atas Laporan Keuangan

Tujuan kami adalah untuk memeroleh keyakinan memadai tentang apakah laporan keuangan secara keseluruhan bebas dari kesalahan penyajian material, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan, dan untuk menerbitkan laporan auditor yang mencakup opini kami. Keyakinan memadai merupakan suatu tingkat keyakinan tinggi, namun bukan merupakan suatu jaminan bahwa audit yang dilaksanakan berdasarkan Standar Audit akan selalu mendeteksi kesalahan penyajian material ketika hal tersebut ada. Kesalahan penyajian dapat disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan dan dianggap material jika, baik secara individual maupun secara agregat, dapat diekspektasikan secara wajar akan memengaruhi keputusan ekonomi yang diambil oleh pengguna berdasarkan laporan keuangan tersebut.

Sebagai bagian dari suatu audit berdasarkan Standar Audit, kami menerapkan pertimbangan profesional dan mempertahankan skeptisisme profesional selama audit. Kami juga:

- Mengidentifikasi dan menilai risiko kesalahan penyajian material dalam laporan keuangan, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan, mendesain dan melaksanakan prosedur audit yang responsif terhadap risiko tersebut, serta memeroleh bukti audit yang cukup dan tepat untuk menyediakan basis bagi opini kami. Risiko tidak terdeteksinya kesalahan penyajian material yang disebabkan oleh kecurangan lebih tinggi dari yang disebabkan oleh kesalahan, karena kecurangan dapat melibatkan kolusi, pemalsuan, penghilangan secara sengaja, pernyataan salah, atau pengabaian pengendalian internal.
- Memeroleh suatu pemahaman tentang pengendalian internal yang relevan dengan audit untuk mendesain prosedur audit yang tepat sesuai dengan kondisinya, tetapi bukan untuk tujuan menyatakan opini atas keefektivitasan pengendalian internal Perusahaan.
- Mengevaluasi ketepatan kebijakan akuntansi yang digunakan serta kewajaran estimasi akuntansi dan pengungkapan terkait yang dibuat oleh manajemen.
- Menyimpulkan ketepatan penggunaan basis akuntansi kelangsungan usaha oleh manajemen dan, berdasarkan bukti audit yang diperoleh, apakah terdapat suatu ketidakpastian material yang terkait dengan peristiwa atau kondisi yang dapat menyebabkan keraguan signifikan atas kemampuan Perusahaan untuk mempertahankan kelangsungan usahanya. Ketika kami menyimpulkan bahwa

terdapat suatu ketidakpastian material, kami diharuskan untuk menarik perhatian dalam laporan auditor kami ke pengungkapan terkait dalam laporan keuangan atau, jika pengungkapan tersebut tidak memadai, harus menentukan apakah perlu untuk memodifikasi opini kami. Kesimpulan kami didasarkan pada bukti audit yang diperoleh hingga tanggal laporan auditor kami. Namun, peristiwa atau kondisi masa depan dapat menyebabkan Perusahaan tidak dapat mempertahankan kelangsungan usaha.

- Mengevaluasi penyajian, struktur, dan isi laporan keuangan secara keseluruhan, termasuk pengungkapannya, dan apakah laporan keuangan mencerminkan transaksi dan peristiwa yang mendasarinya dengan suatu cara yang mencapai penyajian wajar.

Kami mengomunikasikan kepada pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola mengenai, antara lain, ruang lingkup dan saat yang direncanakan atas audit, serta temuan audit signifikan, termasuk setiap defisiensi signifikan dalam pengendalian internal yang teridentifikasi oleh kami selama audit.

KANTOR AKUNTAN PUBLIK
TRISNOWATI & MARIATI

Ariesta Sunaryanto, SE., Ak., CA, CPA
NRAP : AP.1794
Izin KAP : KEP.433/KM.6/2003

PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM (PDAM)
KABUPATEN GUNUNG MAS
N E R A C A
Per 31 Desember 2023
(Disajikan Dalam Rupiah)

	Catatan	2023	2022
ASET			
Aset Lancar			
Kas dan setara kas	II,b, III,1	176.948.921	123.209.884
Piutang air - bersih	II,c,III,2	2.720.438.956	2.495.294.462
Piutang lain-lain	III,4	137.288.050	158.673.798
Persediaan	II,d,III,5	284.683.300	226.249.900
Uang muka		-	
Jumlah Aset Lancar		**3.319.359.226**	**3.003.428.044**
Aset Tidak Lancar			
Aset tetap - bersih	II,e,III,6	27.905.436.251	22.817.132.110
(Setelah dikurangi akumulasi penyusutan sebesar Rp.68.155.340.833,00 Tahun 2023 dan Rp.63.774.687.134,00 tahun 2022)			
Aset tidak berwujud	II,f,III,7	24.185.791	58.369.685
Jumlah Aset Tidak Lancar		**27.929.622.042**	**22.875.501.795**
JUMLAH ASET		**31.248.981.269**	**25.878.929.839**
KEWAJIBAN dan EKUITAS			
KEWAJIBAN			
Kewajiban Jangka Pendek			
Utang usaha	III,8	681.600.000	272.750.000
Utang lain-lain	III,9	75.076.047	275.168.492
Biaya yang masih harus dibayar		-	
Utang pajak		-	
Jumlah Kewajiban Jangka Pendek		**756.676.047**	**547.918.492**
EKUITAS			
Penyertaan modal Pemda	II,j,III,10,11	101.324.380.327	46.562.038.986
Penyertaan modal Pemprov yang belum - ditetapkan statusnya	III,13	1.234.927.000	1.234.927.000
Penyertaan modal PP yang belum - ditetapkan statusnya	III,13	1.528.000.000	42.387.526.000
Hibah	II,I,III,12	3.767.786.900	8.234.958.900
Saldo Laba (Rugi) Ditahan	III,14	(73.088.439.539)	(67.278.164.250)
Saldo Laba (Rugi) Tahun Berjalan	III,14	(4.274.349.466)	(5.810.275.289)
JUMLAH EKUITAS		**30.492.305.222**	**25.331.011.347**
JUMLAH KEWAJIBAN dan EKUITAS		**31.248.981.269**	**25.878.929.839**

Lihat Catatan atas Laporan Keuangan
merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan

PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM (PDAM)
KABUPATEN GUNUNG MAS
LAPORAN LABA - RUGI
Untuk Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2023
(Disajikan Dalam Rupiah)

	Catatan	2023	2022
PENJUALAN BERSIH			
Penjualan	II,k,III,15	9.964.795.124	9.735.558.647
LABA KOTOR		**9.964.795.124**	**9.735.558.647**
BEBAN USAHA			
Beban usaha	II,l,III,16,17	(9.824.306.996)	(10.235.080.044)
Beban penyusutan	II,l,III,16,17	(4.414.837.594)	(5.499.798.623)
Jumlah Beban Usaha		**(14.239.144.590)**	**(15.734.878.667)**
LABA (RUGI) USAHA		**(4.274.349.466)**	**(5.999.320.020)**
PENDAPATAN (BEBAN) LAIN-LAIN			
Pendapatan lain-lain	II,k,III,15	-	189.044.731
Beban lain-lain		-	-
Jumlah Pendapatan (Beban) Lain-lain		**-**	**189.044.731**
LABA (RUGI) USAHA SEBELUM PAJAK		**(4.274.349.466)**	**(5.810.275.289)**
BEBAN PAJAK PENGHASILAN			
Taksiran pajak penghasilan badan		-	-
LABA (RUGI) BERSIH TAHUN BERJALAN		**(4.274.349.466)**	**(5.810.275.289)**

Lihat Catatan atas Laporan Keuangan
merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan

PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM (PDAM)
KABUPATEN GUNUNG MAS
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
Untuk Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2023
(Disajikan Dalam Rupiah)

	Penyertaan Modal Pemda	Penyertaan Modal Pemda Yang Belum Ditetapkan Statusnya	Penyertaan Modal Pemerintah Pusat Yang Belum Ditetapkan Statusnya	Hibah	Laba (Rugi) Ditahan	Jumlah Ekuitas
Saldo 1 Januari 2022	**46.562.038.986**	**1.234.927.000**	**42.387.526.000**	**8.234.958.900**	**(67.278.164.250)**	**31.141.286.636**
Rugi bersih tahun berjalan	-	-	-	-	(5.810.275.289)	**(5.810.275.289)**
Saldo 31 Desember 2022	**46.562.038.986**	**1.234.927.000**	**42.387.526.000**	**8.234.958.900**	**(73.088.439.539)**	**25.331.011.347**
Tambahan modal	54.762.341.341	-	-	-	-	**54.762.341.341**
Penetapan Status Aset			(40.859.526.000)	(4.467.172.000)		**(45.326.698.000)**
Rugi bersih tahun berjalan	-	-	-	-	(4.274.349.466)	**(4.274.349.466)**
Saldo 31 Desember 2023	**101.324.380.327**	**1.234.927.000**	**1.528.000.000**	**3.767.786.900**	**(77.362.789.005)**	**30.492.305.222**

Lihat Catatan atas Laporan Keuangan
merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan

PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM (PDAM)
KABUPATEN GUNUNG MAS
LAPORAN ARUS KAS
Untuk Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2023
(Disajikan Dalam Rupiah)

	2023	2022
ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI		
Laba (rugi) bersih tahun berjalan	(4.274.349.466)	(5.810.275.289)
Penyesuaian atas laba bersih:		
Penyusutan aset tetap	4.414.837.594	5.070.019.535
Penyisihan piutang		
(Pemulihan) piutang	91.013.909	(183.471.139)
Perubahan dalam aset dan kewajiban:		
(Kenaikan) / penurunan dalam asset		
Piutang air	(316.158.402)	235.646.955
Piutang lain-lain	21.385.748	98.023.093
Persediaan	(58.433.400)	51.445.070
Uang muka dan biaya dibayar dimuka		
Kenaikan / (Penurunan) dalam Kewajiban		
Utang usaha	408.850.000	272.750.000
Utang lain-lain	(200.092.445)	275.168.492
Biaya yang masih harus dibayar		
Utang pajak		
Arus kas bersih diperoleh dari (digunakan untuk) aktivitas operasi	**87.053.537**	**9.306.717**
ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI		
Pembelian aset tetap	(9.468.957.841)	(122.986.160)
Pembelian aset tak berwujud	-	(32.050.213)
Arus kas bersih diperoleh dari (digunakan untuk) aktivitas investasi	**(9.468.957.841)**	**(155.036.373)**
ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN		
Hibah	(4.467.172.000)	-
Penyertaan Modal Pemerintah Pusat Yang Belum Ditetapkan Statusnya	(40.859.526.000)	-
Penyertaan modal Pemda	54.762.341.341	-
Arus kas bersih diperoleh dari (digunakan untuk) aktivitas pendanaan	**9.435.643.341**	**-**
KENAIKAN (PENURUNAN) BERSIH KAS DAN SETARA KAS	**53.739.037**	**(145.729.656)**
KAS DAN SETARA KAS AWAL TAHUN	**123.209.884**	**268.939.540**
KAS DAN SETARA KAS AKHIR TAHUN	**176.948.921**	**123.209.884**

Lihat Catatan atas Laporan Keuangan
merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan

PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM (PDAM)
KABUPATEN GUNUNG MAS
Catatan Atas Laporan Keuangan
Untuk Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2023
(Disajikan Dalam Rupiah)

I. UMUM

a. Pendirian Perusahaan

Perusahaan didirikan berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Gunung Mas Nomor: 2 Tahun 2007 tanggal 12 April 2007 dengan nama Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Gunung Mas. Sebagaimana telah diubah berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Gunung Mas Nomor: 5 Tahun 2017 tanggal 03 April 2017 tentang Perubahan Peraturan Daerah Kabupaten Gunung Mas Nomor: 2 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Perusahaan Daerah Air Minum.

Perusahaan bergerak di bidang industri pengolahan air bersih untuk memenuhi kebutuhan air bersih bagi masyarakat Kabupaten Gunung Mas, baik masyarakat di ibukota kabupaten maupun di kecamatan dan pedesaan.

b. Pengurus Perusahaan

Susunan Dewan Pengawas dan Direksi PDAM Kabupaten Gunung Mas tahun buku 2023 dan 2022 adalah sebagai berikut:

	Tahun 2023	**Tahun 2022**
Dewan Pengawas:		
- Ketua	: Yantrio Aulia,M.Ec.Dev	: Yantrio Aulia,M.Ec.Dev
- Sekretaris	: Baryen,ST.,M.Eng	: Baryen,ST.,M.Eng
- Anggota	: Gurnady, SE.,MM	: Gurnady, SE.,MM
Direksi:		
- Direktur	: Hendra Toendan, ST	: Guntur J. Ruben, S.Sos

II. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI

a. Dasar Penyajian Laporan Keuangan

Perusahaan menetapkan SAK-ETAP sebagai basis penyusunan laporan keuangan dan penentuan kebijakan akutansi penting yang diterapkan untuk mengakui dan mengukur transaksi dan peristiwa yang relevan dengan Perusahaan.

Laporan keuangan Perusahaan terdiri atas neraca, laporan laba rugi, laporan perubahan ekuitas, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan.

Laporan keuangan disusun berdasarkan basis kesinambungan usaha dan biaya historis. Laporan keuangan juga disusun berdasarkan basis akrual, kecuali laporan arus kas yang disusun berdasarkan basis kas.

Laporan arus kas menyajikan informasi perubahan historis atas kas dan setara kas entitas, yang menunjukkan secara terpisah perubahan yang terjadi selama satu periode dari aktivitas operasi, investasi dan pendanaan. Cerukan bank pada umumnya termasuk aktivitas pendanaan sejenis dengan pinjaman. Namun, jika cerukan bank dapat ditarik sewaktu-waktu dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pengelolaan kas entitas, maka cerukan tersebut termasuk komponen kas dan setara kas. Entitas melaporkan arus kas aktivitas operasi dengan menggunakan metode tidak langsung.

II. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI (Lanjutan)

b. Kas dan Setara Kas

Kas dan setara kas di laporan posisi keuangan terdiri dari kas di tangan, kas dan bank, dan deposito jangka pendek yang sangat likuid dengan jangka waktu tiga bulan atau kurang, yang siap dikonversi menjadi uang tunai dalam jumlah yang diketahui dan memiliki risiko perubahan nilai yang tidak signifikan. Deposito berjangka yang disajikan adalah yang statusnya perpanjangan otomatis *(roll over)* serta penempatan jangka pendek lainnya yang akan jatuh tempo dalam 3 (tiga) bulan atau kurang terhitung sejak tanggal penempatan dan tidak dijadikan jaminan atas kewajiban dan pinjaman lainnya oleh PDAM Kabupaten Gunung Mas.

c. Piutang

Piutang usaha diperoleh dari hasil penjualan air. Pencatatan sebagai piutang usaha dilakukan saat rekening tagihan diterbitkan. Jumlah piutang usaha disajikan sebesar nilai yang dapat direalisasikan yaitu jumlah piutang usaha dikurangi penyisihan atas piutang yang mungkin tidak tertagih. Untuk menentukan besarnya jumlah penyisihan piutang tidak tertagih yaitu berdasarkan pengalaman dan data historis selama 3 tahun terakhir. Perusahaan menetapkan estimasi kerugian piutang tak tertagih berdasarkan penggolangan tarif sebagai berikut :

- Kelompok Sosial Khusus : 8,69%
- Kelompok Sosial Umum : 0,00%
- Kelompok Rumah Tangga A : 48,10%
- Kelompok Rumah Tangga B : 24,47%
- Kelompok Rumah Tangga C : 17,19%
- Kelompok Inst. Pemerintah/TNI/POLRI : 22,97%
- Kelompok Niaga Kecil : 42,68%
- Kelompok Niaga Besar : 16,67%
- Kelompok Industri Kecil : 0,00%
- Kelompok Industri Besar : 0,00%
- Kelompok Pelabuhan : 0,00%

Apabila terdapat penerimaan dari piutang yang sudah dihapus bukukan, penerimaan tersebut dicatat sebagai “Pendapat Lain-lain”.

d. Persediaan

Persediaan disajikan dengan nilai mana yang lebih rendah antara biaya perolehan dan harga jual dikurangi biaya untuk menjual. Pembebanan atas pemakaian persediaan dicatat dengan menggunakan metode *First In First Out* (FIFO). Pencatatan persediaan bahan operasi dilakukan dengan *phsycal inventory method* , sedangkan persediaan bahan instalasi menggunakan *perpetual inventory method.*

e. Aset Tetap dan Penyusutan

Aset tetap disajikan sebesar biaya perolehan setelah dikurangi biaya akumulasi penyusutan dan penurunan nilai. Biaya perolehan meliputi harga aset tetap termasuk biaya-biaya dapat diatribusikan langsung untuk membawa aset ke lokasi dan kondisi yang siap digunakan serta estimasi awal biaya pembongkaran aset, biaya pemindahan aset dan biaya restorasi relokasi. Pajak-pajak yang dapat dikreditkan dan semua diskon dikurangkan dalam menentukan biaya perolehan. Revaluasi aset tetap tidak diperkenankan, kecuali dilakukan berdasarkan ketentuan pemerintah. Penyusutan dimulai pada saat aset tetap tersedia untuk digunakan dan berhenti ketika aset tetap dihapuskan. Peyusutan tidak berhenti ketika aset tidak digunakan. Penyusutan diakui sebagai beban dalam laporan laba rugi, kecuali memenuhi syarat untuk dikapitalisasi sebagai perolehan suatu aset berdasarkan SAK-ETAP.

II. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI (Lanjutan)

e. Aset Tetap dan Penyusutan (lanjutan)

Aset tetap disajikan sebesar biaya perolehan setelah dikurangi akumulasi penyusutan dan penurunan nilai. Tarif penyusutan aset tetap kecuali dihitung dengan menggunakan metode garis lurus (*straight-line method*), kecuali bangunan berdasarkan taksiran masa manfaat ekonomis aset tetap dengan rincian sebagai berikut :

Jenis Aset Tetap	Masa Manfaat	Tarif Penyusutan
• Tanah	-	-
• Instalasi Sumber Air	20 Tahun	5%
• Instalasi Pompa	20 Tahun	5%
• Instalasi Pengolahan	20 Tahun	5%
• Instalasi Transmisi & Distribusi	20 Tahun	5%
• Bangunan Gedung	20 Tahun	5%
• Peralatan dan Perlengkapan	4 Tahun	25%
• Kendaraan dan Alat Angkutan	4 Tahun	25%
• Inventaris Perabot Kantor	4 Tahun	25%

Pengeluaran untuk pemeliharaan dan perbaikan dibebankan pada laporan laba rugi pada saat terjadinya. Pengeluaran yang mempepanjang masa manfaat atau memberi manfaat ekonomis dimasa yang akan datang dalam bentuk peningkatan kapasitas, mutu produksi atau peningkatan kapasitas, mutu produksi atau peningkatan standar kinerja dikapitalisasi. Aset tetap yang sudah tidak digunakan lagi atau dijual dikeluarkan dari kelompok aset tetap, dan laba atau rugi yang timbul dikreditkan atau dibebankan pada operasi tahun berjalan.

f. Aset Tidak Berwujud

Aset tidak terwujud dinyatakan sebesar biaya perolehan dan diamortisasi dengan metode garis lurus dengan taksiran masa manfaat aset yang bersangkutan sebagai berikut :

Jenis Aset	Masa Manfaat	Tarif Penyusutan
• Perangkat Lunak	5 Tahun	20%

g. Kewajiban Lancar

Kewajiban lancar atau disebut juga kewajiban jangka pendek merupakan kewajiban yang akan dibayar dalam jangka waktu satu tahun dan terdiri dari utang usaha, utang non usaha, biaya yang masih harus dibayar, utang pajak, utang jangka panjang yang akan jatuh tempo, dan kewajiban jangka pendek lainnya yang segera akan dibayar.

h. Kewajiban Jangka Panjang

Kewajiban jangka panjang merupakan kewajiban yang akan dibayar dalam jangka waktu pembayaran lebih dari satu tahun. Kewajiban jangka panjang meliputi pokok pinjaman dan bunga masa tenggang.

Bagian utang jangka panjang yang akan jatuh tempo dalam waktu satu tahun mendatang dan yang telah jatuh tempo disajikan sebagai kewajiban jangka pendek.

II. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI (Lanjutan)

i. Modal Hibah

Penerimaan barang-barang, peralatan dan dana yang sifatnya berupa sumbangan dan tidak mempunyai keterikatan apapun, dibukukan sebagai Modal Hibah. Apabila barang dan peralatan yang diterima tidak lengkapi dengan harga, maka penilaiannya berdasarkan harga barang dan peralatan sejenis jika dibeli sendiri.

j. Modal Pemerintah Daerah

Modal Pemerintah Daerah Merupakan penyertaan modal Pemerintah Kabupaten Gunung Mas dan Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah baik berbentuk setoran tunai maupun berupa aset tetap.

k. Pengakuan Pendapatan

Seluruh pendapatan, baik pendapan usaha maupun non usaha diakui pada saat timbulnya transaksi dan atau prestasi dinikmati, yaitu :

1. Pendapatan Penjualan air diakui, dicatat dan dilaporkan tiap-tiap bulan berdasarkan rekening air yang diterbitkan pada bulan yang bersangkutan, walaupun penerimaan uang baru terjadi kemudian, atau pada saat penerimaan uang untuk transaksi penjualan tunai.
2. Pendapatan dari sambungan baru dan pendapatan non air lainnya diakui dan dicatat seluruhnya sebagai pendapatan tahun berjalan.
3. Penerimaan Dana Meter dari Pelanggan yang dimaksudkan untuk pemeliharaan diakui sebagai pendapatan.

l. Pengakuan Biaya

Biaya diakui, dicatat dan dilaporkan dalam periode terjadinya transaksi yang disebut dengan *method accrual* dengan penggolongan berikut :

1. Pembebanan biaya-biaya yang bersifat peiodik seperti gaji, listrik, sewa, asuransi dan sebagainya harus dikaitkan dengan periode dimana biaya tersebut menjadi beban, walaupun pembayarannya belum dilakukan ataupun telah dibayar dimuka.
2. Biaya Investasi dibebankan dalam jangka waktu yang diperhitungkan atas masa manfaat pengeluaran-pengeluaran tersebut.

III. PENJELASAN POS NERACA DAN LAPORAN LABA RUGI

1. Kas dan setara kas

Kas dan setara kas per 31 Desember 2023 dan 2022 adalah saldo kas dan giro bank rupiah yang terinci sebagai berikut :

	31 Desember 2023 (Rp)	31 Desember 2022 (Rp)
- Kas Besar	48.436.542	36.200.761
- Kas Kecil Unit IKK Tewah	720.000	-
- Kas Kecil Unit IKK Tumbang Miri	98.000	-
- Kas KecilUnit IKK Tumbang Talaken	135.000	-
- Kas Kecil Unit IKK Kampuri	300.000	-
- Giro Bank Kalteng	106.701.478	87.009.123
- Giro Bank Mandiri	18.673.071	-
- Giro Bank BNI	1.884.830	-
Jumlah kas dan setara kas	**176.948.921**	**123.209.884**

2. Piutang Usaha

Piutang Usaha terdiri atas piutang penjualan air dan piutang non air sebagai berkut:

	31 Desember 2023 (Rp)	31 Desember 2022 (Rp)
- Piutang rekening air	4.028.564.498	3.712.406.096
- Piutang non air	14.225.000	14.225.000
- Penyisihan piutang	(1.322.350.542)	(1.231.336.634)
Jumlah piutang usaha - Bersih	**2.720.438.956**	**2.495.294.462**

a. Piutang Rekening air

Klasifikasi piutang rekening berdasarkan kelompok pelanggan sebagai berikut:

	31 Desember 2023 (Rp)	31 Desember 2022 (Rp)
Pelanggan umum:		
- Kelompok Sosial Khusus	-	-
- Kelompok Sosial Umum	14.634.039	9.903.933
- Kelompok Rumah Tangga A	1.396.841.706	1.342.568.341
- Kelompok Rumah Tangga B	2.214.133.292	1.984.894.912
- Kelompok Rumah Tangga C	86.650.106	63.595.341
- Kelompok Inst. Pemerintah/TNI/POLRI	174.206.670	169.304.884
- Kelompok Niaga Kecil	116.142.635	116.409.715
- Kelompok Niaga Besar	25.956.050	25.728.970
Jumlah piutang rekening air	**4.028.564.498**	**3.712.406.096**

III. PENJELASAN POS NERACA DAN LAPORAN LABA RUGI (Lanjutan)

2. Piutang Usaha (Lanjutan)

b. Piutang Rekening Non Air

Piutang Non Air per 31 Desember 2023 dan 2022 masing masing sebesar Rp14.225.000,00 dan Rp14.225.000,00 adalah piutang sambungan baru dengan perincian sebagai berikut :

	31 Desember 2023 (Rp)	31 Desember 2022 (Rp)
- Piutang Rek Non Air Tahun Lalu	14.225.000	14.225.000
Jumlah piutang rekening air	**14.225.000**	**14.225.000**

3. Penyisihan Piutang Usaha

Ikhtisar akumulasi penyisihan piutang usaha sebagai berikut :

	31 Desember 2023 (Rp)	31 Desember 2022 (Rp)
Saldo Awal	(1.231.336.634)	(1.092.073.400)
Kurang : Penghapusan piutang	-	-
Tambah : Penyisihan tahun berjalan	(91.013.909)	-
Saldo Akhir	**(1.322.350.542)**	**(1.231.336.634)**

4. Piutang Lain-lain

Piutang lain-lain per 31 Desember 2023 dan 2022 merupakan piutang pegawai atas PPh 21, iuran dana pensiun, dan iuran astek beban pegawai yang terinci sebagai berikut :

	31 Desember 2023 (Rp)	31 Desember 2022 (Rp)
- PPh pasal 21	-	26.751.548
- Piutang Pegawai	137.288.050	126.083.550
- Iuran asuransi	-	5.838.700
Jumlah piutang lain-lain	**137.288.050**	**158.673.798**

5. Persediaan

Persediaan per 31 Desember 2023 dan 2022 adalah persediaan bahan kimia, BBM dan bahan instalasi dengan rincian sebagai berikut :

	31 Desember 2023 (Rp)	31 Desember 2022 (Rp)
- Persediaan Bahan Kimia		
Tawas	140.125.200	83.232.400
Kaporit	33.792.000	31.506.000
- Persediaan BBM		
Solar	1.630.300	2.847.000
- Persediaan Bahan Instalasi	85.579.000	93.679.500
- Persediaan ATK & Perlengkapan Kantor	23.556.800	14.985.000
Jumlah persediaan	**284.683.300**	**226.249.900**

III. PENJELASAN POS NERACA DAN LAPORAN LABA RUGI (Lanjutan)

6. Aset Tetap

Nilai Historis, Akumulasi Penyusutan, Akumulasi Penurunan Nilai, Nilai Buku, dan perubahan Aset Tetap selama periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2023 dan 2022 terinci sebagai berikut :

a. Tahun 2023

Jenis Aset Tetap	Saldo Per 1 Januari 2023	Mutasi		Saldo Per 31 Desember 2023
		Debet	Kredit	
Nilai Historis :				
1. Tanah	222.050.000	884.148.000	-	1.106.198.000
2. Instalasi Sumber Air	1.058.068.371	-	-	1.058.068.371
3. Instalasi Pompa	1.295.985.200	-	-	1.295.985.200
4. Instalasi Pengolahan	33.018.070.900	457.042.130	-	33.475.113.030
5. Instalasi Transmisi & Distribusi	46.891.800.480	7.189.440.032	-	54.081.240.512
6. Bangunan Gedung	1.823.157.683	578.710.198	-	2.401.867.881
7. Peralatan dan Perlengkapan	47.882.000	326.302.981	-	374.184.981
8. Kendaraan dan Alat Angkutan	1.492.325.010	-	-	1.492.325.010
9. Inventaris Perabot Kantor	742.479.600	33.314.500	-	775.794.100
Jumlah Nilai Historis	86.591.819.244	9.468.957.841	-	96.060.777.085
Akumulasi Penyusutan :				
1. Tanah	-	-	-	-
2. Instalasi Sumber Air	(866.999.883)	-	(36.099.358)	(903.099.241)
3. Instalasi Pompa	(810.501.401)	-	(1.671.098.859)	(2.481.600.260)
4. Instalasi Pengolahan	(22.705.808.059)	-	(2.040.043.289)	(24.745.851.348)
5. Instalasi Transmisi & Distribusi	(37.317.679.069)	-	(92.517.296)	(37.410.196.364)
6. Bangunan Gedung	(582.954.408)	-	(21.758.768)	(604.713.177)
7. Peralatan dan Perlengkapan	(21.344.211)	-	(368.685.447)	(390.029.658)
8. Kendaraan dan Alat Angkutan	(926.259.798)	-	(150.450.683)	(1.076.710.481)
9. Inventaris Perabot Kantor	(543.140.304)	-	-	(543.140.304)
Jumlah Akumulasi Penyusutan	(63.774.687.134)	-	(4.380.653.700)	(68.155.340.833)
Nilai Buku	22.817.132.110	9.468.957.841	(4.380.653.700)	27.905.436.251

b. Tahun 2022

Jenis Aset Tetap	Saldo Per 1 Januari 2022	Mutasi		Saldo Per 31 Desember 2022
		Debet	Kredit	
Nilai Historis :				
1. Tanah	222.050.000	-	-	222.050.000
2. Instalasi Sumber Air	1.058.068.371	-	-	1.058.068.371
3. Instalasi Pompa	1.281.485.200	14.500.000	-	1.295.985.200
4. Instalasi Pengolahan	33.018.070.900	-	-	33.018.070.900
5. Instalasi Transmisi & Distribusi	46.804.934.320	86.866.160	-	46.891.800.480
6. Bangunan Gedung	1.823.157.683	-	-	1.823.157.683
7. Peralatan dan Perlengkapan	46.582.000	1.300.000	-	47.882.000
8. Kendaraan dan Alat Angkutan	1.492.325.010	-	-	1.492.325.010
9. Inventaris Perabot Kantor	722.159.600	20.320.000	-	742.479.600
Jumlah Nilai Historis	86.468.833.084	122.986.160	-	86.591.819.244

III. PENJELASAN POS NERACA DAN LAPORAN LABA RUGI (Lanjutan)

6. Aset Tetap (lanjutan)

Jenis Aset Tetap	Saldo Per 1 Januari 2022	Mutasi		Saldo Per 31 Desember 2022
		Debet	Kredit	
Akumulasi Penyusutan :				
1. Tanah	-	-	-	-
2. Instalasi Sumber Air	(839.704.385)	-	(27.295.498)	(866.999.883)
3. Instalasi Pompa	(697.934.027)	-	(112.567.374)	(810.501.401)
4. Instalasi Pengolahan	(21.232.627.654)	-	(1.473.180.406)	(22.705.808.059)
5. Instalasi Transmisi & Distribusi	(34.079.864.120)	-	(3.237.814.949)	(37.317.679.069)
6. Bangunan Gedung	(517.680.552)	-	(65.273.857)	(582.954.408)
7. Peralatan dan Perlengkapan	(16.799.794)	-	(4.544.417)	(21.344.211)
8. Kendaraan dan Alat Angkutan	(845.407.625)	-	(80.852.173)	(926.259.798)
9. Inventaris Perabot Kantor	(474.649.442)	-	(68.490.862)	(543.140.304)
Jumlah Akumulasi Penyusutan	(58.704.667.599)	-	(5.070.019.535)	(63.774.687.134)
Nilai Buku	27.764.165.485	122.986.160	(5.070.019.535)	22.817.132.110

c. Penambahan Aset Tetap
periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2023 dan 2022, perusahaan menambah aset tetap masing-masing sebesar Rp 9.468.957.841,00 dan Rp.122.986.160,00 yang diperoleh melalui:

	31 Desember 2023 (Rp)	31 Desember 2022 (Rp)
- Penyerahan aset dari Pemerintah Pusat	-	-
- Penyerahan aset dari Pemprov Kalimantan Tengah	-	-
- Penyerahan aset dari Pemkab Gunung Mas	54.762.341.341	-
Jumlah penambahan non kas	54.762.341.341	-
- Internal Perusahaan (kas perusahaan)	-	122.986.160
- Penetapan Status Aset PPYBDS	(45.293.383.500)	
Jumlah penambahan aset tetap	9.468.957.841	122.986.160

7. Aset Tidak Berwujud

Nilai Historis, Akumulasi Amortisasi, Akumulasi Penurunan Nilai, Nilai Buku, dan perubahan Aset Tidak Berwujud selama periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2023 dan 2022 terinci sebagai berikut :

a. Tahun 2023

Uraian Aset Tidak Berwujud	Saldo Per 1 Januari 2023	Mutasi		Saldo Per 31 Desember 2023
		Debet	Kredit	
Nilai Historis :				
1. Program Komputerisasi / Software	193.209.650	-	-	193.209.650
2. Trade Mark / Merk Dagang	-	-	-	-
3. Goodwill	-	-	-	-
Jumlah Nilai Historis	193.209.650	-	-	193.209.650

III. PENJELASAN POS NERACA DAN LAPORAN LABA RUGI (Lanjutan)

7. Aset Tidak Berwujud (lanjutan)

Akumulasi Penyusutan :				
1. Program Komputerisasi / Software	(134.839.965)	-	(34.183.894)	(169.023.859)
2. Trade Mark / Merk Dagang				-
3. Goodwill	-		-	-
Jumlah Akumulasi Amortisasi	(134.839.965)	-	(34.183.894)	(169.023.859)
Akumulasi Penurunan Nilai :	-	-	-	-
Nilai Buku	58.369.685	-	(34.183.894)	24.185.791

b. Tahun 2022

Uraian Aset Tidak Berwujud	Saldo Per 1 Januari 2022	Mutasi		Saldo Per 31 Desember 2022
		Debet	Kredit	
Nilai Historis :				
1. Program Komputerisasi / Software	152.900.000	40.309.650	-	193.209.650
2. Trade Mark / Merk Dagang				
3. Goodwill		-	-	-
Jumlah Nilai Historis	152.900.000	40.309.650	-	193.209.650
Akumulasi Penyusutan :				
1. Program Komputerisasi / Software	(126.580.528)	-	(8.259.436)	(134.839.965)
2. Trade Mark / Merk Dagang				-
3. Goodwill	-	-	-	-
Jumlah Akumulasi Amortisasi	(126.580.528)	-	(8.259.436)	(134.839.965)
Akumulasi Penurunan Nilai :	-	-	-	-
Nilai Buku	26.319.472	40.309.650	(8.259.436)	58.369.685

8. Utang Usaha

Utang usaha per 31 Desember 2023 dan 2022 masing-masing sebesar Rp.681.600.000,00 dan Rp.272.750.000,00 dengan rincian sebagai berikut :

	31 Desember 2023 (Rp)	31 Desember 2022 (Rp)
* Saldo Utang Usaha pada Tahun Sebelumnya	272.750.000	-
* Penambahan Utang Usaha pada Periode Berjalan	3.698.373.028	4.399.494.430
* Pembayaran Utang Usaha pada Periode Berjalan	(3.289.523.028)	(4.126.744.430)
Jumlah utang usaha	**681.600.000**	**272.750.000**

CV. TELAGA BERSAMA	102.000.000
CV. EKA ANUGRAH INDAH	579.600.000
Jumlah	**681.600.000**

III. PENJELASAN POS NERACA DAN LAPORAN LABA RUGI (Lanjutan)

9. Utang Non Usaha

Utang non usaha per 31 Desember 2023 dan 2022 masing-masing sebesar Rp.75.076.047,00 dan Rp.275.168.492,00,00 dengan rincian sebagai berikut :

	31 Desember 2023 (Rp)	31 Desember 2022 (Rp)
* Saldo Utang Non Usaha pada Tahun Sebelumnya	275.168.492	-
* Penambahan Utang Non Usaha pada Periode Berjalan	6.092.262.558	6.230.699.219
* Pembayaran Utang Non Usaha pada Periode Berjalan	(6.292.355.003)	(5.955.530.727)
Jumlah utang non usaha	**75.076.047**	**275.168.492**
BPJS Kesehatan	12.150.998	
Gaji, Lembur dan Insentif	62.925.049	
Jumlah	**75.076.047**	

10. Penyertaan Pemerintah Kabupaten

Penyertaan Pemerintah Kabupaten per 31 Desember 2023 dan 2022 merupakan kekayaan Pemerintah Kabupaten yang dipisahkan berupa penyerahan aset oleh Pemerintah Kabupaten Gunung Mas, sbb :

	31 Desember 2023 (Rp)	31 Desember 2022 (Rp)
- Saldo awal periode	22.753.830.923	22.753.830.923
- Penambahan	54.762.341.341	-
Saldo akhir perode	**77.516.172.264**	**22.753.830.923**

Dengan perincian aset yang diserahkan olah pemerintah Kabupaten Gunung Mas, adalah sebagai berikut :

a.	Mobil Tangki Izusu Tahun 2007 (KH 9208 HU)	297.800.000
b.	Mobil Tangki Izusu Tahun 2007 (KH 9209 HU)	297.800.000
c.	Sarana Air Bersih di Desa Kampuri & Tewai baru	415.540.000
d.	Pipa distribusi, Sambungan Rumah, 4 Sumur Bor, dan 1 Pompa distribusi di PDAM Kuala kurun.	467.500.000
e.	Pipa distribusi dan sambungan rumah di Tumbang Talaken.	341.600.000
f.	Pipa distribusi dan sambungan rumah di Tumbang Miri.	341.250.000
g.	Pipa Distibusi dari depan kantor Dinas Pekerjaan umum sampai jalan sangkurun hulu.	180.000.000
h.	Pipa distribusi dan sambungan rumah di Tumbang Miri.	475.100.000
i.	Banguna Gedung Kantor PDAM di Kuala kurun.	498.197.123
j.	Tanah di jalan Ahmad Yani (IPA 2 Kuala kurun)	111.780.000
k.	Penambahan jaringan distribusi dan Sambungan Rumah untuk koneksi dengan Instalasi Pengolahan baru.	180.900.000
l.	Pembangunan sistem jaringan Pipa Distribusi IKK Kampuri	259.875.000
m.	Penambahan jaringan Pipa distribusi & SR di desa Kampuri.	323.250.000
n.	Penambahan Jaringan Pipa distribusi di Kuala kurun.	242.845.000

III. PENJELASAN POS NERACA DAN LAPORAN LABA RUGI (Lanjutan)

10. Penyertaan Pemerintah Kabupaten (Lanjutan)

o.	Pembangunan sarana air bersih di tumbang talaken.	242.445.200
p.	Perningkatan sarana & Prasana air bersih di Tbg. Talaken	93.944.000
q.	Perningkatan sarana & Prasana air bersih di Kampuri	214.617.000
r.	Perningkatan sarana & Prasana air bersih di Kuala kurun	1.956.616.000
s.	Bangunan Gedung / Tempat Kerja Lainnya Permanen / Bangunan IPA 2 PDAM Kuala kurun	115.004.000
t.	Bangunan Pelengkap Air bersih lain - lain/Sarana & Prasarana Air Bersih di Kuala kurun	914.932.800
u.	Bangunan pembuangan Air kotor lain-lain/Drainase pembuangan limbah SPAM PDAM Tumbang talaken	213.520.200
v.	Pipa distribusi & sambungan rumah (SR) di Tumbang miri Kecamatan Kahayan Hulu Utara	242.657.700
w.	Pipa distribusi & sambungan rumah (SR) di Sepang simin Kecamatan Sepang	423.881.900
x.	Jaringan Sambungan Ke Rumah Kapasitas Sedang/Sarana dan Prasarana Air Bersih di Sepang Simin	635.500.000
y	Pengembangan Jaringan Pipa ke Arah Desa Dandang	1.205.936.000
z	Pembangunan Sarana dan Prasarana Air Bersih di Desa Dahian Tambuk	2.054.574.500
aa.	Pembangunan Jaringan Pipa Distribusi Kurun Hilir dan Kurun Seberang	2.313.363.500
bb.	Jaringan Pipa dan SR PDAM di Kecamatan Tewah.	579.907.000
cc.	Jaringan Pipa dan SR PDAM di Desa Dahian Tambuk	381.345.000
dd.	Jaringan Pipa PDAM di IKK Kurun	391.368.000
ee.	Jaringan Pipa PDAM di IKK Tewah	883.000.000
ff.	Pembangunan Jaringan Air Minum Ibu Kota Kecamatan Tewah	5.457.781.000
gg.	Conductivity Meter (Alat Laboratorium Kimia Air Teknik Penyehatan) dari Dinas Pekerjaan Umum Tahun 2013	146.465.000
hh.	Alat Ukur Kadar Air (Alat Ukur Lainnya) dari Dinas Pekerjaan Umum Tahun 2014	326.302.981
ii.	Bangunan Gedung Kantor Permanen dari Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Tahun 2010	463.706.198
jj.	Bangunan Gedung Kerja Lainnya Permanen dari Dinas Pekerjaan Umum Tahun 2016	115.004.000
kk.	Instalasi Air Permukaan Kapasitas Sedang di Sepang Simin dari Dinas Pekerjaan Umum Tahun 2016	5.401.080.000
ll.	Instalasi Air Permukaan Kapasitas Sedang di IKK Mihing Raya dari Dinas Pekerjaan Umum Tahun 2011	3.516.458.000
mm.	Instalasi Air Permukaan Kapasitas Lainnya di Kuala Kurun dari Dinas Pekerjaan Umum Tahun 2010	4.373.041.130
nn.	Instalasi Air Permukaan Kapasitas Lainnya di IKK Tumbang Miri dari Dinas Pekerjaan Umum Tahun 2009	2.658.200.000

III. PENJELASAN POS NERACA DAN LAPORAN LABA RUGI (Lanjutan)

10. Penyertaan Pemerintah Kabupaten (Lanjutan)

oo.	Pembangunan Jaringan Cabang Distribusi Kapasitas Kecil di IKK Tumbang Miri dari Dinas Pekerjaan Umum Tahun 2011	902.450.000
pp.	Pembangunan Jaringan Cabang Distribusi Kapasitas Sedang di Sepang Simin dari Dinas Pekerjaan Umum Tahun 2016	2.734.645.000
qq.	Pembangunan Jaringan Cabang Distribusi Kapasitas Sedang di Kuala Kurun dari Dinas Pekerjaan Umum Tahun 2014	1.171.855.332
rr.	Pembangunan Jaringan Cabang Distribusi Kapasitas Sedang di IKK Tewah dari Dinas Pekerjaan Umum Tahun 2013	1.727.623.000
ss.	Pembangunan Jaringan Cabang Distribusi Kapasitas Sedang di Kuala Kurun dari Dinas Pekerjaan Umum Tahun 2013	1.773.460.000
tt.	Pembangunan Jaringan Cabang Distribusi Kapasitas Sedang di Kuala Kurun dari Dinas Pekerjaan Umum Tahun 2011	963.853.000
uu.	Pembangunan Jaringan Cabang Distribusi Kapasitas Sedang di IKK Talaken dari Dinas Pekerjaan Umum Tahun 2011	644.800.000
vv.	Pembangunan Jaringan Cabang Distribusi Kapasitas Sedang di Kuala Kurun dari Dinas Pekerjaan Umum Tahun 2006 dan Tahun 2010	2.387.211.000
ww.	Pembangunan Jaringan Cabang Distribusi Kapasitas Sedang di Kuala Kurun dari Dinas Pekerjaan Umum Tahun 2011	1.959.736.000
xx.	Pemasangan Pipa Distribusi dan SR di Desa Tumbang Tariak dari Dinas Pekerjaan Umum Tahun 2019	302.200.000
yy.	Pemasangan Jaringan SR di IKK Tewah Tahun 2017 dan Tahun 2018 dari Dinas Pekerjaan Umum	13.336.207.000
zz.	Pemasangan Jaringan SR lain-lain di Desa Kasintu Kecamatan Tewah Tahun 2020 dari Dinas Pekerjaan Umum	1.159.660.000
aaa.	Peningkatan Sarana dan Prasarana Air Minum (SPAM) di Desa Tumbang Tariak dari Dinas Pekerjaan Umum Tahun 2021	1.043.050.000
bbb.	Pemasangan Jaringan Air Minum lainnya Tahun 2004 dan Tahun 2012 dari Dinas Pekerjaan Umum	3.874.124.000
ccc.	Pengadaan Tanah untuk instalasi dan Kantor PDAM di IKK Tewah Tahun 2016 dari Sekretariat Daerah	327.116.000
ddd.	Pembangunan Bangunan PDAM di Kecamatan Sepang Tahun 2014 dari Sekretariat Daerah	35.000.000
eee.	Pengadaan Tanah untuk Boster Air PDAM Kurun di Kecamatan Kurun Tahun 2016 dari Sekretariat Daerah	341.782.000
fff.	Pembangunan Pengolahan Instalasi Air Minum dan Kantor PDAM Tumbang Jutuh Tahun 2018 di Kecamatan Rungan dengan rincian sebagai berikut:	
	Belanja Modal pengadaan tanah An. TARAWATI untuk lahan Pembangunan pengolahan instalasi Air minum dan Kantor PDAM Tumbang Jutuh	115.050.000
	belanja modal untuk pengadaan tanah untuk Pembangunan pengolahan instalasi air minum dan kantor PDAM Tumbang Jutuh	65.200.000
ggg.	Pembangunan instalasi air bersih/air baku lainnya di Kuala Kurun Tahun 2012	2.897.061.700
	Jumlah Penyertaan Fisik Pemkab. Gunung Mas	**77.516.172.264,00**

III. PENJELASAN POS NERACA DAN LAPORAN LABA RUGI (Lanjutan)

11. Modal Disetor

Modal disetor per 31 Desember 2023 dan 2022 merupakan penyertaan pemerintah dalam bentuk setoran tunai dan hibah dari PDAM Kabupaten Kapuas saat pemisahan, dengan rincian sebagai berikut:

	31 Desember 2023 (Rp)	31 Desember 2022 (Rp)
- Saldo awal periode	23.808.208.063	23.808.208.063
Saldo akhir perode	**23.808.208.063**	**23.808.208.063**

Dengan rincian penyertaan modal tunai sebagai berikut :

a	Tahun 2006 saat pemisahan dengan Kapuas	3.340.222.863
b	Tahun 2007	1.149.485.200
c	Tahun 2010	1.000.000.000
d	Tahun 2011	1.000.000.000
e	Tahun 2012	1.000.000.000
f	Tahun 2013	3.000.000.000
g	Tahun 2014	2.159.000.000
h	Tahun 2015	2.159.500.000
i	Tahun 2016	1.500.000.000
j	Tahun 2017	1.500.000.000
k.	Tahun 2018	1.500.000.000
l.	Tahun 2019	1.500.000.000
m.	Tahun 2020	1.500.000.000
n.	Tahun 2021	1.500.000.000
	Saldo Awal Penyertaan Tunai Pemkab. Gunung Mas	**23.808.208.063**
	Penambahan Penyertaan	**-**
	Jumlah Penyertaan Tunai Pemkab. Gunung Mas	**23.808.208.063**

12. Modal Hibah

Modal Hibah per 31 Desember 2022 dan 2021 merupakan aset yang diterima perusahaan selain dari Pemerintah Kabupaten Gunung Mas antara lain dari penyerahan aset oleh Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Provinsi.

		31 Desember 2023 (Rp)	31 Desember 2022 (Rp)
*	Penyerahan Aset Tetap Pemprov Kalimantan Tengah	3.767.786.900	3.767.786.900
*	Penyerahan Aset Tetap Pemerintah Pusat	4.467.172.000	4.467.172.000
	Saldo awal perode	**8.234.958.900**	**8.234.958.900**
-	Penambahan	-	-
-	(Pengurangan)	(4.467.172.000)	
	Saldo akhir perode	**3.767.786.900**	**8.234.958.900**

III. PENJELASAN POS NERACA DAN LAPORAN LABA RUGI (Lanjutan)

12. Modal Hibah (lanjutan)

Dengan perincian aset yang diserahkan adalah sebagai berikut :

*** REKLASIFIKASI DARI MODAL HIBAH**	
Pengadaan dan pembuatan IPA kap 10 L/dt lengkap (dr Dep PU/APBN, BA serah terima Nomor: /BASTP/PSPAM-IKK/XII/2009 tanggal 8/02/2009	3.767.786.900
Jumlah Total Modal Hibah	**3.767.786.900**

13. Penyertaan Pemerintah yang Belum Ditetapkan Statusnya

a. Penyertaan Pemerintah Pusat Yang Belum Ditetapkan Statusnya

Mutasi Penyertaan Pemerintah Pusat yang Belum Ditetapkan Statusnya per 31 Desember 2023 dan 2022 :

	31 Desember 2023 (Rp)	31 Desember 2022 (Rp)
- Saldo awal periode	42.387.526.000	42.387.526.000
- Penambahan : Penyerahan Pengelolaan Aset Tetap		-
- Kurang: Penetapan status	(40.859.526.000)	-
Saldo akhir periode	**1.528.000.000**	**42.387.526.000**

Dengan perincian aset yang diserahkan olah pemerintah pusat, adalah sebagai berikut :

c	Pengadaan dan pembuatan Reservoir Kap 100 M3 (dr SNVT Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum Kalteng/APBN, BA serah terima Nomor:01/BA /PKPAM/XI/2009 tgl.9/11/2009)	345.500.000
d	Pengadaan dan pembuatan Reservoir Kap 500 M3 (dr SNVT Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum Kalteng/APBN, BA Serah Terima Sementara Nomor: 01/BA/PKPAM/X/2010 tgl. 29/10/2010)	1.182.500.000
Jumlah Total Penyertaan Pemerintah Pusat Yang Belum Ditetapkan Statusnya		**1.528.000.000**

b. Penyertaan Pemerintah Provinsi Yang Belum Ditetapkan Statusnya

Mutasi Penyertaan Pemerintah Provinsi yang Belum Ditetapkan Statusnya tahun 2023 dan 2022 adalah sebagai berikut :

	31 Desember 2023 (Rp)	31 Desember 2022 (Rp)
- Saldo awal periode	1.234.927.000	1.234.927.000
- Tambah : Penyerahan aset tetap	-	-
* Penyerahan Pengelolaan Aset Tetap	-	
- Kurang: Penetapan status	-	-
Saldo akhir periode	**1.234.927.000**	**1.234.927.000**

III. PENJELASAN POS NERACA DAN LAPORAN LABA RUGI (Lanjutan)

13. Penyertaan Pemerintah yang Belum Ditetapkan Statusnya (lanjutan)

Dengan perincian aset yang diserahkan olah pemerintah Propinsi, adalah sebagai berikut :

a	Pengadaan&Pemasangan Jaringan Pipa Distribusi Kec. Mihing Raya No. Kontrak : 01.06-W16/CK/VI/169/2011	377.520.000
b	Pengadaan&Pemasangan Jaringan Pipa Distribusi Kuala Kurun No. Kontrak : 01.06-W16/CK/VI/172/2011	378.500.000
c	Pengadaan Pemasangan Pipa PVC dan Asseories Kuala Kurun	478.907.000
Jumlah Total Penyertaan Pemerintah Propinsi Yang Belum Ditetapkan Statusnya		**1.234.927.000**

c. Penyertaan Pemerintah Kabupaten Yang Belum Ditetapkan Statusnya

Tidak ada Penyertaan Pemerintah Daerah yang Belum Ditetapkan Statusnya pada tahun 2023 dan 2022.

14. Akumulasi Kerugian

Akumulasi Kerugian per 31 Desember 2023 dan 2022 merupakan jumlah kerugian yang diderita perusahaan sampai dengan tanggal tersebut dengan rincian sebagai berikut:

	31 Desember 2023 (Rp)	31 Desember 2022 (Rp)
- Saldo Laba Tahun Lalu	(73.088.439.539)	(67.278.164.250)
- Saldo Laba(Rugi) Tahun Berjalan	(4.241.759.219)	(5.810.275.289)
- Koreksi Saldo Laba (Rugi) Tahun Lalu	-	-
- Koreksi Saldo Laba (Rugi) Tahun Berjalan	-	-
Akumulasi kerugian akhir periode	**(77.330.198.758)**	**(73.088.439.539)**

15. Pendapatan

Pendapatan Penjualan Air

Pendapatan Penjualan Air merupakan pendapatan penjualan air dan semua unsur yang terkandung didalam tagihan rekening air, baik yang dihitung melalui meter air maupun alat pengukuran lainnya, termasuk pula pendapatan penjualan air melalui mobil tangki dalam periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2023 dan 2022 dengan rincian sebagai berikut :

	31 Desember 2023 (Rp)	31 Desember 2022 (Rp)
- Harga air	8.703.736.040	8.393.665.647
- Air Lainnya / Non Pelanggan	20.810.000	4.250.000
Jumlah pendapatan penjualan air	**8.724.546.040**	**8.397.915.647**

III. PENJELASAN POS NERACA DAN LAPORAN LABA RUGI (Lanjutan)

15. Pendapatan (lanjutan)

a. Harga air merupakan penjualan air yang berasal dari pemakaian air berdasarkan data meter air dikali tarif air yang dirinci per kelompok pelanggan sebagai berikut :

	31 Desember 2023 (Rp)	31 Desember 2022 (Rp)
- Sosial Khusus	3.089.650	5.498.150
- Sosial Umum	193.874.649	183.526.803
- Rumah Tangga A	1.344.293.060	1.300.535.575
- Rumah Tangga B	5.993.638.620	5.725.362.980
- Rumah Tangga C	328.663.465	326.204.985
- Inst. Pemerintah/TNI/POLRI	560.784.276	551.261.764
- Niaga Kecil	143.596.420	163.292.100
- Niaga Besar	135.795.900	137.983.290
Jumlah	**8.703.736.040**	**8.393.665.647**

b. Air Lainnya / Non Pelanggan merupakan penjualan air melalui meter induk yang dijual kepada pembeli non pelanggan menggunakan tandon air.

	31 Desember 2023 (Rp)	31 Desember 2022 (Rp)
- Air Lainnya / Non Pelanggan	20.810.000	4.250.000
Jumlah	**20.810.000**	**4.250.000**

Pendapatan Non Air

Pendapatan Non Air merupakan pendapatan yang diperoleh dari aktivitas operasional yang bukan merupakan pendapatan dari penjualan air dalam periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2023 dan 2022 dengan rincian sebagai berikut :

	31 Desember 2023 (Rp)	31 Desember 2022 (Rp)
- Pendapatan penyambungan baru	77.375.000	79.925.000
- Pendapatan Biaya Pemindahan SR	5.775.000	3.025.000
- Pendapatan Biaya Balik Nama	11.700.000	13.900.000
- Pendapatan penyamb. kembali	31.900.000	25.900.000
- Pendapatan administrasi	798.880.000	752.480.000
- Pendapatan Dana meter	3.856.500	143.000
- Pendapatan Denda Rek. Air	307.570.500	462.270.000
Jumlah pendapatan non air	**1.237.057.000**	**1.337.643.000**

III. PENJELASAN POS NERACA DAN LAPORAN LABA RUGI (Lanjutan)

15. Pendapatan (lanjutan)

Pendapatan Lain-lain

Pendapatan Lain-lain dalam periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2023 dan 2022 adalah pendapatan jasa giro dengan perincian sebagai berikut :

	31 Desember 2023 (Rp)	31 Desember 2022 (Rp)
- Pendapatan Jasa Giro	259.084	73.592
- Pendapatan Bantuan CSR Bank Kalteng	-	5.500.000
- Pendapatan Pemulihan Penyisihan Piutang	-	183.471.139
- Pendapatan Kemitraan Bank Kalteng	1.680.000	-
- Pendapatan Pemulihan Nilai Kas Kecil	1.253.000	-
Jumlah pendapatan non air	**3.192.084**	**189.044.731**
JUMLAH PENDAPATAN	**9.964.795.124**	**9.924.603.378**

16. Beban Air dan Pengelolaan

Beban air dan pengelolaan adalah biaya yang timbul dari pengambilan air bersih sampai dengan pengolahannya termasuk pemeliharaan peralatan dan kegiatan pendukung lainnya dalam memberikan pelayanan penyediaan air bersih. Beban tersebut pada tahun 2023 dan 2022, antara lain:

	31 Desember 2023 (Rp)	31 Desember 2022 (Rp)
- Biaya Operasi Sumber Air	2.188.497.007	2.395.777.613
- Biaya Pemeliharaan Sumber Air	-	73.073.000
- Biaya Air Baku	186.000	6.437.650
- Biaya Operasi Pengolahan Air	550.121.200	624.919.400
- Biaya Pemeliharaan Pengolahan Air	13.080.000	22.371.000
- Biaya Transmisi Dan Distribusi	-	36.115.000
- Biaya Pemeliharaan Transmisi & Distribusi.	579.159.932	456.423.910
- Biaya penyusutan dan amortisasi	3.839.758.802	5.272.377.878
Jumlah biaya air dan pengelolaan	**7.170.802.940**	**8.887.495.451**

III. PENJELASAN POS NERACA DAN LAPORAN LABA RUGI (Lanjutan)

16. Beban Air dan Pengelolaan (lanjutan)

Dari beban air dan pengelolaan yang masing-masing pada tahun 2023 dan 2022 berjumlah Rp.7.170.802.940 dan Rp.8.887.495.451, terdapat beberapa beban yang nilainya cukup signifikan. Uraian atas komponen masing-masing beban tersebut akan disajikan dibawah ini:

Biaya Operasi Sumber Air

Beban operasi sumber air pada tahun 2023 dan 2022, antara lain:

	31 Desember 2023 (Rp)	31 Desember 2022 (Rp)
- Pemakaian Bahan Bakar/ Pelumas	42.265.700	36.417.000
- Biaya Listrik PLN	2.123.754.307	2.344.910.613
- Pemakaian Bahan Pembantu	-	450.000
- Rupa - rupa biaya operasi sumber	22.477.000	14.000.000
Jumlah biaya operasi sumber air	**2.188.497.007**	**2.395.777.613**

Biaya Operasi Pengolahan Air

Beban operasi pengolahan air pada tahun 2023 dan 2022, antara lain:

	31 Desember 2023 (Rp)	31 Desember 2022 (Rp)
- Pemakaian Bahan Kimia	550.121.200	595.640.400
- Biaya Bahan Bakar	-	4.320.000
- Upah Angkut Bahan Kimia	-	24.959.000
Jumlah biaya operasi pengolahan air	**550.121.200**	**624.919.400**

Biaya Pemeliharaan Transmisi & Distribusi.

Beban pemeliharaan transmisi dan distribusi pada tahun 2023 dan 2022, antara lain:

	31 Desember 2023 (Rp)	31 Desember 2022 (Rp)
- Pemeliharaan Pipa Transmisi	8.225.000	2.265.000
- Pemeliharaan Pipa Dinas	489.486.132	413.749.510
- Pemeliharaan Instalasi Pompa	1.660.000	1.200.000
- Pemeliharaan Water Meter	71.400.000	35.679.400
- Pemeliharaan Trans dan Dist Lainnya	8.388.800	3.530.000
Jumlah pemeliharaan transmisi dan distribusi	**579.159.932**	**456.423.910**

III. PENJELASAN POS NERACA DAN LAPORAN LABA RUGI (Lanjutan)

17. Beban Administrasi dan Umum

Beban administrasi dan umum merupakan beban yang memiliki atribusi tidak langsung atas penyediaan air bersih. Pada tahun 2023 dan 2022 biaya-biaya tersebut, antara lain:

	31 Desember 2023 (Rp)	31 Desember 2022 (Rp)
- Biaya Pegawai	5.468.484.319	5.602.347.261
- Biaya Kantor	208.992.196	233.745.209
- Biaya Hubungan Pelanggan	113.527.000	115.321.500
- Biaya Penelitan & Pengembangan	14.280.079	5.160.000
- Biaya Keuangan	1.288.893	438.651
- Biaya Pengadaan Dan Pemeliharaan	38.382.000	44.923.001
- Biaya Penyisihan Pengh.Piutang	91.013.909	-
- Biaya Iuran / Berlangganan	24.120.000	18.429.150
- Biaya Badan Pengawas	200.652.201	194.820.000
- Biaya Perjalanan Dinas	80.320.000	101.865.965
- Biaya Jasa Profesional	40.000.000	90.280.000
- Biaya Sewa	31.428.500	13.500.000
- Biaya Pajak & Perijinan	28.183.513	9.771.734
- Rupa - Rupa Biaya Umum	120.000.000	189.360.000
- Penyusutan & Amortisasi	575.078.792	227.420.745
- Biaya Penghapusan Piutang Lain-lain	32.590.248	-
Jumlah beban administrasi dan umum	**7.068.341.650**	**6.847.383.215**

Dari beban administrasi dan umum yang masing-masing pada tahun 2023 dan 2022 berjumlah Rp.7.068.341.650 dan Rp.6.847.383.215, terdapat beberapa beban yang nilainya cukup signifikan. Uraian atas komponen masing-masing beban tersebut akan disajikan dibawah ini:

Biaya pegawai
Beban pegawai pada tahun 2023 dan 2022, antara lain:

	31 Desember 2023 (Rp)	31 Desember 2022 (Rp)
- Gaji Pegawai & Honor	3.411.973.112	3.394.814.969
- Tunjangan	439.928.589	575.650.018
- Biaya Iuran Dapenma	935.029.171	935.443.984
- Biaya Iuran BPJS Ketenagakerjaan	238.578.065	238.478.274
- Biaya Iuran BPJS Kesehatan	148.368.754	102.828.332
- Lembur	227.926.000	205.260.000
- Incentive / Kesejahteraan Karyawan	58.980.628	142.561.684
- Pembinaan Karyawan dan Pakaian Dinas	-	800.000
- Bantuan & Sumbangan (Khusus Karyawan)	500.000	5.000.000
- Biaya Pendidikan & Latihan	7.200.000	1.510.000
Jumlah biaya pegawai	**5.468.484.319**	**5.602.347.261**

III. PENJELASAN POS NERACA DAN LAPORAN LABA RUGI (Lanjutan)

17. Beban Administrasi dan Umum (lanjutan)

Biaya kantor

Beban kantor pada tahun 2023 dan 2022, antara lain:

		31 Desember 2023 (Rp)	31 Desember 2022 (Rp)
-	Biaya Alat Tulis Kantor dan Foto Copy	39.463.200	64.424.000
-	Perlengkapan Kumputer	8.571.000	9.744.000
-	Biaya Telepon, Telex, Telegram	34.208.096	30.994.048
-	Biaya Rapat dan Tamu	-	6.025.000
-	Biaya Pos dan Meterai	2.400.000	1.670.000
-	Biaya Listrik/Penerangan	19.838.000	19.565.000
-	Biaya Clening Service	4.800.000	8.225.000
-	Rupa - rupa biaya kantor	99.711.900	93.098.161
	Jumlah biaya kantor	**208.992.196**	**233.745.209**

Biaya hubungan pelanggan

Beban hubungan pelanggan pada tahun 2023 dan 2022, antara lain:

		31 Desember 2023 (Rp)	31 Desember 2022 (Rp)
-	Biaya Pembacaan Meter	60.201.000	55.866.000
-	Biaya Promosi	53.326.000	50.005.500
-	Rupa-rupa biaya urusan pelanggan	-	9.450.000
	Jumlah biaya hubungan pelanggan	**113.527.000**	**115.321.500**

Biaya perjalanan dinas

Beban perjalanan dinas pada tahun 2023 dan 2022, antara lain:

		31 Desember 2023 (Rp)	31 Desember 2022 (Rp)
-	Biaya Perjalanan Dinas Pengantaran Laporan	12.975.000	18.720.000
-	Biaya Perjalanan Dinas Monitoring & Evaluasi	9.400.000	2.300.000
-	Biaya Perjalanan Dinas Pendidikan & Pelatihan	13.398.000	3.207.000
-	Biaya Perjalanan Dinas Rapat & Koordinasi	44.547.000	77.638.965
	Jumlah biaya perjalanan dinas	**80.320.000**	**101.865.965**

III. PENJELASAN POS NERACA DAN LAPORAN LABA RUGI (Lanjutan)

17. Beban Administrasi dan Umum (lanjutan)

Biaya rupa-rupa umum

Beban rupa-rupa umum pada tahun 2023 dan 2022, antara lain:

	31 Desember 2023 (Rp)	31 Desember 2022 (Rp)
- Dana Respresentatif	120.000.000	180.000.000
- Bahan Bakar Bagian Umum	-	9.360.000
Jumlah biaya rupa-rupa umum	**120.000.000**	**189.360.000**

18. Tanggung Jawab Manajemen Dan Persetujuan Atas Laporan Keuangan

Manajemen bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan. Laporan keuangan per 31 Desember 2023 telah disetujui oleh Direksi untuk diterbitkan pada tanggal 12 Februari 2024.

NERACA

PER 31 DESEMBER 2023

			31/12/2023	31/12/2022
I.		ASET		
A.	3.0.00	ASET LANCAR	*(Belum Audit)*	*(Belum Audit)*
	3.1.00	Kas dan setara Kas	6,026,393	6,822,385
	3.2.00	Piutang Usaha	12,993,000	12,993,000
	3.3 00	Piutang Non Usaha*)	72,511,939	74,511,939
	3.5.00	Jaminan pembayaran dimuka	12,720,000	12,720,000
		Jumlah Aset Lancar	104,251,332	107,047,324
B.	3.6.00	ASET TETAP		
	3.6.01	Tanah.*)	7,500,000	7,500,000
	3.6.02	Gedung dan bangunan *)	172,699,000	172,699,000
	3.6.03	Peralatan dan Perlengkapan	125,853,900	88,098,900
	3.6.04	Kendaraan dan Mesin	591,249,890	591,249,890
	3.6.05	Inventaris Kantor	41,690,000	41,690,000
	3.6.06	Pangkalan BBM	480,156,187	480,156,187
	3.6.07	Pra Operasional *)	1,211,351,997	1,211,351,997
	3.6.07	Pra Ops.Sentra IKM Sepang	41,893,641	41,893,641
	3.6.08	Istalasi listrik Sentra IKM Sepang	70,858,650	70,858,650
		JUMLAH NILAI PEROLEHAN	2,743,253,265	2,705,498,265
	3.6.08	*Akumulasi penyusutan*	*(504,979,559)*	*(504,979,559)*
		JUMLAH NILAI BUKU ASET TETAP	2,238,273,706	2,200,518,706
C	3.7.00	ASET LAIN-LAIN		
	3.7.01	Aset lain-lain *)	1,059,012,450	1,059,012,450
	3.7.02	*Amortisasi Aset Lain-lain*	*(353,044,675)*	*(353,044,675)*
		JUMLAH ASET LAIN-LAIN	705,967,775	705,967,775
		JUMLAH ASET	3,048,492,813	3,013,533,805

			31/12/2023	12/31/2022
			(Belum Audit)	(Belum Audit)
II		KEWAJIBAN DAN EKUITAS		
A		KEWAJIBAN LANCAR		
	3.8.00	Hutang Gaji	62,588,000	62,588,000
	3.9.00	Hutang Pihak III	44,353,814	44,353,814
	3.10.00	Hutang Listrik	10,206,659	10,206,659
	3.11.00	Hutang barang	-	3,952,000
	3.12.00	Hutang Sewa Aset	55,000,000	65,000,000
	3.13.00	Hutang PHR	24,792,520	-
		JUMLAH KEWAJIBAN LANCAR	196,940,993	186,100,473
B.		KEWAJIBAN TIDAK LANCAR		
	3.14.00	Hutang Pembiayaan (Leasing)	513,558,000	513,558,000
	3.15.00	Hutang Usaha	5,000,000	5,000,000
		JUMLAH KEWAJIBAN TIDAK LANCAR	518,558,000	518,558,000
C.		EKUITAS		
	3.16.00	Kekayaan Pemkab yang dipisahkan	6,934,963,635	6,934,963,635
	3.17.00	laba (rugi) tahun lalu	(4,626,088,303)	(4,512,155,041)
	3.18.00	Laba (rugi) tahun berjalan	24,118,488	(113,933,262)
		JUMLAH EKUITAS	2,332,993,820	2,308,875,332
		JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS	3,048,492,813	3,013,533,805

Disusun oleh,

SURADIE H.ERANG,SE

Plt. Direktur

PENJELASAN POS NERACA

PER 31 DESEMBER 2023

I ASET

A. ASET LANCAR

		31/12/2023	31/12/2022
3.1.00	**Kas dan Setara Kas**	**6,026,393.00**	**6,822,385.00**
3.1.01	Kas ditangan Kantor Perusda	2,758,756.00	
3.1.03	Kas yang dibatasi penggunaannya *)	677,500.00	
3.1.04	Kas BPK No.1030103001104	881,065.00	
3.1.05	Kas BPK No.1030103001016 *)	1,709,072.00	
		6,026,393.00	

3.2.00 Piutang Usaha

No.Ak	Uralan		Saldo 31-Dec-23	Penambahan (pengurangan)	Saldo 31-Dec-22
3.2.01	31-Jan	Deni/Petrus	7,293,000.00		7,293,000.00
3.2.03	31-Jan	Mr.X (082149087165)	300,000.00		300,000
3.2.04	31-Jan	Mr.X (082198430029)	1,000,000.00		1,000,000
3.2.05	31-Jan	Mr.X (085389087423)	1,100,000.00		1,100,000.00
3.2.06	31-Jan	Mr.X (082158280963)	3,000,000.00		3,000,000.00
3.2.07	31-Jan	Mr.X (082187626526)	300,000.00		300,000.00
			12,993,000	-	**12,993,000**

3.3.00 Piutang Non Usaha.

No	Tgl	Uralan	Saldo 31-Dec-23	Penambahan (pengurangan)	Saldo 31-Dec-22
3.3.01	Tahun 2016	Salundik Hinting *)	16,600,000.00	-	16,600,000.00
3.3.02	Tahun 2016	Edi Marlin *)	300,000.00	-	300,000.00
3.3.03	Tahun 2016	Supir Joni *)	250,000.00	-	250,000.00
3.3.04	Tahun 2016	Supir Sutarjo *)	6,260,000.00	-	6,260,000.00
3.3.05	Tahun 2016	Supir Bmbang *)	3,930,000.00	-	3,930,000.00
3.3.06	Tahun 2016	Supir Upin *)	1,350,000.00	-	1,350,000.00
3.3.07	Tahun 2016	Supir Dede *)	200,000.00	-	200,000.00
3.3.08	Tahun 2016	Supir Dede *)	500,000.00	-	500,000.00
3.3.09	Tahun 2016	Pengurus Hotel GMP *)	2,000,000.00	-	2,000,000.00
3.3.10	Tahun 2016	Salundik Hinting *)	1,470,604.00	-	1,470,604.00
3.3.11	Tahun 2016	Albert Mahin (Harjo) *)	64,545,600.00	-	64,545,600.00
3.3.12	Tahun 2016	Abul Hasan *)	15,970,887.00	-	15,970,887.00
3.3.13	Tahun 2016	Budi Supri Zonder *)	45,150,000.00	-	45,150,000.00
3.3.14	Tahun 2016	Bu Tetek *)	2,500,000.00	-	2,500,000.00
3.3.15	Tahun 2016	Johar Zen Gafar *)	134,268,400.00	-	134,268,400.00
3.3.16	Tahun 2016	Dian *)	20,000,000.00	-	20,000,000.00
3.3.17	Tahun 2016	Budi *)	10,000,000.00	-	10,000,000.00
3.3.18	Tahun 2020	Sentra IKM (by.mendatangkan)	2,466,339.00	-	2,466,339.00
3.3.19	4-Apr	Andang Taruna (Mantan Karyawan)	5,500,000.00	(2,000,000.00)	7,500,000.00
		JUMLAH	**333,261,830.00**	-	**335,261,830.00**
		Penyisihan piutang	*(260,749,891.00)*	-	*(260,749,891.00)*
		JUMLAH	**72,511,939.00**	**(2,000,000)**	**74,511,939.00**

No.Ak.	Uraian	Saldo 31-Dec-23	Penambahan (pengurangan)	Saldo 30-Nov-23
3.5.00	Jaminan pembayaran dimuka...	12,720,000	-	12,720,000
		12,720,000		**12,720,000**

Keterangan :

Jumlah tersebut adalah jaminan pembayaran dimuka pemakaian listrik PLN, pada Sentra IKM di Sepang.

3.6.00 ASET TETAP

Akun ini terdiri atas :

No.Ak.	Perolehan	Saldo 31-Dec-23	Penambahan (pengurangan)	Saldo 31-Dec-22
3.6.01	Tanah *)	7,500,000.00	-	7,500,000.00
3.6.02	Gedung dan bangunan *)	172,699,000.00	-	172,699,000.00
3.6.03	Peralatan dan Perlengkapan	131,781,900.00	43,683,000.00	88,098,900.00
3.6.04	Kendaraan/Mesin	585,321,890.00	-	585,321,890.00
3.6.05	Perabot/kantor	41,690,000.00	-	41,690,000.00
3.6.06	Pra Operasional *)	1,211,351,997.00	-	1,211,351,997.00
3.6.07	Pra Operasional IKM Sepang	41,893,641.00	-	41,893,641.00
3.6.08	Pra Operasional Pangkalan BBM	480,156,187.00	-	480,156,187.00
3.6.09	Rehabilitasi instalasi Listrik/lain-lain Sentra IKM	70,858,650.00	-	70,858,650.00
	Jumlah	**2,743,253,265**	**43,683,000**	**2,699,570,265**
	***Akumulasi penyusutan** *)*	***(504,979,559)***	-	***(504,979,559)***
	Jumlah	**2,238,273,706**	**43,683,000**	**2,194,590,706**

3.7.00 ASET LAIN-LAIN

Akun ini terdiri atas :

No.Ak.	Perolehan	Saldo 31-Dec-23	Penambahan (pengurangan)	Saldo 31-Dec-22
3.7.01	Aset lain-lain *)	1,059,012,450	-	1,059,012,450
	*Akumulasi penyusutan *)*	*(353,044,675)*	-	*(353,044,675)*
	Jumlah	**705,967,775**	-	**705,967,775**

II KEWAJIBAN DAN EKUITAS

KEWAJIBAN JANGKA PENDEK

3.8.00 Hutang gaji

	Tgl	Uraian	Saldo 31-Dec-23	Penambahan (pengurangan)	Saldo 31-Dec-22
3.8.01	31-Jan	Guanhin (Ketua BP)	6,000,000.00		6,000,000.00
3.8.02	31-Jan	Herbert Y.Asin (Sek.BP)	5,250,000.00		5,250,000.00
3.8.03	31-Jan	Erlambang (Anggota BP)	13,500,000.00		13,500,000.00
3.8.04	31-Jan	Ali Imbron (Dirut)	37,838,000.00		37,838,000.00
			62,588,000		**62,588,000**

		Saldo 31-Dec-23	Penambahan (pengurangan)	Saldo 31-Dec-22
3.9.00	**Hutang Pihak III**			
3.9.01	Ali Imbron	19,853,814.00		19,853,814.00
3.9.02	Dandi	4,500,000.00		4,500,000.00
3.9.02	Herbert Asin	20,000,000.00		20,000,000.00
		44,353,814.00	-	**44,353,814.00**

		Saldo 31-Dec-23	Penambahan (pengurangan)	Saldo 31-Dec-22
3.10.00	**Hutang Listrik**			
3.10.00	Listrik IKM Sepang	**10,206,659**	-	**10,206,659**

		Saldo 31-Dec-23	Penambahan (pengurangan)	Saldo 31-Dec-22
3.11.00	**Hutang Barang**			
3.11.00	Hutang barang	-	**(3,952,000)**	**3,952,000**

		Saldo 31-Dec-23	Penambahan (pengurangan)	Saldo 31-Dec-22
3.12.00	**Hutang Sewa Aset**			
3.12.00	**Hutang Sewa Aset** *(Hotel Gumas)*	55,000,000	(10,000,000)	65,000,000
		55,000,000	(10,000,000)	**65,000,000**

		Saldo 31-Dec-23	Penambahan (pengurangan)	Saldo 31-Dec-22
III	**KEWAJIBAN TIDAK LANCAR**			
3.11.00	**Hutang Pembiyaan (Leasing)*)**	513,558,000	-	513,558,000
		513,558,000	-	**513,558,000**

		Saldo 31-Dec-23	Penambahan (pengurangan)	Saldo 31-Dec-22
3.12.00	**Hutang Usaha*)**			
		5,000,000	-	5,000,000
		5,000,000	-	**5,000,000**

EKUITAS

	Saldo 31-Dec-23	Penambahan (pengurangan)	Saldo 31-Dec-22
3.16.00 Kekayaan PEMKAB yang dipisahkan			
3.16.00 Penyertaan I 16 November 2009 *)	1,000,000,000		1,000,000,000
3.16.00 Penyertaan II 15 Desember 2010 *)	125,000,000		125,000,000
3.16.00 Penyertaan III 28 Desember 2011 *)	232,400,000		232,400,000
3.16.00 Penyertaan IV 29 Desember 2011 *)	44,363,635		44,363,635
3.16.00 Penyertaan V 15 Desember 2014 *)	2,700,000,000		2,700,000,000
3.16.00 Penyertaan VI Perda No.08 th 2019			
3.16.00 tanggal 19 November 2019	2,232,000,000		2,232,000,000
Pengembalian Modal	(583,361,933)		(583,361,933)
3.16.00 Penyertaan VII Perda No.3 th 2020			
tanggal 1 September 2020	1,184,561,933		1,184,561,933
	6,934,963,635		**6,934,963,635**

	Saldo 31-Dec-23	Penambahan (pengurangan)	Saldo 31-Dec-22
3.17.00 **Laba (rugi) tahun berjalan**	**(4,601,969,815)**	**24,118,488**	**(4,626,088,303)**

Keterangan :

**) Pengurus manajemen lama (berakhir tahun 2016)*

PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM (PDAM)
KABUPATEN GUNUNG MAS
N E R A C A
Per 31 Desember 2023
(Disajikan Dalam Rupiah)

	Catatan	2023	2022
ASET			
Aset Lancar			
Kas dan setara kas	II,b, III,1	176.948.921	123.209.884
Piutang air - bersih	II,c,III,2	2.720.438.956	2.495.294.462
Piutang lain-lain	III,4	137.288.050	158.673.798
Persediaan	II,d,III,5	284.683.300	226.249.900
Uang muka		-	
Jumlah Aset Lancar		**3.319.359.226**	**3.003.428.044**
Aset Tidak Lancar			
Aset tetap - bersih	II,e,III,6	27.905.436.251	22.817.132.110
(Setelah dikurangi akumulasi penyusutan sebesar Rp.68.155.340.833,00 Tahun 2023 dan Rp.63.774.687.134,00 tahun 2022)			
Aset tidak berwujud	II,f,III,7	24.185.791	58.369.685
Jumlah Aset Tidak Lancar		**27.929.622.042**	**22.875.501.795**
JUMLAH ASET		**31.248.981.269**	**25.878.929.839**
KEWAJIBAN dan EKUITAS			
KEWAJIBAN			
Kewajiban Jangka Pendek			
Utang usaha	III,8	681.600.000	272.750.000
Utang lain-lain	III,9	75.076.047	275.168.492
Biaya yang masih harus dibayar		-	
Utang pajak		-	
Jumlah Kewajiban Jangka Pendek		**756.676.047**	**547.918.492**
EKUITAS			
Penyertaan modal Pemda	II,j,III,10,11	101.324.380.327	46.562.038.986
Penyertaan modal Pemprov yang belum - ditetapkan statusnya	III,13	1.234.927.000	1.234.927.000
Penyertaan modal PP yang belum - ditetapkan statusnya	III,13	1.528.000.000	42.387.526.000
Hibah	II,I,III,12	3.767.786.900	8.234.958.900
Saldo Laba (Rugi) Ditahan	III,14	(73.088.439.539)	(67.278.164.250)
Saldo Laba (Rugi) Tahun Berjalan	III,14	(4.274.349.466)	(5.810.275.289)
JUMLAH EKUITAS		**30.492.305.222**	**25.331.011.347**
JUMLAH KEWAJIBAN dan EKUITAS		**31.248.981.269**	**25.878.929.839**

Lihat Catatan atas Laporan Keuangan
merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan